



# **PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

## **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018 - 2023**



BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR : 10 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
dan  
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018-2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah (Bupati) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Indragiri Hilir.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Indragiri Hilir adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

18. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
19. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang;
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
22. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
23. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
24. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
25. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;
26. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
27. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

BAB II  
RUANG LINGKUP RPJMD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2018-2023

Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
  - a. visi dan misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan
  - b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) RPJMD berpedoman pada RPJMD dan RPJMN serta memperhatikan :
  - a. RPJMD Provinsi Riau;
  - b. RTRW; dan
  - c. RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.

BAB III  
SISTEMATIKA RPJMD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2018-2023

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 meliputi :
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV : Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah;
  - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
  - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah;
  - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah;
  - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - i. BAB IX : Penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
  - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
  - b. pelaksanaan RPJMD; dan
  - c. hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.; dan/atau
  - d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

- (2) Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Bupati wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018- 2023 sebelum RPJMD periode berikutnya tersusun.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Bupati terpilih berikutnya.
- (4) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
- (5) Pada saat RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD serta mengacu pada RPJMD Provinsi Riau dan RPJMN.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 22 MEI 2019  
BUPATI INDRAGIRI HILIR,



H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan  
pada tanggal 22 MEI 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



H. SAID SYARIFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2019 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU  
(11.35.A/2019).



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RTRW Daerah serta memperhatikan RPJMD Provinsi Riau, dan RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018- 2023, memuat Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Gambaran Keuangan Daerah; Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Penutup.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip: keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, dan keterukuran. Disamping itu secara terpadu juga menerapkan pendekatan-pendekatan: partisipatif (bottom up), top down, teknokratis, politis, dan inovatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir pada setiap tahun anggaran. Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, RKPD Tahun 2019 tetap berlaku. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dokumen RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai Dokumen RPJMD Transisi untuk pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 sebelum RPJMD Tahun 2023-2026 disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	I - 1
1.1. Latar Belakang .....	I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I - 5
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I - 7
1.4. Maksud dan Tujuan .....	I - 8
1.5. Sistematika Penulisan .....	I - 9
BAB II ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.....	II - 1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi .....	II - 1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....	II - 1
2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi .....	II - 1
2.1.1.2. Kondisi Topografi .....	II - 3
2.1.1.3. Kondisi Geologi .....	II - 4
2.1.1.4. Kondisi Hidrologi .....	II - 7
2.1.1.5. Jenis Tanah .....	II - 7
2.1.1.6. Daya Dukung Lahan .....	II - 10
2.1.1.7. Klimatologi .....	II - 12
2.1.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah .....	II - 13
2.1.2. Wilayah Rawan Bencana .....	II - 15
2.1.3. Kondisi Demografi .....	II - 17
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II - 20
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ....	II - 20
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB .....	II - 20
2.2.1.2. Inflasi .....	II - 27
2.2.1.3. PDRB Per kapita .....	II - 28
2.2.1.4. Kemiskinan .....	II - 30
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II - 34
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia .....	II - 34
2.2.2.2. Harapan lama Sekolah .....	II - 36

2.2.2.3.	Rata-Rata Lama Sekolah .....	II - 38
2.2.2.4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) .....	II - 40
2.2.2.5.	Angka Harapan Hidup .....	II - 44
2.2.2.6.	Prevalensi Balita Gizi Buruk .....	II - 46
2.2.2.7.	Tingkat Pengangguran Terbuka .....	II - 48
2.2.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga .....	II - 50
2.2.3.1.	Seni Budaya .....	II - 50
2.2.3.2.	Olahraga .....	II - 52
2.3.	Aspek Pelayanan Umum .....	II - 54
2.3.1.	Layanan Urusan Wajib Dasar .....	II - 54
2.3.1.1.	Pendidikan .....	II - 54
2.3.1.2.	Kesehatan .....	II - 72
2.3.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..	II - 86
2.3.1.4.	Perumahan Rakyat dan Pemukiman .....	II - 95
2.3.1.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	II - 99
2.3.1.6.	Sosial .....	II - 104
2.3.2.	Layanan Urusan Wajib Non Dasar .....	II - 107
2.3.2.1.	Tenaga Kerja .....	II - 108
2.3.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	II - 112
2.3.2.3.	Pangan .....	II - 117
2.3.2.4.	Pertanahan .....	II - 121
2.3.2.5.	Lingkungan Hidup .....	II - 122
2.3.2.6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	II - 124
2.3.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	II - 129
2.3.2.8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	II - 134
2.3.2.9.	Perhubungan .....	II - 138
2.3.2.10.	Komunikasi dan Informatika .....	II - 142
2.3.2.11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ....	II - 145
2.3.2.12.	Penanaman Modal .....	II - 148
2.3.2.13.	Kepemudaan dan Olahraga .....	II - 150
2.3.2.14.	Statistik .....	II - 151
2.3.2.15.	Persandian .....	II - 153
2.3.2.16.	Kebudayaan .....	II - 154
2.3.2.17.	Perpustakaan .....	II - 155
2.3.2.18.	Kearsipan .....	II - 158
2.3.3.	Layanan Urusan Pilihan .....	II - 160
2.3.3.1.	Pariwisata .....	II - 160
2.3.3.2.	Pertanian .....	II - 162
2.3.3.3.	Perdagangan .....	II - 171

2.3.3.4.	Perindustrian .....	II - 174
2.3.3.5.	Transmigrasi .....	II - 177
2.3.3.6.	Kelautan dan Perikanan .....	II - 177
2.3.4.	Urusan Penunjang .....	II - 180
2.3.4.1.	Perencanaan Pembangunan .....	II - 180
2.3.4.2.	Keuangan .....	II - 184
2.3.4.3.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan .....	II - 186
2.3.4.4.	Penelitian dan Pengembangan .....	II - 189
2.3.4.5.	Pengawasan .....	II - 190
2.3.4.6.	Sekretariat Dewan .....	II - 192
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah .....	II - 193
2.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II - 193
2.4.1.1.	Pengeluaran Per Kapita .....	II - 193
2.4.1.2.	Nilai Tukar Petani .....	II - 195
2.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	II - 196
2.4.3.	Iklim Investasi .....	II - 197
2.4.3.1.	Jumlah Tindakan Pidana .....	II - 197
2.4.3.2.	Peraturan Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi .....	II - 198
2.4.4.	Fokus Sumberdaya Manusia .....	II - 200
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH .....	III - 1
3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	III - 2
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD .....	III - 3
3.1.2.	Neraca Daerah .....	III - 21
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .....	III - 28
3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran .....	III - 28
3.2.2.	Analisis Pembiayaan Daerah .....	III - 36
3.3.	Kerangka Pendanaan .....	III - 40
3.3.1.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah .....	III - 41
3.3.2.	Perhitungan Kerangka Pendanaan .....	III - 43
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH .....	IV - 1
4.1.	Permasalahan Pembangunan Daerah .....	IV - 1
4.1.1.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	IV - 2
4.1.1.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	IV - 2
4.1.1.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial .....	IV - 2
4.1.1.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga .....	IV - 4
4.2.	Aspek Pelayanan Umum .....	IV - 4

4.2.1.	Layanan Urusan Wajib Dasar .....	IV - 4
4.2.1.1.	Pendidikan .....	IV - 4
4.2.1.2.	Kesehatan .....	IV - 5
4.2.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..	IV - 6
4.2.1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	IV - 6
4.2.1.5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	IV - 7
4.2.1.6.	Sosial .....	IV - 7
4.2.2.	Layanan Urusan Wajib Non Dasar .....	IV - 8
4.2.2.1.	Tenaga Kerja .....	IV - 8
4.2.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	IV - 8
4.2.2.3.	Pangan .....	IV - 8
4.2.2.4.	Pertanahan .....	IV - 9
4.2.2.5.	Lingkungan Hidup .....	IV - 9
4.2.2.6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	IV - 9
4.2.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	IV - 10
4.2.2.8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	IV - 10
4.2.2.9.	Perhubungan .....	IV - 10
4.2.2.10.	Komunikasi dan Informatika .....	IV - 11
4.2.2.11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ....	IV - 11
4.2.2.12.	Penanaman Modal .....	IV - 12
4.2.2.13.	Kepemudaan dan Olahraga .....	IV - 12
4.2.2.14.	Statistik .....	IV - 12
4.2.2.15.	Persandian .....	IV - 13
4.2.2.16.	Kebudayaan .....	IV - 13
4.2.2.17.	Perpustakaan .....	IV - 13
4.2.2.18.	Kearsipan .....	IV - 13
4.2.3.	Urusan Pemerintahan Pilihan .....	IV - 13
4.2.3.1.	Pariwisata .....	IV - 13
4.2.3.2.	Pertanian .....	IV - 14
4.2.3.3.	Perdagangan .....	IV - 14
4.2.3.4.	Perindustrian .....	IV - 14
4.2.3.5.	Transmigrasi .....	IV - 15
4.2.3.6.	Kelautan dan Perikanan .....	IV - 15
4.2.4.	Penunjang Urusan .....	IV - 15
4.2.4.1.	Perencanaan Pembangunan .....	IV - 15
4.2.4.2.	Keuangan .....	IV - 16

4.2.4.3.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan .....	IV - 16
4.2.4.4.	Penelitian dan Pengembangan .....	IV - 16
4.2.4.5.	Pengawasan .....	IV - 16
4.2.4.6.	Sekretariat Dewan .....	IV - 17
4.3.	Isu-Isu Stretegis .....	IV - 17
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....	V - 1
5.1.	Visi .....	V - 1
5.2.	Misi .....	V - 3
5.3.	Tujuan Dan Sasaran .....	V - 4
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .....	VI - 1
6.1.	Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	VI - 1
6.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir .....	VI - 6
6.2.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2019) .	VI - 7
6.2.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2020) ....	VI - 12
6.2.3.	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2021) ....	VI - 17
6.2.4.	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2022) .	VI - 22
6.2.5.	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2023) ....	VI - 27
6.3.	Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah .....	VI - 31
6.4.	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir .....	VI - 41
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH .....	VII - 1
BAB VIII	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH .....	VIII - 1
BAB IX	PENUTUP .....	IX - 1
9.1	Program Transisi .....	IX - 1
9.2	Kaidah Pelaksanaan .....	IX - 2

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 2.1. Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir .....	II - 3
Tabel 2.2. Luas Satuan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir .....	II - 12
Tabel 2.3. Rata-Rata Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2017 .....	II - 14
Tabel 2.4. Banyaknya Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2017 .....	II - 17
Tabel 2.5. Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Sensus Tahun 1990, 2000 dan 2010 di Kabupaten Indragiri Hilir .....	II - 18
Tabel 2.6. Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2017 .....	II - 19
Tabel 2.7. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 .....	II - 21
Tabel 2.8. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2017 .....	II - 24
Tabel 2.9. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2017 .....	II - 25
Tabel 2.10. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang Pendidikan Dasar .....	II - 74
Tabel 2.11. Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2017 .....	II - 76
Tabel 2.12. Permasalahan/Hambatan Dalam Penerapan Serta Solusi dalam Pencapai SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir.....	II - 81
Tabel 2.13. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan Menurut Permenkes 741/Menkes/Per/VII/2008 .....	II - 98



Tabel 2.14. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan Berdasarkan Permenkes No : 43/MENKES/PER/VII/20018.....	II - 99
Tabel 2.15. Pencapaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2015 - 2017 .....	II - 101
Tabel 2.16. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM Bidang PU-PR .....	II - 111
Tabel 2.17. Pencapaian Indikator SPM Bidang PU-PR Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2017 .....	II - 113
Tabel 2.18. Permasalahan/Hambatan Dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang PU-PR di Kabupaten Indragiri Hilir .....	II - 114
Tabel 2.19. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat .....	II - 121
Tabel 2.20. Pencapaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2017 .....	II - 121
Tabel 2.21. Permasalahan Dalam Pencapaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir .....	II - 122
Tabel 2.22. Jenis Layanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri .....	II - 128
Tabel 2.23. Pencapaian Indikator SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2017 .....	II - 129
Tabel 2.24. Permasalahan/Hambatan Dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Indragiri Hilir .....	II - 130
Tabel 2.25. Jenis Pelayanan dan Indikator Bidang Sosial .....	II - 134
Tabel 2.26. Pencapaian Indikator SPM Bidang Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2017 .....	II - 135

Tabel 2.27.	Permasalahan/Hambatan Dalam Penerapan dan Pencapaian SPM di Kabupaten Indragiri Hilir .....	II - 135
Tabel 2.28.	Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Kelapa Dalam Menurut Kecamatan Tahun 2017 .....	II - 198
Tabel 2.29.	Perkembangan Realisasi, target dan capaian kinerja indikator Opini BPK Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 217
Tabel 2.30.	Perkembangan Realisasi, target dan capaian kinerja indikator Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 221
Tabel 2.31.	Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Yang Mendukung Iklim Usaha .....	II - 231
Tabel 2.32.	Capaian Pelaksanaan Program DMIJ Bidang Infrastruktur Tahun 2015-2018 .....	II - 233
Tabel 2.33.	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 236
Tabel 2.34.	Rekap Pencapaian SPM Indikator Bidang Pendidikan Dasar, Kesehatan, PU-PR, Perumahan Rakyat, Pemerintahan Dalam Negeri dan Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2018 .....	II - 246
Tabel 3.1.	Realiasi Pendapatan 2013-2015, Perkiraan Tahun Berjalan 2016 dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir .....	III - 1
Tabel 3.2.	Proporsi Sumber Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017 .....	III - 5
Tabel 3.3.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017 .....	III - 6
Tabel 3.4.	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017 .....	III - 7
Tabel 3.5.	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017 .....	III - 8
Tabel 3.6.	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017 .....	III - 9

Tabel 3.7.	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017 .....	III - 10
Tabel 3.8.	Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017 .....	III - 11
Tabel 3.9.	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017 .....	III - 12
Tabel 3.10.	Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017 .....	III - 13
Tabel 3.11.	Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017 .....	III - 13
Tabel 3.12.	Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017 .....	III - 14
Tabel 3.13.	Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017 .....	III - 15
Tabel 3.14.	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017 .....	III - 15
Tabel 3.15.	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tahun 2013 - 2017 .....	III - 17
Tabel 3.16.	Realisasi Pembiayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2017 .....	III - 20
Tabel 3.17.	Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun Anggaran 2013-2017 Kabupaten Indragiri Hilir .....	III - 22
Tabel 3.18.	Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017 .....	III - 25
Tabel 3.19.	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2017 .....	III - 28
Tabel 3.20.	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2017 .....	III - 30
Tabel 3.21.	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2017 .....	III - 31
Tabel 3.22.	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2017 .....	III - 33
Tabel 3.23.	Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017 .....	III - 35
Tabel 3.24.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2017 .....	III - 36

Tabel 3.25.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2017 .....	III - 37
Tabel 3.26.	Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2017 .....	III - 38
Tabel 3.27.	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 ....	III - 40
Tabel 3.28.	Realisasi dan Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018-2023 .....	III - 42
Tabel 3.29.	Realisasi dan Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 .....	III - 43
Tabel 3.30.	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 ....	III - 47
Tabel 3.31.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019-2023 .....	III - 49
Tabel 3.32.	Proporsi Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019-2023 .....	III - 50
Tabel 5.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Indragiri Hilir .....	V - 5
Tabel 5.2.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Target Capaian Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 .....	V - 9
Tabel 6.1.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir .....	VI - 2
Tabel 6.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 .....	VI - 13
Tabel 6.3.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 .....	VI - 20
Tabel 6.4.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 .....	VI - 53

Tabel 6.5.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 .....	VI - 85
Tabel 6.6.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 .....	VI - 117
Tabel 6.7.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 .....	VI - 152
Tabel 6.8.	Objek/Kegiatan, Wilayah, dan Jenis Wisata yang Akan Dikembangkan di Kabupaten Indragiri Hilir .....	VI - 184
Tabel 6.9.	Integrasi Program Rencana Awal RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan .....	VI - 199
Tabel 6.10.	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Indragiri Hilir .....	VI - 206
Tabel 7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 .....	VII - 2
Tabel 7.2.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Indragiri Hilir .....	VII - 4
Tabel 8.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Indragiri Hilir 2019 - 2023 .....	VIII - 1
Tabel 8.2.	Indikator Kinerja Daerah dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 - 2023 .....	VIII - 4
Tabel 8.3.	Indikator Kinerja SPM Bidang Pendidikan Dasar, Kesehatan, PU-PR, Perumahan Rakyat, Pemerintahan Dalam Negeri dan Sosial Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 .....	VIII - 11

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan .....	I - 8
Gambar 2.1. Peta Kabupaten Indragiri Hilir .....	II - 2
Gambar 2.2. Distribusi Lahan Basah dan Lahan Kering Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau .....	II - 15
Gambar 2.3. Perkembangan Nilai Pertumbuhan PDRB Harga Konstan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2017 .....	II - 22
Gambar 2.4. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan dan Provinsi Riau Tahun 2016 - 2017 .....	II - 23
Gambar 2.5. Kinerja Indikator Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 26
Gambar 2.6. Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 27
Gambar 2.7. Perkembangan Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir, Pekanbaru, Dumai dan Riau Tahun 2014 - 2017 .....	II - 28
Gambar 2.8. Kinerja Indikator Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2017 .....	II - 29
Gambar 2.9. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2013 - 2017 .....	II - 30
Gambar 2.10. Kinerja Indikator PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 31
Gambar 2.11. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2013 - 2017 .....	II - 32
Gambar 2.12. Kinerja Indikator Jumlah penduduk Miskin Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 32
Gambar 2.13. Perkembangan Persentase Kemiskinan di kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2013 - 2017 ...	II - 34

Gambar 2.14. Kinerja Indikator Tingkat Kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 35
Gambar 2.15. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2013 - 2017 ...	II - 36
Gambar 2.16. Kinerja Indikator IPM Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 37
Gambar 2.17. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2013 - 2017 ...	II - 38
Gambar 2.18. Kinerja Indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 39
Gambar 2.19. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2012 - 2017 ...	II - 40
Gambar 2.20. Kinerja Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 41
Gambar 2.21. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2013 - 2017 ...	II - 42
Gambar 2.22. Kinerja Indikator APK SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 43
Gambar 2.23. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2013 - 2017 ...	II - 44
Gambar 2.24. Kinerja Indikator APK SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 45
Gambar 2.25. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2013 - 2017 ...	II - 46
Gambar 2.26. Kinerja Indikator Angka Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 47
Gambar 2.27. Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk di kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2013 - 2017 .....	II - 48
Gambar 2.28. Kinerja Indikator Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 49

Gambar 2.29. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten Indragiri Hilir dan kabupaten Sekitarnya dan Provinsi Riau Tahun 2013 - 2017 ....	II - 50
Gambar 2.30. Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 51
Gambar 2.31. Perkembangan Cakupan Fasilitas Seni Budaya di kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2016 .....	II - 52
Gambar 2.32. Perkembangan Group Kesenian di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2017 .....	II - 52
Gambar 2.33. Kinerja Indikator Cakupan Fasilitas Seni Budaya Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 53
Gambar 2.34. Perkembangan Jumlah Lapangan Olahraga di kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 - 2017 .....	II - 54
Gambar 2.35. Kinerja Indikator Jumlah Lapangan Olahraga di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 55
Gambar 2.36. Perkembangan APM SD/MTs dan APM SMP/MTs di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2017 .....	II - 57
Gambar 2.37. Kinerja Indikator APM SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 58
Gambar 2.38. Kinerja Indikator APM SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 59
Gambar 2.39. Perkembangan APS 7 - 12 Tahun dan APS 13 - 15 Tahun Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2017 .....	II - 60
Gambar 2.40. Kinerja Indikator APS 7 - 12 Tahun Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 61
Gambar 2.41. Kinerja Indikator APS 13 - 15 Tahun Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 62
Gambar 2.42. Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2017 .....	II - 63
Gambar 2.43. Kinerja Indikator Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 64
Gambar 2.44. Kinerja Indikator Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 65
Gambar 2.45. Perkembangan Rasio Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 - 2017 .....	II - 66



Gambar 2.46. Kinerja Indikator Rasio Sekolah Terhadap Penduduk Usia 7 - 12 tahun Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 67
Gambar 2.47. Kinerja Indikator Rasio Sekolah Terhadap Penduduk Usia 13 - 15 tahun Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 68
Gambar 2.48. Perkembangan Rasio Guru Terhadap Murid Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2017 .....	II - 69
Gambar 2.49. Kinerja Indikator Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 70
Gambar 2.50. Kinerja Indikator Rasio Guru Terhadap Murid SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 71
Gambar 2.51. Perkembangan Guru Berkualifikasi S1/D.IV Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2017 .....	II - 72
Gambar 2.52. Kinerja Indikator Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 73
Gambar 2.53. Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2013 - 2017 .....	II - 84
Gambar 2.54. Kinerja Indikator Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 85
Gambar 2.55. Perkembangan Rasio Puskesmas Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2013 - 2017 .....	II - 86
Gambar 2.56. Kinerja Indikator Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 87
Gambar 2.57. Perkembangan Rasio Dokter Spesialis Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 - 2017 .....	II - 88
Gambar 2.58. Kinerja Indikator Rasio Dokter Spesialis Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 89

Gambar 2.59. Perkembangan Rasio Dokter Umum Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2012 - 2017 .....	II - 90
Gambar 2.60. Kinerja Indikator Rasio Dokter Umum Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 91
Gambar 2.61. Perkembangan Rasio Dokter Gigi Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2012 - 2017 .....	II - 92
Gambar 2.62. Kinerja Indikator Rasio Dokter Gigi Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 93
Gambar 2.63. Perkembangan Rasio Perawat Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2012 - 2017 .....	II - 94
Gambar 2.64. Kinerja Indikator Rasio Perawat Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 95
Gambar 2.65. Perkembangan Rasio Bidan Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2012 - 2017 .....	II - 96
Gambar 2.66. Kinerja Indikator Rasio Bidan Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 97
Gambar 2.67. Perkembangan Jalan dengan Kondisi Baik Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 - 2017 .....	II - 103
Gambar 2.68. Kinerja Indikator Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Baik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 104
Gambar 2.69. Perkembangan Jalan dengan Kondisi Mantap Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 - 2017 .....	II - 105
Gambar 2.70. Kinerja Indikator Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Mantap di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 106
Gambar 2.71. Perkembangan Jembatan dengan Kondisi Baik dan Mantap di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 - 2017 .....	II - 107
Gambar 2.72. Perkembangan Kondisi Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 - 2017 .....	II - 108

Gambar 2.73. Kinerja Indikator Luas Irigasi Dengan Kondisi Baik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 109
Gambar 2.74. Kinerja Indikator Ratio RTH Per Satuan Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 110
Gambar 2.75. Kinerja Indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 116
Gambar 2.76. Perkembangan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Tetangga Tahun 2012 - 2017 .....	II - 117
Gambar 2.77. Kinerja Indikator Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 118
Gambar 2.78. Kinerja Indikator Rumah tangga Pelanggan Listrik PLN di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 119
Gambar 2.79. Kinerja Indikator Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013- 2017 .....	II - 120
Gambar 2.80. Kinerja Indikator Rasio Rumah Ber IMB di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 123
Gambar 2.81. Kinerja Indikator Rasio Personil Satpol PP Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 124
Gambar 2.82. Kinerja Indikator Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 125
Gambar 2.83. Kinerja Indikator Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 127
Gambar 2.84. Kinerja Indikator Penyandang Cacat Baik Fisik Maupun Mental Serta Lanjut Usia Yang Tidak Potensial Yang telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 131
Gambar 2.85. Kinerja Indikator PMKS Yang Menerima Bantuan Sosial di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 133
Gambar 2.86. Perkembangan TPAK kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2012 - 2017 .....	II - 138

Gambar 2.87. Kinerja Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 139
Gambar 2.88. Kinerja Indikator Pencari Kerja Yang Ditempatkan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 140
Gambar 2.89. Kinerja Indikator Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 142
Gambar 2.90. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Serta Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018 ..	II - 143
Gambar 2.91. Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 144
Gambar 2.92. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Serta Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018 ..	II - 145
Gambar 2.93. Kinerja Indikator Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 146
Gambar 2.94. Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 147
Gambar 2.95. Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2014 - 2018 .....	II - 148
Gambar 2.96. Kinerja Indikator Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 149
Gambar 2.97. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2014 - 2018 .....	II - 150
Gambar 2.98. Kinerja Indikator Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 151
Gambar 2.99. Kinerja Indikator Luas tanah bersertifikat di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 152
Gambar 2.100. Kinerja Indikator Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 153
Gambar 2.101. Kinerja Indikator Persentase Penangan Sampah di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 154

Gambar 2.102.	Peta Rawan Bencana Kebakaran Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir.....	II - 156
Gambar 2.103.	Kinerja Indikator Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 157
Gambar 2.104.	Kinerja Indikator Kepemilikan KTP di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 159
Gambar 2.105.	Kinerja Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 161
Gambar 2.106.	Kinerja Indikator Cakupan Program “Desa Maju Inhil Jaya” di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 162
Gambar 2.107.	Kinerja Indikator Jumlah Desa “Maju” di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 163
Gambar 2.108.	Kinerja Indikator PKK Aktif di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 166
Gambar 2.109.	Kinerja Indikator Posyandu Aktif di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 166
Gambar 2.110.	Kinerja Indikator Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 167
Gambar 2.111.	Kinerja Indikator PUS Peserta KB Anggota UPPKS Yang Ber KB di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 168
Gambar 2.112.	Kinerja Indikator Ratio PPKBD Satu Petugas Di Setiap Desa/kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 170
Gambar 2.113.	Kinerja Indikator Tersedianya Angkutan Umum Yang Melayani Wilayah Yang telah tersedia Jaringan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 171
Gambar 2.114.	Kinerja Indikator Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Penerangan Jalan Umum pada Jalan Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 173
Gambar 2.115.	Kinerja Indikator Tersedianya Kapal Laut Yang Beroperasi Pada Lintas Atau Trayek Dalam Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 174

Gambar 2.116.	Kinerja Indikator Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Website di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 175
Gambar 2.117.	Kinerja Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 176
Gambar 2.118.	Kinerja Koperasi Aktif di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 178
Gambar 2.119.	Kinerja Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 179
Gambar 2.120.	Kinerja Indikator Realisasi PMDN di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 180
Gambar 2.121.	Kinerja Indikator PMA di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 182
Gambar 2.122.	Kinerja Indikator Buku Indragiri Hilir Dalam Angka di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 184
Gambar 2.123.	Kinerja Indikator Kecamatan Dalam Angka di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 ....	II - 185
Gambar 2.124.	Kinerja Indikator Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 186
Gambar 2.125.	Kinerja Indikator Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 187
Gambar 2.126.	Kinerja Indikator Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 189
Gambar 2.127.	Kinerja Indikator Koleksi Buku Yang tersedia di Perpustakaan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 190
Gambar 2.128.	Kinerja Indikator Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018	II - 191
Gambar 2.129.	Kinerja Indikator Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 192

Gambar 2.130.	Kinerja Indikator Kunjungan Wisatawan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 ....	II - 193
Gambar 2.131.	Kinerja Indikator Produktivitas Padi di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 195
Gambar 2.132.	Kinerja Indikator Produksi Beras di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 196
Gambar 2.133.	Kinerja Indikator Produktivitas Kelapa di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 ....	II - 199
Gambar 2.134.	Kinerja Indikator Produktivitas Kelapa Sawit di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 ....	II - 202
Gambar 2.135.	Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 203
Gambar 2.136.	Kinerja Indikator Nilai Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 205
Gambar 2.137.	Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 206
Gambar 2.138.	Perkembangan Nilai Produksi Usaha Industri Menengah Kecil di Kabupaten di Indragiri Hilir dan Kabupaten Tetangga Tahun 2014 - 2018 .....	II - 207
Gambar 2.139.	Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 208
Gambar 2.140.	Kinerja Indikator Produksi Perikanan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 ....	II - 210
Gambar 2.141.	Kinerja Indikator Konsumsi Ikan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 211
Gambar 2.142.	Kinerja Indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 213
Gambar 2.143.	Kinerja Indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 215
Gambar 2.144.	Kinerja Indikator Penjabaran RPJMD kedalam RKPD di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 216

Gambar 2.145.	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 222
Gambar 2.146.	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Indikator Persentase Temuan APIP Yang Ditindaklanjuti di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 223
Gambar 2.147.	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Indikator Rasio Pembahasan Prolegda di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 224
Gambar 2.148.	Perkembangan Pengeluaran Per kapita Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Tetangga dan Provinsi Riau Tahun 2013 - 2017 .....	II - 226
Gambar 2.149.	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 227
Gambar 2.150.	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 228
Gambar 2.151.	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Rumah tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 .....	II - 229
Gambar 2.152.	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 ...	II - 230
Gambar 2.153.	Perkembangan Jumlah Guru dan Murid Magrib Mengaji melalui Program DMIJ 2014 - 2018.....	II - 232
Gambar 2.154.	Jumlah Dana yang Sudah Disalurkan melalui Program DMIJ 2014 - 2017 .....	II - 234
Gambar 2.155.	Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Rasio Ketergantungan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018 ...	II - 235
Gambar 6.1.	Tahapan dalam Pencapaian Indragiri Hilir Gemilang pada Periode 2019-2023 .....	IV - 12



Gambar 6.2. Alokasi Anggaran DMIJ (2014-2018) dan DMIJ Plus Terintegrasi (2019) Kabupaten Indragiri Hilir ..... IV - 19

**BAB**

**1**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, maka setiap penyelenggaraan pemerintahan harus melakukan aktivitas pembangunan yang terencana dengan baik. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Lebih lanjut, pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, pengertian perencanaan pembangunan daerah

adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan perencanaan pembangunan daerah yang diawali dengan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan rencana harus memperhatikan prinsip pengintegrasian dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Hal ini dimaksudkan agar rencana pembangunan yang dihasilkan selaras dengan rencana struktur dan pola ruang yang termuat dalam RTRW. Dalam penyusunannya, rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Rencana pembangunan yang harus disusun oleh daerah meliputi rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan rencana perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir pada bulan Juni Tahun 2018 dan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir terpilih pada bulan September 2018, maka pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir perlu melakukan menyusun RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Setelah salah satu dokumen yang harus disusun pada tahap persiapan RPJMD, yaitu Rancangan Teknokratik RPJMD, selesai dilakukan, maka tahapan berikutnya adalah menyusun Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir.

Rancangan Awal RPJMD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rancangan Awal RPJMD mempunyai peran yang penting dalam rangkaian tahapan penyusunan RPJMD. Untuk itu perlu dipersiapkan dengan baik sebab akan menjadi dasar atau awal penyusunan RPJMD. Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023 akan dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA sebagai Ketua Tim Penyusunan RPJMD bersama Perangkat Daerah. Dokumen tersebut akan menjadi input bagi penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir.

Sebagaimana amanat Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Ini bermakna bahwa penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025. Mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah khususnya pada tahap/periode ketiga dan keempat RPJPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Penyusunan RPJMD Riau akan

meliputi 6 (enam) tahapan, yaitu: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- b. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Perumusan RPJMD selain menggunakan pendekatan berdasarkan proses, juga menerapkan pendekatan substansi. Hal ini untuk menjamin kualitas rencana yang dihasilkan telah berdasarkan permasalahan, isu strategis daerah dan arah kebijakan pembangunan yang akan dicapai, serta selaras dengan rencana tata ruang. Pendekatan substansi yang dimaksud, meliputi:

- a. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

- b. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- c. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Mengingat strategis dan pentingnya penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, maka akan dilaksanakan dengan melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terkait. Tim penyusun Rancangan Teknokratik RPJMD akan bersinergi dengan tim penyusun Renstra PD dilingkungan Pemda Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu, untuk mendukung penerapan pembangunan berkelanjutan, maka selain menggunakan pendekatan proses dan substansi, penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir juga memperhatikan hasil dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 - 2025.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

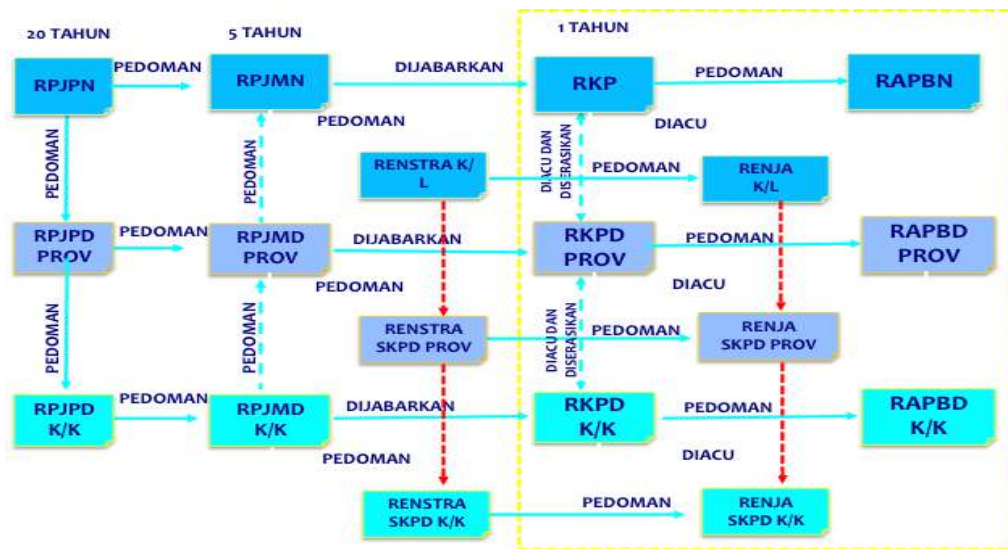
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah Kabupaten/Kota, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional, berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), evaluasi kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Selanjutnya, RPJMD juga merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah sehingga RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 disusun dengan berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RTRW Kabupaten Indragiri Hilir, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Indragiri Hilir. RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir juga merupakan acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota di Kabupaten Indragiri Hilir.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir juga memperhatikan dokumen lainnya seperti Standar Pelayanan Minimal



(SPM), Isu Pemanasan Global dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan perencanaan pembangunan kabupaten tetangga, yakni Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Pelalawan. Disamping itu, RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir juga memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Secara diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1.  
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir adalah mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi guna mendukung penyusunan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Sementara itu, tujuan dari Rancangan Awal ini adalah:

1. Menelaah kinerja pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir lima tahun terakhir baik berdasarkan analisis gambaran umum kondisi daerah maupun analisis gambaran umum keuangan daerah.
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah provinsi beberapa

tahun terakhir dan rumusan permasalahan pembangunan kabupaten/kota.

3. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah terpilih.
4. Merumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
5. Merumuskan kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; dan
6. Merumuskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematikan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 adalah:

#### **BAB 1. Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

#### **BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

#### **BAB 3. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

**BAB 4. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.2. Isu Strategis

**BAB 5. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tujuan dan Sasaran

**BAB 6. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB 7. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN  
PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

**BAB 8. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH**

**BAB 9. PENUTUP**

**BAB**

**2**

## **ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Indragiri Hilir dianalisis dari 4 aspek yaitu aspek Geografi dan Demografi, aspek Kesejahteraan Masyarakat, aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing.

### **2.1. Aspek Geografi dan Demografi**

Aspek geografi menggambarkan mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Aspek demografi menggambarkan perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat.

#### **2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

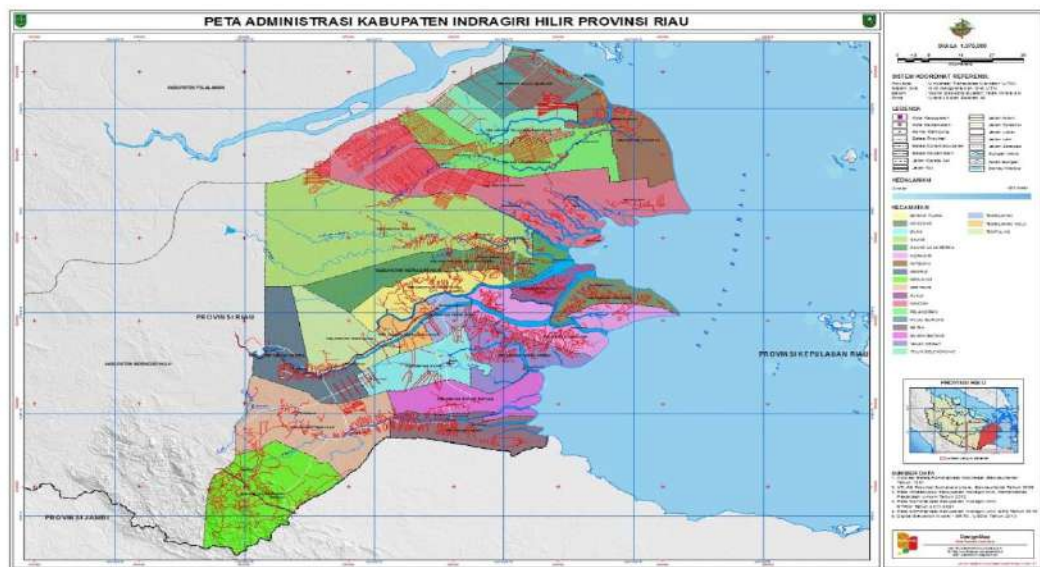
Karakteristik lokasi dan wilayah menggambarkan mengenai letak, luas dan batas wilayah administrasi, Kondisi geografis, Kondisi topografi, Kondisi geologi, Kondisi Hidrologi, Jenis Tanah, Daya Dukung Lahan, dan Kondisi klimatologi.

##### **2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hilir berada pada posisi 0°36' Lintang Utara - 1°07' Lintang Selatan dan 102°32' Bujur Timur -

104°10' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas 11.605,97 KM<sup>2</sup>. Batas-batas wilayah kabupaten Indragiri Hilir adalah:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Pelalawan,
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi),
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu,
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Tanjung Balai Karimun (Provinsi Kepulauan Riau).



Gambar 2.1.  
Peta Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur Sumatera yang merupakan gerbang selatan Provinsi Riau. Posisi Kabupaten Indragiri yang strategis yaitu dekat dengan Selat Melaka dan sejak dulu telah melakukan perdagangan lintas batas dengan negara tetangga Malaysia. Disisi timur yang berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau menjadikan produksi hasil-hasil pertanian Indragiri Hilir dengan mudah dan cepat dibawah ke Kepulauan Riau khususnya Batam. Disisi selatan, Kabupaten Indragiri Hilir berbatasan Provinsi Jambi dan sekaligus

dilintasi 'oleh jalan Nasional 'Lintas Timur'. Posisi kabupaten yang strategis dapat menjadi modal dalam pertumbuhan ekonominya.

Secara administratif, Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 Kecamatan dan 197 Desa dan 39 Kelurahan. Luas wilayah, jumlah desa dan jumlah kelurahan menurut kecamatan ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.  
Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Kecamatan	Luas		Jumlah	
		Km <sup>2</sup>	%	Desa	Kelurahan
1	Keritang	543,45	4,68	16	1
2	Kemuning	525,48	4,53	11	1
3	Reteh	407,75	3,51	11	3
4	Sungai Batang	145,99	1,26	7	1
5	Enok	880,86	7,59	10	4
6	Tanah Merah	721,56	6,22	9	1
7	Kuala Indragiri	511,63	4,41	7	1
8	Concong	160,29	1,38	5	1
9	Tembilahan	197,37	1,70	0	8
10	Tembilahan Hulu	180,62	1,56	4	2
11	Tempuling	681,19	5,96	5	4
12	Kempas	364,49	3,14	10	2
13	Batang Tuaka	1.050,25	9,05	12	1
14	Gaung Anak Serka	612,75	5,28	9	3
15	Gaung	1.479,24	12,75	15	1
16	Mandah	1.021,74	8,80	16	1
17	Kateman	561,09	4,83	8	3
18	Pelangiran	531,22	4,58	15	1
19	Teluk Belengkong	499,00	4,30	13	0
20	Pulau Burung	520,00	4,48	14	0
	Jumlah	11.605,97	100,00	197	39

Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

### 2.1.1.2. Kondisi Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), dan daerah hutan payau (mangrove). Selain itu,

wilayahnya juga terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil. Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya telah di diami penduduk dan sebagian diusahakan penduduk untuk dijadikan kebun-kebun kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu dan lain sebagainya. Gugusan pulau tersebut meliputi : Pulau Kateman, Pulau Burung, Pulau Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku, Pulau Mas, Pulau Nyiur dan pulau-pulau kecil lainnya. Disamping gugusan pulau tersebut maka terdapat pula selat-selat/terusan kecil seperti : Selat/Terusan Kempas, Selat/Terusan Batang, Selat/Terusan Concong, Selat/Terusan Perawang, Selat/Terusan Patah Parang, Selat/Terusan Sungai Kerang, dan Selat/Terusan Tekulai. Selain selat/terusan alam terdapat pula terusan buatan antara lain : Terusan Beringin, Terusan Igal, dan lain-lain. Selain itu di daerah ini juga terdapat danau dan tanjung yakni Danau Gaung, Danau Danai dan Danau Kateman, sedangkan tanjung yang ada di Indragiri Hilir adalah Tanjung Datuk dan Tanjung Bakung.

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir rata-rata memiliki ketinggian 0 - 3 Meter di atas permukaan laut. Daerah yang landai ini sebagian besar terletak di dekat pantai atau sungai. Sedangkan sebagian kecilnya 6.69 % berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6 - 35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh, Kecamatan Keritang. Daerah ini termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT).

Secara fisiografi, wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terbelah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa kemiringan lereng wilayah Kabupaten Indragiri Hilir didominasi oleh kemiringan 0 - 2 % seluas 1.298.763 Ha (94.97 %), kemiringan 3 - 5 % seluas 9.710 Ha (0.71 %), kemiringan 16 - 40% seluas 21.197 Ha (1.55 %) dan kemiringan di atas

40 % seluas 37.744 Ha (2.76 %). Sedangkan khusus kondisi topografi untuk Kawasan Kuala Enok didominasi oleh lahan dengan kemiringan 0 - 8 %.

#### **2.1.1.3. Kondisi Geologi**

Wilayah kabupaten Indragiri Hilir merupakan jalur cekungan sebagai akibat adanya peningkatan kegiatan tektonik bumi yang menyebar luas dan berbentuk morfologi pendataran. Morfologi pendataran ini biasanya memiliki bentuk sungai berbelok-belok dan membawa pasokan material sedimen dari hulu ke hilir. Sedimen-sedimen tersebut akhirnya terperangkap bersama media air pada cekungan-cekungan. Tanah pada cekungan tersebut ditumbuhi oleh mangrove (hutan bakau) sebagai sumber daya hayati pada ekosistem rawa dan hutan dataran rendah. Dalam jangka waktu skala geologi, cekungan-cekungan dan sumberdaya hayati di atasnya mengalami penurunan untuk mencari keseimbangan akibat adanya gaya-gaya tektonik dan pembenanan. Cekungan-cekungan ini tertutup kembali oleh sedimen yang terus memasoknya dimana kejadian ini berulang terus hingga sekarang.

Sumberdaya hayati yang terperangkap dan tertutup sedimen pada masa muda akhirnya membentuk suatu endapan rawa pada tanah gambut. Sementara proses-proses ini terus berlangsung, endapan gambut yang sudah berumur lebih dewasa dapat disebut sebagai batu bara muda. Jadi gambut dapat dianggap sebagai tahapan awal pembentukan batubara. Endapan batubara yang mengalami pembebanan hingga jangka waktu skala geologi sampai suatu saat berubah menjadi lempung hitam dapat dianggap sebagai sumber minyak bumi yang mengalami pencucian atau leaching. Hasil pencucian ini akhirnya terjebak dalam suatu batuan perangkap minyak bumi

Wilayah kabupaten Indragiri Hilir dibentuk oleh sebagian dari dataran alluvium Sumatera Timur yang sangat luas. Dataran alluvium



tersebut sebagian berupa rawa yang terbentuk sebagai akibat kenaikan muka air laut pada zaman es. Perubahan ini merupakan awal proses pembentukan gambut di dataran alluvium Sumatera Timur. Ketika zaman es berakhir, air laut kembali surut, tetapi proses pembentukan gambut dan akumulasi sedimen di daerah rawa dan sepanjang pantai wilayah kabupaten Indragiri Hilir tetap berlangsung terus. Batuan yang tersingkap di permukaan kawasan pesisir kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari jenis alluvium, endapan pantai (Qac) dan endapan rawa (Qs) yang keduanya mempunyai umur Kuartar. Tanah dan batuan yang tampak dipermukaan terdiri dari gambut, lumpur, lempung dan pasir. Gambut terletak di atas lumpur dan lempung, serta pasir didapatkan sebagai sisipan pada lumpur dan lempung. Sedangkan kedalaman batuan dasar sangat beragam, dimana ke arah pantai semakin dalam.

Tanah dan batuan di kawasan dataran pantai merupakan alluvium dan endapan pantai (Qac) yang disusun oleh pasir, lanau, lempung, lumpur, kerikil dan kerakal, sisa tumbuhan setempat dan lapisan gambut dengan tebal mencapai 5 meter. Tanah di dataran pantai terdiri dari lumpur berwarna abu-abu (terdapat dalam keadaan cair, sangat lunak, sangat plastik, memiliki rekah kerut tinggi, kadang-kadang mengandung bahan organik kurang dari 10% dan nilai unconfined strength kurang dari 0.5 kg/cm<sup>2</sup>).

Dalam keadaan kering sifat lumpur sulit dibedakan dengan lempung. Lumpur abu-abu memiliki sifat keteknikan buruk, kurang teguh dan stabil. Batuan dasar, diperkirakan terdapat pada kedalaman lebih dari 60 meter. Karena batuan dasar, diperkirakan satu-satunya batuan keras di wilayah kabupaten Indragiri Hilir dapat ditafsirkan sebagai lapisan keras yang mampu menahan bangunan berat dan berada pada kedalaman lebih dari 60 meter. Tanah dan batuan di dataran limbah banjir dan rawa tepian sungai merupakan endapan rawa (Qs) yang disusun oleh lempung, lanau, pasir dan gambut. Tanah di kawasan ini

terutama terdiri dari lempung abu-abu atau abu-abu dengan bercak kuning. Di beberapa lokasi kadang-kadang di atas lempung ditemukan gambut dengan ketebalan beragam, berkisar antara 50-300 cm.

- **Lempung abu-abu**, terdapat dalam keadaan liat, bersifat plastis, mengotori tangan/sticky, dan kadang-kadang mengandung bahan organik kurang dari 10%, rekah kerutnya tinggi, mudah mencair dan memiliki nilai *unconfined strength* kurang dari 2 kg/cm<sup>2</sup>. Selain itu, dalam keadaan kering dapat mencapai 4 kg/cm<sup>2</sup> dan menjadi bersifat rapuh/*brittle* (Rajiyowiryo, 1986).
- **Pasir**, terdapat sebagai sisipan tipis pada lempung dan lumpur. Komposisi utamanya berupa kuarsa yang belum terikat kuat dan masih bersifat lepas.
- **Batuan dasar**, diperkirakan terdapat pada kedalaman lebih dari 40 meter.
- **Gambut**, bersifat sangat higroskopis, mampu menghisap dan melepas air dengan cepat, butirannya tidak terlalu kuat karena hanya terikat oleh tegangan pori dari air yang mengisi rongga antar butiran. Dalam keadaan kering akan kehilangan tegangan pori hingga mudah lepas, tetapi dalam kondisi kelewat jenuh air, gambut bersifat cair dan daya dukungnya bertambah lemah, sehingga gambut memiliki sifat keteknikan yang buruk. Sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (90 %) merupakan lahan dengan karakteristik tanah gambut ini.

Dari 20 Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat delapan Kecamatan yang berlokasi di wilayah pesisir atau wilayah kecamatan berada di wilayah pesisir, yang meliputi 50 Desa. Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan kateman, Pulau Burung, Mandah, gaung Anak Serka, Kuala Indragiri, Tanah Merah, Sungai Batang dan Reteh. Kecamatan-Kecamatan tersebut sebagian masih belum bisa disentuh melalui jalan darat seperti Pulau Burung, kateman, Kula Indragiri, sementara lima

Kecamatan lainnya sudah dapat dihubungi melalui jalan darat (roda 4 atau roda 2).

Kompleknya permasalahan pesisir Kabupaten Indragiri Hilir menyebabkan pembangunan pesisir daerah ini agak lambat. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan wilayah pesisir adalah keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan/jerambah, dermaga, air bersih, PLN dan telekomunikasi. Selain itu yang menjadi permasalahan adalah perambahan/penebangan hutan mangrove, illegal fishing dan minimnya sarana prasarana penangkapan dan pengolahan hasil perikanan

#### **2.1.1.4. Kondisi Hidrologi**

Pada umumnya keadaan hidrologi di Kabupaten Indragiri Hilir ditentukan oleh perbedaan topografi terutama antara perbukitan, dataran maupun perairan. Keadaan hidrologi di Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya mempunyai potensi perairan yang cukup luas serta daratan yang dapat dikembangkan usaha budidaya perikanan, berpeluang bagi investor untuk menanamkan investasi baik di bidang penangkapan khususnya di perairan lepas pantai dan dibidang budidaya perikanan (tambak, keramba, budidaya kerang Anadara dan kolam).

Disamping sungai-sungai dan selat, di Kabupaten Indragiri Hilir banyak terdapat parit-parit baik keberadaannya secara proses alami atau yang dibuat manusia, sehingga Kabupaten Indragiri Hilir disamping terkenal dengan julukan Negeri Sri Gemilang, juga di kenal sebagai Negeri Seribu Parit. Sumberdaya air di wilayah kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan meliputi air rawa, air sungai dan parit. Air tanah terdiri dari air tanah bebas/*unconfined ground water* dan air tanah agak tertekan/*semiconfined groundwater*. Penentuan potensi ditentukan berdasarkan kuantitas dan kualitasnya. Kuantitas sumberdaya air terutama ditentukan berdasarkan

pengamatan lapangan di samping dari data yang terhimpun dari penelitian terdahulu. Di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 5 (lima) Daerah Aliran Sungai (DAS) dari pesisir Selatan ke arah Utara, yaitu DAS Reteh Gangsal, DAS Indragiri Tuaka, DAS Gaung Anak Serka, DAS Batangtumu, dan DAS Guntung Kateman.

#### **2.1.1.5. Jenis Tanah**

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir (80%) memiliki struktur tanah berupa tanah Organosol (Histosol), yaitu tanah gambut yang banyak mengandung bahan organik. Lapisan tanah gambut mencapai ketebalan lebih dari 100 cm. Tanah ini dominan di daratan rendah diantara aliran sungai. Jenis tanah ini berasal dari akumulasi humus atas permukaan hutan yang melapuk pada permukaan tanah. Di Kabupaten Indragiri Hilir, jenis tanah ini hampir menyebar di semua kecamatan.

Di sepanjang aliran sungai pada umumnya terdapat formasi tanggul alam *Natural River Leves* yang terdiri dari tanah-tanah Aluvial (*Entisol*) dan Gley Humus (*Inceptisol*). Selain itu, juga terdapat jenis tanah Podsolik merah-kuning dan bahan induk batuan endapan dengan fisiografi dataran. Jenis ini hanya terdapat di bagian barat ke arah selatan (Kecamatan Kerintang). Di samping itu, sebagian wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir juga merupakan daerah muara sungai. Lapisan atas batuan permukaannya terdiri dari endapan alluvial lunak yang berasal dari endapan lumpur yang dibawa oleh sungai, sehingga sebagian besar lapisan permukaan tanah yang dilewati oleh aliran sungai adalah deposit sabuk meander. Secara teknis lapisan permukaan alluvial lunak (lapisan sabuk meander, organik dan gambut) mempunyai sifat kompresitasnya yang tinggi, sehingga menyebabkan mudahnya penurunan lapisan tanah.

Penurunan lapisan tanah diakibatkan oleh adanya aliran air pori

menuju ke butir tanah karena pembebanan struktur yang bersifat konstan baik secara vertikal maupun horisontal. Dengan demikian akan diperlukan biaya yang lebih besar terutama dari material dan teknik pembangunan untuk mendapatkan struktur bangunan yang baik di atas tanah tersebut. Berdasarkan Peta Zonasi Kerentanan Tanah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Zona Kerentanan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir adalah Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah (ZKGTSR) dan Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah (ZKGTR). ZKGTSR adalah daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini jarang atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah, baik gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru, kecuali pada daerah tidak luas pada tebing sungai. ZKGTR adalah daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terkena gerakan tanah. Umumnya pada zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng, dan jika terdapat gerakan tanah lama, lereng telah mantap kembali. Gerakan tanah berdimensi kecil mungkin dapat terjadi, terutama pada tebing lembah (alur) sungai.

Daerah Indragiri Hilir bagian Selatan disekitar Kecamatan Keritang terdapat tanah Podsolik merah kuning (Ultisol). Potensi tanah Orgasol ditentukan oleh tebalnya lapisan gambut atau bahan organiknya. Daerah-daerah yang mempunyai ketebalan gambut lebih dari 1 (satu) meter pada umumnya tidak sesuai untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian. Kesuburan tanah-tanah gleihumus dan organosol termasuk sedang sampai tinggi, sehingga tanah-tanah di daerah ini cukup baik untuk pengembangan komoditi pertanian dalam arti luas.

Nilai ekonomis tanah gambut untuk lahan pertanian ditentukan oleh tebalnya lapisan gambut. Semakin tebal lapisan gambut, maka semakin kurang baik tanah itu untuk pertanian. PH tanah gambut sangat rendah, yaitu antara 3,5 - 6, sehingga bersifat asam. Di daerah

Reteh, lapisan mineral di bawah gambut berwarna kelabu. Ditempat-tempat dengan tebal bahan organik 100 - 200 cm, pada umumnya telah ditanami dengan tanaman keras seperti kelapa, karet, kopi, buah-buahan dan tanaman-tanaman tahunan lainnya.

Tanah gambut yang tebal diidentifikasi memiliki bahan organiknya lebih dari 200 cm. Sampai dengan saat ini praktis belum terolah dan walaupun ada masih sangat terbatas luasnya. Karena masalah yang dihadapi dari tanah gambut, maka diperlukan adanya usaha reklamasi tanah dengan pembuatan drainase, akan tetapi berakibat bahwa akan terjadi aksinasi yang cepat dari bahan organik. Oleh sebab itu, pembuatan parit harus memperhatikan agar pengaturan kedalaman air tanah sampai pada batas yang dikehendaki sehingga tidak mempercepat terjadinya pengerutan tanah. Sebagaimana halnya dengan gleihumus tanah organosol yang peka terhadap peristiwa penurunan atau pengerutan tanah, sehingga juga perlu usaha reklamasi.

#### **2.1.1.6. Daya Dukung Lahan**

Secara umum jenis tanah di Kabupaten Indragiri Hilir digolongkan menjadi dua yaitu tanah mineral dan tanah organik. Tanah mineral yaitu tanah yang dihasilkan dari proses pelapukan batuan seperti tanah latosol (merah) dan tanah andosol (hitam). Sedangkan tanah dari hasil pematangan sisa-sisa tanaman akan membentuk tanah organik seperti tanah gambut. Keadaan fisiografi, bentuk wilayah dan sifat-sifat tanah menggambarkan karakteristik yang membedakan satuan lahan. Kualitas lahan sangatlah dipengaruhi oleh kualitas jenis tanahnya yang juga sangat tergantung pada kondisi geologis, iklim maupun topografinya. Secara umum di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 5 (lima) kelompok satuan lahan fisiografi, yaitu: kelompok marin, kubah gambut, alluvial, dataran dan perbukitan.

1. Kelompok Marin, terletak disepanjang pantai dengan ini merupakan

hasil proses sedimentasi dan secara jelas terlihat dengan adanya pelebaran pantai yang terjadi karena penambahan bahan endapan dan proses penangangkatan. Satuan lahan pada kelompok ini dapat dibedakan antara lain beting pasir, dataran pasang surut, rawa belakang pantai, dan endapan delta. Kelompok ini luasnya mencapai 17.09% dari luas lahan di Kabupaten Indragiri Hilir dan umumnya adalah berupa dataran pasang-surut dengan kemiringan lahan yang umumnya kurang dari 3%.

2. Kelompok Kubah Gambut, terbentuk dari endapan organik yang berasal dari endapan permukaan muda dan tua. Secara umum ketebalan gambut akan meningkat semakin jauh dari sungai. Dengan pengendalian tata air yang baik, daerah ini sebenarnya memiliki potensi untuk perkebunan. Namun miskinnya kandungan hara dapat menjadi penghambat utama. Tanah organosol atau tanah gambut ini merupakan jenis tanah yang paling dominan terdapat di kabupaten Indragiri Hilir, mencapai 75.32% dari luas wilayahnya dan umumnya mempunyai ketebalan lebih dari 2 meter.
3. Kelompok Alluvial, terbentuk dari endapan alluvial sungai dan terletak di sepanjang jalur- jalur aliran sungai. Pada umumnya daerah ini cukup potensial untuk lahan persawahan, tentunya dengan memperhatikan jalur hijau yang harus dipertahankan. Kelompok ini merupakan satuan fisiografi yang terkecil di Indragiri Hilir, yaitu hanya sekitar 0.57% dari luas wilayah.

Tabel 2.2.  
Luas Satuan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Satuan Lahan	Luas (Ha)	Proporsi (%)	Keterangan
1	Marin	233.714	17,09	Umumnya kelerengan < 3% dan sebagian kecil < 8%
2	Kubah Gambut	1.030.039	75,32	Didominasi oleh oligotrofik air tawar dengan kedalaman > 2 meter

3	Alluvial	7.795	0,57	Umumnya Kelerengan < 3%
4	Dataran	58.121	4,25	Umumnya Kelerengan < 3% dan terdapat di bagian selatan
5	Perbukitan	37.881	2,77	Umumnya kelerengan 16-25% dan terdapat dibagian selatan
Total		1.367.551	100	

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2017)

4. Kelompok Dataran, berkembang dari batuan sedimen dan tur intermedier dan mafik. Kelompok ini juga hanya ditemui pada bagian selatan Indragiri Hilir dengan kelerengan umumnya <3%. Luasnya mencapai 4.25% dari luas wilayah.
5. Kelompok Perbukitan, seperti halnya kelompok dataran, kelompok perbukitan berkembang dari batuan sedimen dan tur intermedier dan mafik. Kelompok ini juga hanya ditemui pada bagian selatan Indragiri Hilir dengan kelerengan umumnya 16-25%, terutama yang berbatasan dengan kabupaten Indragiri Hulu dan provinsi Jambi (TNBT). Luasnya mencapai 2.77% dari luas total wilayah kabupaten Indragiri Hilir.

#### 2.1.1.7. Klimatologi

Klimatologi adalah ilmu yang mencari gambaran dan penjelasan sifat iklim. Iklim dalam konteks ini membahas tentang perkembangan curah hujan dan hari hujan. Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh dipermukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dalam satuan tinggi (mm) di atas permukaan horizontal bila tidak terjadi evaporasi, *runoff* dan infiltrasi. Sifat hujan dibagi kedalam tiga kategori yaitu (i) diatas normal, jika nilai curah hujan lebih dari 115% terhadap rata-ratanya, (ii) normal, jika nilai curah hujan antara 85 -115% terhadap rata-ratanya dan (iii) dibawah normal, jika nilai curah hujan kurang dari 85% terhadap rata-ratanya. Curah hujan normal sekitar 150 mm/bulan



dengan kisaran antara 2.000 - 3.000 mm/tahun.

Selama periode 2013 -2017, rata-rata hari hujan di Kabupaten Indragiri Hilir berkisar antara 93 - 149 hari hujan per tahunnya, lebih rendah dibandingkan rata-rata hari hujan kabupaten Indragiri Hulu yang berkisar antara 171 - 210 hari hujan per tahun. Rata-rata hari hujan menurun tajam pada tahun 2015 yang hanya sebanyak 93 hari hujan dengan curah hujan yang rendah yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang disertai kabut kabut asap.

Tabel 2.3.  
Rata-Rata Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2013 - 2017

No	Bulan	2013		2014		2015		2016		2017	
		Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)
1	Januari	8,00	65,00	9,00	100,80	7,00	66,00	16,00	216,00	10,00	137,70
2	Februari	12,00	181,00	2,00	13,30	6,00	83,00	23,00	174,00	11,00	169,00
3	Maret	9,00	136,00	6,00	80,50	11,00	150,00	11,00	181,00	14,00	226,40
4	April	9,00	111,00	11,00	184,30	11,00	153,00	10,00	160,00	12,00	183,10
5	Mei	11,00	154,00	11,00	175,20	10,00	150,00	11,00	161,00	10,00	120,80
6	Juni	5,00	64,00	8,00	101,40	7,00	117,00	8,00	85,00	8,00	98,70
7	Juli	9,00	128,00	7,00	79,20	4,00	39,00	9,00	133,00	6,00	86,80
8	Agustus	8,00	111,00	8,00	122,50	6,00	104,00	9,00	141,00	9,00	142,10
9	September	11,00	169,00	7,00	97,80	3,00	28,00	11,00	135,00	11,00	183,70
10	Oktober	10,00	145,00	7,00	83,80	3,00	30,00	12,00	150,00	10,00	184,80
11	November	17,00	236,00	15,00	274,40	11,00	181,00	16,00	241,00	13,00	240,60
12	Desember	14,00	190,00	14,00	197,00	14,00	206,00	13,00	144,00	13,00	191,90
	Jumlah	123,00	1690,00	105,00	1510,20	93,00	1307,00	149,00	1921,00	127,00	1965,60

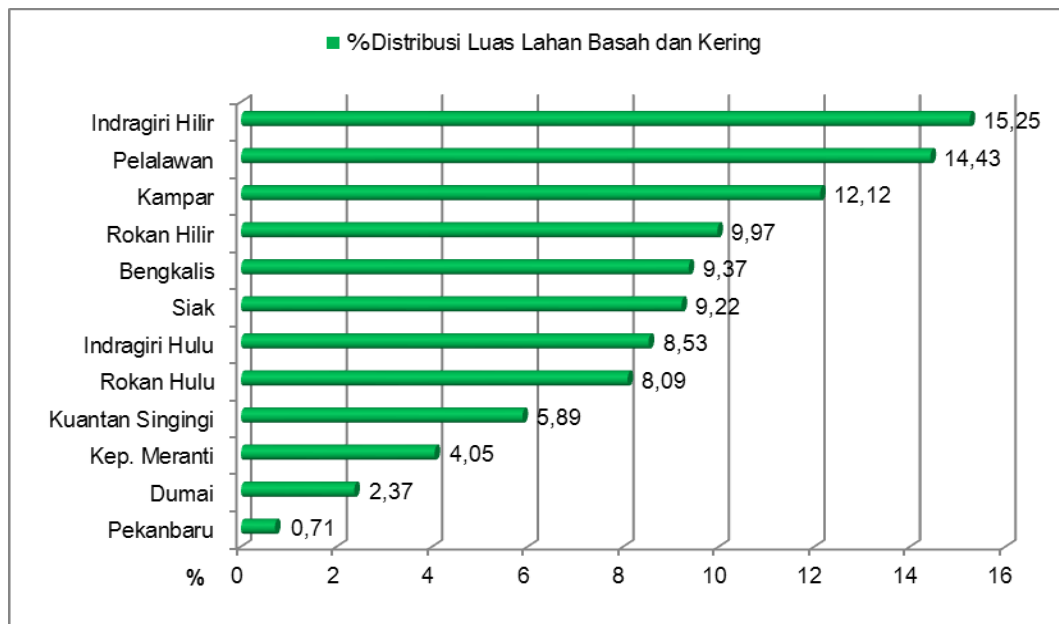
Sumber: Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Selama periode 2013 - 2017, rata-rata hari hujan dan curah hujan yang relatif rendah atau musim kemarau, umumnya mulai terjadi pada bulan juni hingga bulan September, kecuali pada tahun 2015 yang lebih panjang hingga bulan oktober. Sejalan dengan hari hujan, curah hujan di Kabupaten Indragiri Hilir juga dibawah normal dengan kisaran sebesar 1.307 mm/tahun - 1.922 mm/tahun dengan rata-rata sebesar 1.618 mm/tahun, lebih rendah disbanding curah hujan di kabupaten Indragiri Hulu yang rata-ratanya sebesar 2.292.70 mm/tahun. Curah hujan yang jauh dibawah normal umumnya terjadi pada bulan juni - September. Musim kemarau yang terjadi pada bulan juni hingga September ini yang

ditandai dengan rendahnya hari hujan dan curah hujan mendukung terjadinya kebakaran hutan dan lahan kejadian tahun 2014 dan 2015.

### 2.1.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi pengembangan pertanian khususnya perkebunan dan pangan serta perikanan untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi dan menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki total luas lahan kering dan lahan basah Kabupaten Indragiri terluas di Riau yaitu seluas 1.355.095,84 hektar atau 15,25% dari total luas lahan kering dan lahan basah di Provinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki lahan basah seluas 1.321.623,13 hektar atau 15,18% dari total lahan basah di Provinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hilir juga memiliki total luas lahan kering seluas 33,457,33 hektar atau 18,63% dari total lahan kering Provinsi Riau.



Sumber: BPS Provinsi Riau (Provinsi Riau Dalam Angka, 2017)

Gambar 2.2.  
Distribusi Lahan Basah dan Lahan Kering  
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Potensi lahan basah dan lahan kering yang sebagian telah dikembangkan menjadi perkebunan kelapa dan kelapa sawit serta tanaman pangan. Produksi hasil perkebunan kelapa sawit, kelapa dan tanaman kelapa ini perlu didukung dengan industri hilir sehingga nilai tambah dapat diperoleh oleh Kabupaten Kabupaten Hilir. Oleh karena itu, meneruskan untuk mewujudkan kawasan industri Kuala Enok perlu terus dilakukan.

### **2.1.2. Wilayah Rawan Bencana**

Potensi bencana alam yang umumnya terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir adalah bencana banjir dan gelombang pasang surut, longsor tepi sungai, dan kebakaran hutan/lahan. Bencana banjir di kabupaten Indragiri Hilir terjadi karena perubahan musim khususnya musim hujan yang disertai dengan gelombang pasang surut yang juga cukup besar. Bencana tanah longsor umumnya terjadi dikawasan tepi sungai yang merupakan kawasan sempadan sungai yang penggunaan untuk budidaya atau perumahan. Potensi bencana longsor di Kabupaten Indragiri Hilir berada di kawasan sempadan sungai yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Indragiri Hilir. Selama periode 2014 - 2017, bencana tanah longsor terjadi sebanyak 23 kali yang terjadi di lima kecamatan yaitu di kecamatan Tanah Merah sebanyak 13 kali, Kuala Indragiri sebanyak 4 kali, Enok sebanyak 3 kali dan di kecamatan Mandah serta Tempuling yang masing-masingnya sebanyak 1 kali.

Bencana gelombang pasang surut terjadi sebanyak 2 kali didua kecamatan yaitu kecamatan Concong dan Kateman. Bencana puting beliung terjadi sebanyak 14 kali yaitu di kecamatan Mandah dan reteh yang masing-masingnya terjadi sebanyak 3 kali, Enok dan Kuala Indragiri yang masing-masingnya sebanyak 2 kali dan Tanah Merah, Concong, Gaung dan Kateman yang masingnya-masingnya terjadi sekali. Bencana banjir terjadi sekali yaitu di kecamatan Tempuling. Meski Kabupaten

Indragiri Hilir bukan daerah dengan potensi bencana yang besar namunantisipasi terhadap kejadian bencana longsor, gelombang pasang surut, angin puting beliung dan bencana banjir perlu terus dilakukan.

Tabel 2.4.  
Banyaknya Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2017

No	Kecamatan	Tanah Longsor	Banjir	Gelombang Pasang Surut	Angin Puting Beliung
1	Keritang	-	-	-	-
2	Kemuning	-	-	-	-
3	Reteh	-	-	-	3
4	Sungai Batang	-	-	-	-
5	Enok	3	-	-	2
6	Tanah Merah	13	-	-	1
7	Kuala Indragiri	4	-	-	2
8	Concong	-	-	1	1
9	Tembilahan	-	-	-	-
10	Tembilahan Hulu	-	-	-	-
11	Tempuling	1	1	-	-
12	Kempas	-	-	-	-
13	Batang Tuaka	-	-	-	-
14	Gaung Anak Serka	-	-	-	-
15	Gaung	-	-	-	1
16	Mandah	1	-	-	3
17	Kateman	-	-	1	1
18	Pelangiran	-	-	-	-
19	Teluk Belengkong	-	-	-	-
20	Pulau Burung	-	-	-	-
	Kab. Indragiri Hilir	23	1	2	14

Sumber: BPBD Kabupaten Indragiri Hilir (2018)

Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang relatif semakin meningkat di Kabupaten Indragiri Hilir dan Riau, selama periode 2011 - 2015. Dampak kebakaran hutan dan lahan sudah sangat dirasakan oleh masyarakat Indragiri Hilir dan Provinsi Riau yang ditunjukkan dari kabut asap yang mencapai puncaknya pada tahun 2014 dan 2015. Kebakaran hutan dan lahan yang ditunjukkan dari jumlah titik api di Kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat. Kondisi ini perlu perhatian serius untuk diantisipasi karena saat ini dan kedepan,

pembukaan lahan gambut pasang surut di Kabupaten Indragiri Hilir akan terus terjadi. Selama periode 2016 - 2017, kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Indragiri Hilir relatif hampir masih terjadi. Menurut data BPBD Indragiri Hilir (2018) pada tahun 2016 tercatat terjadi kebakaran hutan dan lahan sebanyak 12 lokasi yaitu di Kecamatan Kateman dan Tempuling yang masing-masingnya di 3 lokasi, Pulau Burung dan Kempas masing-masingnya di 2 lokasi dan Reteh di 1 lokasi. Pada tahun 2017, jumlah kebakaran hutan dan lahan terjadi sebanyak 7 lokasi yaitu di Kecamatan Keritang sebanyak 4 lokasi dan Kecamatan Tempuling, Batang Tuaka serta Tempuling yang masing-masingnya 1 kali.

### 2.1.3. Kondisi Demografi

Hasil sensus penduduk tahun 1990 - 2010, laju pertumbuhan pendudukan di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 1,94% per tahun. Pada periode 1990 - 2000, laju pertumbuhan pendudukan meningkat sebesar 1,65% per tahun, meningkat menjadi 1,92% per tahun pada periode 2000 - 2010. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir ini pada periode 2000 - 2010 lebih rendah dibanding laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hulu (4,97%) dan Provinsi Riau (4,75%).

Tabel 2.5.  
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Sensus Tahun 1990, 2000 dan 2010 di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Orang)			Laju Pertumbuhan (%)	
		1990	2000	2010	1990-2000	2000-2010
1	Keritang	55,425	52,696	61,453	-0.5	1.7
2	Kemuning	n.a	11,293	29,656	n.a	16.3
3	Reteh	61,200	42,755	42,211	-3.0	-0.1
4	Sungai Batang	n.a	12,586	1,826	n.a	-0.6
5	Enok	33,620	32,750	32,968	-0.3	0.1
6	Tanah Merah	31,540	31,724	29,948	0.1	-0.6
7	Kuala Indragiri	32,197	19,186	18,688	-4.0	-0.3
8	Concong	n.a	10,937	12,804	n.a	1.7
9	Tembilahan	67,518	51,429	69,524	-2.4	3.5
10	Tembilahan Hulu	n.a	29,176	42,654	n.a	4.6
11	Tempuling	42,073	25,398	29,543	-4.0	1.6

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Orang)			Laju Pertumbuhan (%)	
		1990	2000	2010	1990-2000	2000-2010
12	Kempas	n.a	24,572	32,602	n.a	3.3
13	Batang Tuaka	20,211	21,786	26,317	0.8	2.1
14	Gaung Anak Serka	54,438	21,057	21,339	-6.1	0.1
15	Gaung	n.a	34,576	38,559	n.a	1.2
16	Mandah	36,103	43,327	38,568	2.0	-1.1
17	Kateman	42,843	31,104	43,813	-2.7	4.1
18	Pelangiran	n.a	21,438	42,132	n.a	9.7
19	Teluk Belengkong	n.a	10,953	16,124	n.a	4.7
20	Pulau Burung	n.a	26,958	21,585	n.a	-2.0
	Kab. Indragiri Hilir	477,168	555,701	662,305	1.7	1.9

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2012 - 2016)

Kondisi lebih rendahnya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir karena Kabupaten Indragiri Hilir “belum” menjadi ‘sasaran’ migrasi penduduk luar Provinsi Riau. Dimasa yang akan datang dengan semakin berkembangnya perekonomian dan khususnya industri kelapa sawit dan kelapa, akan menarik migrasi penduduk ke Indragiri Hilir. Fenomena ini terlihat dari laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kemuning selama periode 2000 - 2010 yaitu sebesar 16,26%. Kecamatan-kecamatan yang relatif kurang bergerak perekonomiannya cenderung bermigrasi penduduknya sehingga laju pertumbuhan penduduk minus. Kecamatan-kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan minus selama periode 2000 - 2010 adalah kecamatan Pulau Burung (-1,99%), Mandah (-1,1%), Sungai Batang (0,6%), Tanah Merah (-0,56%) dan Kuala Indragiri (-0,26%).

Tabel 2.6.

Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Orang)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Keritang	64.205	64.380	65.194	66.017	66.823
2	Kemuning	31.289	31.691	32.290	32.946	33.643
3	Reteh	44.038	44.084	44.598	12.629	45.601
4	Sungai Batang	12.336	12.349	12.490	35.274	12.763
5	Enok	34.402	34.464	37.870	31.812	35.664

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Orang)				
		2013	2014	2015	2016	2017
6	Tanah Merah	31.156	31.108	31.462	20.010	32.147
7	Kuala Indragiri	19.514	19.558	19.785	13.817	20.226
8	Concong	13.407	13.473	13.644	13.817	13.988
9	Tembilahan	72.769	73.092	74.087	75.108	76.122
10	Tembilahan Hulu	44.709	44.967	45.604	46.262	46.921
11	Tempuling	30.889	31.010	31.403	31.799	32.187
12	Kempas	34.138	34.317	34.781	35.255	35.725
13	Batang Tuaka	27.561	27.710	28.068	28.431	28.787
14	Gaung Anak Serka	22.220	22.203	22.465	22.726	22.977
15	Gaung	40.278	40.392	40.893	41.396	41.886
16	Mandah	40.015	39.844	40.284	40.716	41.127
17	Kateman	45.862	46.093	46.734	47.393	48.051
18	Pelangiran	44.158	44.478	45.205	45.979	46.777
19	Teluk Belengkong	16.894	16.993	17.235	17.485	17.735
20	Pulau Burung	22.441	22.408	22.642	22.870	23.084
	Kab. Indragiri Hilir	692.614	604.614	703.734	713.034	722.234

Sumber: Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Selama periode 2013 - 2017, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir meningkat yaitu dari 692.614 orang menjadi 722.234 orang dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,84% per tahun. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir ini lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau pada periode yang sama yang masing-masingnya 1,65% per tahun, 4,14% per tahun dan 1,99% per tahun.

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir menurut kelompok umur menunjukkan bahwa sekitar 67,61% terkategori umur produktif dan 32,39% terkategori tidak produktif. Hal yang mendapat perhatian adalah bahwa Kabupaten Indragiri Hilir sudah mulai mendapat 'baby boom' yang ditunjukkan dari porsi penduduk usia muda (0 - 14 tahun) yang saat ini sedang sekolah yaitu sebesar 29,05%. Oleh karena itu, penguatan program keluarga berencana, pendidikan, kesehatan dan pembukaan kesempatan bekerja dan berusaha harus lebih mendapat perhatian lebih dalam pembangunan ke depan

Tabel 2.7.  
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017

No	Kelompok Umur	Penduduk		
		Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4	34.975	33.711	68.686
2	5 - 9	35.558	34.549	70.107
3	10 - 14	34.817	33.886	68.703
4	15 - 19	33.182	31.737	64.919
5	20 - 24	31.223	29.610	60.833
6	25 - 29	32.137	30.954	63.091
7	30 - 34	30.041	29.773	59.814
8	35 - 40	29.461	28.871	58.332
9	40 - 44	26.917	25.037	51.954
10	45 - 49	22.283	20.758	43.041
11	50 - 54	19.231	17.279	36.510
12	55 - 59	14.244	12.585	26.829
13	60 - 64	12.530	10.420	22.950
14	65+	14.004	12.461	26.465
Jumlah		370.603	351.631	722.234

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2018)

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari 3 fokus yaitu (i) fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (ii) fokus kesejahteraan sosial dan (iii) fokus seni budaya dan olahraga.

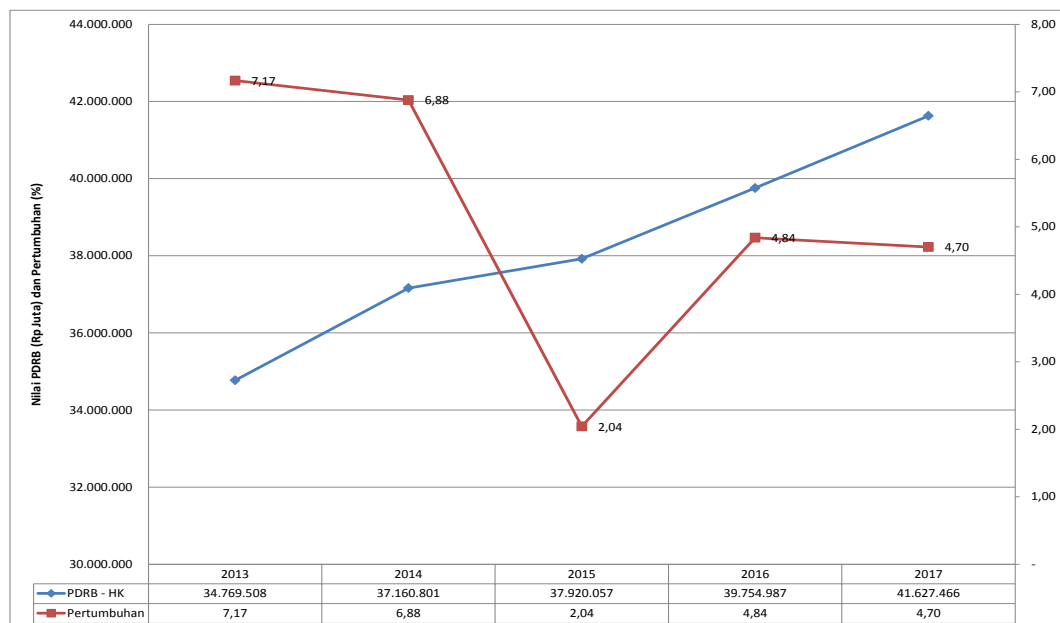
### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menggunakan indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita harga konstan tahun 2010, indeks ketimpangan Williamson, jumlah penduduk miskin dan kemiskinan.



**2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB**

Selama periode 2012 - 2016, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seri 2010 Kabupaten Indragiri Hilir atas dasar harga konstan dengan trend meningkat. Namun pertumbuhan PDRB ini memiliki tren berfluktuatif menurun. Penurunan pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya pada tahun 2014 dan 2015 erat kaitannya dengan kelembaban ekonomi dunia, diperparah oleh bencana alam kebakaran hutan dan lahan yang diikuti kabut asap sehingga aktifitas ekonomi masyarakat menjadi terhambat dan menurun.

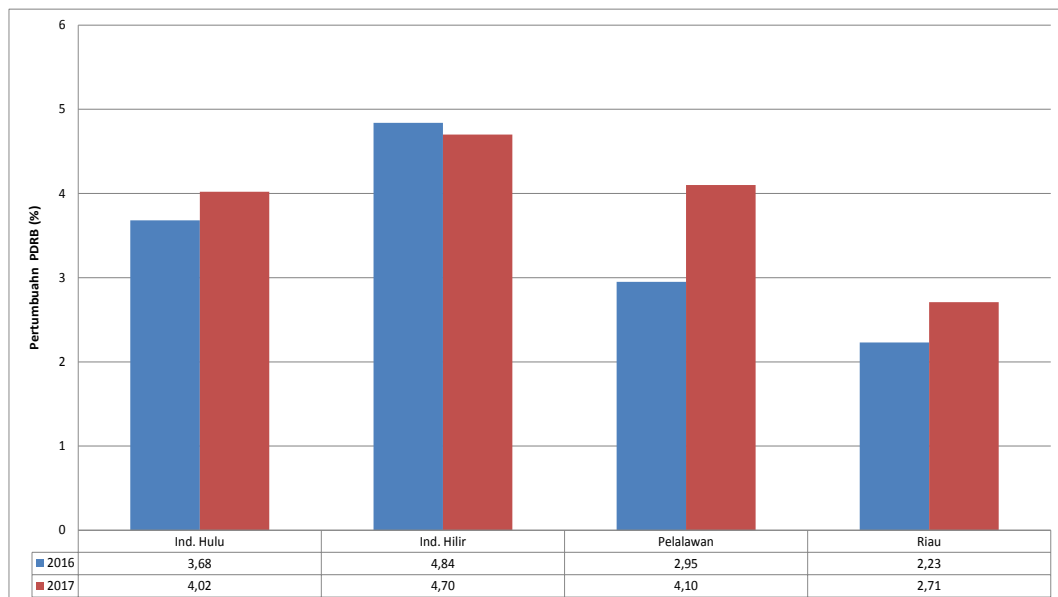


Sumber: Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.3.  
Perkembangan Nilai Pertumbuhan PDRB Harga Konstan  
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2017

Pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir yang berfluktuatif menurun, kondisinya relatif lebih baik dibanding Kabupaten tetangga. Pada tahun 2016 - 2017, pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir lebih baik dibanding Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau. Pada tahun 2017, capaian pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir mengalami penurunan dari 4,84% menjadi 4,70%, terbalik

dibanding pertumbuhan kabupaten tetangga dan Provinsi Riau yang meningkat meski tingkat pertumbuhan Indragiri Hilir tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Indragiri Hulu, Pelalawan dan Provinsi Riau. Penurunan pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir didorong oleh penurunan pertumbuhan sektor pertanian dan industri pengolahan sehingga menurunkan juga pertumbuhan sektor jasa pendidikan dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pada tahun 2018, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir akan lebih rendah dibanding tahun 2017, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,50%, lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 5,14 - 5,21%.



Sumber: BPS Prov. Riau (Provinsi Riau Dalam Angka, 2018)

Gambar 2.4.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan dan Provinsi Riau Tahun 2016 - 2017

Selama periode 2012 - 2017, Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Indragiri Hilir terbesar adalah lapangan pertanian diikuti industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan konstruksi. Lapangan usaha pertanian memberikan kontribusi terbesar, trend kontribusinya semakin menurun yaitu dari 48,21% pada tahun 2012 menjadi 46,53% pada tahun 2017. Meski kontribusi lapangan usaha pertanian

cenderung menurun namun kontribusi pertanian yang besar telah menyakinkan semua pihak bahwa Pertanian adalah sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Penurunan kontribusi lapangan usaha pertanian diimbangi dengan meningkatnya trend kontribusi industri pengolahan yaitu dari 26,74% pada tahun 2012 meingkat menjadi 27,28 pada tahun 2017. Kondisi ini menggambarkan telah mulai terjadi transformasi ekonomi di kabupaten Indragiri Hilir dari pertanian ke industri.

Tabel 2.8.

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012–2017

LAPANGAN USAHA/INDUSTRI		2012	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	48,21	47,08	47,47	46,82	46,88	46,53
B	Pertambangan dan Penggalian	0,46	0,81	0,81	0,62	0,60	0,82
C	Industri Pengolahan	26,74	27,70	27,34	27,64	27,51	27,28
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02
F	Konstruksi	4,68	4,69	4,71	4,90	4,96	5,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,53	13,32	13,29	13,46	13,49	13,80
H	Transportasi dan Pergudangan	0,98	1,00	1,02	1,05	1,07	1,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,46
J	Informasi dan Komunikasi	0,56	0,58	0,58	0,62	0,62	0,63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,61	0,62	0,65	0,61	0,62	0,57
L	Real Estat	0,74	0,74	0,74	0,78	0,79	0,81
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,03	1,99	1,90	1,98	1,89	1,83
P	Jasa Pendidikan	0,47	0,46	0,47	0,49	0,50	0,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,12	0,12	0,12	0,13	0,14	0,13
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,38	0,39	0,40	0,40	0,41	0,43
	Produk Domestik Regional Bruto /Gross Regional Domestic Product	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2018)

Selama periode 2012 - 2016, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dan kontruksi yang merupakan lapangan usaha terbesar ketiga

dan keempat pembentuk produk domestik regional bruto indragiri hilir. Relatif terbatasnya sumber-sumber lapangan usaha yang hanya mengandalkan pertanian; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran; dan konstruksi maka dipandang perlu upaya-upaya mengerakkan lapangan usaha potensial yang belum tersentuh dengan baik sehingga mampu memberikan kontribusi yang semakin besar dalam pembentukan PBRB Kabupaten Indragiri Hilir.

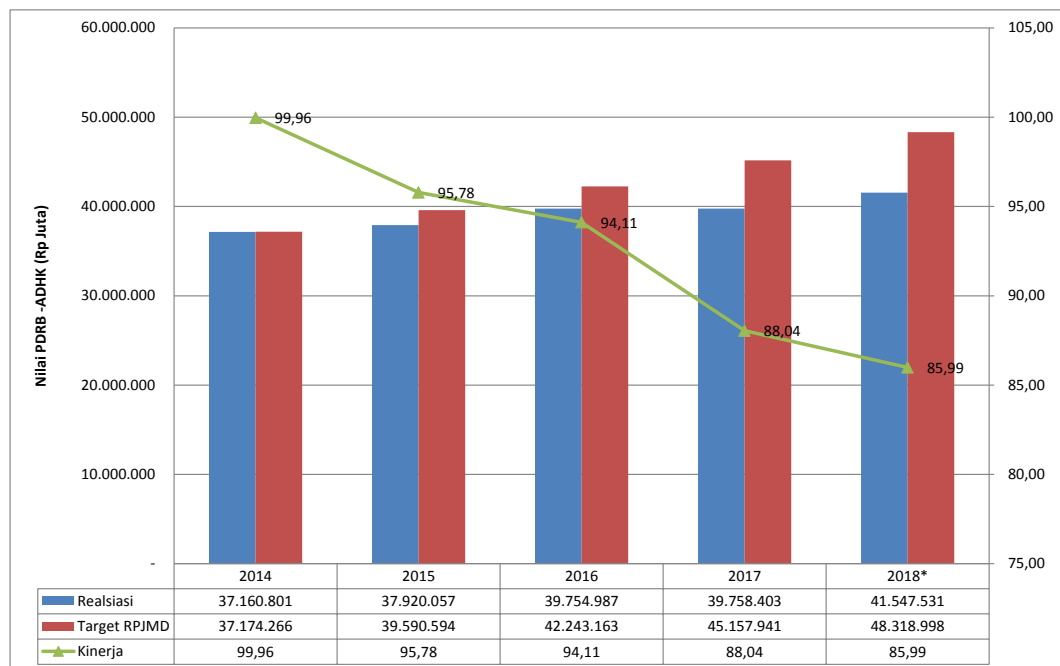
Tabel 2.9.  
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2017

LAPANGAN USAHA/INDUSTRI		2012	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,51	4,65	7,76	0,65	4,99	3,92
B	Pertambangan dan Penggalian	7,59	90,50	6,46	(21,36)	1,39	43,54
C	Industri Pengolahan	12,46	11,04	5,48	3,17	4,33	3,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,77	5,03	7,62	6,32	13,84	4,33
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,33	0,34	0,72	2,82	1,38	15,71
F	Konstruksi	7,71	7,28	7,50	5,95	6,26	6,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,40	5,48	6,68	3,30	5,10	7,12
H	Transportasi dan Pergudangan	9,38	9,23	8,53	5,03	6,58	5,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,73	7,90	7,08	3,22	5,31	6,79
J	Informasi dan Komunikasi	16,75	12,09	5,77	8,94	6,07	6,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	17,66	7,53	13,46	(5,38)	6,46	(2,87)
L	Real Estat	7,37	7,78	6,37	8,52	6,30	6,74
M,N	Jasa Perusahaan	7,10	7,45	7,64	6,46	6,47	6,96
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,78	4,98	2,26	6,11	0,37	1,46
P	Jasa Pendidikan	5,98	6,70	7,61	6,63	6,49	3,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,24	7,96	8,73	10,03	7,90	0,92
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,19	10,00	10,04	3,49	7,00	9,21
	Produk Domestik Regional Bruto /Gross Regional Domestic Product	7,91	7,17	6,88	2,04	4,84	4,70

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2018)

Lapangan usaha yang perlu mendapat perhatian untuk didorong agar dapat memberikan kontribusi yang besar pada produk domestik regional bruto dapat dilihat dari pertumbuhannya yang tinggi dari rata-

rata pertumbuhan lapangan usaha lainnya. Pada tahun 2017, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (43,54%), Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang (15,71%), Perdagangan besar dan eceran (7,12%), Jasa perusahaan (6,96%), Penyediaan akomodasi dan makan minum (6,79%), Real estate (6,74%), konstruksi (6,66%), Informasi dan komunikasi (6,57%) dan Transportasi dan pergudangan (5,70%) adalah sektor perlu mendapat perhatian. Namun demikian, sektor pertanian dan industri pengolahan tetap menjadi prioritas utama.



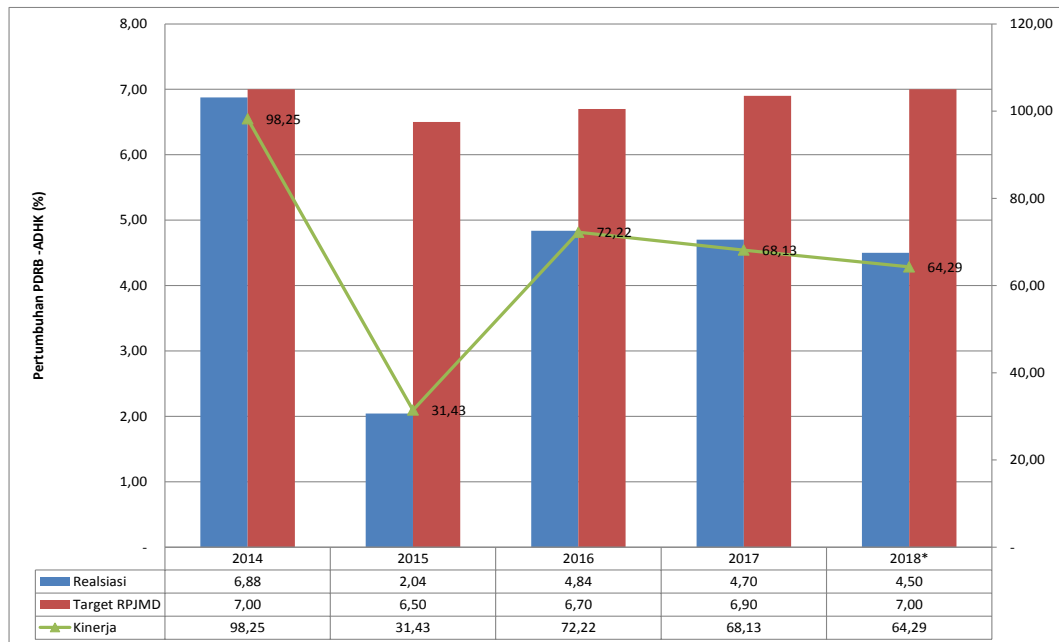
Keterangan: \* = data estimasi

Gambar 2.5.

### Kinerja Indikator Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2018 telah ditargetkan bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 sebesar Rp 37.174.266 (juta) pada tahun 2014, meningkat menjadi Rp 48.318.997 (juta) pada tahun 2018. Realisasi nilai PDRB tahun 2014 sebesar Rp 37.160.180 (juta) dan diperkirakan pada tahun 2018 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,50% maka nilai PDRB-nya 2018 Rp

43.500.702 (juta). Realisasi kinerja selama periode 2014 - 2017 berkisar antara 92,18% - 99,96% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2018, capaian realisasi kinerja diperkirakan sebesar 90,03% yang termasuk dalam kriteria Tinggi. Selama periode 2014 - 2018, rata-rata kinerja indikator nilai PDRB atas dasar harga kosntan sebesar 95,34 yang terkategori Sangat Baik.



Keterangan: \* = data estimasi

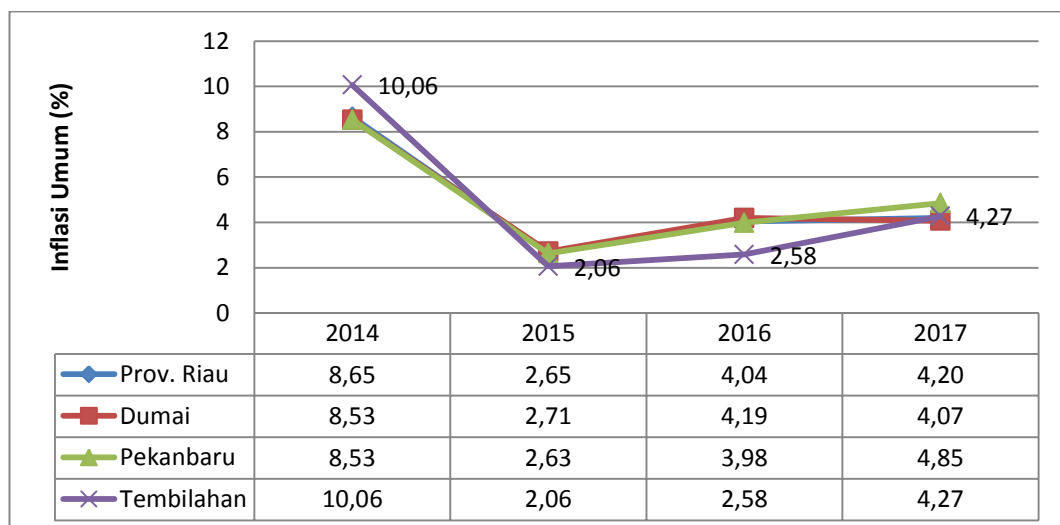
Gambar 2.6.  
Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan  
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

Dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018, pertumbuhan PDRB atas dasar harga kontan ditarget berkisar antara 6,50% hingga 7,00%. Pada tahun 2014, realisasi pertumbuhan PDRB Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 6,88% dengan realisasi kinerja sebesar 98,25% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2015 - 2017, realisasi pertumbuhan PDRB Indragiri Hilir berkisar antara 2,04% - 4,70% dengan realisasi kinerja sebesar 31,43% - 72,22% yang terkategori rendah - Sedang. Pada tahun 2018, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir sebesar 4,50% sehingga capaian kinerja terkategori Rendah. Selama periode 2014 - 2018,

rata-rata kinerja pertumbuhan PDRB Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 66,86 yang terkategori sedang.

### 2.2.1.2. Inflasi

Selama periode 2014 - 2018, inflasi di Tembilahan - Indragiri Hilir berada terkategori inflasi ringan, kecuali tahun 2014 yang terkategori inflasi sedang. Bila dibandingkan daerah lain, secara umum inflasi di Tembilahan relatif lebih rendah. Pada tahun 2014, yang merupakan inflasi tertinggi pada periode ini, dimana andil inflasi menurut kelompok pengeluaran terbesar adalah kelompok pengeluaran bahan makanan (15,64%) diikuti transportasi, komunikasi dan jasa keuangan (10,97%) dan perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (9,14%). Pada tahun 2017, andil inflasi menurut kelompok pengeluaran terbesar adalah kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar memberi andil sebesar 2,84% diikuti pendidikan, rekreasi dan olahraga (0,38%) dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (0,32%). Oleh karena itu, untuk lebih menjaga agar inflasi di Indragiri Hilir tetap rendah dengan kategori inflasi ringan maka kelompok pengeluaran bahan makanan; transportasi, komunikasi dan jasa keuangan dan perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar perlu menjadi perhatian khususnya dalam hal kelancaran distribusinya.

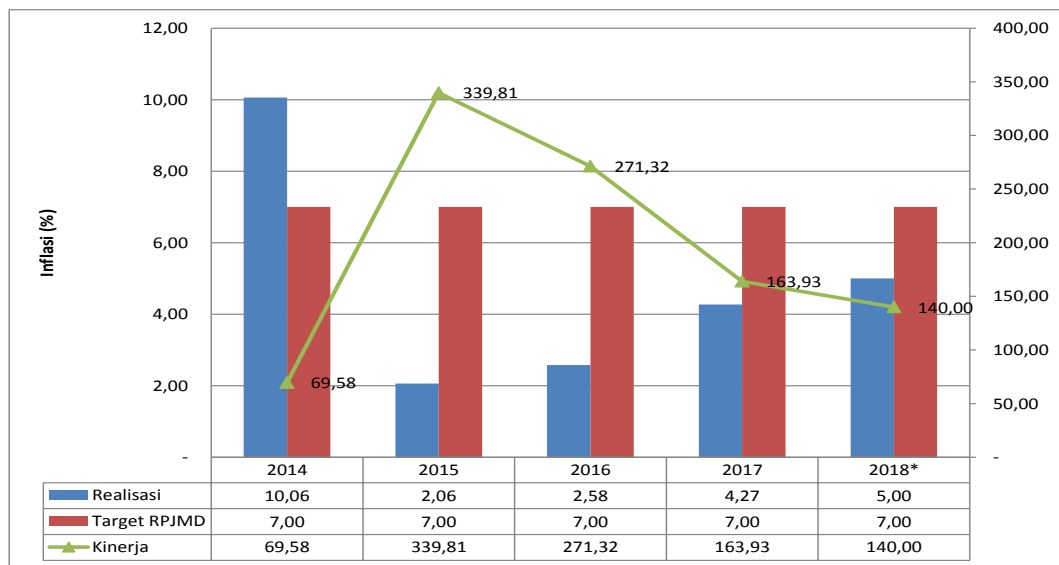


Sumber: Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.7.

Perkembangan Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir, Pekanbaru, Dumai dan Riau Tahun 2014 - 2017

Pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2018 telah ditargetkan inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 7,0% yang masih terkategori inflasi ringan. Selama periode 2014 - 2017, inflasi di Indragiri Hilir berkisar antara 2,06% - 10,06% dan diestimasi pada tahun 2018 sebesar 5,0%. Selama periode 2014 - 2018, realisasi kinerja umumnya terkategori sangat tinggi kecuali tahun 2014 yang terkategori sedang.



Keterangan: \*= Data Estimasi

Gambar 2.8.

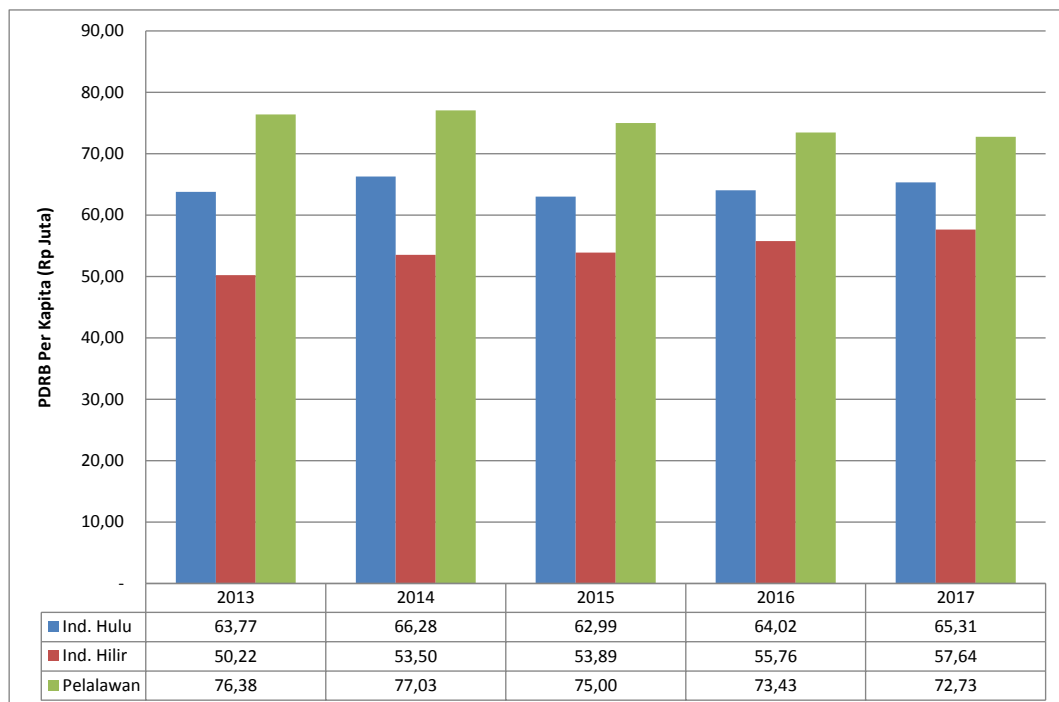
Kinerja Indikator Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2017

### 2.2.1.3. PDRB Per kapita

Selama periode 2013 - 2017, PDRB atas dasar harga konstan per kapita Kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend yang terus meningkat. Pada tahun 2013, PDRB per kapita sebesar Rp 50,22 juta per kapita/tahun meningkat menjadi Rp 57,64 juta per kapita/tahun pada tahun 2017. PDRB per kapita kabupaten Indragiri Hilir ini relatif lebih rendah dibanding PDRB per kapita Kabupaten Indragiri Hulu maupun PDRB per



kapita Kabupaten Pelalawan. Selama periode 2013 - 2017, meski nilai PDRB per kapita kabupaten Indragiri Hilir adalah yang terkecil namun memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi dibanding Indragiri Hulu maupun Pelalawan. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita meningkat sebesar 2,79% per tahun, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Indragiri Hulu yang hanya sebesar 0,48% per tahun dan Pelalawan yang pertumbuhannya - 0,97% per tahun..



Sumber: Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.9.  
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2013 - 2017

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditargetkan PDRB per kapita harga konstan tanpa migas tahun 2014 sebesar Rp 52,73 juta/kap/tahun, meningkat menjadi Rp 64,10 juta/kap/tahun. Realisasi PDRB per kapita tahun 2014 - 2016 berkisar antara Rp 53,52 juta/kap/tahun - Rp 55,75 juta/kap/tahun dan diperkirakan pada tahun 2017 dan 2018 masing-masingnya sebesar Rp

56,51 juta/kap/tahun dan Rp 57,29 juta/kap/tahun. Selama periode 2014 – 2018, realisasi kinerja PDRB per kapita terkategori tinggi hingga sangat tinggi.



Keterangan: \*= data Estimasi

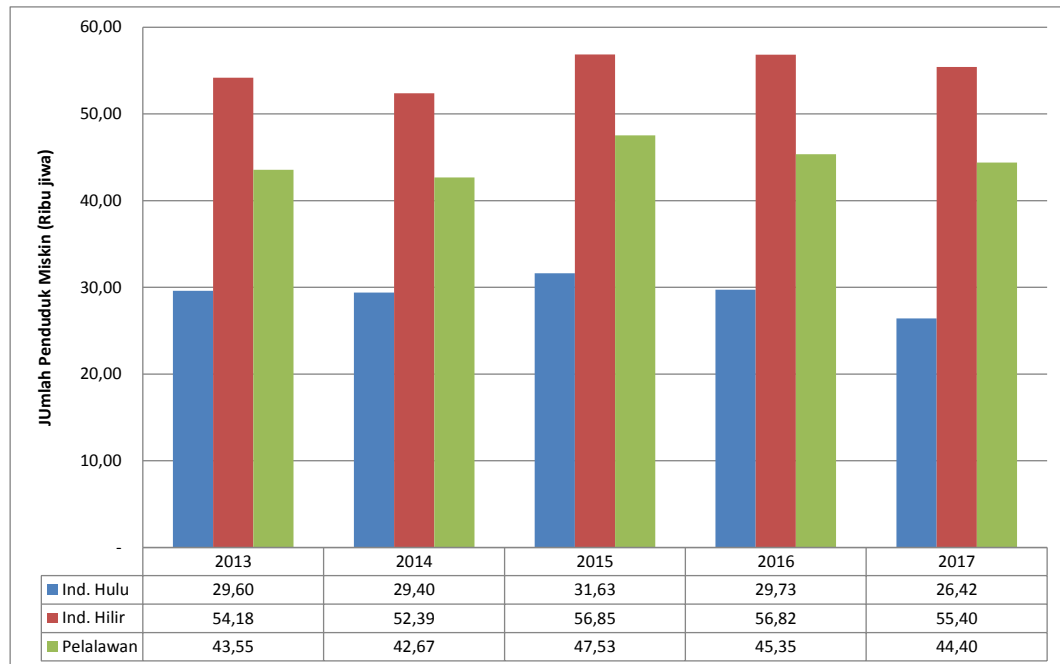
Gambar 2.10.

Kinerja Indikator PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

#### 2.2.1.4. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin Indragiri Hilir sebanyak 54,18 ribu jiwa, meningkat menjadi 56,85 ribu jiwa tahun 2015 dan sedikit menurun menjadi 55,40 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin Indragiri Hilir adalah yang tertinggi dibanding dengan jumlah penduduk miskin kabupaten sekitarnya. Selama periode 2014 – 2017, rata-rata pertumbuhan penduduk miskin Kabupaten Indragiri hilir meningkat sebesar 0,45% per tahun. Jumlah penduduk miskin yang mengalami peningkatan juga dialami Kabupaten Pelalawan. Disisi lain, jumlah penduduk miskin Kabupaten Indragiri Hulu, rata-rata menurun

pertumbuhannya yang yaitu sebesar -2,25% per tahun dan -1,64% per tahun



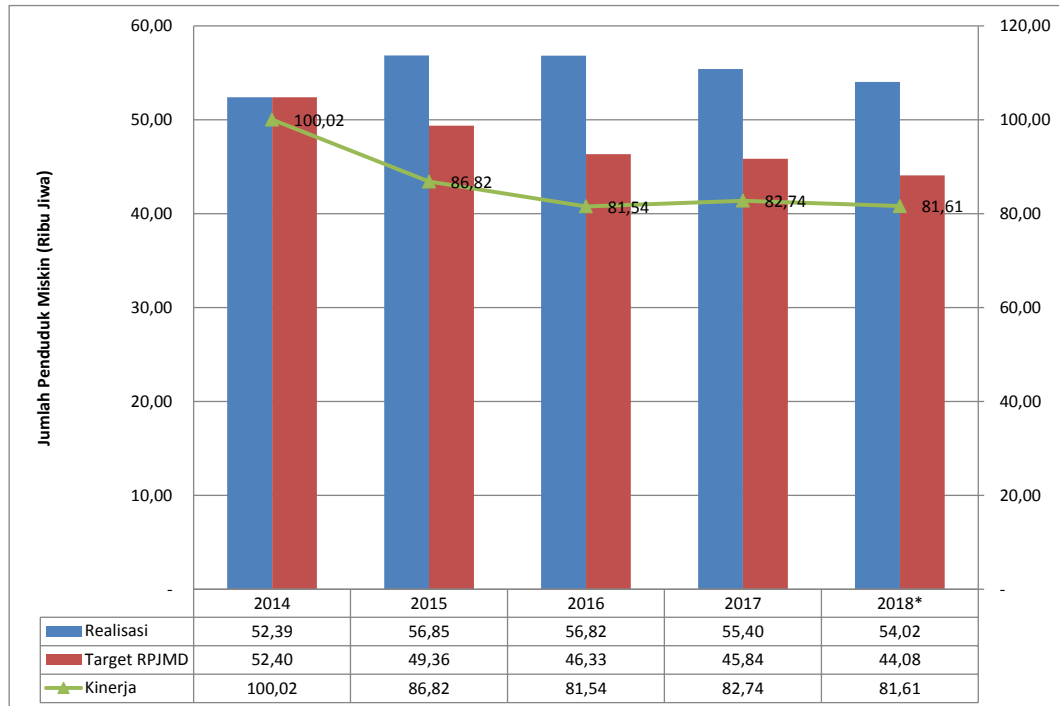
Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir ( Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2018)

Gambar 2.11.

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2013 - 2017

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditargetkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hilir menurun dari 52,40 ribu jiwa pada tahun 2014 menjadi 44,08 ribu jiwa. Selama periode 2014 - 2017, realisasi jumlah penduduk miskin Indragiri Hilir berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2014, jumlah penduduk miskin Indragiri Hilir berjumlah 54,18 ribu jiwa sehingga capaian kinerja terkategori sangat tinggi (100,02%). Periode selanjutnya 2015 - 2017, capaian kinerja menurun dengan kisaran antara 82,74% hingga 86,82% yang terkategori tinggi. Pada tahun 2018, diperkirakan jumlah penduduk miskin Indragiri Hilir menurun menjadi 54,02 ribu jiwa dengan capaian kinerja sebesar 81,61% yang terkategori tinggi. Jumlah penduduk miskin Indragiri Hilir tahun 2015 - 2017 yang cenderung meningkat sebagai

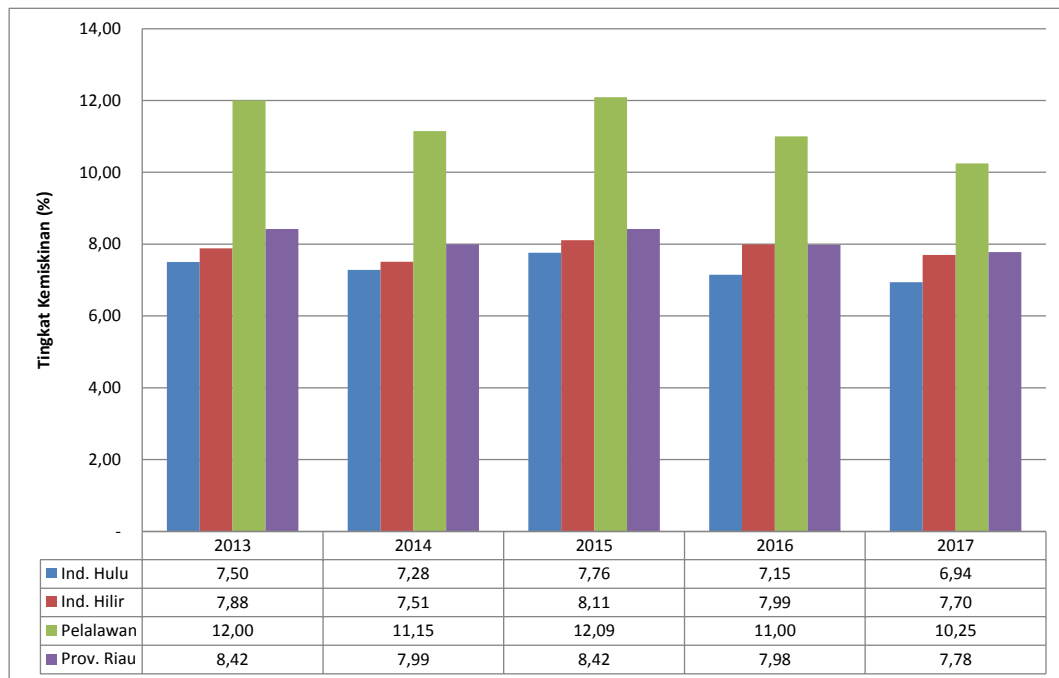
dampak dari kelembaban ekonomi yang diperparah oleh kebakaran hutan dan lahan, kabut asap serta kekeringan. Kondisi ini menjadikan geliat ekonomi masyarakat Indragiri Hilir terpengaruh tertekan.



Keterangan: \*= Data Estimasi

Gambar 2.12.  
Kinerja Indikator Jumlah penduduk Miskin Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

Bila jumlah penduduk miskin Kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif meningkat, persentase kemiskinan memiliki trend berfluktuatif menurun. Selama periode 2013 - 2017, jumlah penduduk miskin Indragiri Hilir yang tertinggi dibanding kabupaten sekitarnya, diikuti dengan laju penurunan pertumbuhan yang terendah dibanding rata-rata pertumbuhan penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Indragiri Hulu, Pelalawan dan Provinsi Riau. Rata-rata penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Indragiri Hulu selama periode ini sebesar -1,54% per tahun, Provinsi Riau sebesar -1,57% per tahun dan Kabupaten Pelalawan sebesar -3,10% per tahun.

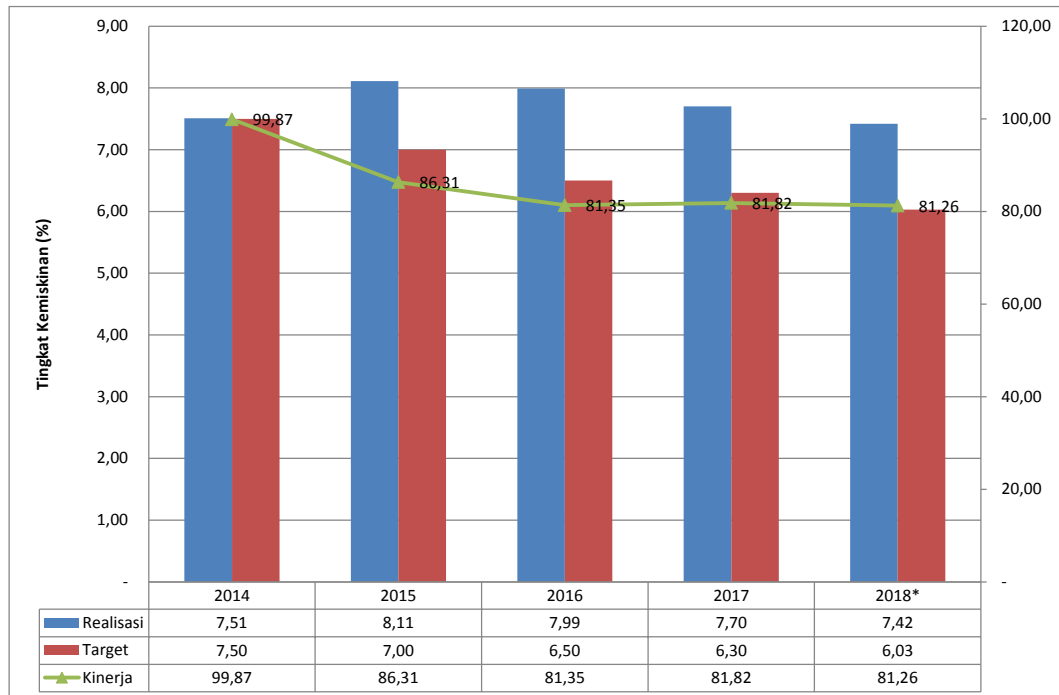


Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2018)

Gambar 2.13.

Perkembangan Persentase Kemiskinan di kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2013 – 2017

Sejalan dengan perkembangan realisasi jumlah penduduk miskin, dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 – 2018 telah ditargetkan persentase kemiskinan di Indragiri Hilir tahun 2014 sebesar 7,50% dan menurun menjadi 6,03% tahun pada tahun 2018. Realisasi persentase kemiskinan tahun 2014 sebesar 7,51%, sedikit lebih tinggi disbanding target sehingga realisasi kinerja sebesar 99,87% dan terkategori sangat tinggi. Pada periode 2015 – 2017, realisasi persentase kemiskinan meningkat disbanding tahun 2014 sehingga realisasi kinerja menurun dengan kisaran antara 81,82% - 86,31% dan terkategori tinggi. Pada tahun 2018, diperkirakan persentase kemiskinan di Indragiri Hilir sedikit menurun menjadi 7,42% sehingga capaian kinerja juga terkategori tinggi (81,26%).



Keterangan: \* = Data Estimasi

Gambar 2.14.  
Kinerja Indikator Tingkat Kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2014 - 2018

## 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus Kesejahteraan Sosial menganalisis melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, APK SD/MI, APK SMP/MTs, angka harapan hidup, prevalensi balita gizi buruk dan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

### 2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Selama periode 2012 - 2017, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend meningkat. Tahun 2013, IPM Indragiri Hilir sebesar 63,44 meningkat menjadi 66,17 pada tahun 2017. Posisi IPM Indragiri Hilir adalah yang terendah dibandingkan IPM Kabupaten tetangga dan Provinsi Riau. Keempat komponen pembentuk IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Per Kapita, semua

nilainya berada dibawah nilai kabupaten tetangga. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan IPM Indragiri Hilir meningkat sebesar 0,85% per tahun, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten tetangga namun masih dibawah rata-rata pertumbuhan IPM Provinsi Riau (0,95% per tahun).

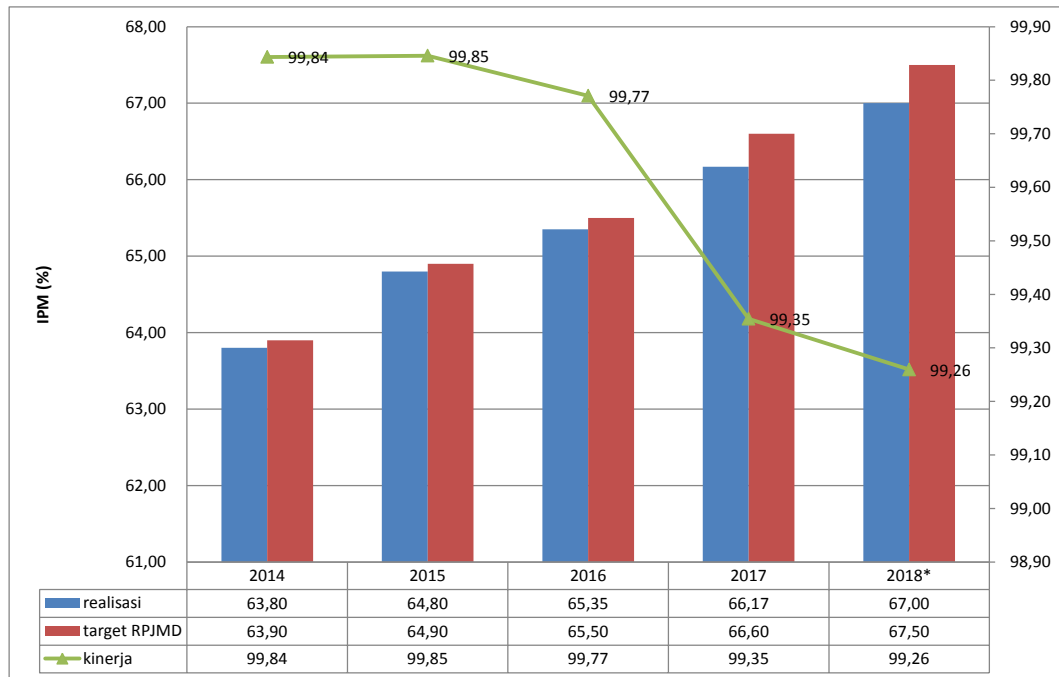


Sumber: Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.15.  
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2013 - 2017

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2018 telah ditargetkan capaian IPM yaitu sebesar 63,90 pada tahun 2014, meningkat menjadi 67,50 % pada tahun 2018. Selama periode 2014 - 2017, capaian IPM Indragiri Hilir mendekati target yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga realisasi kinerjanya berkisar antara 99,35% - 99,85% dan terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2018, diperkirakan capaian IPM Indragiri Hilir sebesar 67,00% sehingga kinerjanya sebesar 99,26% dan

terkategori Sangat Tinggi. Capaian kinerja IPK ini harus dilanjutkan pada periode pembangunan berikutnya.



Keterangan: \*= Data Estimasi

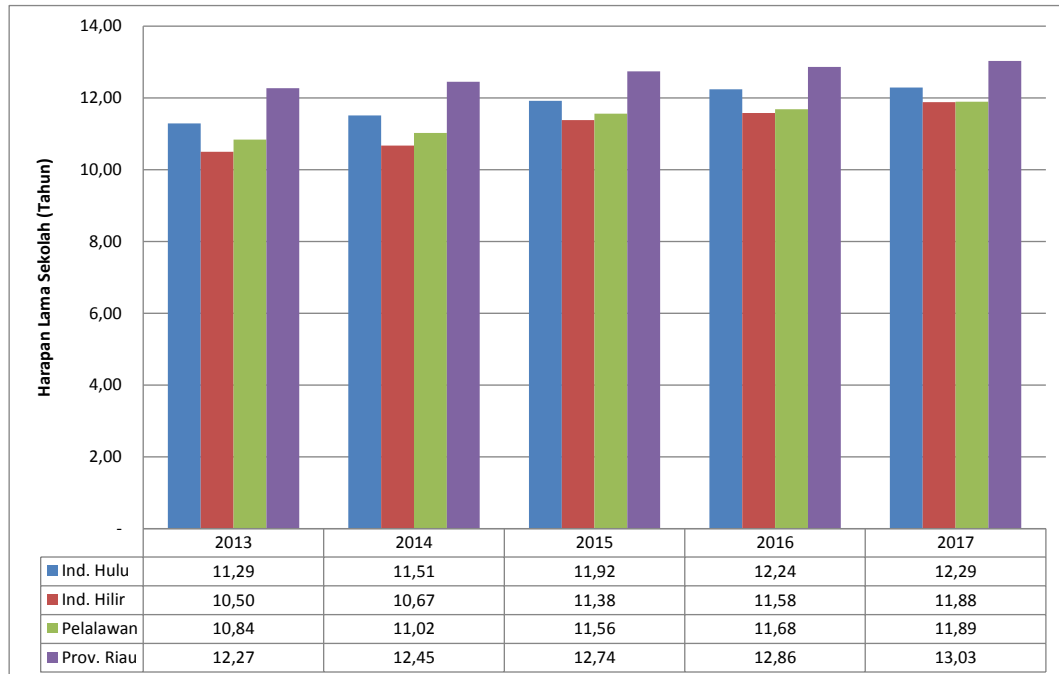
Gambar 2.16.  
Kinerja Indikator IPM Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

### 2.2.2.2. Harapan lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lama sekolah (tahun) yang diharapkan akan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang sehingga HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang. Selama periode 2013 - 2017, HLS Kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend meningkat yang menggambarkan bahwa kondisi pembangunan pendidikan di Indragiri Hilir terus meningkat. Namun bila dibandingkan dengan kondisi pembangunan pendidikan dengan kabupaten tetangga memperlihatkan bahwa kondisi pembangunan pendidikan di Indragiri Hilir adalah yang terendah sehingga perlu dilakukan percepatan dimasa yang akan datang. Selama periode 2013 - 2017, rata-rata pertumbuhan



HLS Kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 2,10% per tahun, tertinggi dibanding lebih tinggi rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Indragiri Hulu, Pelalawan dan Provinsi Riau.

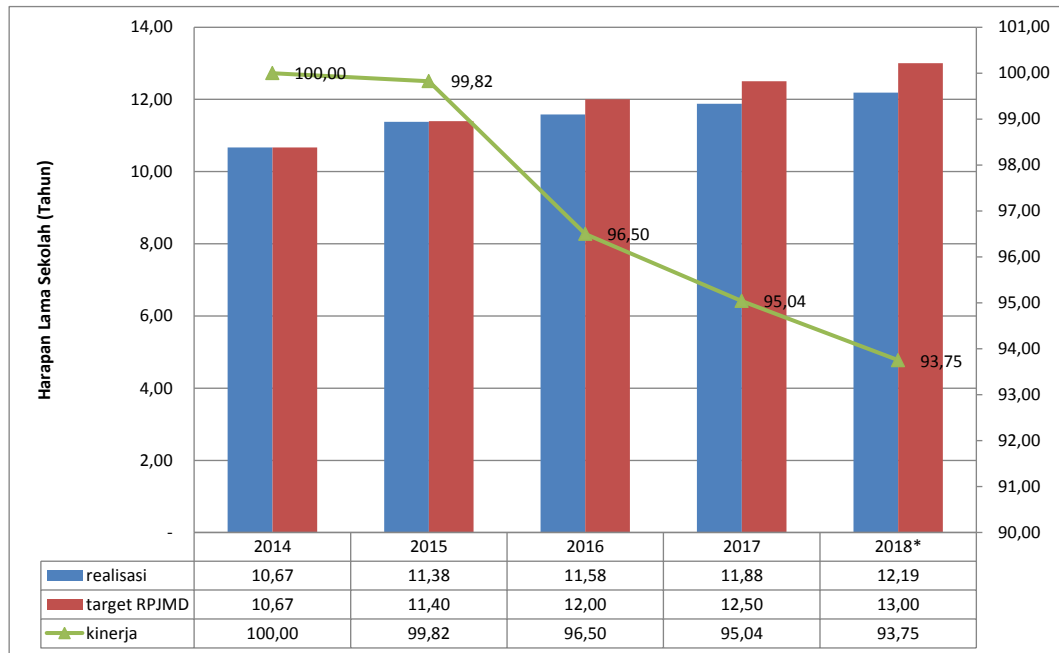


Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2018)

Gambar 2.17.

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2013 – 2017

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditargetkan HLS dengan trend meningkat dari 10,67 tahun pada tahun 2014 menjadi 13 tahun pada tahun 2018. Realisasi HLS trendnya meningkat meski dengan slope yang lebih rendah dibanding slope target. Ditambah dengan target yang terus meningkat maka capaian kinerja menurun dari 100% pada tahun 2014 dengan kategori sangat tinggi menurun capaian kinerjanya menjadi 96,50 tahun dan 99,82% - 95,04% yang kategorinya masih sangat tinggi pada periode 2015 – 2017. Pada tahun 2018 diperkirakan capaian kinerjanya sebesar 93,75% dengan kategori masih sangat tinggi. Capaian kinerja HLS yang terus menurun perlu mendapat perhatian untuk senantiasa ditingkatkan.

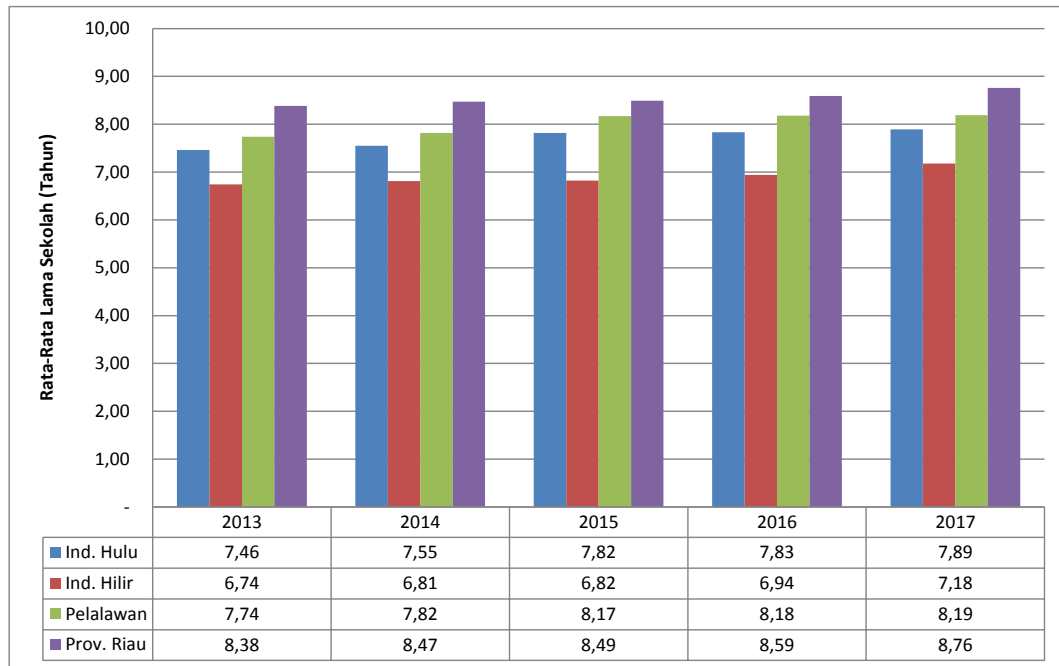


Keterangan: \*= Data Estimasi

Gambar 2.18.  
Kinerja Indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2014 - 2018

### 2.2.2.3. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Selama periode 2014 - 2017, RLS kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend meningkat meski dengan slope yang hampir datar. Posisi RLS kabupaten Indragiri Hilir kembali menjadi yang terendah dibandingkan dengan RLS kabupaten sekitarnya sehingga kondisi ini perlu dilakukan percepatan dalam pembangunan periode berikutnya. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan RLS kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 1,27% per tahun, tertinggi dibanding rata-rata pertumbuhannya RLS Kabupaten Pelalawan (1,14% per tahun), Kabupaten Indragiri Hulu (1,13% per tahun) dan Provinsi Riau (0,89% per tahun).

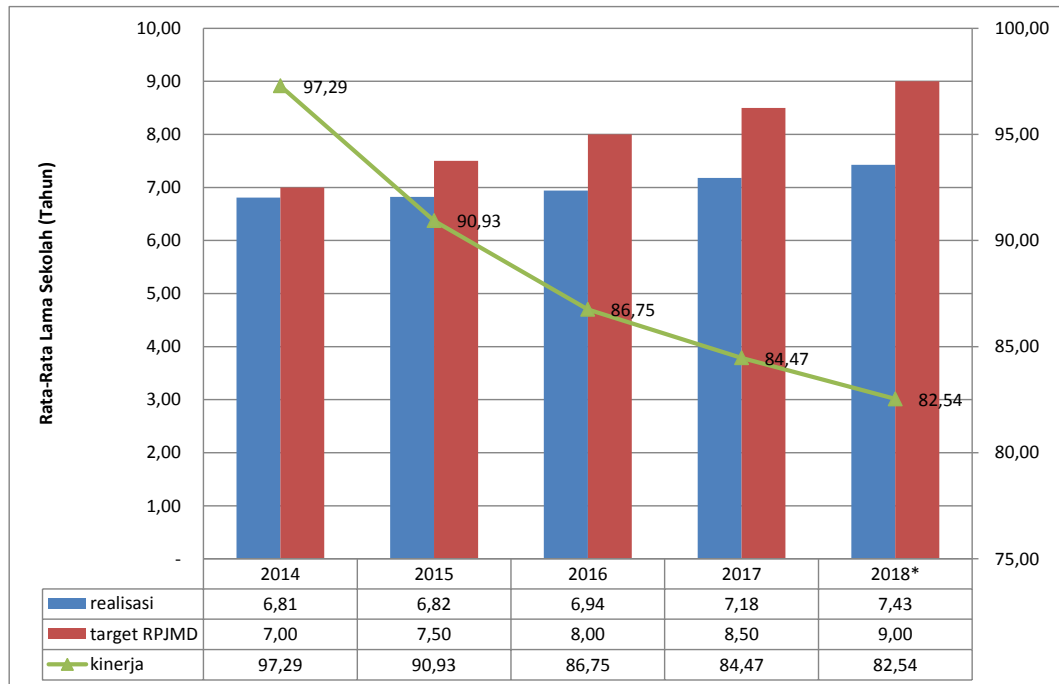


Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2018)

Gambar 2.19.

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2013 – 2017

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 – 2018 telah ditargetkan bahwa RLS terus meningkat dari 7,00 tahun pada tahun 2014 menjadi 9,00 pada tahun 2018. Realisasi RLS meningkat dari 6,81 tahun pada tahun 2014 menjadi 7,18 tahun pada tahun 2017 dan diperkirakan capaiannya menjadi 7,43 tahun 2018. Capaian RLS tahun 2018 ini masih dibawah Wajib Belajar 9 tahun. Capaian kinerja RLS kabupaten Indragiri Hilir trendnya terus menurun. Pada tahun 2014, realisasi kinerja sebesar 97,29% yang terkategori sangat tinggi. Namun pada periode 2015 – 2017, realisasi kinerjanya berkisar antara 84,47% - 90,93% dengan kategori tinggi. Pada tahun 2018, realisasi kinerja diperkirakan sebesar 82,54% yang masih terkategori tinggi. Relatif rendahnya RLS dan masih dibawah wajib belajar 9 tahun, harus menjadi perhatian dan prioritas pada pembangunan periode berikutnya.



Keterangan: \* = DaTAEstimasi

Gambar 2.20.

Kinerja Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

#### 2.2.2.4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK yang dibahas terdiri dari APK SD/MI dan APK SMP/MTs

##### a. APK SD/MI

Selama periode 2013 - 2017, APK SD/MI kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend menurun. Pada tahun 2013, APK SD/MI indragiri Hilir sebesar 109,41% menurun menjadi 109,56% tahun 2015 dan menurun lagi menjadi 101,73% pada tahun 2017. Capaian APK SD/MI Indragiri Hilir adalah yang terendah dibandingkan capaian APK SD/MI kabupaten sekitarnya dan Provinsi Riau. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan APK SD/MI menurun sebesar 1,45% per tahun. Penurunan rata-rata pertumbuhan APK SD/MI kabupaten Indragiri Hilir adalah yang

tertinggi setelah Kabupaten Indragiri Hulu (-1,87% per tahun). Rata-rata pertumbuhan APK SD/MI Kabupaten Pelalawan sebesar -1,11 dan Provinsi Riau sebesar -0,76%.



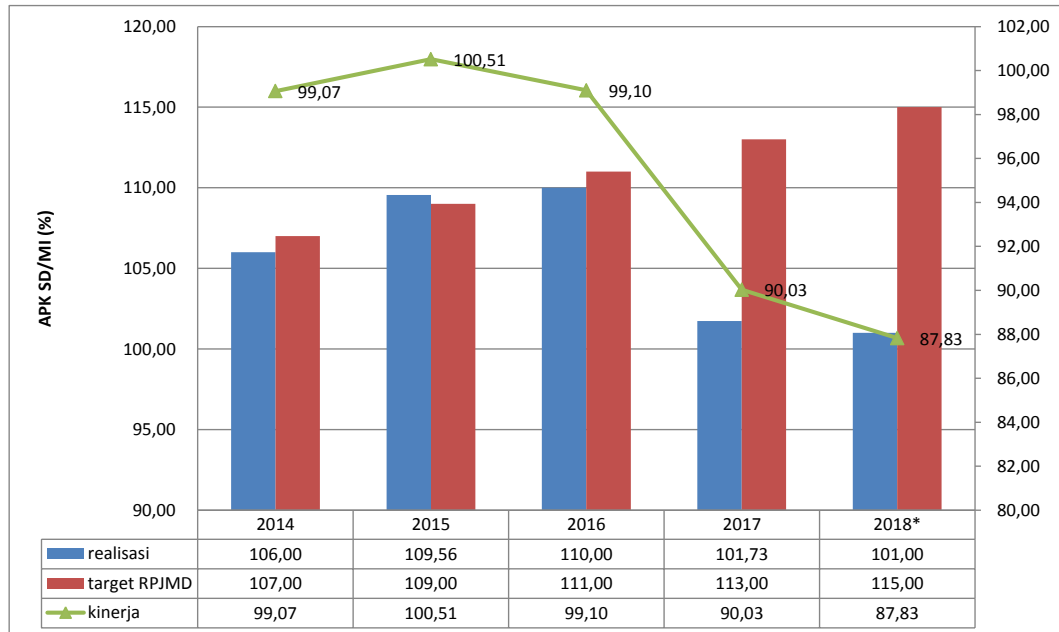
Sumber: Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan (2014 – 2017) dan <https://riau.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html#subjekViewTab3>

Gambar 2.21.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2013 – 2017

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditargetkan bahwa APK SD/MI kabupaten Indragiri Hilir pada periode 2014 – 2018, trendnya terus meningkat dari 107% pada tahun 2014 menjadi 115% pada tahun 2018. Realisasi APK SD SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir terus menurun sehingga realisasi kinerja menjadi turun. Pada tahun 2014 – 2016, realisasi kinerja menurun dari 99,07% menjadi 90,10% terkategori sangat tinggi. Pada tahun 2017, realisasi kinerja menurun sebagai konsekwensi menurunnya capaian APKSD/SM dan meningkatnya target sehingga capaian kinerja menjadi turun menjadi

90,03% yang terkategori capaian kinerja Tinggi. Pada tahun 2018, diperkirakan capaian APK SD/MI kembali menurun sehingga capaian kinerja juga turun menjadi 87,83, yang terkategori Tinggi.



Sumber : Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

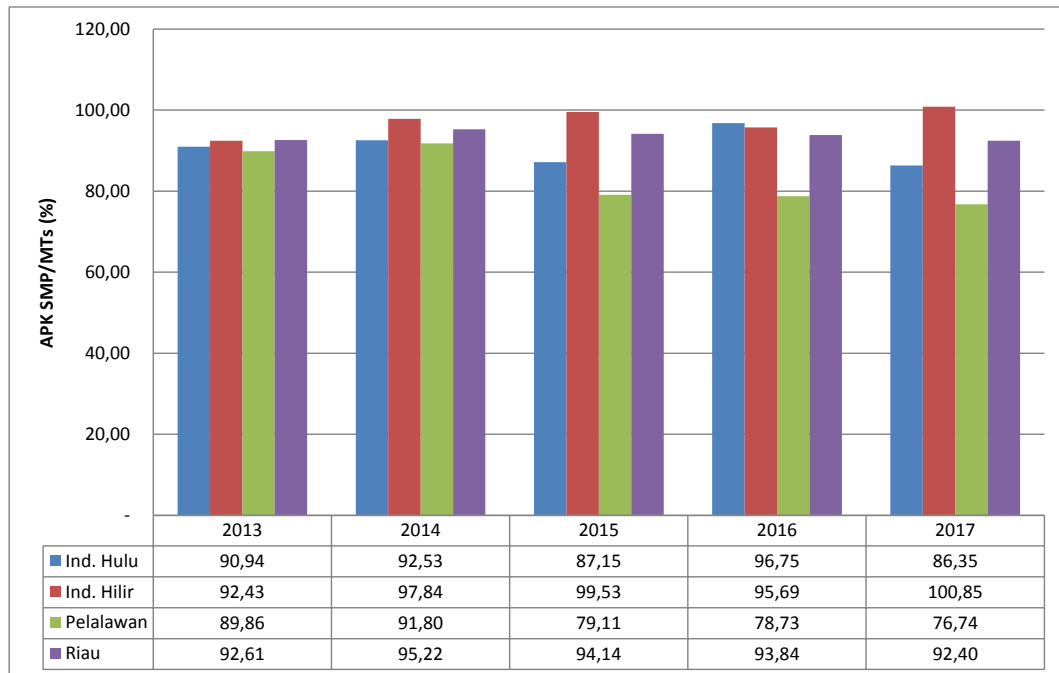
Keterangan: \*= Data Estimasi

Gambar 2.22.  
Kinerja Indikator APK SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2014 - 2018

#### b. APK SMP/MTs

Selama periode 2013 - 2017, APK SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir trendnya meningkat yaitu dari 92,43% pada tahun 2013 menjadi 100,85% pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan capaian APK SD/SMP, maka capaian APK SMP/MTs relatif lebih rendah. Hal yang menonjol dibanding indikator-indikator sebelumnya, indikator APK SMP/MTs inilah yang nilainya lebih tinggi dibanding semua kabupaten sekitarnya bahkan juga dengan Provinsi Riau. Selama periode 2013 - 2016, rata-rata pertumbuhan APK SMP/MTs Indragiri Hilir meningkat 1,76% per tahun. Capaian rata-rata pertumbuhan APK SMP/MTs Indragiri Hilir (1,76% per tahun) adalah yang tertinggi dibanding capaian

APK SMP/MTs Indragiri Hulu dan Pelalawan serta Provinsi Riau dengan rata-rata pertumbuhan menurun.

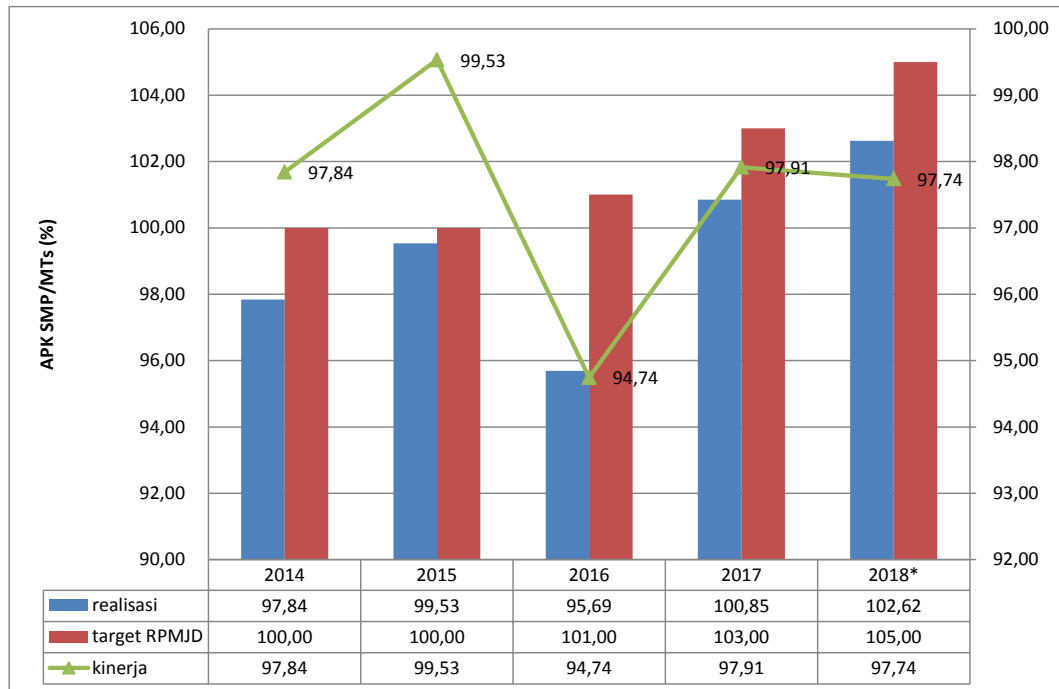


Sumber: Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan (2014 – 2017) dan <https://riau.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html#subjekViewTab3>

Gambar 2.23.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2013 – 2017

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan APK SMP/MTs trendnya meningkat dari 100% pada tahun 2014 menjadi 105% pada tahun 2018. Realisasi capaian APK SMP/MTs Indragiri Hilir trendnya berfluktuatif meningkat. Selama periode 2014 – 2017, realisasi kinerja APK SMP/MTs bekisar antara 94,74% – 99,53% yang semua capaian terkategori sangat tinggi. Pada tahun 2018, diperkirakan capaian APK SMP/MTs sebesar 100,91 dengan capaian kinerja sebesar 97,74% dan terkategori sangat tinggi. Capaian kinerja SMP/MTs perlu dipertahankan dan bahkan ditingkat pada pembangunan periode berikut agar upaya pencapaian wajib belajar 9 tahun dan rata-rata lama sekolah pada IPM terus meningkat sehingga IPM Kabupaten Indragiri Hilir naik lebih tinggi lagi.



Sumber : Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Keterangan: \*= Data Estimasi

Gambar 2.24.  
Kinerja Indikator APK SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2014 - 2018

#### 2.2.2.5. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat dan merupakan salah satu komponen pembentuk IPM. Selama periode 2013 - 2017, AHH kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend meningkat yaitu dari 66,50 tahun pada tahun 2013 menjadi 67,07 tahun pada tahun 2017. Capaian AHH kabupaten Indragiri Hilir ini adalah yang terendah dibanding capaian AHH Kabupaten Indragiri Hulu dan Pelalawan serta Provinsi Riau. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan AHH kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 0,17% per tahun, tertinggi dibanding rata-rata pertumbuhan AHH Kabupaten Indragiri Hulu dan Pelalawan serta Provinsi Riau. Posisi AHH kabupaten Indragiri Hilir yang terendah



dibanding capaian AHH kabupaten sekitarnya perlu menjadi dorongan untuk dilakukan percepatan pada pembangunan bidang kesehatan pada periode berikutnya.



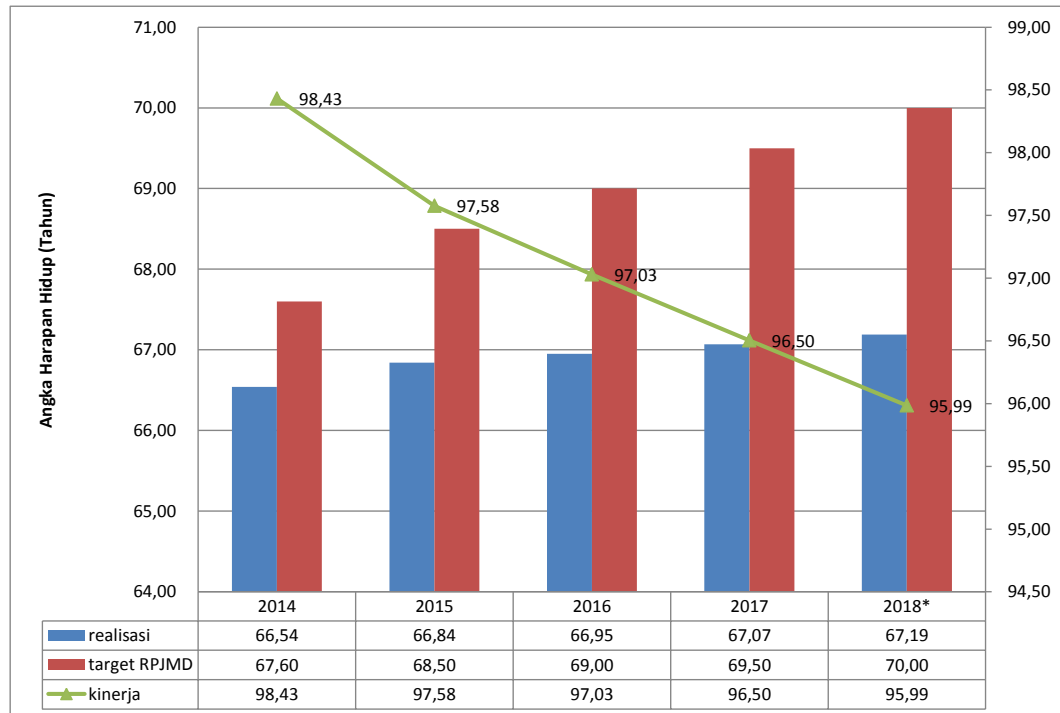
Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2018)

Gambar 2.25.

Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2013 - 2017

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2014 - 2018 telah ditetapkan AHH dengan trend meningkat yaitu dari 67,60 tahun pada tahun 2014 menjadi 70 tahun pada tahun 2018. Meski realisasi capaian AHH terus meningkat yaitu dari 66,54 tahun pada tahun 2014 menjadi 67,19 tahun 2017, namun peningkatan target jauh lebih tinggi sehingga realisasi kinerja terus menurun. Pada tahun 2014, realisasi kinerja sebesar 98,43% yang terkategori sangat tinggi, menurun realisasi kinerja menjadi 96,50% pada tahun 2017 yang kategori capaiannya masih sangat tinggi. Pada tahun 2018, diperkirakan capaian AHH sebesar 67,19% dengan capaian realisasi kinerja sebesar 95,88% dan terkategori sangat tinggi. Meski capaian kinerja terkategori tinggi namun dengan posisi AHH yang

terendah dibanding AHH kabupaten sekitarnya yang menggambarkan bahwa derajat kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir masih rendah sehingga perlu menjadi perhatian serius pada pembangunan periode berikutnya.



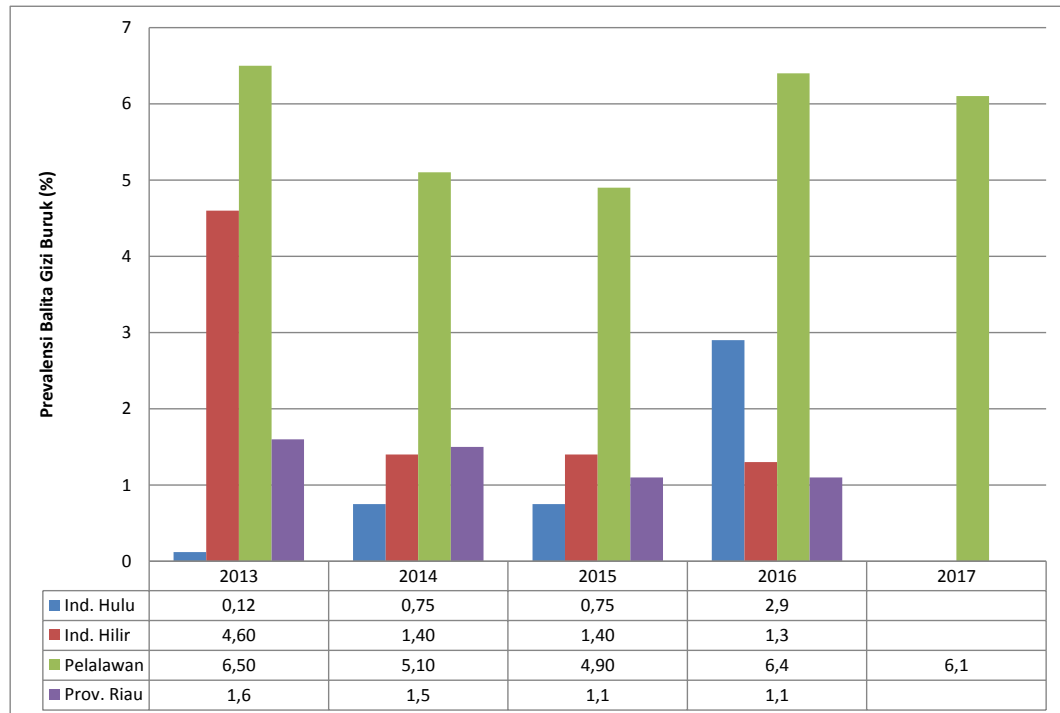
Sumber : Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>  
 Keterangan: \* = Data Estimasi

Gambar 2.26.  
 Kinerja Indikator Angka Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir  
 Tahun 2014 - 2018

### 2.2.2.6. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Status gizi yang didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrien. Parameter berat badan /tinggi badan berdasarkan z score, dimana gizi buruk (sangat kurus) yaitu < - 3 SD. Selama periode 2013 - 2016, persentase balita gizi buruk di Kabupaten Indragiri Hilir terus menurun yaitu dari 4,60% pada tahun 2013 menjadi 1,3% pada tahun 2016. Capaian penurunan prevalensi balita gizi buruk Kabupaten Indragiri Hilir ini

tahun 2016, relatif lebih baik bila dibandingkan capaian prevalensi gizi buruk Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu. Namun demikian, capaian prevalensi balitas gizi buruk Kabupaten Indtagiri Hilir relatif lebih rendah dibanding capaian Provinsi Riau.



Sumber: Dinas kesehatan Provinsi Riau (2017)

Gambar 2.27.

Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk di kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2013 - 2017

Pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa target prevalensi balita gizi buruk menurun dari 1,20% menjadi 1,00% pada tahun 2018. Realisasi capaian prevalensi balita gizi buruk berfluktuatif menurun dari 1,14% pada tahun 2014 menjadi 1,30% pada tahun 2016 dengan realisasi kinerja berkisar antara 78,57% - 85,71% yang terkategori Tinggi. Pada tahun 2017 dan 2018 diperkirakan prevalensi balita gizi buruk sebesar 1,20% dan 1,10% sehingga realisasi kinerja masing-masingnya sebesar 83,33% dan 90,91% yang keduanya terkategori Tinggi.



Sumber : Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

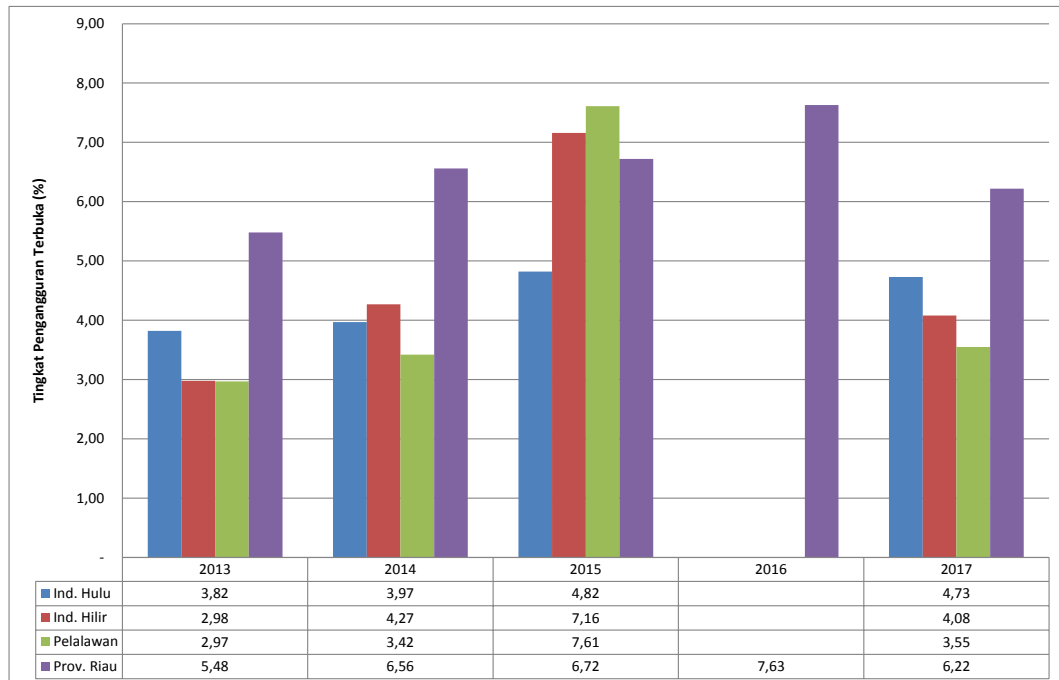
Keterangan: \* Estimasi

Gambar 2.28.

Kinerja Indikator Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

### 2.2.2.7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Selama periode 2013-2017, TPT Kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif meningkat yang bermakna kuantitas dan tingkat pengangguran meningkat. Pada tahun 2013, tingkat pengangguran terbuka di Indragiri Hilir sebesar 2,98%, meningkat menjadi 7,16% pada tahun 2015 dan menurun menjadi 4,08% pada tahun 2017. Pada tahun 2017, capaian TPT Kabupaten Indragiri Hilir ini lebih rendah dibanding TPT Provinsi Riau (6,22%) dan Indragiri Hulu (4,73%), namun sedikit lebih tinggi bila dibandingkan TPT Kabupaten Pelalawan (3,55%). Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan TPT Kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 6,49%, tertinggi dibanding rata-rata pertumbuhan Provinsi Riau (2,57% per tahun), Kabupaten Pelalawan (2,57%) dan Kabupaten Indragiri Hulu (4,37%).



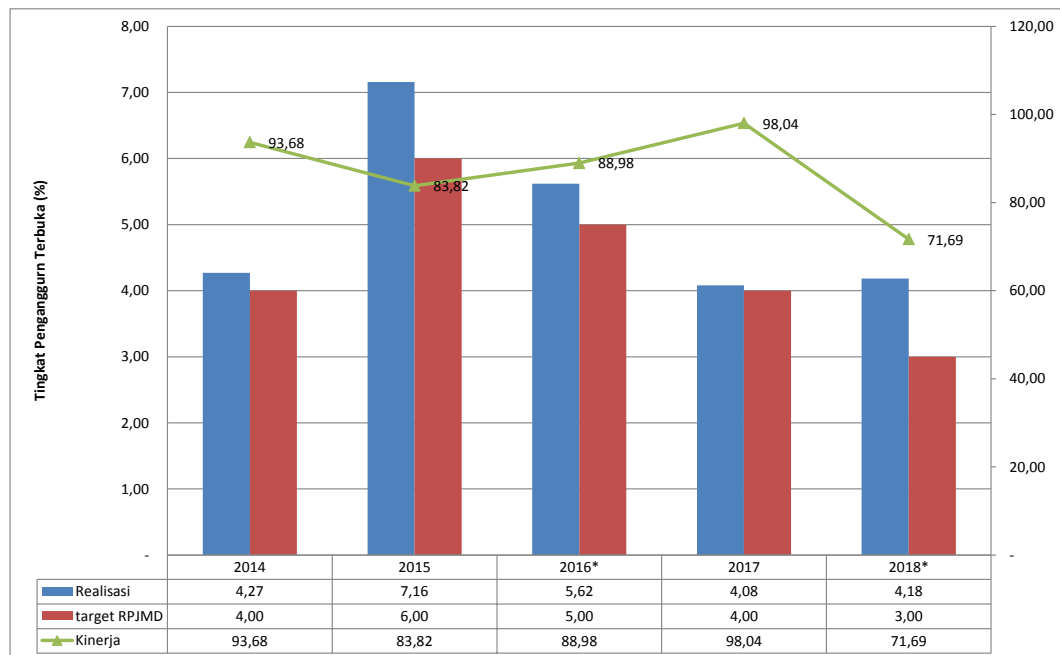
Sumber: Survey Angkatan Kerja Nasional (2013 – 2017) dan [https://riau.bps.go.id/subject/ 6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab3](https://riau.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab3)

Gambar 2.29.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten Indragiri Hilir dan kabupaten Sekitarnya dan Provinsi Riau Tahun 2013 – 2017

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditargetkan TPT Kabupaten Indragiri Hilir dengan trend menurun yaitu dari 4,00% pada tahun 2014 menjadi 3,0% pada tahun 2017. Realisasi TPT yang berfluktuatif meningkat dan target yang semakin menurun menjadikan realisasi kinerja memiliki trend menurun. Pada tahun 2014 dengan realisasi kinerja sebesar 93,68% dan terkategori Sangat Tinggi, menurun menjadi 88,98% pada tahun 2015, yang terkategori Tinggi. Pada tahun 2017, realisasi TPT Kabupaten Indragiri Hilir meningkat menjadi 4,08% dengan kinerja sebesar 98,04 yang terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2018, diperkirakan capaian TPT Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 4,18% dengan realisasi kinerja sebesar 71,69% yang terkategori Sedang. Kondisi TPT yang berfluktuatif meningkat dengan capaian kinerja yang

cenderung menurun ini perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembangunan periode berikutnya.



Sumber : Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Keterangan: \*= Data Estimasi

Gambar 2.30.

Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka  
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018

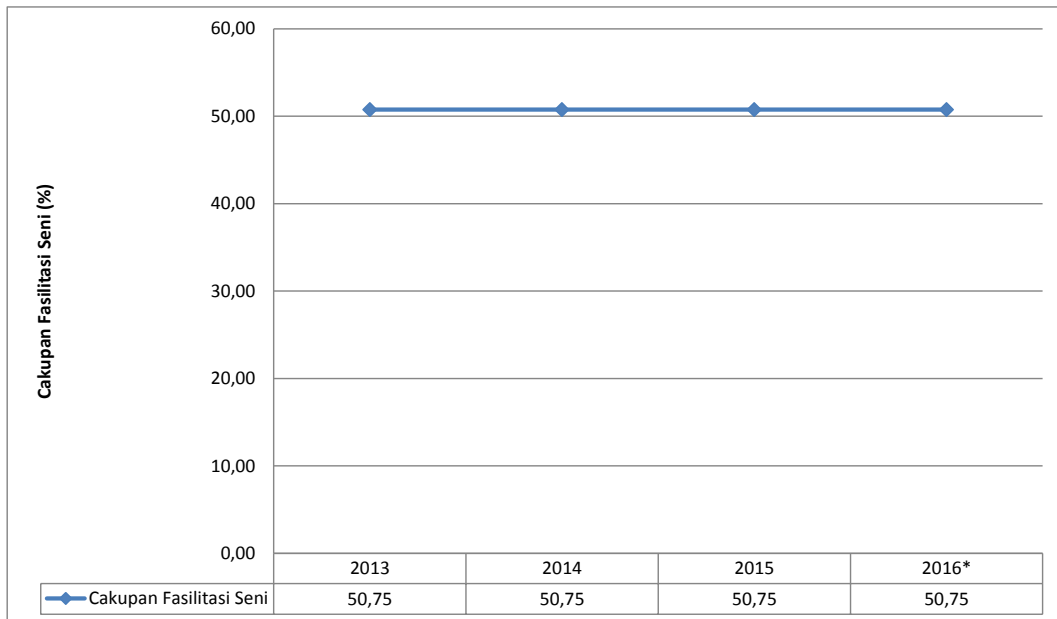
### 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga terdiri dari seni budaya yang direpresentasikan dari cakupan fasilitasi seni dan olahraga yang direpresentasikan dari jumlah lapangan olahraga.

#### 2.2.3.1. Seni Budaya

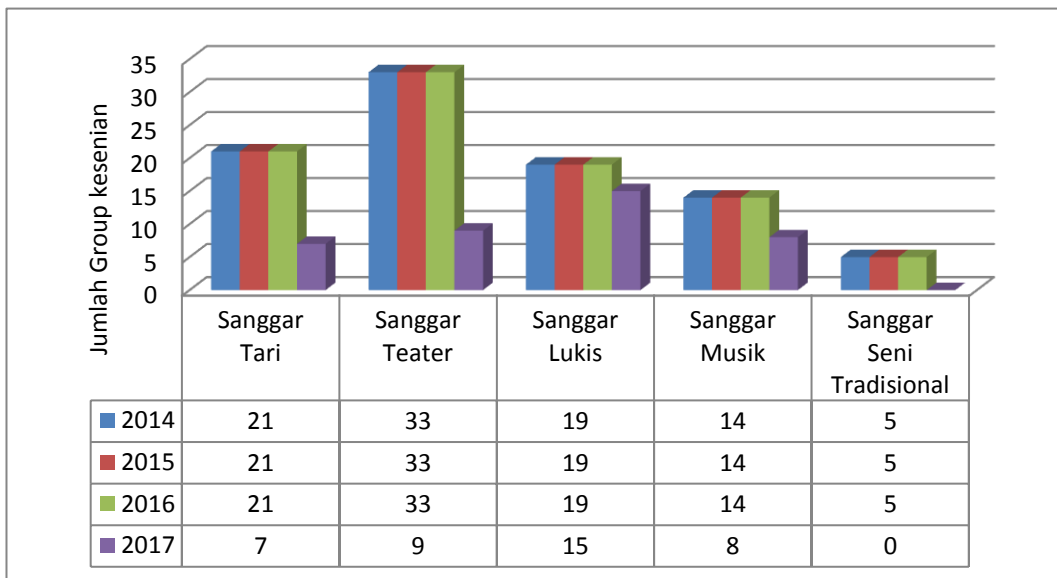
Selama periode 2013 – 2016, perkembangan fasilitasi seni budaya oleh pihak terkait relatif tidak mengalami perkembangan yang berarti. Fasilitasi seni budaya yang dilakukan masih terbatas pada kegiatan-kegiatan seni budaya yang telah dilakukan sebelumnya seperti festival bakaroh, sampan, menongkah, seribu telur dan karnaval budaya. Padahal

masih banyak seni-budaya indragiri hilir yang perlu diangkat sehingga akan dapat menjadi daya tarik wisata ke Indragiri Hilir.



Gambar 2.31.

Perkembangan Cakupan Fasilitas Seni Budaya di kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2016

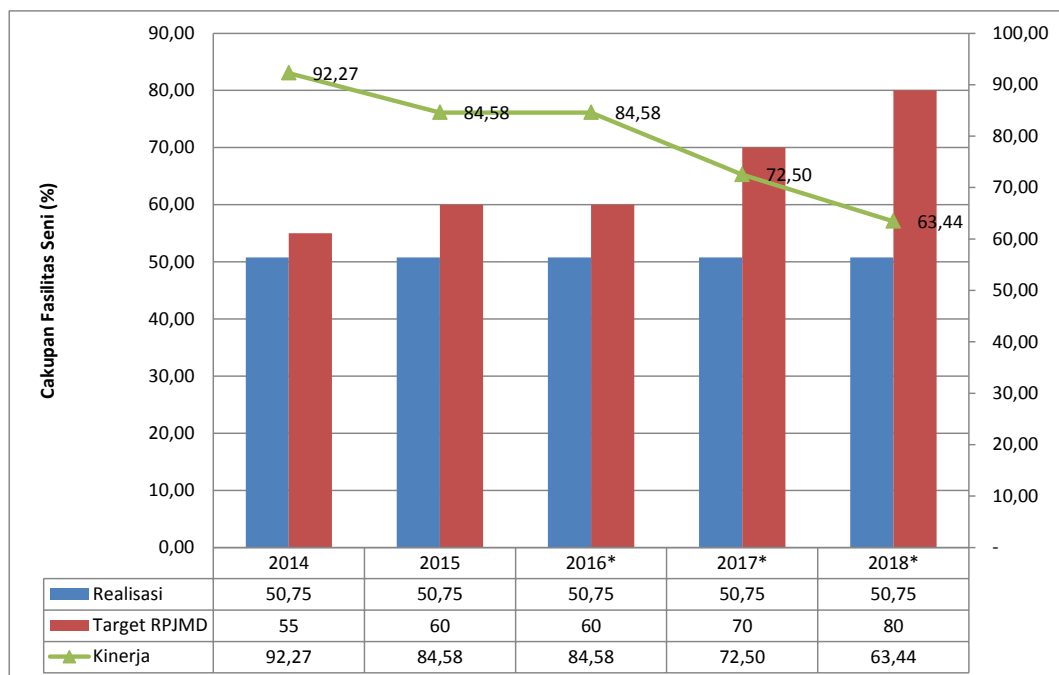


Sumber : Sumber: [https:// sipd.kemendagri.go.id](https://sipd.kemendagri.go.id)

Gambar 2.32.

Perkembangan Group kesenian di kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2017

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditargetkan bahwa cakupan fasilitasi seni pada tahun 2014 sebesar 55% meningkat menjadi 80% pada tahun 2018. Realisasi cakupan fasilitasi seni stagnan sebesar 50,75%. Target RPJMD terhadap cakupan fasilitasi seni terus meningkat dan disisi lain realisasi tetap sebesar 50,75% maka realisasi kinerja terus menurun. Pada tahun 2014 sebesar 92,27% dan terkategori sangat tinggi. Pada tahun 2015 - 16 menurun menjadi 84,58% dan terkategori tinggi. Pada tahun 2017 dan 2018 diperkirakan realisasi menurun menjadi 63,44% - 72,50% dan terkategori Rendah - Sedang. Alasan tidak tersedianya dana untuk fasilitasi cakupan seni adalah hal yang paling menonjol disampaing alasan lain seperti keterbatasan sumberdaya manusianya. Kedepan, dalam upaya menarik wisatawan ke Indragiri Hilir dan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Riau, perlu upaya peningkatan kinerja cakupan fasilitasi seni di Kabupaten Indragiri Hilir.



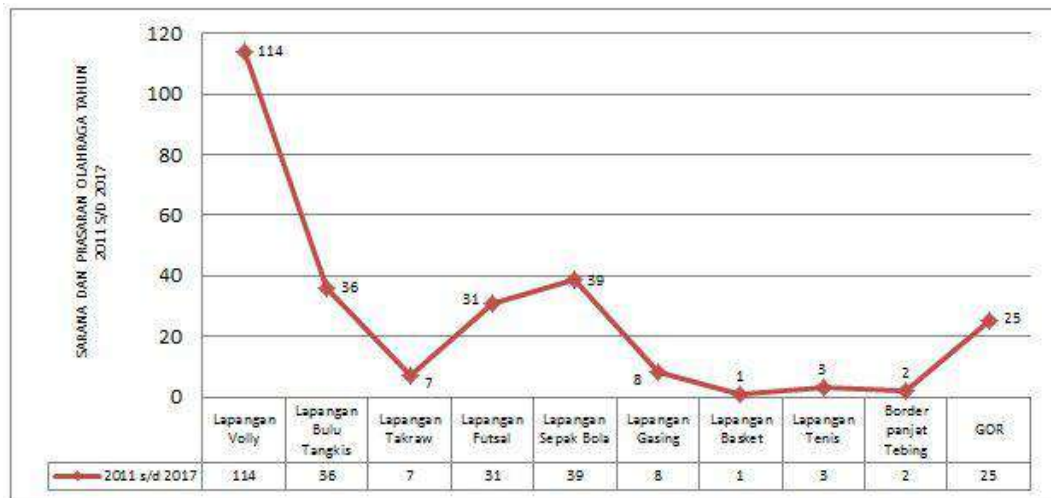
Keterangan: \*= Data Estimasi

Gambar 2.33.  
Kinerja Indikator Cakupan Fasilitasi Seni Budaya  
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018



**2.2.3.2. Olahraga**

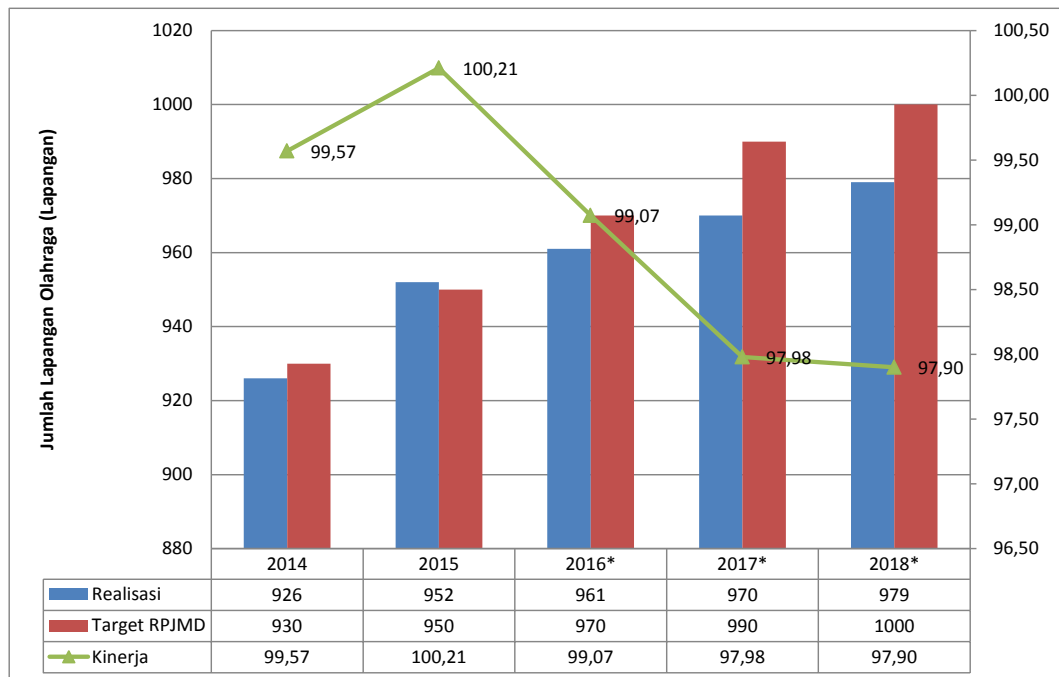
Selama periode 2013 – 2016, perkembangan penyediaan lapangan olahraga sebagai representasi perkembangan pembinaan olahraga di Indragiri Hilir memiliki trend terus meningkat. Pada tahun 2013, jumlah lapangan olahraga (sepakbola, volly, badminton, tenis, takraw, futsal dan lainnya) meningkat dari 913 unit menjadi 961 unit pada tahun 2016. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan jumlah lapangan olahraga meningkat sebesar 1,18% per tahun lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Indragiri Hilir 0,66% per tahun. Kondisi ini cukup menggembirakan yang menggambarkan bahwa penduduk Indragiri Hilir memiliki animo yang tinggi berolahraga. Namun hal yang penting dalam pembinaan olahraga adalah melakukan olahraga prestasi yang menghasilkan atlet-atlet berkaliber juara Provinsi Riau dan Nasional atau bahkan juara internasional.



Gambar 2.34.  
Perkembangan Jumlah Lapangan Olahraga di kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 – 2017

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa jumlah lapangan olahraga menjadi indikator kinerja daerah. Pada tahun 2014 telah ditargetkan jumlah lapangan olahraga sebanyak 930 unit,

meningkat menjadi 1000 unit pada tahun 2018. Realisasi jumlah lapangan olahraga sedikit dibawah target dengan realisasi kinerja berkisar antara 97,90% - 100,21% yang semuanya terkategori sangat tinggi. Pencapaian kinerja indikator ini seharus diikuti dengan pembinaan yang mengarah kepada pembinaan atlet-atlet berprestasi di tingkat provinsi, nasional maun internasional. Upaya pembinaan atlet-atlet berprestasi ini perlu menjadi perhatian pada pembangunan ke depan.



Keterangan: \*= Data Estimasi

Gambar 2.35.

Kinerja Indikator Jumlah Lapangan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

### 2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum terdiri 4 layanan yaitu (i) layanan urusan wajib dasar, (ii) layanan urusan wajib non dasar, (iii) layanan urusan pilihan dan (iv) urusan penunjang.

#### 2.3.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

Layanan urusan wajib dasar terdiri dari 6 urusan dasar yaitu (i) pendidikan, (ii) kesehatan, (iii) pekerjaan umum dan penataan ruang, (iv)

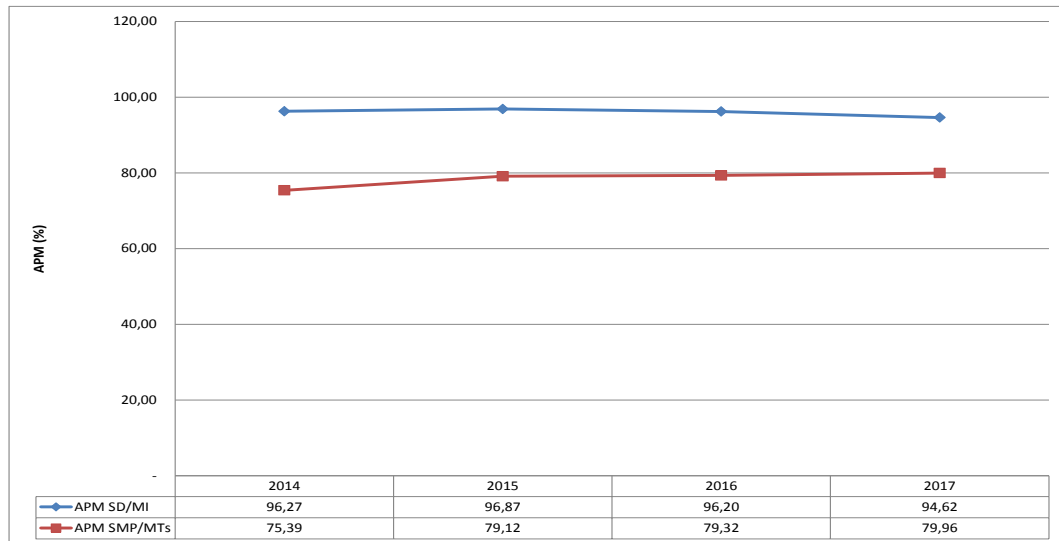
perumahan rakyat dan pemukiman, (v) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan (vi) sosial.

#### **2.3.1.1. Pendidikan**

Layanan urusan wajib dasar bidang urusan pendidikan dianalisis meliputi indikator kinerja (a) Angka partisipasi murni (APM), (b) Angka partisipasi sekolah (APS), (c) Angka putus sekolah, (d) Rasio ketersediaan sekolah, (e) Rasio guru terhadap Murid dan (f) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV

##### **a. Angka Partisipasi Murni**

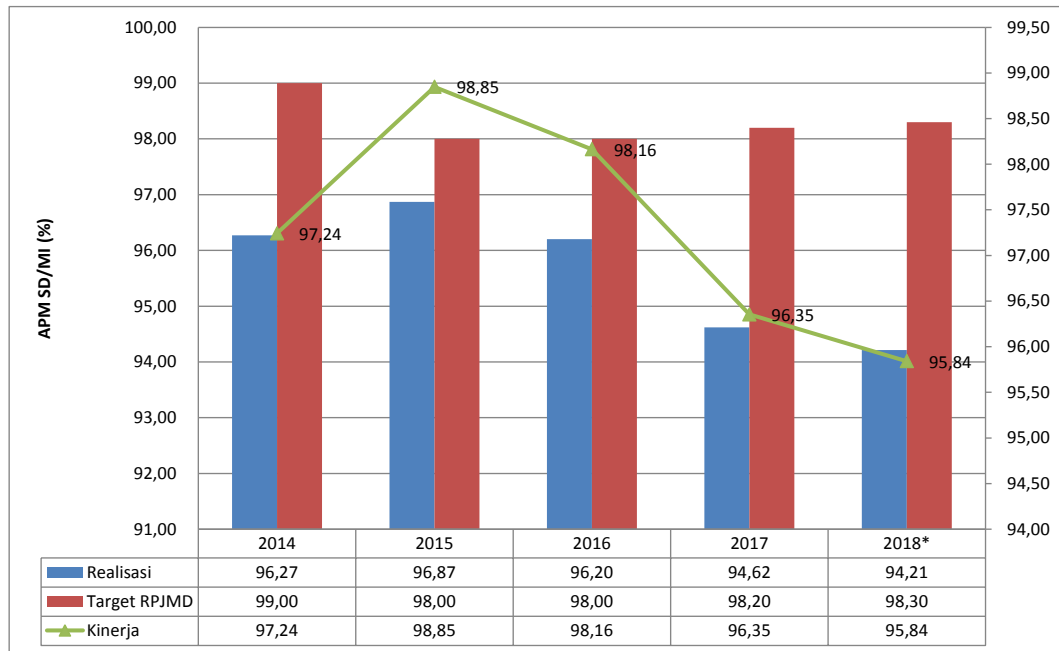
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu. Selama periode 2014 - 2017, APM SD/MI Indragiri Hilir memiliki trend menurun. Pada tahun 2014 sebesar 96,27% menurun menjadi 94,62% pada tahun 2017. Selama periode ini terdapat 3,73% - 5,38% penduduk umur pendidikan SD/MI yang belum sekolah. Capaian APM SD/MI Indragiri Hilir tahun 2017 sebesar 94,62%, lebih rendah dibanding APM SD/MI kabupaten Indragiri Hulu dan Provinsi Riau yang masing-masingnya sebesar 99,17% dan 97,08%. Oleh karena itu, upaya meningkatkan APM SD/MI hingga mencapai 100% perlu terus dilakukan agar semua penduduk umur SD/MI dapat bersekolah sehingga juga mendorong terhadap pencapaian wajib belajar dan IPM Indragiri Hilir. Selama periode 2014 - 2017, rata-rata pertumbuhan APM SD/MI Indragiri Hilir menurun sebesar -0,43% per tahun.



Sumber: Sumber : Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.36.  
Perkembangan APM SD/MTs dan APM SMP/MTs  
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2017

Pada periode yang sama, APM SMP/MTs memiliki trend meningkat yaitu dari 75, 99% menjadi 79,96%. Meski trend APM SMP/MTs memiliki trend yang meningkat namun nilai APM SMP/MTs jauh lebih rendah dibanding APM SD/MI. Selama periode 2014 - 2017 ini, terdapat 20,04% - 20,30% penduduk umur sekolah SMP/MTs yang belum sekolah. Upaya mengesa peningkatan APM SMP/MTs menjadi 100% sehingga wajib belajar 9 tahun tercapai dan IPM meningkat lebih cepat. Capaian APM SMP/MTs Indragiri Hilir tahun 2017, lebih tinggi dibanding capaian APM SMP/MTs Indragiri Hulu dan Provinsi Riau yang masing-masingnya sebesar 76,53% dan 78,87%. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan APM SMP/MTs Indragiri Hilir meningkat sebesar 1,04% per tahun

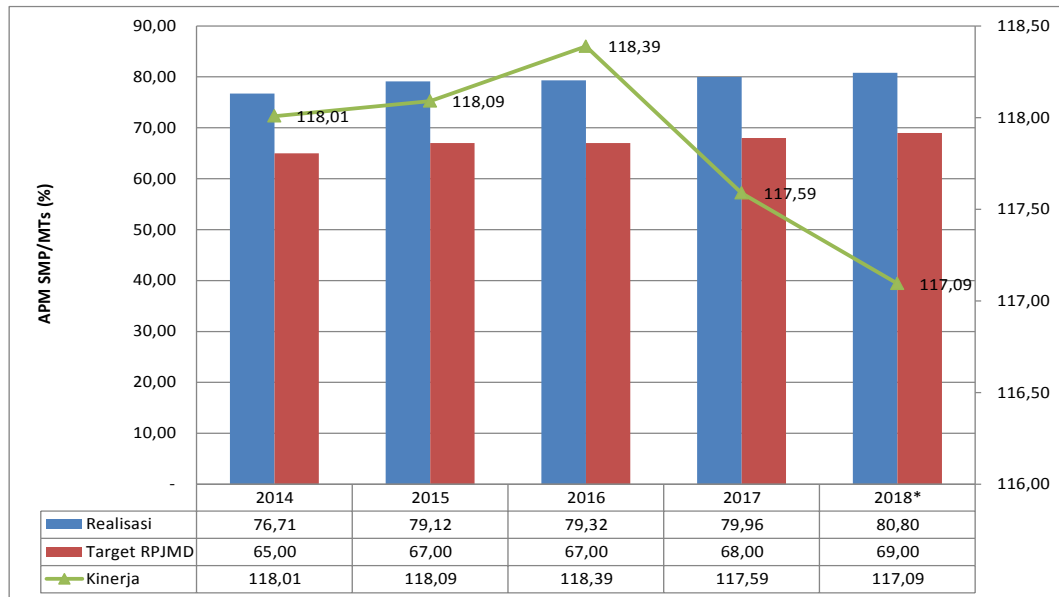


Sumber : Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Keterangan: \*= Data Estimasi

Gambar 2.37.  
Kinerja Indikator APM SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2014 - 2018

Pada RPJMD Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditargetkan APM SD/MI meningkat dari 99% pada tahun 2014 menjadi 98,30% pada tahun 2018. Selama periode 2014 - 2017, realisasi APM SD/MI memiliki trend menurun, dari 96,27% menjadi 94,62% dan diperkirakan pada tahun 2018 sebesar 94,21%. Selama periode 2014 - 2018, capaian realiasi kinerja berkisar antara 95,84% - 98,85% yang semuanya terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian kinerja terkategori Sangat Tinggi, namun upaya pencapaian APM SD/MI mencapai 100% harus terus diupayakan agar pencapaian wajib belajar dan percepatan peningkatan nilai IPM .



Sumber : Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Keterangan: \*= Data Estimasi

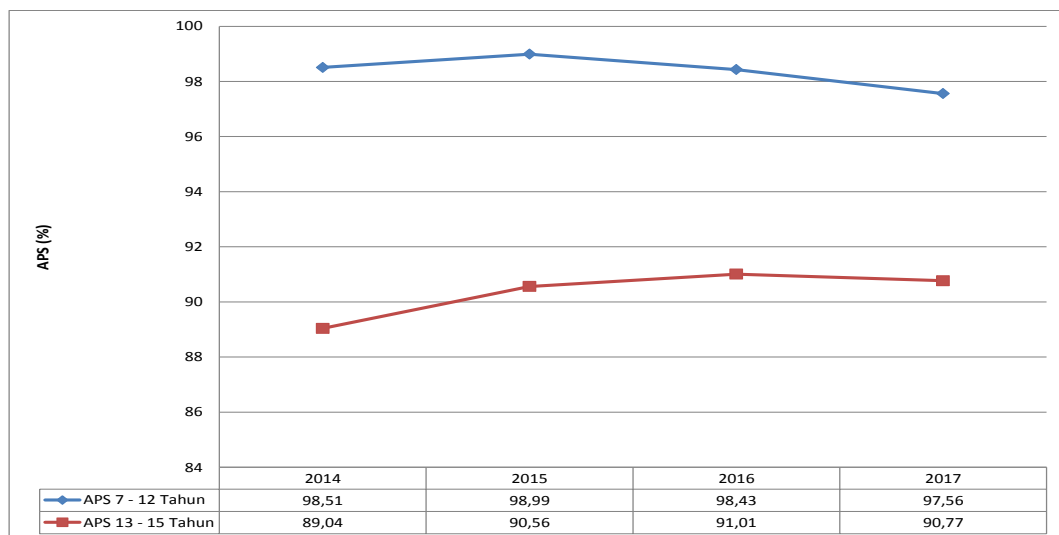
Gambar 2.38.  
Kinerja Indikator APM SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2014 – 2018

Pada RPJMD juga telah ditarget APM SMP/MTs dengan trend meningkat yaitu dari 65% pada tahun 2014 menjadi 69% pada tahun 2018. Realisasi capaian APM SMP/MTs melebihi target yaitu sebesar 75,39% pada tahun 2014 meningkat menjadi 81,15% pada tahun 2018. Realisasi kinerja APM SMP/MTs berkisar antara 115,98% - 117,60% yang semuanya terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian realisasi kinerja APM SMP/MTs Sangat Tinggi, namun untuk mencapai APM SMP/MTs Indragiri Hilir dengan nilai 100% perlu dilakukan dengan usaha yang lebih terencana baik.

#### b. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7 - 12 tahun dan 13 - 15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Selama periode 2014 - 2017, APS 7 - 12 tahun kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif menurun. Pada tahun 2014, nilai APS 7

- 12 tahun Indragiri Hilir sebesar 98,51% menurun menjadi 97,56% pada tahun 2017. Capaian APS 7 - 12 tahun selama periode ini sekaligus menggambarkan bahwa terdapat sebesar 1,49% hingga 2,44% penduduk usia 7 - 12 tahun yang tidak sedang sekolah di SD/MI. Pada tahun 2016, jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun yang tidak berpartisipasi di sekolah SD/MI cukup besar, mencapai 1.434 orang. Oleh karena itu upaya mencapai APS dengan nilai 100% perlu terus diupayakan. Capaian APS 7 - 12 tahun Indragiri Hilir tahun 2016 adalah yang terendah dibanding capaian APS 7 - 12 tahun kabupaten Pelalawan (97,89%) dan Indragiri Hulu (96,36%) serta Provinsi Riau (95,28%). Selama periode 2014 - 2017, rata-rata pertumbuhan APS 7 - 12 tahun menurun sebesar -0,24% per tahun.



Sumber: Sumber : Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.39.

Perkembangan APS 7 - 12 Tahun dan APS 13 - 15 Tahun  
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2017

Pada periode yang sama, APS 13 - 15 tahun Kabupaten Indragiri Hilir justru trendnya meningkat yaitu dari 89,04% pada tahun 2014 menjadi 90,77% pada tahun 2017. Meski capaian APS 13 - 15 tahun Indragiri Hilir meningkat namun nilainya lebih rendah dibanding APS 7 - 13 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk umur 13 - 15 tahun yang tidak berpartisipasi pada pendidikan SMP/MTs jauh lebih besar

yaitu 9,23% - 10,96% dari total penduduk usia 13 - 15 tahun (37.757 orang tahun 2016). Oleh karena itu, upaya peningkatan APS 13 - 15 tahun harus menjadi perhatian dalam pembanguna pendidikan Indragiri Hilir ke depan. Capaian APS 13 - 15 tahun Indragiri Hilir ini adalah yang tertinggi dibanding Kabupaten sekitarnya (Pelalawan 69,85% dan Indragiri Hulu 68,99%) dan Provinsi Riau (72,87%). Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan APS 13 - 15 tahun meningkat sebesar 0,48% per tahun.

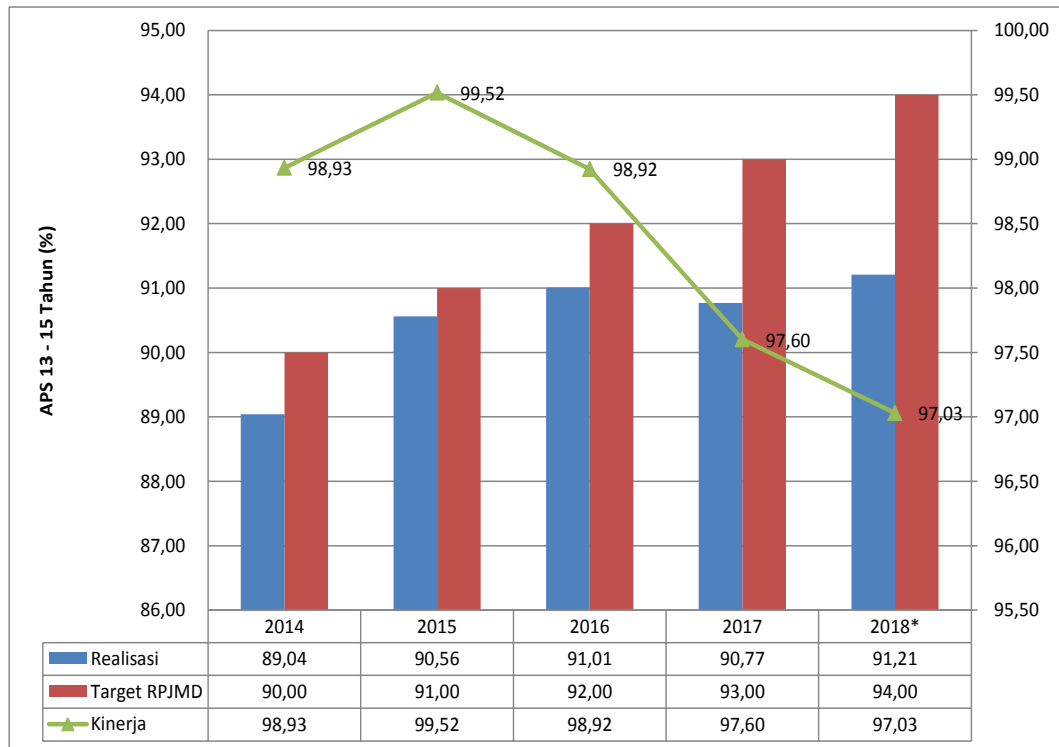


Gambar 2.40.  
Kinerja Indikator APS 7 - 12 Tahun Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2014 - 2018

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan target APS 7 - 12 tahun Indragiri Hilir yaitu sebesar 98,60% pada tahun 2014 meningkat menjadi 99,30% pada tahun 2018. Selama periode 2014 - 2017, capaian realisasi APS 7 - 12 tahun berfluktuatif menurun dan umumnya dibawah target. Realisasi kinerja berkisara antara 99,99% - 98,35% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2018,



diperkirakan APS 7 - 12 tahun sebesar 97,32% dengan realisasi kinerja sebesar 98,01% dan terkategori Sangat Tinggi.



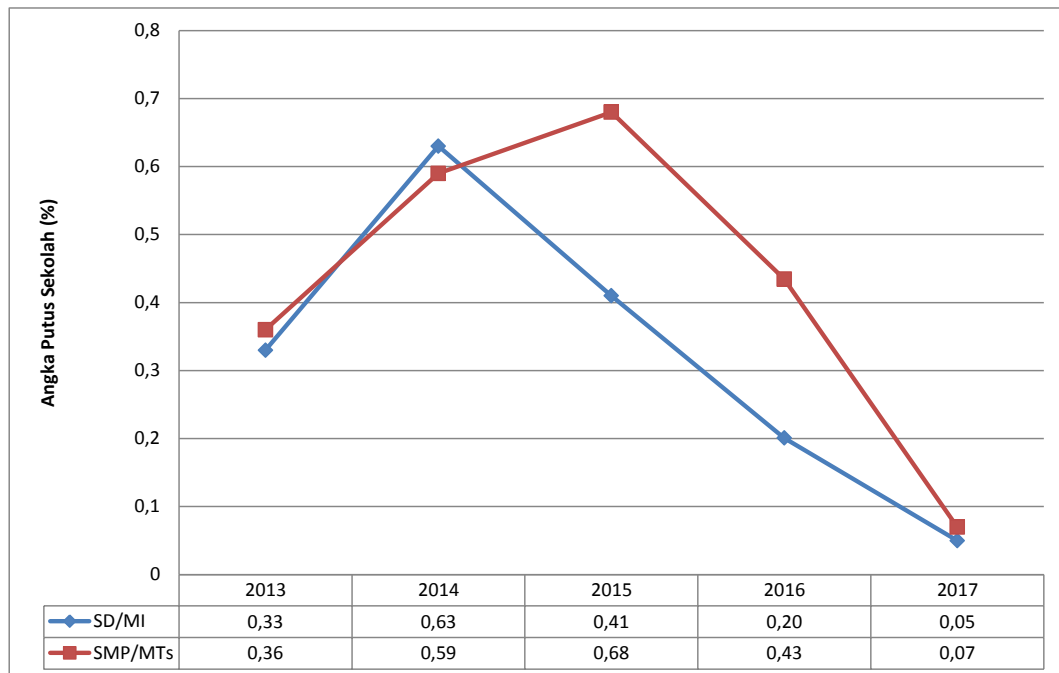
Gambar 2.41.  
Kinerja Indikator APS 13 - 15 Tahun Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2014 - 2018

Dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditargetkan APS 13-15 tahun sebesar 90% - 94%. Realisasi APS SMP/MTs berfluktuatif meningkat dan umumnya dibawah target RPJMD. Meski capaian APS 13 - 15 tahun dibawah target namun realisasi kinerjanya terkategori Sangat Tinggi dengan rentang realisasi kinerja antara 97,03% - 98,93%.

### c. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APTS) adalah proporsi anak menurut kelompok usia (7 - 12 tahun, 13 - 15 tahun dan 16 - 18 tahun) yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Selama periode 2013 - 2017, APTS SD/MI memiliki trend berfluktuatif menurun yaitu dari 0,33% pada tahun 2013 menjadi

0,05% pada tahun 2017. Meski APT SD/MI sudah terkategori rendah, namun upaya menurunkan APTS SD/MI per terus dilanjutkan. Pada tahun 2017, Capaian APTS SD/MI ini sedikit lebih rendah dibanding capaian APTS Provinsi Riau (0,042%). Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan APTS SD/MI menurun sebesar -46,92% per tahun.

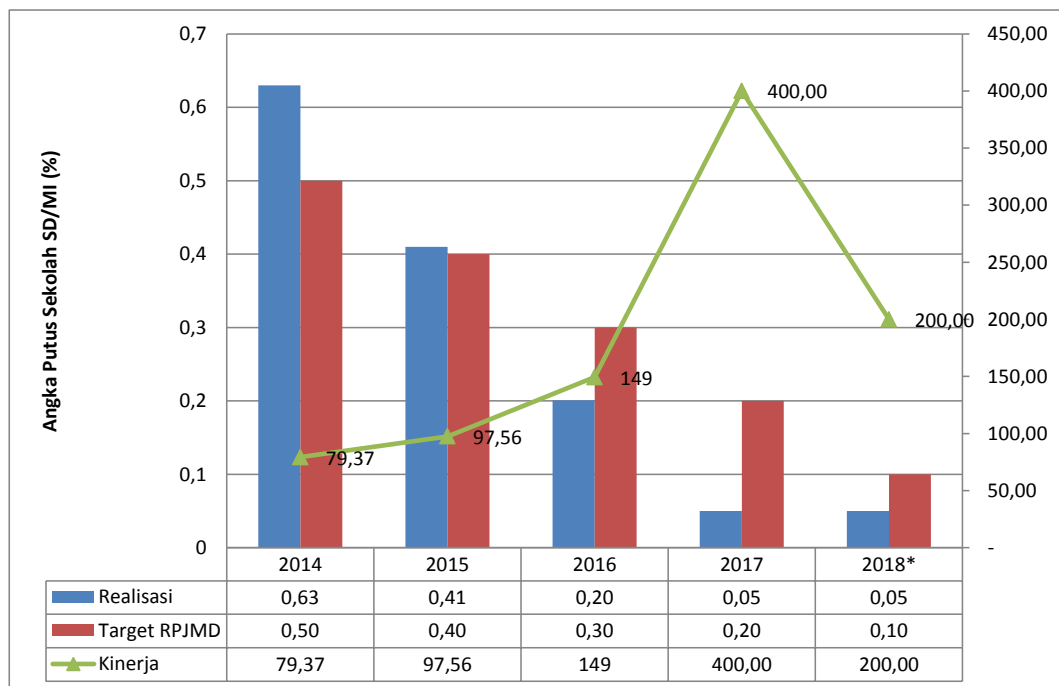


Sumber : Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.42.  
Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2013 - 2017

Pada periode yang sama, APTS SMP/MTs memiliki trend yang sama dengan APTS yang memiliki trend berfluktuatif menurun, namun dengan nilai yang lebih besar. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat putus sekolah di SMP/MTs lebih tinggi dibanding ditingkat SD/MI. Pada tahun 2017, capaian APTS SMP/MTs Indragiri Hilir (0,07%) relatif sama dengan APTS SMP/MTs Provinsi Riau (0,07%). Selama periode 2013 - 2017 ini, rata-rata pertumbuhan APTS SMP/MTs menurun sebesar -41,31% per tahun.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa APTS SD/MI Kabupaten Indragiri Hilir menurun dari 0,50% pada tahun 2014 menjadi 0,10% pada tahun 2018. Realisasi APTS SD/MI 2014 - 2015 masih dibawah target dengan realisasi kinerja sebesar 79,37% - 97,56% yang terkagori Tinggi dan Sangat Tinggi. Pada tahun 2016 dan 2017, realisasi APTS SD/MI sudah diatas target dan tahun 2018 juga akan diatas target sehingga relisasi kinerja berkisar antara 149% - 400% dan terkategori Sangat Tinggi.

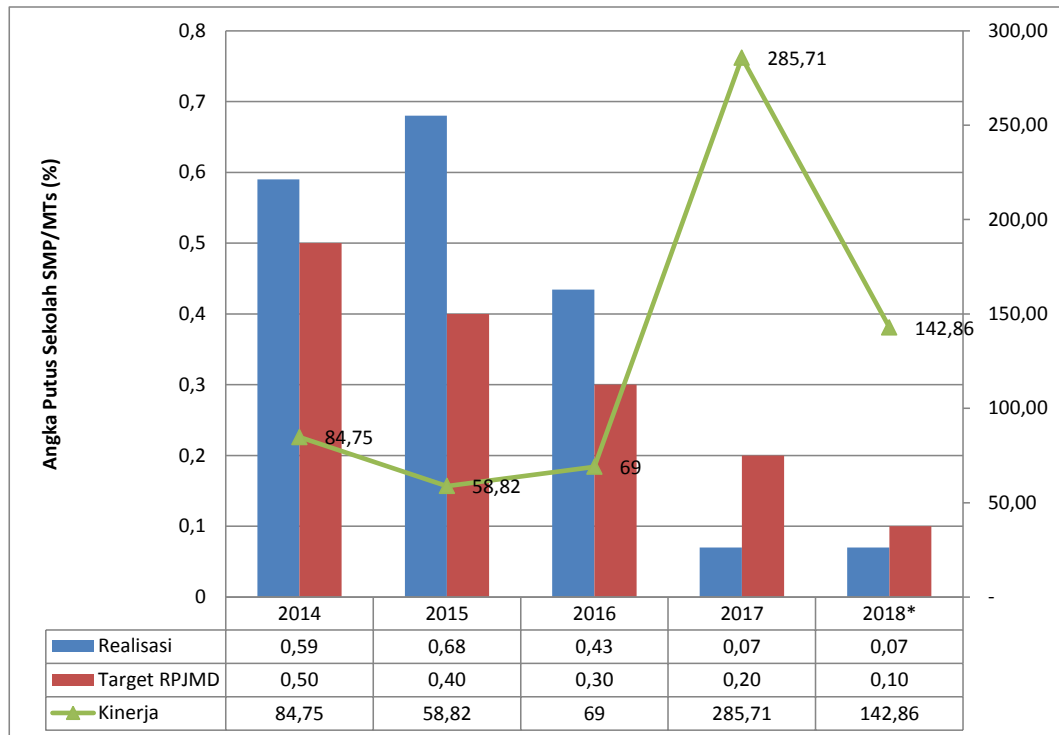


Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.43.  
Kinerja Indikator Angka Putus Sekolah SD/MI  
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa APTS SMP/MTs Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan menurun dari 0,50% pada tahun 2014 menjadi 0,10% pada tahun 2018. Realisasi APTS SMP/MTs tahun 2014 - 2016 dibawah target sehingga realisasi kinerja berkisar antara 58,82 - 84,75% yang terkagori rendah - tinggi. Pada tahun 2017, realisasi APTS SMP/MTs melebihi target dan

kondisi yang sama diperkirakan pada tahun 2018 sehingga realisasi kinerja sebesar 142,86% - 285,71% dan terkategori Sangat Tinggi.



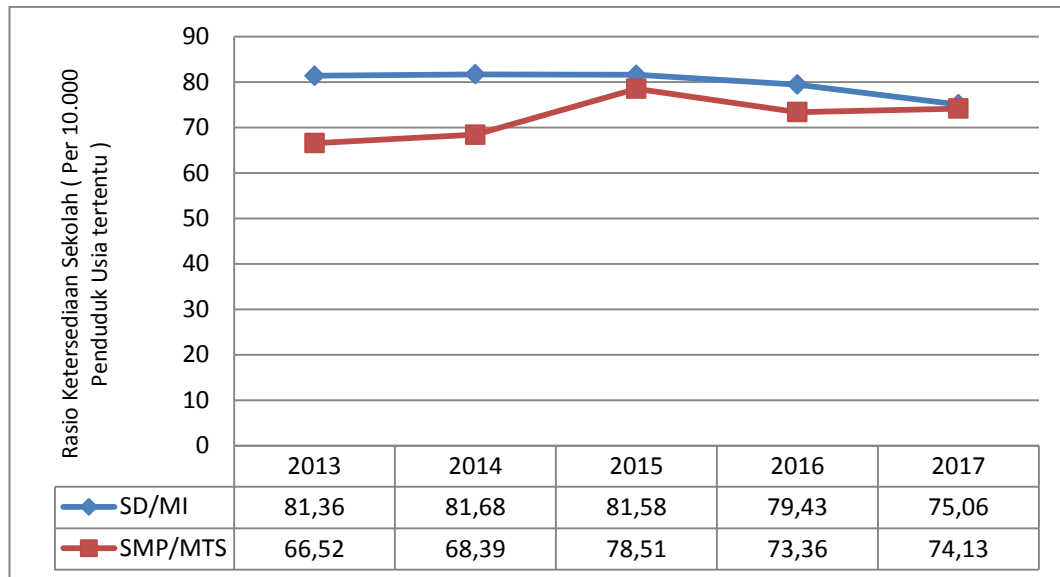
Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.44.  
Kinerja Indikator Angka Putus Sekolah SMP/MTs  
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

#### d. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar (7 - 12 tahun dan 13 - 15 tahun). Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Selama periode 2013 - 2017, rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia 7 - 12 tahun yang selanjutnya disebut tingkat SD/MI memiliki trend berfluktuatif menurun. Pada tahun 2013, rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 81,36% menurun menjadi 75,06% pada tahun 2017 atau setiap sekolah SD/MI melayani 122,91 orang penduduk usia 7 - 12 tahun, meningkat menjadi 131,94 orang penduduk usia 7 - 12

tahun. Hal yang perlu mendapat perhatian, selain ketersediaan sekolah adalah rendahnya persentase SD/MI bangunan baik yaitu hanya sebesar 23,53% , terendah diantara kabupaten sekitarnya seperti Indragiri Hulu sebesar 28,40% dan Pelalawan sebesar 34% serta Provinsi Riau (29%). Selama periode 2012 - 2017, rata pertumbuhan rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir menurun sebesar -1,41% per tahun.

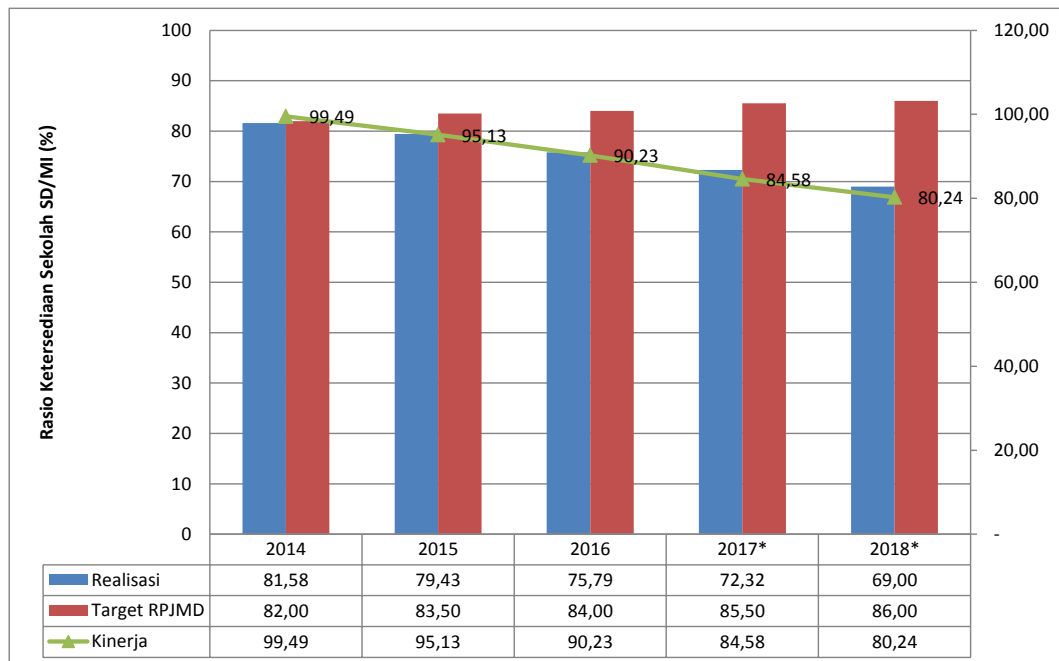


Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.45.  
Perkembangan Rasio Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 - 2017

Rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs per 10.000 penduduk usia 13 - 15 tahun yang selanjutnya disebut tingkat SMP/MTs memiliki trend sebaliknya yaitu trend meningkat. Pada tahun 2013 rasionya sebesar 66,52 meningkat menjadi 74,13% pada tahun 2017. Namun angka rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs jauh lebih kecil dibanding dengan angka rasio ketersediaan sekolah SD/MI. Hal ini menggambarkan bahwa ketersediaan sekolah SMP/MTs hanya mampu menampung sebesar 66,52% hingga 71,36% dari penduduk usia 13 - 15 tahun atau setiap sekolah SMP/MTs melayani sebanyak 127,37 - 150,33 orang penduduk umur 13 - 15 tahun. Sama halnya dengan permasalahan diatas adalah

rendahnya persentase bangunan dengan kondisi yang baik. Pada tahun 2017, persentase bangunan sekolah SMP/MTs dengan kondisi baik di Indragiri Hilir sebesar 20,15%, lebih rendah dibandingkan kabupaten sekitarnya seperti Indragiri Hulu (25,85%) dan Pelalawan (39,76%) serta Provinsi Riau (28,54%). Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 1,98% per tahun.



Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

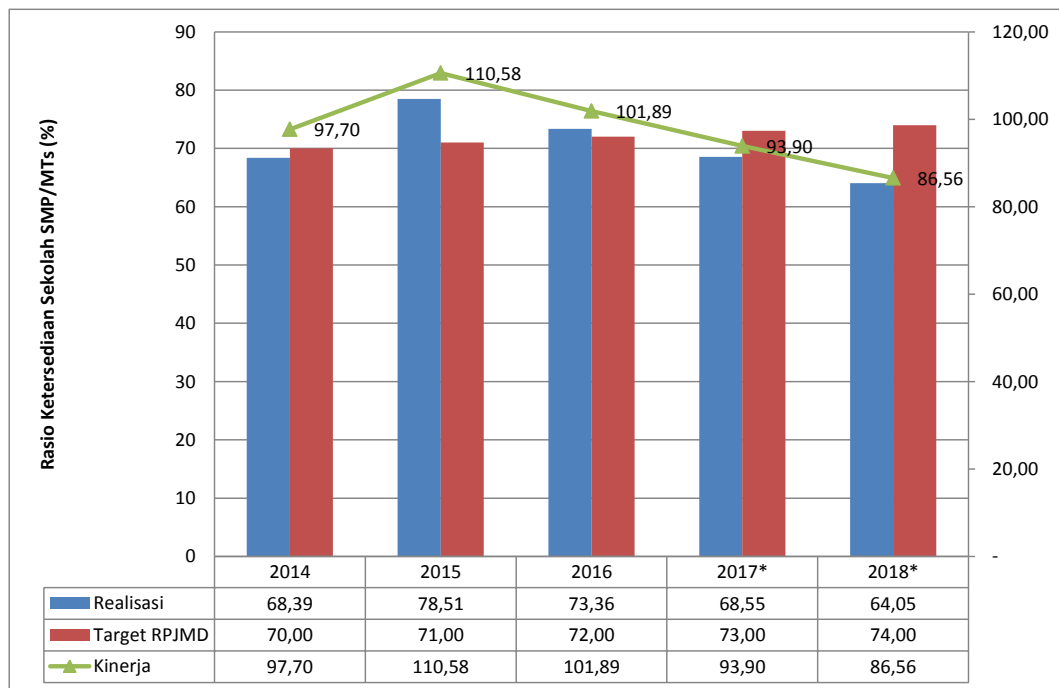
Gambar 2.46.

Kinerja Indikator Rasio Sekolah Terhadap Penduduk Usia 7 - 12 tahun Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa rasio ketersediaan sekolah SD/MI terus meningkat yaitu dari 82% menjadi 86%. Realisasi rasio ketersediaan sekolah SD/MI memiliki trend menurun dimana pada tahun 2014 - 2015, realisasi kinerja sebesar 99,49% dan 95,13% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2016 - 2017, realisasi kinerja menurun menjadi 90, 23% dan 84,38% serta

diperkirakan pada tahun 2018 sebesar 80,24% yang semuanya terkategori Tinggi.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs juga terus meningkat yaitu dari 70% menjadi 74%. Realisasi capaian indikator ini selama periode 2014 dan 2017 sedikit dibawah target dan tahun 2015 - 2016 diatas target dengan capaian realisasi kinerja berkisar antara 93,90% - 110,58% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2018, diperkirakan realisasi rasio ketersediaan sekolah menurun menjadi 64,05% dengan realisasi kinerja sebesar 86,56% dan terkategori Tinggi.

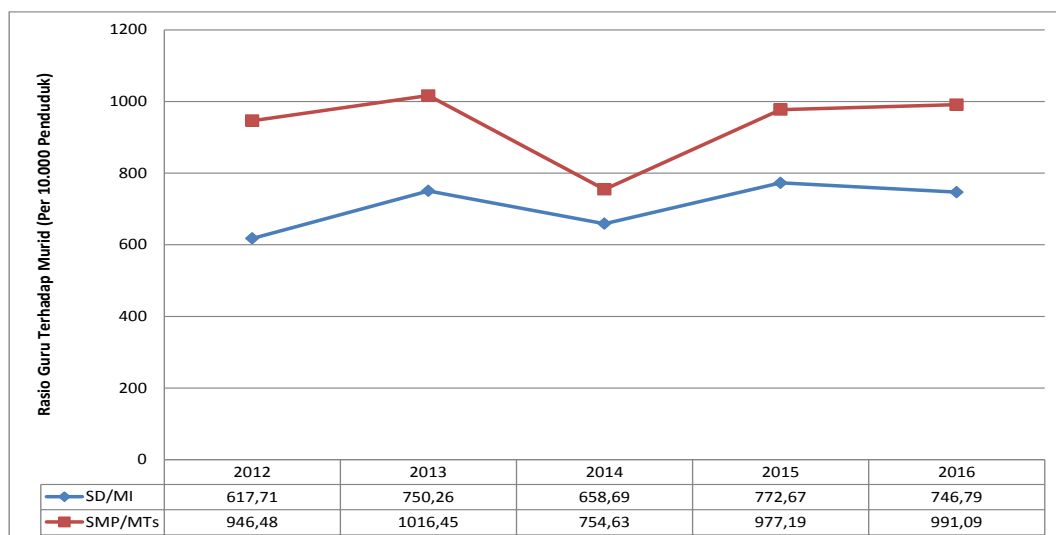


Gambar 2.47.

Kinerja Indikator Rasio Sekolah Terhadap Penduduk Usia 13 - 15 tahun Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

**e. Rasio Guru Terhadap Murid**

Rasio guru terhadap murid adalah rasio antara jumlah guru tingkat pendidikan dasar dengan jumlah pendudukan yang masuk kategori umur pendidikan dasar (7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun). Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar disamping mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru. Selama periode 2014 – 2016, rasio gurun terhadap 10.000 murid SD/MI di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif meningkat yaitu dari 617,71 pada tahun 2012 menjadi 746,79 pada tahun 2016. Rasio sebesar 746,79 ini bermakna bahwa setiap 10.000 murid SD/MI dilayani oleh rata-rata sebanyak 746,79 orang guru atau setiap guru melayani 13,39 murid SD/MI. Selama periode ini, seorang guru SD/MI di Kabupaten Indragiri Hilir melayani sebanyak 13,30 – 16,20 orang murid SD/MI, yang merupakan rasio yang cukup baik. Namun permasalahan yang umum terjadi adalah rasio ini kurang baik untuk daerah sulit dan rendah atau baik didaerah perkotaan. Selama periode 2012 – 2016, rata-rata pertumbuhan rasio guru terhadap murid ditingkat SD/MI meningkat sebesar 3,87% per tahun.

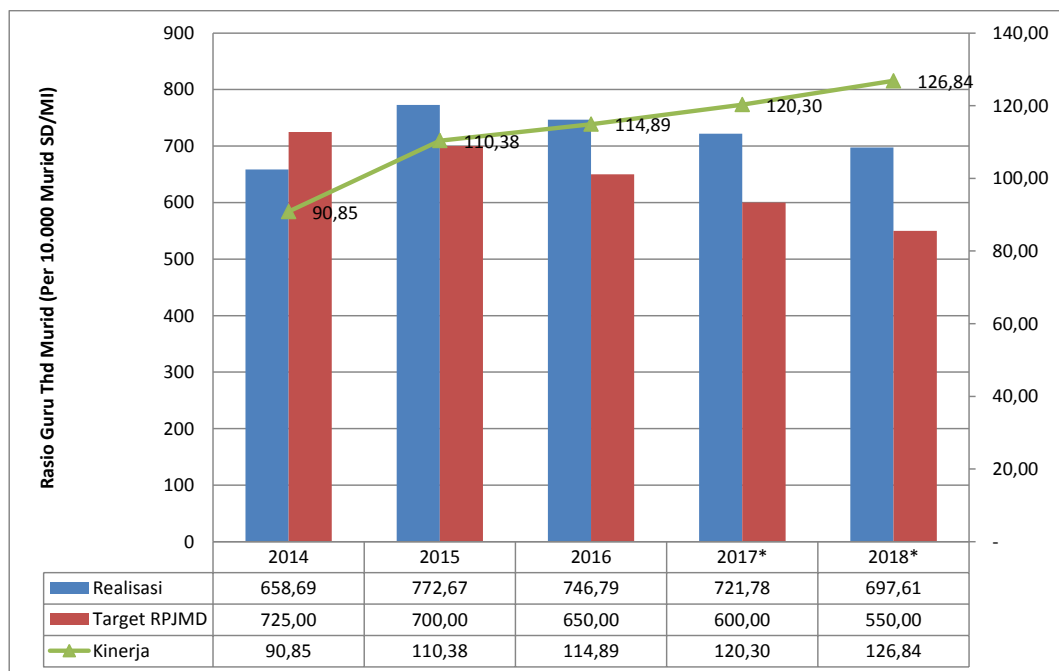


Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.48.  
Perkembangan Rasio Guru Terhadap Murid Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2013 – 2017



Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa indikator rasio guru terhadap murid SD/MI (Guru per 10.000 murid SD/MI) menurun dari 725 menjadi 550 guru per 10.000 murid SD/MI. Realisasi capaian indikator rasio guru terhadap murid SD/MI pada tahun 2014 diatas target sehingga capaian kinerja sebesar 110,07% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2014, capaian indikator rasio guru SD/MI masih dibawah target RPJMD dengan realisasi kinerja sebesar 90,85% yang terkategori Tinggi. Pada periode 2015 -2018 realisasi indikator rasio guru terhadap 10.000 murid sudah diatas target RPJMD sehingga realisasi kinerjanya diatas 100% dengan kategori Sangat Tinggi.

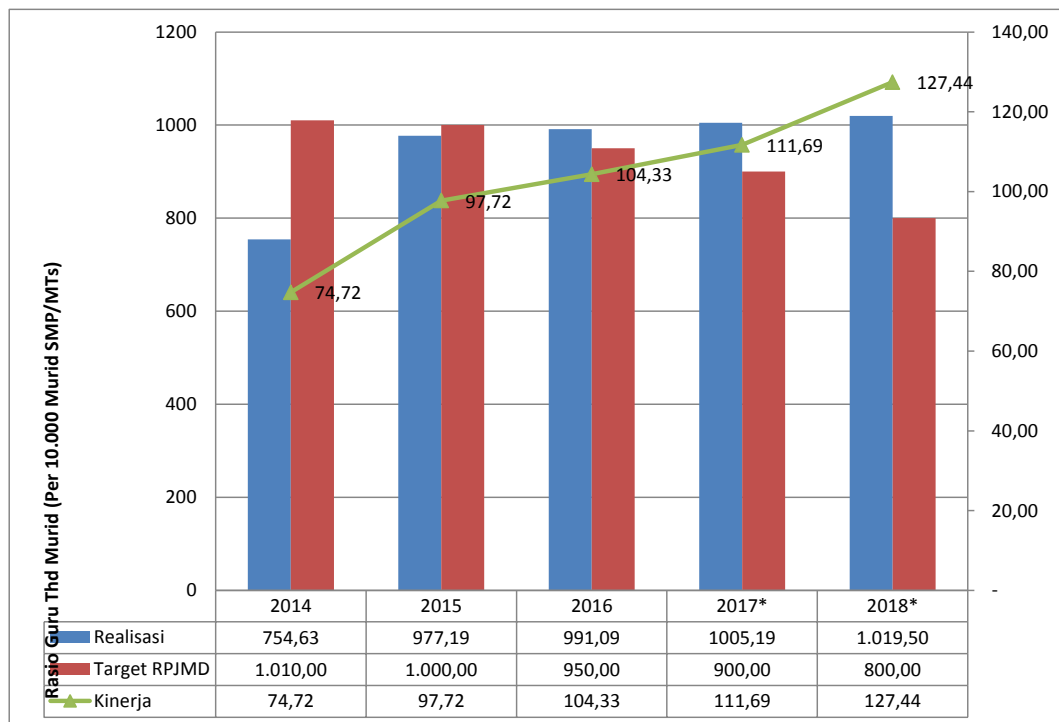


Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.49.  
Kinerja Indikator Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI  
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa indikator rasio guru terhadap murid SMP/MTs (Guru

per 10.000 murid SMP/MTs) menurun dari 1.010 - 800 guru per 10.000 murid SMP/MTs. Realisasi indikator guru terhadap murid SMP/MTs ini berada dibawah target pada tahun 2014 - 2015 dengan realisasi kinerja sebesar 74,72% - 97,72% yang terkategori Sedang - Sangat Tinggi. Pada tahun 2016, capaian indikator rasio guru terhadap murid SMP/MTs sudah diatas target sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 104,33 dan terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2017 dan 2018 ini diperkirakan capaian kinerja indikator rasio guru terhadap murid SMP/MTs masing-masingnya sebesar 111,69% dan 127,44% yang keduanya terkategori Tinggi.



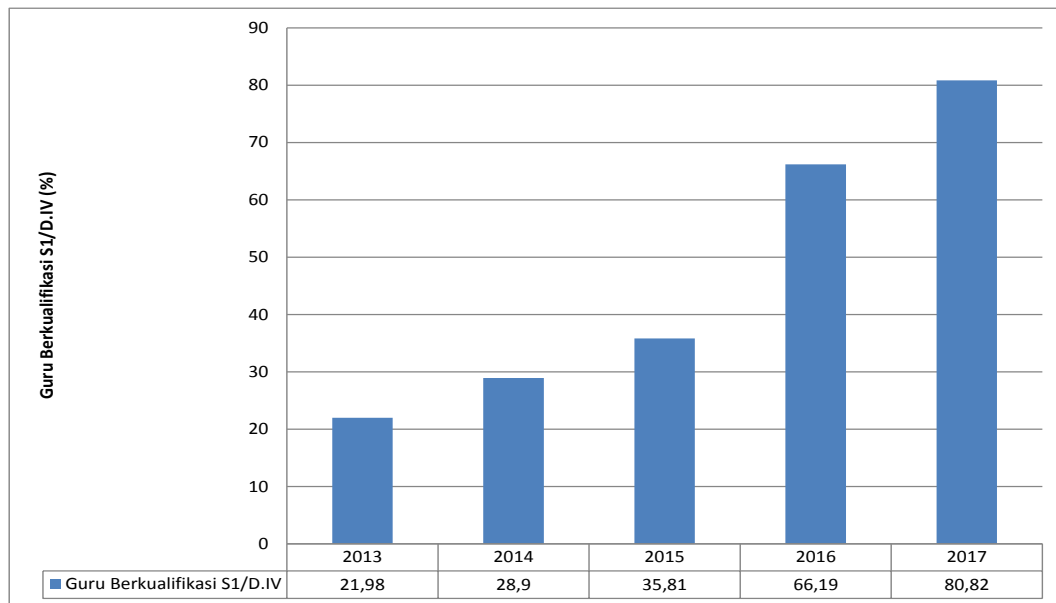
Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.50.  
Kinerja Indikator Rasio Guru Terhadap Murid SMP/MTs  
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

**f. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV**

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional. Seorang guru atau pendidikan profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana S1 atau diploma empat (D.IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian) memiliki sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

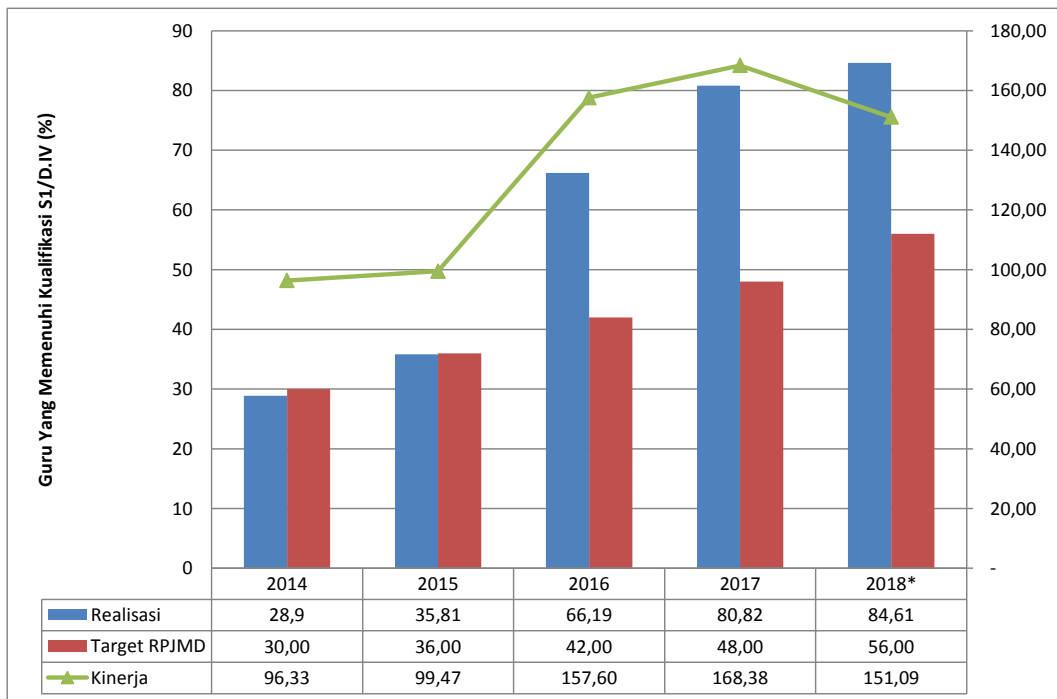


Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.51.  
Perkembangan Guru Berkualifikasi S1/D.IV Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2017

Selama periode 2013 - 2017, perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV memiliki trend terus meningkat. Pada tahun 2013 persentase guru (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK) yang memiliki kualifikasi S1/D.IV sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 20 tahun 2003 dan UU No. 14 tahun 2005 serta PP No. 19 tahun 2005, sebesar 21,98%, meningkat menjadi 80,82% pada tahun 2017. Capaian persentase guru yang memiliki kualifikasi S1/D.IV Indragiri Hilir tahun 2017 ini lebih rendah dibanding capaian Kabupaten Pelalawan (90,58%), Indragiri Hulu (87,21%), dan Kuansing (84,26%) serta Provinsi Riau (91,58%). Bila

dibandingkan capaian antara guru SD/ MI dengan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK menunjukkan bahwa persentase capaian prosentase Guru tingkat SD/MI yang memiliki kualifikasi S1/D.IV sebesar 76,93%, adalah yang terendah diikuti guru SMP/MTs (84,36%) dan guru SMA/MA/SMK (92,54%). Selama periode 2013 - 2017, rata-rata pertumbuhan guru yang memiliki kualifikasi S1/D.IV meningkat sebesar 29,75% per tahun.



Gambar 2.52.  
Kinerja Indikator Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV  
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa indikator guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV ditargetkan meningkat dari 30% pada tahun menjadi 56% pada tahun 2018. Pada tahun 2014 dan 2015, realisasi indikator guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV mengalami peningkatan dibawah target dengan realisasi kinerja sebesar 96,33% - 99,47% dengan kategori sangat tinggi. Pada tahun 2016 - 2017, realisasi indikator ini diatas target termasuk pada tahun 2018 yang juga diperkirakan diatas target. Realisasi kinerja

indikator ini berkisar antara 151,09% - 168,38% yang semuanya terkategori sangat tinggi.

**g. SPM pendidikan Dasar**

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM DIKDAS) adalah salah satu tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai SPM merupakan kewenangan dan tanggungjawab Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar merupakan kewenangan kabupaten/kota. di dalamnya mencakup : (a) pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota dan; (b) pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan. Selain jenis pelayanan pendidikan diatas, di kabupaten/kota tertentu wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah. Jenjang pendidikan dasar terdiri dari jenjang SD/MI dan SMP/MTs dengan total jumlah indikator SD/MI 27 indikator dan SMP/MTs 28 indikator. Batas waktu pencapaian SPM bidang pendidikan dasar adalah tahun 2015. Rincian mengenai jenis pelayanan dasar dan indikator SPM bidang pendidikan dasar dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.10  
Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM  
Bidang Pendidikan Dasar

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
	Indikator	Nilai (%)	
<b>I</b>	<b>Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota</b>		
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	100	2015
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	100	2015
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	100	2015

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
	Indikator	Nilai (%)	
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru	100	2015
5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	100	2015
6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	100	2015
7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	100	2015
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	100	2015
9	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKN	100	2015
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100	2015
11	Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100	2015
12	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	100	2015
13	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	100	2015
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	100	2015
<b>II</b>	<b>Pendidikan dasar oleh satuan pendidikan</b>		
15	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKN dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	100	2015
16	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	100	2015
17	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	100	2015
18	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	100	2015
19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	100	2015
20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelas I - II : 18 jam per minggu</li> <li>- Kelas III : 24 jam per minggu</li> <li>- Kelas IV – VI : 27 jam per minggu</li> <li>- Kelas VII – IX : 27 jam per minggu</li> </ul>	100	2015
21	Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	100	2015
22	Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	100	2015
23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	100	2015
24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	100	2015

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
	Indikator	Nilai (%)	
25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik	100	2015
26	Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhire (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau	100	2015
27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip- prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	100	2015

Selama Periode 2013 - 2017, pencapaian SPM pendidikan dasar Kabupaten Indragiri hilir ditunjukkan pada tabel berikut. Pada tahun 2017, capaian indikator tingkat SD terhadap 27 indikator, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan sebanyak 24 indikator (88,88%) dan ada 11 indikator (40,74% yang telah mencapai target nasional. Pada tingkat SMP, dari total 28 indikator kinerja, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan sebanyak 24 indikator (85,71%) dengan 8 indikator telah mencapai target nasional. Khusus untuk tingkat MI dan MTs tidak disajikan karena berada pada tupoksi Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir

Tabel 2.11  
Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2013 - 2017

No.	Indikator SPM	Level	Capaian SPM				
			2013	2014	2015	2016	2017
	<b>A. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota</b>						
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	SD	-	-	-	-	-
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	-	-	-	-	-
		MTs	-	-	-	-	-
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi	SD	-	19,73	30,12	96,71	89,73
		MI	-	-	-	-	-
		SD	-	19,73	34,36	68,99	89,73
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	30,56	30,56	95,56	96,32	96,69

No.	Indikator SPM	Level	Capaian SPM				
			2013	2014	2015	2016	2017
	dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	MTs	-	-	-	-	
		SMP	30,56	30,56	80,00	91,18	96,69
		MTs					
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	SMP	-	-	14,81	41,18	55,88
		MTs	-	-	-	-	-
		SMP	-	-	14,07	35,29	55,88
		MTs	-	-	-	-	-
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	SD	31,91	31,91	37,64	69,77	81,58
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	-	-	25,93	75,74	79,78
		MTs	-	-	-	-	-
		SMP	-	-	23,70	68,38	-
		MTs	-	-	-	-	-
5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	SD	36,94	36,94	36,94	83,91	98,06
		MI	-	-	-	-	-
		SD	36,94	88,39	95,56	96,71	98,06
		MI	-	-	-	-	-
6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	SMP	-	-	20,74	57,35	73,53
		MTs	-	-	-	-	-
7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	SD	44,68	40,46	48,84	91,09	97,29
		MI	-	-	-	-	-
		SD	44,68	40,46	47,88	63,18	97,29
		MI	-	-	-	-	-
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	SMP	-	-	57,78	69,12	76,84
		MTs	-	-	-	-	-
		SMP	-	-	65,93	74,26	76,84
		MTs	-	-	-	-	-



No.	Indikator SPM	Level	Capaian SPM				
			2013	2014	2015	2016	2017
9	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn	SMP	-	-	57,78	25,74	36,03
		MTs	-	-	-	-	-
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	SD	50,87	50,87	54,83	62,21	74,03
		MI	-	-	-	-	-
11	Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	SMP	-	-	57,78	97,06	99,26
		MTs	-	-	-	-	-
12	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	SD	-	94,44	91,23	100,00	100,00
		MI	-	-	-	-	-
13	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	SD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		MTs	-	-	-	-	-
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	SD	30,75	30,75	32,43	100,00	100,00
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	30,75	30,75	33,33	100,00	100,00
		MTs	-	-	-	-	-
<b>B. Pendidikan Dasar Oleh Satuan Pendidikan</b>							
15	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	SD	11,41	51,71	51,71	59,51	31,49
		MI	-	-	-	-	-
		SD	11,41	0,08	33,33	0,47	31,49
		MI	-	-	-	-	-
16	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	SMP	-	-	7,96	8,39	17,09
		MTs	-	-	-	-	-
		SMP	-	-	14,07	18,38	17,09
		MTs	-	-	-	-	-

No.	Indikator SPM	Level	Capaian SPM				
			2013	2014	2015	2016	2017
17	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	SD	16,05	16,05	19,31	29,07	33,91
		MI	-	-	-	-	-
18	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	SD	-	9,86	13,13	17,64	19,36
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	10,84	16,16	21,48	72,06	90,44
		MTs	-	-	-	-	-
19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	SD	26,69	26,69	30,50	71,51	73,26
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	-	-	21,48	72,06	88,24
		MTs	-	-	-	-	-
20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :		20,76	24,76	30,17	83,56	
	Kelas I - II : 18 jam per minggu	SD	20,76	24,76	32,43	81,59	87,40
	Kelas III : 24 jam per minggu	MI	-	-	-	-	-
	Kelas IV - VI : 27 jam per minggu	SMP	20,76	24,76	21,48	91,11	94,81
	Kelas VII - IX : 27 jam per minggu	MTs	-	-	-	-	-
21	Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	SD	62,48	24,76	32,43	100,00	100,00
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	62,48	-	21,48	100,00	100,00
		MTs	-	-	-	-	-
22	Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	SD	56,29	62,48	74,32	100,00	100,00
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	56,29	-	72,59	99,26	100,00
		MTs	-	-	-	-	-
23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	SD	50,48	50,48	100,00	99,42	100,00
		MI	-	-	-	-	-
	Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	SMP	50,48	50,48	100,00	92,65	100,00
		MTs	-	-	-	-	-
24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan	SD	45,07	100,00	100,00	100,00	100,00
		MI	-	-	-	-	-

No.	Indikator SPM	Level	Capaian SPM				
			2013	2014	2015	2016	2017
	umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	SMP	45,07	100,00	100,00	99,26	100,00
		MTs	-	-	-	-	-
25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik	SD	54,16	100,00	100,00	100,00	100,00
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	54,16	100,00	100,00	100,00	100,00
		MTs	-	-	-	-	-
26	Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau	SD	64,02	100,00	100,00	100,00	100,00
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	64,02	100,00	100,00	100,00	100,00
		MTs	-	-	-	-	-
27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip- prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)		49,90				
		SD	49,90	100,00	100,00	100,00	100,00
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	49,90	100,00	100,00	100,00	100,00
		MTs	-	-	-	-	-
	IP 27.1	SD	49,90	100,00	100,00	100,00	100,00
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	49,90	100,00	100,00	100,00	100,00
		MTs	-	-	-	-	-
	IP 27.2	SD	49,90	100,00	100,00	100,00	100,00
		MI	-	-	-	-	-
		SMP	49,90	100,00	100,00	100,00	100,00
MTs		-	-	-	-	-	
IP 27.3	SD	49,90	100,00	100,00	100,00	100,00	
	MI	-	-	-	-	-	
	SMP	49,90	100,00	100,00	100,00	100,00	
	MTs	-	-	-	-	-	

Permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian SPM bidang pendidikan dasar di Kabupaten Indragiri Hilir menurut jenis pelayanan dan indikator, solusinya uraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.12  
Permasalahan/Hambatan Dalam Penerapan Serta Solusi dalam pencapai  
SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir

NO.	Jenis Pelayanan	Indikator	Hambatan	Solusi
1.	Perluasan Akses Pendidikan Dasar	- Persentase ketersediaan satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	Kondisi wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dengan ketinggian rata-rata 0-3 dpl, dengan kondisi daratan merupakan lahan gambut	Perlunya pendanaan pembangunan sarana prasarana sekolah yang cukup besar
2.	Rasio rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	- Persentase peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	Penyebaran penduduk usia sekolah yang tidak merata	Perlunya penyelenggaraan sekolah filial atau sekolah non induk
3.	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	- Persentase SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	Jumlah tenaga guru mata pelajaran IPA yang masih kurang	Penerimaan guru PNS atau Non PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan jurusan IPA linier dengan
4.	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	- Persentase SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	Ketersediaan anggaran yang belum dapat memenuhi kebutuhan ruang kepala sekolah dan ruang guru beserta perabotannya	Mengalokasikan sumber pendanaan melalui sumber pendanaan dari sumber lain seperti, Dana Alokasi Khusus, APBN, dan APBD Provinsi Riau
5.	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4	- Persentase SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4	Moratorium penerimaan guru PNS	Penerimaan tenaga guru honorer

NO.	Jenis Pelayanan	Indikator	Hambatan	Solusi
	(empat) orang guru setiap satuan pendidikan;	(empat) orang guru setiap satuan pendidikan;		
6.	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	- Persentase setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	Moratorium penerimaan guru PNS	Penerimaan tenaga guru honorer
7.	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;	- Persentase SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;	Moratorium penerimaan guru PNS	Penerimaan tenaga guru honorer
8.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;	- Persentase setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;	Moratorium penerimaan guru PNS	Penerimaan tenaga guru honorer
9.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan <a href="#">kualifikasi akademik S-1 atau D-IV</a> dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;	- Persentase setiap SMP/MTs tersedia guru dengan <a href="#">kualifikasi akademik S-1 atau D-IV</a> dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;	Moratorium penerimaan guru PNS	Penerimaan tenaga guru honorer
10.	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	- Persentase setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	Masih terdapat Kepala SD/MI yang belum berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	Izin belajar ataupun tugas belajar yang dibiayai oleh dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir, maupun sumber pendanaan lain
11.	Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat	- Persentase setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat	Masih terdapat Kepala SMP/MTs yang belum berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah	Izin belajar ataupun tugas belajar yang dibiayai oleh dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir, maupun

NO.	Jenis Pelayanan	Indikator	Hambatan	Solusi
	pendidik;	pendidik;	memiliki sertifikat pendidik;	sumber pendanaan lain
12.	Di setiap kabupaten/kota semua <a href="#">pengawas sekolah</a> dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	- Persentase setiap kabupaten/kota semua <a href="#">pengawas sekolah</a> dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	Masih terdapat Pengawas Sekolah yang belum berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	Izin belajar ataupun tugas belajar yang dibiayai oleh dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir, maupun sumber pendanaan lain
13.	Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	- Persentase Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	Ketersediaan anggaran belum maksimal dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	Pengalokasian anggaran melalui sumber-sumber lain, seperti :DAK, APBN dan APBD Provinsi
14.	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	- Persentase Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	Keterbatasan tenaga pengawas dan keterbatasan pendanaan bagi pengawas dalam melaksanakan tugas kepengawasan	Pengalokasian anggaran melalui sumber-sumber lain, seperti :DAK, APBN dan APBD Provinsi

### 2.3.1.2. Kesehatan

Layanan urusan wajib dasar bidang kesehatan dianalisis dari aspek (i) rumah sakit, (ii) Puskesmas, (iii) Dokter, Perawat dan Bidan, (iv) cakupan.

#### a. Rasio Rumah Sakit

Pada tahun 2017, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 3 rumah sakit pemerintah. Selama periode 2013 - 2017, jumlah rumah sakit tidak mengalami perubahan dan yang berubah adalah jumlah penduduk yang meningkat. Selama periode ini, rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di

Indragiri Hilir relatif tetap yaitu sebesar 0,006 yang berarti setiap 1 rumah sakit melayani sebanyak 175.934 orang penduduk Indragiri Hilir. Pada tahun 2017, capaian rasio rumah sakit Indragiri Hilir lebih rendah dibanding Indragiri Hulu dan Provinsi Riau yang masing-masingnya sebesar 0,007 dan 0,011.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, rasio ideal daya tampung RS adalah 1.000 penduduk : 1 tempat tidur. Pada tahun 2017, jumlah penduduk sebanyak 722.234 jiwa maka dibutuhkan jumlah tempat tidur sebanyak 704 tempat tidur. Total tempat tidur keempat rumah sakit di Indragiri Hilir sebanyak 308 tempat tidur sehingga masih kurang sebanyak 306 tempat tidur. Oleh karena itu, upaya peningkatan jumlah tempat tidur sehingga idela 1 tempat tidur per 1.000 penduduk disamping peningkatan sarana dan prasarana layanan rumah sakit perlu mendapat perhatian pada pembangunan ke depan.

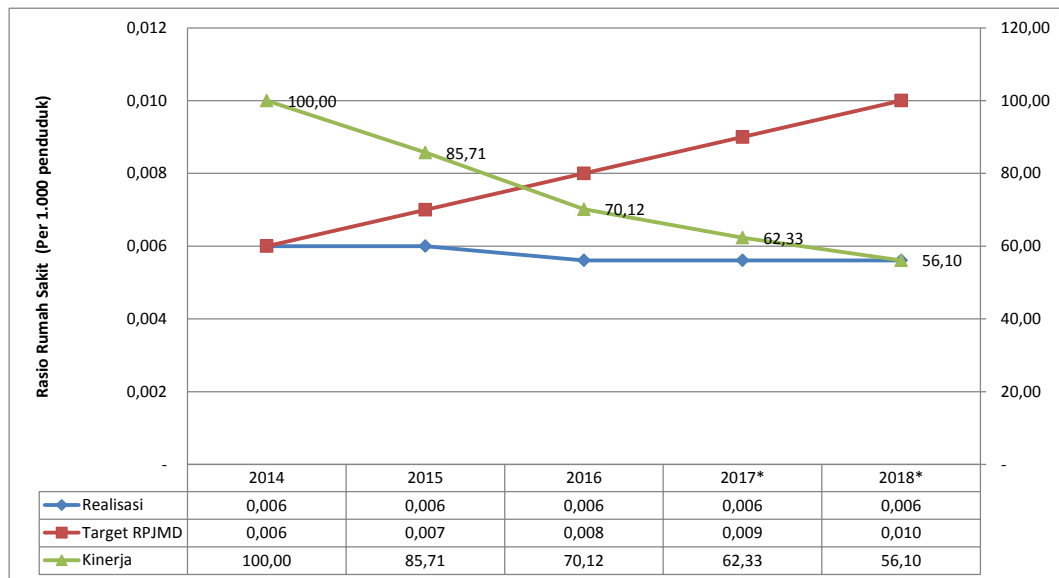


Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2013 - 2018), (Indragiri Hulu dalam Angka, 2013 - 2018) (Provinsi Riau Dalam Angka , 2013 - 2018)

Gambar 2.53.  
Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2013 - 2017

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa indikator Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk telah

ditetapkan terus meningkat meski belum ideal yaitu sebesar 0,006 tahun 2014 meningkat menjadi 0,01 pada tahun 2018. Pada tahun 2014, realisasi rasio rumah sakit per 1.000 penduduk sesuai target yaitu 0,06 sehingga realisasi kinerja sebesar 100% dan terkategori sangat tinggi. Pada tahun 2015 - 2018, realisasi dan perkiraan realisasi berada dibawah target dengan kisaran realisasi kinerja sebesar 56,10% -85,71% yang terkategori dari rendah - tinggi.



Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.54.  
Kinerja Indikator Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk  
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

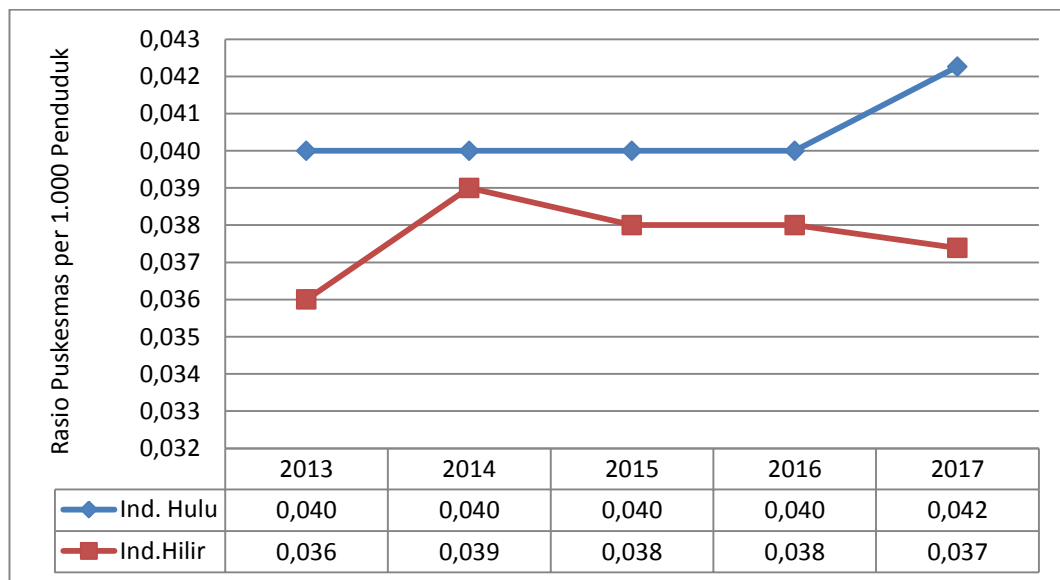
#### b. Rasio Puskesmas

Puskesmas adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat. Selama periode 2013 - 2017, perkembangan rasio puskesmas per 1.000 penduduk Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif menurun. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, jumlah puskesmas di Indragiri Hilir sebanyak 27 puskesmas lebih banyak dari jumlah kecamatan (20 kecamatan). Rasio puskesmas per 1.000



penduduk sebesar 0,036 atau 1 puskesmas, rata-rata melayani sebanyak 27.598 penduduk pada tahun 2013 dan menurun menjadi 0,037 atau setiap puskesmas melayani sebanyak 26.049 penduduk pada tahun 2017 sementara tahun 2014 sampai 2016 antara 0,038 dan 0,039. Capaian rasio puskesmas per 1.000 penduduk Indragiri Hilir ini masih dibawah capaian rasio puskesmas per 1.000 penduduk Indragiri Hulu.

Rasio puskesmas Indragiri hilir sebesar 0,05 - 0,043 artinya setiap satu puskesmas melayani 26.064 - 28.149 penduduk. Rentang jumlah penduduk yang dilayani oleh puskesmas di Indragiri Hilir ini masih memenuhi standar nasional (1 puskesmas melayani 30.000 penduduk). Meski rasio puskesmas telah memenuhi standar nasional dari sisi kuantitas, namun dari segi kualitas sarana dan prasarana relatif masih belum memadai. Kondisi puskesmas, peralatan dan obat-obatan belum mampu memenuhi standar sebuah puskesmas yang baik. Oleh karena itu, pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas harus menjadi agenda pembangunan ke depan.

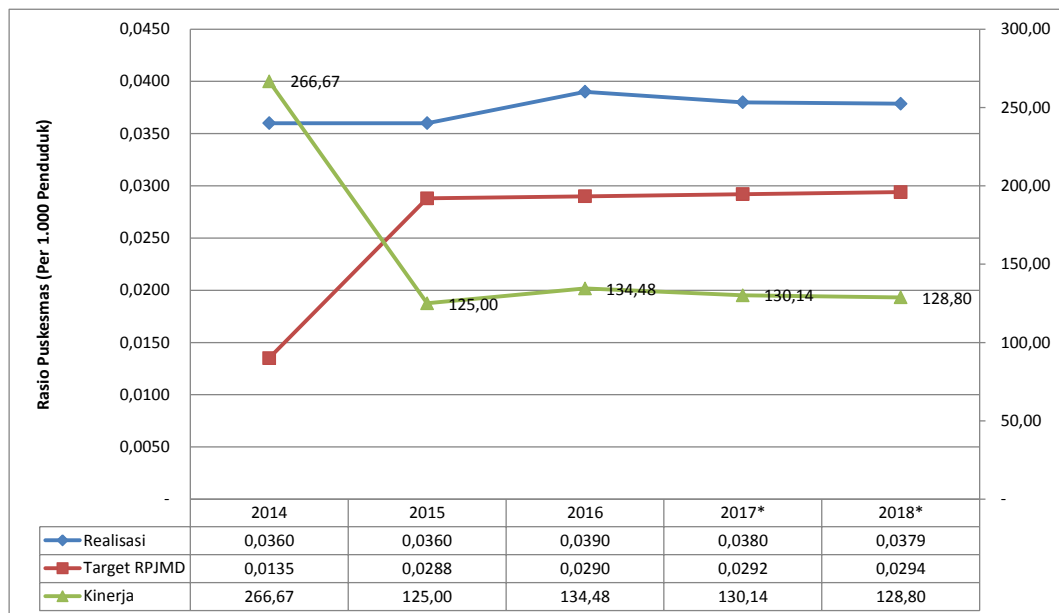


Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2013 - 2017), (Indragiri Hulu dalam Angka, 2013 - 2017)

Gambar 2.55.

Perkembangan Rasio puskesmas per 1.000 penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2013 - 2017

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa indikator rasio puskesmas per 1.000 penduduk ditargetkan terus meningkat yaitu dari 0,0135 pada tahun 2014 menjadi 0,0294 pada tahun 2018. Selama periode 2014 hingga 2016, capaian rasio puskesmas per 1.000 penduduk Indragiri Hilir berada diatas target dengan realisasi kinerja berkisar antara 134,48 - 266,67% dengan kategori sangat tinggi. Pada tahun 2017 - 2018, capaian rasio juga diatas target dengan realisasi kinerja berkisar antara 128,80 - 130,14% dan terkategori Sangat Tinggi.



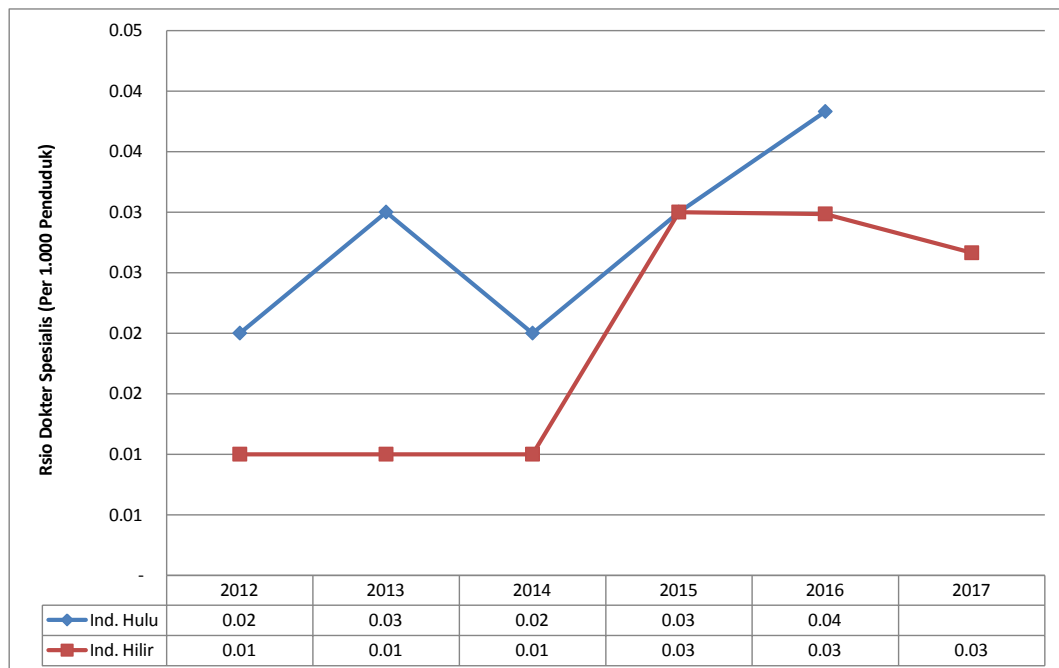
Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.56.  
Kinerja Indikator Rasio Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk  
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

### c. Rasio Dokter Spesialis

Selama periode 2012 - 2017, jumlah dokter spesialis yang Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 7 - 21 orang. Selama periode ini, rasio dokter spesialis per 1.000 penduduk memiliki tren meningkat

berkisar antara yaitu dari 0,01 pada tahun 2012 meningkat menjadi 0,03 pada tahun 2017 yang bermakna bahwa setiap 1 orang dokter spesialis melayani penduduk berkisar antara 33.511 - 115.379 penduduk. Kondisi rasio dokter spesialis Indragiri Hilir masih dibawah standar (15 dokter spesialis melayani 100.000 penduduk atau 1 dokter spesialis melayani 6.666 penduduk). Dibandingkan dengan capaian rasio dokter spesialis Indragiri Hulu, capaian rasio dokter spesialis Indragiri Hilir masih dibawah capaian rasio dokter spesialis Indragiri Hulu. Agar mencapai jumlah ideal, maka jumlah dokter spesialis di Indragiri Hilir sebanyak 107 orang dokter spesialis dari berbagai keahlian. Kondisi ini perlu menjadi target pada pembangunan kesehatan ke depan.



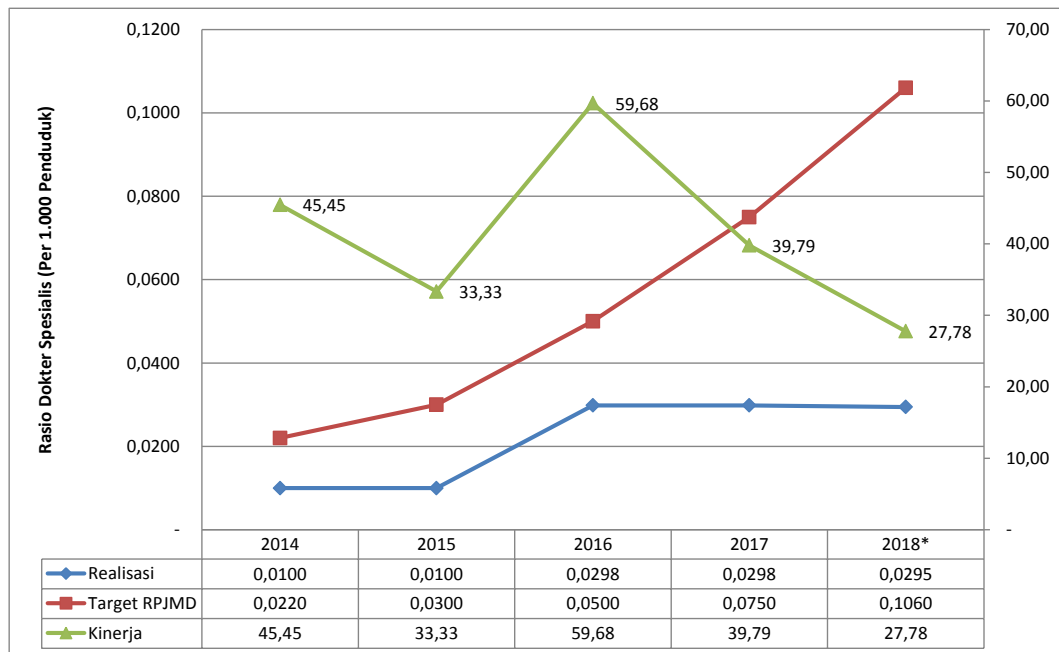
Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2013 - 2017) dan (Indragiri Hulu dalam Angka, 2013 - 2017)

Gambar 2.57.

Perkembangan Rasio Dokter Spesialis Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 - 2017

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa indikator rasio dokter spesialis per 1.000 sebesar terus

meningkat meski jauh dari ideal yaitu sebesar 0,022 - 0,106. Selama periode 2014 - 2016, capaian target indikator rasio dokter spesialis terus dibawah target dimana pada tahun 2012 - 2016 memiliki realisasi kinerja sebesar 33,33% - 59,68% yang terkategori Sangat Rendah. Pada tahun 2017 - 2018, realisasi kinerja indikator rasio dokter spesialis diperkirakan semakin rendah, berkisar antara 27,78% - 39,79% dan terkategori Sangat Rendah.

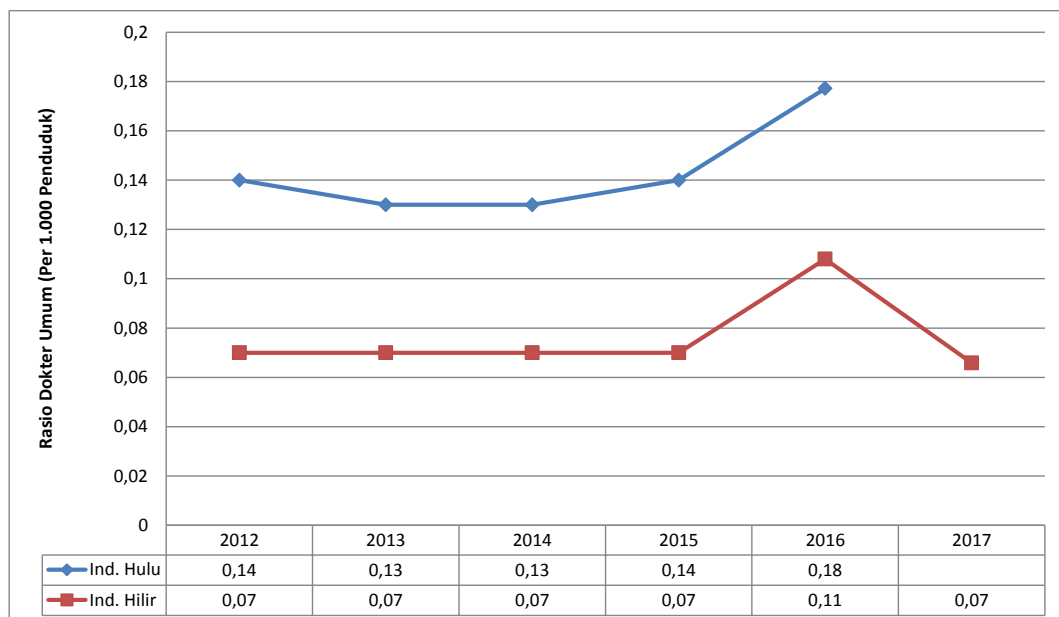


Gambar 2.58.  
Kinerja Indikator Rasio Dokter Spesialis Per 1.000 Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

#### d. Rasio Dokter Umum

Selama periode 2012 - 2017, rasio dokter umum per 1.000 penduduk Indragiri Hilir berfluktuatif konstan. Pada tahun 2012, jumlah dokter umum umum di Indragiri Hilir sebanyak 47 orang dengan rasio dokter umum per 1.000 penduduk sebesar 0,07 yang berarti setiap 1 orang dokter melayani sebanyak 14.680 orang penduduk. Jumlah dokter umum meningkat menjadi 76 orang pada tahun 2014 dengan rasio ini meningkat menjadi 0,07 atau 1 dokter melayani 9.140 orang penduduk. Pada tahun

2017, jumlah dokter umum menurun menjadi 47 orang dengan rasio sebesar 0,07 atau 1 orang dokter melayani 15.371 orang penduduk Indragiri Hilir. Capaian rasio dokter umum Indragiri dimana setiap 1 orang dokter umum melayani antara 9.260 - 15.371 orang penduduk Indragiri Hilir masih dibawah standard nasional (1 orang dokter umum melayani 2.500 orang penduduk). Capaian rasio dokter umum per 1.000 penduduk Indragiri Hilir ini pada tahun 2016, dibawah capaian rasio Kabupaten Indragiri Hulu. Oleh karena itu, upaya pencapaian rasio dokter umum per 1.000 penduduk Indragiri Hilir perlu diupayakan terus untuk dicapai. Idealnya sesuai standar nasional, jumlah dokter umum di Indragiri Hilir tahun 2017 sebanyak 289 dokter, masih kurang sebanyak 242 orang dokter umum.

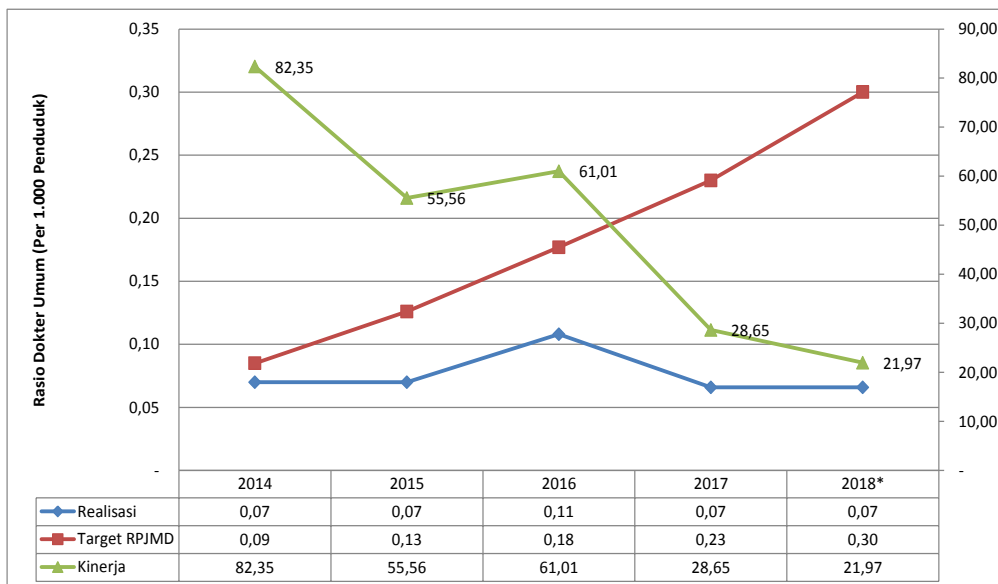


Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2013 - 2017), (Indragiri Hulu dalam Angka, 2013 - 2017)

Gambar 2.59.  
Perkembangan Rasio Dokter Umum Per 1.000 Penduduk  
Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2012 - 2017

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa indikator rasio dokter umum per 1.000 penduduk terus

meningkat dari 0,085 meningkat menjadi 0,30. Realisasi rasio dokter umum per 1.000 penduduk Indragiri Hilir berfkuktatif dan terus dibawah target RPJMD. Pada tahun 2014, rasio dokter umum per 1.000 penduduk Indragiri Hilir sebesar 0,07 dengan realisasi kinerja sebesar 82,35% dan terkategori tinggi. Pada tahun 2015 hingga 2017, realisasi kinerja berkisar 28,85% - 55,56% dan terkategori Rendah - Sangat Rendah. Pada tahun 2018, diperkirakan capaian realisasi rasio dokter umum sebesar 0,07 dengan realisasi kinerja sebesar 21,97% dan terkategori Sangat rendah. Secara umum, rata-rata capaian realisasi kinerja rasio dokter umum sebesar 49,91% dan terkategori Sangat Rendah.

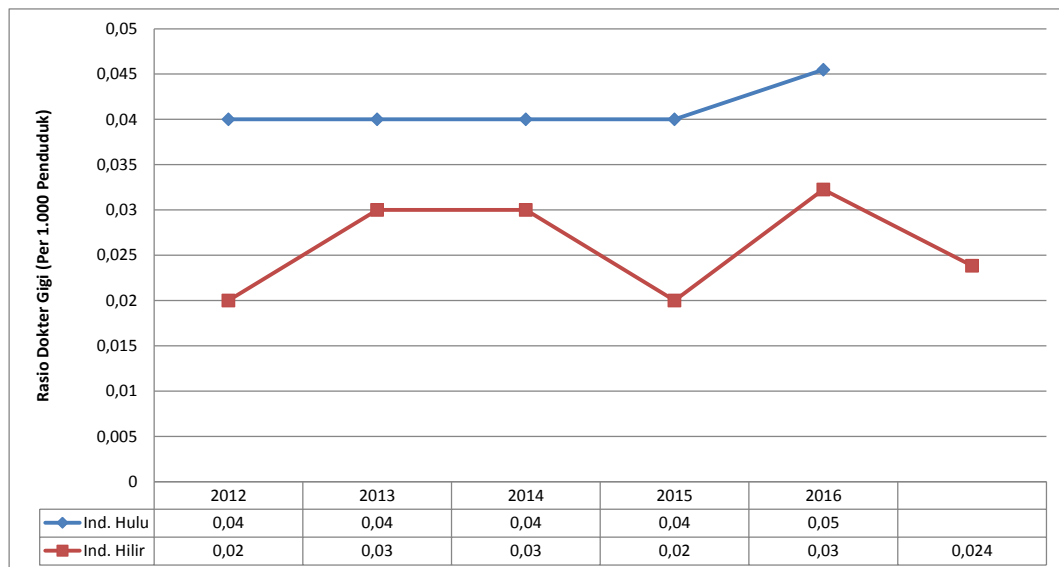


Gambar 2.60.  
Kinerja Indikator Rasio Dokter Umum Per 1.000 Penduduk  
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

**e. Rasio Dokter Gigi**

Selama periode 2012 - 2017, rasio dokter gigi per 1.000 penduduk Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2012, jumlah dokter gigi di Indragiri Hilir sebanyak 13 orang dengan rasio dokter gigi per 1.000 penduduk Indragiri Hilir sebesar 0,02 atau setiap 1 orang dokter gigi melayani sebanyak 53.072 orang penduduk. Pada tahun 2015, jumlah dokter gigi meningkat menjadi 21 orang dengan rasio per

1.000 penduduk sebesar 0,02 atau setiap 1 orang dokter gigi melayani sebanyak 33.511 orang penduduk Indragiri Hilir. Pada tahun 2017, jumlah dokter gigi menurun menjadi 17 orang dengan rasio sebesar 0,03 atau setiap 1 orang dokter gigi melayani sebanyak 41.943 penduduk Indragiri Hilir. Capaian layanan 1 orang dokter gigi melayani 31.001 - 57.690 penduduk Indragiri Hilir masih dibawah standar nasional (1 dokter gigi untuk melayani 9.090 penduduk). Bila dibandingkan dengan Indragiri Hulu, capaian rasio dokter gigi Indragiri Hilir lebih rendah dibandingkan dengan capaian rasio dokter gigi Indragiri Hulu. Menurut standar nasional, pada tahun 2017 Indragiri Hilir masih perlu tambahan sebanyak 62 orang dokter gigi.

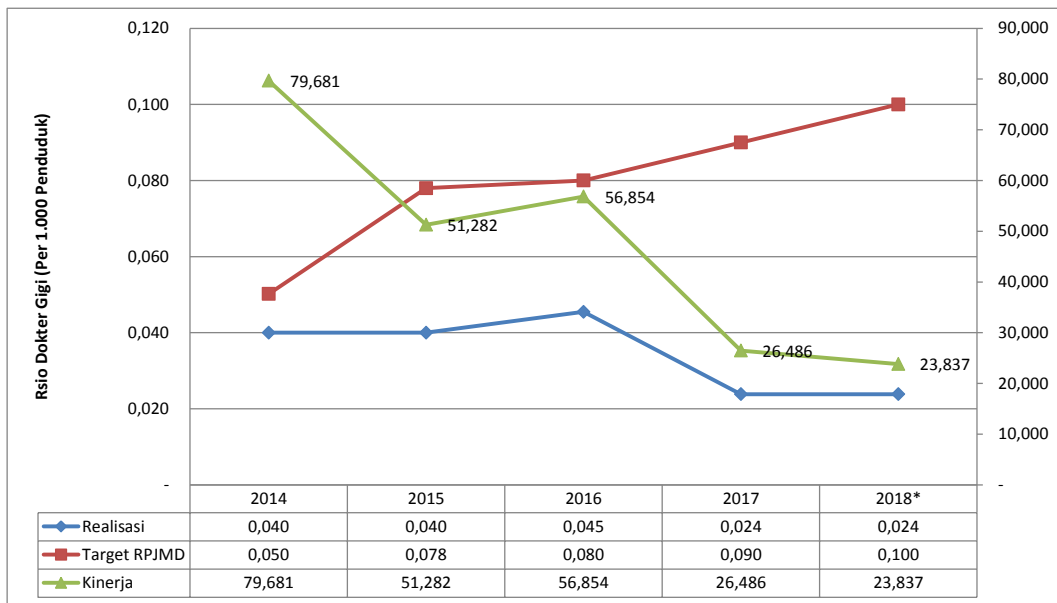


Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2013 - 2017), (Indragiri Hulu dalam Angka, 2013 - 2017)

Gambar 2.61.  
Perkembangan Rasio Dokter Gigi Per 1.000 Penduduk  
Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2012 - 2017

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa indikator rasio dokter gigi per 1.000 penduduk Indragiri Hilir telah ditetapkan terus meningkat meski belum mencapai rasio ideal yaitu dari 0,050 tahun 2014 menjadi 0,10 pada tahun 2018.

Realisasi rasio dokter gigi per 1.000 penduduk Indragiri tahun 2014 – 2017 berada dibawah target dengan dengan realisasi kinerja berkisar antara 26,49% - 79,68% yang terkategori Sangat Rendah - Tinggi. Pada tahun 2018, diperkirakan realisasi kinerja indikator dokter gigi per 1.000 penduduk sebesar 44,12% dan terkategori Sangat Rendah. Selama periode ini, rata-rata realisasi kinerja rasio dokter gigi per 1.000 penduduk sebesar 53,58% dan terkategori Rendah.



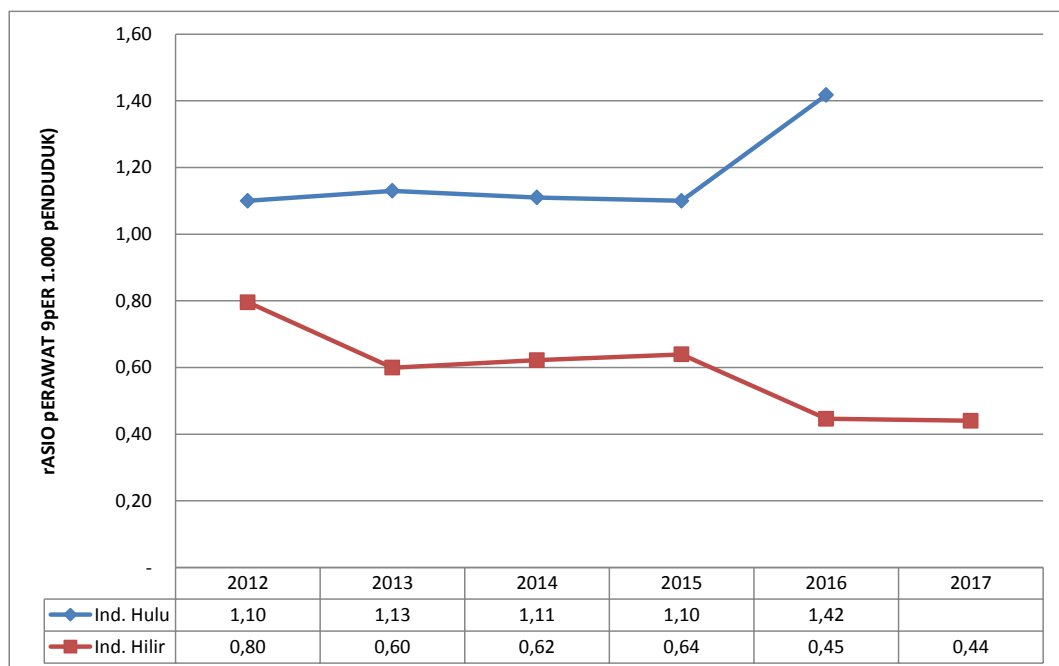
Gambar 2.62.  
Kinerja Indikator Rasio Dokter Gigi Per 1.000 Penduduk  
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018

#### f. Rasio Perawat

Perawat adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kewenangan untuk memberikan asuhan keperawatan pada orang lain berdasarkan ilmu dan kiat yang dimilikinya dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya. Selama periode 2012 – 2017, rasio perawat per 1.000 penduduk Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif menurun. Pada tahun 2012, jumlah perawat di Indragiri Hilir sebanyak 549 orang dengan rasio perawat per 1.000 penduduk Indragiri Hilir sebesar 0,80 yang berarti 1 orang perawat melayani sebanyak 1.257 orang



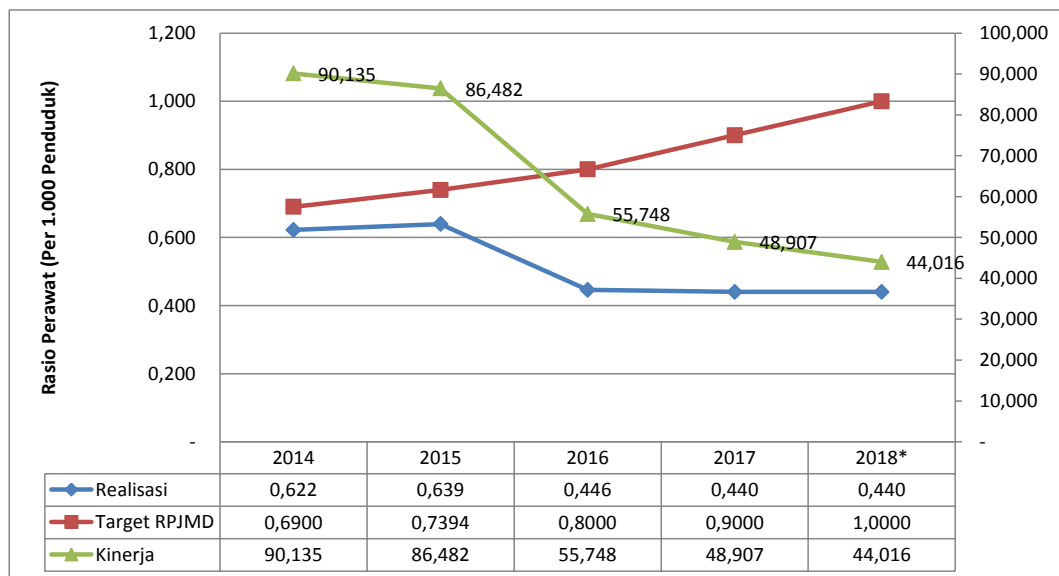
penduduk Indragiri Hilir. Pada tahun 2015, jumlah perawat meningkat menjadi 450 orang dengan rasio yang menurun menjadi 0,62 yang berarti 1 orang perawat melayani sebanyak 1.564 penduduk. Pada tahun 2017, jumlah perawat menurun menjadi 315 orang dengan rasio sebesar 0,44 yang berarti setiap 1 orang perawat melayani sebanyak 2.242 penduduk. Capaian rasio perawat di Indragiri Hilir dimana 1 perawat melayani 1.257 - 2242 penduduk Indragiri Hilir tergolong belum sesuai standar nasional (1 perawat melayani 900,90 penduduk). Bila capaian rasio perawat per 1.000 penduduk indragiri Hilir dibandingkan dengan capaian rasio perawat per 1.000 penduduk Indragiri Hulu menunjukkan bahwa capaian Indragiri Hilir relatif lebih rendah. Bila mengikut standar nasional maka pada tahun 2017, Indragiri Hilir masih kekurangan sebanyak 487 orang perawat.



Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2013 - 2017) dan (Indragiri Hulu dalam Angka, 2013 - 2017)

Gambar 2.63.  
Perkembangan Rasio Perawat Per 1.000 Penduduk  
Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2012 - 2017

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa indikator rasio perawat per 1.000 penduduk Indragiri Hilir terus meningkat meski belum sampai pada standar ideal yaitu dari 0,69 pada tahun 2014 menjadi 1,0 pada tahun 2018. Realisasi rasio perawat per 1.000 Indragiri Hilir selama periode ini terus dibawah target dengan realisasi kinerja berkisar antara 44,02% - 90,14% yang terkategori Rendah hingga Tinggi. Rata-rata realisasi kinerja indikator rasio perawat per 1.000 penduduk sebesar 65,06% yang terkategori Rendah.

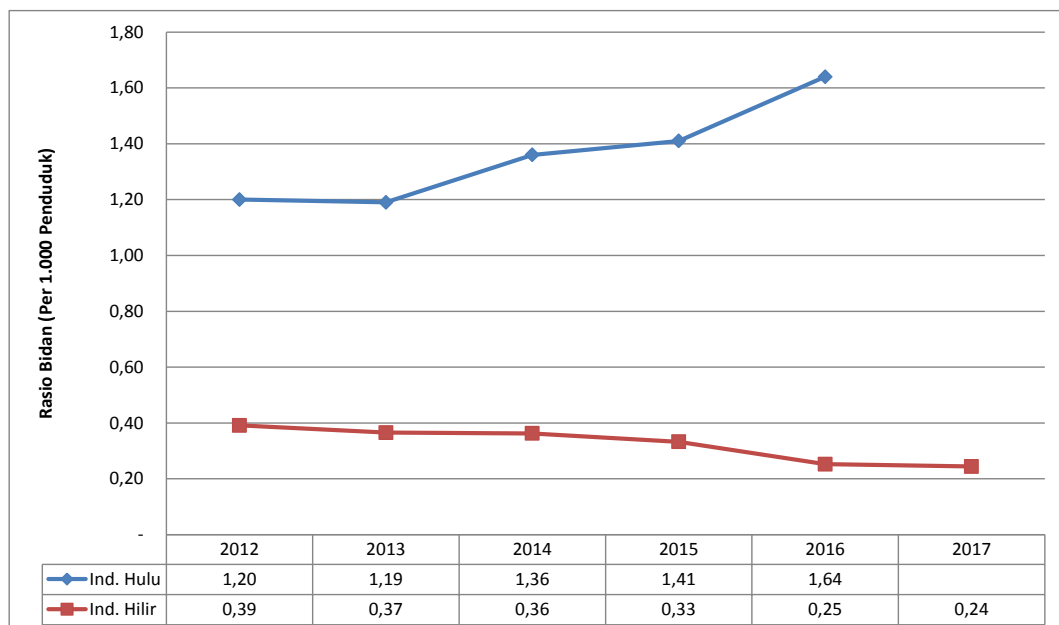


Gambar 2.64.  
Kinerja Indikator Rasio Perawat Per 1.000 Penduduk  
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

#### g. Rasio Bidan

Bidan adalah salah satu petugas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Selama periode 2012 - 2017, rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hilir memiliki trend menurun. Pada tahun 2012, jumlah bidan di Indragiri Hilir sebanyak 270 orang dengan rasio sebesar 0,39 atau setiap 1 orang bidng melayani sebanyak 2.555 orang penduduk Indragiri Hilir. Pada tahun 2017, jumlah bidan menurun menjadi 174 orang dengan rasio bidan per 1.000 penduduk sebesar 0,24 atau setiap 1

orang bidan melayani sebanyak 37.543 penduduk Indragiri Hilir. Rentang pelayanan 1 orang bidan untuk 2.555 - 4.098 penduduk Indragiri Hilir ini terkategori dibawah standar nasional (1 orang bidan melayani sebanyak 833,33 penduduk). Capaian rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hilir relatif masih dibawah capaian rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hulu. Oleh karena itu, agenda peningkatan pelayanan kesehatan khususnya melalui peningkatan rasio bidan per 1.000 penduduk sesuai standar nasional dengan menambah jumlah bidan pada tahun 2017 sebanyak 693 orang.

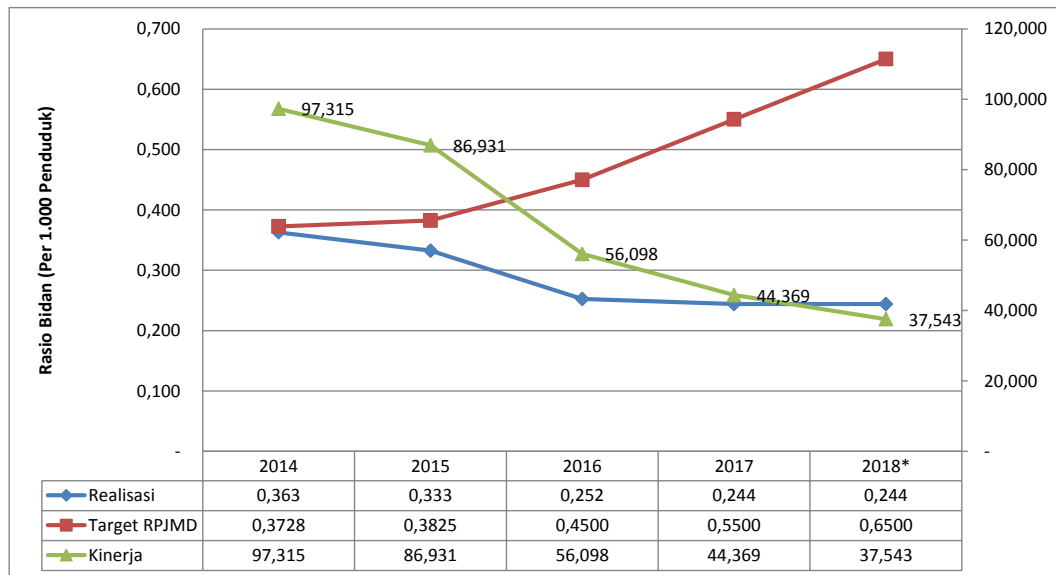


Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2013 - 2017) dan (Indragiri Hulu dalam Angka, 2013 - 2017)

Gambar 2.65.  
Perkembangan Rasio Bidan Per 1.000 Penduduk  
Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Tahun 2012 - 2017

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa indikator rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hilir terus meningkat meski belum akan ideal yaitu dari 0,037 pada tahun 2014 menjadi 0,65 pada tahun 2018. Realisasi indikator rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hilir terus menurun yaitu dari 0,363 dengan realisasi kinerja sebesar 97,31% yang terkategori Sangat Tinggi pada

tahun 2014, menurun menjadi 0,244 dengan realisasi kinerja sebesar 44,37% yang terkategori Sangat Rendah. Pada tahun 2018, diperkirakan realisasi kinerja indikator rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hilir sebesar 37,54% dan terkategori Sangat Rendah. Selama periode 2014 – 2018, rata-rata realisasi kinerja rasio bidan per 1.000 penduduk Indragiri Hilir sebesar 64,45% dan terkategori Rendah.



Gambar 2.66.  
Kinerja Indikator Rasio Bidan Per 1.000 Penduduk  
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018

#### h. SPM Bidang Kesehatan

Selama periode 2013 – 2017, SPM bidang kesehatan memiliki 2 Peraturan Menteri Kesehatan yaitu Permenkes 741/Menkes/Per/VII/2008 yang terdiri dari 4 jenis pelayanan dasar dengan 22 indikator kinerja (termasuk sub indikator) yang menjadi kewajiban dan tanggung yang harus dilaksanakan pemerintah daerah. Target waktu capaian SPM bidang kesehatan adalah tahun 2010–2015 dengan nilai capaian berkisar Antara 0 –100%. Rincian jenis pelayanan dasar dan indikator kinerja SPM bidang Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13  
 Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan  
 Menurut Permenkes 741/Menkes/Per/VII/2008

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	
	Indikator	Nilai (%)		
<b>I</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Dasar</b>			
	1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95	2015
	2	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	80	2015
	3	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90	2015
	4	Cakupan pelayanan ibu nifas	90	2015
	5	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	80	2010
	6	Cakupan kunjungan bayi	90	2010
	7	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	2010
	8	Cakupan pelayanan anak balita	90	2010
	9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100	2010
	10	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	2010
	11	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100	2010
	12	Cakupan peserta KB Aktif	70	2010
	13	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit		
	A.	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	100	2010
	B.	Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100	2010
	C.	Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	100	2010
	D.	Penderita DBD yang Ditangani	100	2010
	E.	Penemuan Penderita Diare	100	2010
	14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	2015
<b>II</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>			
	15	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	2015
	16	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota	100	2015
<b>III</b>	<b>Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB</b>			
	17	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100	2015
<b>IV</b>	<b>Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>			
	18	Cakupan Desa Siaga Aktif	40	2015

Pada tahun 2014, dari 22 indikator yang ditetapkan dalam Permenkes 741/Menkes/Per/VII/2008, Pemerintah Kabupaten Indragiri

Hilir telah menerapkan sebanyak 22 indikator (100%). Namun demikian, belum semua pelayan tersebut memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dari 22 indikator, baru 5 indikator (22,73%) yang telah memenuhi target nasional, selebihnya belum mencapai target nasional.

SPM bidang kesehatan menurut Permenkes 741/Menkes/Per/VII/2008 direvisi menjadi Permenkes Nomor 43/MENKES/PER/VIII/2016. Dalam Permenkes tersebut dijelaskan bahwa terdapat 12 jenis layanan dasar dengan 12 indikator kinerja yang menjadi kewajiban dan tanggung yang harus dilaksanakan pemerintah daerah. Target waktu capaian SPM bidang kesehatan adalah tahun 2016–2020 dengan nilai capaian berkisar Antara 0 –100%. Dalam pelaksanaan, mulai tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sudah mengacu ke Permenkes Nomor 43/MENKES/PER/VIII/2016. Rincian jenis pelayanan dasar dan indikator kinerja SPM bidang Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut.

Tabel 2.14

Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan

Berdasarkan Permenkes No : 43/MENKES/PER/VIII/2016

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian Kinerja Kabupaten	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Batas Waktu Pencapaian	Satker Penanggung Jawab
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	Sesuai standar pelayanan antenatal	Ibu hamil	2020	Dinkes Kab/Kota
2		Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	100	Sesuai standar pelayanan peralinaan	Ibu bersalin	2020	Dinkes Kab/Kota
3		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Bayi baru lahir	2020	Dinkes Kab/Kota
4		Pelayanan kesehatan balita	100	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Balita	2020	Dinkes Kab/Kota

5		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidickn usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar	2020	Dinkes Kab/Kota
6		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun	2020	Dinkes Kab/Kota
7		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas	2020	Dinkes Kab/Kota
8		Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	100	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	2020	Dinkes Kab/Kota
9		Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus	2020	Dinkes Kab/Kota
10		Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	2020	Dinkes Kab/Kota
11		Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	Sesuai standar skrining kesehatan dengan TB	Orang dengan TB	2020	Dinkes Kab/Kota
12		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	2020	Dinkes Kab/Kota

Selama periode 2015 - 2017, capaian ke 12 indikator bidang kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir ditunjukkan pada Tabel 2.14. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan sebanyak 12 indikator (100%). Namun demikian, belum semua indikator

tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Dari 12 indikator, baru 4 indikatoe (30%) yang telah memenhi target nasional.

Tabel 2.15  
Pencapaian Indikator SPM Bidang Kesehatan tahun 2015 - 2017

No.	Indikator SPM	Capaian SPM		
		2015	2016	2017
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	73,96	71	77
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	100	68	76
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	71,14	79	72
4	Pelayanan kesehatan balita	73,46	48	55
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	28,53	93	81
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	61,47	100	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	29,06	100	100
8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	45,78	100	35
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100,00	100	12
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	33,21	100	100
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	46,65	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	-	45	38

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan Antara lain yaitu (i) masih kurangnya ketersediaan Anggaran untuk masing-masing program. (ii) penyebaran Sumber Daya Manusia belum merata di Sarana dan Prasarana Kesehatan sehingga masih minimnya pelayanan kepada masyarakat di daerah terpencil. (iii) belum terintegrasinya SPM ke dalam renstra SKPD. Solusi dari permasalahan diatas adalah penerapan 10% APBD untuk kesehatan dan



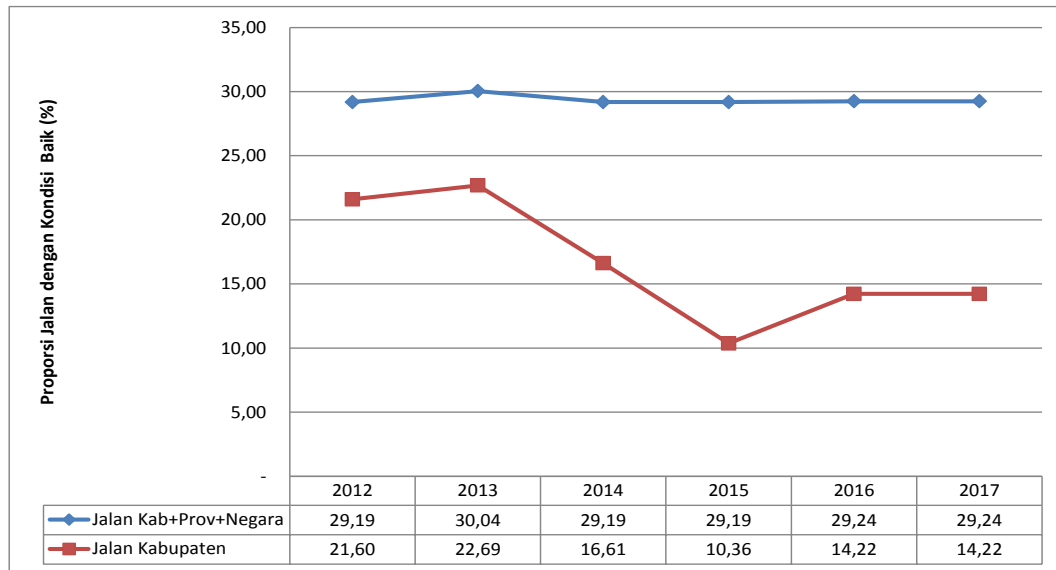
menerapkan SPM secara maksimal dan terintegrasi ke dalam renstra SKPD terkait

### **2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Layanan urusan wajib dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dianalisis dengan beberapa aspek yaitu (i) Kondisi jalan Kabupaten, (ii) Jembatan, (iii) irigasi dan (iv) Ruang Terbuka Hijau.

#### **a. Jalan Kabupaten**

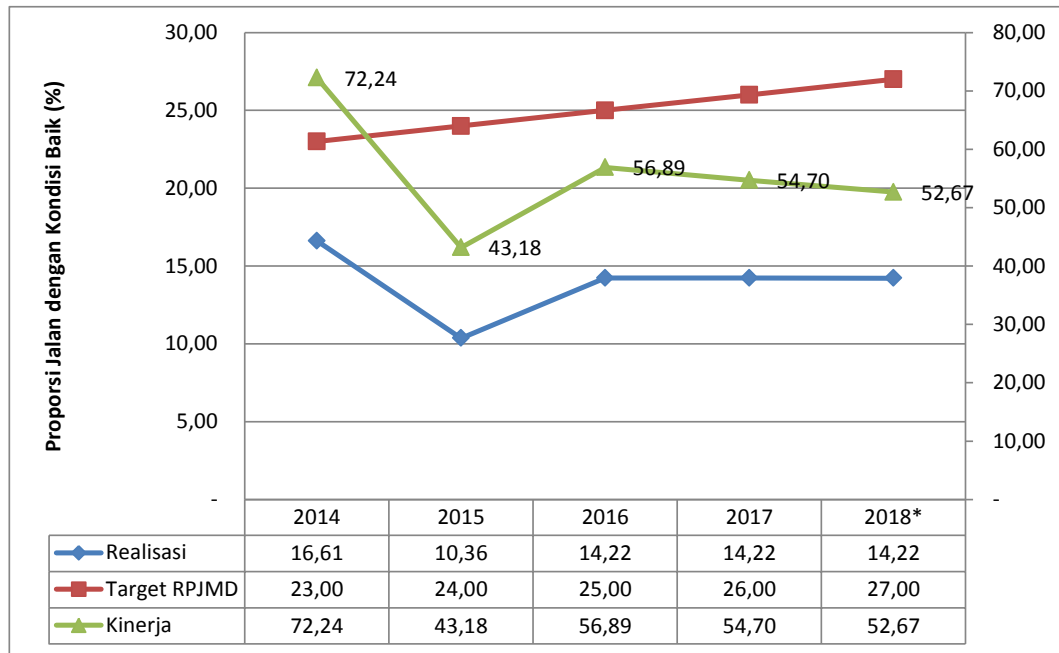
Jalan didefinisikan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air. Pada tahun 2016, panjang jalan di Kabupaten Indragiri Hilir sepanjang 1.892,59 Km yang terdiri dari 198,82 Km (10,40%) jalan Negara, 497,23 Km (26,27%) jalan Provinsi dan 1.198,54 Km (63,33%) jalan Kabupaten. Selama periode 2012 - 2017, seluruh jalan di Kabupaten Indragiri Hilir (Negara, Provinsi dan Kabupaten) dengan kondisi baik proporsinya sebesar 29,19% pada tahun 2012 dan sedikit meningkat proporsinya menjadi 29,24% pada tahun 2017. Selama periode ini, capaian jalan dengan kondisi baik untuk seluruh jalan (negara, Provinsi dan Kabupaten) yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, lebih tinggi proporsinya dibanding jalan kabupaten Indragiri Hilir yang proporsinya hanya sebesar 21,60% pada tahun 2012 menurun menjadi 10,36% pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 14,22% pada tahun 2017.



Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.67.  
Perkembangan Jalan dengan Kondisi Baik Di Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2012 - 2017

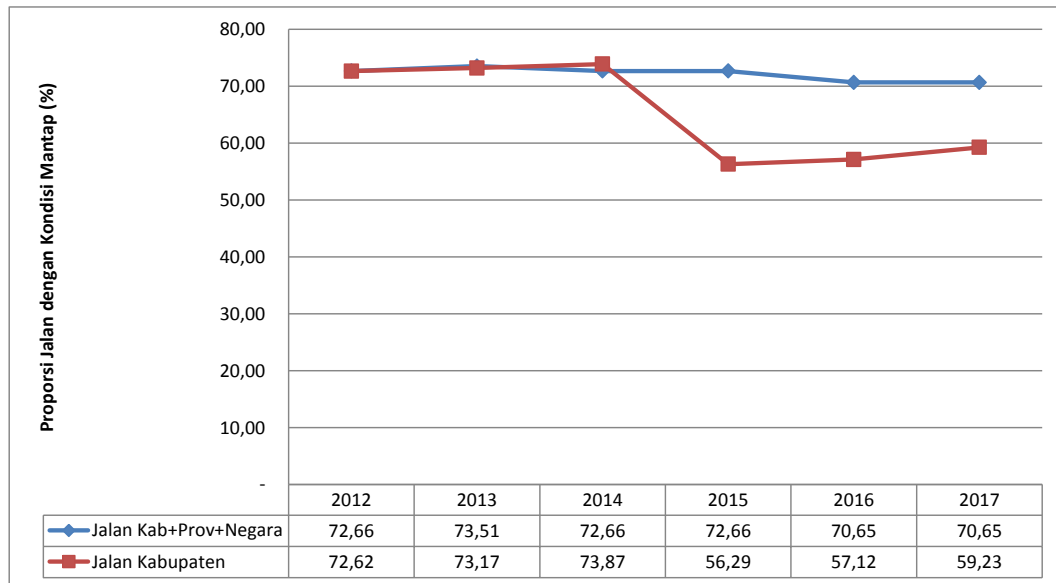
Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa indikator rasio jalan Kabupaten dengan kondisi baik, proporsinya ditargetkan terus meningkat dari 23% pada tahun 2014 menjadi 27% pada tahun 2018. Selama periode 2014 - 2017, realisasi proporsi jalan kabupaten dengan kondisi baik terus dibawah target yaitu sebesar 20,36% - 14,22% dan ditahun 2018 diperkirakan juga sebesar 14,22%. Selama periode ini, realisasi kinerja indikator proporsi jalan Kabupaten dengan kondisi baik berkisar antara 43,18% - 72,24% dengan kategori Sangat Rendah - Sedang. Rata-rata nilai realisasi kinerja sebesar 55,93% dengan kategori Rendah.



Gambar 2.68.  
Kinerja Indikator Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Baik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

Pada periode yang sama (2012 - 2017), panjang jalan dengan kondisi mantap (baik dan sedang) untuk seluruh status jalan (Negara, Provinsi dan Kabupaten) di Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif menurun yaitu dari 1.276,74 Km dengan proporsi sebesar 72,66% pada tahun 2012, menurun menjadi 706,36 Km dengan proporsi sebesar 70,65% pada tahun 2017. Capaian kondisi seluruh status jalan ini lebih tinggi dibanding dengan capaian panjang jalan Kabupaten dengan kondisi mantap. Pada tahun 2012, panjang jalan Kabupaten dengan kondisi mantap sepanjang 870,41 Km dengan proporsi sebesar 72,62% menurun menjadi proporsinya menjadi 56,29% pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 59,23% pada tahun 2017. Secara keseluruhan, jalan dengan kondisi mantap, baik pada semua status jalan maupun jalan kabupaten masih dibawah standar yang dutetapkan secara nasional yaitu 80% jalan dengan kondisi mantap. Oleh karena itu, upaya untuk terus

meningkatkan kondisi jalan dengan status mantap dengan proporsi sekitar 80% perlu terus diupayakan.

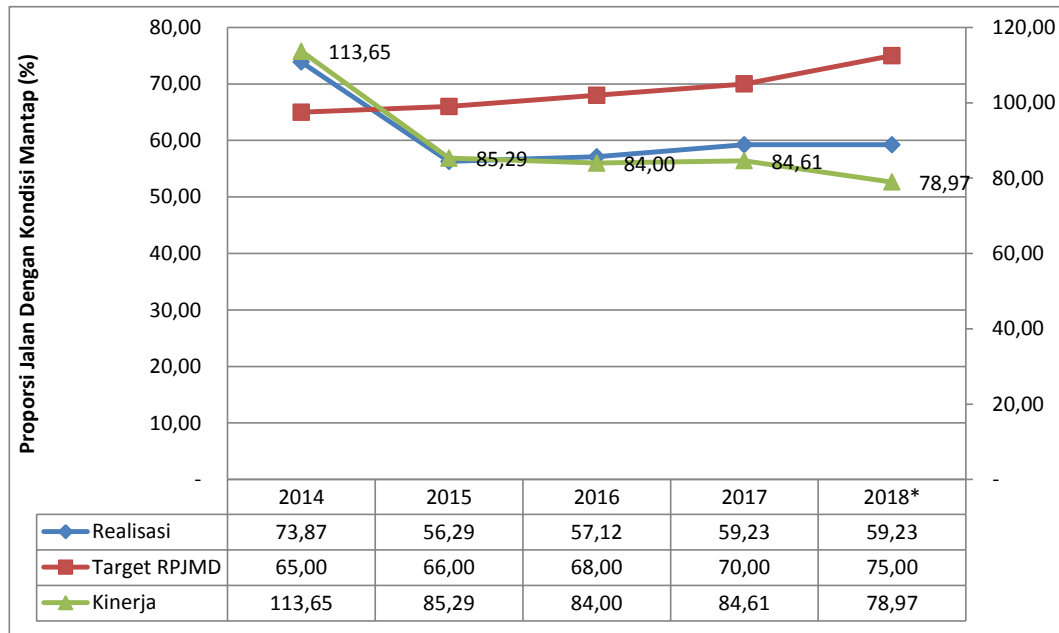


Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2013 - 2017) dan LKPJ (2013 - 2017)

Gambar 2.69.

#### Perkembangan Jalan dengan Kondisi Mantap Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 - 2017

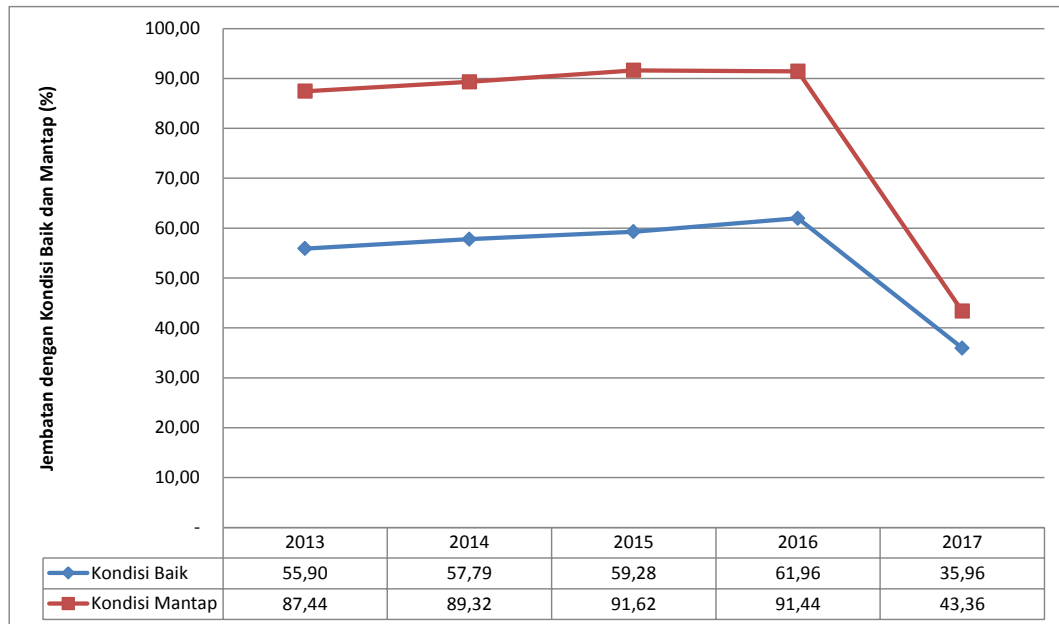
Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa indikator rasio jalan Kabupaten dengan kondisi mantap, proporsinya ditargetkan terus meningkat yaitu dari 65% pada tahun 2014 menjadi 75% pada tahun 2018. Realisasi indikator proporsi jalan kabupaten dengan kondisi mantap hanya pada tahun 2014 saja yang di atas target yaitu sebesar 73,87% dengan realisasi kinerja sebesar 113,65% dan terkategori Sangat Tinggi. Pada periode 2015 - 2017, realisasi indikator jalan kabupaten dengan kondisi mantap terus di bawah target dengan realisasi kinerja berkisar antara 85,29% - 84,61% yang terkategori Tinggi. Pada tahun 2018, diperkirakan realisasi indikator proporsi jalan kabupaten dengan kondisi mantap sekitar 59,23% dengan realisasi kinerja sebesar 78,97% dan terkategori Tinggi.



Gambar 2.70.  
Kinerja Indikator Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Mantap di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

**b. Jembatan**

Secara umum, jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya yang melintang tidak sebidang dan lain-lain. Selama periode 2013 - 2017, jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir dengan kondisi baik memiliki trend berfluktuatif menurun. Pada tahun 2013, proporsi jembatan dengan kondisi baik sebesar 55,90% meningkat menjadi 61,96% pada tahun 2016 dan menurun tajam pada tahun 2017 menjadi 35,96%. Selama periode 2013 - 2017, rata-rata pertumbuhan proporsi jembatan dengan kondisi baik menurun sebesar -8,45% per tahun.



Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2013 - 2017) dan LKPJ (2013 - 2017)

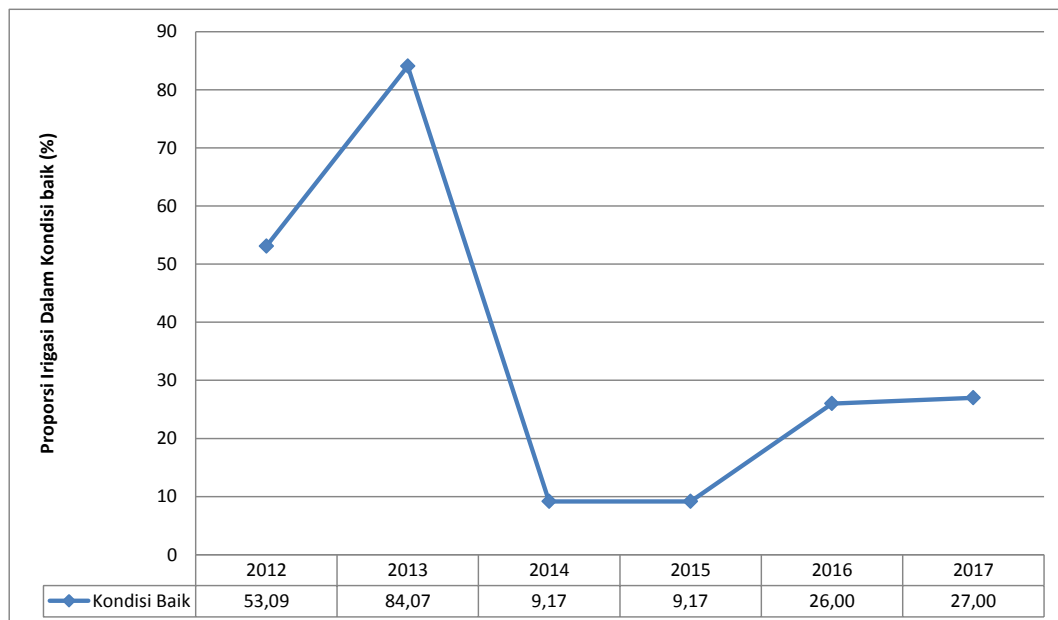
Gambar 2.71.  
Perkembangan Jembatan dengan Kondisi Baik dan Mantap di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 - 2017

Pada periode yang sama, proporsi jembatan dengan kondisi mantap (baik dan sedang) memiliki trend yang hampir sama dengan proporsi jembatan dengan kondisi baik yaitu trendnya berfluktuatif menurun. Pada tahun 2013, proporsinya sebesar 87,44% lebih tinggi dari proporsi jembatan dengan kondisi baik (55,44%), meningkat menjadi 91,44% pada tahun 2016 dan menurun tajam pada tahun 2017 menjadi 43,36%. Selama periode 2013 - 2017, rata-rata pertumbuhan proporsi jembatan dengan kondisi mantap menurun sebesar 13,09%. Penurunan tajam proporsi jembatan dengan kondisi baik dan mantap harus menjadi perhatian dalam pembangunan periode berikutnya agar transportasi dari dan menuju Indragiri Hilir dapat terus lancar.

### c. Irigasi

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi

air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa. Selama periode 2012 – 2017, irigasi di Indragiri Hilir dengan kondisi baik proporsinya berfluktuatif menurun. Pada tahun 2012, proporsinya sebesar 53,09% meningkat menjadi 84,07% pada tahun 2013 dan menurun menjadi 9,17% pada tahun 2014 dan secara perlahan meningkat menjadi 27% pada tahun 2017. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan indikator luas irigasi dengan kondisi baik menurun sebesar 10,66% per tahun. Rendahnya proporsi luas irigasi dengan kondisi baik dan penurunannya yang tajam perlu mendapat perhatian dalam pembangunan agar produksi padi dapat terus ditingkatkan

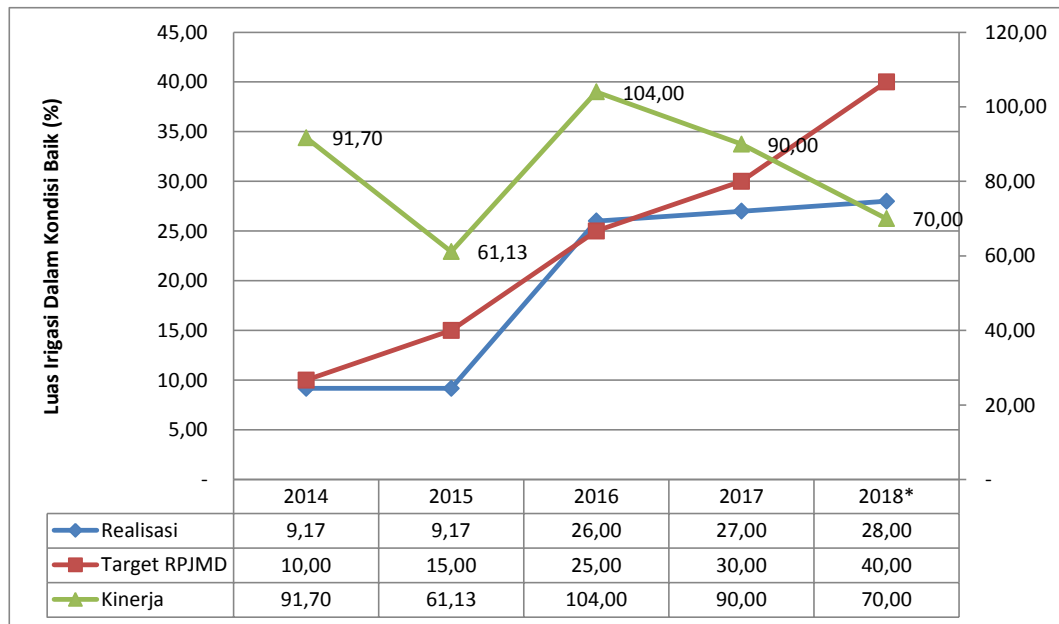


Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2013 - 2017) dan LKPJ (2013 - 2017)

Gambar 2.72.  
Perkembangan Kondisi Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 - 2017

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan bahwa indikator luas irigasi dalam kondisi baik telah ditetapkan meningkat dari 10% pada tahun 2014 menjadi 40% pada tahun 2018. Realisasi indikator luas irigasi dengan kondisi baik memiliki trend meningkat meski umumnya masih dibawah target keculai untuk tahun

2016 yang capainnya diatas target. Kecuali kinerja tahun 2016 yang capaian realiasi kinerja sebesar 104,00% yang terkategori Sangat Tinggi, capaian realisasi kinerja 2014 - 2015 dan 2017 - 2018 berkisar antara 61,13% - 91,70% yang terkatgeori Rendah - Tinggi. Rata-rata realisasi kinerja indikator luas irigasi dengan kondisi baik sebesar 83,37% dan terkategori Tinggi.



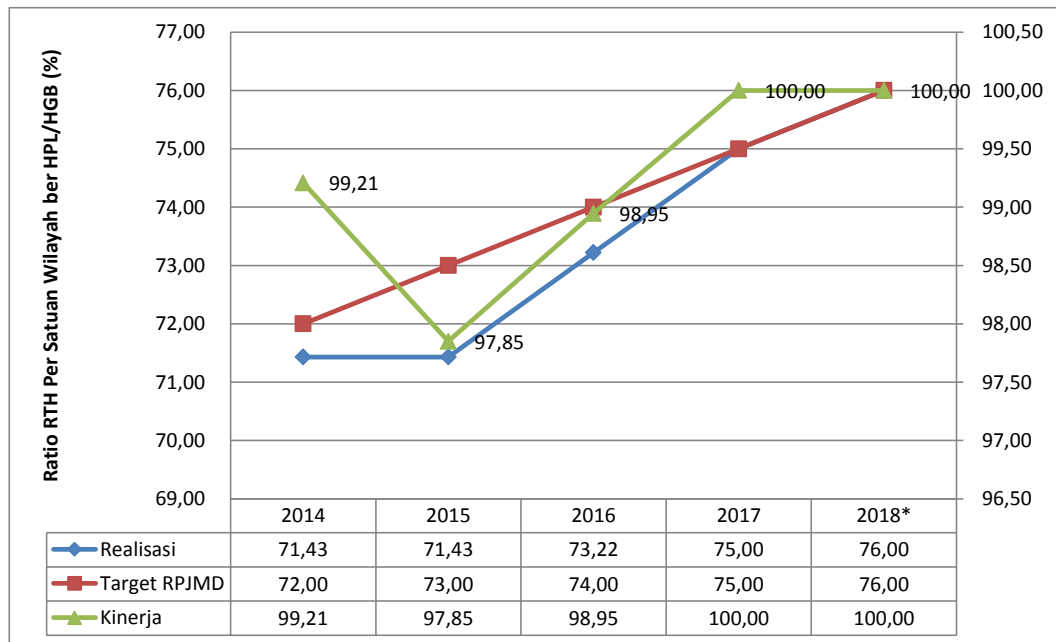
Gambar 2.73.  
Kinerja Indikator Luas Irigasi Dengan Kondisi Baik  
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

#### d. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria (a) Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, (b) berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan (c) didominasi komunitas tumbuhan. Selama periode 2014 -



2018, rasio RTH per satuan wilayah ber HPL/HGB di Indragiri Hilir memiliki trend meningkat yaitu sebesar 71,43% pada tahun 2012 menjadi 75% pada tahun 2017 dan diperkirakan sebesar 76% pada tahun 2018. Selama periode 2014 - 2018, rata-rata pertumbuhan rasio RTH per satuan wilayah ber HPL/HGB di Indragiri Hilir meningkat sebesar 1,25% per tahun.



Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2013 - 2017) dan LKPJ (2013 - 2017)

Gambar 2.74.  
Kinerja Indikator Ratio RTH Per Satuan Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa indikator ratio RTH Per Satuan Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 72% pada tahun 2014 menjadi 76% pada tahun 2018. Realisasi capaian indikator ratio RTH Per Satuan Wilayah ber HPL/HGB terus dibawah target dan relatif sama dengan target pada tahun 2016 dan 2017. Selama periode ini, realisasi kinerja ratio RTH Per Satuan Wilayah ber HPL/HGB di Indragiri Hilir

berkisar antara 97,85% - 100% dan terkategori Sangat Tinggi. Capaian indikator yang tinggi ini harus terus dipertahankan.

**e. SPM PU-PR**

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dijelaskan bahwa SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar SPM PU-PR terdiri dari 9 jenis pelayanan dasar yang terdiri atas 16 indikator (termasuk anak indikator) dengan batas waktu pencapaian tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.15 dibawah ini.

Tabel 2.16  
Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM Bidang PU-PR

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator, Target dan Tahun Pencapaian	
1	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	1	persentase Tersedi anya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari <b>(100%) tahun 2019</b>
		2	persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya <b>70% tahun 2019</b>
2	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	3	persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang. <b>60% tahun 2019</b>
		4	persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi diwilayah kabupaten/ kota <b>100% tahun 2019</b>
3	Penyediaan air minum	5	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman <b>target 81,77 % tahun 2019</b>
4	Penyediaan sanitasi	6	persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai <b>target 60% tahun 2019</b>
		7	persentase pengurangan sampah di perkotaan <b>target 20% tahun 2019</b>
		8	persentase pengangkutan sampah <b>target 70 % tahun 2019</b>

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator, Target dan Tahun Pencapaian	
		9	persentase pengoperasian TPA <b>target 70 % tahun 2019</b>
		10	persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun
			Tersedianya Pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota <b>target 50 % tahun 2019</b>
			Pengurangan Luas Genangan <b>target 50 % tahun 2019</b>
5	Penataan Bangunan dan Lingkungan	11	persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan(IMB) yang diterbitkan <b>target 60 % tahun 2019</b>
6	Penangan Pemukiman Kumuh Perkotaan	12	persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan <b>target 10 % tahun 2019</b>
7	Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	13	persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) <b>target 60 % tahun 2019</b>
		14	persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap <b>target 100% tahun 2019</b>
8	Informasi Penataan Ruang	15	persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital <b>target 100% tahun 2019</b>
9	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	16	persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan <b>target 50% btahun 2019</b>

Pencapaian indikator SPM bidang PU-PU Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2013 - 2017 ditunjukkan pada Tabel 2.17. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan sebanyak 6 indikator (37,50%) dengan jumlah indikator mencapai target nasional sebanu=yak 2 indikator (12,50%).

Tabel 2.17  
Pencapaian Indikator SPM Bidang PU-PR Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2013 - 2017

No.	Indikator SPM	Capaian SPM				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Tersedi anya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	-	-	59,28	59,28	-
2	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	-	-	-	-	93,48
3	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang.	32,24	33,06	65,08	65,08	58,86
4	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi diwilayah kabupaten/ kota	-	-	24,14	24,14	-
5	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	-	-	-	-	-
6	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	-	-	-	-	-
7	Persentase pengurangan sampah di perkotaan	-	67,05	-	-	-
8	Persentase pengangkutan sampah	-	67,05	-	-	-
9	Persentase pengoperasian TPA	-	-	-	-	-
10a	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	-	33,25	1,96	1,96	-
10b	Pengurangan luas genangan	-	-	-	-	-
11	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	-	38,35	166,67	166,67	100,00
12	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	-	-	-	-	-
13	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	-	-	-	-	-
14	Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	-	42,60	40,01	40,01	37,26

No.	Indikator SPM	Capaian SPM				
		2013	2014	2015	2016	2017
15	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	-	-	-	-	77,39
16	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	-	42,34	-	-	-

Permasalahan/hambatan dalam penerapan dan pencapaian SPM hingga tahun 2017 menurut jenis pelayanan dan indikator serta solusinya ditunjukkan pada Tabel 2.18 dibawah ini.

Tabel 2.18

Permasalahan/Hambatan Dalam penerapan dan Pencapaian SPM Bidang PU-PR di Kabupaten Indragiri Hilir

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	HAMBATAN	SOLUSI
1 Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat	1 Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	-	-
	2 Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	Sidementasi yang terlalu cepat sehingga terjadi pendangkalan saluran irigasi	Operasional dan pemeliharaan saluran irigasi secara berkala dan tersedianya dana operasional dan pemeliharaan
2 Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	3 Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	Anggaran kurang memadai dan kondisi geografis yang sulit serta proses lelang yang selalu lambat, sehingga pengerjaan selalu dipenghujung waktu.	meningkatkan jumlah anggaran serta mempercepat proses lelang, sehingga bisa dikerjakan tepat waktu.
	4 Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota	Pembebasan Lahan pada Penyediaan Jalan	Tersedianya Lahan sebelum Pembangunan jalan
3 Penyediaan air minum	5 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	-	-
4 Penyediaan sanitasi	6 Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	-	-
	7 Persentase pengurangan sampah di perkotaan	-	-
	8 Persentase pengangkutan sampah	-	-
	9 Persentase pengoperasian TPA	-	-
	10 Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	-	-
5 Penataan Bangunan dan Lingkungan	11 Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	Belum Tersedianya RTRW Kabupaten Indragiri Hilir	Menggesa Pengesahan Ranperda RTRW
6 Penangan Pemukiman Kumuh Perkotaan	12 Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	-	-
7 Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	13 Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	-	-
	14 Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	-	-
8 Informasi Penataan Ruang	15 Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Belum Tersedianya RTRW Kabupaten Indragiri Hilir	Menggesa Pengesahan Ranperda RTRW
9 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	16 Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Belum Tersedianya RTRW Kabupaten Indragiri Hilir	Menggesa Pengesahan Ranperda RTRW

#### **2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Pemukiman**

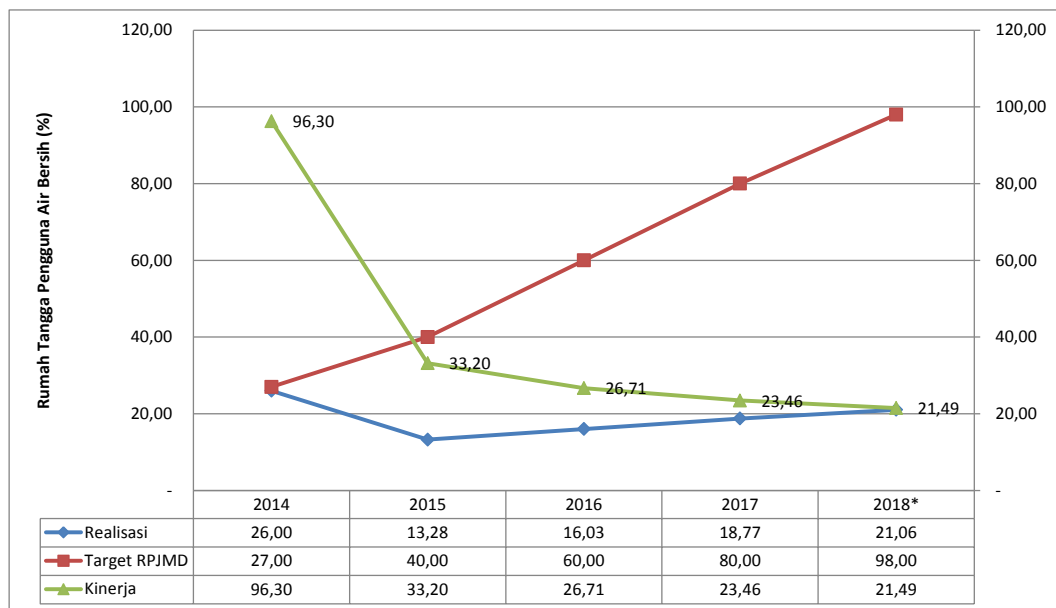
Layanan urusan wajib dasar bidang Perumahan dan Pemukiman dianalisis dari tiga indikator utamanya yaitu (i) Rumah tangga pengguna air bersih, (ii) Rumah tidak layak huni dan (iii) Rumah tangga pelanggan listrik PLN.

##### **a. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih**

Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari dan memenuhi persyaratan untuk pengairan sawah, untuk treatment air minum dan untuk treatment air sanitasi. Persyaratan disini ditinjau dari persyaratan kandungan kimia, fisika dan biologis. Pengertian air bersih secara umum adalah air yang aman dan sehat yang bisa dikonsumsi manusia. Secara fisik air tersebut tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Secara Kimia adalah (a) PH netral (bukan asam/basa) dan (b) tidak mengandung racun dan logam berat berbahaya. Selama periode 2014 - 2018, persentase rumah tangga pengguna air bersih di Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif menurun. Pada tahun 2014, rumah tangga pengguna air bersih sebesar 26% m3nurun menjadi 13,28% pada tahun 2015 dan meningkat persentase hingga tahun 2018 menjadi 21,06%. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan rumah tangga pengguna air bersih menurun sebesar -4,12% per tahun. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dan perlu upaya peningkatan persentase rumahtangga pengguna air bersih sehingga tingkat kesehatan masyarakat Indragiri Hilir dapat terus meningkat.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa indikator rumah tangga pengguna air bersih terus meningkat dari 27% pada tahun 2014 menjadi 98,33% pada tahun 2018. Realisasi indikator rumah tangga penggunaan air bersih di Kabupaten

Indragiri Hilir selama periode 2014 - 2017 terus dibawah target. Pada tahun 2014, capaian indikator rumah tangga pengguna air bersih sebesar 26% dengan realisasi kinerja sebesar 96,30%. Pada tahun 2015 - 2018, realisasi indikator yang berfluktuatif menurun dan target yang terus meningkat menjadikan realisasi kinerja terus menurun yaitu dari 33,20% menjadi 21,49% yang terkategori Sangat Rendah. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses rumah tangga terhadap penggunaan air bersih perlu mendapat prioritas pada pembangunan ke depan.



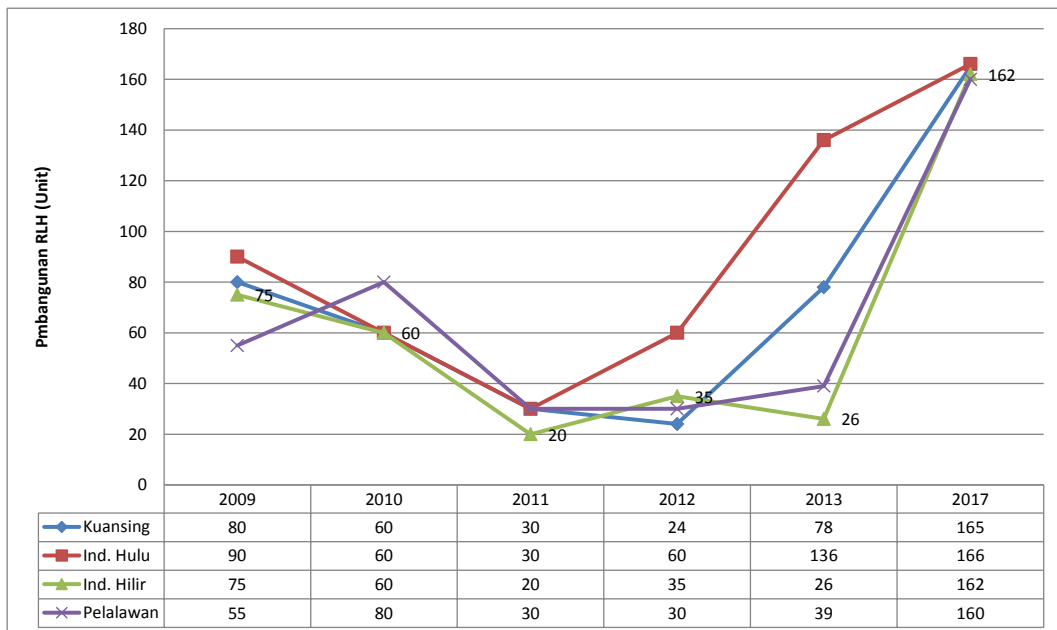
Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2013 - 2017) dan LKPJ (2013 - 2017)

Gambar 2.75.  
Kinerja Indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih  
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

#### b. Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni adalah didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Selama periode 2009 - 2017, tidak termasuk tahun 2014 - 2016, jumlah pembangunan rumah layak huni (RLH) di Indragiri Hilir bervariasi setiap tahunnya dengan sumber dana APBD Kabupaten dan Provinsi dan APBN. Selama

periode ini, jumlah RLH yang dibangun untuk keluarga miskin sebanyak 378 unit, jumlah yang paling sedikit dibanding jumlah RLH yang dibangun di Kabupaten sekitarnya seperti Indragiri Hulu sebanyak 542 unit, Kuantan Sengingi sebanyak 437 unit dan Pelalawan sebanyak 394 unit. Disisi lain jumlah penduduk miskin di Indragiri Hilir adalah yang terbanyak dibanding Kabupaten sekitarnya yaitu sebanyak 55,40 ribu jiwa.



Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka,2013 - 2017) dan LKPJ (2013 - 2017)

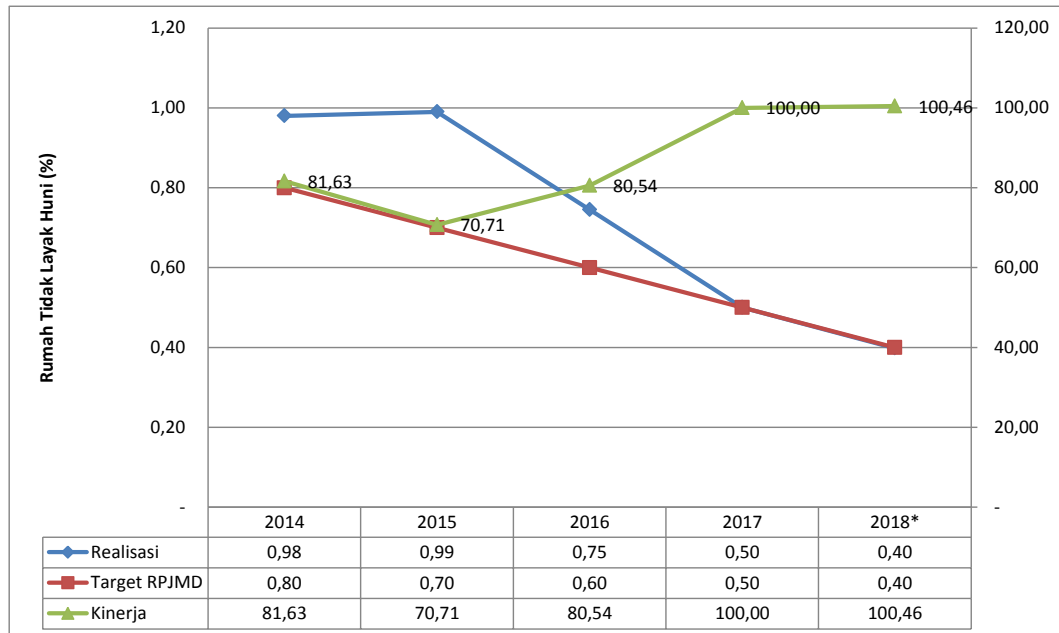
Gambar 2.76.

Perkembangan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Tetangga Tahun 2012 - 2017

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa indikator rumah tidak layak huni di Kabupaten Indragiri Hilir terus menurun yaitu dari 0,80% pada tahun 2014 menjadi 0,40% pada tahun 2018. Realisasi capaian indikator rumah tidak layak huni lebih rendah dan/atau sama dengan target. Pada tahun 2014 - 2016, capaian realisasi kinerja rumah tidak layak huni yang tersisa relatif dibawah target yaitu sebesar 0,98 - 0,75% dengan capaian realisasi kinerja berkisar antara 70,71% - 81,63% yang terkategori Sedang - Tinggi. Pada



tahun 2016 - 2017, capaian indikator rumah tidak layak huni relatif sama dengan target sehingga realisasi kinerja sekitar 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Selama periode ini, rata-rata realisasi kinerja indikator rumah tidak layak huni sebesar 86,67% dengan kategori Tinggi.



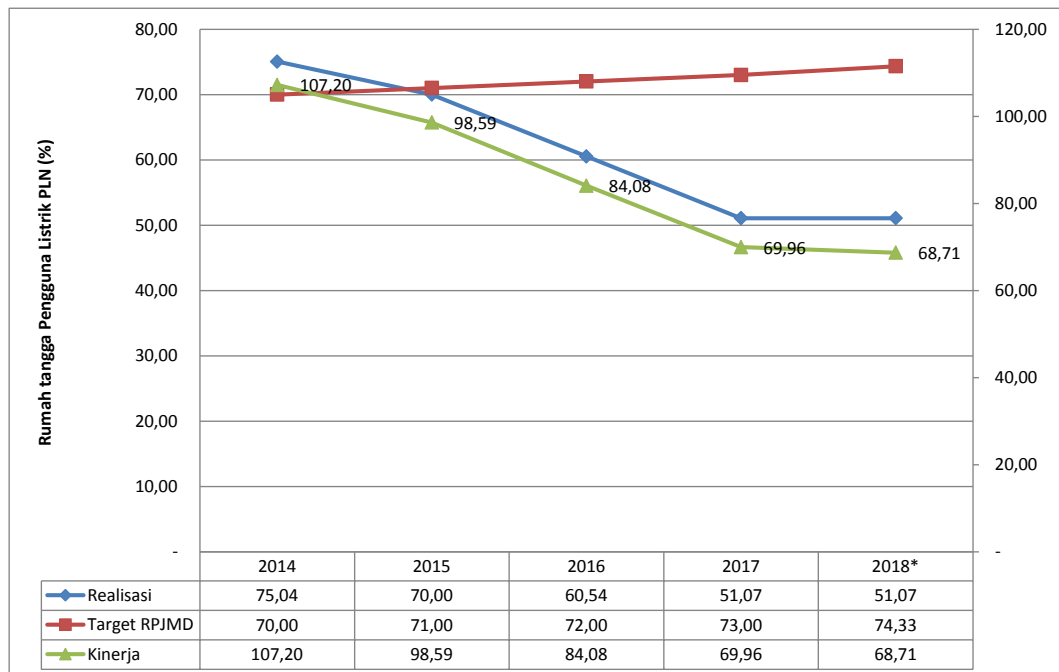
Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2013 - 2017) dan LKPJ (2013 - 2017)

Gambar 2.77.  
Kinerja Indikator Rumah Tidak Layak Huni  
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

### c. Rumah Tangga Pelanggan Listrik PLN

Selama periode 2014 - 2018, persentase rumah tangga yang menjadi pelanggan listrik PLN terus menurun. Pada tahun 2012, rumah tangga yang menjadi pelanggan PLN sebesar 75,04% dan ditahun-tahun berikutnya persentasenya menurun hingga 51,07% pada tahun 2018. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa indikator rumah tangga pelanggan listrik PLN terus meningkat dari 70% pada tahun 2014 menjadi 74,33% pada tahun 2018. Capaian realisasi kinerja indikator rumah tangga pelanggan listrik PLN menurun dari 107,20 dengan kategori tinggi pada tahun 2014 menjadi

84,08% pada tahun 2016 dengan kategori Tinggi. Pada tahun 2017, realisasi kinerja indikator ini menurun menjadi 69,96% dan 2018 menjadi 68,71% yang keduanya terkategori Sedang. Penurunan persentase rumah tangga pelanggan listrik PLN harus menjadi perhatian pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir sehingga akses rumah tangga terhadap listrik PLN dapat terus meningkat sehingga produktivitas rumah tangga juga meningkat.



Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

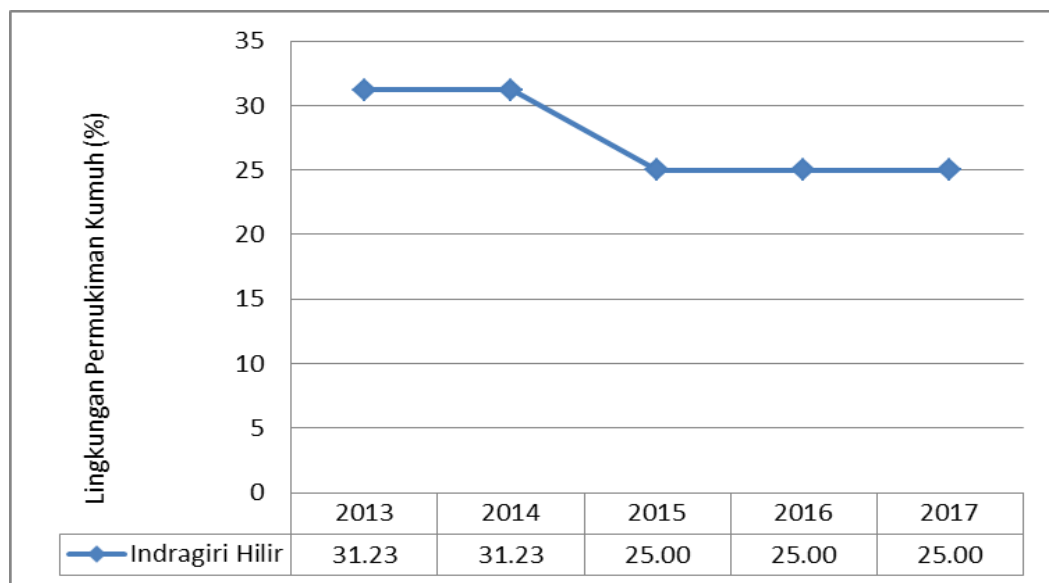
Gambar 2.78.  
Kinerja Indikator Rumah tangga Pelanggan Listrik PLN  
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

#### d. Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh berdasarkan karakteristiknya adalah suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas. Dengan kata lain memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya. Dan tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak bahkan cenderung membahayakan bagi penghuninya. ciri permukiman kumuh merupakan permukiman dengan tingkat hunian dan kepadatan bangunan yang sangat tinggi, bangunan tidak teratur, kualitas

rumah yang sangat rendah. Selain itu tidak memadainya prasarana dan sarana dasar seperti air minum, jalan, air limbah dan sampah.

Selama periode 2013 - 2017, Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh di Indragiri Hilir mengalami penurunan. Pada tahun 2013 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh 31.23% dan pada tahun 2017 turun menjadi 25.00%



Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.79.  
Kinerja Indikator Rumah Tidak Layak Huni  
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2017

**e. SPM Bidang Perumahan Rakyat**

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 16 Tahun 2010 tentang /Kota, dijelaskan bahwa indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif

dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan. Jenis pelayanan dasar SPM bidang Perumahan Rakyat berjumlah 2 jenis dengan indikator kinerja berjumlah 3 indikator dan batas waktu pencapaian SPM tahun 2009–2025 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19

Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
	Indikator	Nilai (%)	
I	Rumah Layak Huni dan Terjangkau		
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100	2009–2025
2	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	70	2009–2025
II	Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		
3	Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100	2009–2025

Pencapaian indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 – 2017 ditunjukkan pada Tabel 2.20. Pada tahun 2017, dari 3 indikator pelayanan dasar bidang perumahan, seluruhnya telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Capaian semua indikator masih dibawah target nasional.

Tabel 2.20

Pencapaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2017

No.	Indikator SPM	Capaian SPM				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	na	na	na	25,17	21,00
2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	na	na	na	6,78	4,36
3	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	na	na	na	0,10	0,10

Beberapa permasalahan yang menajdai hambatan dalam pencapaian SPM Perumahan Rakayabeserta solusi ditunjukkan pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21  
Permasalahan Dalam Pencapaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir

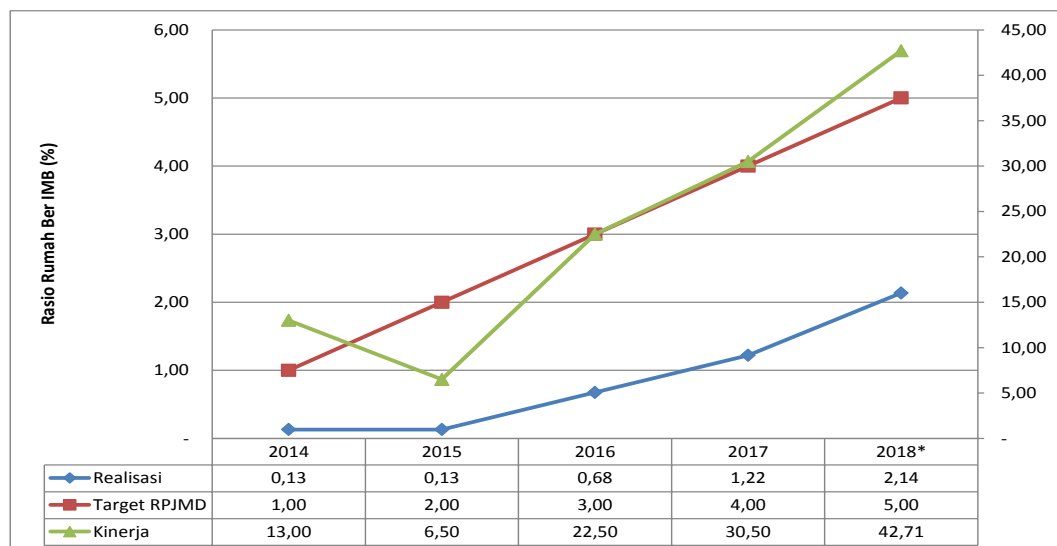
No	Masalah	Sub Masalah	Solusi
1	Perumahan Rakyat belum memenuhi standar layak huni	Mahalnya bahan konstruksi di daerah pedesaan sehingga masyarakat kesulitan membangun rumah bersetandar	Membantu masyarakat membangun rumah layak huni berstandar
		Struktur tanah yang tidak memungkinkan membangun beton atau semenisasi rumah	Diupayakan membangun rumah dengan penimbunan sabut dasn pasir curug
2	Sulitnya akses jalan	Sulitnya akses cepat jalan lingkungan pemukiman	Membangun jalan lingkungan dan menunjang keberhasilan distribusi dan perekonomian masyarakat
3	Tidak adanya jamban (toilet)	Dekatnya sumber air sungai	Membuat kesadaran hidup bersih dan sehat
			Membuat tempat mandi cuci kakus (MCK)
4	Sulitnya air bersih	Jenis air di Kabupaten Indragiri Hilir adalah payau (berlumpur)	Membangun pipa air bersih dengan sumur bor
			Membantu masyarakat membuat penampungan air hujan
5.	Lemahnya administrasi pembangunan tempat pemakaman umum	Tidak adanya pembatas tanah bangunan tempat pemakaman umum	Membuat pagar pembatas antar wilayah penguburan jenazah dengan batas tanah masyarakat
6.	Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikawasan perkotaan kecamatan di wilayah pedesaan	Partisipasi Rekreasi pada masyarakat di Kecamatan tertentu	Terbuka Hijau dengan mementingkan aspek pertumbuhan perdagangan dan jasa transfortasi
			Membuat Taman Rekreasi di Kawasan Perkotaan dan Ibu Kota Kecamatan

**2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Layanan urusan wajib dasar bidang sosial dianalisis dari empat indikator penting yaitu ((i) Rasio rumah ber IMB, (iii) Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk, (iii) Cakupan penegakan daerah dan peraturan kepala daerah, dan (iv) Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

**a. Rasio Rumah Ber IMB**

Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, kenyamanan sekaligus kepastian hukum. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan bahwa indikator rasio rumah ber IMB terus meningkat yaitu dari 1% pada tahun 2014 menjadi 5% pada tahun 2018.



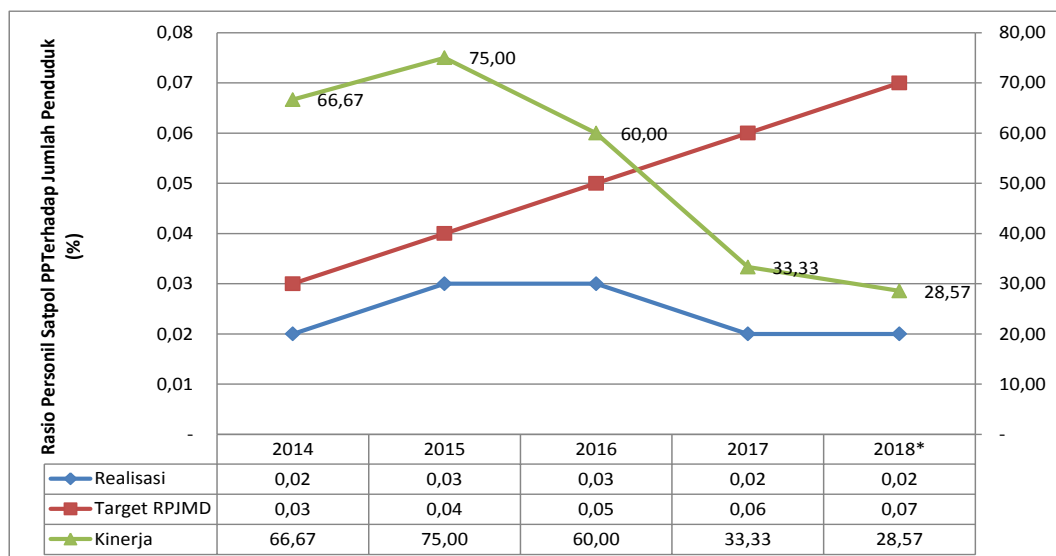
Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.80.  
Kinerja Indikator Rasio Rumah Ber IMB  
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018

Selama periode 2014 - 2018, capaian indikator rasio rumah ber IMB di Kabupaten Indragiri Hilir terus dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD. Pada periode ini, realisasi kinerja indikator rasio rumah ber IMB berkisar antara 6,50% - 42,71% yang terkategori Sangat Rendah. Upaya untuk meningkatkan kinerja indikator ini harus menjadi perhatian serius dalam pembangunan periode mendatang.

**b. Rasio Personil Satpol PP Terhadap Jumlah Penduduk**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa indikator rasio rasio personil satpol PP per 10.000 penduduk terus meningkat dari 0,03 tahun 2014 menjadi 0,07 tahun 2018.



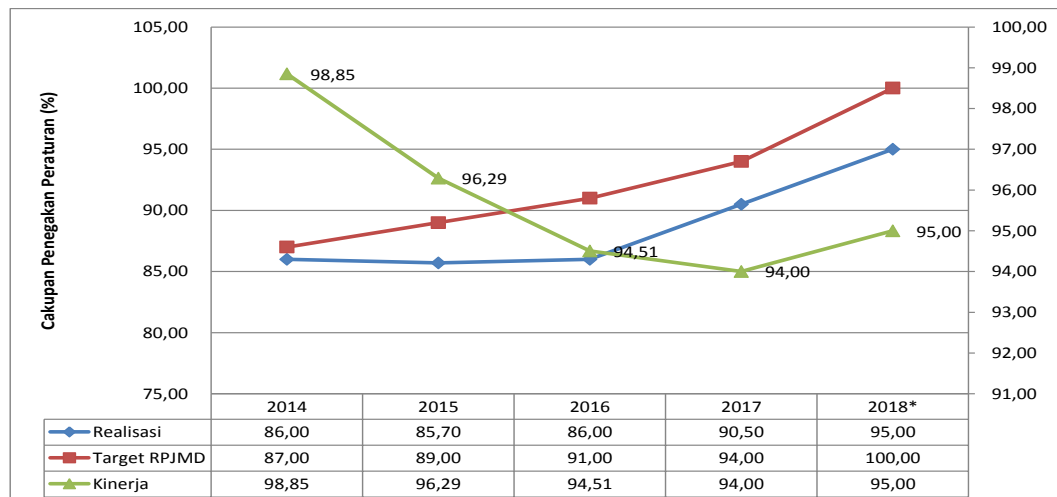
Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2013 - 2017) dan LKPJ (2013 - 2017)

Gambar 2.81.  
Kinerja Indikator Rasio Personil Satpol PP Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

Realisasi indikator rasio personil satpol PP per 10.000 penduduk Indragiri Hilir selama periode 2014 - 2018 terus dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD. Pada tahun 2014 - 2016, realisasi kinerja indikator rasio personil satpol PP per 10.000 penduduk Indragiri Hilir berkisar antara 60,00% - 75,00% yang terkategori Rendah - Sedang. Pada tahun 2017 - 2018, realisasi kinerja indikator ini menurun menjadi 28,57% - 33,33% yang terkategori Sangat rendah. Rendahnya, realisasi indikator ini karena jumlah anggota Satpol PP yang belum mengacu kepada Permendagri No. 60 tahun 2012. Upaya pencapaian rasio ideal untuk Satpol PP per 10.000 penduduk perlu terus diupayakan.

**c. Cakupan Penegakan Peraturan**

Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dilakukan oleh Satpol PP sebagai perangkat Pemerintahan Daerah kabupaten Indragiri Hilir. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa indikator cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 87% pada tahun 2014 menjadi 100% pasda tahun 2018.



Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2013 - 2017) dan LKPJ (2013 - 2017)

Gambar 2.82.

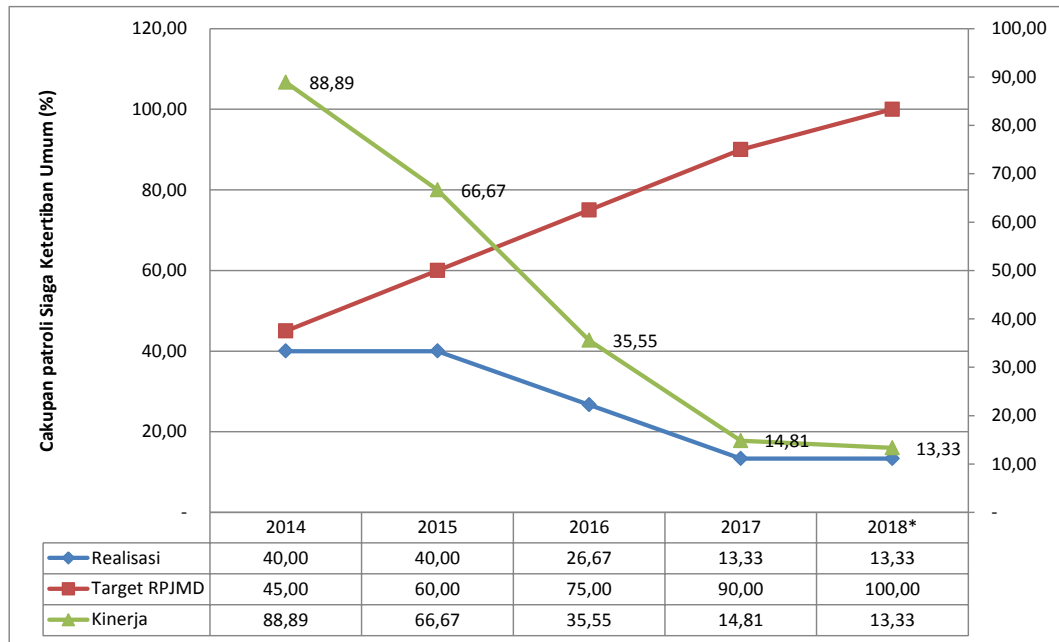
Kinerja Indikator Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018



Selama periode 2014 - 2018, capaian indikator cakupan penegakan peraturan daerah dan kepala daerah di Kabupaten Indragiri Hilir relatif mendekati target yang telah ditetapkan. Meski capaian indikator ini terus meningkat namun peningkatannya lebih rendah dibanding target sehingga realisasi kinerja memiliki trend menurun. Pada periode 2014 - 2018, realisasi kinerja berkisar antara 94,00% - 98,85% dan terkategori Sangat Tinggi. Capaian indikator cakupan penegakan peraturan daerah dan kepala daerah yang Sangat Tinggi harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

#### **d. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok satuan polisi pamong praja disetiap kecamatan yang berada di Kabupaten/Kota. Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan antara lain (a) tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan, (b) antar batas wilayah dan (c) tempat keramaian/hiburan. Apabila telah tercipta kondisi 3 kali patroli dalam sehari diseluruh kecamatan pada Kabupaten maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi. PP sebagai perangkat Pemerintahan Daerah kabupaten Indragiri Hilir. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa indikator cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terus meningkat yaitu dari 45% pada tahun 2014 menjadi 100% pada tahun 2018.



Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2013 - 2017) dan LKPJ (2013 - 2017)

Gambar 2.83.

Kinerja Indikator Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

Selama periode 2014 - 2018, capaian indikator cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terus dibawah target yang ditetapkan dan bahkan semakin membesar gapnya. Pada tahun 2014, realisasi indikator patroli siaga ketertiban di Indragiri Hilir sebesar 40% dengan realisasi kinerja sebesar 88,89% dan terkategori Tinggi. Pada tahun-tahun berikutnya realisasi indikator terus menurun sehingga realisasi kinerja juga terus menurun yaitu dari 66,67% yang terkategori Sedang menjadi 13,33% yang terkategori Sangat Rendah. Secara umum, realiasi kinerja sebesar 43,85% dan terkategori Sangat Rendah. Rendahnya capaian indikator ini sangat terkait erat dengan jumlah satpol PP yang jauh dari ideal sebagaimana diatur dalam permendagri No. 60 tahun 2012.

**e. SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri**

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Pelayanan dasar kepada Masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan masyarakat

untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Dalam SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri terdapat 3 jenis pelayanan dasar dengan total indikator berjumlah 11 indikator Batas waktu pencapaian target SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah tahun 2014 – 2020. Daftar jenis layanan dasar dan indikator kinerja SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri ditunjukkan pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22  
Jenis Layanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Bidang Pemerintahan Dalam negeri

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
	Indikator	Nilai (%)	
<b>I</b>	<b>Pelayanan Dokumen Kependudukan</b>		
	1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100	2015
	2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100	2015
	3. Cakupan Penerbitan Kuitipan Akta Kelahiran	90	2020
	4. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	70	2020
<b>II</b>	<b>Pemeliharaan Ketentraman &amp; Ketertiban Masyarakat</b>		
	5. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	100	2016
	6. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x patroli dlm sehari	2018
	7. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota	1 org setiap RT atau sebutan lainnya	2018
<b>III</b>	<b>Penanggulangan Bencana Kebakaran</b>		
	8. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	80	2016
	9. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	75	2016
	10. Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85	2016
	a. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	90	2016

Selama periode 2013 – 2017, capaian indikator SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir ditunjukkan pada Tabel 2.23. Dari 11 indikator kinerja SPM Bidang pemerintahan Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan seluruh indikator (100%) dengan 6 indikator (54,55%) telah

mencapai target nasional. Tugs pelayanan bidang Pemerintahan Dalam negeri dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran.

Tabel 2.23.

Pencapaian Indikator SPM Bidang Pemerintaha Dalam Negeri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2017

No.	Indikator SPM	Capaian SPM				
		2013	2014	2015	2016	2017
	<b>Pelayanan Dokumen Kependudukan</b>					
1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	70,55	83,12	83,12	32,05	83,95
2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	50,57	76,85	76,85	8,48	217,00
3	Cakupan Penerbitan Kuitipan Akta Kelahiran	100,00	100,00	100,00	2,67	45,35
4	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100,00	100,00	100,00	n.a	100,00
	<b>Pemeliharaan Ketentraman &amp; Ketertiban Masyarakat</b>					
5	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	86,00	86,00	86,00	100,00	100,00
6	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	0,30	0,40	0,40	0,40	0,20
7	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota	0,90	1,00	1,00	0,60	n.a
	<b>Penanggulangan Bencana Kebakaran</b>					
8	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	100,00	150,00	150,00	150,00	n.a
9	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100,00	100,00	100,00	100,00	n.a
10	Persentase aparaturn pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	100,00	56,25	51,95	50,00	n.a
11	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	100,00	100,00	100,00	100,00	n.a

Permasalahan /hambatan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam negeri di Kabupaten Indragiri Hilir menurut jenis pelayanan dasar dan indikator serta solusinya ditunjukkan pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24  
Permasalahan/Hambatan Dalam penerapan dan Pencapaian SPM Bidang  
Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Indragiri Hilir

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Hambatan	Solusi
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Operasi Pengamanan dan Pengawasan	Belum terpenuhinya standar kesejahteraan petugas khusus nya yang masih berstatus Non PNS	Peningkatan Alokasi Anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan honorer Satpol.PP / Banpol.PP
	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Masih lambat nya respon menanggapi laporan masyarakat tentang gangguan Tibumtranmas	Pembentukan Unit Reaksi Cepat Satpol.PP
	Cakupan Penegakan PERDA / PERKADA	Penegakan masih sebatas Surat Peringatan tanpa belum sampai pemberian sanksi	Pembentukan Sekretariat PPNS agar dapat menindaklanjuti pelanggaran PERDA sampai gelar Sidang Tipiring

### 2.3.1.6. Sosial

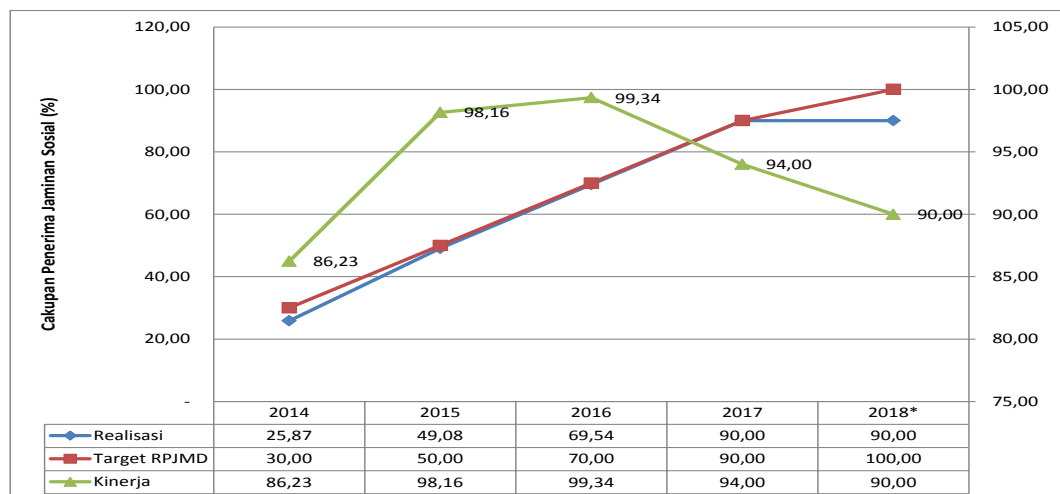
Layanan urusan wajib dasar bidang sosial dianalisis dari dua indikator penting yaitu (i) Penyandang cacat baik fisik maupun mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dan (ii) PMKS yang menerima bantuan sosial.

#### a. Penerima Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah

ditetapkan bahwa indikator penyandang cacat baik fisik maupun mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial terus meningkat yaitu dari 30% pada tahun 2014 menjadi 100% pada tahun 2018. Indikator ini ditetapkan agar menjamin indikator penyandang cacat baik fisik maupun mental serta lanjut usia yang tidak potensial di Kabupaten Indragiri Hilir menerima jaminan sosial .

Selama periode 2014 - 2018, realisasi capaian indikator penyandang cacat baik fisik maupun mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial hampir mendekati target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2014, realisasi kinerja indikator ini sebesar 86,23% dan terkategori tinggi. Pada tahun 2015 - 2018, realisasi kinerja indikator penyandang cacat baik fisik maupun mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial berkisar antara 90,00% - 99,34% yang terkategori Tinggi - Sangat Tinggi. Secara keseluruhan, capaian realisasi kinerja indikator ini sebesar 93,55% dan terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian kinerja telah Sangat tinggi, namun upaya terus mempertahankan jinerja harus terus dilakukan agar penyandang cacat mendapat perlindungan sosial.



Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka,2013 - 2017) dan LKPJ (2013 - 2017)

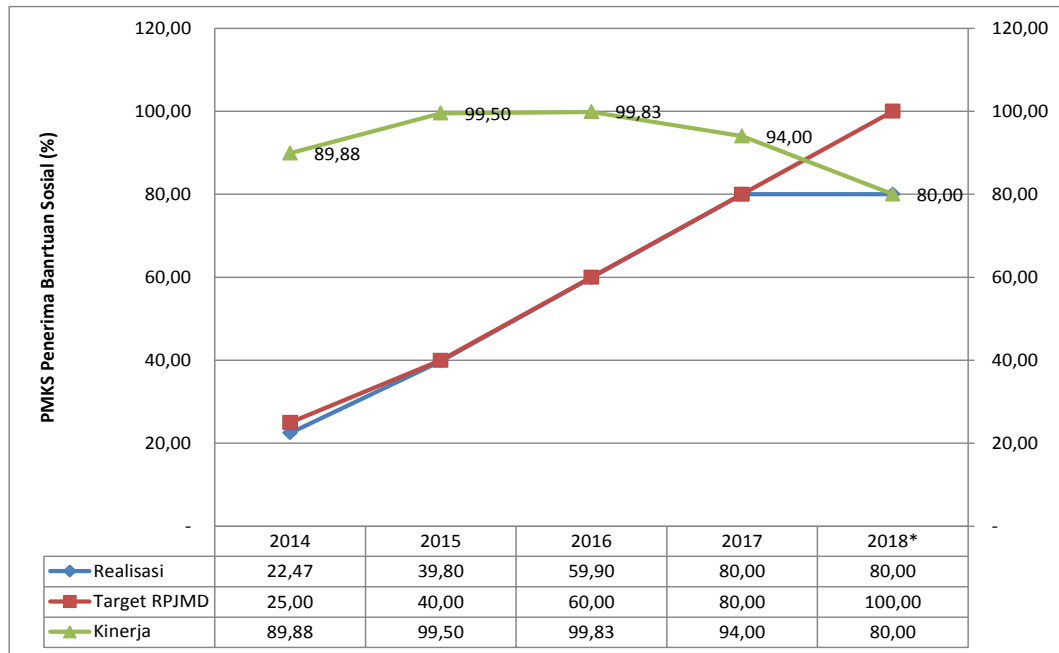
Gambar 2.84.

Kinerja Indikator Penyandang Cacat Baik Fisik Maupun Mental Serta Lanjut Usia Yang Tidak Potensial Yang telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

**b. PMKS yang Menerima Bantuan Sosial**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa indikator PMKS yang menerima bantuan sosial terus meningkat yaitu dari 25% pada tahun 2014 menjadi 100% pada tahun 2018. Indikator ini ditetapkan dan dimasukkan dalam RPJMD untuk menjamin agar PMKS yang ada di Indragiri Hilir mendapat pembinaan dan bantuan sosial.

Selama periode 2014 - 2018, realisasi capaian indikator di Indragiri Hilir hampir sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Pada tahun 2014 - 2017, realisasi kinerja indikator ini sebesar 89 - 99,50% yang terkategori Tinggi - Sangat Tinggi. Pada tahun 2018, diperkirakan realisasi indikator sama dengan tahun sebelumnya namun karena target meningkat sehingga realisasi kinerja menurun menjadi 80% dan terkategori Tinggi. Selama periode ini, rata-rata realisasi kinerja indikator PMKS penerima bantuan sosial sebesar 92,66 yang terkategori Sangat Tinggi. Capaian indikator PMKS penerima bantuan sosial yang tinggi selama periode 2014 - 2018 perlu terus dipertahankan pada periode berikutnya.



Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.85.  
Kinerja Indikator PMKS Yang Menerima Bantuan Sosial  
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

### c. SPM Bidang Sosial

SPM Bidang Sosial merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara minimal. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/Huk/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan bahwa yang dimaksud Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Daftar jenis layanan dan indikator SPM Bidang Sosial ditunjukkan pada Tabel 2.25 berikut.



Tabel 2.25  
Jenis Pelayanan dan Indikator Bidang Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator	Target Nasional (%)	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
1	<b>Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:</b>			
	a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota	1 Presentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	100	2017
	b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota	2 Presentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	100	2017
2	<b>Penyediaan sarana dan prasarana sosial:</b>			
	a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota	3 Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	100	2017
	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota	4 Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	100	2017
3	<b>Penanggulangan korban Bencana:</b>			
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota	5 Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	2017
	b. Evakuasi korban bencana skala Kabupaten/kota	6 Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	2017
4	<b>Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:</b>			
	- Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota	7 Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100	2017

Selama periode 2013 - 2017, capaian indikator SPM Bidang Sosial Kabupaten Indragiri Hilir ditunjukkan pada Tabel 2.26. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan 7 indikator (100%)

pada SPM bidang sosial dan 2 indikator (28,57% sudah mencapai target nasional,

Tabel 2.26  
Pencapaian Indikator SPM Bidang Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2017

No.	Indikator SPM	Capaian SPM				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	0,7	63,3	80,01	100	97
2	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	0	1,1	100	100	98
3	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	100	100	96
4	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100
5	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	0	100
6	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	85,71	98
7	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	68,62	34	100	0	97

Permasalahan /hambatan dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial di Kabupaten Indragiri Hilir menurut jenis pelayanan dan indikator serta solusinya ditunjukkan pada Tabel 2.27 dibawah ini.

Tabel 2.27.  
Permasalahan/hambatan Dalam Penerapan dan Pencapaian SPM di Kabupaten Indragiri Hilir

Jenis Pelayanan	Indikator	Hambatan	Solusi
1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang			
a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang	1 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan	Letak Daerah pada Perairan Pasang Surut	Meningkatkan Koordinasi dengan pihak

Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota		kebutuhan dasar.	satu kendala lambatnya distribusi Bansos kepada PMKS	kecamatan serta tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)
b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota	2	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	Pemberdayaan Sosial masyarakat melalui KUBE belum berjalan secara maksimal karena belum serius Kecamatan ada Pendamping KUBE	Meningkatkan Koordinasi kerja dengan pihak Kecamatan dan membentuk petugas Pendamping KUBE
2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial:				
a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota	3	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	Menyacu kepada isu no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Panti yang dikelola oleh pemerintah merupakan Kewenangan Pemerintah Provinsi	Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk Bantuan Sosial bagi Panti-panti swasta
b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota	4	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	Belum terbentuknya wahana kesejahteraan berbasis masyarakat (WKSB)	Mengupayakan Secepatnya melalui Koordinasi dengan pihak kecamatan membentuk WKSBM
3. Penanggulangan korban Bencana:				
a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota	5	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Sulitnya Proses Administrasi untuk Pencairan dana Tanggap Darurat Bencana pada BPKAD Kab. Inhil menyebabkan Bantuan Sosial tidak maksimal	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan pelaporan Bencana secara berkala
b. Evakuasi korban bencana skala	6	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan	Sulitnya proses pencairan dana tanggap darurat	Meningkatkan Koordinasi kerja dengan Tim

Kabupaten/kota		sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Bencana, walaupun Evakuasi Korban sudah dilaksanakan oleh Tim Penanggulangan Bencana daerah	penanggulangan bencana alam proses bantuan Tanggap darurat Bencana berjalan dengan yang diharapkan
4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:				
- Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota	7	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Masih Banyaknya PMKS yang belum menerima jaminan sosial terutama yang berada di daerah terpencil, kesulitan peralatan e-KTP, sehingga tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi terkait agar masyarakat yang belum dapat menerima Jaminan Sosial dapat masih data Nasional Penerima bantuan iuran Jaminan Kesejahteraan nasional (PBI-JKN)

### 2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

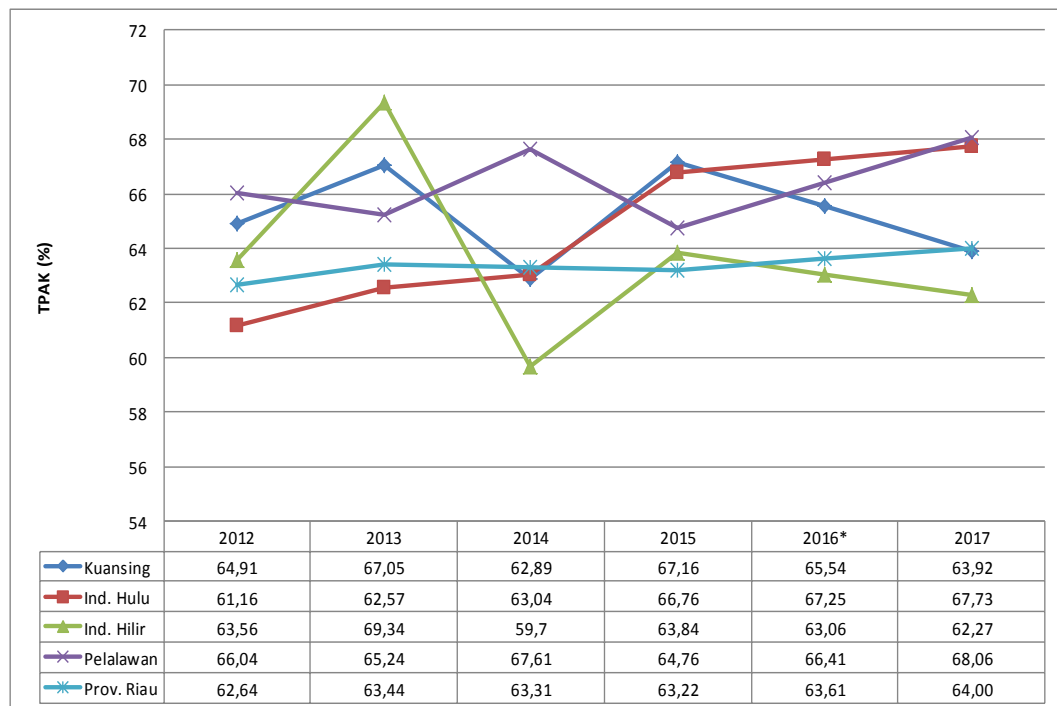
Layanan urusan wajib non dasar terdiri dari 18 layanan yaitu (i) Tenaga Kerja, (ii) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (iii) Pangan, (iv) Pertanahan, (v) Lingkungan Hidup, (vi) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (vii) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (viii) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (ix) Perhubungan, (x) Komunikasi dan Informatika, (xi) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (xii) Penanaman Modal, (xiii) Kepemudaan dan Olahraga, (xiv) Statistik, (xv) Persandiaan, (xvi) Kebudayaan, (xvii) Perpustakaan dan (xviii) Kearsipan

### 2.3.2.1. Tenaga Kerja

Layanan urusan wajib non dasar bidang tenaga kerja dianalisis dari indikator (i) Tingkat partisipasi Angkatan Kerja, (ii) Pencari kerja yang ditempatkan dan (iii) Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan.

#### a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

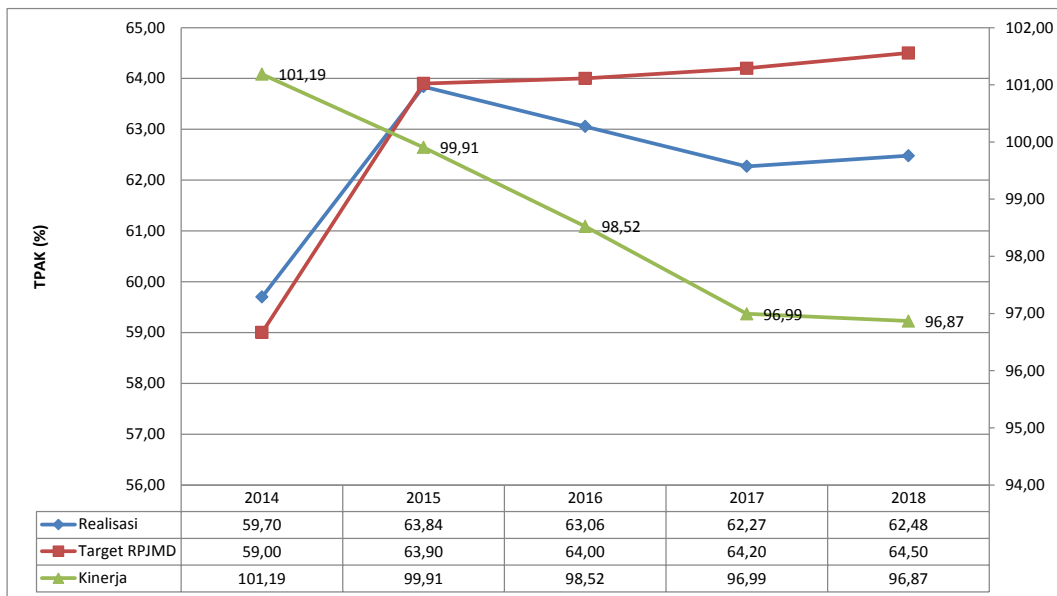


Sumber : BPS Provinsi Riau (<https://riau.bps.go.id/dynamictable/2016/10/06/10/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-kabupaten-kota-di-provinsi-riau-2010-2015.html>)

Gambar 2.86.  
Perkembangan TPAK kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya serta Provinsi Riau Tahun 2012 – 2017

Selama periode 2012 – 2017, TPAK Kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif menurun. Pada tahun 2012 TPAK Indragiri

Hilir sebesar 63,56% yang berarti, dari 100 orang penduduk Indragiri Hilir berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 64 orang tersedia untuk memproduksi. Pada tahun 2013, TPAK meningkat tajam menjadi 69,34% dan menurun tajam pada tahun 2014 menjadi 59,70. Selama periode 2015 – 2017, TPAK Indragiri Hilir nilainya berfluktuatif dari 62,27% - 63,84%. Capaian TPAK Indragiri Hilir ini relatif berada diposisi menengah bawah dibanding TPAK Kabupaten sekitarnya, bahkan pada tahun 2017 TPAK Indragiri Hilir adalah yang terendah dibanding kabupaten sekitarnya dan Provinsi Riau.



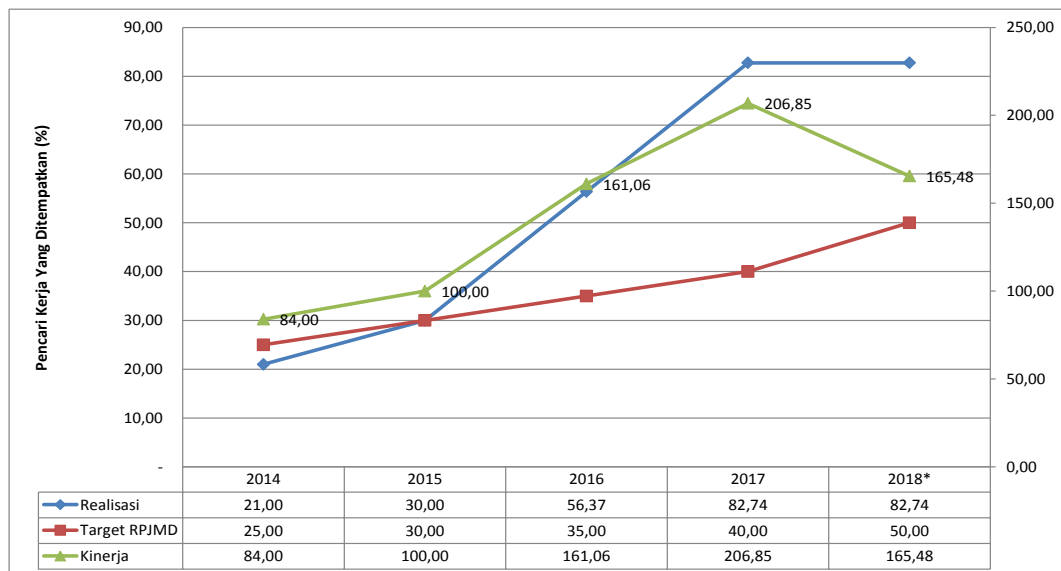
Gambar 2.87.  
Kinerja Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan bahwa indikator TPAK telah ditetapkan terus meningkat dari 59,70% pada tahun 2014 menjadi 64,50% pada tahun 2018. Pada tahun 2014, realisasi TPAK Indragiri Hilir berada diatas target sehingga realisasi kinerja sebesar 101,19% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2015 – 2018, realisasi TPAK Indragiri Hilir sedikit berada dibawah target dengan realisasi kinerja berkisar antara 96,87% - 99,91% yang semuanya

terkategori Sangat Tinggi. Pencapaian TPAK dan kinerja yang Sangat Tinggi ini perlu dipertahankan.

**b. Pencari kerja yang ditempatkan**

Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan (Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. PER.07/MEN/IV/2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja). Selama periode 2014 - 2017, pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat dari 21% pada tahun 2014 meningkat menjadi 82,74% pada tahun 2017.



Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.88.  
Kinerja Indikator Pencari Kerja Yang Ditempatkan  
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

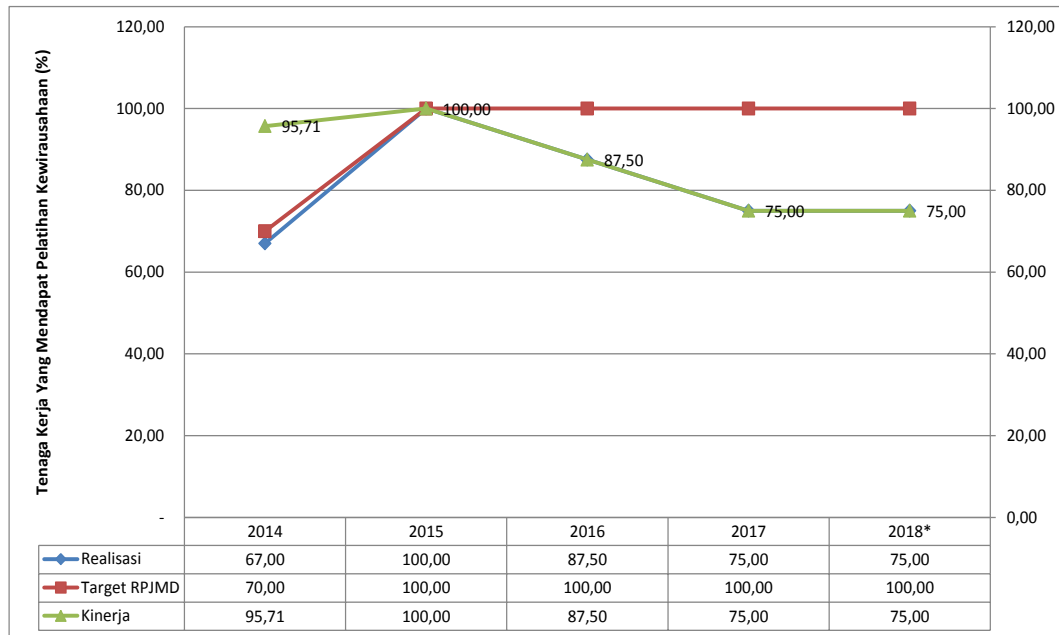
Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan indikator pencari kerja yang ditempatkan di Indragiri Hilir terus meningkat dari 25% pada tahun 2014 menjadi 50% pada tahun 2018. Realisasi indikator pencari kerja yang ditempatkan di Indragiri Hilir ini, capainnya umumnya diatas kecuali pada tahun 2014 yang dibawah

target. Realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 84% yang terkategori Tinggi. Pada periode 2015 - 2019, realisasi indikator pencari kerja yang ditempatkan di Indragiri Hilir berada sama dan/atau diatas target dengan realisasi kinerja berkisar antara 100 - 206,85% dan terkategori Sangat Tinggi. Capaian kinerja indikator yang tinggi ini perlu terus dipertahankan.

**c. Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan**

Selama periode 2014 - 2017, realisasi indikator tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan memiliki trend berfluktuatif menurun yaitu dari 67% pada tahun 2014 meningkat menjadi 100% pada tahun 2015 dan terus menurun menjadi 75% pada tahun 2017. Dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa indikator tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan meningkat dari 70% pada tahun 2014 menjadi 100% pada tahun 2018. Realisasi kinerja indikator ini pada tahun 2014 dari 95,71% menjadi 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2016 - 2018, realisasi kinerja indikator tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan terus menurun dari 87,50% menjadi 75% dengan kategori Tinggi - Sedang. Upaya untuk meningkatkan indikator ini perlu senantiasa dilakukan sehingga tenaga yang dilatih dapat membuka lapangan usaha mandiri.





Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.89.

Kinerja Indikator Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

### 2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

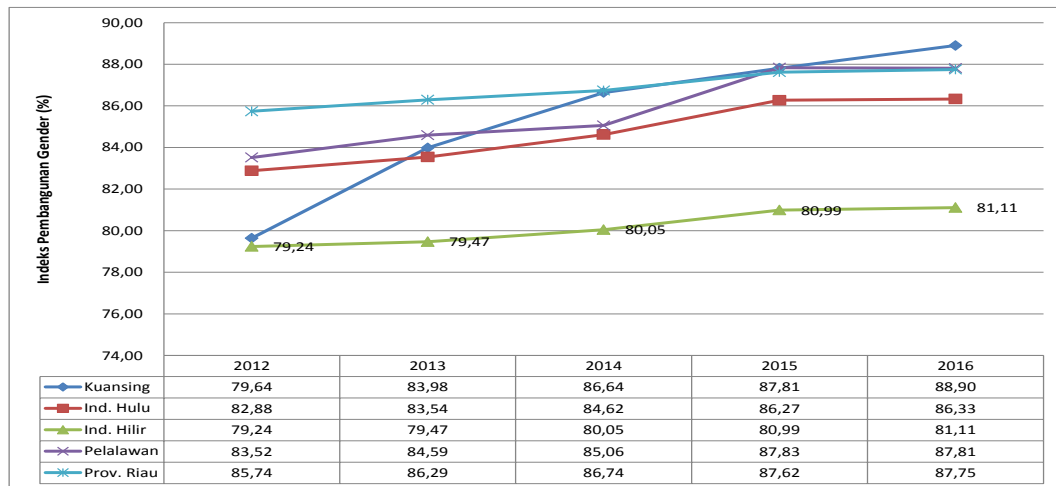
Layanan urusan wajib non dasar bidang tenaga kerja dianalisis dari indikator (i) Indeks Pembangunan Gender, (ii) Indeks Pemberdayaan Gender dan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.

#### a. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen.

Selama periode 2012 - 2016, IPG Indragiri Hilir memiliki trend meningkat yaitu dari 79,24% pada tahun 2012 meningkat menjadi 81,11%

pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengsn IPG Kabupaten sekitarnya serta IPG Provinsi Riau memperlihatkan bahwa IPG Indragiri Hilir adalah yang terendah. Oleh karena itu, upaya meningkatkan pembangunan perempuan di Indragiri dari bidang ekonomi dan non ekonomi perlu terus ditingkatkan khususnya dalam peran serta perempuan dalam bekerja.

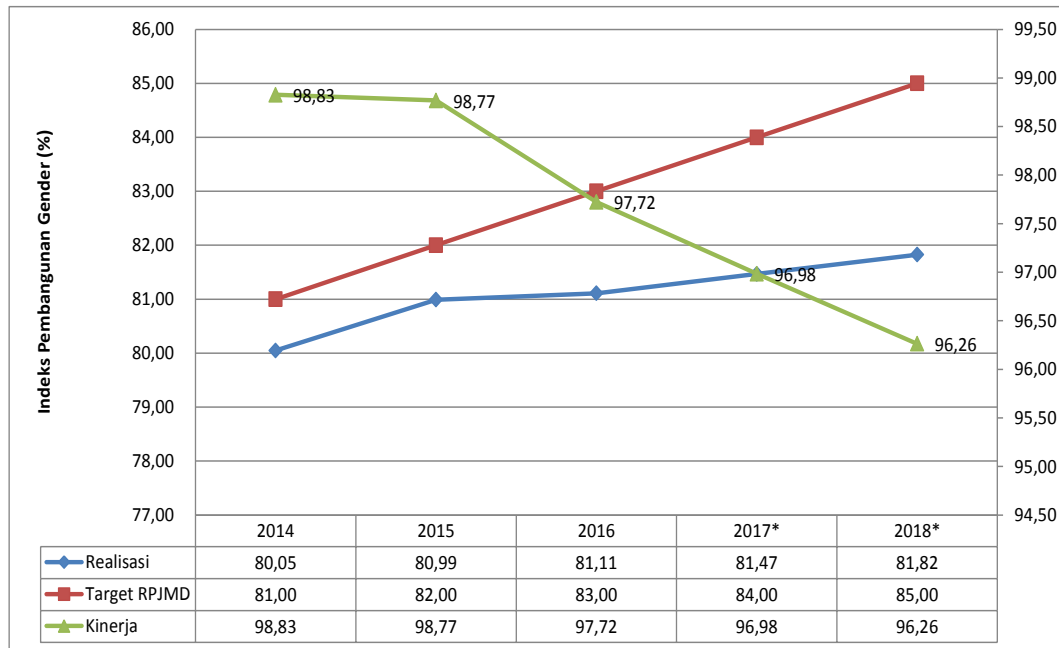


Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka,2013 - 2017) dan LKPJ (2013 - 2017)

Gambar 2.90.

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Serta Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018

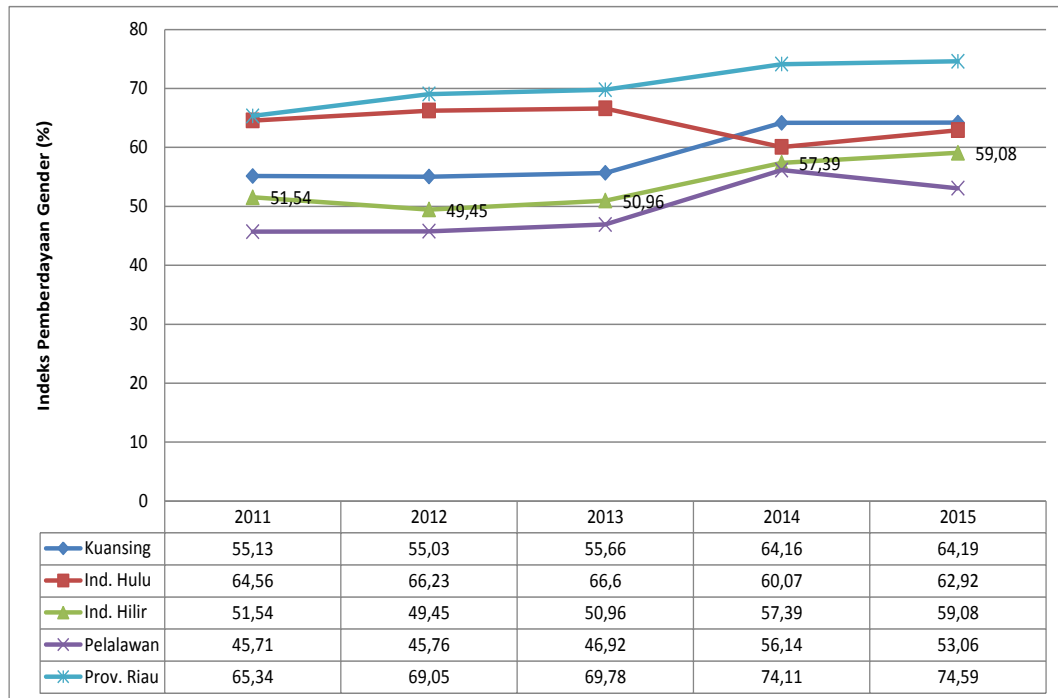
Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan indikator IPG Kabupaten Indragiri Hilir dari 81% pada tahun 2014, meningkat menjadi 85% pada tahun 2018. Selama periode ini, capaian indikator IPG Indragiri Hilir berada dibawah target yang ditetapkan. Pada tahun 2014 - 2015, capaian indikator IPG sebesar 80,05% dan 80,99% dengan realisasi kinerja sebesar 98,77% - 98,83% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2016 - 2018, realisasi meningkat lambat dan disisi lain target meningkat lebih tinggi sehingga realisasi kinerja menurun dari 97,72% menjadi 96,26% dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian realisasi kinerja IPG Indragiri Hilir selama periode ini harus terus dipertahankan dan ditingkat nilainya sehingga dapat melampaui IPG Kabupaten Sekitarnya.



Gambar 2.91.  
Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Gender  
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

**b. Indeks Pemberdayaan Gender**

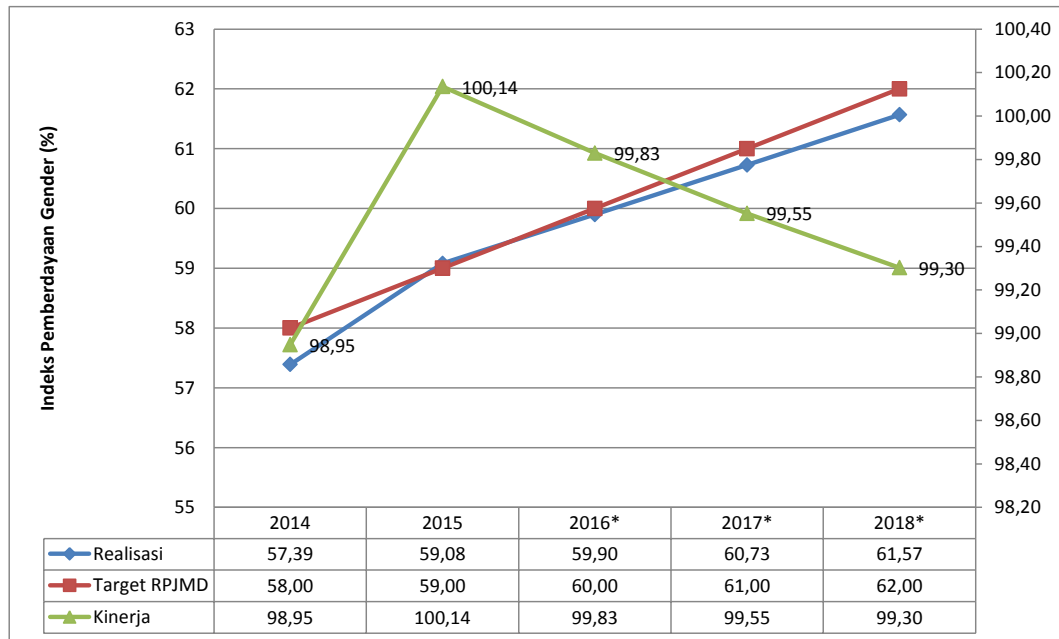
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama periode 2011 - 2015, IDG Kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif meningkat yaitu dari 51,54% pada tahun 2011, menurun menjadi 49,45% pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 59,08 pada tahun 2015. Bila capaian IDG Indragiri Hilir ini dibandingkan dengan capaian IDG Kabupaten sekitarnya menunjukkan bahwa IDG Indragiri Hilir hanya lebih tinggi dari IDG Pelalawan namun lebih rendah dibandingkan dengan IDG Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Sengingi dan Provinsi Riau. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan indikator IDG Kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 2,77% per tahun.



Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka,2013 - 2017) dan LKPJ (2013 - 2017)

Gambar 2.92.  
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya Serta Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan indikator IDG Indragiri Hilir meningkat dari 58% pada tahun 2014 menjadi 62% pada tahun 2018. Realisasi Indikator IDG Kabupaten Indragiri Hilir sedikit dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD. Selama periode ini, realisasi kinerja indikator IDG Indragiri Hilir berkisar antara 98,95% - 100,14% dan terkategori Sangat Tinggi. Tingginya capaian kinerja indikator IDG ini perlu terus dipertahankan sehingga IDG Indragiri Hilir dapat terus meningkat melebihi IDG Kabupaten Sekitarnya.



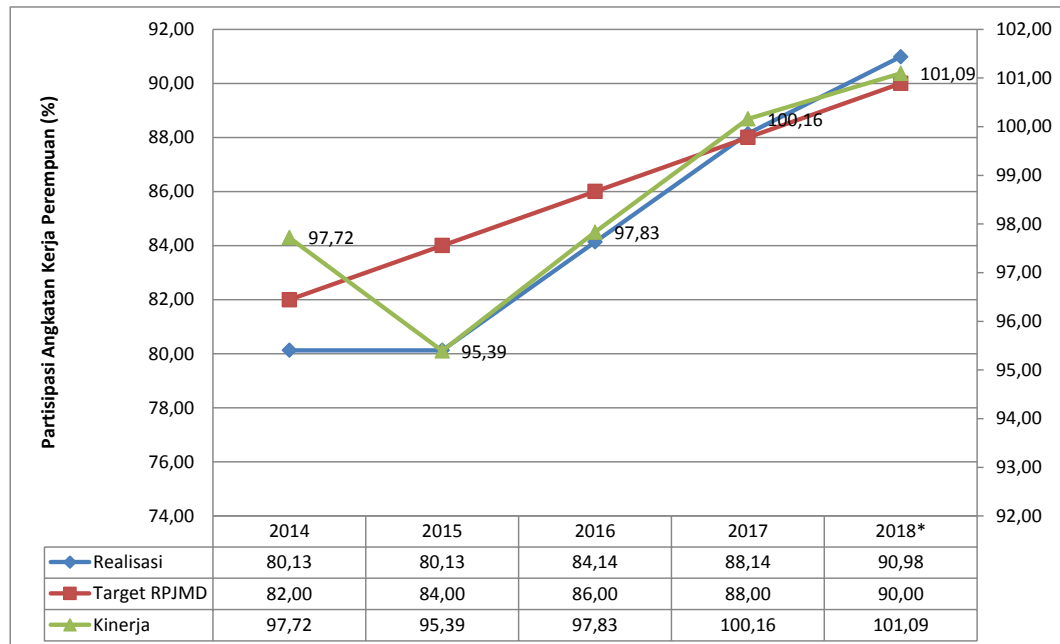
Gambar 2.93.  
Kinerja Indikator Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

**c. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**

Bank Dunia menyatakan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia masih rendah. Masih rendahnya partisipasi itu karena terhambat masih kurangnya layanan pengasuhan anak baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Hanya sekitar 53,5 persen perempuan usia kerja di Indonesia yang menjadi bagian dari angkatan kerja atau jauh di bawah rata-rata 67,7 persen untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik.

Selama periode 2014 - 2015, indikator partisipasi angkatan kerja perempuan di Indragiri Hilir terus meningkat meski dibawah target RPJMD Indragiri Hilir tahun 2014 - 2018, namun pada tahun 2017 - 2018 diperkirakan akan melampaui target RPJMD. Selama periode ini realisasi kinerja indikator partisipasi angkatan kerja perempuan berkisar antara 95,39% - 101,09% dan terkategori pencapaian yang Sangat Tinggi. Capaian kinerja ini perlu terus ditingkatkan agar IPG dan IDG Kabupaten Indragiri

Hilir meningkat lebih cepat lagi dan melampaui IDG dan IPG Kabupaten tetangga dan Provinsi Riau



Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.94.  
Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan  
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

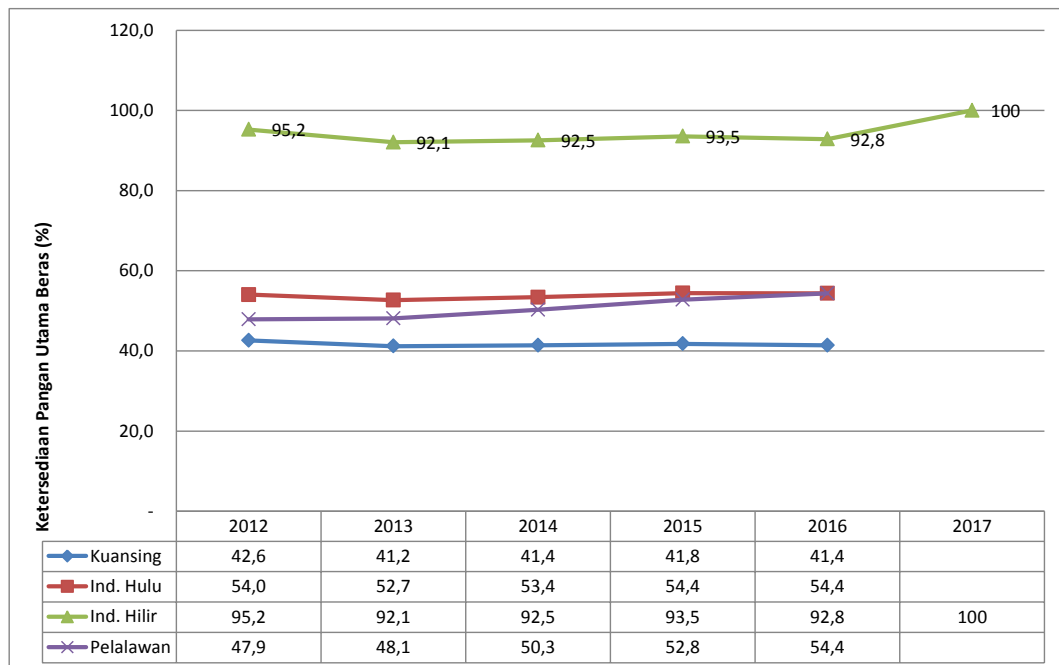
### 2.3.2.3. Pangan

Layanan urusan wajib non dasar bidang tenaga kerja dianalisis dari indikator (i) ketersediaan pangan utama dan (ii) skor Pola Pangan Harapan (PPH)

#### a. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama beras di Kabupaten Indragiri Hilir, selama periode 2012 - 2017, trendnya berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2012, ketersediaan pangan utama beras di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 95,20% menurun menjadi 92,1% pada tahun 2013 dan seterusnya meningkat menjadi 100% pada tahun 2017. Bila indikator ketersediaan pangan utama beras Kabupaten Indragiri Hilir dibandingkan dengan Kabupaten tetangga menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama

beras di Indragiri Hilir adalah yang tertinggi. Hal ini dimungkinkan karena produksi beras di Kabupaten Indragiri Hilir adalah yang terbesar di Riau dengan rasio produksi terhadap konsumsi sebesar 0,85% yang berarti bahwa produksi beras Indragiri Hilir baru mampu mencukupi kebutuhan konsumsi beras di Indragiri Hilir sebesar 85%. Kekurangannya disuplai oleh Bulog dan Provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Upaya untuk berswasembada pangan di Indragiri Hilir perlu terus diupayakan agar ketersediaan pangan inidapat terus terjamin.

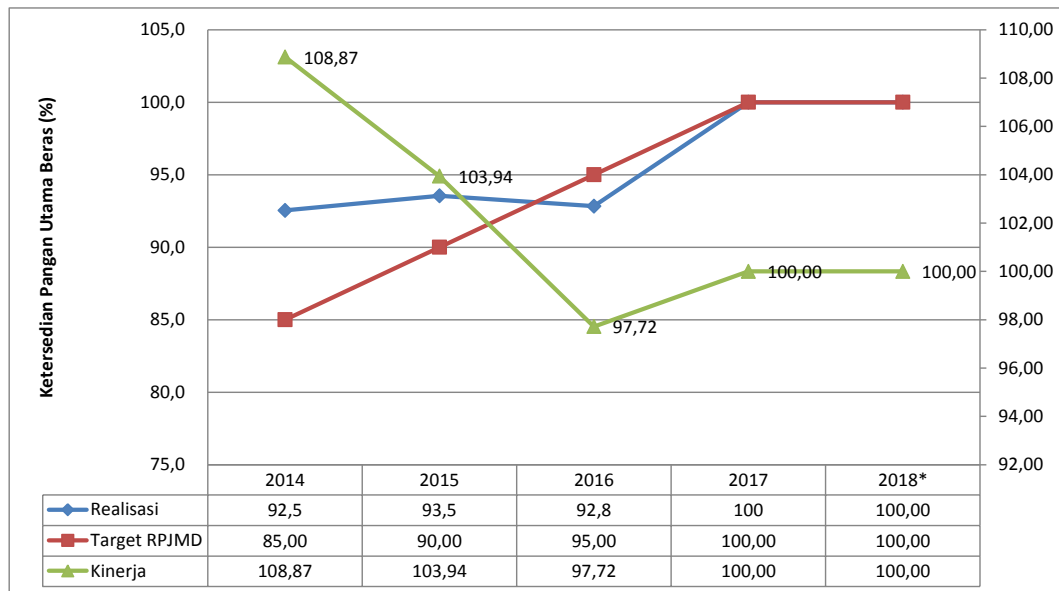


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau (2017) dan LKPJ (2013 - 2017)

Gambar 2.95.  
Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama  
di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya  
Tahun 2014 - 2018

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir tahun 2014 - 2018 telah ditetapkan indikator ketersediaan pangan utama beras terus meningkat dari 85% pada tahun 2014 menjadi 100% pada tahun 2018. Selama periode ini, capaian indikator ini umumnya sama atau diatas target RPJMD

kecuali pada tahun 2016 sehingga realisasi kinerja berkisar antara 97,72% - 108,87% dan terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian indikator ketersediaan pangan utama beras ini Sangat Tinggi, namun upaya untuk terus berupaya untuk meningkatkan produksi sehingga rasio produksi sama atau lebih tinggi dibanding konsumsi perlu terus diupayakan.



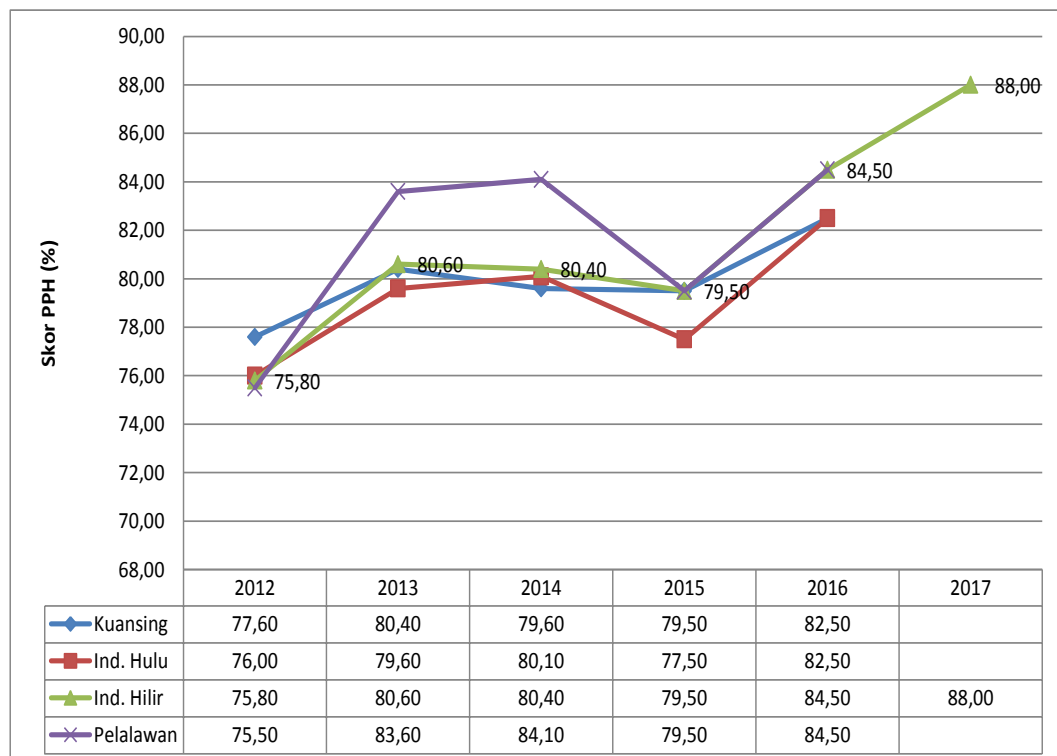
Gambar 2.96.  
Kinerja Indikator Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

#### b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan.



Selama periode 2012 -2017, skor PPH indragiri memiliki trend berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2012 - 2015, posisi skor PPH Indragiri Hilir adalah doiposisi tengah dibanding skor PPH kabupaten tetangga. Pada tahun 2016 - 2017, skor PPH Indragiri Hilir bergerak dengan percepatan yang lebih tinggi sehingga pada tahun 2016/2017 , skornya tertinggi dibanding skor PPH kabupaten tetangga. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan skor PPH Kabupaten Indragiri Hilir 2,52% per tahun.

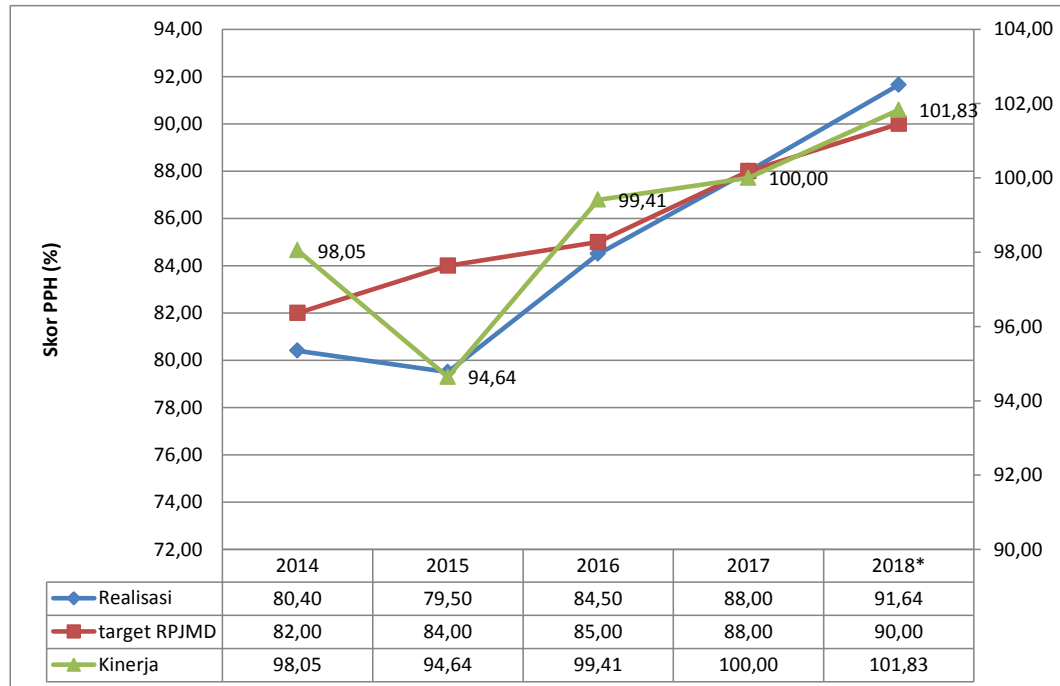


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau (2017) dan LKPJ (2013 - 2017)

Gambar 2.97.  
Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan  
di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Sekitarnya  
Tahun 2014 - 2018

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2018, indikator Skor PPH ini telah ditetapkan meningkat yaitu dari 82,00% pada tahun 2014 meningkat menjadi 90,00% pada tahun 2018. Realisasi skor PPH pada periode ini berfluktuatif meningkat dengan realisasi kinerja berkisar antara 94,64% - 101,83% yang terkategori Sangat Tinggi.

Capaian indikator skor PPH yang Sangat Tinggi ini perlu terus ditingkatkan sehingga akan mendorong kepada peningkatan angka harapan hidup.



Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.98.  
Kinerja Indikator Skor Pola Pangan Harapan  
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

#### 2.3.2.4. Pertanian

Layanan urusan wajib non dasar bidang tenaga kerja dianalisis dari indikator persentase luas tanah bersertifikat. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator persentase luas tanah bersertifikat di kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 42% pada tahun 2014 menjadi 46% pada tahun 2018. Selama periode ini, realisasi capaian indikator persentase luas tanah bersertifikat di Kabupaten Indragiri Hilir relatif konstan. Target yang terus meningkat dengan capaian yang konstan maka realisasi kinerja terus menurun yaitu dari 98,55% menjadi 89,98% yang terkategori dari Sangat Tinggi hingga Tinggi. Upaya peningkatan indikator luas tanah bersertifikat perlu terus

ditingkatkan lebih baik melalui Prona maupun program daerah karena indikator ini merupakan surat tanda bukti pemegang hak tanah bagi masyarakat.



Sumber : LKPJ Inhil (2013 - 2017)

Gambar 2.99.  
Kinerja Indikator Luas tanah bersertifikat  
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

### 2.3.2.5. Lingkungan Hidup

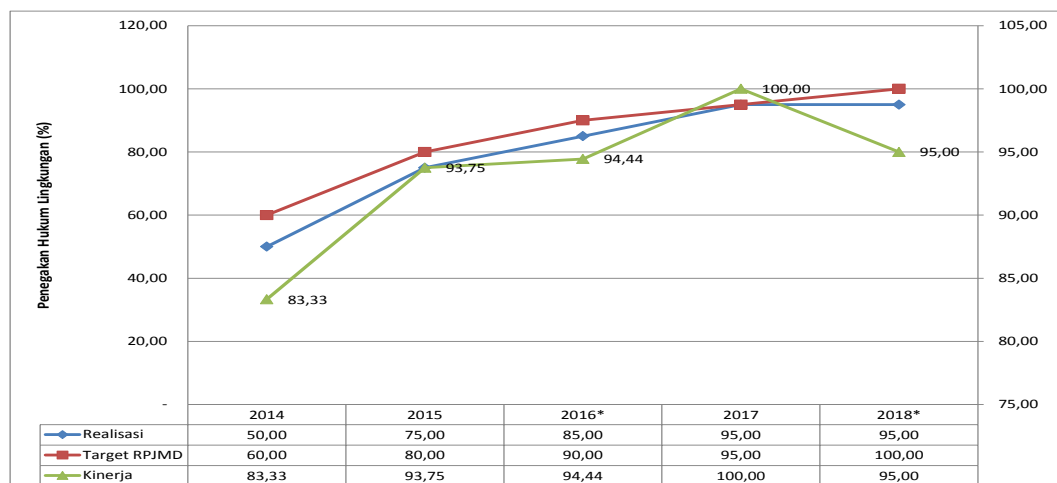
Layanan urusan wajib non dasar bidang Lingkungan Hidup dianalisis dari indikator (i) penegakan hukum lingkungan dan (ii) penanganan sampah.

#### a. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan Hukum Lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, gugatan perdata, dan

pidana. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator penegakan hukum lingkungan terus meningkat yaitu dari 60% pada tahun 2014 menjadi 100% pada tahun 2018.

Selama periode 2014 - 2018, realisasi indikator penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend meningkat dan berada dibawah target kecuali pada tahun 2017 yang relatif sama dengan target RPJMD. Selama periode ini, realisasi kinerja indikator penegakan hukum berkisar antara 83,33% - 100,00% yang terkategori Tinggi - Sangat Tinggi. Meski capaian penegakan hukum lingkungan rata-ratanya terkategori Sangat Tinggi, namun upaya penegakan hukum lingkungan ini harus terus dilakukan meski dengan keterbatasan tenaga fungsional pengawas lingkungan daerah. Upaya menambah kuantitas tenaga fungsional pengawas lingkungan perlu mendapat perhatian kedepannya.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Inhil (2018) dan LKPJ Inhil (2013 - 2017)

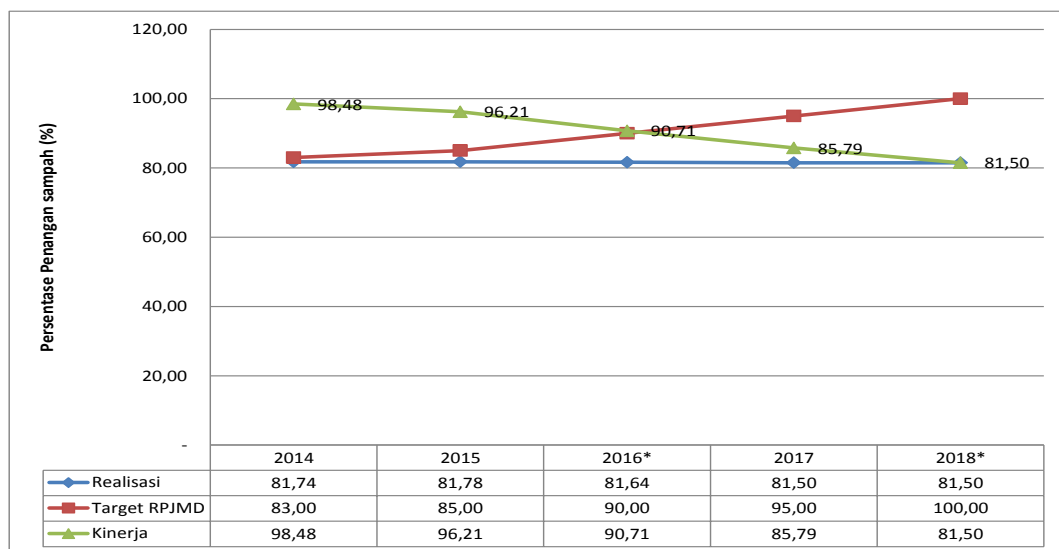
Gambar 2.100.  
Kinerja Indikator Penegakan Hukum Lingkungan  
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

### b. Penanganan Sampah

Sampah merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kurangnya TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) atau pembuangan sampah yang tidak memenuhi syarat kesehatan lingkungan

dapat mengakibatkan (i) tempat berkembang dan bersarang serangga dan tikus, (ii) menjadi sumber polusi dan bencana alam, seperti tanah, air, dan udara, dan (iii) menjadi sumber dan tempat hidup kuman-kuman yang membahayakan kesehatan.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator persentase penanganan sampah terus meningkat yaitu dari 83% pada tahun 2014 menjadi 100% pada tahun 2018. Pada periode 2014 - 2018, realisasi indikator persentase penanganan sampah trendnya sedikit menurun dan posisinya terus dibawah target yang ditetapkan. Realisasi kinerja persentase penanganan sampah di Kabupaten Indragiri Hilir berkisar antara 81,51% - 81,78% yang terkategori Tinggi. Masih rendahnya pencapaian indikator penanganan sampah ini dibanding target perlu menjadi perhatian dalam pembangunan periode berikutnya.



Sumber: [https:// sipd.kemendagri.go.id](https://sipd.kemendagri.go.id)

Gambar 2.101.  
Kinerja Indikator Persentase Penangan Sampah  
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

### c. Kebakaran Hutan dan lahan

Kebakaran hutan dan lahan berskala besar menyebabkan bencana asap yang berdampak pada beragam masalah ekologi, sosial dan ekonomi. Bencana ini disebabkan oleh kebakaran atau pembakaran

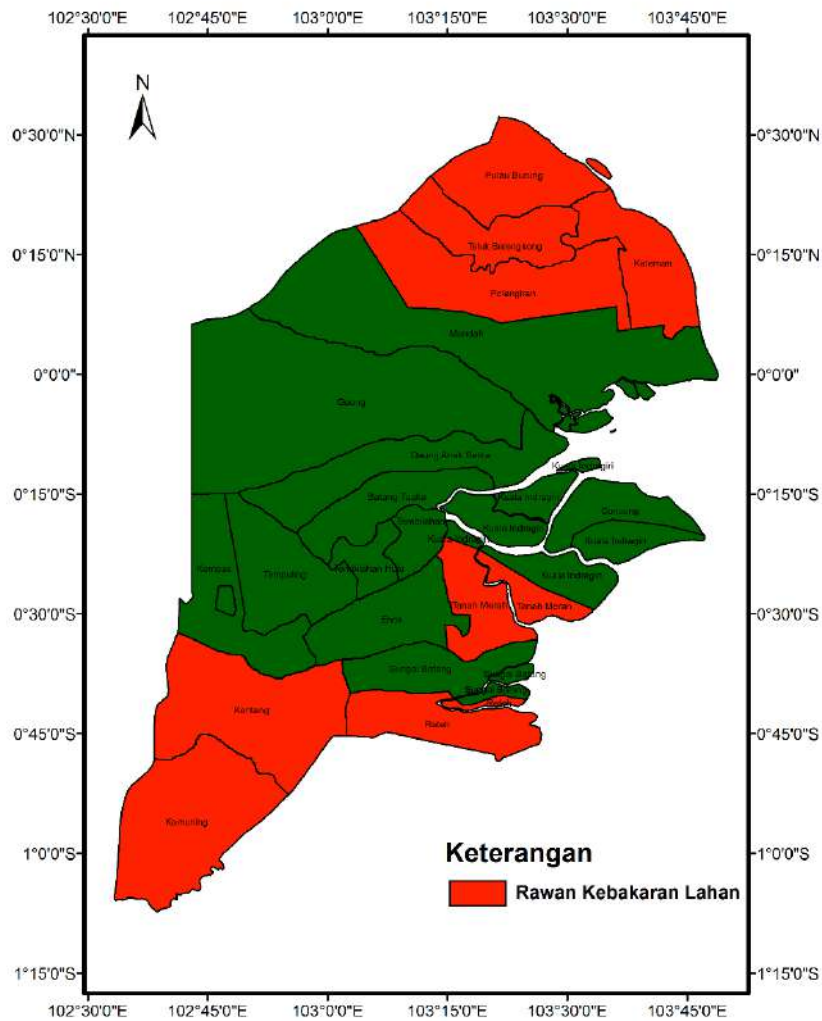
biomassa, baik di kawasan hutam, lahan perkebunan, ladang, maupun semak belukar/ilalang. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu wilayah yang hampir setiap tahun menghadapi bencana kebakaran dan asap, termasuk bencana kebakaran hutan/lahan dan asap yang cukup luas awal tahun 2014.

Berdasarkan tipologi lahan, Kab. Indragiri Hilir pada umumnya merupakan lahan gambut yang cukup luas, terdiri atas: 1.267.237 ha kawasan hidrologis gambut/KHG, 222.706 ha kawasan lindung gambut (KLG) dan 1.044.531 ha kawasan budidaya gambut (KBG). Degradasi hutan dan deforestasi yang terjadi di Kab. Indragiri Hilir telah menyebabkan suatu ekosistem yang tahan kebakaran (seperti ekosistem lahan gambut) menjadi ekosistem yang rentan terhadap kebakaran (KLH, 2009).

Hutan alam primer memiliki resiliensi yang lebih tinggi terhadap kebakaran dibandingkan dengan hutan sekunder atau hutan yang telah terdegradasi. Sehingga pada umumnya, hutan alam ini hanya akan terbakar setelah mengalami musim kering yang berkepanjangan dan adanya faktor pemicu api yang sangat kuat, misalnya karena rembetan api dari lahan perkebunan atau hutan tanaman yang bersebelahan. Namun sebaliknya, areal hutan yang telah terdegradasi dan ditumbuhi semak belukar, pada saat musim kemarau jauh lebih rentan terhadap kebakaran karena ketersediaan biomasa yang kering sebagai bahan bakar.

Hasil analisis data sekunder dan data distribusi hotspot, diperoleh hasil bahwa areal hutan/lahan terbakar, termasuk perkebunan rakyat, tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kec. Pulau Burung, Kecamatan Enok, Kecamatan Kempas, Kecamatan Gaung, Kecamatan Tempuling, Kecamatan Batang Tuaka, Kecamatan Pelangiran, Kecamatan Teluk Belengkong, Kecamatan Keritang, Kecamatan Mandah, Kecamatan Kemuning, dan Kecamatan Gaung Anak Serka.

Jumlah titik Hotspot di kabupaten Indragiri Hilir mengalami penurunan dari tahun 2013 sebanyak 312 titik hotspot menjadi 26 titik hotspot pada tahun 2017.



Gambar 2.102

Peta Rawan Bencana Kebakaran Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir

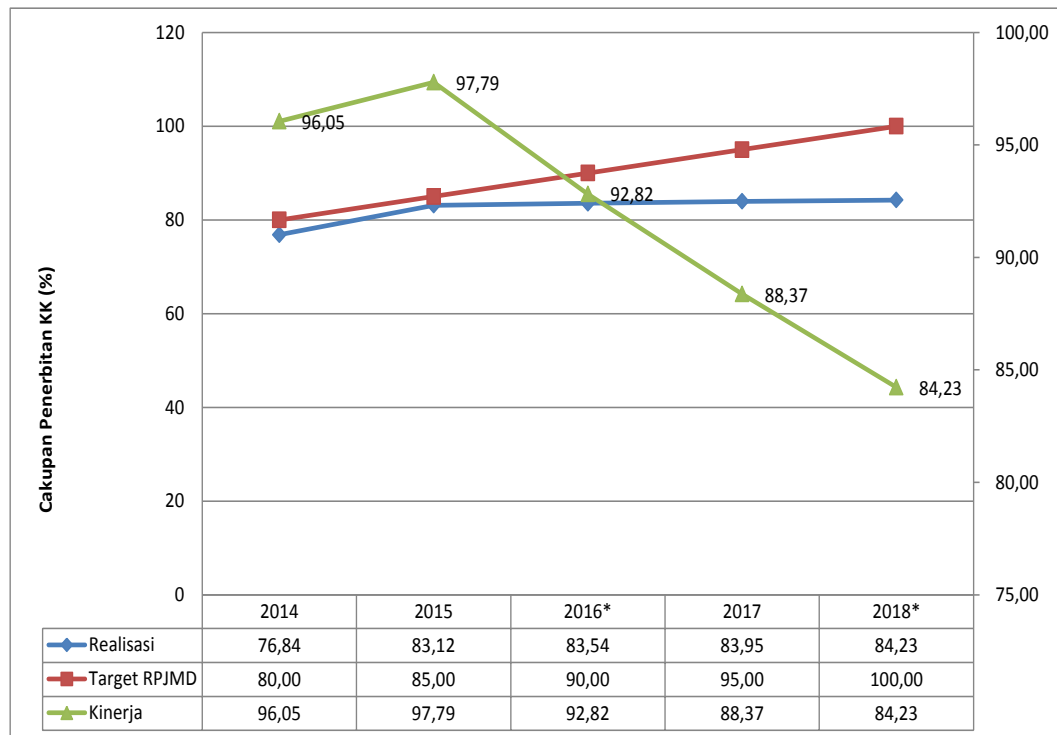
### 2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Layanan urusan wajib non dasar bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dianalisis dari indikator (i) Cakupan

penerbitan kartu keluarga, (ii) Kepemilikan KTP dan (iii) Kepemilikan Akta kelahiran.

**a. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga**

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga, wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator cakupan penerbitan kartu keluarga secara bertahap dimiliki dari 80% pada tahun 2014 menjadi 100% pada tahun 2018.



Sumber : Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Inhil (2018) dan LKPJ Inhil (2013 - 2017)

Gambar 2.103.  
Kinerja Indikator Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

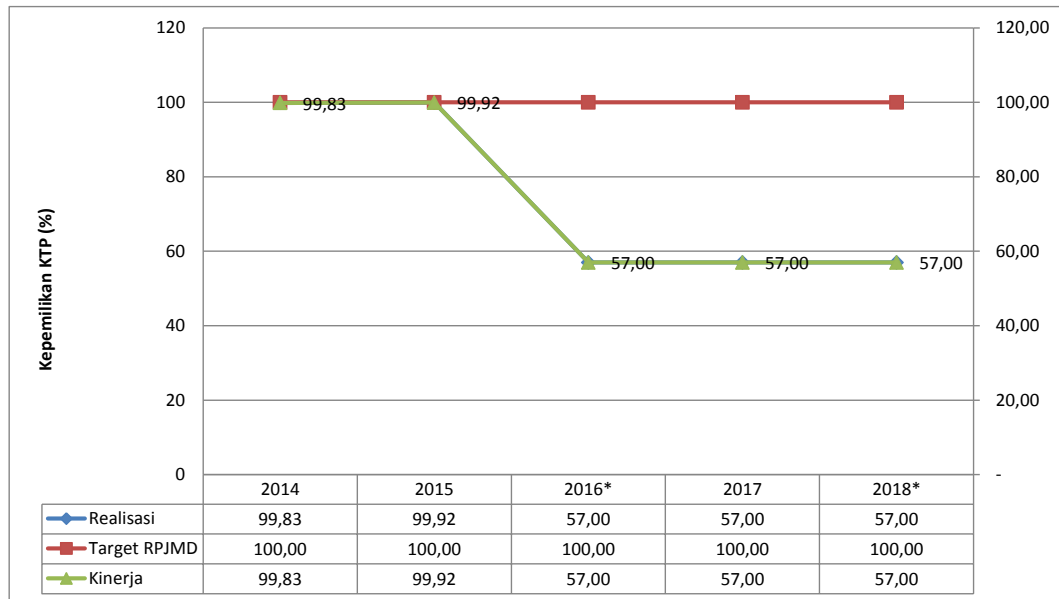
Realisasi capaian indikator cakupan penerbitkan kartu keluarga di Idnragiri Hilir selama selama periode 2014 - 2018 memiliki trend



meningkat namun dibawah target yang ditetapkan RPJMD. Realisasi kinerja indikator ini pada tahun 2014 - 2015 berkisar antara 96,05% - 97,79% dan terkategori pencapaian kinerja Sangat Tinggi. Pada atahun 2016 - 2017, sejalan dengan pemberlakuan KTP elektronik maka setiap penduduk harus memiliki NIK dan kartu keluarga nasional maka capaian indikator ini relatif tidak meningkat cakupannya sejak tahun 2015. Realisasi kinerja indikator ini berkisar antara 88,37% - 97,79% dengan kategori Tinggi Sangat Tinggi. Meski capaian kinerja indikator ini sudah Sangat Tinggi, namun upaya pencapaian indikator ini sebesar 100% perlu terus untuk diwujudkan.

#### **b. Kepemilikan KTP**

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia setidaknya telah menerbitkan 3 versi KTP. KTP lama atau KTP Kabupaten (1978), KTP dari blangko kertas dan laminasi plastik, photo di lem, tanda tangan/cap jempol dan data tercetak di komputer serta berlaku di tiap Kabupaten/Kota. Versi kedua adalah KTP nasional tahun 2004 dengan karakteristik photo dicetak pada kartu, tanda tangan/cap jempol, data dicetak dengan komputer, berlaku nasional. Versi ketiga dan terbaru adalah KTP Elektronik (2011) dimana photo dicetak dikartu, data tercetak di komputer, berlaku secara nasional, mampu menyimpan data dan data dapat dibaca/ditulis dengan *Card Reader*. Namun kenyataan pelaksanaan KTP elektronik ini hingga saat ini masih bermasalah sehingga banyak penduduk yang belum memiliki KTP elektronik ini.



Sumber : Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Inhil (2018) dan LKPJ Inhil (2013 - 2017)

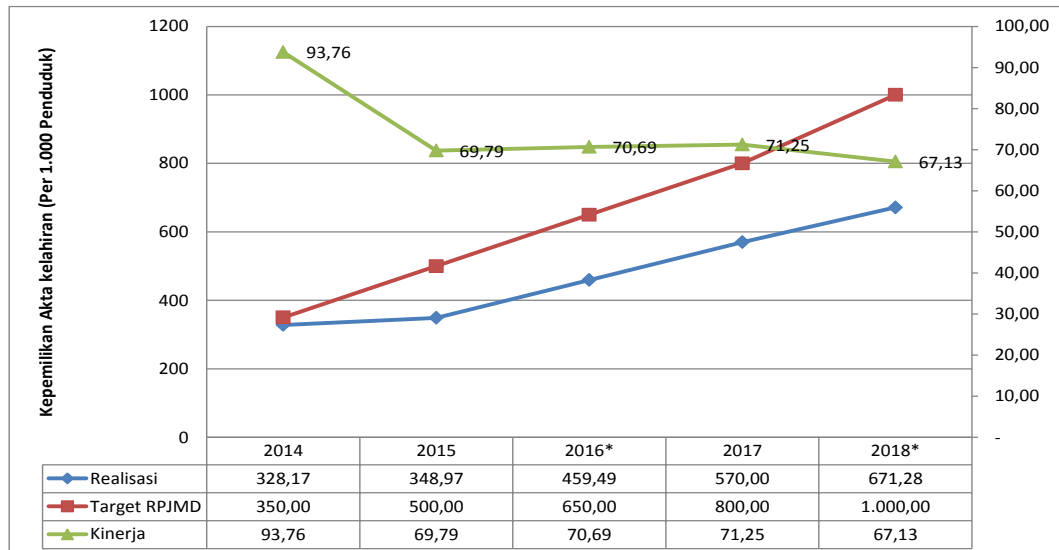
Gambar 2.104.  
Kinerja Indikator Kepemilikan KTP  
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator kepemilikan KTP ditargetkan 100% mulai dari tahun 2014 - 2018. Realisasi indikator kepemilikan KTP tahun 2014 - 2015, masih Sangat Tinggi yaitu sebesar 99,83% - 99,92% karena penduduk disamping menggunakan KTP versi KTP Nasional dan KTP Kabupaten serta KTP elektronik. Mulai 2016 - 2018, pemberlakuan KTP elektronik disemua institusi menjadikan KTP versi sebelumnya tidak lagi digunakan. Disisi lain, penerbitan KTP elektronik mengalami kendala seperti ketiadaan blangko KTP. Kondisi ini menjadikan persentase kepemilikan KTP di Indragiri Hilir sebagaimana kabupaten lainnya di Indonesia menurun menjadi 57% dan terkategori Rendah. Upaya untuk terus memfasilitasi masyarakat untuk dapat akses memiliki KTP elektronik perlu terus dilakukan meski menghadapi masalah-masalah yang sukar diterobos oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

**c. Kepemilikan Akta Kelahiran**

Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Dasar untuk Memperoleh Pelayanan Masyarakat Lainnya. Manfaat Akta Kelahiran: (i) Identitas Anak, (ii) Administrasi Kependudukan untuk KTP dan KK, (iii) Keperluan Sekolah, (iii) Pendaftaran Pernikahan di KUA, (iv) Mendaftar Pekerjaan, (v) Persyaratan Pembuatan Paspor, (vi) Mengurus Hak Ahli Waris, (viii) Mengurus Asuransi, (ix) Mengurus Tunjangan Keluarga, (x) Mengurus Hak Dana Pensiun dan (xi) Melaksanakan Ibadah Haji.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa indikator kepemilikan akte kelahiran ditetapkan terus meningkat yaitu dari 350 akte kelahiran per 1.000 penduduk meningkat menjadi 1.000 akte per 1.000 penduduk yang berarti setiap penduduk mempunyai akte kelahiran. Selama periode 2014 - 2018, realisasi indikator kepemilikan akte kelahiran memiliki trend meningkat akan tetapi dibawah target RPJMD. Realisasi kinerja indikator ini berkisar antara 67,13% pada tahun 2018 yang terkategori Rendah. Pada kondisi ini, kepemilikan akte kelahiran di Indragiri Hilir sebesar 671,29 per 1.000 penduduk, masih terdapat sekitar 329 penduduk dari setiap 1.000 penduduk yang belum mempunyai akte kelahiran. Mengingat pentingnya akte kelahiran bagi setiap penduduk maka upaya peningkatan kinerja indikator ini perlu terus dilakukan.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Inhil (2018) dan LKPJ Inhil (2013 - 2017)

Gambar 2.105.  
Kinerja Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran  
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

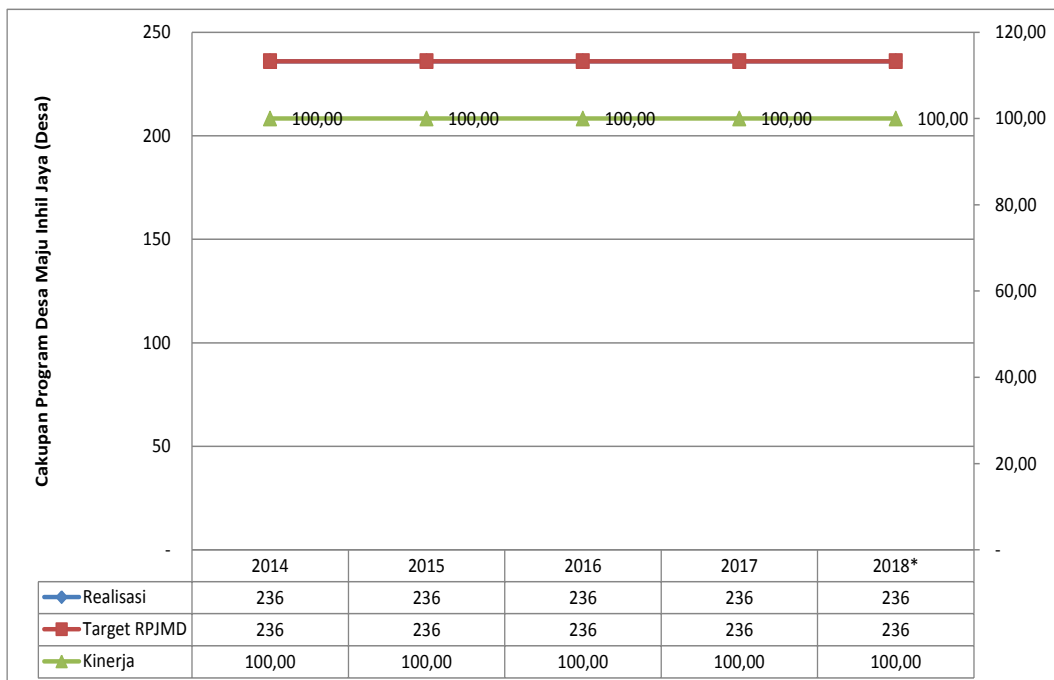
### 2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Layanan urusan wajib non dasar bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa dianalisis dari indikator (i) Cakupan program ‘desa Maju Inhil jaya’, (ii) Jumlah desa ‘maju’, (iii) PKK aktif dan (iv) Posyandu aktif.

#### a. Cakupan Program “Desa Maju Inhil Jaya”

Program Desa maju Inhil Jaya merupakan program inisiasi Pemerintah Indragiri Hilir untuk mensiasati permasalahan pembangunan infrastruktur pedesaan di Indragiri Hilir yang dilaksanakan dengan konsep pemberdayaan Masyarakat. Program ini sebenarnya juga merupakan kelanjutan dari Program Desa Mandiri yang mulai dilaksanakan tahun 2006 di Indragiri Hilir. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa indikator cakupan program desa maju inhil jaya sebanyak desa dan kelurahan yang ada di indragiri Hilir yaitu sebanyak 236 desa/kelurahan. Realisasi

indikator cakupan desa maju inhil jaya mencakup semua desa kelurahan dengan realisasi kinerja sebesar 100% yang terkategori Sangat Tinggi. Setelah lebih dari 12 tahun berjalannya program ini di Indragiri Hilir, hampir sebagian infrastruktur pedesaan telah terbangun. Namun demikian perlu sadari bahwa dengan kondisi alam indragiri Hilir yang keras menjadikan umur ekonomis infrastruktur yang dibangun tidaklah terlalu lama sehingga program seperti ini masih tetap dibutuhkan masyarakat pedesaan. Program ini dipandang juga perlu pengembangan untuk porsi pengembang ekonomi masyarakat dengan mendorong industri di pedesaan.



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Inhil (2018 ) dan LKPJ Inhil (2013 - 2017)

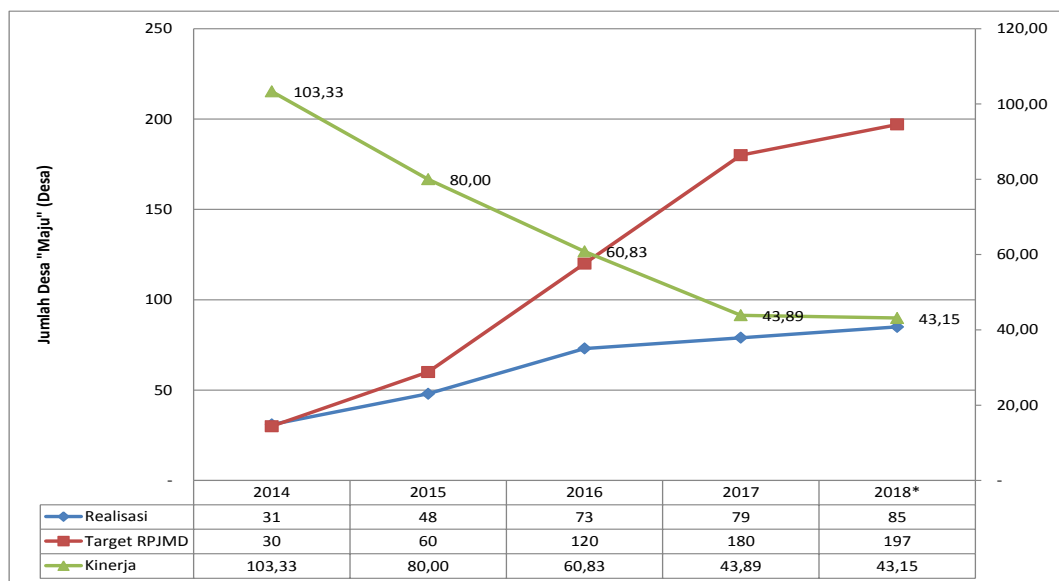
Gambar 2.106.

Kinerja Indikator Cakupan Program “Desa Maju Inhil Jaya”  
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

**b. Jumlah Desa “Maju”**

Sejalan dengan pelaksanaan program desa maju inhil maju dengan pendekatan pemberdayaan akan membawa desa kearah kemajuan dari semua aspek. Program Desa Mandiri yang mulai dilaksanakan tahun 2006

di Indragiri Hilir. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan bahwa indikator jumlah desa ‘maju’ meningkat dari 31 desa pada tahun 2014 menjadi 85 desa pada tahun 2018. Selama periode ini, realisasi indikator jumlah desa maju di Indragiri Hilir memiliki trend meningkat namun masih dibawah target yang ditetapkan. Realisasi kinerja indikator ini terus menurun sepanjang periode 2014 – 2018 yaitu dari 103,33% menurun menjadi 43,15% yang terkategori dari Sangat Tinggi menuju Sangat Rendah. Tidak tercapainya kinerja indikator ini karena belum tersedianya program yang handal untuk menghantar ke desa maju. Program yang ada baru mampu menghantar desa untuk penyediaan infrastruktur, belum ke desa maju. Oleh karena itu, program desa maju inhil jaya perlu dilakukan penguatan-penguatan sehingga bukan saja cakupan desa tetapi juga desa maju.



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Inhil (2018) dan LKPJ Inhil (2013 – 2017)

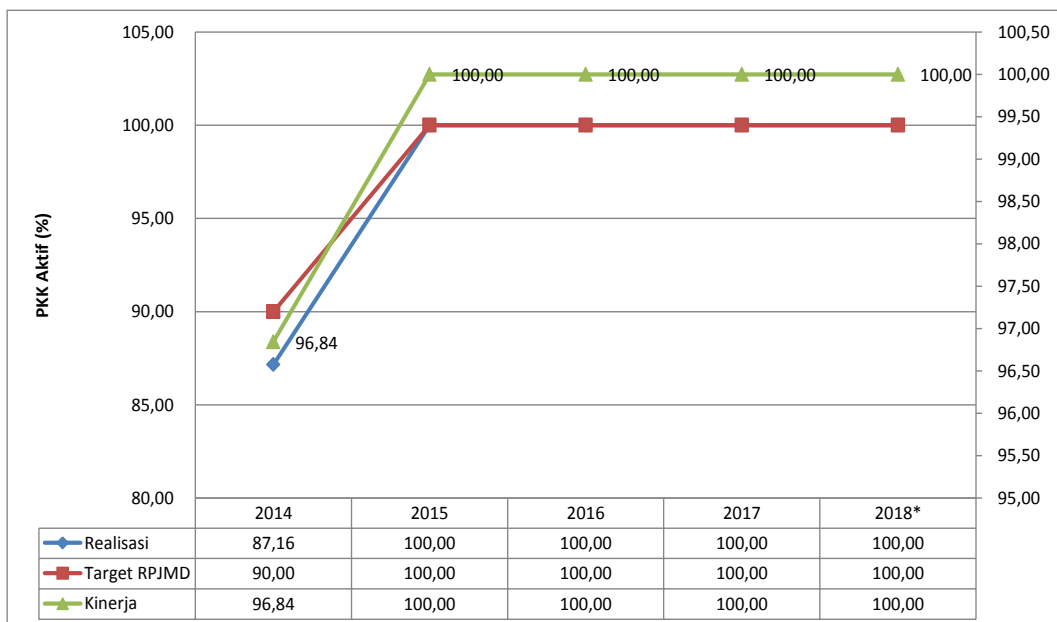
Gambar 2.107.  
Kinerja Indikator Jumlah Desa “Maju”  
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018

### c. PKK Aktif

Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan msyarakat yang tumbuh dari

bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa PKK aktif di Kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 87,16% pada tahun 2014 menjadi 100% pada tahun 2018. Indikator ini ditetapkan juga sebagai upaya pencapaian indikator jumlah desa maju di Indragiri Hilir.

Selama periode ini, realisasi indikator persentase pkk aktif relatif sama dengan target RPJMD kecuali untuk tahun 2014 yang realisasinya dibawah target. Selama periode 2014 - 2018, realisasi kinerja indikator persentase PKK aktif berkisar antara 95,845 - 100% dan terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian kinerja indikator ini Sangat Tinggi, upaya-upaya peningkatan kualitas kegiatan PKK aktif perlu dilakukan sehingga akan mampu mendorong pencapaian indikator Desa Maju.



Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

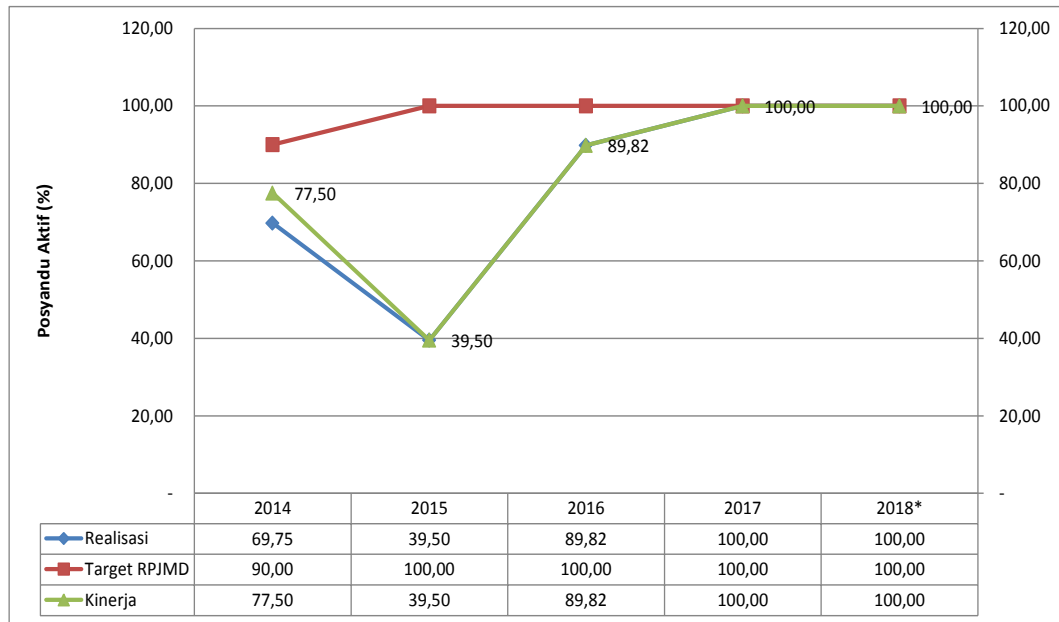
Gambar 2.108.  
Kinerja Indikator PKK Aktif di Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2014 - 2018

**d. Posyandu Aktif**

Pos Pelayanan Keluarga berencana - Kesehatan Terpadu (Posyandu) adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Tujuan posyandu antara lain (i) Menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, (ii) Membudayakan NKBS, (iii) Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera dan (iv) Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Mengingat pentingnya peran Posyandu yang aktif maka dalam Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa indikator posyandu aktif terus meningkat yaitu dari 90% pada tahun 2014 menjadi 100 pada tahun 2018.

Selama periode 2014 - 2018, realisasi capaian indikator posyandu aktif Indragiri Hilir memiliki trend meningkat dan mulai tahun 2017 sudah sesuai target RPJMD. Selama periode 2014 - 2016, realisasi kinerja sebesar 39,50% - 89,82% yang terkategori Sangat Rendah - Tinggi. Pada tahun 2017, realisasi indikator ini mencapai 100% dan tahun 2018 diperkirakan juga 100% yang capaiannya terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian indikator dan kinerjanya sangat tinggi namun upaya meningkatkan kualitas kegiatan posyandu perlu dilakukan sehingga tujuan sebenar posyandu lebih tercapai.





Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

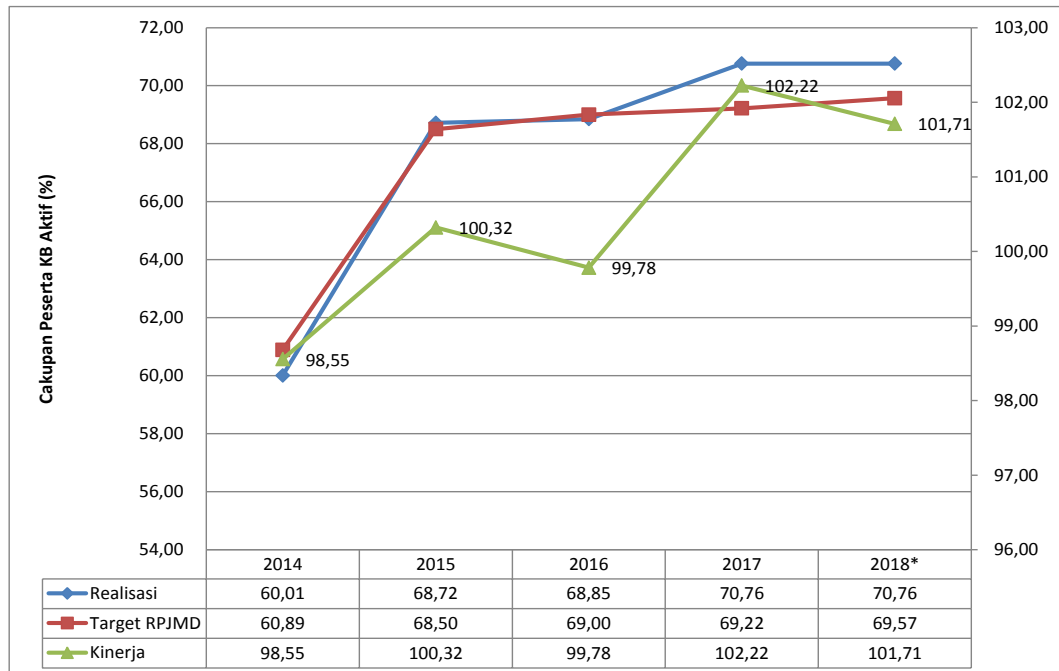
Gambar 2.109.  
Kinerja Indikator Posyandu Aktif  
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018

### 2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Layanan urusan wajib non dasar bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dianalisis dari indikator (i) Cakupan peserta KB aktif, (ii) Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB Mandiri, dan (iii) Ratio PPKBD satu petugas disetiap desa/kelurahan.

#### a. Cakupan Peserta KB Aktif

Pengertian program keluarga Berencana menurut UU No. 10 Tahun 1992 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga sejahtera adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Oleh karena pentingnya KB maka dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan Indikator cakupan peserta KB aktif yang terus meningkat dari 60,89% pada tahun 2014 menjadi 69,57% pada tahun 2018.



Sumber : Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak Inhil (2018)

Gambar 2.110.  
Kinerja Indikator Cakupan Peserta KB Aktif  
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018

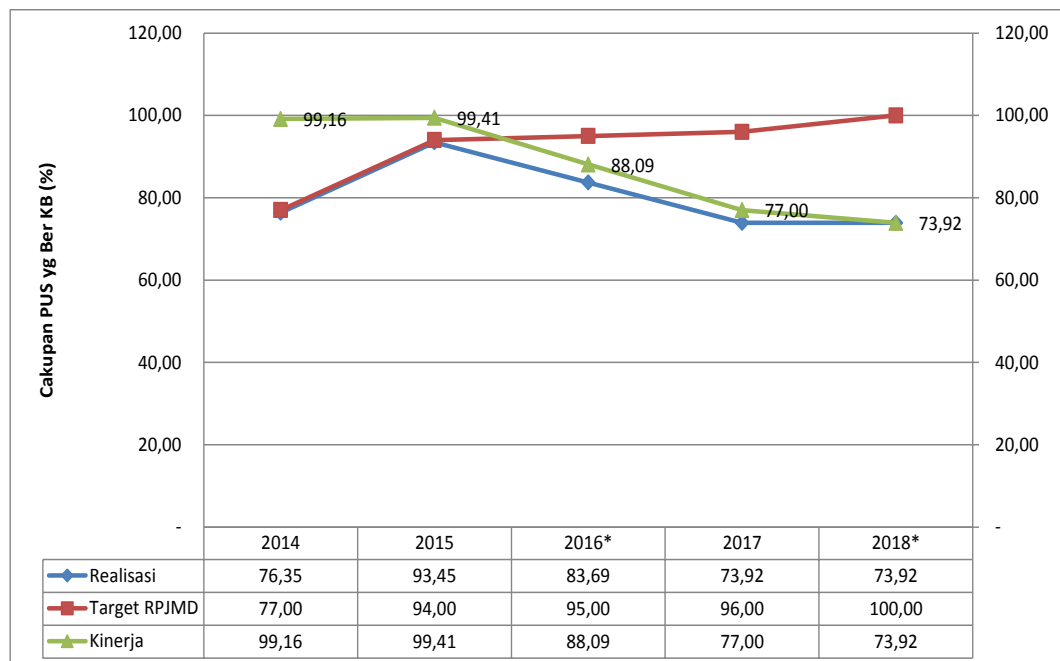
Selama periode 2014 - 2018, realisasi capaian indikator cakupan peserta KB aktif di Indragiri Hilir berfluktuatif meningkat dan relatif sesuai target. Pada tahun 2014 - 2018, capaian indikator berkisar antara 60,01% - 70,76% dengan realiasi kinerja berkisar antara 98,55% - 102,22% yang terkategori Sangat Tinggi. Meski kinerja indikator ini terkategori Sangat Tinggi, namun upaya meningkatkan cakupan peserta KB aktif di Indragiri Hilir perlu terus dilanjutkan agar tujuan keluarga berencana dapat terus tercapai.

#### b. Cakupan Peserta KB Anggota UPPKS Yang Ber KB

Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, baik pasangan usia subur yang sudah ber KB maupun yang belum ber KB dalam rangka meningkatkan tahapan

kesejahteraan dan memantapkan. Tujuan UPPKS adalah (i) mengajak keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktif, (ii) mensosialisasikan pengelolaan keuangan keluarga, (iii) meningkatkan ketahanan dan kemandirian keluarga dan (iv) mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan indikator cakupan peserta PUS KB anggota UPPKS yang ber KB terus meningkat yaitu dari 77% pada tahun 2014 menjai 100% pada tahun 2018. Selama periode 2014 - 2018, realisasi indikator ini mempunyai trend berfluktuatif menurun dan dibawah target RPJMD. Selama periode ini, realisasi kinerja indikator cakupan peserta PUS KB anggota UPPKS yang ber KB menurun dari 99,16% yang terkategori Sangat Tinggi menjadi 73,92 yang terkategori Tinggi. Upaya untuk terus meningkat cakupan peserta PUS KB anggota UPPKS yang ber KB perlu terus ditingkat agar pencapaian desa maju dapat diwujudkan.



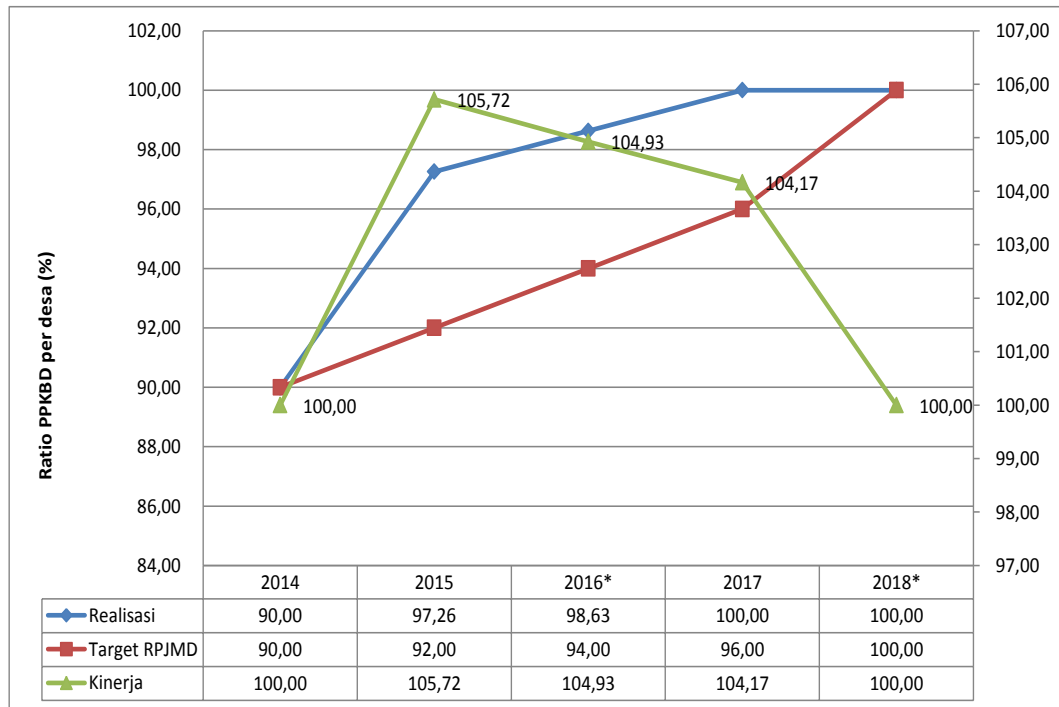
Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.111.  
Kinerja Indikator PUS Peserta kb Anggota UPPKS Yang Ber KB  
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

**c. Ratio PPKBD Per Desa/Kelurahan**

Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah seseorang atau beberapa kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB ditingkat Desa/Kelurahan. Peran dan fungsi PPKBD adalah (i) Kepengurusan, (ii) Penyuluhan, motivasi dan konseling, (iii) pelayanan ulang/rujukan, (iv) pendataan dan pencatatan, (v) pertemuan rutin, (vi) kegiatan program KB dan (vii) kegiatan mandiri. Dalam rangka mensukseskan program KB sekaligus mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dilapangan maka memberadayaan PPKBD per desa/kelurahan penting untuk dilakukan. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan indikator ratio PPKBD satu petugas disetiap desa/kelurahan terus meningkat dari 92% pada tahun 2014 menjadi 100% pada tahun 2018.

Selama periode 2014 - 2018, realisasi kinerja indikator ratio PPKBD satu petugas disetiap desa/kelurahan memiliki trend yang meningkat dan sama dan/atau diatas target yang ditetapkan dalam RPJMD. Selama periode ini, realisasi kinerja indikator ini berkisar antara 100% - 105,72% yang terkategori Sangat Tinggi.



Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.112.

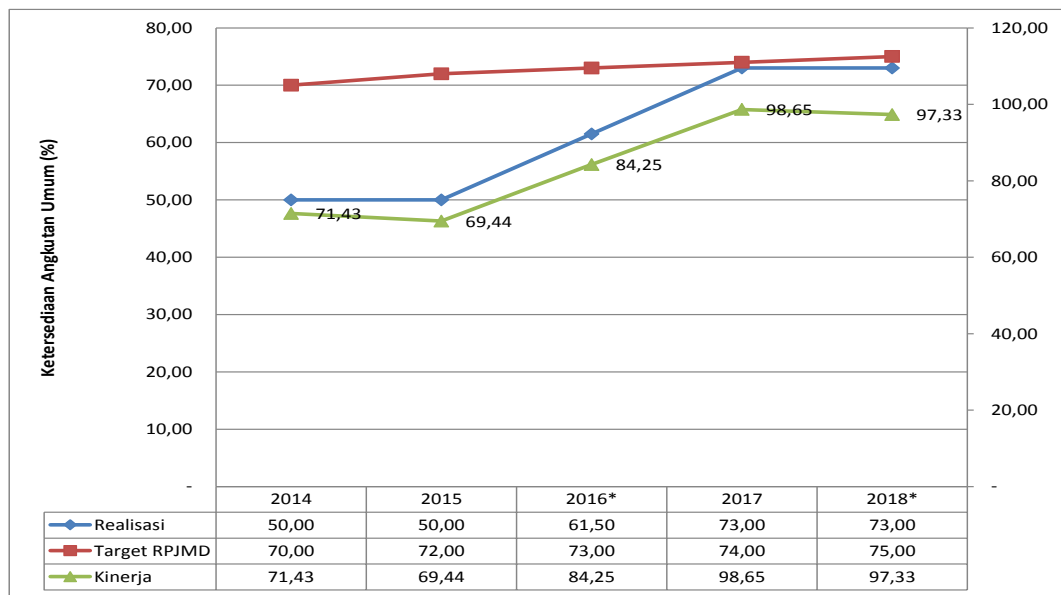
Kinerja Indikator Ratio PPKBD Satu Petugas Di Setiap Desa/kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018

### 2.3.2.9. Perhubungan

Layanan urusan wajib non dasar bidang Perhubungan dianalisis dari indikator (i) Tersedianya angkutan umum yang melayani trayek yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota, (ii) Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan pada jalan kabupaten/kota, dan (iii) Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.

**a. Angkutan Umum**

Angkutan Umum atau transportasi umum adalah sebuah layanan angkutan penumpang yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan indikator tersedianya angkutan umum yang melayani trayek yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota terus meningkat dari 70% pada tahun 2014 menjadi 75% pada tahun 2018.



Sumber : Dinas Perhubungan Inhil (2018) dan LKPJ Inhil (2013 – 2017)

Gambar 2.113.

Kinerja Indikator Tersedianya Angkutan Umum Yang Melayani Wilayah Yang telah tersedia Jaringan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018

Selama periode 2014 – 2018, realisasi indikator tersedianya angkutan umum yang melayani trayek yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota terus meningkat meski masih dibawah target RPJMD. Selama periode ini, realisasi kinerja indikator ini terus meningkat dari 50% pada tahun 2014 menjadi 61,50% pada tahun 2016 dan diperkirakan menjadi 73% pada tahun 2018. Selama periode 2014 – 2016, realisasi kinerja berkisar antara 71,43% - 84,25% yang terkategori Sedang – Tinggi. Pada periode 2017 – 2018, realisasi kinerja meningkat

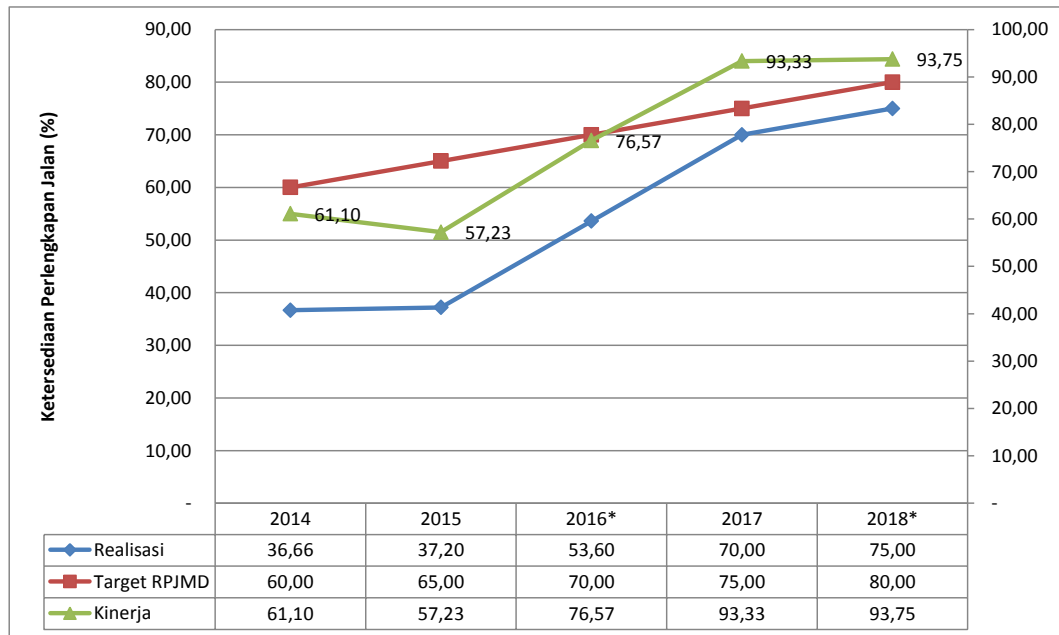
menjadi 97,33% - 98,65% yang terkategori Sangat Tinggi. Upaya untuk terus meningkatkan tersedianya angkutan umum yang melayani trayek yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota harus terus ditingkatkan sebagai wujud pembangunan yang berkeadilan di Indragiri Hilir.

#### **b. Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Penerangan Jalan Umum**

Menurut peraturan pemerintah No. 26 tahun 1985 tentang jalan, pada Pasal 15 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perlengkapan jalan ialah rambu-rambu lalu lintas dan marka serta yang tidak berkaitan langsung dengan pemakai jalan seperti rambu, marka, patok KM, dan pagar pengaman (*guard rail*) serta penghalang lalu lintas (*traffic barrier*). Penerangan jalan umum (PJU) adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda, dan pengendara kendaraan dapat melihat dengan lebih jelas jalan/medan yang akan dilalui malam hari sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari pengguna jalan dari kegiatan/aksi kriminal.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan indikator tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan pada jalan kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 60% pada tahun 2014 menjadi 80% pada tahun 2018. Selama periode ini, realisasi indikator tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan pada jalan kabupaten Indragiri Hilir berfluktuatif meningkat dan dibawah target RPJMD, yaitu dari 36,66% pada tahun 2014 menjadi 75% pada tahun 2018. Pada tahun 2014 - 2016, realisasi kinerja indikator ini berkisar antara 61,10% - 76,57% yang terkategori Rendah hingga Tinggi. Pada tahun 2017 - 2018, realisasi kinerja sebesar 93,33% - 93,75% dan terkategori Sangat Tinggi. Upaya untuk terus meningkatkan tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan pada jalan

kabupaten/kota perlu untuk terus dilakukan agra kenyamanan dan keselamatan dijalan Kabupaten Indragiri Hilir meningkat.



Sumber : Dinas Perhubungan Inhil (2018) dan LKPJ Inhil (2013 - 2017)

Gambar 2.114.

Kinerja Indikator Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Penerangan Jalan Umum pada Jalan Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

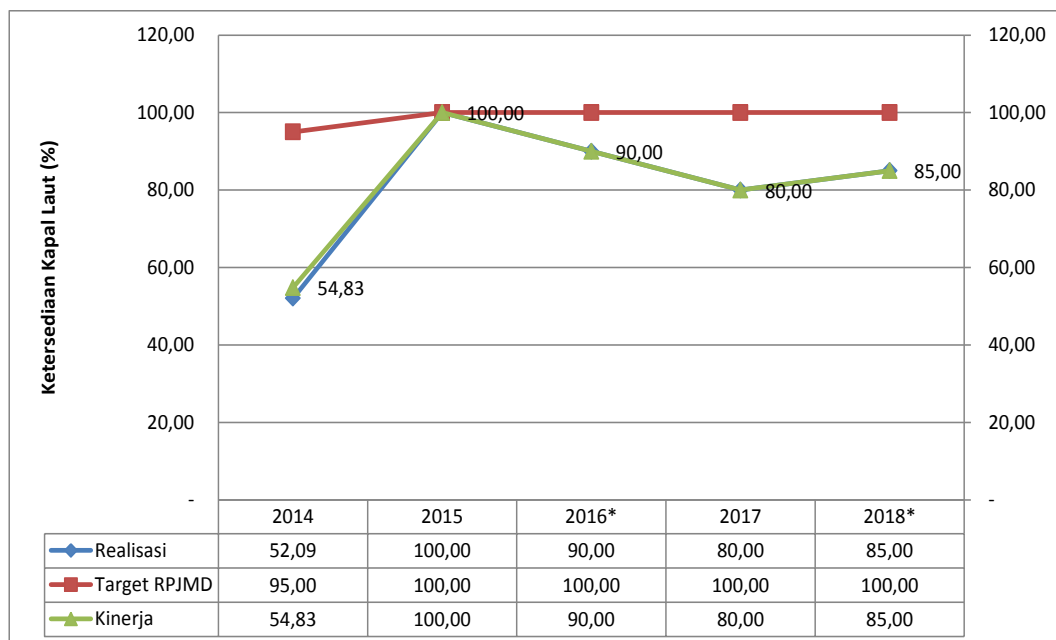
**c. Kapal laut**

Indragiri Hilir yang sebagian besar wilayahnya perairan dan laut maka indikator tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan menjadi sangat penting. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan indikator ini terus meningkat yaitu dari 95% pada tahun 2014 menjadi 100% pada tahun 2018.

Selama periode 2014 - 2018, realisasi indikator tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang



telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan memiliki trend berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2014, capaian indikator ini sebesar 52,09% dengan realisasi kinerja sebesar 54,83% yang terkategori Rendah. Pada tahun 2015, capaian indikator ini meningkat menjadi 100% dan selanjutnya mneurun hingga 85% pada taun 2018 dengan realisais kinerja berkisar antara 80% - 100% yang terkategori Tinggi - Sangat Tinggi. Upaya terus meningkatkan tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan harus terus ditingkatkan dalam upaya membuka isolasi daerah.



Sumber : Dinas Perhubungan Inhil (2018) dan LKPJ Inhil (2013 - 2017)

Gambar 2.115.

Kinerja Indikator Tersedianya Kapal Laut Yang Beroperasi Pada Lintas Atau Trayek Dalam Kabupaten di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

### 2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

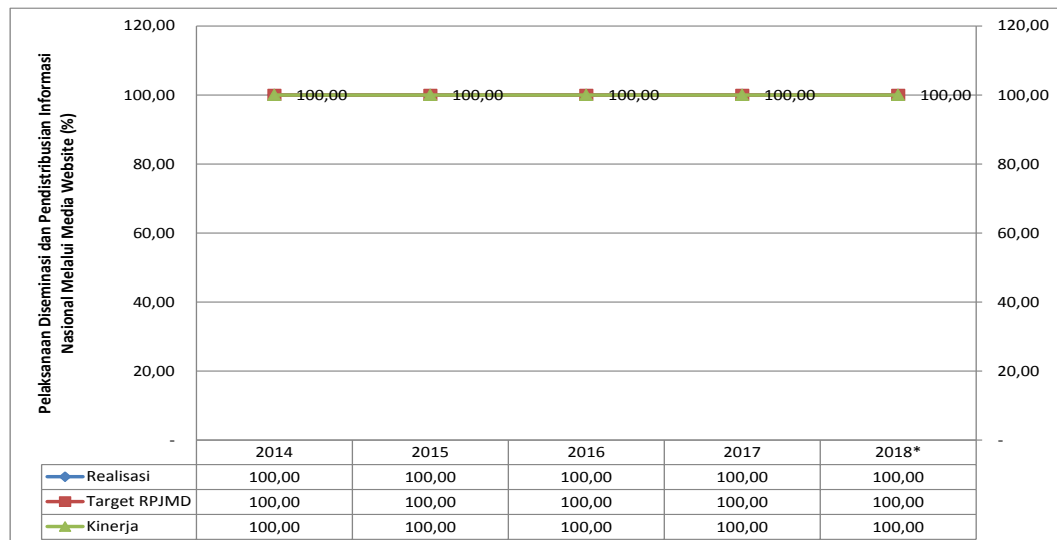
Layanan urusan wajib non dasar bidang Komunikasi dan Informatika dianalisis dari indikator (i) pelaksanaan diseminasi dan

distribusi informasi nasional melalui website (media online) dan (ii) Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan.

**a. Diseminasi dan Distribusi Informasi**

Diseminasi (*dissmenination*) adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Sedangkan distribusi nformasi adalah proses dimana informasi yang telah disampaikan pada orang yang tepat dan pada waktu yang diinginkan. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan indikator pelaksanaan dan pendistribusian informasi nasional melalui web di Indragiri Hilir ditargetkan terlaksana 100%

Selama periode 2014 – 2018, realisasi indikator pelaksanaan dan pendistribusian informasi nasional melalui web terlaksana 100% sehingga realisasi kinerjanya juga sebesar 100% yang terkategori Sangat Tinggi.



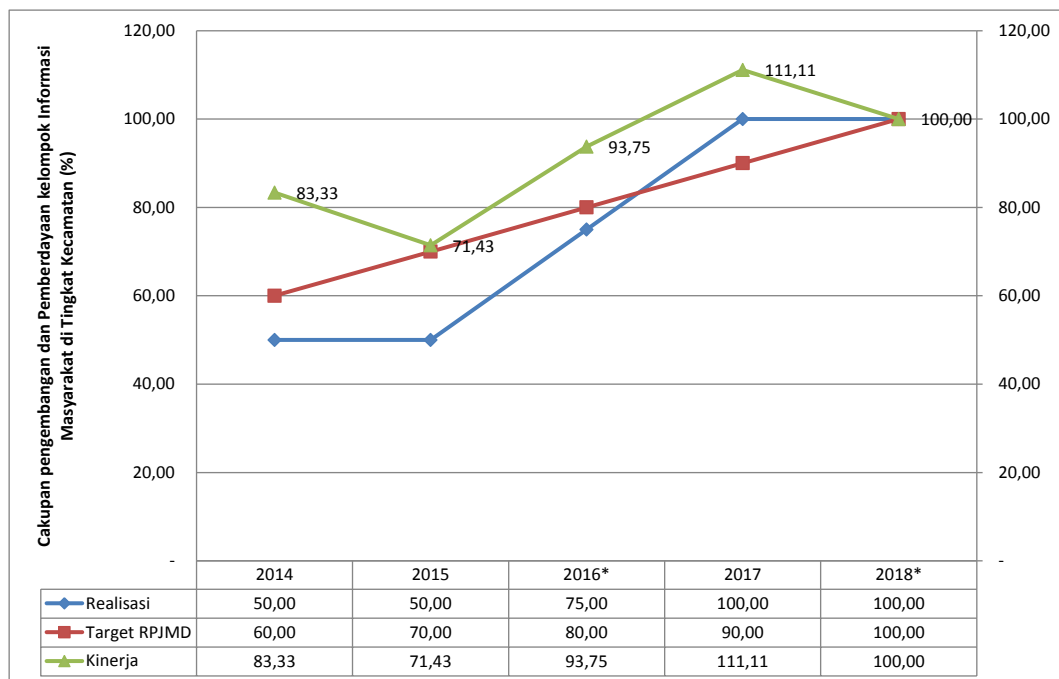
Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Inhil (2018 ) dan LKPJ Inhil (2013 – 2017)

Gambar 2.116.  
Kinerja Indikator Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Website di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018

**b. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi masyarakat**

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan sebagai indikator penting yang ditargetkan terlaksana sebesar 60% pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 100% pada tahun 2018.

Selama periode 2014 - 2018, realisasi indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan memiliki trend meningkat. Pada tahun 2014 - 2016, realisasi indikator ini dibawah target dengan realisasi kinerja berkisar antara 71,43% - 91,75% yang terkategori Sedang - Sangat Tinggi. Pada periode 2017 - 2018, realisasi indikator ini diatas target RPJMD dengan realisasi kinerja sebesar 100% - 111% yang terkategori Sangat Tinggi.



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Inhil (2018) dan LKPJ Inhil (2013 - 2017)

Gambar 2.117.

Kinerja Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan di Kabupaten di Indragiri Hilir

Tahun 2014 – 2018

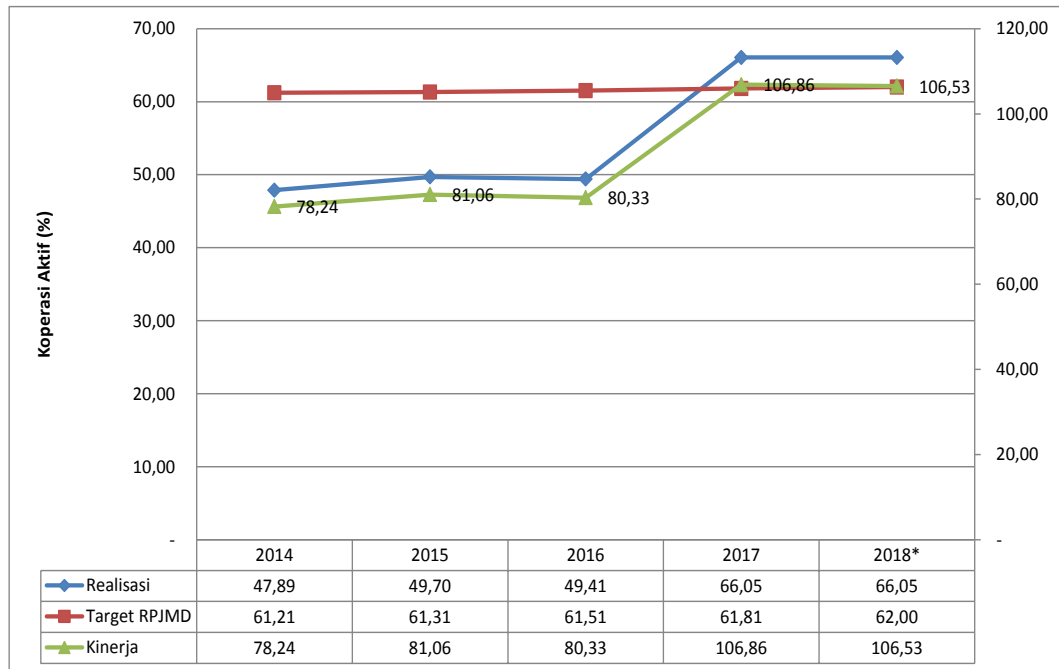
**2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Layanan urusan wajib non dasar bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dianalisis dari indikator (i) Koperasi Aktif dan (ii) Usaha Mikro dan Kecil.

**a. Koperasi Aktif**

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 25/Per/M.KUKN/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi menyatakan bahwa koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut mengadakan rapat RAT (Rapat Tahunan Anggota) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota). Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan indikator koperasi aktif sebagai indikator yang terus meningkat persentasenya di Indragiri Hilir. Pada tahun 2014, persentase koperasi aktif ditargetkan sebesar 61,21%, meningkat menjadi 62% pada tahun 2018.

Selama periode 2014 -2016, realisasi indikator persentase koperasi aktif dibawah target RPJMD dengan realisasi kinerja sebesar 78,24% - 80,33% yang terkategori Tinggi. Pada periode 2017 – 2018, realisasi indikator ini sudah diatas terget RPJMD dengan realisasi kinerja sebesar 106,53% - 103,86% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada periode pembangunan berikutnya diupayakan untuk mendorong semua koperasi di Indragiri Hilir menjadi koperasi aktif.

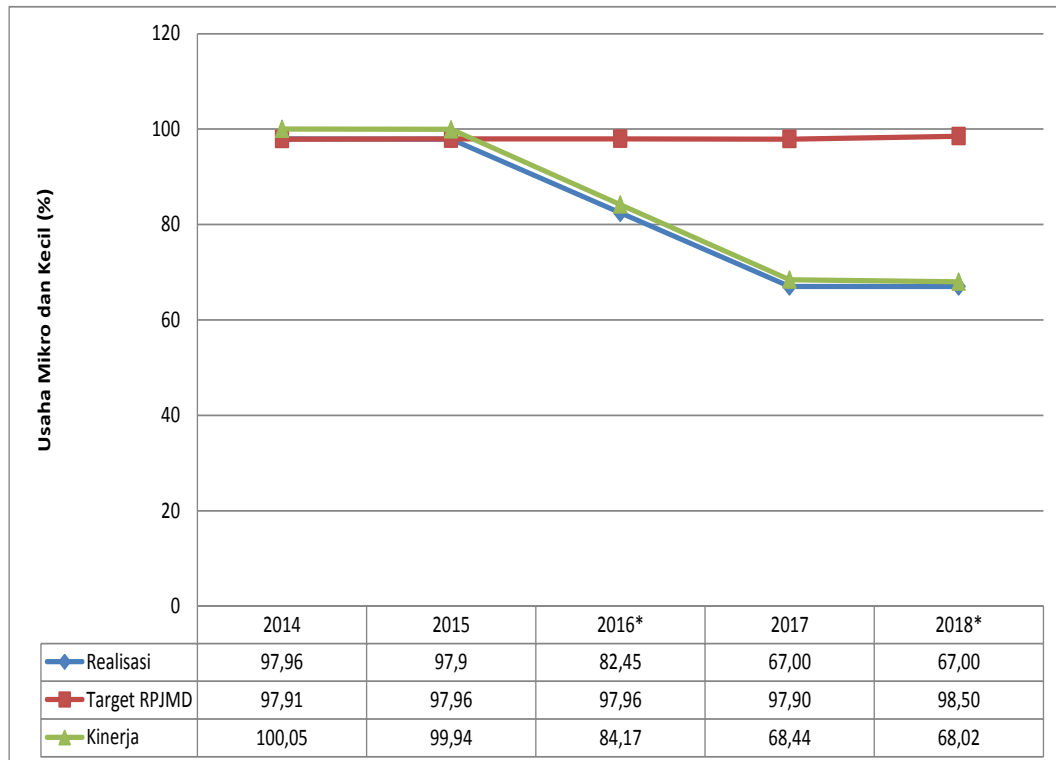


Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.118.  
Kinerja Koperasi Aktif di Kabupaten di Indragiri Hilir  
Tahun 2014 - 2018

**b. Usaha Mikro dan Kecil**

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang dengan kriteria aset maksimal Rp 50 juta dan kriteria omset maksimal Rp 300 juta. Usaha kecil adalah yang mempunyai jumlah tenaga kerja kurang dari 50 orang, memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 200 juta dan omset maksimal Rp 1 miliar. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan indikator persentase Usaha Mikro dan Kecil penting dalam pembangunan di Indragiri Hilir. Pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 97,91% meningkat menjadi 98,50% pada tahun 2018.



Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.119.  
Kinerja Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten di Indragiri Hilir  
Tahun 2014 - 2018

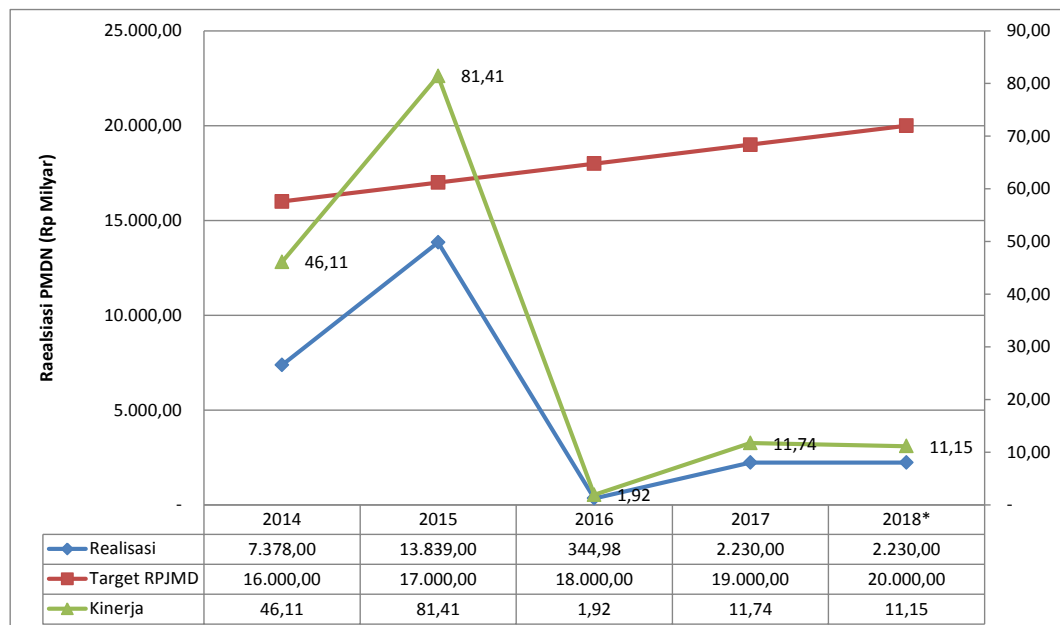
Selama periode 2014 - 2015, realisasi indikator persentase usaha mikro dan kecil lebih tinggi dan/atau sama dengan target RPJMD sehingga realisasi kinerja berkisar antara 99,94% - 100,05% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2016 hingga 2018, realisasi indikator ini cenderung menurun yaitu dari 82,45% pada tahun 2016 menjadi 67% pada tahun 2018 sehingga realisasi kinerja sebesar 68,02% - 84,17% yang terkategori Sedang - Tinggi. Secara keseluruhan, rata-rata realisasi kinerja indikator persentase usaha mikro dan kecil sebesar 84,12% yang terkategori Tinggi. Meski persentase usaha mikro dan kecil capaian kinerjanya terkategori tinggi namun upaya pembinaan UMK menjadi usaha yang lebih berdaya saing perlu terus dilakukan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir.

**2.3.2.12. Penanaman Modal**

Layanan urusan wajib non dasar bidang Penanaman Modal dianalisis dari indikator (i) Realisasi PMDN dan (ii) Realisasi PMA.

**a. Realisasi PMDN**

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan menggunakan modal dalam negeri. Untuk penanaman modal dalam negeri tidak ada ketentuan mengenai persyaratan nilai investasi. memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 200 juta dan omset maksimal Rp 1 miliar. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan indikator penanaman modal dalam negeri terus meningkat yaitu dari Rp 16.000 (milyar) pada tahun 2014 menjadi Rp 20.000 (milyar).



Sumber : Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Inhil (2018 ) dan LKPJ Inhil (2013 - 2017)

Gambar 2.120.  
Kinerja Indikator Realisasi PMDN di Kabupaten di Indragiri Hilir  
Tahun 2014 - 2018

Selama periode 2014 - 2015, realisasi indikator penanaman modal dalam negeri relatif cukup tinggi meski masih dibawah target RPJMD yaitu Rp. 7.378 milyar dan Rp 13.839 milyar dengan realisasi kinerja sebesar 46,11% dan 81,41% yang masing-masing terkategori Sangat rendah dan Tinggi. Pada tahun 2015 hingga 2017, realisasi indikator ini menurun tajam dengan realisasi kinerja sebesar 1,92% - 11,74% yang terkategori Sangat Rendah. Kondisi ini terjadi karena bencana kebakaran hutan dan lahan yang melanda Riau khususnya indragiri Hilir tahun 2015 - 2016 dan disertai melemahnya perkenomian dunia sehingga banyak investor yang melakukan 'wait and see". Upaya untuk terus menarik investasi PMDN harus terus dilakukan sehingga akan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Indragiri Hilir.

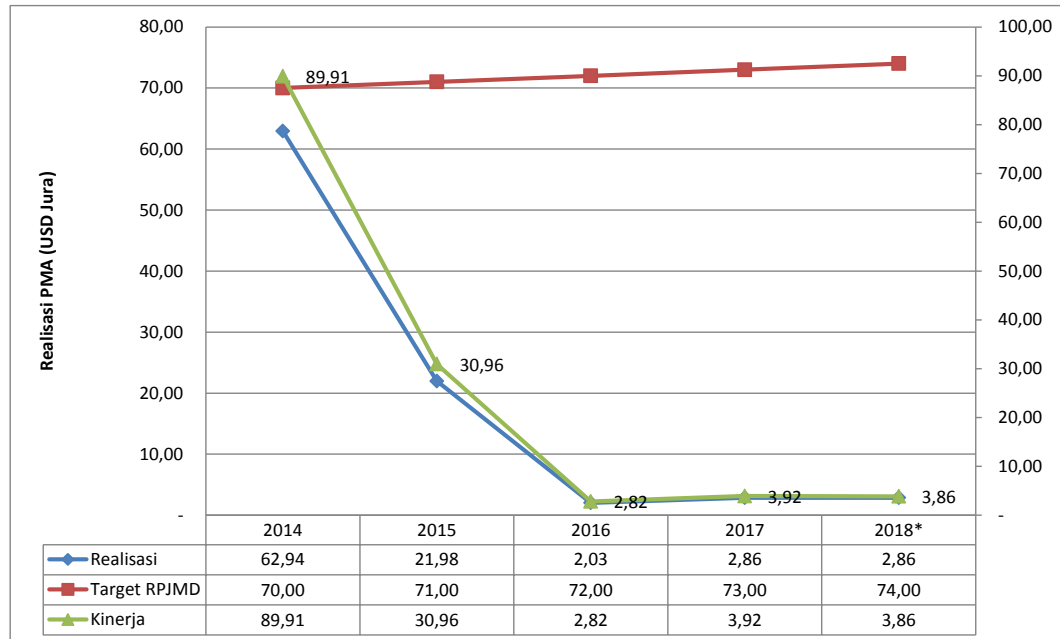
#### **b. Realisasi PMA**

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun sebagian dengan penanaman modal dalam negeri. Total nilai investasi lebih besar dari Rp 10 milyar diluar tanah dan bangunan. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan indikator realisasi PMA meningkat dari USD 70 juta pada tahun 2014 menjadi USD 74 juta pada tahun 2018.

Hampir sejalan dengan PMDN, realisasi PMA hanya relatif tinggi pada tahun 2014 saja yaitu sebesar USD 62,94 juta dengan realisasi kinerja sebesar 89,91% yang terkategori Tinggi. Pada tahun 2015 dan selanjutnya jumlah realisasi PMA terjenu bebas seiring dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang disertai dengan kelembaban ekonomi dunia. Selama periode 2015 - 2018, realisasi PMA menurun dari USD 21,98 juta pada tahun 2015 menjadi USD 2,86 juta pada tahun 2017. Realisasi kinerja indikator ini selama periode ini berkisar antara 2,82% - 30,96% yang



terkategori Sangat Rendah. Upaya untuk terus meningkatkan PMA perlu terus dilakukan sehingga akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir.



Sumber : Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Inhil (2018) dan LKPJ Inhil (2013 - 2017)

Gambar 2.121.  
Kinerja Indikator PMA di Kabupaten di Indragiri Hilir  
Tahun 2014 - 2018

### 2.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Layanan urusan wajib non dasar bidang Kepemudaan dan Olahraga seharusnya diukur dengan indikator persentase organisasi pemuda yang aktif, persentase wirausaha muda, cakupan pembinaan olahraga, cakupan pelatih yang bersertifikat, cakupan pembinaan atlet muda, jumlah atlet berprestasi dan jumlah prestasi olahraga. Namun seluruh indikator ini belum tersedia datanya, hanya pada tahun 2017 tercatat beberapa indikator yang tersedia.

Pada tahun 2017, jumlah prestasi olahraga Indragiri Hilir sebanyak 6 prestasi yaitu (i) Juara III bolavoli putri pada pejuaraan piala Gubernur Riau, (ii) Juara 1 futsal Putra pada kejuaraan tingkat pelajar se Provinsi

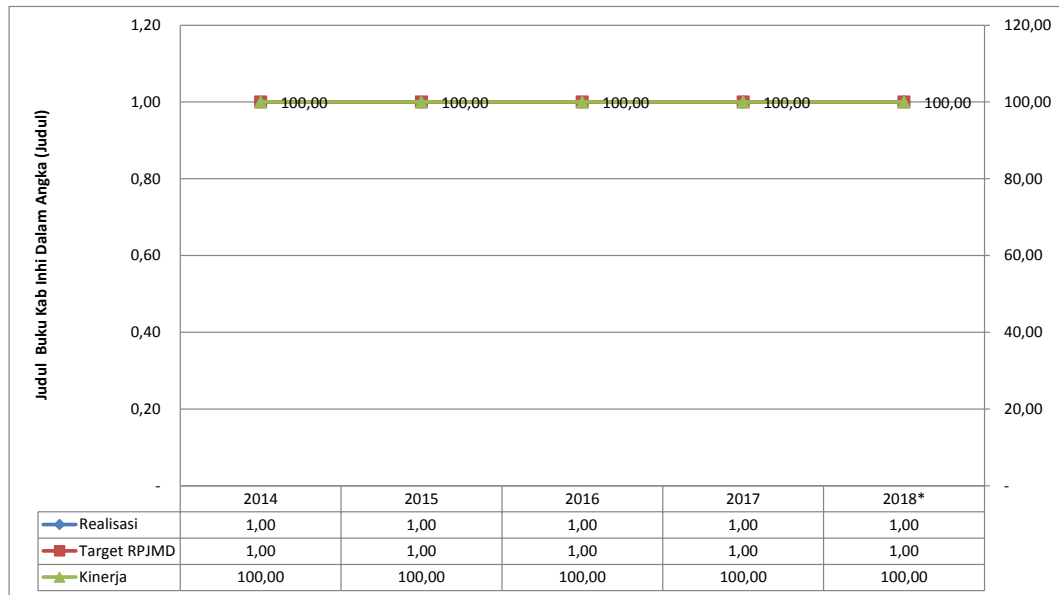
Riau, (iii) juara 1 Futsal Putra pada kejuaraan tingkat mahasiswa se Provinsi Riau, (iv) Juara umum pada kejuaraan Lemkari se Sumatera, (v) Juara III lomba presenting putri pada perlombaan English Festival tingkat Provinsi dan (vi) Juara III Singging Contest Putra pada perlombaan English festival tingkat Provinsi. Secara umum kondisinya lapangan, persentase organisasi yang aktif, cakupan pembinaan olahraga cakupan pelatih yang bersertifikat persentase wirausaha muda, cakupan pembinaan atlet muda dan jumlah atlet berprestasi di Indragiri Hilir relatif masih minim. Upaya untuk meningkatkan capaian indikator kepemudaan dan olahraga diatas perlu menjadi perhatian dalam pembangunan kepemudaan dan olahraga indragiri Hilir ke depan.

#### **2.3.2.14. Statistik**

Layanan urusan wajib non dasar bidang Statistik diwakili oleh indikator (i) Buku “Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka” dan (ii) Kecamatan Dalam Angka.

##### **a. Buku Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka**

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan buku Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka menjadi indikator dalam bidang statistik. Selama periode 2014 - 2018, Buku Indragiri Hilir dalam angka selalu terbit dalam edisi cetak dan online sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dengan cepat dan murah. Setiap tahunnya, BPS bekerjasama pemerintah indragiri hilir juga mempublikasikan Statistik Daerah, Indikator kesejahteraan Rakyat Kabupaten Indragiri Hilir dan PDRB Indragiri Hilir serta publikasi-publikasi lainnya.



Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

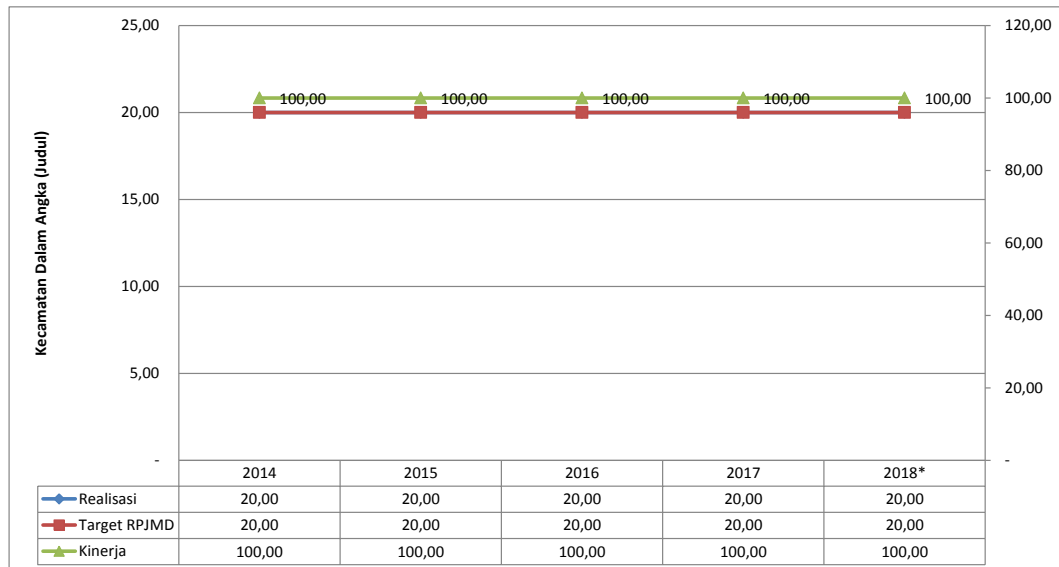
**Gambar 2.122.**  
Kinerja Indikator Buku Indragiri Hilir Dalam Angka  
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan indikator Buku Indragiri Hilir Dalam Angka sebagai indikator dalam bidang Statistik. Selama periode ini, realisasi indikator buku Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100% yang terkategori Sangat Tinggi. Agar evaluasi RPJMD dapat dilakukan dengan baik setiap tahunnya, perlu dilakukan kerjasama dengan BPS untuk pengukuran beberapa indikator penting sesuai dengan Permendagri No. 86 tahun 2017.

**b. Kecamatan Dalam Angka**

Sejalan dengan penerbitan Buku Indragiri Hilir Dalam Angka, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bekerjasama dengan BPS Indragiri hilir juga menerbitkan dan mempublikasikan buku Kecamatan dalam Angka untuk ke 20 kecamatan di Indragiri Hilir. Buku Kecamatan Dalam Angka ini diikuti dengan buku Statistik Daerah Kecamatan sebanyak 20 judul. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah

ditetapkan indikator penerbitan dan publikasi 20 judul buku kecamatan dalam angka sebagai indikator penting dalam bidang Statistik.



Sumber : LKPJ Inhil (2013 - 2017)

Gambar 2.123.

Kinerja Indikator Kecamatan Dalam Angka di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

Realisasi indikator penerbitan dan publikasi ke 20 buku kecamatan dalam angka terealisasi penuh sehingga realisasi kinerja 100% dan terkategori Sangat Tinggi. Kedepan, statistik tingkat kecamatan juga menyediakan data-data yang terkait dengan indikator yang diperlukan dalam evaluasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 86 tahun 2017.

**2.3.2.15. Persandian**

Persandian atau juga dikenal dengan sebutan kriptologi adalah ilmu atau seni yang mempelajari semua aspek tulisan rahasia. Bidang urusan persandian diukur menggunakan indikator persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah. Indikator ini relatif kurang digunakan dan tidak tersedia data yang dimaksud.

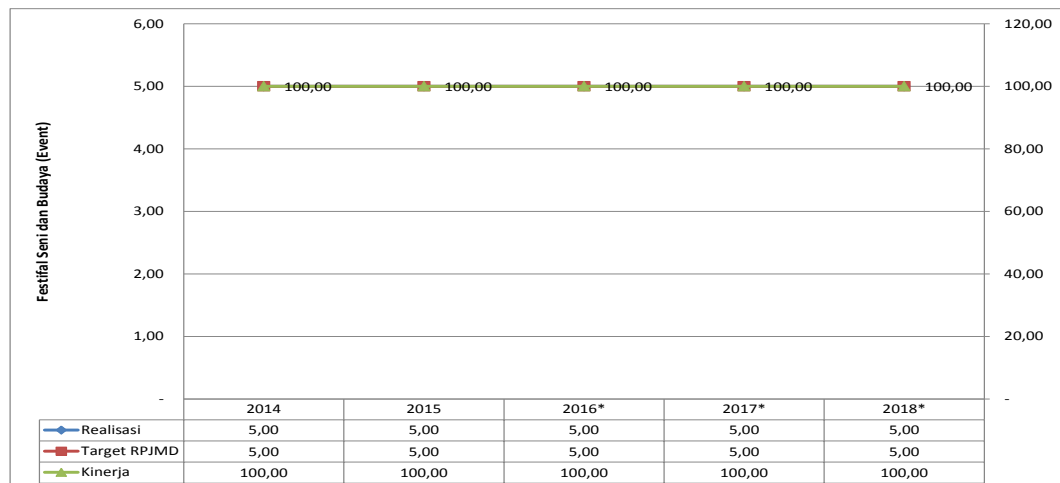
**2.3.2.16. Kebudayaan**

Layanan urusan wajib non dasar bidang Statistik diwakili oleh indikator (i) Penyelenggaraan festival seni dan budaya dan (ii) Sarana penyelenggaraan seni dan budaya.

**a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**

Setiap tahun, pemerintah Indragiri Hilir melaksanakan berbagai festival seni dan budaya seperti (i) festival bumi gemilang, (ii) festival berdah, (iii) penampilan sanggar seni tari Citra Sehati di Taman Mini Indonesia, (iv) lomba seni teater klasik dan (vi) lomba kagu bupati Singer, musik gebyar merdeka serta panggung hiburan rakyat Penyelenggaraan festival seni dan budaya ini menjadi indikator dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018.

Realisasi capaian indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya di Indragiri Hilir sesuai dengan target sehingga realisasi kinerjanya sebesar 100% yang terkategori Sangat Tinggi. Penyelenggaraan festival seni dan budaya indragiri Hilir perlu terus dilakukan secara berkala sehingga akan dapat menjadidaya tarik wisatawan datang ke Indragiri Hilir.



Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.124.  
Kinerja Indikator Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018

**b. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya**

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan indikator jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebagai indikator penting yang diukur setiap tahun tingkat pencapaian kerjanya. Selama periode 2014 – 2018, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Indragiri Hilir sebanyak dua unit dan realisasinya juga dua unit sehingga realisasi kerjanya 100% dan terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian realisasi kinerja indikator ini terkategori Sangat Tinggi namun pemanfaat sarana seni dan budaya untuk pertunjukan masih sangat terbatas. Oleh karena itu pembinaan terhadap seni dan budaya perlu ditingkatkan dan dipertunjukkan kepada masyarakat.



Sumber : LKPJ Inhil (2013 – 2017)

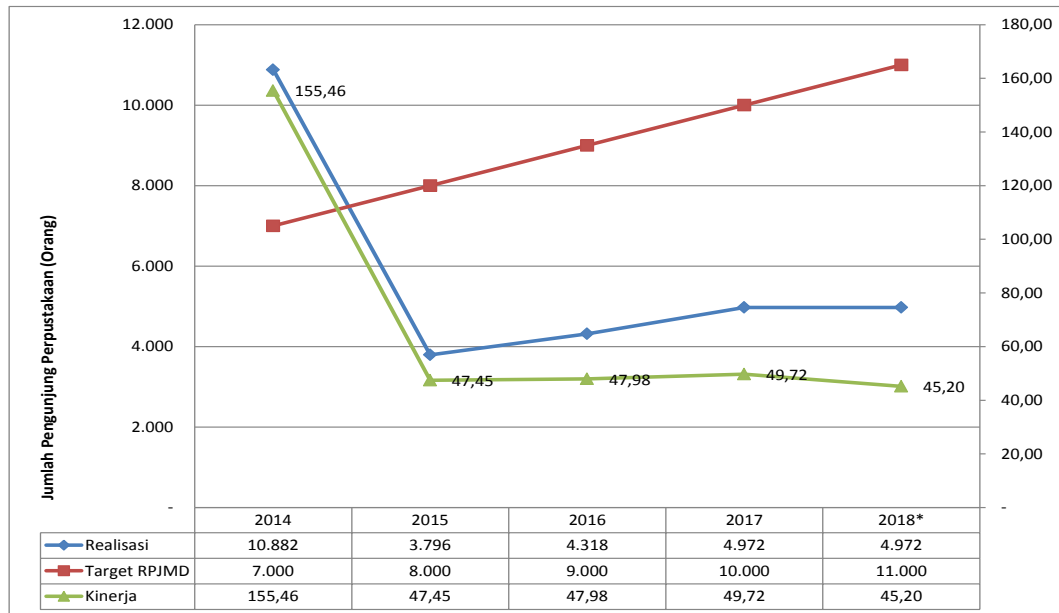
Gambar 2.125.  
Kinerja Indikator Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018

### **2.3.2.17. Perpustakaan**

Layanan urusan wajib non dasar bidang Statistik diwakili oleh indikator (i) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dan (ii) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan.

#### **a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan**

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan indikator jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Indragiri Hilir meningkat dari 7000 pengunjung pada tahun 2014 menjadi 11.000 pengunjung pada tahun 2018. Selama periode 2014 - 2018, realisasi indikator jumlah pengunjung perpustakaan cenderung menurun. Pada tahun 2014 tercatat jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 10.882 pengunjung, diatas target yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga realisasi kinerja sebesar 155,46% dan terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2015 - 2018, jumlah pengunjung menurun tajam menjadi 3.796 - 4.972 pengunjung pertahun dengan realisasi kinerja sebesar 45,20% - 47,98% yang terkategori Sangat Rendah. Menurun tajamnya pengunjung perpustakaan Indragiri Hilir dimungkinkan karena kurang menariknya koleksi buku yang tersedia disamping fasilitas yang terbatas. Pengembangan perpustakaan digital yang terkoneksi dengan perpustakaan lainnya adalah salah strategi yang dapat menarik minat pengunjung ke perpustakaan Indragiri Hilir.



Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

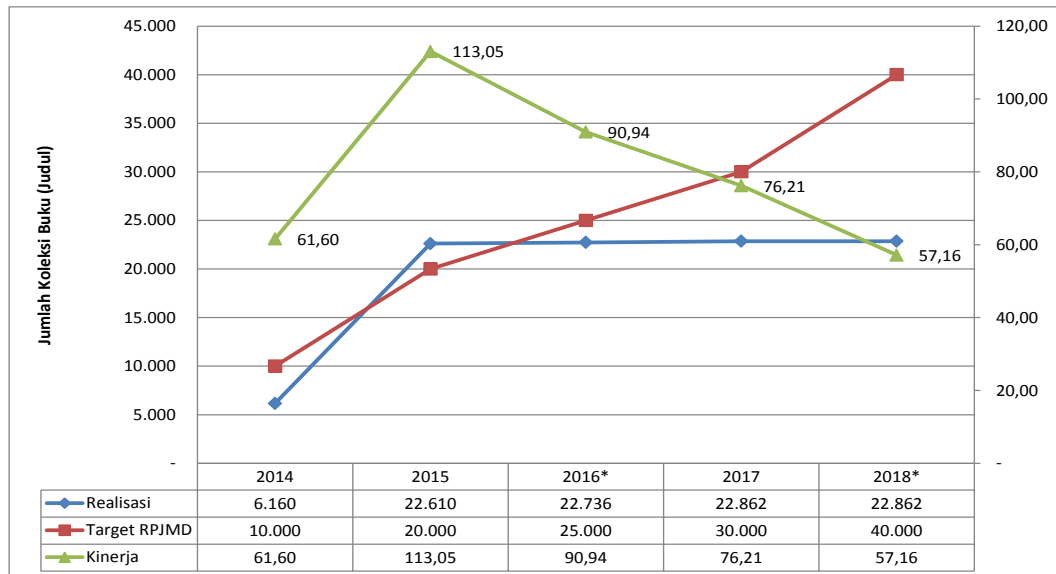
Gambar 2.126.  
Kinerja Indikator Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018

**b. Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan**

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan indikator jumlah buku yang tersedia di perpustakaan Indragiri Hilir meningkat dari 10.000 buku menjadi 40.000 buku. Selama periode 2014 – 2018, jumlah koleksi buku berjumlah 6.160 buku pada tahun 2014 meningkat menjadi 22.862 buku. Selama periode ini, telah terjadi kenaikan jumlah buku hampir 4 kali lipat dengan rata-rata pertumbuhan jumlah buku meningkat sebesar 29,99% per tahun. Meski peningkatan jumlah buku cukup tinggi, namun masih dibawah target yang ditetapkan kecuali pada tahun 2015 yang jumlahnya diatas target. Selama periode ini, realisasi kinerja indikator koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Indragiri Hilir berkisar antara 57,16% - 113,05% yang terkategori Rendah hingga Sangat Tinggi dengan rata-rata terkategori Tinggi. Meski capaian realisasi kinerja terkategori Tinggi namun jumlah pengunjung perpustakaan relatif sepi. Oleh karena itu upaya menarik minat



pengunjung melalui peningkatan pelayan seperti perpustakaan digital dan terkoneksi dengan perpustakaan lain perlu diupayakan.



Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.127.  
Kinerja Indikator Koleksi Buku Yang tersedia di Perpustakaan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018

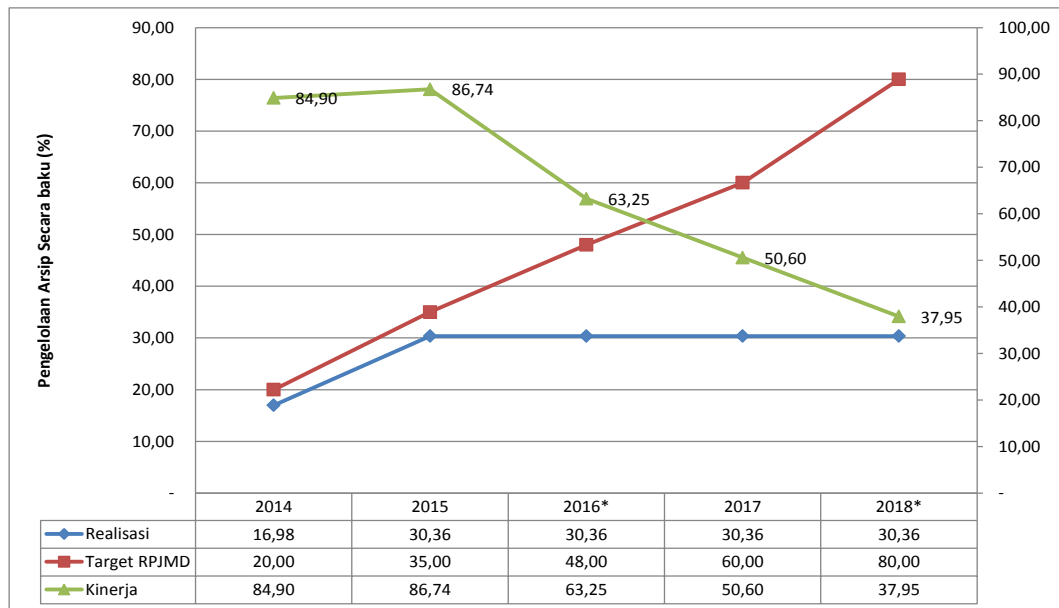
### 2.3.2.18. Kearsipan

Layanan urusan wajib non dasar bidang Statistik diwakili oleh indikator (i) Pengelolaan arsip secara baku dan (ii) Peningkatan SDM pengelola kearsipan.

#### a. Pengelolaan Arsip Secara Baku

Kearsipan adalah suatu proses penyimpanan arsip secara sistematis agar mudah ditemukan kembali, yang meliputi penciptaan (pembuatan dan penerimaan), penyimpanan (filling) dan penemuan kembali (finding), penyelamatan (pengamanan, pemeliharaan, dan perawatan), dan penyusutan arsip (pemindahan, penyerahan, dan pemusnahan). Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan indikator pengelolaan arsip secara baku meningkat dari 20% pada tahun 2014 menjadi 80% pada tahun 2018. Selama periode 2014 – 2018, realisasi

indikator ini berada dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga realisasi kinerjanya sebesar 37,95% - 86,74% yang terkategori Sangat Rendah hingga Tinggi dengan rata-rata kinerja terkategori Sedang. Upaya peningkatan realisasi kinerja indikator ini perlu terus dilakukan pada periode yang akan datang.

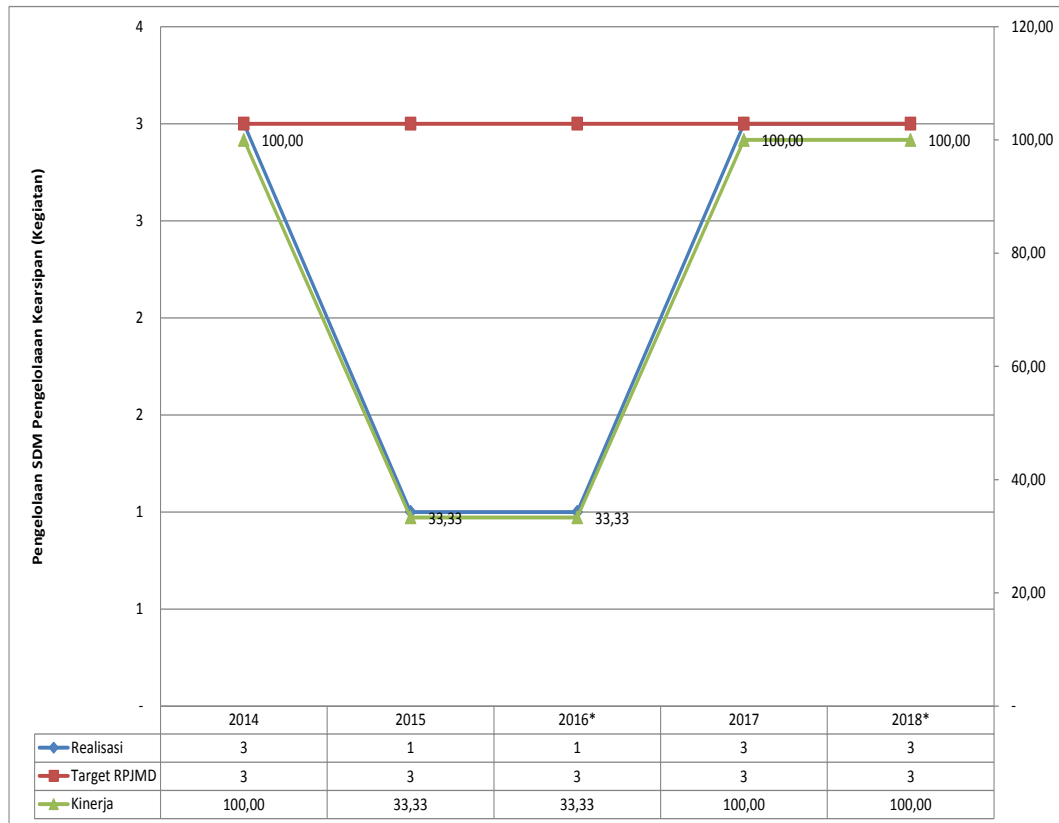


Sumber : LKPJ Inhil (2013 - 2017)

Gambar 2.128.  
Kinerja Indikator Pengelolaan Arsip Secara Baku  
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

#### b. Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan indikator peningkatan SDM pengelola kearsipan sebanyak 3 orang. Realisasi indikator ini pada tahun 2015 dan 2016 hanya 1 orang sehingga realisasi kinerja sebesar 33% dan terkategori Rendah. Pada tahun 2014 dan 2017 - 2018, realisasi kinerja sebesar 100% yang terkategori Sangat Tinggi. Upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelola kearsipan dapat dilakukan dengan fungsional kearsipan buka sekedar pegawai pengelola kearsipan.



Sumber : LKPJ Inhil (2013 - 2017)

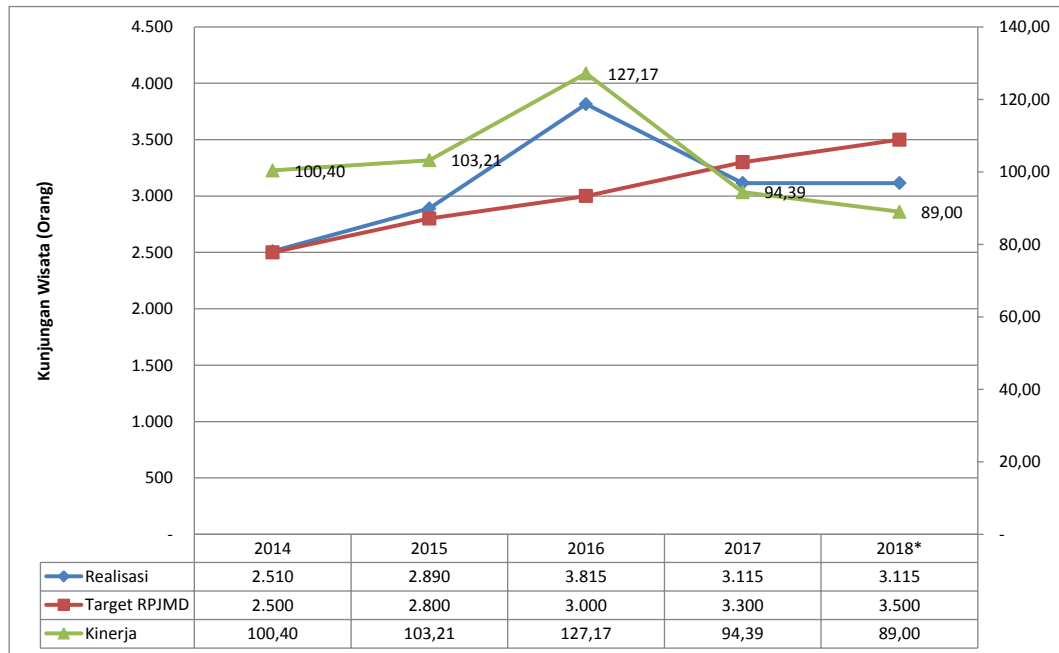
Gambar 2.129.  
Kinerja Indikator Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

### 2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

Layanan urusan pilihan terdiri dari (i) Pariwisata, (ii) Pertanian, (iii) Perdagangan, (iv) Perindustrian, (v) Transmigrasi, dan (vi) Kelautan dan Perikanan.

#### 2.3.3.1. Pariwisata

Layanan urusan pilihan bidang pariwisata digambarkan dari indikator Kunjungan Wisatawan. Indragiri Hilir mempunyai beberapa tempat wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi seperti (i) agriwisata yang berupa hamparan ladang padi dan kelapa, (ii) Bukit berbunga indragiri Hilir, (iii) Pantai Solop, (iv) Air Terjun Tembulan Rusa dan (v) Makam Syek Abdurrahman Siddiq Al Banjari.



Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.130.

Kinerja Indikator Kunjungan Wisatawan  
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018

Dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan bahwa indikator kunjungan wisatawan ke Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 2.500 wisatawan pada tahun 2014 menjadi 3.500 wisatawan pada tahun 2018. Realisasi indikator memiliki tren berfluktuatif meningkat, dimana pada tahun 2014 – 2015, capaiannya diatas target dan tahun 2017 dibawah target. Pada tahun 2018 diperkirakan capaiannya dibawah target. Selama periode 2014 – 2017, realisasi kinerja indikator ini berkisar antara 94,39% - 127,17% dan terkategori Sangat Tinggi dan pada tahun 2018 diperkirakan capaian kinerjanya sebesar 89% dan terkategori Tinggi. Meski capaian kinerja indikator kunjungan wisatawan terkategori Sangat Tinggi, namun secara umum, pariwisata di Indragiri Hilir relatif belum berkembang, dimana objek-objek wisata yang ada belum dikelola dengan baik dan dilengkapi sarana-prasarana yang memadai. Masih jauh kalah bila dibandingkan dengan Kabupaten Tetangga seperti Pelalawan yang mempunyai objek wisatawan yang dikenal dan dikunjungi

wisatawan manca negara seperti Ombak Bono dan Taman Nasional Tesso Nilo. Begitu juga dengan Indragiri Hulu dengan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.

### **2.3.3.2. Pertanian**

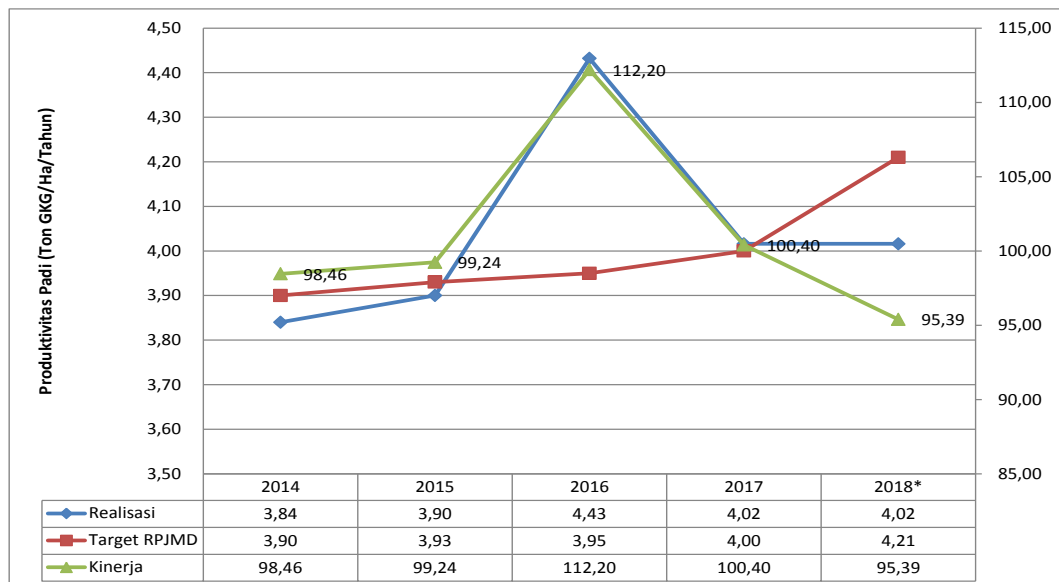
Layanan urusan pilihan bidang pertanian digambarkan dari indikator (i) Produktivitas Padi, (ii) Produksi beras, (iii) Produktivitas Kelapa, (iv) Produktivitas kelapa sawit dan (v) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

#### **a. Produktivitas Padi**

Indragiri Hilir merupakan sentra tanaman padi di Provinsi Riau. Pada tahun 2016, luas panen padi sawah di Indragiri Hilir seluas 24.988,9 hektar dengan kontribusi sebesar 34,44% dari total luas tanam Provinsi Riau. Luas panen padi sawah Indragiri Hilir jauh lebih luas dibanding Kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu dan pelalawan yang masing-masing hanya seluas 1.895,5 hektar dan 6.45.8hektar. Produksi gabah Indragiri Hilir tahun 2016 sebesar 100.383 ton dengan kontribusi terhadap produksi gabah Provinsi Riau sebesar 30,81%, jauh lebih tinggi dibanding Indragiri Hulu dan Pelalawan yang masing-masingnya sebesar 7.174 ton dan 29.819 ton. Namun dari segi produktivitas, produktivitas padi sawah Indragiri Hilir sebesar 40,17 kwintal/hektar masih dibawah produktivitas padi sawah Pelalawan yang sebesar 44,87 kwintal/hektar, meski lebih tinggi dibanding Indragiri Hulu yang sebesar 37,17 kwintal/hektar.

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator produktivitas padi sawah Kabupaten Indragiri Hilir meningkat dari 3,90 ton/hektar tahun 2014 menjadi 4,21 ton pada tahun 2018. Realisasi indikator produktivitas padi sawah di kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2014 - 2015, produktivitas padi sawah di Indragiri Hilir masih dibawah target RPJMD

namun pada tahun 2016 dan 2017, capaian indikatornya berada diatas target. Pada tahun tahun 2018 diperkirakan capaian indikator produktivitas padi akan dibawah target. Selama periode 2014 - 2018, realisasi kinerja produktivitas padi sawah berkisar antara 95,39% - 112,20% dan terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian kinerja indikator ini Sangat Tinggi, namun perlu disadari bahwa produktivitas target relatif jauh lebih rendah dibanding potensi disamping produksi yang ada belum mampu mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu, upaya menggenjot lagi produktivitas dengan revitalisasi irigasi dan penerapan teknologi perlu terus dilakukan sehingga produktivitas padi sawah dapat mencapai produktivitas potensinya.



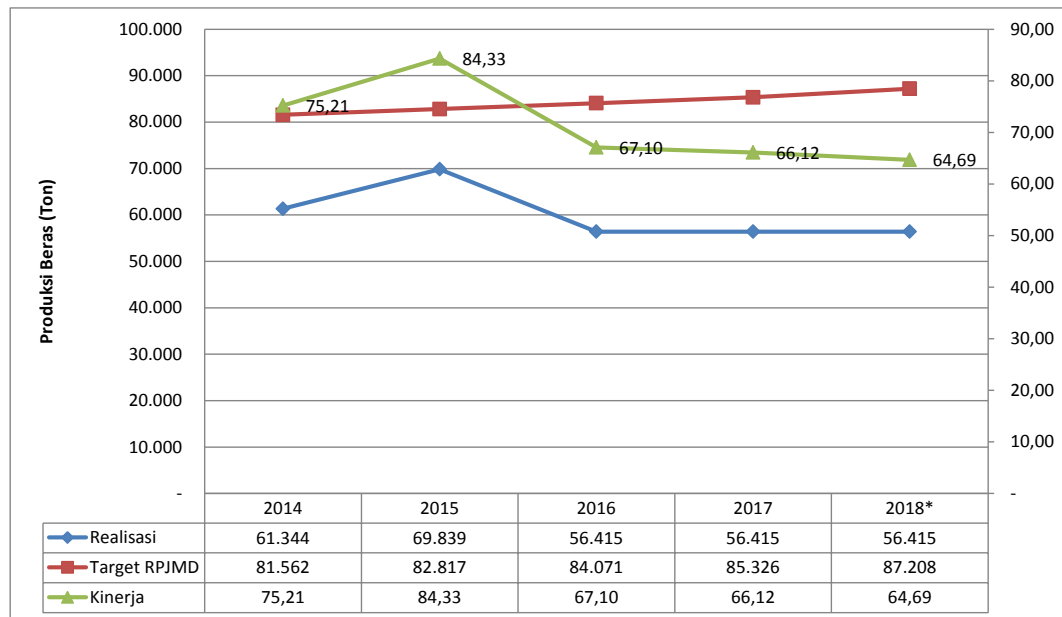
Sumber: [https:// sipd.kemendagri.go.id](https://sipd.kemendagri.go.id)

Gambar 2.131.  
Kinerja Indikator Produktivitas Padi  
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

## b. Produksi Beras

Meski indragiri hilir merupakan sentra padi terbesar di Provinsi Riau dengan produksi beras terbesar di Riau, namun produksi berasnya belum mampu mencukupi kebutuhan beras penduduk Indragiri Hilir.

Pada tahun 2016, jumlah penduduk sebesar 713.034 jiwa dibutuhkan beras sebanyak 70.661,7 ton. Sementara kemampuan produksi beras Indragiri Hilir sebesar 63.509 ton, dan kekurangan sebesar 7.152 ton atau defisit sebesar -10,12%. Capaian ini lebih baik dibanding Indragiri Hulu yang defisit sebesar -080,20% dan Pelalawan defisit sebesar -54,43%.



Sumber : BPS (Statistik Daerah Indragiri Hilir 2014 - 2017) dan LKPJ Inhil (2013 - 2017)

Gambar 2.132.  
Kinerja Indikator Produksi Beras  
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

Dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa produksi beras Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 81.562 ton pada tahun 2014 menjadi 87.208 ton pada tahun 2018. Realisasi indikator produksi beras Indragiri Hilir berfluktuatif menurun dan berada dibawah target. Realisasi kinerja indikator ini selama 2014 - 2017 berkisar antara 66,12% - 84 ,33% yang terkategori Sedang - Tinggi dan pada tahun 2018 diestimasi sebesar 64,69% yang terkategori rendah. Selama periode ini, rata-rata capaian kinerja indikator produksi beras di Idnragiri Hilir terkategori Sedang. Upaya terus meningkatkan produksi beras harus terus

dilakukan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga kedepan Indragiri Hilir dapat berswasembada beras.

#### **c. Peternakan**

Indragiri Hilir merupakan daerah perkebunan kelapa sawit dan kelapa yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan untuk peternakan sapi. Pada tahun 2017, populasi sapi di Indragiri Hilir sebanyak 7.394 ekor. Populasi ternak sapi Indragiri Hilir ini relatif sangat rendah dibanding potensi sumberdaya alam yang dimiliki dan kalah jauh dibanding Kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu yang mencapai 50.000 ekor.

Populasi Ternak sapi Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 7.394 ekor, jumlah betina produktif dari jumlah suatu data kegiatan 3.000 ekor yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Kondisi wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir yang di batasi aliran parit-parit (sungai). Menyulitkan peternak untuk melakukan kawin alam ternak sapinya. Sehingga angka kelahiran ternak sapi di Kabupaten Indragiri Hilir baru mencapai 28% dari betina produktif. Dan jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Riau angka kelahiran ternak di Indragiri Hilir sangat jauh tertinggal dengan Kabupaten lain yang Sarana dan Prasarana pendukungnya yang lebih memadai. Untuk peningkatan angka kelahiran tersebut pula dilakukan berbagai upaya: (i) pengadaan pejantan untuk wilayah - wilayah yang sulit untuk pelaksanaan Inseminasi Buatan, (ii) perluasan wilayah Inseminasi Buatan (IB) dengan dukungan petugas, Sarana dan Prasarana IB yang memadai dan (iii) mengoptimalkan kinerja petugas pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB)

#### **d. Kelapa**

Indragiri Hilir merupakan sentra kelapa Indonesia, bahkan dunia. Pada tahun 2017, luas lahan kelapa di Indragiri Hilir seluas 440.696 hektar dengan produksi sebesar 359.397 ton (BPS Provinsi Riau, 2018). Luas lahan



kelapa Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017, memiliki porsi sebesar 84,76% dari total luas areal kelapa Provinsi Riau dengan kontribusi produksi sebesar 86,41%. Perkebunan kelapa khususnya kelapa dalam di Kabupaten Indragiri Hilir mencakup hampir seluruh kecamatan kecuali di kecamatan Kemuning yang luasan dan produksinya relatif kecil. Perkebunan kelapa ini telah menjadi urat perekonomian penduduk Kabupaten Indragiri Hilir dengan jumlah petani sebanyak 65.417 petani.

Tabel 2.28.

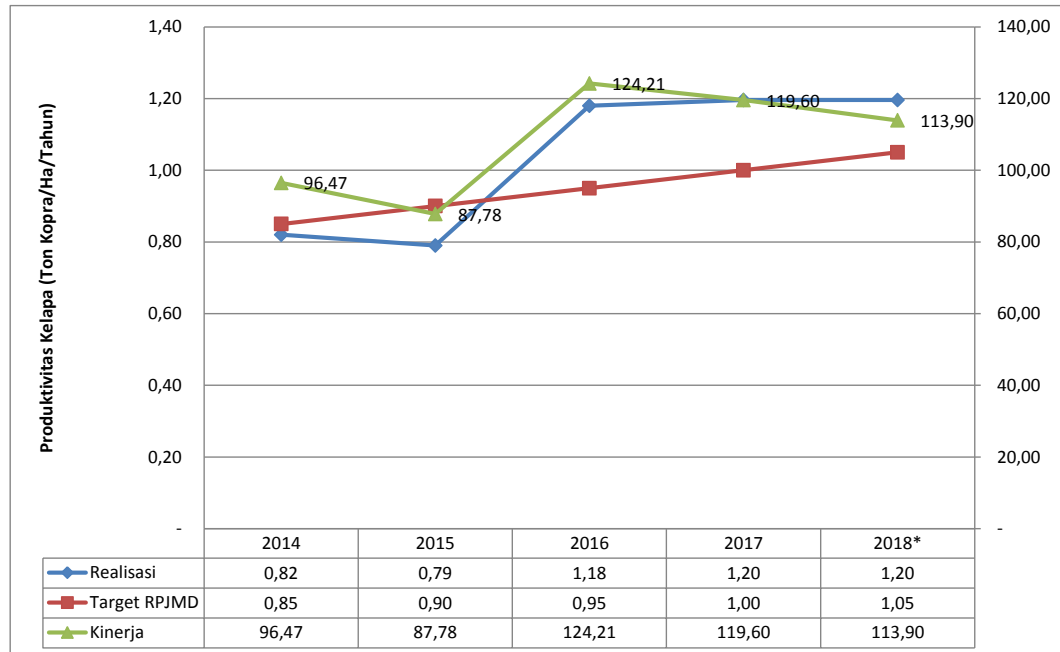
Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Kelapa Dalam Menurut Kecamatan Tahun 2017.

No	Kecamatan	Luas Areal (Hektar)				Produksi (Kg)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani
		TBM	TM	TTR	Jumlah			
1	Keritang	922	21.230	852	23.004	21.315.081	1.004	5.502
2	Kemuning	3	15	-	18	18.210	1.214	27
3	Reteh	1.005	21.422	1.501	23.928	29.797.487	1.391	4.883
4	Sungai Batang	361	14.573	487	15.421	19.600.860	1.345	3.147
5	Enok	1.310	23.998	5.587	30.895	23.182.039	966	6.305
6	Tanah Merah	256	11.034	133	11.422	16.206.177	1.469	4.272
7	Kuala Indragiri	450	5.947	6.742	13.139	5.863.989	986	2.681
8	Concong	171	9.345	194	9.710	11.800.008	1.263	1.982
9	Tembilahan	175	6.785	620	7.580	9.058.002	1.335	1.547
10	Tembilahan Hulu	87	4.345	604	5.036	5.018.602	1.155	1.028
11	Tempuling	959	8.647	884	10.491	10.376.784	1.200	2.141
12	Kempas	234	1.698	340	2.273	2.068.651	1.218	464
13	Batang Tuaka	25	12.429	1.539	13.993	12.602.803	1.014	2.856
14	Gaung Anak Serka	1.901	9.679	5.598	17.178	7.715.224	797	3.506
15	Gaung	403	22.120	4.761	27.285	19.863.879	898	5.568
16	Mandah	1.018	26.264	7.061	34.343	31.516.884	1.200	7.946
17	Kateman	3.048	9.790	18.783	31.621	11.855.230	1.211	6.453
18	Pelangiran	2.416	11.405	2.329	16.150	17.552.064	1.539	3.296
19	Teluk Belengkong	45	4.023	550	4.618	6.098.155	1.516	942
20	Pulau Burung	-	3.637	628	4.265	4.364.388	1.200	879
	Jumlah	14.789	228.386	59.193	302.370	265.874.517	1.196	65.417

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa produktivitas kelapa Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 0,82 ton/ha/tahun pada tahun 2014 menjadi 1,20 ton/ha/tahun pada tahun 2017 dan diperkirakan pada tahun 2018 juga sebesar 1,20 ton/ha/tahun. Realisasi indikator produktivitas kelapa Indragiri Hilir dibawah target

pada tahun 2014 - 2015 dan diatas target pada tahun 2016 - 2018. Realisasi kinerja indikator produktivitas kelapa indragiri Hilir ini berkisar antara 87,78% - 124,21% yang terkategori Tinggi - Sangat Tinggi.



Sumber : BPS (Statistik Daerah Indragiri Hilir 2014 - 2017) dan LKPJ Inhil (2013 - 2017)

Gambar 2.133.  
Kinerja Indikator Produktivitas Kelapa  
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

Sebagaimana telah ditunjukkan pada tabel diatas bahwa perkebunan kelapa merupakan urat nadi perekonomian penduduk Kabupaten Indragiri Hilir yang diusahakan hampir diseluruh kecamatan dan desa. Meski data statistik menunjukkan bahwa produktivitas kelapa Indragiri Hilir memiliki trend meningkat dengan rata-rata pertumbuhan produktivitas meningkat sebesar 1,88% per tahun, namun capaian produktivitas saat ini masih dibawah potensinya yaitu sebanyak 9000 - 11.000 butir atau 1,5 - 2,0 ton kopra/hektar/tahun. Rendahnya produktivitas kelapa Kabupaten Indragiri Hilir ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi petani kelapa antara (i) luasnya tanaman tua dan rusak - TTR, (ii) banyaknya tanggul yang rusak sehingga

banyak tanaman kelapa sawit yang terancam rusak, dan (iii) serangan hama.

Luasan tanaman kelapa dalam yang terkategori tua dan rusak mowski trend luasnya terus menurun yaitu dari 95.675 hektar pada tahun 2013 atau 24,27% dari total luas kelapa dalam (394.244 hektar) menurun menjadi 93.405 hektar (23,78%) pada tahun 2015 dan kembali menurun menjadi 59.193 hektar (19,58%) pada tahun 2017. Selama periode 2013 – 2017, luasan dan porsi tanaman kelapa dalam yang terkategori tua dan rusak di Kabupaten Indragiri tergolong besar sehingga perlu dilakukan replanting atau peremajaan kembali sehingga produktivitasnya diharapkan kembali meningkat.

Pada masa yang hampir bersamaan, perkebunan kelapa khususnya kelapa dalam dihadapkan kepada banyak tanggul-tanggul yang sudah rusak sehingga mengancam tidak kurang dari 100.000 hektar tanaman kelapa terinstruksi air laut. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk memperbaiki tanggul dan trio tata airnya. Pada tahun 2017, sekitar 60.000 hektar perkebunan kelapa dalam rakyat masih memerlukan perbaikan tanggul dan trio tata air yang rusak dan kurang berfungsi.

Relatif rendahnya produktivitas kelapa juga dipengaruhi oleh semakin meningkatnya serangan hama kelapa khususnya serangan hama kumbang tanduk. Kondisi cuaca yang cenderung lembab dan semakin luas replanting kelapa sawit, dimana dalam pembenaman batang kelapa kurang sesuai SOP, maka batang kelapa sawit sisa replanting ini menjadikan media yang baik untuk berkembang biaknya kumbang tanduk. Hama kumbang tanduk inilah yang menyerang tanaman kelapa dalam rakyat.

Hal yang terus menjadi perbincangan adalah harga jual kelapa bulat petani yang cenderung rendah. Akibat tekanan harga beli kelapa yang sudah lama rendah, menjadikan kebun-kebun kelapa kurang

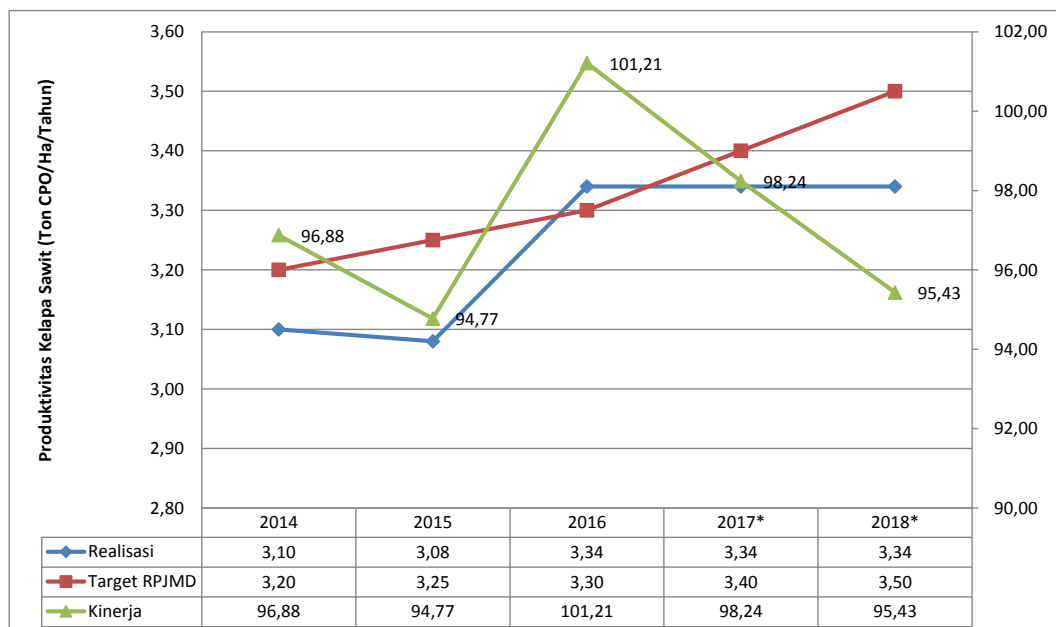
mendapat perhatian oleh petani. Kondisi harga jual kelapa rakyat yang rendah karena pasar kelapa bulat di Indragiri Hilir yang Monopsoni dan akan mengarah ke Monopoli. Campur tangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir agar posisi tawar petani menjadi lebih baik perlu dilakukan antara melalui resi gudang. Upaya mendorong industri miko/kecil berbasis kelapa di pedesaan adalah bentuk lainnya mendorong berkembang dan berjayanya kembali industri kelapa Indragiri Hilir. Oleh karena itu, revitalisasi industri kelapa yang diikuti dengan penerapan penetapan harga jual kelapa yang wajar harus menjadi salah satu fokus pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir ke depannya.

#### **e. Kelapa Sawit**

Provinsi Riau telah menjadi barometer industri kelapa sawit Indonesia. Pada tahun 2017, luas areal kelapa sawit Provinsi Riau seluas 2.493.176 hektar atau 20,26% dari total luas areal kelapa sawit Indonesia dengan produksi sebesar 8.721.148 ton atau 24,66% dari total produksi minyak sawit Indonesia. Luas dan produksi kelapa sawit di Provinsi Riau menurut Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa areal kelapa sawit Indragiri Hilir seluas 227.806 hektar atau 9,49 % dari total luas areal kelapa sawit Provinsi Riau dengan produksi sebesar 721.084 atau 9,29% dari total produksi minyak sawit Provinsi Riau. Luas areal dan produksi kelapa sawit Indragiri Hilir ini diatas Indragiri Hulu (117.820 hektar dan 424.022 ton), namun masih jauh dibawah luas areal dan produksi minyak sawit Pelalawan (306.977 hektar dan 1.249.219 ton).

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa produktivitas kelapa sawit di Indragiri Hilir didorong meningkat yaitu dari 3,20 ton/hektar pada tahun 2014 menjadi 3,50 ton/hektar tahun 2018. Realisasi capaian indikator produktivitas kelapa sawit ini umumnya dibawah target keculai untuk tahun 2016 yang diatas target. Selama periode ini, realisasi kinerja produktivitas kelapa sawit

berkisar antara 96,43% - 101,21% yang terkategori sangat Tinggi. Namun perlu dicatat bahwa capaian produktivitas kelapa sawit Indragiri Hilir khususnya diperkebunan rakyat tahun 2016 yaitu sebesar 3,34 ton per hektar, masih jauh rendah bila dibanding dengan capaian produktivitas perkebunan besar di Indragiri Hilir sendiri yaitu sebesar 4,24 ton, bahkan di Pelalawan sudah mencapai 4,42 ton per hektar. Oleh karena itu, upaya replanting perkebunan kelapa sawit rakyat di Indragiri perlu direncanakan sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani kelapa sawit.



Sumber : BPS (Statistik Daerah Indragiri Hilir 2014 - 2017) dan LKPJ Inhil (2013 - 2017)

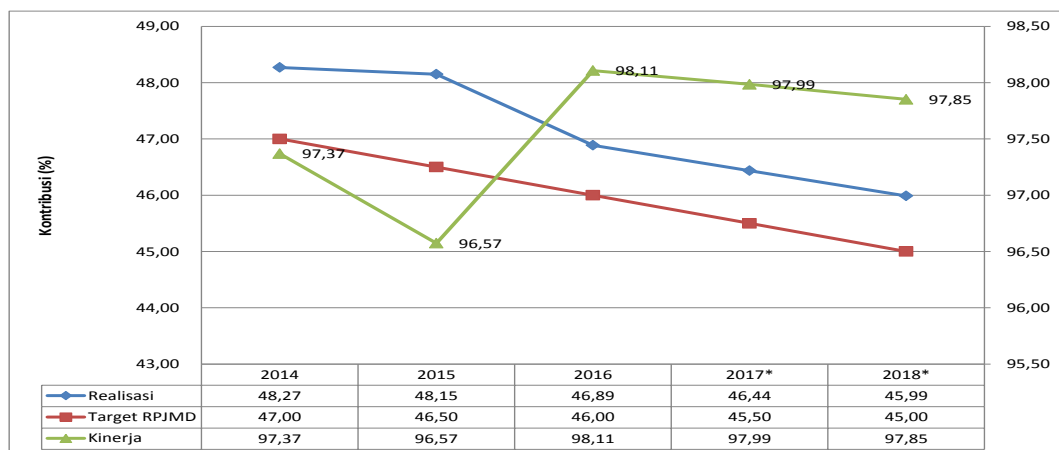
Gambar 2.134.  
Kinerja Indikator Produktivitas Kelapa Sawit  
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

#### f. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB Indragiri Hilir menurut lapangan usaha dengan trend menurun. Kontribusi sektor pertanian menurut sub sektor menunjukkan bahwa subsektor tanaman perkebunan memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 57% diikuti perikanan (24%), kehutanan

(11%), tanaman pangan (4%), tanaman hortikultura (1%) dan peternakan (1%) serta jasa petnaian dan perburuan (1%).

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB menurun dari 47% pada tahun 2014 menjadi 45% pada tahun 2018. Realisasi indikator kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Indragiri Hilir memiliki trend yang relatif sama dengan target yaitu menurun dengan capaian yang masih diatas target. Realisasi kinerja indikator kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Indragiri Hilir ini berkisar antara 96,57% - 98,11% yang terkategori Sangat Tinggi. Masih tingginya kontribusi sektor pertanian khususnya dari sub sektor perkebunan naka sudah seharusnya sub sektor ini mendapat perhatian yang cukup dalam pembangunan dan didorong untuk berkembangnya industri hilir.



Sumber: [https:// sipd.kemendagri.go.id](https://sipd.kemendagri.go.id)

Gambar 2.135.  
Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB  
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018

### 2.3.3.3. Perdagangan

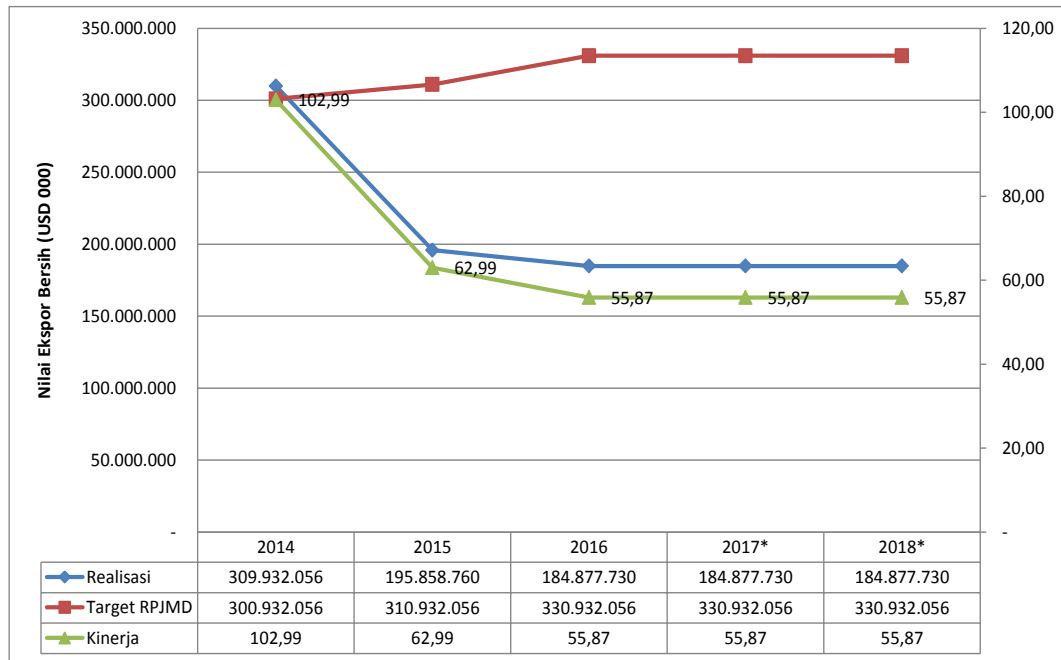
Layanan urusan pilihan bidang pertanian diwakili oleh indikator (i) Nilai ekspor bersih perdagangan dan (ii) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

**a. Ekspor Bersih Perdagangan**

Ekspor bersih perdagangan atau disebut juga neraca perdagangan adalah nilai ekspor dikurangi nilai impor. Volume dan nilai ekspor Indragiri Hilir selama periode 2014 hingga 2016 cenderung semakin menurun yaitu dari 826.749.270 ton dengan nilai USD 346.711.340 pada tahun 2014 menurun menjadi 435.685.750 ton dengan nilai USD 255.139.100 pada tahun 2015. Pada tahun 2016, volume ekspor menurun lagi menjadi 414.186.430 ton dengan nilai USD 253.417.600. Disisi lain volume dan nilai impor cenderung meningkat sehingga ekspor bersih cenderung menurun.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator ekspor bersih perdagangan Indragiri Hilir adalah terus meningkat atau surplus yaitu dari USD 300.932.056 pada tahun 2014 menjadi USD 330.932.056.

Selama periode 2014 - 2018, realisasi indikator ekspor bersih perdagangan Indragiri Hilir memiliki trend menurun dan dibawah target yang ditetapkan. Pada tahun 2014, dengan realisasi indikator diatas target maka realisasi kinerja menjadi 102,99% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada periode 2015 - 2018, realisasi kinerja indikator ekspor bersih perdagangan menurun menjadi 55,87% - 62,99% yang terkategori Rendah. Semakin menurunnya ekspor bersih perdagangan atau neraca perdagangan Indragiri Hilir ini harus segera diantisipasi melalui program-program pembangunan yang mendorong tumbuh dan berkembang industri yang memberi nilai tambah pada output pertanian yang beroreantasi ekspor.



Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.136.  
Kinerja Indikator Nilai Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

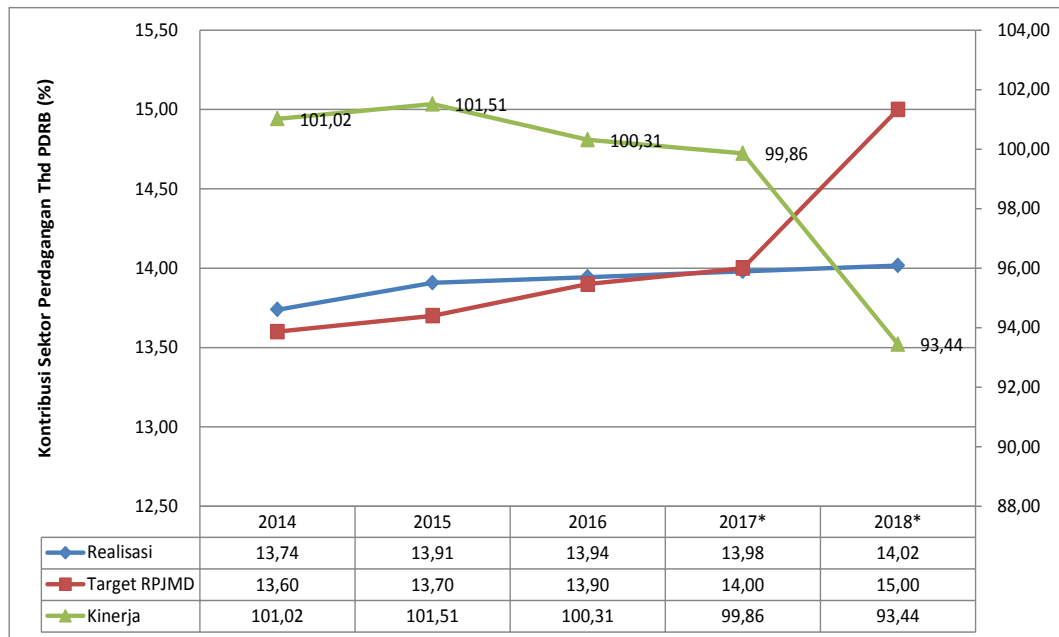
**b. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB**

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000 = 100) menggunakan klasifikasi usaha indonesia 1990 (KLUI 1990) yang terdiri dari 9 lapangan usaha. PDRB tahun dasar 2010 = 100 menggunakan KBLI 2009 yang terdiri dari 17 lapangan usaha. Lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran pada KLUI 1990 dipecah menjadi 2 lapangan usaha pada KBLI 2009 yang terdiri dari (i) perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dan (ii) transportasi dan pergudangan.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator kontribusi perdagangan terus meningkat dari 13,60% pada tahun 2014 menjadi 15% pada tahun 2018. Realisasi indikator ini memiliki trend meningkat yaitu dari 13,74% pada tahun 2014 meningkat menjadi 13,94% pada tahun 2016 dan diperkirakan pada tahun 2017 dan 2018 kontribusi



masing-masingnya sebesar 13,98% dan 14,02%. Realisasi kinerja indikator ini selama periode 2014 - 2016 berada di atas target dengan realisasi kinerja sebesar 100,31% - 101,51% yang terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2017 - 2018, diperkirakan, capaian indikator ini akan di bawah target dengan realisasi kinerja sebesar 93,44% - 99,86% yang terkategori Sangat Tinggi.



Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka 2014 - 2017) dan LKPJ Inhil (2013 - 2017)

Gambar 2.137.

Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

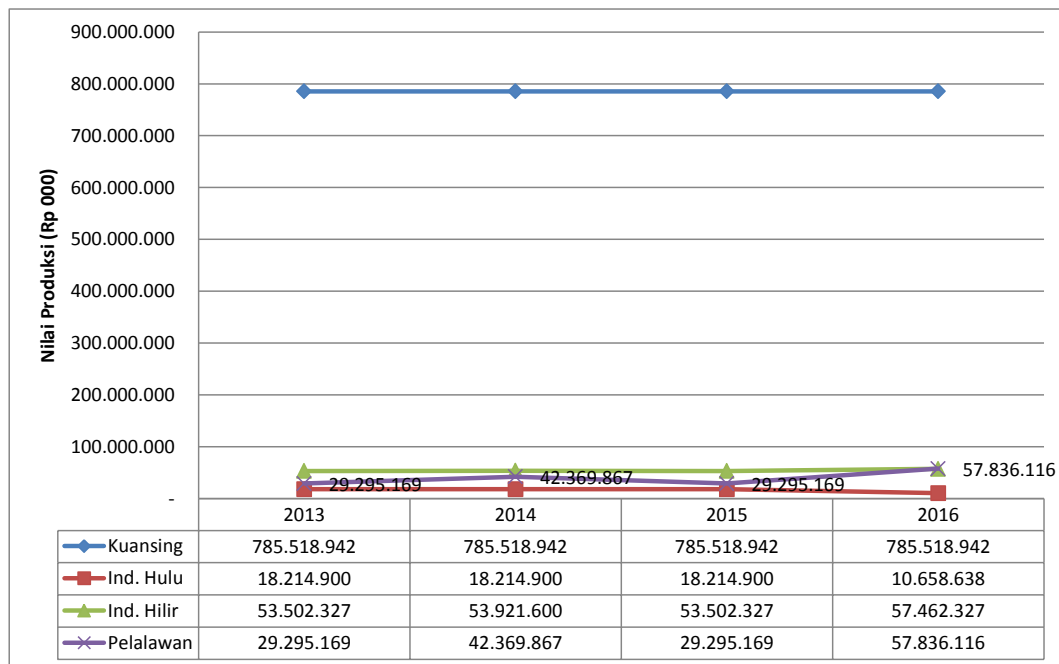
#### 2.3.3.4. Perindustrian

Layanan urusan pilihan bidang industri diwakili oleh indikator (i) Nilai produksi usaha menengah kecil dan (ii) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

##### a. Nilai Produksi Usaha Industri Menengah Kecil

Selama periode 2013 - 2016, nilai produksi usaha industri menengah dan kecil Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif

meningkat. Pada tahun 2013, nilai produksi usaha industri menengah kecil sebesar Rp 53.502.327.000 meningkat menjadi Rp 57.462.327.000 pada tahun 2016. Selaman periode ini, rata-rata pertumbuhan nilai produksi usaha industri menengah keci Indragiri Hilir meningkat sebesar 1,80% per tahun. Capaian nilai produksi usaha menengah kecil Indragiri Hilir lebih kecil dari Kuantan Singingi meski lebih tinggi nilainya dibanding Indragiri Hulu dan Pelalawan. Upaya untuk meningkatkan nilai produksi usaha menengah kecil Indragiri Hilir perlu mendapat perhatian karena potensi yang ada saat ini belum terkelola dengan baik. Upaya menggerakkan usaha menengah kecil melalui program Desa Maju Inhil Jaya adalah suatu strategi terbaik dilakukan.



Sumber : BPS (Riau Dalam Angka , 2017)

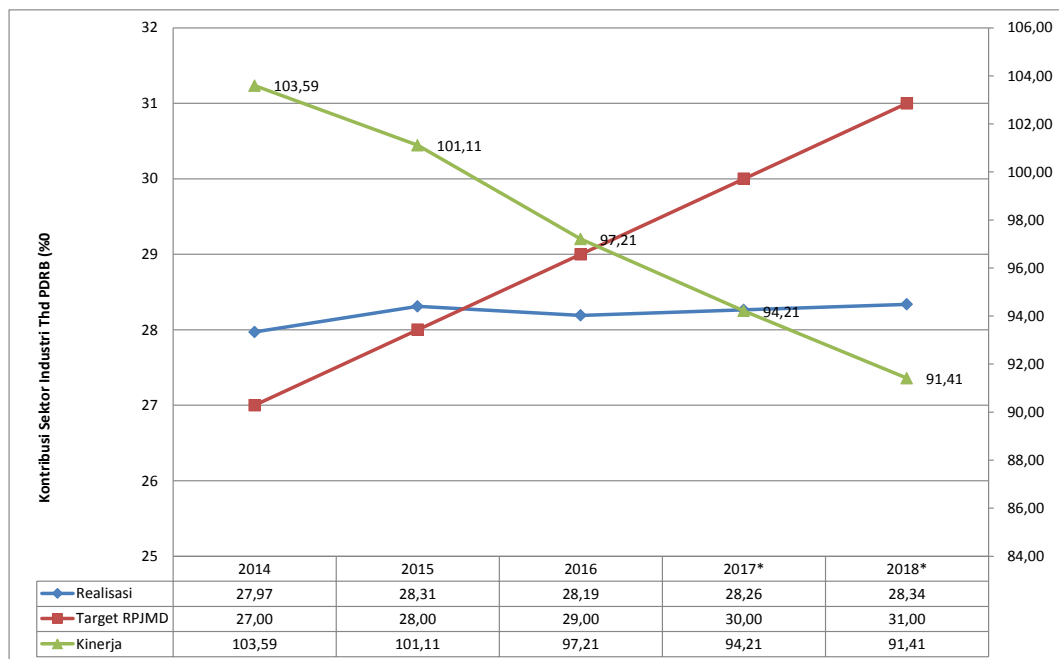
Gambar 2.138.

Perkembangan Nilai Produksi Usaha Industri Menengah Kecil di Kabupaten di Indragiri Hilir dan Kabupaten Tetangga Tahun 2014 - 2018

**b. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB**

sektor industri yang dalam KLUI 1990 yang dimaksud adalah sektor industri pengolahan yang dalam KBLI dipecah menjadi menjadi 4

yaitu (i) Industri pengolahan, (ii) pengadaan listrik dan gas, (iii) pengadaan air dan (iv) informasi dan komunikasi. Kontribusi Sektor industri ini dalam PDRB indragiri Hilir menempati posisi kedua setelah sektor pertanian. Dalam RPJMD Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa kontribusi sektor indsutri terhadap PDRB Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 27% pada tahun 2014 menjadi 31% pada tahun 2018. Target ini menandakan bahwa Indragiri Hilir bertransformasi dari pertanian ke industri pertanian.



Sumber : BPS (Indragiri Hilir Dalam Angka 2014 - 2017) dan LKPJ Inhil (2013 - 2017)

Gambar 2.139.  
Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

Selama periode 2014 - 2016, realisasi indikator kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB memiliki trend berfluktuatif meningkat yaitu dari 27,97% pada tahun 2014 meningkat menjadi 28,19% pada tahun 2016 dan diperkirakan meningkat menjadi 28,34 pada tahun 2018. Selaras dengan peningkatan capaian indikator dan target, maka realisasi kinerja cenderung menurun yaitu dari 103,59% pada tahun 2014 menjadi 97,21%

pada tahun 2016 yang terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2017 dan 2018, capaian kinerja indikator kontribusi sektor industri berkisar antara 91,41% - 94,21% yang terkategori Sangat Tinggi. Meski kontribusi sektor industri Sangat Tinggi, namun pencapaian ini dapat jauh lebih tinggi karena sumberdaya yang tersedia masih banyak diekspor dengan nilai tambah rendah seperti kelapa bulat dan CPO. Upaya mewujudkan kawasan industri yang saat ini masih terbengkalai perlu terus diupayakan.

#### **2.3.3.5. Transmigrasi**

Indikator yang biasa digunakan untuk bidang transmigrasi adalah kontribusi transmigrasi terhadap PDRB. Data ini relatif tidak tersedia dalam penyajian PDRB. Pada tahun 2016, tercatat di dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebuah kegiatan yaitu Transmigrasi Lokal dengan nilai sebesar Rp 46.913.500 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 90,40%.

#### **2.3.3.6. Kelautan dan Perikanan**

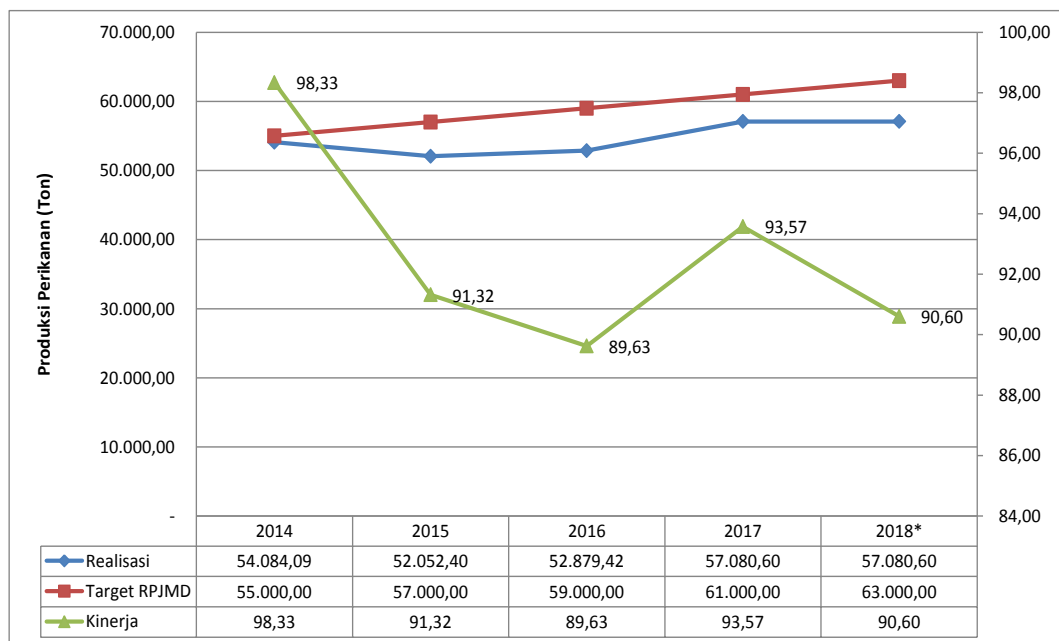
Layanan urusan pilihan bidang pertanian diwakili oleh indikator (i) produksi perikanan dan (ii) Konsumsi ikan.

##### **a. Produksi Perikanan**

Indragiri Hilir merupakan salah satu produsen ikan di Provinsi Riau setelah Rokan Hilir. Produksi ikan Indragiri Hilir jauh diatas Kabupaten Indragiri Hulu dan Pelalawan. Sumber produksi ikan Indragiri Hilir berasal dari perikanan laut dan perairan umum. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator produksi ikan Indragiri Hilir terus meningkat yaitu dari 55.000 ton pada tahun 2014 menjadi 63.000 ton pada tahun 2018.

Selama periode 2014 - 2018, realisasi indikator produksi ikan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif meningkat. Selama

periode ini, capaian indikator produksi ikan Indragiri Hilir dibawah target RPJMD. Capaian kinerja indikator ini berkisar antara 89,63% - 98,33% yang terkategori Tinggi - Sangat Tinggi. Meski capaian kinerja indikator ini rata-rata sebesar 92,69% dan terkategori Sangat Tinggi namun untuk terus meningkatkan produksi dari tangkap dilaut dan perairan umum akan sulit terus dilakukan. Oleh karena itu, upaya pengembangan perikanan budidaya harus menjadi agenda pembangunan ke depan sehingga produksi ikan dapat terus meningkat dan kesejahteraan nelayan tetap terjamin.



Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

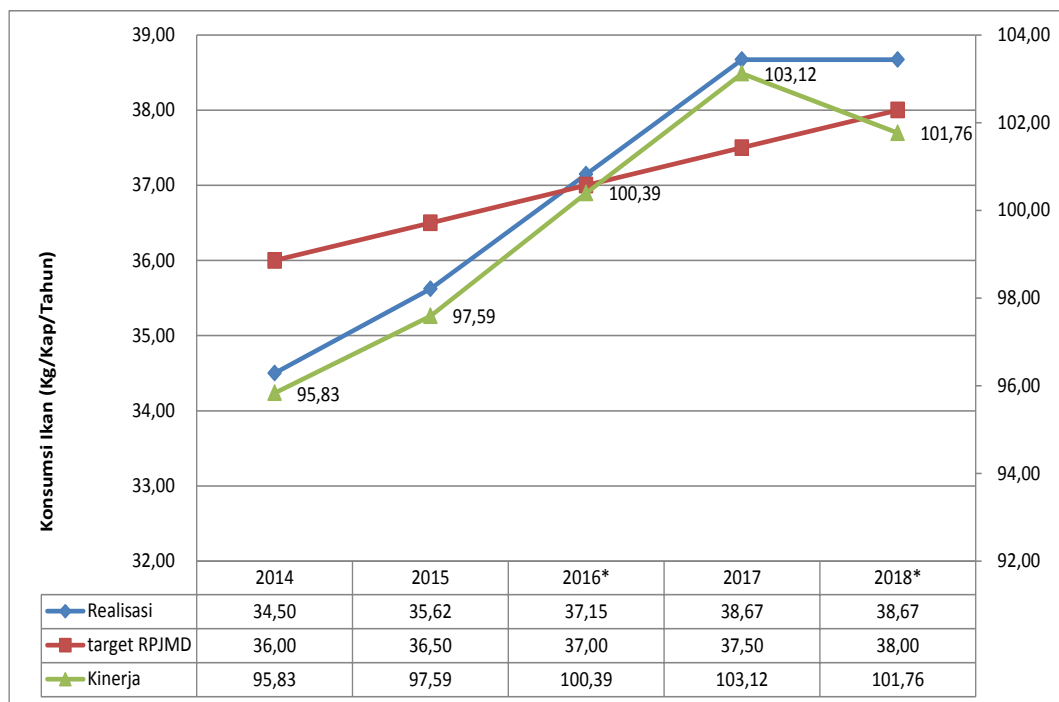
Gambar 2.140.  
Kinerja Indikator Produksi Perikanan  
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

## b. Konsumsi Ikan

Indragiri Hilir yang merupakan produsen ikan di Provinsi Riau sehingga suplai ikan ke masyarakat selalu tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga murah. Ketersediaan protein per kapita Indragiri Hilir tahun 2016 sebesar 95,52 gram/kapita, dimana ketersediaan ini lebih besar

dari ketersediaan protein per kapita di Indragiri Hulu (93,42 gram/kapita) dan Pelalawan (94,31 gram/kapita). Ketersediaan protein per kapita sebesar 95,52 gram, sebesar 37,15 gram berasal dari ikan.

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan indikator konsumsi ikan di Indragiri Hilir meningkat dari 34,50 gram per kapita menjadi 38 gram per kapita. Pada periode 2014 - 2015, Realisasi indikator konsumsi ikan Indragiri Hilir masih dibawah target RPJMD, namun pada periode 2016 - 2018 sudah diatas target RPJMD. Selama periode ini, realisasi kinerja indikator konsumsi ikan berkisar antara 95,83% - 103,12% yang terkategori Sangat Tinggi. Meski capaian indikator ini sudah Sangat Tinggi namun capaian indikator ini harus terus ditingkat sehingga konsumsi protein dari ikan dapat meningkat.



Sumber: [https:// sipd.kemendagri.go.id](https://sipd.kemendagri.go.id)

Gambar 2.141.  
Kinerja Indikator Konsumsi Ikan  
di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018

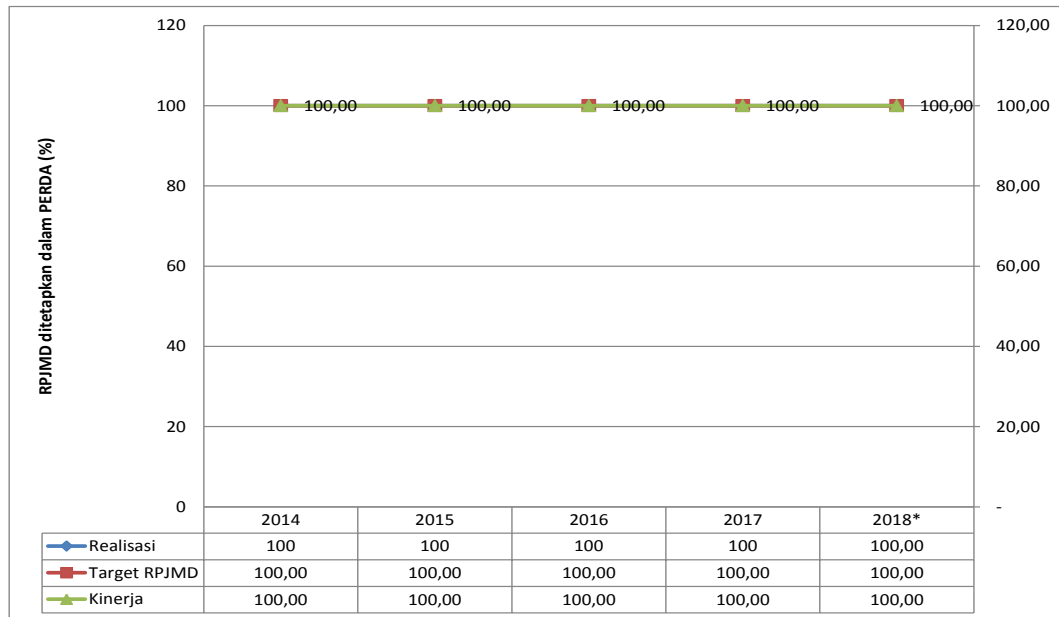
### **2.3.4. Urusan Penunjang**

#### **2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan**

Layanan urusan Penunjang Bidang Perencanaan Pembangunan diwakili dari indikator (i) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada, (ii) Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada dan (iii) Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD.

##### **a. RPJMD**

Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (olima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional. Indikator tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/perkada telah ditetapkan dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2014 - 2018 sebagai indikator dalam bidang Perencanaan Pembangunan. RPJMD Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 tahun 2014. Pada tanggal 20 September 2017, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indragiri Hilir mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2018.



Sumber : LKPJ Inhil (2013 - 2017)

Gambar 2.142.

Kinerja Indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

Selama periode 2014 - 2018, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki RPJMD yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut. Realisasi kinerja indikator tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada sebesar 100% dan terkategori Sangat Tinggi. Meski pencapaian kinerja indikator ini sangat tinggi namun disadari bahwa dalam penyusunan dokumen RPJMD, Bappeda Indragiri Hilir masih sangat tergantung sepenuhnya dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas fungsional penelitian bidang perencanaan perlu menjadi perhatian dalam periode berikutnya.

#### b. RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun. RKPD



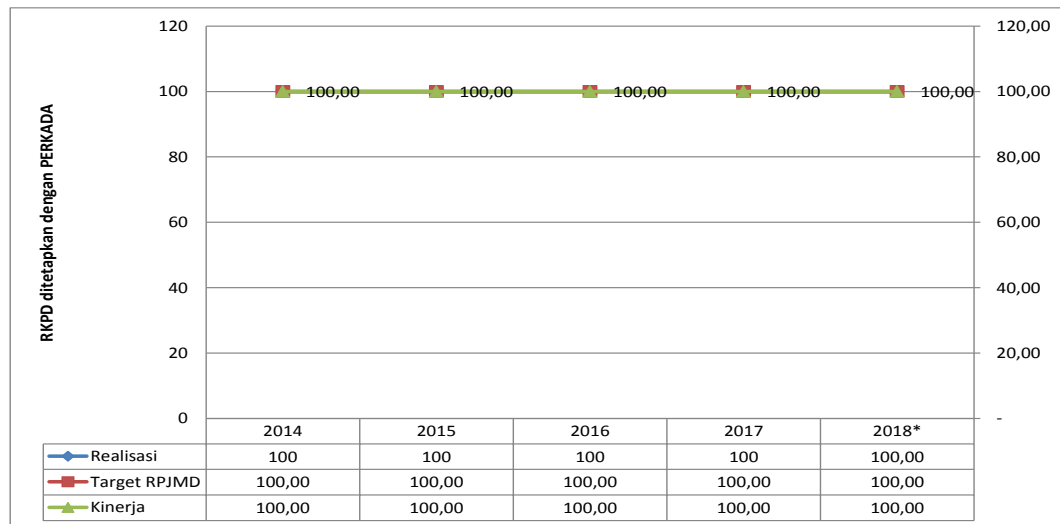
mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain (i) merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD, (ii) menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja OPD, berupa program/kegiatan, (iii) mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD, (iv) menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD dan (v) menjadi bahan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Dalam RPJMD kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa Indikator tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dalam Perkada menjadi salah satu indikator dalam bidang perencanaan pembangunan. Selama periode 2014 - 2018, Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir yang berkaitan dengan RKPD sebagai berikut

1. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor. 18 tahun 2013 tentang RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2014.
2. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor. 19 tahun 2014 tentang RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2015.
3. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor. 20 tahun 2015 tentang RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016.
4. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor. 27 tahun 2016 tentang RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017.
5. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor. 16 tahun 2017 tentang RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018

Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dalam Perkada Realisasi kinerja indikator menjadikan realisasi kinerja indikator ini sebesar 100% dan terkategori Sangat Tinggi. Meski pencapaian indikator

ini sangat tinggi dan RKPD Indragiri Hilir mendapat penghargaan di tingkat Provinsi Riau, namun dalam penyusunan RKPD masih banyak tergantung dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, kedepan perlu diperbanyak fungsional perencana yang berkualitas dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan.



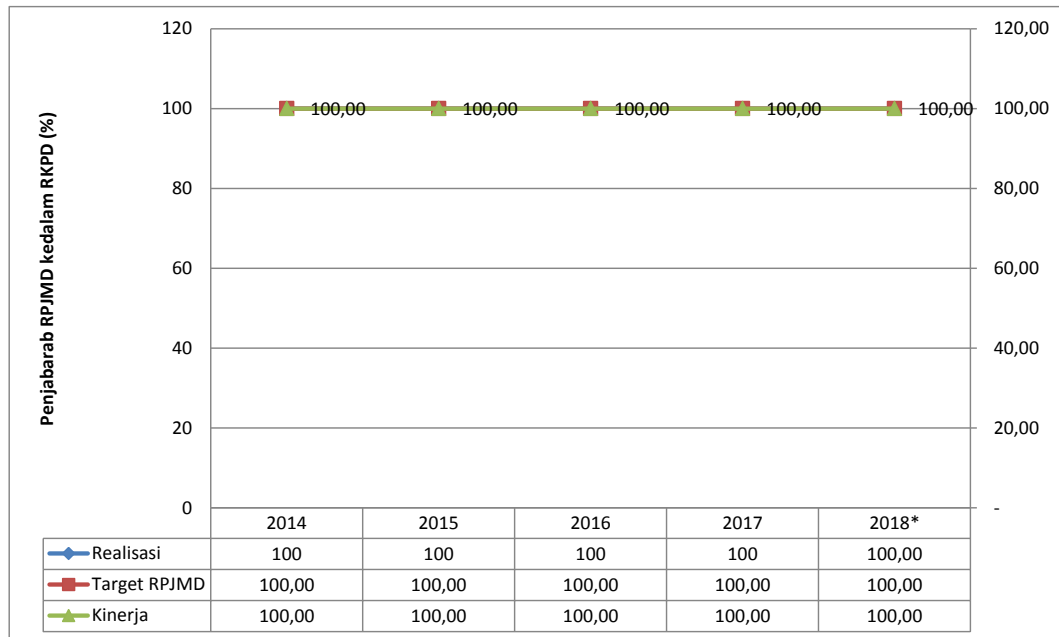
Sumber : LKPJ Inhil (2013 - 2017)

Gambar 2.143.

Kinerja Indikator Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

**c. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD**

Dalam pedoman penyusunan RKPD telah digariskan bahwa program dalam RKPD harus merupakan mengacu kepada program dalam RPJMD. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan bahwa bahwa indikator penjabaran RPJMD ke dalam RKPD dilaksanakan 100% dalam artian program yang dilaksanakan dalam RKPD harus ada dalam RPJMD. Realisasi capaian indikator ini selama periode 2014 - 2018 adalah sebesar 100%. Dengan demikian, realisasi kinerja indikator penjabaran RPJMD ke dalam RKPD terlaksana 100% dan terkategori Sangat Tinggi.



Sumber : LKPJ Inhil (2013 - 2017)

Gambar 2.144.  
Kinerja Indikator Penjabaran RPJMD kedalam RKPD  
di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

#### 2.3.4.2. Keuangan

Layanan urusan Penunjang Bidang Keuangan diwakili dari Opini BPK. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksian mengenai kewajaran informasi keuangan yang didasarkan pada empat kriteris yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap oeraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern. Jenis Opini BPK adalah (i) Wajar tanpa pengecualian atau WTP (*unqualified opinion*), (ii) Wajar Dengan Pengecualian atau WDP (*qualified opinion*), Tidak Wajar (*advised opinion*) dan Tidak Menyatakan pendapat (*disclamer of opinion*)

Selama periode 2014 - 2017, opini BPK yang diterima Indragiri Hilir mengalami peningkatan dari WTP menjadi WTP. Pada tahun 2014 - 2015, opini BPK yang diterima Indragiri Hilir adalah WDP atau wajar

dengan pengecualian adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pada tahun 2016 - 2017, opini BPK yang diterima adalah WTP atau wajar tanpa pengecualian. Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkan paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Salain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal. Dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain.

Tabel 2.29.

Perkembangan Realisasi, target dan capaian kinerja indikator Opini BPK Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018*
Realisasi	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
Target RPJMD	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
Kinerja	S. Tinggi	S. Tinggi	S. Tinggi	S. Tinggi	S. Tinggi

Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2013 - 2018 telah ditetapkan capaian indikator opini BPK yaitu WDP pada tahun 2014 - 2016 dan WTP pada tahun 2017 - 2018. Realisasi capaian indikator opini BPK indragiri

Hilir lebih awal dari target RPJMD dimana pencapaian opini BPK dengan prediket WTP dapat dicapai pada tahun 2016. Capaian kinerja indikator opini BPK Indragiri Hilir terkategori Sangat Tinggi.

Pencapaian opini BPK Indragiri Hilir dibanding kabupaten tetangga menunjukkan bahwa pencapaian Opini BPK Indragiri Hilir tahun 2016 dan 2017 sama dengan yang dicapai Indragiri Hulu yang mendapat opini BPK dengan prediket WTP pada tahun 2016 dan 2017. Namun bila dibandingkan dengan Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau, capaian opini BPK mereka sudah 6 kali berturut dengan prediket WTP yaitu dari tahun 2012 - 2017.

#### **2.3.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

Layanan urusan Penunjang Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan diwakili oleh indikator Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteris masing-masing komponen sebagaimana ditunjukkan dibawah ini :

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1.	Perencanaan kerja	30%	a. Rencana strategis (10%) b. Perencanaan kinerja tahunan (20%)
2.	Pengukuran kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3.	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan laporan (3%) b. Kualitas laporan (7,5%) c. Pemanfaatan laporan (4,5%)
4.	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan evaluasi (3%)
5.	Capaian kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
	Total	100%	

Setelah proses pelaksanaan evaluasi selesai secara keseluruhan, MENPAN & AB memberikan peringkat nilai dengan sebutan: AA, A, B, CC, C, dan D, dengan rincian Interpretasi dan Karakteristik instansinya sebagai berikut:

No	Skor	Nilai	Interpretasi dan Karakteristik Instansi
1	➤ 85	AA	<b>Memuaskan:</b> Memimpin perubahan, 100 berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan akuntabel, perlu terus berinovasi
2	➤ 75 - 85	A	<b>Sangat Baik:</b> Akuntabilitas kinerjanya baik, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, menggunakan knowledge management untuk membangun budaya berkinerja, perlu banyak inovasi
3	➤ 65 - 75	B	<b>Baik:</b> akuntabilitas kinerjanya baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan untuk systems dan perlu banyak

No	Skor	Nilai	Interpretasi dan Karakteristik Instansi
			berfokus perbaikan soft systems.
4	➤ 50 - 65	CC	<b>Cukup Baik (memadai):</b> Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja bagi pertanggungjawaban, tapi perlu banyak perbaikan, termasuk sedikit perbaikan yang mendasar
5	➤ 30 - 50	C	<b>Agak Kurang:</b> Memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi kurang dapat diandalkan, perlu banyak perbaikan dan termasuk perbaikan yang mendasar
6	0 - 30	D	<b>Kurang:</b> sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Selama periode 2014 - 2017, capaian indikator Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berfluktuatif konstans dari segi kriteria capaian yaitu nilai CC (50,12) pada tahun 2014, menurun menjadi C (40,99) pada tahun 2015 dan kembali meningkat pada tahun 2016 - 2017. Pada tahun 2016, nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir masih tetap CC (41,07) dan meningkat menjadi CC (50,01). Pada tahun 2018, diperkirakan nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan bernilai CC dengan skor sekitar 53,44. Capaian indikator ini relatif dibawah target RPJMD. Pada tahun 2014, realisasi kinerja indikator akuntabilitas sebesar 91,13% dan terkategori Sangat Tinggi. Pada tahun 2015 - 2016, realisasi kinerja terkategori Sedang. Pada tahun 2017, capaian kinerja terkategori Tinggi dan diperkirakan pada tahun 2018 juga terkategori Tinggi.

Tabel 2.30.

Perkembangan Realisasi, Target dan Capaian kinerja indikator Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018*
Realisasi	CC	C	C	CC	CC
Target RPJMD	CC	CC	CC	B	B
Kinerja	S. Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi

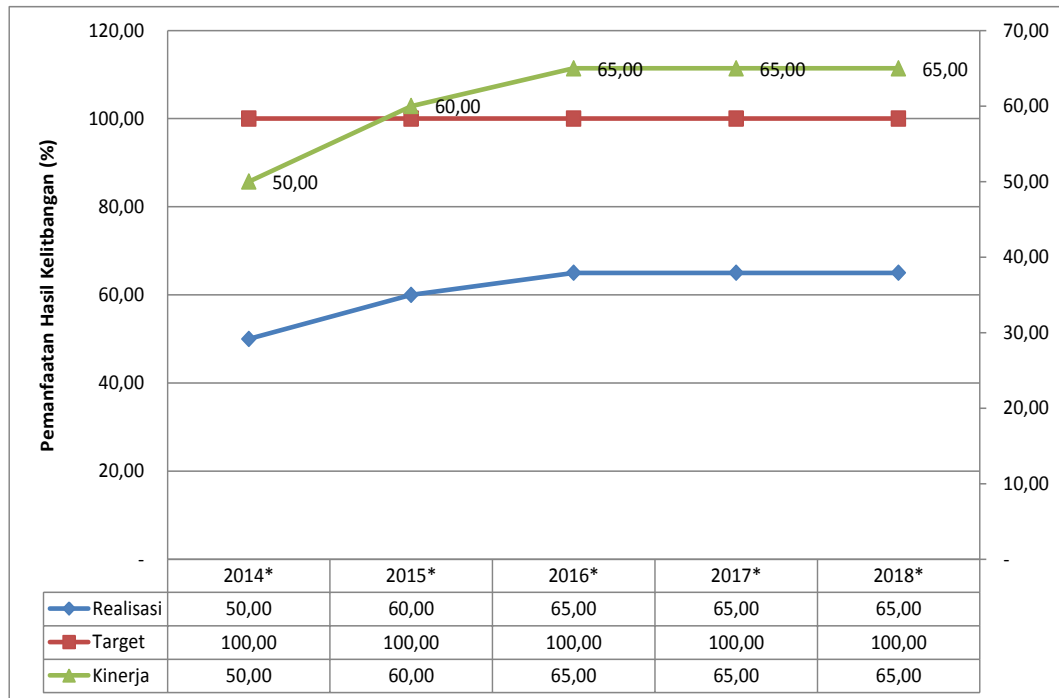
Sumber: LKPJ Inhil (2014 - 2017)

Capaian indikator Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2015 dan 2016 dibanding kabupaten/Kota dan Provinsi Riau menunjukkan Indragiri Hilir berada di urutan ke 10 dan hanya lebih baik dari Kuantan Sengingi, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti. Pada tahun 2015 - 2016, capaian indikator akuntabilitas Indragiri Hulu di urutan ke 5 dengan nilai CC (50,29) dan Pelalawan di urutan kedelapan dengan nilai C (47,65). Pada tahun 2017, Indragiri Hulu memiliki nilai akuntabilitas Indragiri Hulu 54,02 dan Pelalawan bernilai CC (50,39).

#### 2.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Layanan urusan Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan diwakili oleh indikator Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Selama periode 2014 - 2018, diestimasi indikator pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Indragiri Hilir relatif masih dibawah yang ditargetkan yaitu semua hasil kelitbangan dimanfaatkan untuk pembangunan. Realisasi kinerja pemanfaatan hasil kelitbangan berkisar antara 50% - 65% yang terkategori Rendah. Periode pembangunan kedepan, hasil penelitian harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan sehingga hasil pembangunan akan lebih optimal dan lebih berdaya guna.





Keterangan: \* estimasi

Gambar 2.145.

Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

#### 2.3.4.5. Pengawasan

Layanan urusan Penunjang Bidang Pengawasan diwakili oleh indikator Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan. Di Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan oleh Inspektorat yang bertanggungjawab kepada Bupati.



Sumber : LKPJ Inhil (2013 - 2017)

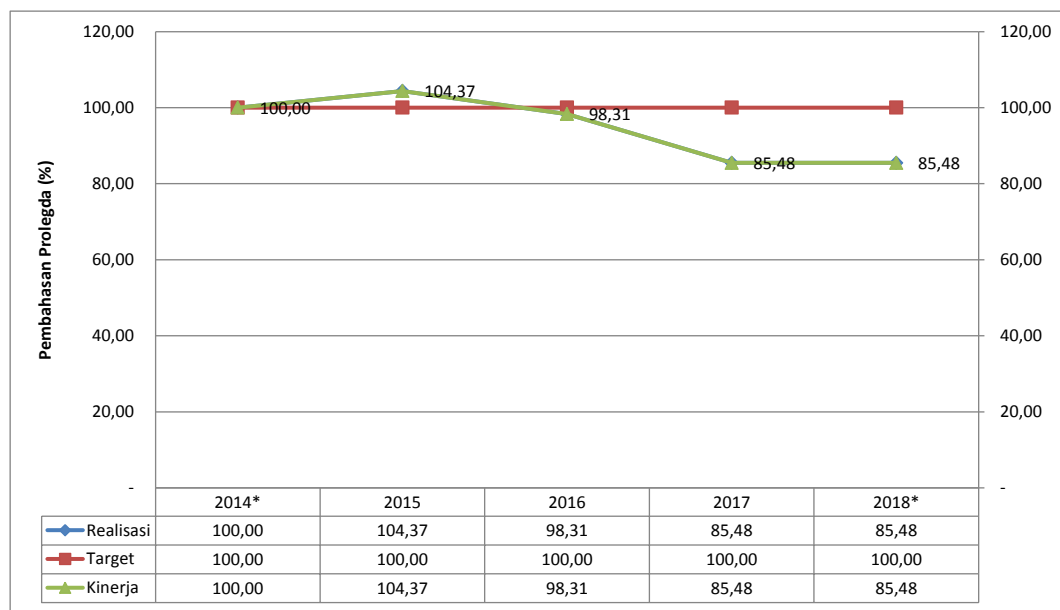
Gambar 2.146.

Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Indikator Persentase Temuan APIP Yang Ditindaklanjuti di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

Selama periode 2014 - 2018, persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti memiliki trend berfluktuatif menurun yaitu dari 100% pada tahun 2014 menurun menjadi 87,63% pada tahun 2016 dan menurun lagi menjadi 83,68% pada tahun 2017. Sebagaimana target umumnya, seharusnya persentase temuan APIP yang ditindak lanjuti adalah 100%. Dengan demikian, realisasi kinerja indikator temuan APIP yang ditindaklanjuti memiliki trend menurun yaitu dari 100 pada tahun 2014 - 2015 yang terkategori Sangat Tinggi menurun menjadi 83,68 - 87,63% yang terkategori Tinggi. Permasalahan menurunnya kinerja indikator temuan APIP yang ditindaklanjuti disebabkan oleh beberapa hal seperti (i) terbatasnya jumlah personil aparatur APIP yang hanya sebanyak 12 orang. Jumlah ideal aparatur fungsional APIP sebanyak 45 orang dan (ii) lemahnya penegakan hasil temuan APIP sehingga temuan berulang terjadi di OPD yang sama.

**2.3.4.6. Sekretariat Dewan**

Layanan urusan Penunjang Bidang Sekretariat Sewan diwakili oleh indikator Rasio Pembahasan Prolegda. Program Legislasi Daerah (Prolegda) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.



Sumber : LKPJ Inhil (2013 - 2017)

Gambar 2.147.

Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Indikator Rasio Pembahasan Prolegda di Kabupaten di Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

Selama periode 2014 - 2018, perkembangan indikator rasio pembahasan prolegda Indragiri Hilir memiliki trend berfluktuatif menurun. Pada tahun 2014, realisasi pembahasan progda Indragiri hilir capainya 100%, menurun menjadi 98,31% pada tahun 2016 dan capainya menjadi 85,48% pada tahun 2017. Seharusnya, prolegda yang telah diagendakan dapat dibahas pada tahun berkenaan. Selama priode 2014 - 2016, realisasi kinerja indikator rasio pembahasan prolegda Indragiri Hilir sebesar 98,31% - 104,37% dan terkategori tinggi. Pada tahun 2017, realisasi kinerja indikator rasio pembahasan prolegda Indragiri Hilir sebesar 85,48 dan diperkirakan pada tahun 2018 capaiannya diperkirakan sama yaitu

sebesar 85,48 dan terkategori Tinggi. Meski capaian indikator rasio pembahasan prolegda Indragiri Hilir terkategori tinggi pada tahun 2017, namun trend indikator ini yang menurun perlu diantisipasi lebih awal dengan melakukan koordinasi yang lebih baik dengan DPRD. Bila rasio pembahasan prolegda Indragiri Hilir terus menurun persentasenya akan menghambat kinerja pemerintah.

## **2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH**

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, provinsi, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah antara lain terdiri dari fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

### **2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

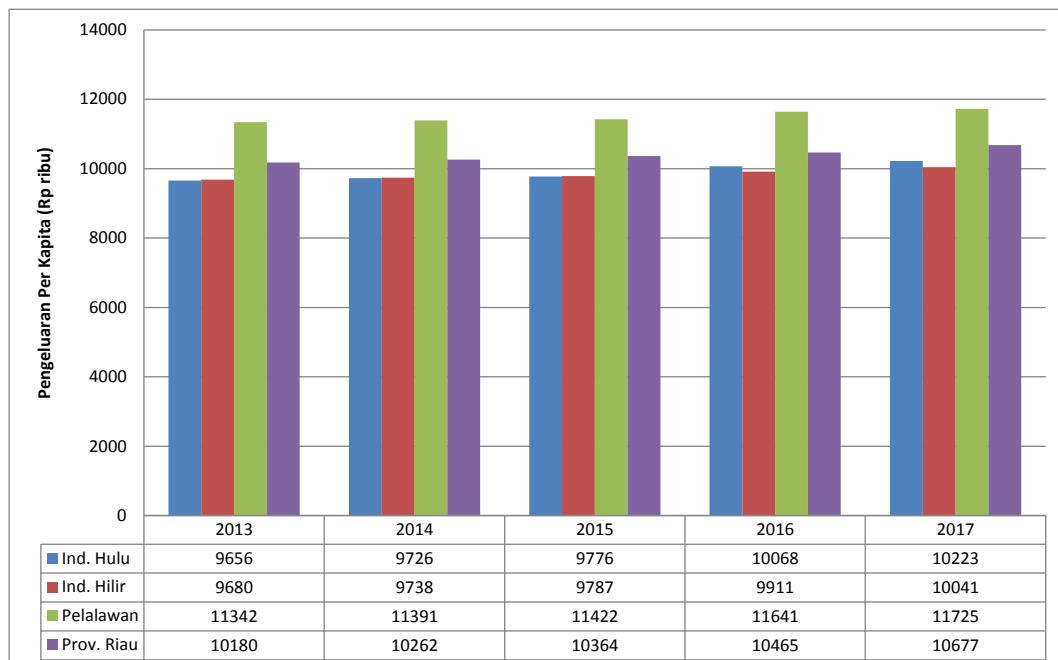
Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dianalisis melalui pengeluaran per kapita dan nilai tukar petani (NTP).

#### **2.4.1.1. Pengeluaran Per Kapita**

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan. BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Selama periode 2013-2017, pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir memiliki trend meningkat yaitu dari Rp 9.680.000 pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 10.041.000 pada tahun 2017. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan pengeluaran riil per kapita penduduk Kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 0,73% per tahun.

Capaian pengeluaran per kapita riil penduduk Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2013 – 2015 sedikit diatas Kabupaten Indragiri Hulu dan dibawah Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau. Namun pada periode 2016 – 2017, posisi pengeluaran per kapita Kabupaten Indragiri Hilir adalah yang terendah atau dibawah Kabupaten Indragiri Hulu. Kondisi ini didorong oleh relatif tingginya rata-rata pertumbuhan pengeluaran per kapita Indragiri Hulu yang rata-ratanya sebesar 1,15% per tahun, yang lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan pengeluaran per kapita Indragiri Hilir (0,73% per tahun) dan Provinsi Riau (0,96% per tahun).



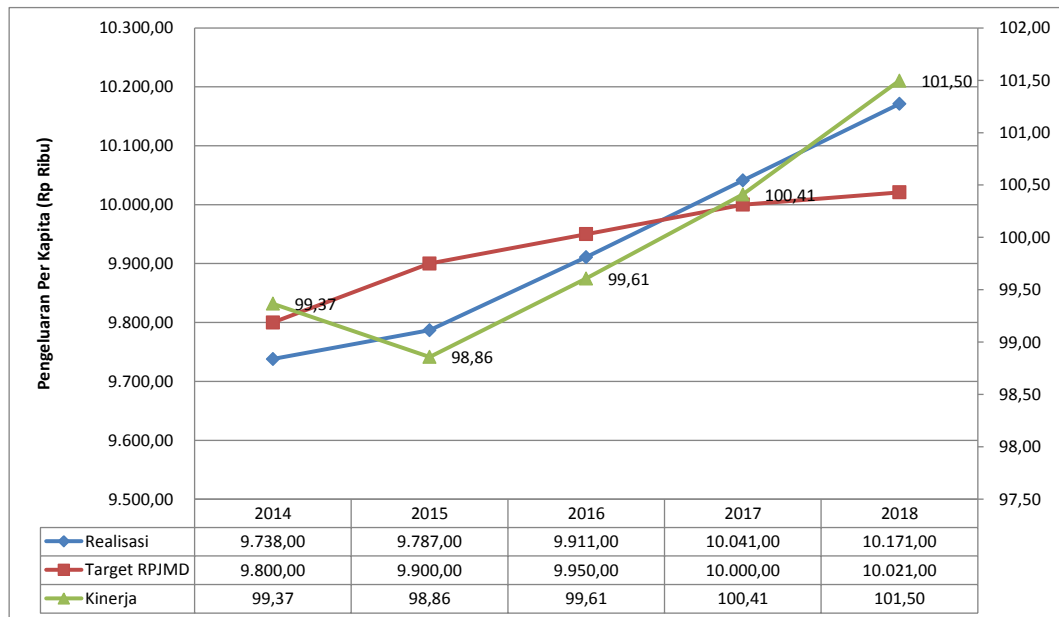
Sumber: <https://riau.bps.go.id/subject/26/index-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab3>

Gambar 2.148.

Perkembangan Pengeluaran Per kapita Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Tetangga dan Provinsi Riau Tahun 2013 – 2017

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan bahwa indikator pengeluaran per kapita Kabupaten Indragiri Hilir ditargetkan meningkat dari Rp 9.800.000 pada tahun 2014, meningkat menjadi R0 10.021.000 pada tahun 2018. Selama periode 2014 – 2016, realisasi indikator pengeluaran per kapita dibawah target dengan

capaian kinerja sebesar 98,86% - 99,61% yang terkategori sangat tinggi. Pada periode 2017, realisasi pengeluaran per kapita diatas target dengan capaian kinerja sebesar 100,41%. Pada tahun 2018, diperkirakan realisasinya juga diatas target RPJMD sehingga capaian kinerjanya sebesar 101,50%. Selama periode ini, rata-rata kinerja indikator pengeluaran per kapita sebesar 99,95% yang terkategori Sangat Tinggi.

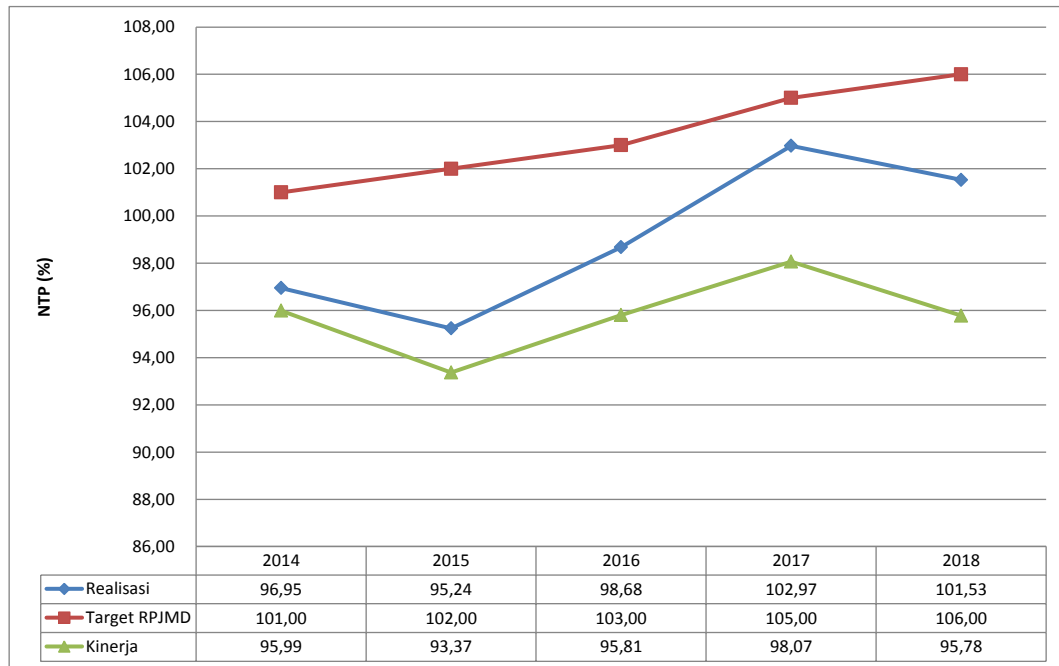


Gambar 2.149.

Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

#### 2.4.1.2. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayar oleh petani dalam melaksanakan usahatani. NTP mencerminkan efisiensi usahatani dan daya beli petani. Oleh karena NTP Kabupaten Indragiri Hilir tidak tersedia, maka NTP Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan proxy NTP Provinsi Riau.



Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

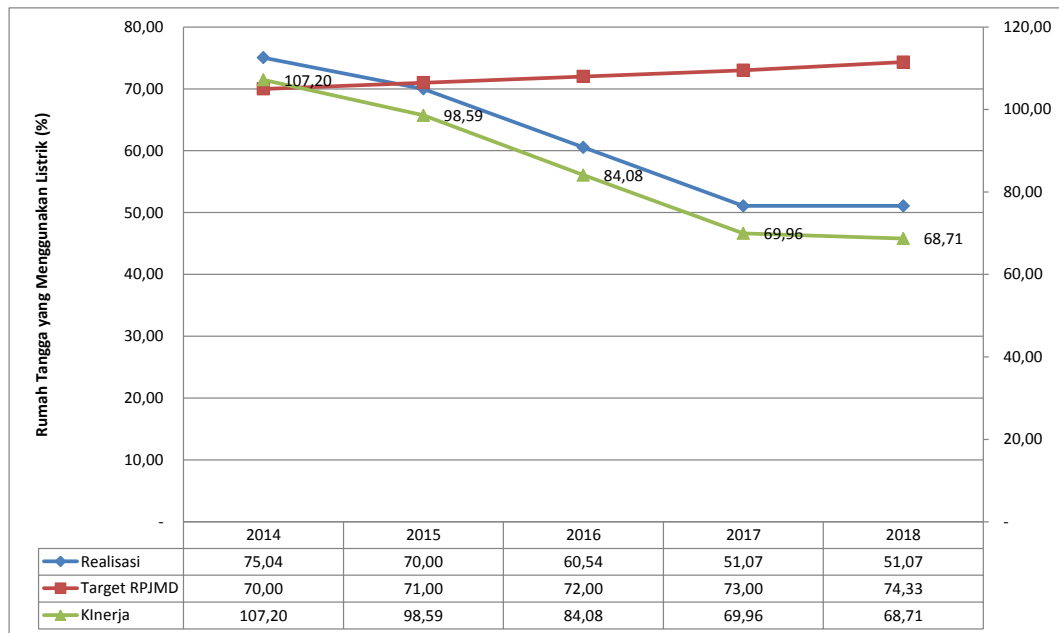
Gambar 2.150.

Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan bahwa indikator NTP terus meningkat yaitu dari 101,00 pada tahun 2014 menjadi 106,00 pada tahun 2018. Selama periode ini, realisasi indikator NTP meningkat secara berfluktuatif dan dibawah target. Meski realisasi indikator NTP selalu dibawah target namun capaian kinerja berkisar antara 93,37% - 98,07% yang terkategori Sangat Tinggi.

#### 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan menggunakan indikator persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.



Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.151.

Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Rumah tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 – 2018

### 2.4.3. Iklim Investasi

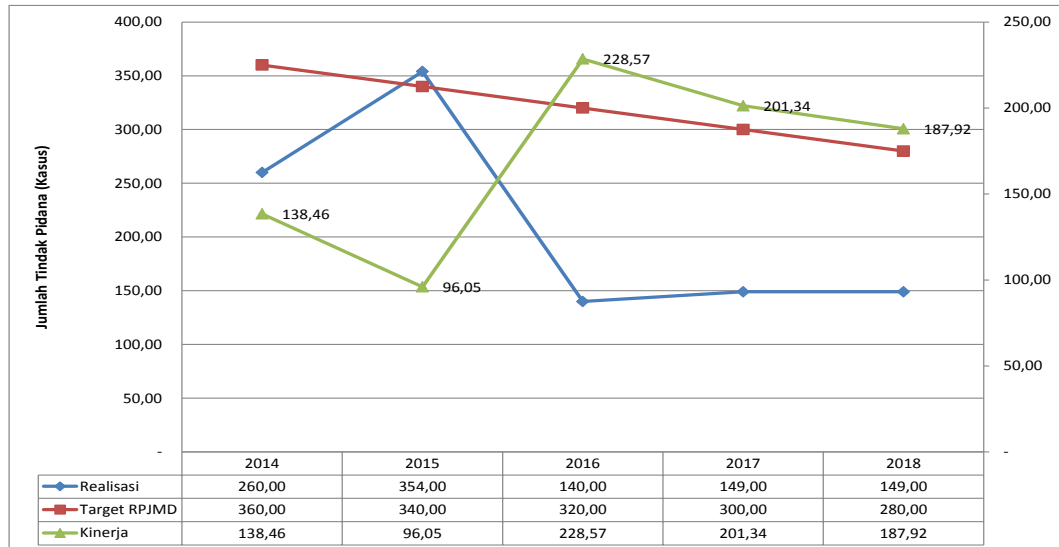
Analisis kinerja atas iklim investasi dilakukan menggunakan indikator jumlah tindak pidana dan jumlah Perda yang mendukung iklim investasi.

#### 2.4.3.1. Jumlah Tindak Pidana

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan bahwa indikator jumlah tindak pidana di Kabupaten Indragiri Hilir ditargetkan menurun dari 360 kasus pada tahun 2014 menjadi 280 kasus pada tahun 2018. Selama periode ini, realisasi indikator jumlah tindak pidana berfluktuatif menurun dan selalu dibawah target kecuali



pada tahun 2015. Capaian kinerja indikator jumlah tindak pidana berkisar antara 96,05% -228,57% yang terkategori Sangat Tinggi.



Gambar 2.152.

Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

#### 2.4.3.2. Peraturan Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi

Kondisi daerah yang kondusif akan mendorong meningkatnya iklim investasi karena investor ingin modal yang telah ditanamkan dapat kembali lagi. Untuk itu diperlukan kepastian hukum dan supremasi hukum harus ditegakkan serta didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha di Kabupaten Indragiri Hilir maka disusun beberapa peraturan daerah yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya iklim usaha yang kondusif. Peraturan tersebut penting karena menjadi pedoman bagi aparatur maupun masyarakat umum dalam menjalankan aktivitas usaha sehingga jelas mana yang boleh dan mana yang dilarang. Beberapa peraturan daerah tersebut antara lain sebagaimana Tabel 2.10.

Tabel 2.31.  
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Yang Mendukung Iklim Usaha

NO	NOMOR PERDA	TENTANG
1	2 Tahun 2013	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Indragiri
2	4 Tahun 2013	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
3	7 Tahun 2013	Bangunan Gedung
4	1 Tahun 2014	Perubahan atas Perda Kab. Inhil Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
5	2 Tahun 2014	Retribusi Pelayanan Pasar
6	3 Tahun 2014	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
7	8 Tahun 2014	Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
8	9 Tahun 2014	Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Puri Husada Tembilahan
9	1 Tahun 2015	Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah
10	5 Tahun 2015	Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya
11	9 Tahun 2015	Perubahan ke empat atas Perda Kab. Inhil Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
12	10 Tahun 2015	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kepada PT. Bank Riau Kepri
13	11 Tahun 2015	Penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Indragiri
14	6 Tahun 2016	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
15	10 Tahun 2016	Pencabutan Perda Nomor 56 Tahun 2000 tentang Pajak Hasil Pertanian dan Perikanan
16	11 Tahun 2016	Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat
17	6 Tahun 2017	Pedoman Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
18	7 Tahun 2017	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	9 Tahun 2017	Penyelenggaraan Usaha Pariwisata
20	1 Tahun 2018	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Kepada PT. Bank Riau Kepri
21	2 Tahun 2018	Penambahan Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Kepada PD. BPR Gemilang
22	3 Tahun 2018	Tata Niaga Kelapa

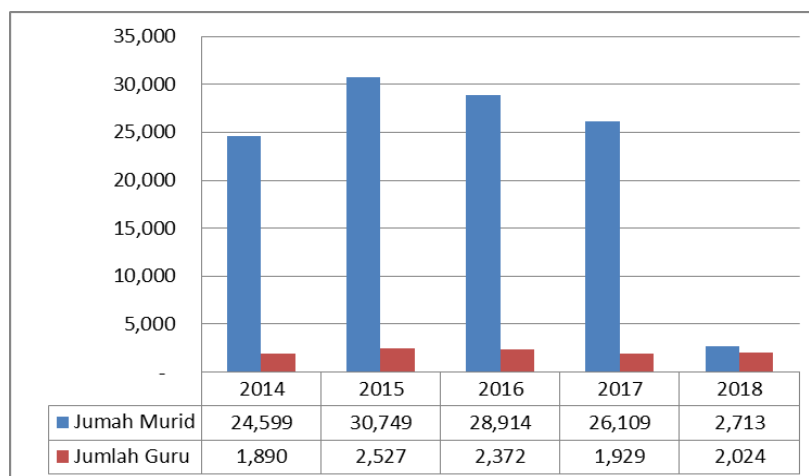
Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. Indragiri Hilir (2018)

Guna percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir maka telah di-Perda-kan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya melalui Perda Nomor 5 Tahun 2015. Program ini memberikan kewenangan kepada desa sekaligus pendanaannya sehingga Pemerintahan Desa diharapkan dapat mandiri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah desanya.

Program DMIJ bertujuan sebagai penggerak agar pembangunan/kegiatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir bercirikan daerah, artinya mengikuti khasanah Indragiri Hilir.

Program DMIJ dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui pola Pendampingan. Pendamping Program DMIJ direkrut secara profesional terhadap pelaku-pelaku pemberdayaan masyarakat yang sudah berpengalaman dalam mendampingi masyarakat seperti Program PNPM Mandiri, RIS PNPM, PISEW, Program Pemberdayaan Desa, PAMSIMAS, anggota LSM penggerak dan pelaku Pemberdayaan, dan lain-lain

Program DMIJ tidak hanya membangun sarana infrastruktur, tapi juga memadukan arahan pembinaan yang kemudian di integrasikan dengan program Posyandu maupun pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD).



Gambar 2.153.

Perkembangan Jumlah Guru dan Murid Magrib Mengaji  
melalui Program DMIJ 2014-2018

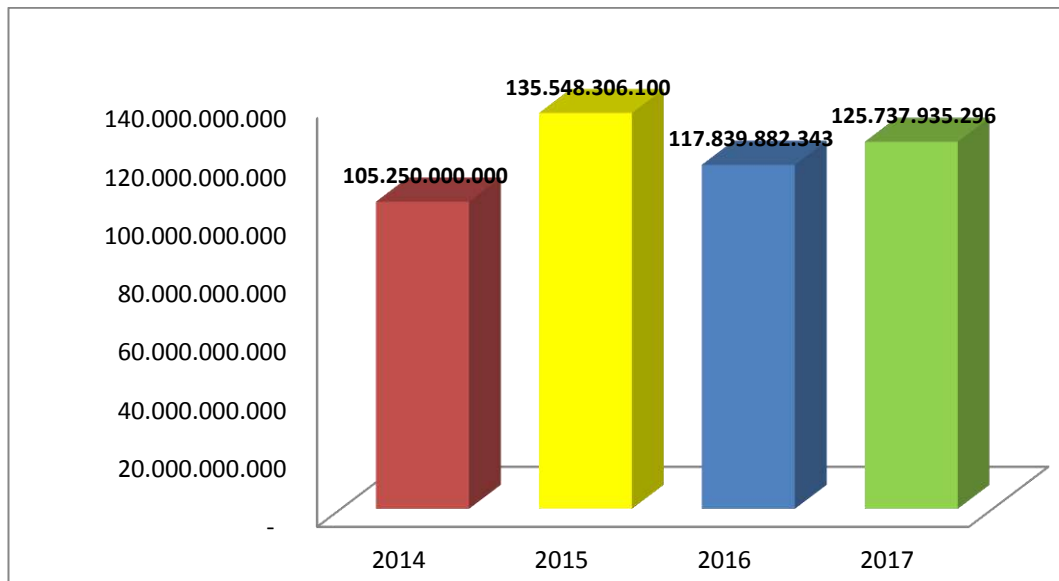
Tabel 2.32

Capaian Pelaksanaan Program DMIJ Bidang Infrastruktur  
Tahun 2015 - 2018

No	Jenis Kegiatan	2015			2016			2017			2018		
		Unit	Panjang (m)	Luas (m2)	Unit	Panjang (m)	Luas (m2)	Unit	Panjang (m)	Luas (m2)	Unit	Panjang (m)	Luas (m2)
1	Jalan Rabat Beton	-	73,552	-	-	51,184	-	-	10,705	-	-	105,781	-
2	Jalan Sirtu	-	7,171	-	-	12,062	-	-	2,820	-	-	14,435	-
3	Badan Jalan/Tanggul	-	22,337	-	-	33,182	-	-	7,071	-	-	177,646	-
4	Jerambah	-	1,610	-	2	2,521	-	-	586	-	-	6,425	-
5	Jembatan	111	1,667	-	30	466	-	14	-	-	122	-	-
6	Box Culvert / Gorong-gorong	8	-	-	1	5	-	59	-	-	97	-	-
7	Tembok Penahan Tanah/Turap	-	1,102	-	2	1,980	-	9	5	49	9	1,583	-
8	Dermaga	33	-	-	6	16	-	7	3	-	17	328	-
9	Air Bersih	30	-	-	36	120	-	5	-	-	48	-	-
10	MCK	-	-	-	12	6	-	2	-	-	5	-	-
11	Drainase	-	294	-	10	-	-	800	159	-	965	1,980	-
12	Pasar Desa	5	-	320	1	10	90	3	-	-	13	39	450
13	Listrik Desa	-	-	-	4	3	6	5	-	-	5	-	-
14	Halaman	-	-	-	-	-	-	-	-	477	-	80	1,149
15	Normalisasi Kanal	-	-	-	75	4,319	1,777	-	1,238	-	-	36,850	-
16	Lain-lain Sarana/Prasarana	34	6,393	1,517	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Gedung Pendidikan	9	-	734	-	-	-	2	216	54	-	-	-
18	Perpustakaan Desa	-	-	-	1	62	814	-	-	-	17	216	1,226
19	Lain-lain Pendidikan	2	-	249	-	-	-	26	-	-	-	-	-
20	Gedung Kesehatan	1	-	35	1	-	-	3	-	-	27	-	100
21	Lain-lain Kesehatan	4	7	40	4	78	728	-	-	-	-	-	-
22	Kantor Desa	22	-	1,000	4	29	150	5	-	564	3	-	386
23	Balai Desa / Gedung Serbaguna	7	-	885	1	96	-	2	-	174	1	-	-
24	Pagar	-	254	-	1	-	-	2	40	-	-	-	-
25	Gapura/Gerbang	6	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	564
26	Pesanggrahan	14	-	169	-	-	-	2	-	63	2	-	174
27	Bak Air	57	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40	-
28	Lain-Lain	35	-	668	-	-	-	-	-	-	1	-	-

TOTAL										2	-	63
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	----

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hilir (2018)



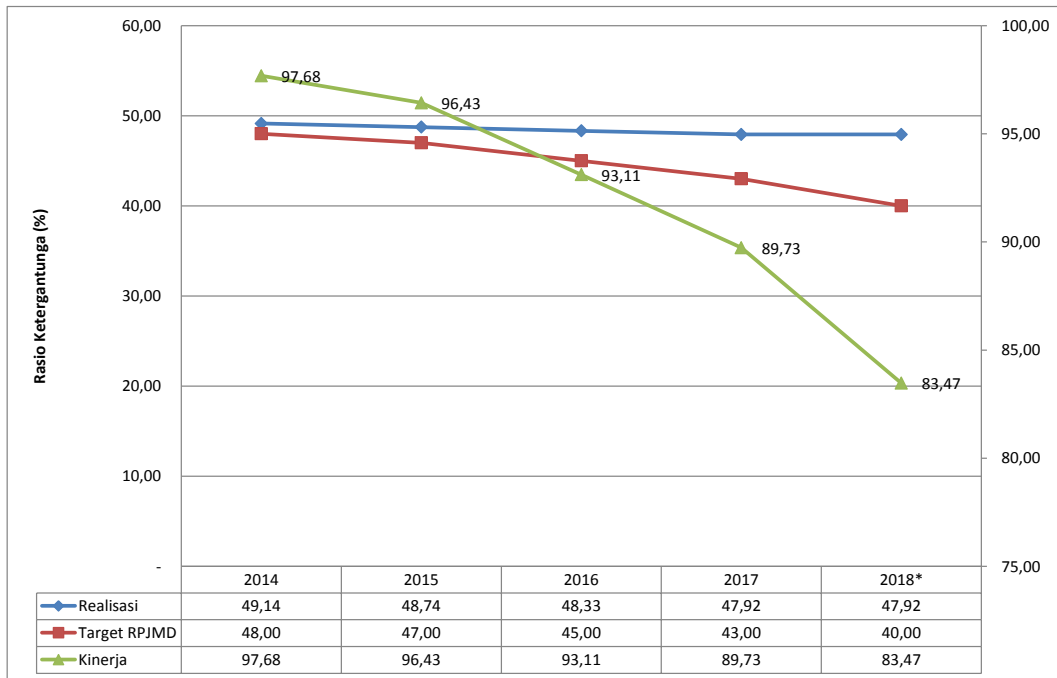
Sumber : Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hilir (2018)

Gambar 2.154.

Jumlah Dana yang Sudah Disalurkan melalui Program DMII 2014-2017

#### 2.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia

Analisis kinerja sumberdaya manusia dilakukan menggunakan indikator rasio ketergantungan (defendency ratio). Perhitungan rasio ketergantungan diperoleh dari perbandingan antara jumlah penduduk umur 0 - 14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 - 64 tahun (angkatan kerja). Angka ketegantungan ini menunjukkan berapa banyak beban penduduk usia non produktif (bukan tenaga kerja) yang harus ditanggung oleh seorang penduduk produktif (tenaga kerja).



Sumber: <https://sipd.kemendagri.go.id>

Gambar 2.155.

Perkembangan Realisasi, Target RPJMD dan Capaian Kinerja Indikator Rasio Ketergantungan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

Hasil Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Indragiri Hilir terkait dengan capaian kinerja (target kinerja dan realisasi kinerja) penyelenggaraan urusan pemerintah selama periode 2014 - 2018 dirangkum dalam Tabel 2.33 dan capaian kinerja SPM pada Tabel 2.34. berikut:

Tabel 2.33.  
 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah  
 Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018*	
<b>I</b>	<b>KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>											
<b>1.1.</b>	<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>											
1.1.1.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp Milyar)	37.174	39.591	42.243	45.158	48.158	37.161	37.920	39.755	41.627	43.501	=
1.1.2.	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (%)	7,00	6,50	6,70	6,90	7,00	6,88	2,04	4,84	4,70	4,84	<
1.1.3.	Inflasi (%)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	10,06	2,06	2,58	4,27	4,02	>
1.1.4.	PDRB Per Kapita (Rp Juta/Kap/Tahun)	52,73	55,37	58,14	61,05	61,10	53,50	53,89	55,76	57,64	59,46	=
1.1.5.	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	52,40	49,36	46,33	45,84	44,08	52,39	56,85	56,82	55,40	54,02	<
1.1.6.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,50	7,00	6,50	6,30	6,03	7,51	8,11	7,99	7,70	7,60	<
<b>1.2.</b>	<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>											
1.2.1.	Indeks Pembangunan Manusia (%)	63,90	64,90	65,50	66,50	67,50	63,80	64,80	65,35	66,17	66,30	=
1.2.2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	10,67	11,40	12,00	12,50	13,00	10,67	11,38	11,58	11,88	11,88	=
1.2.3.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	6,81	6,82	6,94	7,18	7,18	<
1.2.4.	APK SD/MI (%)	107,00	109,00	111,00	113,00	115,00	106,00	109,56	110,00	101,73	101,73	<
1.2.5.	APK SMP/MTs (%)	112,00	100,00	101,00	103,00	105,00	97,84	99,53	95,69	100,85	100,85	<
1.2.6.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	67,60	68,50	69,00	69,50	70,00	66,54	66,84	66,95	67,07	67,07	=
1.2.7.	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	1,20	1,10	1,10	1,00	1,00	1,40	1,40	1,30	1,20	1,10	<
1.2.8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,00	6,00	5,00	4,00	3,00	3,75	4,87	7,16	4,08	3,74	=

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018*	
<b>1.3.</b>	<b>Fokus Seni Budaya dan Olahraga</b>											
1.3.1.	Cakupan Fasilitasi Seni (%)	55,00	60,00	60,00	70,00	80,00	50,75	50,75	50,75	50,75	50,75	<
1.3.2.	Jumlah Lapangan Olahraga (Lapangan)	930,00	950,00	970,00	990,00	1.000,00	926	952	961	970	979	=
<b>II</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>											
<b>2.1.</b>	<b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b>											
<b>2.1.1.</b>	<b>Pendidikan</b>											
2.1.1.1.	APM SD/MI (%)	99,00	98,00	98,00	98,20	98,30	96,27	96,87	96,20	94,62	94,62	>
2.1.1.2.	APM SMP/MTs (%)	65,00	67,00	67,00	68,00	69,00	75,39	79,12	79,32	79,96	79,96	>
2.1.1.3.	APS 7 - 12 Tahun (%)	98,60	99,00	99,10	98,20	99,30	98,51	98,99	98,43	97,56	97,56	=
2.1.1.4.	APS 13 - 15 tahun (%)	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	89,04	90,56	91,01	90,77	90,77	=
2.1.1.5.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10	0,63	0,41	0,20	0,05	0,05	>
2.1.1.6.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10	0,59	0,68	0,43	0,07	0,07	>
2.1.1.7.	Rasio Ketersediaan Sekolah Thd Penduduk Usia 7 - 12 Tahun (%)	82,00	83,50	84,00	85,50	86,00	81,58	79,43	75,79	72,32	72,32	<
2.1.1.8.	Rasio Ketersediaan Sekolah Thd Penduduk Usia 13 - 15 Tahun (%)	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	68,39	78,51	73,36	68,55	64,05	=
2.1.1.9.	Rasio ketersediaan Guru Thd Murid SD/MI (Guru Per 10.000 Murid)	725,00	700,00	650,00	600,00	550,00	658,69	772,67	746,79	721,78	697,61	<
2.1.1.10.	Rasio ketersediaan Guru Thd Murid SMP/MTs (Guru Per 10.000 Murid)	1.010,00	1.000,00	950,00	900,00	800,00	754,63	977,19	991,09	1.005,19	1.005,19	<
2.1.1.11.	Guru Yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV (%)	30,00	36,00	42,00	48,00	56,00	14,98	35,81	66,19	80,82	84,61	>
<b>2.1.2.</b>	<b>Kesehatan</b>											
2.1.2.1.	Rasio Rumah Sakit (Per 1.000 Penduduk)	0,0060	0,0070	0,0080	0,0090	0,0100	0,0043	0,0043	0,0042	0,0042	0,0042	<



RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018*	
2.1.2.2.	Rasio Puskesmas (Per 1.000 Penduduk)	0,0365	0,0388	0,0392	0,0392	0,0430	0,0390	0,0380	0,0380	0,0370	0,0370	=
2.1.2.3.	Rasio Dokter Spesialis (Per 1.000 Penduduk)	0,0220	0,0300	0,0500	0,0750	0,1060	0,0220	0,0210	0,0290	0,0370	0,0370	<
2.1.2.4.	Rasio Dokter Umum (Per 1.000 Penduduk)	0,0850	0,1260	0,1770	0,2300	0,3000	0,0710	0,0710	0,1080	0,1080	0,1080	<
2.1.2.5.	Rasio Dokter Gigi (Per 1.000 Penduduk)	0,0502	0,0780	0,0800	0,0900	0,1000	0,0027	0,0024	0,0035	0,0039	0,0039	<
2.1.2.6.	Rasio Perawat (Per 1.000 Penduduk)	0,690	0,739	0,800	0,900	1,000	0,4520	0,4590	0,4420	0,7890	0,7890	<
2.1.2.7.	Rasio Bidan (Per 1.000 Penduduk)	0,373	0,383	0,450	0,550	0,650	0,4850	0,2560	0,3690	0,5950	0,5950	>
<b>2.1.3.</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>											
2.1.3.1.	Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Baik (%)	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	16,61	10,36	14,22	14,22	14,22	<
2.1.3.2.	Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Mantap (%)	65,00	66,00	68,00	70,00	75,00	73,87	56,29	57,12	59,23	59,23	<
2.1.3.3.	Proporsi Jembatan Dengan Kondisi Baik (%)	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	57,79	59,28	61,96	35,96	35,96	>
2.1.3.4.	Proporsi Irigasi Dalam kondisi Baik (%)	10,00	15,00	25,00	30,00	40,00	9,17	9,17	26,00	27,00	28,00	<
2.1.3.5.	Ratio RTH Per Satuan Wilayah Ber HPL/HGB (%)	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	71,43	71,43	73,22	75,00	76,00	=
<b>2.1.4.</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Pemukiman</b>											
2.1.4.1.	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	27,00	40,00	60,00	80,00	98,33	26,00	13,28	16,03	18,77	18,77	<
2.1.4.2.	Rumah Tidak Layak Huni (%)	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,98	0,99	0,75	0,50	0,50	=
2.1.4.3.	Persentase luasan pemukiman kumuh diperkotaan (%)	30,00	28,00	26,00	24,00	20,00	31,23	25,00	25,00	25,00	25,00	=
<b>2.1.5.</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>											

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018*	
2.1.5.1.	Rasio Rumah Ber IMB (%)	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	0,13	0,13	0,68	1,22	2,14	<
2.1.5.2.	Rasio Personil Satpol PP (Per 10.000 Penduduk)	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	<
2.1.5.3.	Cakupan Penegakan Peraturan (%)	87,00	88,00	91,00	94,00	100,00	86,00	85,70	86,00	90,50	95,00	=
2.1.5.4.	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (%)	45,00	60,00	75,00	90,00	100,00	5,00	10,00	20,00	10,00	10,00	<
<b>2.1.6.</b>	<b>Sosial</b>											
2.1.6.1.	Penyandang Cacat Baik Fisik Maupun Mental Serta Lanjut Usia Yang Tidak Potensial Yang telah Menerima Jaminan Sosial (%)	30,00	50,00	70,00	90,00	100,00	25,87	49,08	69,54	90,00	90,00	=
2.1.6.2.	PMKS penerima bantuan sosial (%)	25,00	40,00	60,00	80,00	100,00	22,47	39,80	59,90	80,00	80,00	=
<b>2.2.</b>	<b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>											
<b>2.2.1.</b>	<b>Tenaga Kerja</b>											
2.2.1.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	59,00	63,90	64,00	64,20	64,50	59,70	63,84	63,06	62,27	62,27	=
2.2.1.2.	Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%)	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	21,00	30,00	56,37	82,74	82,74	>
2.2.1.3.	Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan (%)	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	67,00	100,00	87,50	75,00	75,00	<
<b>2.2.2.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>											
2.2.2.1.	Indeks Pembangunan Gender (%)	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	80,99	81,10	81,79	81,47	82,39	=
2.2.2.2.	Indeks Pemberdayaan Gender (%)	58,00	59,00	60,00	61,00	62,00	57,39	59,08	59,90	60,73	62,30	=
2.2.2.3.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	80,13	80,13	84,14	88,14	90,98	>

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018*	
<b>2.2.3.</b>	<b>Pangan</b>											
2.2.3.1.	Ketersediaan Pangan Utama (%)	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	92,54	93,55	92,83	100,00	100,00	=
2.2.3.2.	Skor Pola Pangan Harapan (%)	82,00	84,00	85,00	88,00	90,00	80,40	79,50	84,50	88,00	88,00	=
<b>2.2.4.</b>	<b>Pertanahan</b>											
2.2.4.1.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	42,00	43,00	44,00	45,00	46,00	41,39	41,39	41,39	41,39	41,39	=
<b>2.2.5.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>											
2.2.5.1.	Penegakan Hukum Lingkungan (%)	60,00	80,00	90,00	95,00	100,00	50,00	75,00	85,00	95,00	95,00	=
2.2.5.2.	Persentase Penanganan Sampah (%)	83,00	85,00	90,00	95,00	100,00	81,74	81,78	81,64	81,50	81,70	<
<b>2.2.6.</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>											
2.2.6.1.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (%)	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	76,84	83,12	83,54	83,95	84,23	<
2.2.6.2.	Kepemilikan KTP (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,83	99,92	57,00	57,00	57,00	<
2.2.6.3.	Kepemilikan Akta Kelahiran (Per 1.000 Penduduk)	350,00	500,00	650,00	800,00	1.000,00	328,17	348,97	459,49	570,00	671,28	<
<b>2.2.7.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>											
2.2.7.1.	Cakupan Program Desa Maju Inhil Jaya (Desa)	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	=
2.2.7.2.	Jumlah Desa Maju (Desa)	30	60	120	180	197	2	2	2	2	2	<
2.2.7.3.	PKK Aktif (%)	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	87,16	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.2.7.4.	Posyandu Aktif (%)	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	69,75	39,50	89,82	100,00	100,00	=
<b>2.2.8.</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>											
2.2.8.1.	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	67,89	68,50	69,00	69,22	69,57	68,01	68,76	68,85	70,76	70,76	=

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018*	
2.2.8.2.	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	77,00	94,00	95,00	96,00	100,00	76,35	93,45	83,69	73,92	73,92	<
2.2.8.3.	Ratio PPKBD Satu Setiap Desa/Kelurahan (%)	50,00	70,00	80,00	90,00	100,00	90,00	97,26	98,63	100,00	100,00	>
<b>2.2.9.</b>	<b>Perhubungan</b>											
2.2.9.1.	Tersedianya Angkutan Umum Yang melayani Trayek Yang Telah Tersedia Jaringan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten (%)	70,00	72,00	73,00	74,00	75,00	50,00	50,00	61,50	73,00	73,00	=
2.2.9.2.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan pada jalan kabupaten/kota (%)	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	36,66	37,20	53,60	70,00	75,00	=
2.2.9.3.	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan (%)	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	52,09	100,00	90,00	80,00	85,00	<
<b>2.2.10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>											
2.2.10.1	Pelaksanaan diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui website (media online)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.2.10.2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%)	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	50,00	50,00	75,00	100,00	100,00	>
<b>2.2.11.</b>	<b>Koperasi, Usaha kecil dan Menengah</b>											
2.2.11.1.	Koperasi Aktif (%)	50,00	52,00	55,00	60,00	70,00	47,89	49,70	49,41	66,05	66,05	>
2.2.11.2.	Usaha Mikro dan Kecil (%)	98,00	98,50	99,00	99,50	99,50	97,96	97,90	82,45	67,00	67,00	<

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018*	
<b>2.2.12.</b>	<b>Penanaman Modal</b>											
2.2.11.1.	Realisasi PMDN (Rp Milyar)	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000	21.860	21.986	24.700	2.230	8.730	<
2.2.11.2.	Realisasi PMA (USD Juta)	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	-	15,00	3,00	-	84,00	<
<b>2.2.13.</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>											
2.2.13.1.	Jumlah Prestasi olahraga (Kejuaraan)										4	<
<b>2.2.14</b>	<b>Statistik</b>											
2.2.14.1.	Buku "Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka" (Judul)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	=
2.2.14.1.	Kecamatan Dalam Angka (Judul)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	=
<b>2.2.15</b>	<b>Persandian</b>											
<b>2.2.16</b>	<b>Kebudayaan</b>											
2.2.16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Event)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	=
2.2.16.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (Unit)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	=
<b>2.2.17.</b>	<b>Perpustakaan</b>											
2.2.17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000	10.882	3.796	4.318	4.972	4.972	<
2.2.17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan (Buku)	10.000	20.000	25.000	30.000	40.000	6.160	22.610	22.736	22.862	22.862	=
<b>2.2.18.</b>	<b>Kearsipan</b>											
2.2.18.1	Pengelolaan arsip secara baku (%)	20,00	35,00	45,00	60,00	80,00	16,98	30,36	30,36	30,36	30,36	<
2.2.18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (Orang)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	3,00	3,00	=

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018*	
<b>2.3.</b>	<b>Layanan Pilihan</b>											
<b>2.3.1.</b>	<b>Pariwisata</b>											
2.3.1.1.	Kunjungan Wisatawan (Orang)	2.500	2.800	3.000	3.300	3.500	2.510	2.890	3.815	3.115	3.115	=
<b>2.3.2.</b>	<b>Pertanian</b>											
2.3.2.1.	Produktivitas Padi (Ton GKG/Hektar)	3,90	3,93	3,95	4,00	4,21	3,84	3,90	4,43	4,02	4,02	=
2.3.2.2.	Produksi beras (Ton)	81.562	82.817	84.071	85.326	872.087	61.344	69.839	56.415	56.415	56.415	<
2.3.2.3.	Produktivitas Kelapa (Ton Koppa/Hektar)	0,85	0,90	0,95	1,00	1,05	1,19	1,19	1,14	1,19	1,19	>
2.3.2.4.	Produktivitas kelapa sawit (Ton CPO/Hektar)	3,20	3,25	3,30	3,40	3,50	3,50	3,50	3,34	2,53	2,53	<
2.3.2.5.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	47,00	46,50	46,00	45,50	45,00	48,27	48,15	46,89	46,44	45,63	=
<b>2.3.3.</b>	<b>Perdagangan</b>											
2.3.3.1.	Nilai Ekspor bersih Perdagangan (USD Juta)	300,93	310,93	320,93	330,93	340,93	309,93	195,86	184,88	184,88	184,88	<
2.3.3.2.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	13,60	13,70	13,90	14,00	15,00	13,74	13,91	13,94	13,98	14,02	=
<b>2.3.4.</b>	<b>Perindustrian</b>											
2.3.4.1.	Nilai produksi usaha menengah kecil (Rp Juta)	54.000	56.000	57.000	58.500	59.500	53.922	53.502	57.462	58.083	58.710	=
2.3.4.2.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.	27,00	28,00	29,00	30,00	31,00	27,97	28,31	28,19	28,26	28,32	<
<b>2.3.5.</b>	<b>Transmigrasi</b>											
<b>2.3.6.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>											
2.3.6.1.	Produksi Perikanan (Ton)	55.000	57.000	59.000	61.000	63.000	54.084	52.052	52.879	57.081	57.081	=
2.3.6.2.	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	36,00	36,50	37,00	37,50	38,00	34,50	35,62	37,15	38,67	38,67	>

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018*	
<b>2.4.</b>	<b>Urusan Penunjang</b>											
<b>2.4.1.</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>											
2.4.1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.2.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2.4.1.3.	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
<b>2.4.2.</b>	<b>Keuangan</b>											
2.4.2.1.	Opini BPK (Opini)	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	=
<b>2.4.3.</b>	<b>Kepegawaian Serta Pendidikan dan Latihan</b>											
2.4.3.1.	Pembinaan PNS melalui Pemberian Hukuman Disiplin (SK)						9,00	24,00	26,00	7,00	7,00	=
<b>2.4.4.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>											
2.4.4.1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00	50,00	60,00	65,00	65,00	65,00	<
<b>2.4.5.</b>	<b>Pengawasan</b>											
2.4.5.1.	Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	55,00	47,29	44,69	47,21	47,21	<
<b>2.4.6.</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>											
2.4.6.1.	Rasio Pembahasan Prolegda	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	104,37	98,31	85,48	85,48	<
III.	<b>Aspek Daya Saing</b>											

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018*	
<b>3.1.</b>	<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>											
3.1.1.	Pengeluaran Per Kapita (Rp Ribu)	9.800,00	9.900,00	9.950,00	10.000,00	10.021,00	9.738,00	9.787,00	9.911,00	10.041,00	10.171,00	>
3.1.2.	Nilai Tukar Petani (%)	101,00	102,00	103,00	105,00	106,00	96,95	95,24	98,68	102,97	101,53	=
<b>3.2.</b>	<b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>											
3.2.1.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	70,00	71,00	72,00	73,00	74,33	75,04	70,00	60,54	51,07	51,07	<
<b>3.3.</b>	<b>Fokus Iklim Investasi</b>											
3.3.1.	Jumlah Tindak Pidana (Kasus)	360,00	340,00	320,00	300,00	280,00	260,00	354,00	140,00	149,00	149,00	>
<b>3.4.</b>	<b>Fokus Sumberdaya Manusia</b>											
3.4.1.	Rasio Ketergantungan (%)	48,00	47,00	45,00	43,00	40,00	49,14	48,74	48,33	47,92	47,92	<



**Tabel 2.34**  
**Rekap Pencapaian Indikator SPM Bidang Pendidikan Dasar, Kesehatan, PU-PR, Perumahan Rakyat, Pemerintahan Dalam Negeri dan Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 - 2018**

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM		Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)	
			2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*		
<b>I</b>	<b>Pendidikan</b>													
	<b>A. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota</b>													
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	SD	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	<	
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	
		SMP	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	<	
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	SD	100	100	100	100	100	19,73	30,12	96,71	89,73	89,73	<	
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SD	100	100	100	100	100	19,73	34,36	68,99	89,73	89,73	<	
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	30,56	95,56	96,32	96,69	96,69	=	
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SMP	100	100	100	100	100	30,56	80,00	91,18	96,69	96,69	=		

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM		Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)	
			2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*		
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	SMP	100	100	100	100	100	-	14,81	41,18	55,88	55,88	<	
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	-	14,07	35,29	55,88	55,88	<	
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	SD	100	100	100	100	100	31,91	37,64	69,77	81,58	81,58	<	
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	-	25,93	75,74	79,78	79,78	<	
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SMP	100	100	100	100	100	-	23,70	68,38	-	-	<	
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	SD	100	100	100	100	100	36,94	36,94	83,91	98,06	98,06	=	
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SD	100	100	100	100	100	88,39	95,56	96,71	98,06	98,06	=	
6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah	SMP	100	100	100	100	100	-	20,74	57,35	73,53	73,53	<	

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM		Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)	
			2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*		
	khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	SD	100	100	100	100	100	40,46	48,84	91,09	97,29	97,29	=	
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SD	100	100	100	100	100	40,46	47,88	63,18	97,29	97,29	=	
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	SMP	100	100	100	100	100	-	57,78	69,12	76,84	76,84	,	
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	-	65,93	74,26	76,84	76,84	<	
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn	SMP	100	100	100	100	100	-	57,78	25,74	36,03	36,03	,	
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	SD	100	100	100	100	100	50,87	54,83	62,21	74,03	74,03	<	
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah	SMP	100	100	100	100	100	-	57,78	97,06	99,26	99,26	=	

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM		Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)	
			2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*		
	memiliki sertifikat pendidik	MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D- IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	SD	100	100	100	100	100	94,44	91,23	100,00	100,00	100,00	=	
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	SD	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=	
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=	
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	SD	100	100	100	100	100	30,75	32,43	100,00	100,00	100,00	=	
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	30,75	33,33	100,00	100,00	100,00	=	
		MTs	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-	-	
<b>B. Pendidikan Dasar Oleh Satuan Pendidikan</b>			100	100	100	100	100							
15	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan Pkn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	SD	100	100	100	100	100	51,71	51,71	59,51	31,49	31,49	<	
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SD	100	100	100	100	100	0,08	33,33	0,47	31,49	31,49	<	

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM		Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)	
			2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*		
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	SMP	100	100	100	100	100	-	7,96	8,39	17,09	17,09	<	
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	-	14,07	18,38	17,09	17,09	<	
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	SD	100	100	100	100	100	16,05	19,31	29,07	33,91	33,91	<	
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	SD	100	100	100	100	100	9,86	13,13	17,64	19,36	19,36	<	
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	60,74	21,48	72,06	90,44	90,44	<	
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	SD	100	100	100	100	100	26,69	30,50	71,51	73,26	73,26	<	
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	-	21,48	72,06	88,24	88,24	<	
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM		Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)	
			2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :		100	100	100	100	100	24,76	30,17	83,56				
	Kelas I - II : 18 jam per minggu	SD	100	100	100	100	100	24,76	32,43	81,59	87,40	87,40	<	
	Kelas III : 24 jam per minggu	MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kelas IV – VI : 27 jam per minggu	SMP	100	100	100	100	100	24,76	21,48	91,11	94,81	94,81	=	
	Kelas VII – IX : 27 jam per minggu	MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	SD	100	100	100	100	100	24,76	32,43	100,00	100,00	100,00	=	
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	-	21,48	100,00	100,00	100,00	=	
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	SD	100	100	100	100	100	62,48	74,32	100,00	100,00	100,00	=	
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	-	72,59	99,26	100,00	100,00	=	
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan	SD	100	100	100	100	100	50,48	100,00	99,42	100,00	100,00	=	

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM		Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)	
			2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*		
	kemampuan belajar peserta didik	MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	SMP	100	100	100	100	100	50,48	100,00	92,65	100,00	100,00	=	
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	SD	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=	
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	100,00	100,00	99,26	100,00	100,00	=	
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik	SD	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=	
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=	
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhira (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau	SD	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=	
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=	

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM		Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)	
			2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*		
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)		100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
27	IP 27.1	SD	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IP 27.2	SD	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
		MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IP 27.3	SD	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
		MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMP	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
MTs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II	<b>Kesehatan</b>													
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		100										<	



RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM		Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*	
		-		100	100	100	100	-	73,96	71	77	77	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	-	100	100	100	100	100	-	100	68	76	76	<
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	-	100	100	100	100	100	-	71,14	79	72	72	<
4	Pelayanan kesehatan balita	-	100	100	100	100	100	-	73,46	48	55	55	<
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	-	100	100	100	100	100	-	28,53	93	81	81	<
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	-	100	100	100	100	100	-	61,47	100	100	100	=
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	-	100	100	100	100	100	-	29,06	100	100	100	=
8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	-	100	100	100	100	100	-	45,78	100	35	35	<
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	-	100	100	100	100	100	-	100,00	100	12	12	<
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	-	100	100	100	100	100	-	33,21	100	100	100	=
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	-	100	100	100	100	100	-	46,65	100	100	100	=
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	-	100	100	100	100	100	-	-	45	38	38	<
III	<b>PU-PR</b>	-											
1	Persentase Tersedi any air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	-	100	100	100	100	100	-	59,28	59,28	-	-	<

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM		Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*	
2	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	-	70	70	70	70	70	-	-	-	93,48	93	>
3	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang.	-	60	60	60	60	60	33,06	65,08	65,08	58,86	59	=
4	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi diwilayah kabupaten/ kota	-	100	100	100	100	100	-	24,14	24,14	-	-	<
5	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	-	82	82	82	82	82	-	-	-	-	-	<
6	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	-	60	60	60	60	60	-	-	-	-	-	<
7	Persentase pengurangan sampah di perkotaan	-	20	20	20	20	20	67,05	-	-	-	-	<
8	Persentase pengangkutan sampah	-	70	70	70	70	70	67,05	-	-	-	-	<
9	Persentase pengoperasian TPA	-	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	<
10a	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	-	50	50	50	50	50	33,25	1,96	1,96	-	-	<
10b	Pengurangan luas genangan	-	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	<
11	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	-	60	60	60	60	60	38,35	166,67	166,67	100,00	100,00	>
12	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	-	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	<

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM		Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*	
13	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	-	60	60	60	60	60	-	-	-	-	-	<
14	Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	-	100	100	100	100	100	42,60	40,01	40,01	37,26	37,26	<
15	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	-	100	100	100	100	100	-	-	-	77,39	77,39	<
16	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	-	50	50	50	50	50	42,34	-	-	-	-	<
<b>IV</b>	<b>Perumahan Rakyat</b>	-											
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		100	100	100	100	100	na	na	25,17	21,00	21,00	<
2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau		70	70	70	70	70	na	na	6,78	4,36	4,36	<
3	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)		100	100	100	100	100	na	na	0,10	0,10	0,10	<
<b>V</b>	<b>Pemerintahan Dalam negeri</b>												
	<b>A. Pelayanan Dokumen Kependudukan</b>												
1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga		100	100	100	100	100	83,12	83,12	32,05	83,95	83,95	<

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
		2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*	
2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100	100	100	100	100	76,85	76,85	8,48	217,00	217,00	>
3	Cakupan Penerbitan Kuitipan Akta Kelahiran	90	90	90	90	90	100,00	100,00	2,67	45,35	45,35	<
4	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	70	70	70	70	70	100,00	100,00	n.a	100,00	100,00	
	<b>B. Pemeliharaan Ketentraman &amp; Ketertiban Masyarakat</b>											
5	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	86,00	86,00	100,00	100,00	100,00	=
6	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,40	0,40	0,40	0,20	0,20	<
7	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	0,60	0,60	0,60	<
	<b>C. Penanggulangan Bencana Kebakaran</b>											
8	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	80	80	80	80	80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	>
9	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	75	75	75	75	75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	>
10	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85	85	85	85	85	56,25	51,95	50,00	50,00	50,00	<
11	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	90	90	90	90	90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	>
<b>VI</b>	<b>Sosial</b>	-										

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM		Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018*	
1	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	-	98,60	98,60	98,60	80,00	80,00	63	80	100	97	97	>
2	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	-	7,30	7,30	7,30	20,00	40,00	1,1	100	100	98	98	>
3	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	-	100,00	100,00	100,00	80,00	80,00	100	100	100	96	96	>
4	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	-	100,00	100,00	100,00	60,00	60,00	100	100	100	100	100	>
5	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	-	100,00	100,00	100,00	80,00	80,00	100	100	-	100	100	=
6	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	-	100,00	100,00	100,00	80,00	80,00	100	100	86	98	98	=
7	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	-	52,10	52,10	52,10	40,00	40,00	34	100	-	97	97	=

**BAB****3****GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah mengandung prinsip dasar yakni: hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan kebijakan perimbangan keuangan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan memegang prinsip: (1) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah; (2) Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal; dan (3) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Penyerahan dan pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah akan diikuti dengan pemberian pembiayaan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah. Artinya pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan

ataupun pelimpahan wewenang lainnya selalu diikuti dengan penyerahan pembiayaan. Demikian juga halnya dengan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota harus diikuti dengan penyerahan pembiayaan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

### **3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis kinerja keuangan daerah diperlukan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah melalui pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan daerah mencakup pendapatan dari penerimaan dan pembiayaan daerah. Oleh karenanya untuk mengetahui kinerja (kapasitas) keuangan daerah diperlukan pemahaman yang baik tentang objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan susunan/struktur masing-masing APBD. Dalam rangka memahami kinerja keuangan Kabupaten Indragiri Hilir, maka diperlukan analisis kinerja keuangan masa lalu, yakni kinerja keuangan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013-2017. Secara berturut-turut pada sub-bagian ini akan dijelaskan tentang kinerja keuangan Kabupaten Indragiri Hilir, mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

#### **A. Pendapatan Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam kedua Undang-Undang tersebut juga dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Mengacu kepada kondisi ekonomi daerah dan tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang ditunjukkan pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah pada periode 2013-2017 sebesar 3.41% per tahun. Pertumbuhan tersebut paling besar didorong oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 27.40%, diikuti oleh Lain-lain PAD sebesar 17.02%, sedangkan Dana Perimbangan mengalami pertumbuhan negatif, yakni sebesar -0.62%.

Walaupun dari sisi pertumbuhan, komponen PAD memperlihatkan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Daerah daripada komponen Lain-lain PAD yang Sah dan Dana Perimbangan, namun dilihat dari proporsinya, Dana Perimbangan dan Lain-lain PAD yang Sah memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Daerah. Dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa pada Tahun Anggaran 2013-2017, proporsi pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan masih lebih besar dari 70%, sedangkan yang bersumber dari PAD dan lain-lain PAD yang Sah masih di bawah 30%.



Tabel 3.1.  
Realiasi Pendapatan 2013-2015, Perkiraan Tahun Berjalan 2016 dan  
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir

NO.	URAIAN	Realisasi 2013 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>64,006,077,511.01</b>	<b>105,541,229,332.49</b>	<b>131,307,547,521.58</b>	<b>132,838,355,239.52</b>	<b>214,785,344,624.85</b>	<b>27.40</b>
1	Pendapatan Pajak Daerah	14,131,082,515.00	18,517,840,664.25	31,974,622,455.14	22,402,940,847.10	27,550,184,218.00	14.29
2	Pendapatan Retribusi Daerah	11,306,811,283.30	15,333,560,946.36	6,220,155,417.47	10,203,208,136.24	3,741,694,697.44	-19.84
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,884,910,837.00	9,286,080,731.00	11,316,430,016.32	7,294,423,767.70	11,521,933,687.72	10.85
4	Lain-lain PAD yang Sah	48,189,424,271.92	62,403,746,990.88	81,796,339,632.65	92,937,782,488.48	171,971,532,021.69	28.97
<b>B</b>	<b>PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,323,840,269,399.00</b>	<b>1,479,872,269,672.00</b>	<b>1,235,567,369,318.00</b>	<b>1,370,286,058,678.00</b>	<b>1,283,445,695,586.00</b>	<b>-0.62</b>
1	Dana Bagi Hasil Pajak	70,904,912,500.00	55,980,273,257.00	49,296,362,333.00	50,624,756,351.00	42,619,746,148.00	-9.68
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	430,281,583,899.00	526,114,673,415.00	203,208,529,985.00	148,025,196,514.00	125,038,127,844.00	-21.90
3	Dana Alokasi Umum	773,041,103,000.00	847,860,750,000.00	841,133,812,000.00	898,404,765,000.00	895,989,730,000.00	3.00
4	Dana Alokasi Khusus	49,612,670,000.00	49,916,573,000.00	141,928,665,000.00	273,231,340,813.00	219,798,091,594.00	34.67
<b>C</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>141,121,202,306.00</b>	<b>221,231,241,405.65</b>	<b>313,667,252,963.21</b>	<b>334,830,259,663.84</b>	<b>309,649,378,410.38</b>	<b>17.02</b>
1	Pendapatan Hibah	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	51,203,035,306.00	117,108,798,405.65	87,173,693,743.21	87,218,624,408.29	83,870,103,575.00	10.37
4	Pendapatan Dana Penyesuaian	82,203,267,000.00	88,926,443,000.00	211,397,431,000.00	122,553,836,000.00	155,804,872,000.00	13.64
5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7,714,900,000.00	14,196,000,000.00	14,096,128,220.00	125,057,799,255.55	69,974,402,835.38	55.43
6	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1,528,967,549,216.01</b>	<b>1,806,644,740,410.14</b>	<b>1,680,542,169,802.79</b>	<b>1,837,954,673,581.36</b>	<b>1,807,880,418,621.23</b>	<b>3.41</b>

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2018, diolah

Tabel 3.2.  
Proporsi Sumber Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun Anggaran 2013-2017

NO.	URAIAN	Realisasi 2013 (%)	Realisasi 2014 (%)	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2017 (%)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>4.19</b>	<b>5.84</b>	<b>7.81</b>	<b>7.23</b>	<b>11.88</b>
1	Pendapatan Pajak Daerah	0.92	1.02	1.90	1.22	1.52
2	Pendapatan Retribusi Daerah	0.74	0.85	0.37	0.56	0.21
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.45	0.51	0.67	0.40	0.64
4	Lain-lain PAD yang Sah	3.15	3.45	4.87	5.06	9.51
<b>B</b>	<b>PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN</b>	<b>86.58</b>	<b>81.91</b>	<b>73.52</b>	<b>74.55</b>	<b>70.99</b>
1	Dana Bagi Hasil Pajak	4.64	3.10	2.93	2.75	2.36
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	28.14	29.12	12.09	8.05	6.92
3	Dana Alokasi Umum	50.56	46.93	50.05	48.88	49.56
4	Dana Alokasi Khusus	3.24	2.76	8.45	14.87	12.16
<b>C</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>9.23</b>	<b>12.25</b>	<b>18.66</b>	<b>18.22</b>	<b>17.13</b>
1	Pendapatan Hibah	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
2	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	3.35	6.48	5.19	4.75	4.64
4	Pendapatan Dana Penyesuaian	5.38	4.92	12.58	6.67	8.62
5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.50	0.79	0.84	6.80	3.87
6	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2018, diolah

Selama periode 2013-2017, sumber-sumber Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir terbesar masih dari Dana Perimbangan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2 dengan tren kontribusi menurun dengan besaran antara 86.58% - 70.99% dari total pendapatan. Kontribusi terbesar dari komponen dana perimbangan adalah dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan tren berfluktuasi dengan kecenderungan menurun dengan besaran kontribusi berkisar antara 46.93%-50.56%. Diposisi kedua bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah dengan tren kontribusi meningkat dengan besaran berkisar antara 9.23% - 18.66% dari total

pendapatan. Diposisi ketiga adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tren kontribusi meningkat dengan kisaran besaran kontribusi antara 4,19%-11.88%. Kontribusi dari komponen PAD yang terbesar bersumber dari lain-lain PAD yang Sah dengan kisaran kontribusi 3.15%-9.51%.

Lebih lanjut, kinerja Pendapatan Daerah dapat dilihat dengan membandingkan antara anggaran yang ditetapkan dan realisasinya. Selaras dengan penerapan otonomi daerah, Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terus mengalami peningkatan dari Rp 1,506,261,863,728.85 pada tahun 2013 menjadi Rp 1,782,167,412,263.02 pada tahun 2017. Lebih detail tentang perkembangan Anggaran dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.  
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2013	1,506,261,863,728.85	1,528,967,549,216.01	101.51	22,705,685,487.16	1.51
2014	1,790,126,981,936.22	1,806,644,740,410.14	100.92	16,517,758,473.92	0.92
2015	1,782,167,412,263.02	1,680,542,169,802.79	94.30	-101,625,242,460.23	-5.70
2016	2,035,205,227,946.02	1,837,954,673,581.36	90.31	-197,250,554,364.66	-9.69
2017	2,066,067,904,823.94	1,807,880,418,621.23	87.50	-258,187,486,202.71	-12.50
Jumlah	9,179,829,390,698.05	8,661,989,551,631.53	94.36	-517,839,839,066.52	-5.64

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2018, diolah

Dari Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa selama periode Tahun Anggaran 2013-2017, secara kumulatif Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp 9,179,829,390,698.0 dengan realisasi Rp 8,661,989,551,631.53, yang berarti realisasi lebih rendah dari Anggaran 94.36% atau berkurang 5.64%. Hal ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan pada tahun anggaran

tersebut kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menghimpun pendapatan daerah relatif masih rendah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa sumber Pendapatan Daerah masih didominasi oleh Dana Perimbangan, sedangkan kontribusi dari PAD dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih lebih kecil. Namun demikian, jika dicermati lebih lanjut dari proporsi realisasi komponen pendapatan, kontribusi PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara konsisten menunjukkan peningkatan. Semakin meningkatnya kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa kemampuan daerah menuju kemandirian pembiayaan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah semakin membaik.

Selama Tahun Anggaran 2013-2017, secara kumulatif realisasi PAD masih lebih rendah dari Anggaran, dengan realisasi 95.54% atau berkurang sebesar 4.46%. Tabel 3.4 menyajikan tentang perkembangan Anggaran dan realisasi PAD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017.

Tabel 3.4.  
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2013	66,842,698,021.85	64,006,077,511.01	95.76	-2,836,620,510.84	-4.24
2014	107,879,122,122.95	105,541,229,332.49	97.83	-2,337,892,790.46	-2.17
2015	124,185,982,816.53	131,307,547,521.58	105.73	7,121,564,705.05	5.73
2016	135,349,726,228.36	132,838,355,239.52	98.14	-2,511,370,988.84	-1.86
2017	244,517,034,480.26	214,785,344,624.85	87.84	-29,731,689,855.41	-12.16
Jumlah	678,774,563,669.95	648,478,554,229.45	95.54	-30,296,009,440.50	-4.46

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2018, diolah

Komponen PAD terdiri dari: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dari empat komponen PAD tersebut Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memberikan kontribusi terbesar terhadap total PAD diikuti oleh komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Tabel 3.5 menyajikan tentang Anggaran dan realisasi Pajak Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017. Perlu diinformasikan bahwa Pajak Daerah terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Pemanfaatan Air Permukaan. Berdasarkan Tabel 3.5 dapat dinyatakan bahwa pada Tahun Anggaran 2013-2017 realisasi Pajak Daerah lebih rendah dari Anggaran yang telah ditetapkan. Secara kumulatif Anggaran Pajak Daerah sebesar Rp 131,416,572,243.00 dengan realisasi mencapai Rp 114,576,670,699.49. Dengan demikian realisasi mencapai 87.19% atau berkurang Rp 16,839,901,543.51 (12.81%).

Tabel 3.5.  
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2013	13,330,572,000.00	14,131,082,515.00	106.01	800,510,515.00	6.01
2014	19,509,894,423.00	18,517,840,664.25	94.92	-992,053,758.75	-5.08
2015	30,354,600,990.00	31,974,622,455.14	105.34	1,620,021,465.14	5.34
2016	30,546,504,830.00	22,402,940,847.10	73.34	-8,143,563,982.90	-26.66
2017	37,675,000,000.00	27,550,184,218.00	73.13	-10,124,815,782.00	-26.87
Jumlah	131,416,572,243.00	114,576,670,699.49	87.19	-16,839,901,543.51	-12.81

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2018, diolah

Selanjutnya Tabel 3.6 menyajikan Anggaran dan realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah provinsi kepada kepentingan orang pribadi atau badan, baik yang bersifat pelayanan jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Tabel 3.6.  
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2013	16,024,199,000.00	11,306,811,283.30	70.56	-4,717,387,716.70	-29.44
2014	17,324,356,639.00	15,333,560,946.36	88.51	-1,990,795,692.64	-11.49
2015	14,189,157,960.00	6,220,155,417.47	43.84	-7,969,002,542.53	-56.16
2016	12,633,432,960.00	10,203,208,136.24	80.76	-2,430,224,823.76	-19.24
2017	9,846,379,500.00	3,741,694,697.44	38.00	-6,104,684,802.56	-62.00
Jumlah	70,017,526,059.00	46,805,430,480.81	66.85	-23,212,095,578.19	-33.15

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2018, diolah

Dari Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa realisasi Retribusi Daerah secara kumulatif dan per tahun rata-rata lebih rendah dari Anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Anggaran Retribusi Daerah secara kumulatif sebesar Rp. 70,017,526,059.00 dengan realisasi yang lebih rendah dari Anggarannya, yakni sebesar Rp. 46,805,430,480.81 atau 81.60%. Dengan kata lain realisasi Retribusi Daerah berkurang Rp. 23,212,095,578.19 (33.15%) dari Anggaran yang telah ditetapkan.

Komponen PAD berikutnya adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperoleh dari Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah. Dari Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa

selama Tahun Anggaran 2013-2017, Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara kumulatif sebesar Rp. 45,953,437,938.37, sedangkan realisasinya mencapai Rp 46,303,779,039.74 (100.76%). Dengan kata lain realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan telah melebihi anggaran sebesar Rp 350,341,101.37 (0.76%) dari Anggaran yang ditetapkan.

Tabel 3.7.  
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2013	6,170,596,465.00	6,884,910,837.00	111.58	714,314,372.00	11.58
2014	9,194,296,603.00	9,286,080,731.00	101.00	91,784,128.00	1.00
2015	11,245,090,234.37	11,316,430,016.32	100.63	71,339,781.95	0.63
2016	7,571,737,793.00	7,294,423,767.70	96.34	-277,314,025.30	-3.66
2017	11,771,716,843.00	11,521,933,687.72	97.88	-249,783,155.28	-2.12
Jumlah	45,953,437,938.37	46,303,779,039.74	100.76	350,341,101.37	0.76

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2018, diolah

Tabel 3.8 menyajikan Anggaran dan realisasi PAD yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah bersumber dari: (a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; (b) Jasa Giro; (c) Pendapatan Bunga; (d) Tuntutan Ganti Rugi (TGR); (e) Komisi; (f) Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah; (g) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; (h) Pendapatan Denda Pajak; (i) Pendapatan Denda Retribusi; (j) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan; (k) Pendapatan dari Pengembalian; (l) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; (m) Pendapatan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; (n) Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan; dan (o) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Tabel 3.8.  
Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2013	31,317,330,556.85	48,189,424,271.92	153.87	16,872,093,715.07	53.87
2014	61,850,574,457.95	62,403,746,990.88	100.89	553,172,532.93	0.89
2015	68,397,133,632.16	81,796,339,632.65	119.59	13,399,206,000.49	19.59
2016	84,598,050,645.36	92,937,782,488.48	109.86	8,339,731,843.12	9.86
2017	185,223,938,137.26	171,971,532,021.69	92.85	-13,252,406,115.57	-7.15
Jumlah	431,387,027,429.58	457,298,825,405.62	106.01	25,911,797,976.04	6.01

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2018, diolah

Dari Tabel 3.8 dapat dinyatakan bahwa selama Tahun Anggaran 2013-2017, secara kumulatif Anggaran Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 431,387,027,429.58, sedangkan realisasinya mencapai sebesar Rp. 457,298,825,405.62 (106.01). Dengan demikian realisasi PAD yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp 25,911,797,976.04 (6.01%).

Sumber pendapatan daerah terbesar bagi penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir adalah dari Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara kumulatif, Anggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan selama Tahun Anggaran 2013-2017 sebesar Rp. 7,075,416,589,098.00. Sementara itu, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang setiap tahun diterbitkan, akumulasi Dana Perimbangan yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 6,693,011,662,653.00. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi Dana Perimbangan sebesar 94.60% dari Anggaran atau berkurang 5.40% dari Anggaran. Secara detail Anggaran dan realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017 disajikan pada Tabel 3.9.



Komponen Dana Perimbangan terdiri dari: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum dan (c) Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Dana Perimbangan, diikuti oleh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Tabel 3.9.  
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2013	1,311,678,998,707.00	1,323,840,269,399.00	100.93	12,161,270,692.00	0.93
2014	1,489,921,593,194.00	1,479,872,269,672.00	99.33	-10,049,323,522.00	-0.67
2015	1,339,374,317,785.00	1,235,567,369,318.00	92.25	-103,806,948,467.00	-7.75
2016	1,463,191,465,203.00	1,370,286,058,678.00	93.65	-92,905,406,525.00	-6.35
2017	1,471,250,214,209.00	1,283,445,695,586.00	87.24	-187,804,518,623.00	-12.76
Jumlah	7,075,416,589,098.00	6,693,011,662,653.00	94.60	-382,404,926,445.00	-5.40

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2018, diolah

Dari Tabel 3.10 dapat dilihat bahwa secara kumulatif Anggaran penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak selama Tahun Anggaran 2013-2017 adalah sebesar Rp. 302,558,772,699.00, sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp. 269,426,050,589.00. Dengan demikian realisasinya hanya sebesar 89.05% dari Anggaran yang telah ditetapkan atau berkurang 10.95%.

Tabel 3.10.  
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2013	69,831,955,707.00	70,904,912,500.00	101.54	1,072,956,793.00	1.54
2014	55,200,226,864.00	55,980,273,257.00	101.41	780,046,393.00	1.41
2015	63,630,633,000.00	49,296,362,333.00	77.47	-14,334,270,667.00	-22.53
2016	49,747,618,272.00	50,624,756,351.00	101.76	877,138,079.00	1.76
2017	64,148,338,856.00	42,619,746,148.00	66.44	-21,528,592,708.00	-33.56
Jumlah	302,558,772,699.00	269,426,050,589.00	89.05	-33,132,722,110.00	-10.95

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2018, diolah

Selanjutnya dari Tabel 3.11 dapat dilihat bahwa secara kumulatif Anggaran penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam selama Tahun Anggaran 2013-2017 adalah sebesar Rp. 1,559,068,737,749.00, sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp. 1,432,668,111,657.00. Dengan demikian realisasinya hanya sebesar 91.89% dari Anggaran yang telah ditetapkan atau berkurang 8.11%.

Tabel 3.11.  
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam Kabupaten  
Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2013	411,893,950,000.00	430,281,583,899.00	104.46	18,387,633,899.00	4.46
2014	520,305,186,330.00	526,114,673,415.00	101.12	5,809,487,085.00	1.12
2015	257,199,042,785.00	203,208,529,985.00	79.01	-53,990,512,800.00	-20.99
2016	145,679,419,281.00	148,025,196,514.00	101.61	2,345,777,233.00	1.61
2017	223,991,139,353.00	125,038,127,844.00	55.82	-98,953,011,509.00	-44.18
Jumlah	1,559,068,737,749.00	1,432,668,111,657.00	91.89	-126,400,626,092.00	-8.11

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2018, diolah

Sementara itu anggaran dan realisasi Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum selama Tahun Anggaran 2013-2017 adalah sama. Untuk Dana Alokasi Umum (Tabel 3.12), secara

kumulatif selama Tahun Anggaran 2013-2017 Anggaran dan realisasinya sebesar Rp. 4,256,430,160,000.00.

Tabel 3.12.  
Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2013	773,041,103,000.00	773,041,103,000.00	100.00	0.00	0.00
2014	847,860,750,000.00	847,860,750,000.00	100.00	0.00	0.00
2015	841,133,812,000.00	841,133,812,000.00	100.00	0.00	0.00
2016	898,404,765,000.00	898,404,765,000.00	100.00	0.00	0.00
2017	895,989,730,000.00	895,989,730,000.00	100.00	0.00	0.00
Jumlah	4,256,430,160,000.00	4,256,430,160,000.00	100.00	0.00	0.00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2018, diolah

Dari Tabel 3.13 dapat dilihat bahwa secara kumulatif Anggaran penerimaan dari Dana Alokasi Khusus selama Tahun Anggaran 2013-2017 adalah sebesar Rp. 957,358,918,650.00, sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp. 734,487,340,407.00. Dengan demikian realisasinya hanya sebesar 76.72% dari Anggaran yang telah ditetapkan atau berkurang 23.28%.

Tabel 3.13.  
Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2013	56,911,990,000.00	49,612,670,000.00	87.17	-7,299,320,000.00	-12.83
2014	66,555,430,000.00	49,916,573,000.00	75.00	-16,638,857,000.00	-25.00
2015	177,410,830,000.00	141,928,665,000.00	80.00	-35,482,165,000.00	-20.00
2016	369,359,662,650.00	273,231,340,813.00	73.97	-96,128,321,837.00	-26.03
2017	287,121,006,000.00	219,798,091,594.00	76.55	-67,322,914,406.00	-23.45
Jumlah	957,358,918,650.00	734,487,340,407.00	76.72	-222,871,578,243.00	-23.28

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2018, diolah

Selain PAD dan Dana Perimbangan, komponen Pendapatan Daerah juga bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah secara kumulatif dapat dipenuhi. Selama Tahun Anggaran 2013-2017, Lain-lain Pendapatan yang Sah dianggarkan sebesar Rp. 1,425,638,237,930.10, sedangkan realisasinya mencapai sebesar Rp. 1,320,499,334,749.08. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 92.63% atau berkurang 7.37%. Secara rinci Anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017 disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14.  
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2013	127,740,167,000.00	141,121,202,306.00	110.48	13,381,035,306.00	10.48
2014	192,326,266,619.27	221,231,241,405.65	115.03	28,904,974,786.38	15.03
2015	318,607,111,661.49	313,667,252,963.21	98.45	-4,939,858,698.28	-1.55
2016	436,664,036,514.66	334,830,259,663.84	76.68	-101,833,776,850.82	-23.32
2017	350,300,656,134.68	309,649,378,410.38	88.40	-40,651,277,724.30	-11.60
Jumlah	1,425,638,237,930.10	1,320,499,334,749.08	92.63	-105,138,903,181.02	-7.37

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2018, diolah

## B. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan baik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan pembangunan. Kebijakan belanja daerah senantiasa memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan

pada tahun 2017 dan 2018. Realisasi belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2013-2017 ditunjukkan pada Tabel 3.15.

Dari Tabel 3.15 dapat dilihat bahwa selama periode 2013-2017, rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir meningkat sebesar 8,18% per tahun. Peningkatan tertinggi terdapat pada belanja pegawai yaitu sebesar 3.16% per tahun.

Tabel 3.15.  
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tahun 2013 - 2017

No.	Uraian	Realisasi 2013 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>A.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>695,077,494,389.00</b>	<b>785,719,439,799.00</b>	<b>920,437,578,280.00</b>	<b>958,460,832,550.00</b>	<b>1,029,706,182,421.00</b>	<b>8.18</b>
1.	Belanja Pegawai	607,072,149,596.00	658,607,313,132.00	720,208,794,880.00	766,658,645,617.00	709,222,133,469.00	3.16
2.	Belanja Bunga	3,118,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00	0.00
4.	Belanja Hibah	18,914,369,220.00	18,027,675,000.00	8,470,000,000.00	2,540,100,000.00	35,670,879,356.00	0.00
5.	Belanja Bantuan Sosial	2,927,500,000.00	2,847,440,000.00	447,000,000.00	20,000,000.00	300,000,000.00	0.00
6.	Belanja Bagi Hasil	0.00	0.00	3,604,887,522.00	3,343,353,933.00	4,547,596,896.00	4.03
7.	Belanja Bantuan Keuangan	66,160,357,000.00	106,237,011,667.00	187,706,895,878.00	185,898,733,000.00	277,751,953,200.00	0.00
8.	Belanja Tidak Terduga	0.00	0.00	0.00	-	213,619,500.00	0.00
<b>2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>812,474,533,972.13</b>	<b>928,741,413,645.25</b>	<b>902,259,188,516.34</b>	<b>970,054,743,146.32</b>	<b>980,322,787,386.47</b>	<b>3.83</b>
1.	Belanja Pegawai	77,238,663,400.00	88,793,736,360.00	95,023,318,070.00	86,527,027,600.00	66,389,026,998.00	2.88
2.	Belanja Barang dan Jasa	387,978,484,866.00	445,910,094,114.64	448,836,242,044.52	468,148,712,341.92	560,793,771,316.81	4.81
3.	Belanja Modal	362,876,301,662.13	394,037,583,170.61	358,399,628,401.82	415,379,003,204.40	353,139,989,071.66	3.44
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1,507,552,028,361.13</b>	<b>1,714,460,853,444.25</b>	<b>1,822,696,766,796.34</b>	<b>1,928,515,575,696.32</b>	<b>2,010,028,969,807.47</b>	<b>5.92</b>

Sumber: Bagian Keuangan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2018, diolah

Lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa pada masa yang akan datang pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir lebih diarahkan pada upaya meningkatkan pembangunan melalui peningkatan biaya langsung. Rata-rata pertumbuhan belanja langsung sebesar 3,83%. Seluruh komponen belanja langsung mengalami peningkatan, masing-masing untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal meningkat sebesar 2.88%, 4.81%, dan 3.44%.

### **C. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti

penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Realisasi pembiayaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2011 – 2016 ditunjukkan pada Tabel 3.16.

Dari Tabel 3.16 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2013 sebesar Rp 425,442,758,650.09 dan meningkat menjadi Rp 217,943,442,894.32 pada tahun 2017 yang terbesar bersumber dari Silpa. Disisi lain pengeluaran pembiayaan daerah jauh lebih kecil dari penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah hanya bersumber dari penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2013 pengeluaran pembiayaan daerah yang bersumber dari penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp 6,641,843,946.00, turun menjadi Rp 5,000,000,000.00 pada tahun 2017.



Tabel 3.16.  
Realisasi Pembiayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
<b>A.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>425,442,758,650.09</b>	<b>438,809,123,114.18</b>	<b>528,535,832,598.07</b>	<b>386,163,222,875.82</b>	<b>217,943,442,894.32</b>
1.	Penggunaan SiLPA	425,442,758,650.09	440,247,896,539.18	528,511,915,930.07	386,163,222,875.82	215,943,442,894.32
2.	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	23,916,668.00	0.00	2,000,000,000.00
5.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Penerimaan piutang daerah	0.00	-1,438,773,425.00	0.00	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Penerimaan Kembali Piutang TGR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>6,641,843,946.00</b>	<b>5,475,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,215,000,000.00</b>	<b>5,000,000,000.00</b>
2.	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6,641,843,946.00	5,475,000,000.00	0.00	16,215,000,000.00	5,000,000,000.00
4.	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>418,800,914,704.09</b>	<b>433,334,123,114.18</b>	<b>528,535,832,598.07</b>	<b>369,948,222,875.82</b>	<b>212,943,442,894.32</b>

Sumber: Bagian Keuangan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2018, diolah

### 3.1.2. Neraca Daerah

Sehubungan dengan Neraca Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana per tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Tabel berikut ini menyajikan data perkembangan dan pertumbuhan neraca daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dari Tabel 3.17 dapat dilihat bahwa Total Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun Anggaran 2013-2017 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, Total Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp 4,839,171,352,892.59, menurun menjadi Rp 3,734,273,603,395.02 pada tahun 2017. Bertolak belakang dengan penurunan Aset Daerah, Kewajiban Daerah Kabupaten Indragiri Hilir juga mengalami peningkatan, dari Rp 4,496,363,204.36 pada tahun 2013 menjadi Rp 96,985,738,745.49 pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan Kewajiban Daerah lebih besar dari pertumbuhan Aset Daerah, namun nilai nominal Kewajiban Daerah jauh lebih kecil dari Aset Daerah. Dengan kata lain, pengalokasian dana bagi penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir masih sangat aman untuk dapat meningkatkan pengeluaran pembangunan melalui peningkatan kewajiban.

Lebih lanjut dari Tabel 3.17 yang menarik untuk diulas adalah komponen ekuitas. Secara total ekuitas dana Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penurunan. Dengan demikian, kemampuan daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk dapat mendanai sendiri kegiatan pembangunan daerah cenderung mengalami penurunan.

Tabel 3.17.  
Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun Anggaran 2013-2017 Kabupaten Indragiri Hilir

Uraian	Realisasi 2013 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
<b>ASET</b>	4,839,171,352,892.59	4,839,171,352,892.59	3,725,043,876,831.25	3,870,730,869,503.85	3,734,273,603,395.02	-5.05
<b>ASET LANCAR</b>	541,671,585,310.84	583,283,672,875.51	462,726,972,167.59	343,083,159,020.14	149,453,487,730.51	-22.70
Kas di Kas Daerah	436,407,494,391.97	521,916,597,073.27	377,613,969,772.39	201,150,882,799.51	2,831,249,073.26	-63.49
Kas di Bendahara Penerimaan	40,154,703.00	29,935,186.00	83,736,732.00	3,615,242,194.00	72,260,491.00	12.47
Kas di Bendahara Pengeluaran	6,093,118,175.36	2,432,693,620.00	1,605,395,345.00	943,697,891.00	574,217,922.00	-37.65
Kas di BLUD	121,429,536.21	1,976,703,622.80	2,828,015,746.66	5,161,973,245.58	3,171,815,331.72	92.04
Kas Bendahara Kapitasi JKN FKTP	0.00	3,155,390,000.00	4,128,178,746.77	5,287,704,757.21	3,433,698,342.70	2.14
Setara Kas Lainnya	0.00	0.00	1,779,359,889.40	1,857,127,826.63	3,202,930,519.40	21.65
Setara Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00	0.00	203,083,042.73	157,271,348.73	-12.00
Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Piutang Pajak	33,358,090,760.00	42,357,166,263.50	52,383,684,246.00	62,273,387,364.00	71,803,687,648.00	16.57
Penyisihan Piutang Pajak	0.00	0.00	-22,001,793,772.50	-23,023,913,132.82	-30,936,607,511.02	12.03
Piutang Pajak Netto	0.00	0.00	30,381,890,473.50	39,249,474,231.18	40,867,080,136.98	10.39
Piutang Retribusi	3,007,255,480.50	4,631,056,006.20	10,161,580,861.20	14,303,923,261.90	11,536,962,634.70	30.85
Penyisihan Piutang Retribusi	0.00	0.00	-1,628,984,984.57	-2,473,742,163.40	-3,653,369,059.35	30.90
Piutang Retribusi Netto	0.00	0.00	8,532,595,876.63	11,830,181,098.50	7,883,593,575.35	-2.60
Piutang BLUD	0.00	5,752,055,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	11,305,824.68	11,305,824.68	0.00	0.00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0.00	0.00	0.00	9,012,045,280.89	16,821,886,632.00	36.62
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,109,433.16	0.00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	0.00	0.00	0.00	9,012,045,280.89	16,737,777,198.84	36.28
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0.00	0.00	7,084,678,132.89			0.00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0.00	81,986,171,785.00	5,893,167,175.00	41,652,400,037.00	16,541,200,075.00	-32.98
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,706,000.38	0.00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Netto	0.00	81,986,171,785.00	0.00	41,652,400,037.00	16,458,494,074.62	-37.14
Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	55,605,557,163.00	14,969,828,452.50	6,818,888,727.75	448,883,246.46	12,179,673,171.34	-26.19
Piutang Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	61,516,970.00			0.00
Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,898,365.86	0.00
Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Netto	55,605,557,163.00	14,969,828,452.50	0.00	0.00	12,118,774,805.48	0.00
Piutang Pendapatan Lainnya	235,916,970.00	235,916,970.00	0.00	54,016,970.00	54,016,970.00	-25.53
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,391,970.00	0.00
Piutang Pendapatan Lainnya Netto	235,916,970.00	235,916,970.00	0.00	54,016,970.00	5,625,000.00	-67.73
Belanja Dibayar Dimuka	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Netto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Uraian	Realisasi 2013 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Netto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat Netto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya Netto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0.00	0.00	41,850,000.00	0.00	0.00	0.00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	0.00	0.00	41,850,000.00	0.00	0.00	0.00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uang Muka	0.00	0.00	2,096,156.10	22,484,364.60	22,484,364.60	120.54
Beban Dibayar diMuka	0.00	0.00	355,782,227.50	399,329,689.73	337,843,993.66	-1.71
Persediaan	6,919,113,625.80	10,720,323,984.24	15,504,544,371.32	22,183,326,520.44	41,578,371,552.17	43.14
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>95,565,444,017.00</b>	<b>99,601,670,592.00</b>	<b>100,126,131,193.72</b>	<b>117,719,308,803.48</b>	<b>119,892,830,801.69</b>	<b>4.64</b>
Investasi Non Permanen	17,878,250,000.00	16,439,476,575.00	16,129,337,092.46	16,022,514,702.22	13,196,036,700.43	-5.89
Pinjaman Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investasi Dalam Surat Utang Negara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investasi Non Permanen Dana Bergulir	17,878,250,000.00	16,439,476,575.00	16,415,559,907.00	16,402,052,927.00	14,439,911,584.00	-4.18
Investasi Non Permanen Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyisihan Investasi Non Permanen	0.00	0.00	-286,222,814.54	-379,538,224.78	-1,243,874,883.57	63.19
Investasi Permanen	77,687,194,017.00	83,162,194,017.00	83,996,794,101.26	101,696,794,101.26	106,696,794,101.26	6.55
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	77,687,194,017.00	83,162,194,017.00	83,996,794,101.26	101,696,794,101.26	106,696,794,101.26	6.55
Investasi Permanen Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ASET TETAP</b>	<b>3,685,932,845,373.51</b>	<b>4,035,725,747,035.40</b>	<b>3,069,953,231,778.09</b>	<b>3,325,423,525,393.14</b>	<b>3,384,419,924,466.02</b>	<b>-1.69</b>
Tanah	495,733,789,859.10	497,877,280,359.10	500,051,880,406.00	496,333,377,241.00	483,315,916,241.00	-0.51
Peralatan dan Mesin	304,476,161,406.52	354,684,987,755.56	311,321,638,806.27	457,799,683,680.38	540,794,677,873.37	12.17
Gedung dan Bangunan	1,049,050,870,887.96	1,127,139,207,715.91	1,146,259,140,360.00	1,229,584,368,511.56	1,183,561,203,197.84	2.44
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,365,785,082,021.12	1,564,155,137,316.40	1,756,046,398,254.39	1,984,145,418,530.89	2,265,535,532,027.85	10.65
Aset Tetap Lainnya	21,267,276,778.40	14,489,974,914.91	15,695,685,187.71	18,623,298,577.65	18,697,298,486.07	-2.54
Konstruksi Dalam Pengerjaan	449,619,664,420.41	477,379,158,973.52	508,063,823,609.31	508,988,345,609.61	522,039,489,281.20	3.03
Akumulasi Penyusutan	0.00	0.00	-1,167,485,334,845.60	-1,370,050,966,757.96	-1,629,524,192,641.31	11.76
<b>DANA CADANGAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>14,918,068,647.09</b>	<b>13,680,096,792.69</b>	<b>92,237,541,691.85</b>	<b>84,504,876,287.10</b>	<b>80,507,360,396.80</b>	<b>40.10</b>
Tagihan Penjualan Angsuran	0.00	0.00	0.00	1,471,450,000.00	1,471,450,000.00	0.00

Uraian	Realisasi 2013 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tagihan Penjualan Angsuran Netto	0.00	0.00	0.00	1,471,450,000.00	1,471,450,000.00	0.00
Tuntutan Perbendaharaan	3,089,776,270.00	2,222,776,270.00	2,024,776,270.00	59,476,805.00	375,513,627.00	-34.39
Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tuntutan Perbendaharaan Netto	0.00	0.00	2,024,776,270.00	59,476,805.00	375,513,627.00	-42.97
Tuntutan Ganti Rugi	913,662,773.00	912,662,773.00	911,162,773.00	861,412,773.10	861,412,773.10	-1.17
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tuntutan Ganti Rugi Netto	0.00	0.00	911,162,773.00	861,412,773.10	861,412,773.10	-1.85
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00	12,678,597,200.00	12,935,720,806.00	13,201,784,556.00	1.36
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Netto	0.00	0.00		12,935,720,806.00	13,201,784,556.00	1.02
Aset Tak Berwujud	0.00	209,600,000.00	1,204,432,000.00	1,583,745,500.00	2,097,915,000.00	77.87
Amortisasi Aset Tak Berwujud	0.00	0.00	0.00	0	-1,536,921,600.00	0.00
Aset Tak Berwujud Netto	0.00	0.00	1,204,432,000.00	1,583,745,500.00	560,993,400.00	-22.48
Aset Lain-lain	10,914,629,604.09	10,335,057,749.69	170,459,385,585.13	159,063,770,690.41	153,970,620,538.32	69.78
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0.00	0.00	-95,040,812,136.27	-91,470,700,287.41	-89,934,414,497.62	-1.82
Aset Lain-lain Netto	0.00	0.00	75,418,573,448.85	67,593,070,403.00	64,036,206,040.70	-5.31
<b>KEWAJIBAN</b>	4,496,363,204.36	5,877,844,978.90	71,635,073,428.49	56,954,213,628.54	96,985,738,745.49	84.83
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	4,496,363,204.36	5,877,844,978.90	71,635,073,428.49	56,954,213,628.54	96,985,738,745.49	84.83
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2,374,145,564.36	969,468,386.00	94,473,467.00	423,637,885.73	2,648,551,320.73	2.21
Utang Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	5,438,610,548.50	4,157,325,647.00	5,438,610,548.50	3,529,498,342.70	-10.25
Utang Belanja	2,122,217,640.00	542,768,203.90	15,856,834,792.49	16,989,171,890.31	63,348,417,686.06	97.24
Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00	4,365,608,389.00	51,526,439,522.00	34,102,793,304.00	27,459,271,396.00	58.37
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utang Dalam Negeri - Obligasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Premium (Diskonto) Obligasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EKUITAS</b>	4,333,591,580,144.08	4,833,293,507,913.69	3,653,408,803,402.76	3,813,776,655,875.31	3,637,287,864,649.54	-3.44
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	4,338,087,943,348.44	4,839,171,352,892.59	3,725,043,876,831.25	3,870,730,869,503.85	3,734,273,603,395.03	-2.95

Sumber: Bagian Keuangan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2018, diolah

Selanjutnya analisis neraca daerah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Kegunaan dari masing-masing perhitungan rasio tersebut adalah: (a) Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, meliputi rasio lancar, dan rasio cepat; (b) Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya, meliputi rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal; (c) Rasio Aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah, meliputi rata-rata umur piutang, dan rata-rata umur persediaan. Tabel 3.18 menyajikan hasil analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2011-2015.

Tabel 3.18.  
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun Anggaran 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
<b>A.</b>	<b>Rasio Likuiditas</b>					
1.	Rasio lancar (current ratio)	120.4688	99.2343	6.4595	6.0238	1.5410
2.	Rasio cepat (quick ratio)	118.9300	97.4104	6.2431	5.6343	1.1123
<b>B.</b>	<b>Rasio Solvabilitas</b>					
1.	Rasio total hutang terhadap total asset	0.0009	0.0012	0.0192	0.0147	0.0260
2.	Rasio hutang terhadap modal	0.0010	0.0012	0.0196	0.0149	0.0267
<b>C.</b>	<b>Rasio Aktivitas</b>					
1.	Rata-rata umur piutang (Hari)	1	1	1	1	1
2.	Rata-rata umur persediaan (Hari)	365	365	365	365	365

Sumber: Bagian Keuangan Kabupaten Indragiri Hilir 2014-2018, diolah

Dari Tabel 3.18 dapat dinyatakan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir secara keseluruhan dinilai sangat baik dilihat dari hasil analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio

aktivitas. Berdasarkan hasil analisis rasio likuiditas menunjukkan nilai rasio lancar maupun rasio cepat cukup tinggi dan cenderung berfluktuasi. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya cukup tinggi dan berfluktuasi.

Kemampuan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya juga sangat baik. Rasio total hutang terhadap total asset masih sangat kecil, yakni berkisar antara 0.0009 pada tahun 2013 dan 0.0260 pada tahun 2017. Rasio hutang terhadap modal sebesar 0.0010 pada tahun 2013 dan 0.0267 pada tahun 2017. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir masih memungkinkan memperbesar pinjamannya guna memacu pertumbuhan dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Demikian juga dengan upaya untuk meningkatkan aktivitas pelayanan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga sangat baik. Rata-rata umur piutang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun Anggaran 2013-2017 hanya 1 hari. Hal ini mengindikasikan bahwa waktu penagihan hutang (piutang) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sangat cepat. Rata-rata umur persediaan mencapai 365 hari (satu tahun), yang berarti persediaan sangat aman dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

## **3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

### **3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran**

#### **a. Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja**

Tabel 3.19 menyajikan hasil analisis proporsi realisasi Belanja Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2017. Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa proporsi realisasi Baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung terhadap anggaran yang telah ditetapkan di bawah 100 persen. Hal ini mengindikasikan

bahwa realisasi Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan. Untuk proporsi realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap anggaran yang telah ditetapkan berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Sementara itu proporsi realisasi Belanja Langsung terhadap Anggaran yang telah ditetapkan cenderung menurun.



Tabel 3.19.  
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	2013			2014			2015			2016			2017		
		Anggaran (Juta Rupiah)	Realisasi (Juta Rupiah)	%	Anggaran (Juta Rupiah)	Realisasi (Juta Rupiah)	%	Anggaran (Juta Rupiah)	Realisasi (Juta Rupiah)	%	Anggaran (Juta Rupiah)	Realisasi (Juta Rupiah)	%	Anggaran (Juta Rupiah)	Realisasi (Juta Rupiah)	%
<b>A.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>861.74</b>	<b>695.08</b>	<b>80.66</b>	<b>951.03</b>	<b>785.72</b>	<b>82.62</b>	<b>1,096.87</b>	<b>920.44</b>	<b>83.92</b>	<b>1,066.02</b>	<b>958.46</b>	<b>89.91</b>	<b>1,064.84</b>	<b>1,029.71</b>	<b>96.70</b>
1.	Belanja Pegawai	754.37	607.07	80.47	805.57	658.61	81.76	885.26	720.21	81.36	800.49	766.66	95.77	736.23	709.22	96.33
2.	Belanja Bunga	0.10	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####
3.	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
4.	Belanja Hibah	34.88	18.91	54.23	29.41	18.03	61.29	17.77	8.47	47.67	21.27	2.54	11.94	41.35	35.67	86.27
5.	Belanja Bantuan Sosial	4.36	2.93	67.08	7.51	2.85	37.91	1.44	0.45	30.97	1.08	0.02	1.85	0.58	0.30	51.64
6.	Belanja Bagi Hasil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	100.00	3.97	3.34	84.26	4.81	4.55	94.52
7.	Belanja Bantuan Keuangan	67.22	66.16	98.42	107.74	106.24	98.61	187.99	187.71	99.85	238.41	185.90	77.97	278.98	277.75	99.56
8.	Belanja Tidak Terduga	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.89	0.21	23.95
<b>B.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>968.75</b>	<b>812.47</b>	<b>83.87</b>	<b>1,200.67</b>	<b>928.74</b>	<b>77.35</b>	<b>1,183.37</b>	<b>902.26</b>	<b>76.24</b>	<b>1,321.61</b>	<b>970.05</b>	<b>73.40</b>	<b>1,217.19</b>	<b>980.32</b>	<b>80.54</b>
1.	Belanja Pegawai	84.61	77.24	91.29	94.70	88.79	93.76	100.98	95.02	94.10	89.14	86.53	97.07	69.17	66.39	95.98
2.	Belanja Barang dan Jasa	463.05	387.98	83.79	584.31	445.91	76.31	531.82	448.84	84.40	538.54	468.15	86.93	637.91	560.79	87.91
3.	Belanja Modal	421.09	362.88	86.18	521.66	394.04	75.53	550.57	358.40	65.10	693.93	415.38	59.86	510.11	353.14	69.23
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>1,830.48</b>	<b>1,507.55</b>	<b>82.36</b>	<b>2,151.71</b>	<b>1,714.46</b>	<b>79.68</b>	<b>2,280.24</b>	<b>1,822.70</b>	<b>79.93</b>	<b>2,387.63</b>	<b>1,928.52</b>	<b>80.77</b>	<b>2,282.03</b>	<b>2,010.03</b>	<b>88.08</b>

Sumber: Bagian Keuangan Kabupaten Indragiri Hilir 2014-2018, diolah

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang optimal, maka pendapatan daerah hendaklah dibelanjakan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya Belanja Daerah haruslah dibelanjakan pada aktivitas-aktivitas yang menjadi skala prioritas berupa pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat, meliputi pendidikan, kesehatan, fasilitas umum/sosial yang layak. Prinsip belanja daerah yang transparan dan akuntabel hendaknya diterapkan untuk mewujudkan perencanaan anggaran yang efektif dan efisien.

**b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur adalah gambaran tentang belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja kebutuhan aparatur. Tabel 3.20 menyajikan Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013–2017. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Belanja Pemenuhan Aparatur Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2013 sebesar Rp 823,780,995,963.00, meningkat menjadi Rp 978,165,337,760.00 pada tahun 2017. Dilihat dari komponen pembentukannya. Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Indragiri Hilir lebih besar pada komponen Biaya Langsung. Realisasi komponen Belanja Langsung meningkat dari Rp 216,708,846,367.00 pada tahun 2013, menjadi Rp 268,943,204,291.00 pada tahun 2017. Sementara itu, realisasi komponen Biaya Tidak Langsung meningkat dari Rp 607,072,149,596.00 pada tahun 2013 menjadi Rp 709,222,133,469.00 pada tahun 2017.

Tabel 3.20.  
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Realiasi 2013 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
<b>A.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>607,072,149,596.00</b>	<b>658,607,313,132.00</b>	<b>720,208,794,880.00</b>	<b>766,658,645,617.00</b>	<b>709,222,133,469.00</b>
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	412,044,929,237.00	435,907,999,197.00	475,321,513,494.00	506,941,484,586.00	463,814,319,514.00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan**)	188,523,996,560.00	216,303,914,103.00	238,403,185,380.00	253,101,678,569.00	235,822,202,770.00
3.	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4,095,120,000.00	4,273,120,000.00	4,227,120,000.00	4,317,720,000.00	8,450,500,000.00
4.	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	2,408,103,799.00	2,122,279,832.00	2,256,976,006.00	2,297,762,462.00	1,135,111,185.00
5.	Insentif pemungutan pajak daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>216,708,846,367.00</b>	<b>247,012,496,494.00</b>	<b>233,861,098,692.00</b>	<b>282,238,465,018.00</b>	<b>268,943,204,291.00</b>
1.	Belanja Honorarium PNS**)	30,777,663,000.00	28,926,835,160.00	35,739,484,120.00	28,458,468,050.00	25,163,822,949.00
2.	Belanja Honorarium Non PNS	45,799,755,000.00	58,239,193,500.00	57,912,066,200.00	55,240,585,500.00	26,122,590,300.00
3.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	456,200,000.00	508,000,000.00	347,240,000.00	350,430,000.00	474,010,000.00
4.	Belanja Kursus. Pelatihan. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	3,924,695,777.00	4,151,805,396.00	2,583,105,881.00	2,744,893,091.00	3,004,915,987.00
5.	Belanja premi asuransi kesehatan	781,207,000.00	0.00	3,111,969,975.00	15,031,351,000.00	20,795,036,000.00
6.	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	19,521,323,620.00	20,154,876,405.00	26,205,907,513.00	23,988,917,400.00	26,024,876,945.00
7.	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	2,672,993,500.00	3,272,647,200.00	2,078,639,200.00	1,178,935,355.00	1,301,657,558.00
8.	Belanja Pakaian Kerja	1,764,732,800.00	1,740,555,500.00	2,126,828,400.00	1,665,388,000.00	3,379,093,000.00
9.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	2,708,472,700.00	4,387,175,294.00	2,648,929,200.00	1,484,338,750.00	1,403,089,090.00
10.	Belanja perjalanan dinas**)	93,823,975,952.00	105,860,645,159.00	85,326,535,473.00	138,516,593,091.00	136,176,944,016.00
11.	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Belanja Modal (Kantor. Mobil Dinas. Meubelair. peralatan dan perlengkapan dll)	14,477,827,018.00	19,770,762,880.00	15,780,392,730.00	13,578,564,781.00	25,097,168,446.00
	<b>TOTAL</b>	<b>823,780,995,963.00</b>	<b>905,619,809,626.00</b>	<b>954,069,893,572.00</b>	<b>1,048,897,110,635.00</b>	<b>978,165,337,760.00</b>

Sumber: Bagian Keuangan Kabupaten Indragiri Hilir 2014-2018, diolah

Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan, Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain bertambahnya jumlah aparatur, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tahun 2013-2017 Kabupaten Indragiri Hilir dapat disajikan pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21.  
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2017

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2017	978,165,337,760.00	2,015,028,969,807.47	48.54
2	Tahun Anggaran 2016	1,048,897,110,635.00	1,944,730,575,696.32	53.94
3	Tahun Anggaran 2015	954,069,893,572.00	1,822,696,766,796.34	52.34
4	Tahun Anggaran 2014	905,619,809,626.00	1,719,935,853,444.25	52.65
5	Tahun Anggaran 2013	823,780,995,963.00	1,514,193,872,307.13	54.40

Sumber: Bagian Keuangan Kabupaten Indragiri Hilir 2014-2018, diolah

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah terus mengalami penurunan. Pada tahun 2013, persentase belanja kebutuhan aparatur adalah sebesar 54,40% menurun menjadi 48.54% pada tahun 2017.

**c. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama**

Analisis Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran Daerah yang juga penting dilakukan adalah analisis pengeluaran priodik yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda

pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah. Sementara itu belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah. Hasil analisis pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017 disajikan pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22.  
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>669,990,583,870.00</b>	<b>760,748,021,633.00</b>	<b>908,410,501,774.00</b>	<b>953,005,061,588.00</b>	<b>989,036,258,380.00</b>	<b>4.05</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	412,044,929,237.00	435,907,999,197.00	475,321,513,494.00	506,941,484,586.00	463,814,319,514.00	1.20
2	Tambahan Penghasilan PNS	188,523,996,560.00	216,303,914,103.00	238,403,185,380.00	253,101,678,569.00	235,822,202,770.00	2.29
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4,095,120,000.00	4,273,120,000.00	4,227,120,000.00	4,317,720,000.00	8,450,500,000.00	7.80
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	65,323,419,500.00	0.00	3,604,887,522.00	3,343,353,933.00	4,547,596,896.00	4.03
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	0.00	104,262,988,333.00	186,853,795,378.00	185,300,824,500.00	276,401,639,200.00	6.97
7	Belanja Bunga	3,118,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Pembiayaan Pengeluaran</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pembayaran pokok utang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>669,990,583,870.00</b>	<b>760,748,021,633.00</b>	<b>908,410,501,774.00</b>	<b>953,005,061,588.00</b>	<b>989,036,258,380.00</b>	<b>4.05</b>

Sumber: Bagian Keuangan Kabupaten Indragiri Hilir 2014-2018, diolah

Dari Tabel 3.22 dapat dilihat bahwa Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Indragiri Hilir tumbuh sebesar 4.05 persen. Pertumbuhan ini sepenuhnya merupakan kontribusi dari alokasi Belanja Langsung. Hal ini mempertegas bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir secara konsisten melakukan dan menerapkan kebijakan pembangunan daerah yang menekankan pada pelayanan publik dan pembangunan daerah.

### **3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah**

Berkaitan dengan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Sementara, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai

bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pada bagian ini akan dipaparkan: (a) Hasil Analisis Sumber Penutup Defisit Riil, (b) Hasil Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, (c) Hasil Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, dan (d) Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah.

#### A. Analisis Penutup Defisit Riil

Hasil analisis penutup defisit riil anggaran Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017 disajikan pada Tabel 3.23. Defisit riil diperoleh dari realisasi Pendapatan Daerah dikurangi dengan realisasi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh Defisit Riil Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2017 sebesar Rp 106,650,302,900.41.

Tabel 3.23.

Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2017

No.	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1,528,967,549,216.01	1,806,644,740,410.14	1,680,542,169,802.79	1,837,954,673,581.36	1,807,880,418,621.23
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	1,507,552,028,361.13	1,714,460,853,444.25	1,822,696,766,796.34	1,928,515,575,696.32	2,010,028,969,807.47
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6,641,843,946.00	5,475,000,000.00	0.00	16,215,000,000.00	5,000,000,000.00
<b>A.</b>	<b>Defisit riil</b>	<b>14,773,676,908.88</b>	<b>86,708,886,965.89</b>	<b>-142,154,596,993.55</b>	<b>-106,775,902,114.96</b>	<b>-207,148,551,186.24</b>
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	425,442,758,650.09	440,247,896,539.18	528,511,915,930.07	386,163,222,875.82	215,943,442,894.32
2.	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	23,916,668.00	0.00	2,000,000,000.00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	-1,438,773,425.00	0.00	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>425,442,758,650.09</b>	<b>438,809,123,114.18</b>	<b>528,535,832,598.07</b>	<b>386,163,222,875.82</b>	<b>217,943,442,894.32</b>
<b>A+ B</b>	<b>Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>440,216,435,558.97</b>	<b>525,518,010,080.07</b>	<b>386,381,235,604.52</b>	<b>279,387,320,760.86</b>	<b>10,794,891,708.08</b>

Sumber: Bagian Keuangan Kabupaten Indragiri Hilir 2014-2018, diolah



Komposisi penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit riil anggaran adalah seperti pada Tabel 3.24. Dari tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa, penutupan deficit sepenuhnya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Tabel 3.24.  
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	425,442,758,650.09	440,247,896,539.18	528,511,915,930.07	386,163,222,875.82	215,943,442,894.32
2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	23,916,668.00	0.00	2,000,000,000.00
5	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Penerimaan piutang daerah	0.00	-1,438,773,425.00	0.00	0.00	0.00
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	440,216,435,558.97	525,518,010,080.07	386,381,235,604.52	279,387,320,760.86	10,794,891,708.08

Sumber: Bagian Keuangan Kabupaten Indragiri Hilir 2014-2018, diolah

## B. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis sisa lebih perhitungan anggaran merupakan gambaran tentang pembentukan komposisi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Dengan mengetahui SiLPA periode sebelumnya, dapat diketahui dari mana sumber perolehan SiLPA serta seberapa besar kontribusi komponen pembentuk SiLPA tersebut. Hasil analisis sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) disajikan pada Tabel 3.25.

Tabel 3.25.  
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017		Rata-rata Petumbuhan
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
	<b>Jumlah SiLPA</b>	<b>425,442,758,650.09</b>	<b>100.00</b>	<b>440,247,896,539.18</b>	<b>100.00</b>	<b>528,511,915,930.07</b>	<b>100.00</b>	<b>386,163,222,875.82</b>	<b>100.00</b>	<b>215,943,442,894.32</b>	<b>100.00</b>	<b>-12.68</b>
1.	Pelampauan penerimaan PAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,898,309,295.58	3.66	0.00
2.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,405,415,832.63	1.58	0.00
3.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	425,442,758,650.09	100.00	440,247,896,539.18	100.00	528,511,915,930.07	100.00	386,163,222,875.82	100.00	59,688,298,268.11	27.64	-32.48
5.	Sisa dana alokasi khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,951,419,498.00	67.12	0.00
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Bagian Keuangan Kabupaten Indragiri Hilir 2014-2018, diolah

**C. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran. Analisis ini merupakan penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah seperti pada tabel 3.26.

Tabel 3.26.  
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Saldo kas neraca daerah	425,442,758,650.09	440,247,896,539.18	528,511,915,930.07	386,163,222,875.82	215,943,442,894.32
	Dikurangi:					
2.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kegiatan lanjutan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	425,442,758,650.09	440,247,896,539.18	528,511,915,930.07	386,163,222,875.82	215,943,442,894.32

Sumber: Bagian Keuangan Kabupaten Indragiri Hilir 2014-2018, diolah

**3.3. Kerangka Pendanaan**

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Setelah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas, berikutnya dilakukan pengalokasian sumber penerimaan tersebut ke pos-pos belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pengalokasian masing-masing sumber penerimaan memiliki sejumlah kebijakan yang harus diperhatikan, antara lain: (a) Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan

retribusi pajak dipungut; (b) Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah; (c) Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah; (d) Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan, dan (e) Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

### **3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah**

Pada Proyeksi Pendapatan daerah menggunakan asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah meningkat dan terjadi peningkatan efektifitas penggunaan belanja daerah. Berdasarkan pada analisa kinerja pendapatan periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 bahwa pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir terbesar berasal dari dana perimbangan yang bersumber dari dana alokasi umum. Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN. Belanja daerah diarahkan untuk dapat meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban akan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah 2018-2023 disajikan pada Tabel 3.27.

Tabel 3.27.  
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2018-2023

NO.	URAIAN	APBD 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan (%)
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.904.514.228.670,66</b>	<b>2.137.942.076.167,04</b>	<b>2.202.472.472.283,64</b>	<b>2.266.086.428.372,68</b>	<b>2.330.409.474.494,76</b>	<b>2.406.985.635.933,50</b>	<b>4,79%</b>
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>169.844.881.097,36</b>	<b>180.103.946.097,36</b>	<b>189.843.215.183,80</b>	<b>201.726.817.166,80</b>	<b>214.379.727.274,32</b>	<b>229.399.008.499,16</b>	<b>6,20%</b>
1.	Pendapatan Pajak	37.467.558.883,00	41.632.558.883,00	44.183.970.930,09	44.782.806.331,27	44.872.729.622,90	46.148.073.735,53	4,26%
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	7.593.652.960,00	12.687.717.960,00	7.007.986.250,00	7.447.058.900,00	7.929.987.230,00	8.491.542.376,00	2,26%
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.640.282.909,00	11.640.282.909,00	11.925.469.840,27	12.210.656.771,54	12.495.843.702,81	12.781.030.634,08	1,89%
4.	Lain-lain PAD yang sah	113.143.386.345,36	114.143.386.345,36	126.725.788.163,44	137.286.295.163,99	149.081.166.718,61	161.978.361.753,55	7,44%
<b>B.</b>	<b>PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.356.075.510.000,00</b>	<b>1.595.141.578.535,00</b>	<b>1.650.996.316.544,56</b>	<b>1.680.298.898.630,00</b>	<b>1.709.541.262.623,96</b>	<b>1.748.670.370.817,26</b>	<b>5,22%</b>
1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	195.933.787.000,00	321.224.080.990,00	342.515.185.544,56	349.160.062.630,00	354.215.818.623,96	370.125.782.817,26	13,57%
3.	Dana Alokasi Umum	918.602.922.000,00	960.554.017.545,00	995.117.651.000,00	1.017.775.356.000,00	1.041.961.964.000,00	1.065.181.108.000,00	3,01%
4.	Dana Alokasi Khusus	241.538.801.000,00	313.363.480.000,00	313.363.480.000,00	313.363.480.000,00	313.363.480.000,00	313.363.480.000,00	5,34%
<b>C.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>378.593.837.573,30</b>	<b>362.696.551.534,68</b>	<b>361.632.940.555,28</b>	<b>384.060.712.575,88</b>	<b>406.488.484.596,48</b>	<b>428.916.256.617,08</b>	<b>2,53%</b>
1.	Pendapatan Hibah	72.627.000.000,00	71.718.400.000,00	71.718.400.000,00	71.718.400.000,00	71.718.400.000,00	71.718.400.000,00	-0,25%
2.	Dana Darurat							
3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	99.092.735.534,68	99.092.735.534,68	101.520.507.555,28	103.948.279.575,88	106.376.051.596,48	108.803.823.617,08	1,89%
4.	Pendapatan Dana Penyesuaian	146.756.324.000,00	168.394.033.000,00	188.394.033.000,00	208.394.033.000,00	228.394.033.000,00	248.394.033.000,00	11,10%
5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintahan Daerah Lainnya	60.117.778.038,62	-	-	-	-	-	
NO.	URAIAN	APBD 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan (%)

6.	Dana Insentif Daerah	-	23.491.383.000,00	-	-	-	-	-
	<b>BELANJA</b>	<b>2.179.523.698.075,58</b>	<b>2.251.940.855.743,94</b>	<b>2.243.797.472.283,64</b>	<b>2.307.586.428.372,68</b>	<b>2.368.409.474.494,76</b>	<b>2.439.985.635.933,50</b>	<b>2,28%</b>
<b>A.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.105.680.131.098,30</b>	<b>1.163.378.177.977,80</b>	<b>1.205.756.907.342,46</b>	<b>1.241.271.592.220,68</b>	<b>1.276.920.959.184,76</b>	<b>1.354.875.423.013,50</b>	<b>4,15%</b>
1.	Belanja Pegawai	771.011.743.214,00	819.746.198.000,00	828.042.390.970,00	840.523.026.834,55	853.190.872.237,07	866.048.735.320,62	2,35%
2.	Belanja Bunga		-	-	-	-	-	
3.	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00%
4.	Belanja Hibah	66.649.465.000,00	25.828.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	60.000.000.000,00	-2,08%
5.	Belanja Bantuan Sosial	1.385.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	16,72%
6.	Belanja Bagi Hasil	4.156.121.184,30	5.432.027.684,30	5.119.195.718,01	5.222.986.523,13	5.280.271.685,29	5.463.961.611,15	5,62%
7.	Belanja Bantuan Keuangan	259.677.801.700,00	297.709.846.853,50	343.595.320.654,46	366.525.578.863,00	389.449.815.262,40	413.362.726.081,73	9,74%
8.	Belanja Tidak Terduga	800.000.000,00	10.662.105.440,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	44,27%
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.073.843.566.977,28</b>	<b>1.088.562.677.766,14</b>	<b>1.038.040.564.941,17</b>	<b>1.066.314.836.152,00</b>	<b>1.091.488.515.310,00</b>	<b>1.085.110.212.920,00</b>	<b>0,21%</b>
1.	Belanja Pegawai	68.759.338.400,00	58.456.413.077,00	55.743.347.897,44	57.261.691.775,20	58.613.532.158,48	58.271.013.820,44	-3,26%
2.	Belanja Barang dan Jasa	642.838.300.114,68	665.434.876.141,27	634.550.870.491,67	651.834.841.865,53	667.223.431.254,70	663.324.395.445,77	0,63%
3.	Belanja Modal	362.245.928.462,60	364.671.388.547,87	347.746.346.552,07	357.218.302.511,27	365.651.551.896,82	363.514.803.653,80	0,07%

Sumber: Hasil Analisis

### 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

#### A. Proyeksi SiLPA

Penghitungan SiLPA pada periode tahun 2018 menggunakan data APBD Tahun 2018, serta proyeksi tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menggunakan dasar pertumbuhan SiLPA pada periode tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan rata-rata SiLPA dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 2,61%, maka diperoleh proyeksi SiLPA sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28.  
Realisasi dan Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)  
Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun Anggaran 2018-2023

Uraian	APBD 2018	Proyeksi					Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
SiLPA	318.459.469.404,92	135.225.842.825,13	60.000.000.000,00	55.000.000.000,00	50.000.000.000,00	45.000.000.000,00	2,61

Sumber: Hasil Analisis

#### B. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2019 sampai dengan 2023 menggunakan hasil dari perhitungan kinerja rata-rata pertumbuhan belanja kurun waktu 2013-2017. Berdasarkan analisis tersebut sehingga diketahui nilai dan tingkat pertumbuhan Belanja Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dari periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 3.29.

Tabel 3.29.  
Realisasi dan Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2018-2023

No	Uraian	APBD 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan (%)
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.105.680.131.098,30</b>	<b>1.163.378.177.977,80</b>	<b>1.205.756.907.342,46</b>	<b>1.241.271.592.220,68</b>	<b>1.276.920.959.184,76</b>	<b>1.354.875.423.013,50</b>	<b>4,15%</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	488.816.894.528,00	518.112.325.148,00	523.565.403.795,57	531.783.608.122,84	539.989.104.360,81	548.318.143.008,68	2,32%
2	Tambahan Penghasilan PNS	266.491.758.589,00	286.777.790.755,00	289.680.108.444,82	294.046.300.309,06	298.477.985.051,27	302.976.145.064,61	2,60%
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	12.990.600.000,00	12.990.600.000,00	12.990.600.000,00	12.990.600.000,00	12.990.600.000,00	12.990.600.000,00	0,00%
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.712.490.097,00	1.865.482.097,00	1.806.278.729,62	1.702.518.402,65	1.733.182.824,99	1.763.847.247,33	-8,25%
5	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00%
6	Belanja Hibah	66.649.465.000,00	25.828.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	60.000.000.000,00	-2,08%
7	Belanja Bantuan Sosial	1.385.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	16,72%
8	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.156.121.184,30	5.432.027.684,30	5.119.195.718,01	5.222.986.523,13	5.280.271.685,29	5.463.961.611,15	5,62%
9	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	259.677.801.700,00	297.709.846.853,50	343.595.320.654,46	366.525.578.863,00	389.449.815.262,40	413.362.726.081,73	9,74%
10	Belanja Tidak Terduga	800.000.000,00	10.662.105.440,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	44,27%
<b>B</b>	<b>Pembiayaan Pengeluaran</b>	<b>13.450.000.000,00</b>	<b>9.825.000.000,00</b>	<b>18.675.000.000,00</b>	<b>13.500.000.000,00</b>	<b>12.000.000.000,00</b>	<b>12.000.000.000,00</b>	<b>-2,26%</b>
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-	-	-
3	Penyertaan Modal	13.450.000.000,00	9.825.000.000,00	18.675.000.000,00	13.500.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	-2,26%
	<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>1.119.130.131.098,30</b>	<b>1.173.203.177.977,80</b>	<b>1.224.431.907.342,46</b>	<b>1.254.771.592.220,68</b>	<b>1.288.920.959.184,76</b>	<b>1.366.875.423.013,50</b>	<b>4,08%</b>

Sumber: Hasil Analisis



Dari Tabel 3.29 perlu dijelaskan tentang penyertaan modal. Penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir difokuskan pada empat BUMD, yaitu PT. Bank Riau Kepri, PD. BPR Gemilang, PDAM Tirta Indragiri dan PT. KIG. Penyertaan modal pada PT. Bank Riau Kepri dan PD. BPR Gemilang merupakan kelanjutan dan peningkatan penyertaan modal dari tahun-tahun sebelumnya.

Penyertaan modal untuk PT. Bank Riau Kepri untuk priode 2019- dialokasikan sebesar Rp.7.700.000.000 sedangkan pada tahun 2020 penyertaan modal terhadap Bank Riau Kepri berakhir dan dialokasikan sebesar Rp.11.550.000.000 sehubungan pada tahun 2018 penyertaan modal pada Bank Riau Kepri dialokasikan sebesar 50% sehingga pada tahun 2020 dilakukan penambahan penyertaan modal tersebut sebagai komitmen Pemerintah Daerah menjalankan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penambahan penyertaan modal, sedangkan pada tahun 2021-2023 direncanakan dialokasikan sebesar Rp.5.000.000.000 per tahun.

Penyertaan Modal untuk PD. BPR Gemilang pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp.2.125.000.000 sedangkan pada tahun 2021 penyertaan modal terhadap PD. BPR Gemilang berakhir dan dialokasikan sebesar Rp.3.500.000.000 sehubungan pada tahun 2018 penyertaan modal pada PD. BPR Gemilang dialokasikan sebesar 65,71% sehingga pada tahun 2021 dilakukan penambahan penyertaan modal tersebut sebagai komitmen Pemerintah Daerah menjalankan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penambahan penyertaan modal, sedangkan pada tahun 2022-2023 direncanakan dialokasikan sebesar Rp.2.000.000.000 per tahun.

Sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk lebih memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya maka pada periode 2018-2023, telah mencanangkan untuk melakukan penyertaan modal bagi pengembangan PDAM Tirta Indragiri Hilir dan PT. KIG.

Penyertaan modal bagi pengembangan PDAM Tirta Indragiri Hilir dimaksudkan untuk penyediaan air baku bagi masyarakat di Indragiri Hilir. Hal ini didasarkan pada kondisi wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang terletak di wilayah pesisir dan didominasi oleh lahan gambut. Dengan kondisi wilayah seperti ini, sebagian besar masyarakat Indragiri Hilir mengandalkan air hujan atau mendatangkan air dari hulu sungai, terutama untuk kebutuhan memasak. Dengan dikembangkannya PDAM Tirta Indragiri Hilir secara persisten kebutuhan air baku, khususnya untuk memasak bagi masyarakat Indragiri Hilir dapat terpenuhi. Untuk kepentingan tersebut Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir merencanakan untuk melakukan penyertaan modal pada PDAM Tirta Indragiri Hilir sebesar Rp. 3.000.000.000 per tahun pada periode 2018-2023.

Sementara itu penyertaan modal bagi pendirian PT. KIG dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan dunia usaha dan berkontribusi dalam proses percepatan pembangunan daerah. Adapun tujuan dari pendirian PT. KIG adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang sesuai dengan prinsip perekonomian nasional. Selain itu pendirian PT. KIG bertujuan untuk mendatangkan keuntungan, melindungi industri daerah dan usaha kerakyatan serta dalam rangka meningkatkan pendapatan kesejahteraan petani dan masyarakat. Untuk kepentingan pendirian dan pengembangan PT. KIG, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir merencanakan untuk melakukan penyertaan modal pada perusahaan tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000 per tahun pada periode 2018-2023.

### **C. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**

Hasil dari analisis serta pengolahan data-data yang dilakukan pembahasan sebelumnya sehingga dapat disajikan proyeksi Riil Kemampuan Keuangan daerah, kapasitas Riil akan dikelompokkan penerimaan yang merupakan sumber pendapatan daerah yang sudah menjadi hak daerah serta pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah maka dapat diketahui besaran dana untuk mendanai pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.30.

Tabel 3.30.  
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2019-2023

Uraian	APBD 2018	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Pendapatan</b>	<b>1.904.514.228.670,66</b>	<b>2.137.942.076.167,04</b>	<b>2.202.472.472.283,64</b>	<b>2.266.086.428.372,68</b>	<b>2.330.409.474.494,76</b>	<b>2.406.985.635.933,50</b>
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	318.459.469.404,92	135.225.842.825,13	60.000.000.000,00	55.000.000.000,00	50.000.000.000,00	45.000.000.000,00
Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-	-
<b>Total penerimaan</b>	<b>2.222.973.698.075,58</b>	<b>2.273.167.918.992,17</b>	<b>2.262.472.472.283,64</b>	<b>2.321.086.428.372,68</b>	<b>2.380.409.474.494,76</b>	<b>2.451.985.635.933,50</b>
Dikurangi						
Pengeluaran pembiayaan	13.450.000.000,00	9.825.000.000,00	18.675.000.000,00	13.500.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00

Sumber: Hasil Analisis

#### D. Kebijakan Alokasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian efektifitas program dan keterbatasan anggaran serta pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow of priority program*) sangat penting, maka diperlukan kebijakan Alokasi Anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan ditentukannya prioritas alokasi anggaran.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 2 (dua). Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut:

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Proyeksi Rencana dan Proporsi Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.31 dan Tabe 3.32 berikut ini:

Tabel 3.31.  
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun Anggaran 2019-2023

Uraian	Proyeksi				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	2.273.167.918.992,17	2.262.472.472.283,64	2.321.086.428.372,68	2.380.409.474.494,76	2.451.985.635.933,50
<b>KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH</b>	1.099.964.741.014,37	1.038.040.564.941,17	1.066.314.836.152,00	1.091.488.515.310,00	1.085.110.212.920,00
<b>PRIORITAS I</b>	1.163.378.177.977,80	1.205.756.907.342,46	1.241.271.592.220,68	1.276.920.959.184,76	1.354.875.423.013,50
<b>PRIORITAS II</b>	1.088.562.677.766,14	1.038.040.564.941,17	1.066.314.836.152,00	1.091.488.515.310,00	1.085.110.212.920,00

Sumber: Hasil Analisis

Tabel 3.32.  
Proporsi Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun Anggaran 2019-2023

Uraian	Proyeksi									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	Nilai (Rp)	Proporsi (%)	Nilai (Rp)	Proporsi (%)	Nilai (Rp)	Proporsi (%)	Nilai (Rp)	Proporsi (%)	Nilai (Rp)	Proporsi (%)
<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	2.273.167.918.992,17	100,00%	2.262.472.472.283,64	100,00%	2.321.086.428.372,68	100,00%	2.380.409.474.494,76	100,00%	2.451.985.635.933,50	100,00%
<b>KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH</b>	1.099.964.741.014,37	48,39%	1.038.040.564.941,17	45,88%	1.066.314.836.152,00	45,94%	1.091.488.515.310,00	45,85%	1.085.110.212.920,00	44,25%
<b>PRIORITAS I</b>	1.163.378.177.977,80	51,18%	1.205.756.907.342,46	53,29%	1.241.271.592.220,68	53,48%	1.276.920.959.184,76	53,64%	1.354.875.423.013,50	55,26%
<b>PRIORITAS II</b>	1.088.562.677.766,14	47,89%	1.038.040.564.941,17	45,88%	1.066.314.836.152,00	45,94%	1.091.488.515.310,00	45,85%	1.085.110.212.920,00	44,25%

## BAB

## 4

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan Analisis isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis. Permasalahan pembangunan adalah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Isu-isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional.

### 4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Penerapan rencana pembangunan daerah akan menimbulkan permasalahan karena adanya *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJMD dan RPJPD). Terjadinya *gap* tersebut juga karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi riil daerah saat penyusunan dokumen perencanaan. Upaya penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan sehingga penyelesaian secara cepat, tepat dan berkelanjutan dapat dilakukan. Rumusan masalah menurut aspek dan fokus sebagai berikut:



#### **4.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

##### **4.1.1.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

1. Pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir trendnya menurun dari 7,91% pada tahun 2012 menurun menjadi 6,88% pada tahun 2014 dan sekitar 4,70% pada tahun 2017. Terus menurunnya pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir selain disebabkan oleh kelembaban ekonomi dunia juga belum berkembangnya sektor-sektor lainnya diluar sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan besar serta konstruksi.
2. PDRB per kapita Indragiri Hilir meski memiliki trend meningkat namun relatif rendah dibanding PDRB tetangga dengan kinerja untuk peningkatan PDRB per kapita yang cenderung terus menurun.
3. Jumlah penduduk miskin di Indragiri Hilir adalah yang tertinggi dibanding kabupaten tetangga dengan kinerja penurunan jumlah penduduk miskin yang semakin melemah yaitu dari 86,82% tahun 2015 menjadi 81,61% pada tahun 2018.

##### **4.1.1.2. Fokus Kesejahteraan Sosial**

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indragiri Hilir sebesar 66,17 tahun 2017 adalah yang terendah dibanding IPM kabupaten sekitarnya dan masih jauh dari capaian IPM minimal dunia (80). Selama periode 2014 - 2018, kinerja indikator IPM trendnya menurun dan dibawah target RPJMD.
2. Harapan lama sekolah (HLS) tahun 2017 sebesar 11,88 tahun adalah terendah dibanding kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu (12,29 tahun dan Pelalawan (11,89 tahun). Selama periode 2014 - 2018, kinerja indikator harapan lama sekolah trendnya menurun dan dibawah target RPJMD.
3. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017 sebesar 7,18 tahun adalah yang terendah dibanding kabupaten tetangga

seperti Indragiri Hulu (7,89 tahun) dan Pelalawan (8,19 tahun). Selama periode 2014 – 2018, kinerja indikator rata-rata lama sekolah trendnya menurun dan dibawah target RPJMD.

4. APK SD/MI Indragiri Hilir tahun 2017 sebesar 101,73%, terendah dibandingkan APK SD/MI kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu (114,21%) dan Pelalawan (113,66%). Selama periode 2014- 2018, kinerja indikator APK SD/MI trendnya menurun.
5. APK SMP/MTs Indragiri Hilir tahun 2017 sebesar 100,85%, tertinggi dibanding kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu (86,35%) dan Pelalawan (76,74%), namun capaian APK ini masih dibawah target RPJMD.
6. Angka harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016 sebesar 67,07 tahun adalah yang terendah dibanding angka harapan hidup kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu (69,83 tahun) dan Pelalawan (70,54 tahun). Selama periode 2014 – 2018, realisasi kinerja indikator ini trendnya menurun.
7. Prevalensi balita gizi buruk tahun 2016 sebesar 1,3% lebih tinggi dibanding prevalensi Provinsi Riau yang sebesar 1,1%.
8. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017 sebesar 4,08%. Capaian tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 yaitu sebesar 7,16%, lebih tinggi dibanding Kabupaten tetangga Indragiri Hulu (4,82%) dan Provinsi Riau (6,22%). Selama periode 2014 – 2018, realisasi kinerja indikator pengangguran terbuka trendnya menurun.

#### **4.1.1.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

1. Relatif stagnannya cakupan fasilitas seni yang sekaligus menggambarkan masih lemahnya pembinaan dan pengelolaan grup kesenian.

2. Semakin berkurangnya perhatian generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam grup-grup kesenian.
3. Masih lemahnya pembinaan olahraga sehingga belum berkembang klub-klub olahraga di masyarakat yang berorientasi pada prestasi.

## **4.2. Aspek Pelayanan Umum**

### **4.2.1. Layanan Urusan Wajib Dasar**

#### **4.2.1.1. Pendidikan**

1. Selama periode 2014 - 2017, APM SD/MI Indragiri Hilir berkisar antara 94,62% - 94,62% yang berarti ada sekitar 3,13% - 5,38% penduduk umur pendidikan SD/MI yang belum sekolah. Capaian ADM SD/MI Indragiri Hilir tahun 2017 lebih rendah dibanding capaian APM Indragiri Hulu (99,17%) dan Provinsi Riau (97,08%).
2. Selama periode 2014 - 2017, APM SMP/MTs Indragiri Hilir berkisar antara 75,99% - 79,96%, yang berarti ada sekitar 20,04% - 24,61% penduduk usia 7 -13 yang yang belum sekolah.
3. Selama periode 2014 - 2017, APS 7 - 12 tahun Indragiri Hilir trendnya menurun yaitu dari 98,51% pada tahun 2014 menjadi 97,56% pada tahun 2017, yang berarti sebesar 1,49% - 2,44% penduduk umur 7 - 12 tahun Indragiri Hilir yang tidak berpartisipasi pada pendidikan di SD/MI.
4. APS 13 - 15 tahun Indragiri Hilir selama periode 2014 - 2017 berkisar antara 89,04% - 90,77%, yang menggambarkan bahwa penduduk umur 13 - 15 tahun Indragiri Hilir yang tidak berpartisipasi pada pendidikan SMP/MTs sebesar 9,23% - 10,96%.
5. Persentase bangunan SD/MI dengan kondisi baik Pada tahun 2017 hanya sebesar 24,61%. Pada tahun 2016, persentase bangunan SD/MI dalam kondisi baik hanya sebesar 23,53%, lebih rendah dibanding Indragiri Hulu (28,40%), Pelalawan (34,00%) dan Provinsi Riau 29%).

6. Pada tahun 2017, persentase bangunan SMP/MTs di Indragiri Hilir dengan kondisi baik hanya sebesar 19,70%. Pada tahun 2016, bangunan SMP/MTS dengan kondisi baik di Indragiri Hilir hanya 20,15%, lebih rendah dibanding Indragiri Hulu (25,15%), Pelalawan (39,76%) dan Provinsi Riau (28,54%).
7. Pada tahun 2017, masih terdapat sekitar 19,08% guru yang belum berkualifikasi S1/D.IV sehingga yang bersangkutan belum tersertifikasi sebagai guru.

#### **4.2.1.2. Kesehatan**

1. Rasio ideal daya tampung rumah sakit adalah setiap 1.000 penduduk : 1 tempat tidur. Pada tahun 2016, Indragiri Hilir kekurangan sekitar 306 tempat tidur lagi.
2. Rasio puskesmas per 1.000 penduduk telah memenuhi standar nasional namun kualitas pelayanan puskesmas relatif belum standar sebagai akibat rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan puskesmas.
3. Rasio dokter spesialis per 1.000 penduduk masih jauh dibawah norma yaitu sebesar 0,037 (norma 0,15) pada tahun 2017, lebih rendah dibandingkan capaian rasio dokter indragiri Hulu tahun 2016 yang sebesar 0,04. Pada tahun 2017, Indragiri Hilir masih membutuhkan sebanyak 107 dokter spesiali sehingga rasionya ideal.
4. Rasio dokter umum per 1.000 penduduk masih jauh dibawah norma yaitu sebesar 0,1080 (norma 0,40). Pada tahun 2017, Indragiri Hilir masih membutuhkan tambahan dokter umum sebanyak 242 orang dokter umum.
5. Rasio dokter gigi per 1.000 penduduk masih jauh dibawah norma yaitu 0,0039 (norma 0,11). Pada tahun 2017, Indragiri Hilir masih membutuhkan 62 orang dokter gigi.

6. Rasio perawat per 1.000 penduduk masih dibawah norma yaitu 0,44 (norma 1,1), Pada tahun 2017, Indragiri Hilir masih membutuhkan perawat sekitar 487 orang lagi.
7. Rasio Bidan per 1.000 penduduk masih dibawah norma yaitu 0,59 (norma 1,0). Pada tahun 2017, Indragiri Hilir masih membutuhkan sebanyak 693 orang Bidan.

#### **4.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

1. Proporsi jalan Kabupaten dengan kondisi Baik (14,22%) dan Mantap (59,23%), masih dibawah target dan standar Nasional (80%).
2. Proporsi jembatan dengan kondisi Baik (35,96%) dan Mantap (43,36%), masih dibawah standar Nasional.
3. Proporsi irigasi dalam kondisi baik sebesar 27 %, Jauh dibawah Target yang ditetapkan (40%)
4. Rendahnya kualitas infrastruktur yang dibangun dan kondisi lahan gambut dan rawa pasang surut mengakibatkan tingginya frekuensi pemeliharaan terhadap infrastruktur tersebut.

#### **4.2.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

1. Rendahnya rumah tangga pengguna air bersih sampai tahun 2018 hanya sebesar 21,49% dari total rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hilir jauh dari sebesar 98%
2. Masih terbatasnya pembangunan rumah layak huni di Indragiri Hilir yaitu berkisar antara 75 unit - 162 unit per tahun selama periode 2009 - 2017. Disisi lain, jumlah rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 16.868 unit rumah.
3. Masih adanya permukiman kumuh di perkotaan yaitu sebesar 25%.
4. Masih Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dasar di wilayah permukiman

5. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau ( RTH) Publik di seluruh Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Permendagri 20 % dari Luas Perkotaan

#### **4.2.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

1. Rasio rumah ber IMB baru 1,22% dari total rumah yang ada di Indragiri Hilir tahun 2017.
2. Rasio personil Satpol PP per 10.000 penduduk masih rendah yaitu 0,02 sehingga penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kurang optimal.
3. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketertiban masyarakat masih rendah dengan kinerja 13,33% sebagai konsekuensi kurangnya tenaga Satpol PP.
4. Belum tersedianya data Daerah Rawan Bencana dimasing-masing Kecamatan secara menyeluruh di Kabupaten indragiri Hilir sebagai acuan identifikasi bencana.
5. Dukungan anggaran pada APBD Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana masih rendah.
6. Pengalokasian dana siap pakai tidak berada di BPBD Kabupaten Indragiri Hilir sehingga sulit diakses ketika terjadi bencana dalam rangka penanggulangan bencana.
7. Rehabilitasi dan Rekonstruksi daerah terdampak bencana belum terlaksana dengan baik karena terbentuk anggaran.
8. Kurangnya keterlibatan multi pihak dalam penanggulangan bencana dan membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

#### **4.2.1.6. Sosial**

1. Belum optimalnya pendataan, verifikasi dan validasi data kemiskinan keluarga penerima manfaat (KPM) melalui sistem layanan dan

rujukan terpadu dan SINK-NG menuju penyediaan Basis Data Terpadu (BDT).

2. Belum optimalnya penanganan bencana alam dan bencana sosial karena kekurangan penyediaan logistik bencana dan biaya operasional.
3. Belum optimal penanganan anak bermasalah sosial.

#### **4.2.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar**

##### **4.2.2.1. Tenaga Kerja**

1. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Indragiri Hilir adalah yang terendah dibanding Kabupaten sekitar dan Provinsi Riau dengan capaian kinerja yang terus menurun.
2. Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Indragiri Hilir tahun 2017 capaiannya sebesar 82,74%.
3. Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan sebesar 75% dan ada sekitar 25% yang belum mendapat pelatihan.
4. Tidak berjalannya peranan dan fungsi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah dibentuk di perusahaan.

##### **4.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Indeks pembangunan gender (IPG) Indragiri Hilir tahun 2017 sebesar 81,47% adalah yang terendah dibandingkan IPG kabupaten tetangga dan Provinsi Riau.
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indragiri Hilir yaitu sebesar 60,73% juga termasuk yang terendah dibanding kabupaten tetangga dan Provinsi Riau.
3. Masih lemahnya kelembagaan/institusi yang mendukung pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak, kurangnya pemahaman tentang kota layak anak serta terbatasnya sarana dan prasarana dalam menuju kota layak anak.

##### **4.2.2.3. Pangan**

1. Pencapaian kinerja penanganan daerah rawan pangan relatif rendah.

#### **4.2.2.4. Pertanahan**

1. Persentase luas tanah yang bersertifikat baru sebesar 41,39%.
2. Belum memadainya SDM dalam bidang Sistem Pendaftaran Tanah.
3. Masih terdapatnya aset kekayaan daerah yang belum memiliki bukti autentik, sehingga rawan terjadi penyerobotan;

#### **4.2.2.5. Lingkungan Hidup**

1. Belum memiliki laboratorium lingkungan dan perlengkapannya guna memberikan hasil sampel yang cepat untuk disampaikan dalam waktu dan tempat tertentu
2. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan
3. Masing tingginya pencemaran lingkungan hidup.
4. Masih tingginya kerusakan lingkungan hidup, kerusakan DAS, degradasi kawasan pesisir, abrasi pantai, kebakaran hutan dan lahan.
5. Persentase penanganan sampah masih belum optimal, baru sekitar 81,50%.
6. Tingginya alih fungsi hutan dan lahan.
7. Kabupaten Indragiri Hilir belum memiliki tempat pemrosesan akhir (TPA) sesuai standar (*Sanitary landfill/control landfill*).

#### **4.2.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

1. Cakupan penerbitan kartu keluarga masih 84,23% dari total keluarga di Indragiri Hilir
2. Kepemilikan KTP (e-KTP) hanya 57% dari total penduduk Indragiri Hilir yang harus ber KTP.
3. Kepemilikan akte kelahiran hanya sebanyak 570 per 1.000 penduduk Indragiri Hilir. Masih ada 430 penduduk dari 1.000 penduduk yang belum ada akta kelahiran.



4. Keterbatasan peralatan untuk mendukung kegiatan administrasi kependudukan.
5. Tidak sinkronnya data penduduk baik jumlah penduduk ataupun LAMPID (Lahir, Mati, Pindah, Datang) karena tidak dilaporkan secara berkala dari Kecamatan.

#### **4.2.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

1. Capaian desa maju masih sangat rendah yaitu hanya 79 desa pada tahun 2017.
2. Masih sangat lemahnya kapasitas Pemerintahan dan Kelembagaan Desa memmaneg kegiatan-kegiatan desa.
3. Masih rendahnya pengelolaan admisnistrasi keuangan desa.

#### **4.2.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

1. Cakupan peserta KB aktif masih 85,96% pada tahun 2017.
2. Cakupan PUS peserta KB masih 73,92%.
3. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh anak, remaja dan bina lansia.
4. Belum optimalnya peran masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKB/PK) serta pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan dan kemandirian peserta KB.
5. Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan dan kemandirian peserta KB.
6. Masih kurangnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).
7. Masih kurangnya tenaga (petugas lapangan) sarana dan prasarana.

#### **4.2.2.9. Perhubungan**

1. Kurangnya SDM Teknis Perhubungan baik Kualitas maupun Kuantitas dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir
2. Kurangnya Ketersediaan Produk Hukum baik peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati
3. Kurangnya sarana Prasarana perhubungan di kabupaten Indragiri Hilir.
4. Belum beroperasi secara maksimal UPT pengujian kendaraan bermotor , terminal dan perpajakan pada Dinas Perhubungan di kabupaten Indragiri Hilir
5. Kurangnya Pemeliharaan dan atau peningkatan Prasarana perhubungan di kabupaten Indragiri Hilir
6. Masih rendahnya pemenuhan standar layanan angkutan di kabupaten Indragiri Hilir

#### **4.2.2.10. Komunikasi dan Informatika**

1. Masih lemahnya cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan.
2. Sebagian besar penduduk Indragiri Hilir belum dapat mengakses internet untuk mendapatkan informasi.

#### **4.2.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

1. Koperasi aktif di Indragiri Hilir sebesar 66,05% pada tahun 2017.
2. Usaha mikro dan kecil persentasenya sebesar 67% pada tahun 2017.
3. Rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi yang mengakibatkan tertinggalnya kinerja koperasi, dan kurang baiknya citra koperasi.
4. Kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi, sebagian besar masih sangat rendah.
5. Sumberdaya manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah relatif rendah kualitas.

6. Kebanyakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menggunakan teknologi sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk.
7. Terbatasnya jaringan pasar dan pemasaran koperasi dan UKM, Kebanyakan hanya memiliki akses pasar di tingkat lokal dan sedikit yang melakukan ekspor melalui usaha menengah dan besar yang berlaku sebagai perantara.

#### **4.2.2.12. Penanaman Modal**

1. Realisasi PMDN masih rendah yaitu Rp 2.230 milyar tahun 2017, dibawah target Rp 20.000 milyar.
2. Realisasi PMA jauh masih rendah yaitu USD 2,86 juta pada tahun 2017, dibawah target USD 74 juta.
3. Belum maksimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal (pemantauan pembinaan dan pengawasan).
4. Terbatasnya kompetensi SDM dan sarana dan prasarana penunjang kegiatan BP2MPD.
5. Lemahnya koordinasi antar dinas/instansi kecamatan dan kelurahan dalam pengurusan perijinan penanaman modal.
6. Masih kurangnya upaya promosi daerah melalui kegiatan berskala regional, nasional maupun internasional.

#### **4.2.2.13. Kepemudaan dan Olahraga**

1. Masih rendah persentase wirausaha muda.
2. Masih rendah cakupan pembinaan olahraga.
3. Masih rendah cakupan pelatih yang bersertifikat.
4. Masih rendah cakupan pembinaan atlet muda.
5. Pembinaan olahraga belum beroreantasi prestasi.

#### **4.2.2.14. Statistik**

1. Data-data untuk pengukuran indikator kinerja pada RPJMD banyak yang tidak tersedia di Indragiri Hilir Dalam Angka, kecamatan dalam Angka, PDRB, Statistik Daerah dan Indikator kesejahteraan serta terbitan lainnya.
2. Koordinasi dan sinergi antara Pemerintahan Kabupaten khususnya SKPD dengan BPS Kabupaten Indragiri Hilir masih lemah.

#### **4.2.2.15. Persandian**

#### **4.2.2.16. Kebudayaan**

1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya masih terbatas.
2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya masih terbatas kuantitas dan kualitasnya.
3. Mulai ditinggalkannya nilai-nilai budaya dan kesenian tradisional dikalangan Masyarakat.
4. Belum optimalnya pemeliharaan Cagar budaya dan bangunan bersejarah.

#### **4.2.2.17. Perpustakaan**

1. Jumlah perpustakaan yang masih terbatas yaitu sebanyak 4.972 orang pada tahun 2017.
2. Koleksi buku perpustakaan yang masih terbatas dengan pelayanan yang belum baik.

#### **4.2.2.18. Kearsipan**

1. Masih relatif rendahnya pengelolaan arsip secara baku yaitu sebesar 30,36% pada tahun 2017.
2. Terbatasnya jumlah SDM yang berkualitas untuk pengelola kearsipan yaitu sebanyak 3 orang.

### **4.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan**

#### **4.2.3.1. Pariwisata**

1. Belum berkembang destinasi dan objek pariwisata di Indragiri Hilir sehingga jumlah wisatawan ke Indragiri Hilir hanya sebanyak 3.115 orang tahun 2017.
2. Belum memadai sarana dan prasarana pendukung objek wisata yang ada.

#### **4.2.3.2. Pertanian**

1. Produksi beras Indragiri Hilir belum mencukupi konsumsi penduduk Indragiri Hilir.
2. Produktivitas kelapa masih rendah yaitu 1,18 ton kopra/hektar tahun 2017.
3. Produktivitas kelapa sawit rakyat masih rendah yaitu 2,34 ton CPO/hektar, diibawah produktivitas perkebunan besar Indragiri Hilir (4,24 ton CPO/hektar)
4. Pembangunan infrastruktur kebun terutama pembangunan tanggul mekanik dan normalisasi saluran yang masih jauh dibawah kebutuhan.
5. Kegiatan Rehabilitasi/peremajaan kebun kelapa belum dapat menyentuh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Harga kelapa petani PIR maupun petani non PIR berfluktuatif dan cenderung rendah.

#### **4.2.3.3. Perdagangan**

1. Nilai ekspor bersih perdagangan Indragiri Hilir yang ysng venderung terus menurun, dimana pada tahun 2017 hanya USD184,87 juta.
2. Kontribusi sektor perdagangan yang masih dibawah target 15% dari

#### **4.2.3.4. Perindustrian**

1. Nilai produksi usaha menengah kecil masih rendah dan kalah jauh dibanding Kuantan Senginggi.
2. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB relatif masih rendah yaitu 28,34% pada tahun 2017.

3. Belum optimalnya pengembangan industri kecil menengah dan kewirausahaan masyarakat.
4. Masih rendahnya jumlah industri pengolahan.
5. Rendahnya daya saing industri kecil menengah di Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **4.2.3.5. Transmigrasi**

1. Kegiatan-kegiatan ketransmigrasian secara terbatas pada transmigrasi lokal.

#### **4.2.3.6. Kelautan dan Perikanan**

1. Produksi perikanan Indragiri Hilir masih mengandalkan perikanan tangkap dan sangat terbatas pada perikanan budidaya.
2. Konsumsi ikan penduduk Indragiri Hilir yang rata-ratanya sebesar 38,67 ton/kapita perlu didorong meningkat menjadi 50,80ton/kapita/tahun.
3. Masih terdapatnya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan beracun dan alat terlarang.
4. Terjadinya konflik antara sesama nelayan dalam hal menentukan lokasi penangkapan.
5. Rendahnya kemampuan petani pembudidaya tambak dalam hal merevitalisasi tambaknya.

#### **4.2.4. Penunjang Urusan**

##### **4.2.4.1. Perencanaan Pembangunan**

1. Terbatasnya Sumberdaya kuantitas (fungsional) dan kualitas rencana pembangunan.
2. Hasil Evaluasi (RPJMD, RKPD dan lainnya) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan berikutnya.
3. Belum optimalnya *e-planning* dan *e-budgeting*.

4. Terbatasnya sumber data yang lengkap dan akurat, yang dapat dipedomani dalam penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

#### **4.2.4.2. Keuangan**

1. Realisasi Pendapatan daerah yang kurang tercapai.
2. Masih rendahnya pendapatan asli daerah.
3. Masih kurangnya petugas yang memiliki kompetensi dibidang pemeriksaan pajak daerah.
4. Pemerintah Indragiri Hilir belum sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual.

#### **4.2.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan**

1. Nilai akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah masih bernilai CC (50,01) yang terkategori memadai, masih dibawah target RPJMD. Nilai akuntabilitas Indragiri Hilir tahun 2017 ini masih dibawah nilai Indragiri Hulu (54,02) dan Pelalawan (50,29).
2. Penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada standar kompetensi jabatan.
3. Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, baik diklat struktural, fungsional maupun teknis.
4. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan pegawai oleh sebagian pejabat struktural kepada PNS bawahannya yang indiscipliner, sementara peraturan disiplin PNS telah memberikan kewenangan sesuai dengan jenjang jabatannya.

#### **4.2.4.4. Penelitian dan Pengembangan**

1. Masih sedikit pemanfaatan hasil peneltian untuk pembangunan di Indragiri Hilir.

5. Penelitian yang dilakukan spasial dan tidak komprehensif sehingga sukar diterapkan.

#### **4.2.4.5. Pengawasan**

1. Masih banyak temuan APIP yang belum ditindak-lanjuti. Tahun 2017, persentase APIP yang ditindaklanjuti sebesar 83,68%.
2. Masih terbatas jumlah personel APIP yang hanya 12 orang dan idealnya sebanyak 45 orang.
3. Lemahnya penegakan hasil temuan APIP sehingga terjadi serupa berulang kembali.

#### **4.2.4.6. Sekretariat Dewan**

1. Rasio pembahasan prolegda yang semakin menurun, dimana pada tahun 2017 sebesar 85,48%.

### **4.3. Isu-Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat dimasa datang. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional. Dalam periode 2018 – 2023 isu-isu strategis penting di Indragiri Hilir sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir perlu ditingkatkan mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program Bupati dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan.



2. Pemantapan pemerataan pembangunan.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal baik kuantitas maupun kualitasnya. Panjang jalan dan jembatan serta infrastruktur perhubungan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Selain itu sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi,serta perumahan perlu penangannan yang lebih baik lagi. hal ini dalam rangka mengakomodir penyediaan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan,serta infrastruktur dasar lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi parameter pembangunan suatu wilayah. Sarana dan prasarana penunjang produktivitas pertanian masih belum efektif, hal ini berbanding lurus dengan pemasaran produksi pertanian yang juga masih belum optimal,luas perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir adalah yang terluas di Indonesia,namun belum mampu mengangkat perekonomian masyarakat dengan berbagai permasalahan yang dihadapi salah satunya adalah harga kelapa yang cenderung rendah.Kondisi-kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan, serta berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal.

4. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS di Kabupaten Indragiri Hilir masih terbilang lambat. Kondisi-kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa, pelayanan kebutuhan dasar lain seperti PMKS serta penguatan kearifan lokal melalui modal sosial dan akses lapangan pekerjaan perlu ditingkatkan.

5. Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing.

Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten

Indragiri Hilir sampai pada tahun 2017 teridentifikasi bahwa beberapa layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal. Seperti layanan PAUD dan akses pendidikan 12 tahun yang belum mampu tercapai secara optimal. Kondisi ini dapat merupakan bagian dari efek domino berbagai aspek seperti misalnya aspek fisik seperti infrastruktur, sarana dan prasarana maupun non-fisik seperti sosial, budaya maupun kapasitas finansial.

6. Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Pelayanan kesehatan dasar yang masih belum mampu terjangkau oleh keseluruhan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya daerah perdesaan dan infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

7. Pengelolaan potensi sumberdaya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar khususnya perkebunan dan pangan serta perikanan untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi dan menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir. Produksi Perikanan, hasil perkebunan kelapa sawit, kelapa dan tanaman kelapa ini perlu didukung dengan industri hilir sehingga nilai tambah dapat diperoleh oleh Kabupaten Kabupaten Hilir.

Indragiri Hilir mempunyai beberapa tempat wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi seperti (i) agriwisata yang berupa hamparan ladang padi dan kelapa, (ii) Bukit berbunga indragiri Hilir, (iii) Pantai Solop, (iv) Air Terjun Tembulan Rusa dan (v) Makam Syek Abdurrahman Siddiq Al Banjari. namun secara umum, pariwisata di Indragiri Hilir relatif belum berkembang, dimana objek-objek wisata yang ada belum dikelola dengan baik dan dilengkapi sarana-prasarana yang memadai.

8. Mewujudkan kerukunan, ketentraman dan ketertiban.

Upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial (kemiskinan dan pengangguran), disiplin dan kesadaran masyarakat serta penegakan aturan. Tantangan yang akan dihadapi ke depan yaitu meningkatkan profesionalisme aparat, optimalisasi fungsi institusi-institusi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kesadaran masyarakat.

9. Peningkatan pembangunan sosial ekonomi pedesaan melalui Program DMIJ Plus Terintegrasi

Pada periode sebelumnya Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir meluncurkan Program yang bernama Desa Maju Indragiri Hilir Jaya. Pada perkembangannya, dengan melihat progres positif yang telah dicapai oleh Desa terutama pada program pembangunan fisik dan kegiatan sosial dan keagamaan lainnya, maka dinilai perlu untuk menambah serta mengevaluasi apa saja yang bisa menjadi nilai tambah dari program ini maka diluncurkanlah yang disebut dengan Program DMIJ Plus Terintegrasi.

Program ini sebagai wadah bagi seluruh Stakeholder untuk memberikan perhatiannya ke Desa dan Kelurahan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat Desa dengan menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai porosnya. Setelah rampung pada pembangunan infrastruktur, membuka akses Desa untuk jalannya perekonomian Desa maka Desa diminta untuk mampu mengelola serta mengontrol potensi local Desa sehingga memiliki nilai ekonomis .

Desa diharapkan menjadi pilar kuat Daerah dimana Desa memiliki sumber PADes sendiri dan pengelolanya secara efektif dan efisien dengan SDM yang berkualitas.

10. Peningkatan fungsi terminal bandar laksamana Indragiri menjadi terminal penumpang dan barang.

Pembangunan Terminal Bandar Laksamana Indragiri terletak di Kecamatan Tembilahan Hulu pada tahun 2010 lalu.

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari waktu ke waktu serta berkembangnya industri-industri di beberapa wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir menyebabkan semakin tingginya kegiatan sosial ekonomi di wilayah tersebut. Berkembangnya kegiatan sosial ekonomi sangat berpengaruh terhadap perkembangan transportasi. Kota Tembilahan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting yaitu sebagai pusat pengembangan pembangunan, pusat pemerintahan, perdagangan, industri, serta pusat pelayanan sosial seperti pusat pendidikan, kesehatan serta distribusi barang dan jasa.

Ketersediaan fasilitas terminal baik fasilitas umum maupun fasilitas penunjang, pengoperasian dan pelaksanaan terminal, serta pemeliharaan terminal. Untuk itu dalam upaya memaksimalkan penggunaan Terminal Bandar Laksamana Indragiri perlu ditingkatkan fungsi menjadi terminal penumpang dan barang dan mengupayakan agar masyarakat untuk menggunakan Terminal Bandar Laksamana Indragiri dan meningkatkan kedisiplinan pemilik jasa dan pengguna angkutan penumpang dan barang.

11. Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh.

Dalam rangka Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh dan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan menyusun Perencanaan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan melakukan pengadaan tanah sehingga bisa mendorong pusat pertumbuhan ekonomi dengan melakukan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir

**BAB****5****VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN****5.1. Visi**

Visi, berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan peraturan turunannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Visi dan Misi Kepala Daerah yang disampaikan saat pencalonan atau masa kampanye pertama di depan DPRD menjadi dokumen negara dan pada dasarnya merupakan idealisme dan pemikiran calon kepala daerah terhadap kondisi dan permasalahan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Kepala Daerah terpilih mempunyai keinginan agar pembangunan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dengan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui integrasi semua sumberdaya yang dimiliki.

Disamping itu, visi dan misi calon kepala daerah tersebut juga harus dipadu padankan dengan visi jangka panjang daerah yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025, yaitu:

**“INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG 2025”**

Berdasarkan hasil penelaahan visi pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2005-2025 dan visi misi kepala daerah terpilih, maka visi antara yang hendak diwujudkan Kepala Daerah dalam pembangunan jangka menengah lima tahunan (RPJM) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 adalah;

**“KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT”**

Berdasarkan visi tersebut, untuk memperjelas misi, tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan, maka diberikan penjelasan sebagai berikut:

- KEJAYAAN INHIL artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna positif bagi seluruh warga Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seraya senantiasa mengharapkan ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
- Semakin Maju berarti Melanjutkan pembangunan yang NYATA HASILNYA DAN BENAR-BENAR DIRASAKAN MANFAATNYA baik dalam pembangunan infrastruktur dasar, sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan perbaikan kesejahteraan rakyat yang semakin lebih baik, lebih merata dan berkeadilan, di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan, di desa ataupun kelurahan dan meliputi seluruh wilayah kabupaten, sehingga tercapai pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih berdaya saing positif dan makin diperhitungkan sebagai salah satu barometer pembangunan daerah kabupaten di Indonesia.

- Bermarwah pengertiannya Pemimpin dan rakyat Indragiri Hilir terus BERGERAK BERSAMA, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela dan berkarya untuk negeri, bersama-sama dengan SPIRIT yang terus bergelora, BERKARYA NYATA UNTUK BERJAYA dan saling jaga menjaga kebanggaan positif pada daerahnya Kabupaten Indragiri Hilir tercinta.
- Bermartabat artinya Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang manusiawi dan berkeadilan sosial yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat Indragiri Hilir, pelayanan publik yang responsif, berdemokrasi secara sehat, tidak ada diskriminasi, rakyatnya hidup rukun, tentram dan berbahagia dalam ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

## 5.2. Misi

Misi, berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata lain, Misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan.

Alur pemikiran dalam penyusunan misi tersebut berdasarkan isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena paling aktual atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, dengan memperhitungkan segala peluang yang dimiliki. Rumusan misi dalam rancangan dokumen RPJMD ini merupakan hasil telaahan dan analisis terhadap visi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun Misi Kabupaten Indragiri Hilir dirumuskan sebagai berikut:

Misi 1 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketataan hukum.

- Misi 2 : Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah.
- Misi 3 : Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat.
- Misi 4 : Memantapkan Pembangunan SDM Yang Semakin Berkualitas Dan Berdaya Saing, Serta Meningkatkan Iman Dan Taqwa.
- Misi 5 : Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
- Misi 6 : Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial.
- Misi 7 : Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
- Misi 8 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

### **5.3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada misi yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selama 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana disajikan pada Tabel 5.1 berikut ini.



Tabel. 5.1.  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Tujuan	Sasaran
<b>VISI: UNTUK KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT</b>		
<b>Misi 1: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum.</b>		
1.1.	Memantapkan kinerja pelayanan publik	Memantapkan kinerja pelayanan publik
		1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel
		2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
<b>Misi 2: Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah</b>		
2.1	Memantapkan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat	Memantapkan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat
		1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
		2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak
2.2	Memantapkan pembangunan infrastruktur perhubungan	1. Meningkatnya layanan angkutan darat
		2. Meningkatnya layanan angkutan Perairan, sungai dan penyeberangan
<b>Misi 3: Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat</b>		
3.1	Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang lebih produktif	Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang lebih produktif
		1. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian
		2. Meningkatnya kontribusi sektor perikanan
		3. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata

No.	Tujuan	Sasaran
3.2	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan
		1. Meningkatnya kualitas tutupan lahan
		2. Meningkatnya kualitas udara
		3. Meningkatnya kualitas air
		4. Terwujudnya pengelolaan dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan
<b>Misi 4:</b>		
<b>Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing</b>		
4.1	Mewujudkan kualitas SDM berdaya saing	Mewujudkan kualitas SDM berdaya saing
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan dasar pendidikan sesuai dengan standar
		2. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat
		3. Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat
4.2	Mewujudkan pembangunan SDM beriman dan bertaqwa	Mewujudkan pembangunan SDM beriman dan bertaqwa
		1. Meningkatnya sarana rumah ibadah
		2. Meningkatnya aktivitas keagamaan
<b>Misi 5:</b>		
<b>Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan</b>		
5.1	Meningkatkan partisipasi sosial	Meningkatkan partisipasi sosial
		1. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
		2. Meningkatnya semangat kegotong royongan masyarakat
5.2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
		1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan
		2. Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat
		3. Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat

No.	Tujuan	Sasaran	
<b>Misi 6:</b>			
<b>Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketenteraman kehidupan sosial</b>			
6.1	Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman sosial	Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman sosial	
		1. Menurunnya angka kriminalitas	
		2. Tegaknya prinsip-prinsip demokrasi	
		3. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	
		4. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	
		5. Menurunnya resiko bencana	
<b>Misi 7:</b>			
<b>Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran</b>			
7.1	Menurunkan tingkat pengangguran	Menurunkan tingkat pengangguran	
		1. Meningkatnya kesempatan kerja	
		2. Meningkatnya kualitas tenaga kerja	
7.2	Menurunkan tingkat kemiskinan	Menurunkan tingkat kemiskinan	
			1. Meningkatnya cakupan bantuan kepada masyarakat miskin
			2. Meningkatkan daya beli penduduk miskin
<b>Misi 8:</b>			
<b>Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.</b>			
8.1	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	
		1. Meningkatnya kemandirian ekonomi dan terkendalinya kesenjangan pendapatan	
		2. Terwujudnya percepatan transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan	
		3. Meningkatnya investasi daerah	
		4. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dirumuskan melalui gambaran yang lebih jelas dengan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana dimuat pada Tabel 5.2. berikut ini.

Tabel. 5.2.  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Target Capaian Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
<b>VISI: KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT</b>										
<b>Misi 1: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum</b>										
1.1	Memantapkan kinerja pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	44,36	55.00	65.00	69.00	72.00	79.00	79.00
	1.1.1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	1. Nilai AKIP (predikat)	CC	B	B	BB	BB	A	A
			2. Nilai LPPD ( Nilai )	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
			3. Opini BPK atas LKPD (predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			4. Keterbukaan informasi (%)	32.28	20.00	40.00	60.00	80.00	95.00	95.00
1.1.2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	75,22	78,47	80,08	83,12	87,65	89,22	89,22	
<b>Misi 2: Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah</b>										
2.1	Memantapkan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat		Rata-rata persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar	27.03	28.58	30.16	31.70	33.32	36.10	36.10
	2.1.1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	1. Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	17.57	19.00	22.49	26.08	29.75	34.08	34.08
			2. Persentase Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	18.8	22.46	24.17	25.66	27.25	30.75	30.75

	2.1.2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih layak	1.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air bersih layak (%)	36.58	39.66	42.75	45.83	48.92	52.00	52.00
	2.1.3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak	1.	Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak (%)	60.34	61.38	62.43	63.47	64.52	65.56	65.56
2.2	Memantapkan pembangunan infrastruktur perhubungan		Konektivitas Wilayah (Desa yang terhubung) (%)		1.7	7.00	17.00	32.00	52.00	77.00	77.00
	2.2.1	Meningkatnya layanan angkutan darat	1.	Konektivitas desa yang memiliki layanan angkutan darat (%)	9.43	14.00	24.00	39.43	59.00	84.00	84.00
	2.2.2	Meningkatnya layanan angkutan Perairan, sungai dan penyeberangan	2.	konektivitas desa yang memiliki layanan angkutan perairan, sungai dan penyeberangan (%)	17.54	23.00	33.00	48.00	68.00	93.00	93.00
<b>Misi 3: Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat</b>											
3.1	Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang lebih produktif		PDRB Sektor Pertanian dan Pariwisata (Rp Ribu)		29,683,059.75	31,485,017.58	33,286,975.41	35,088,933.25	36,890,891.08	38,692,848.92	38,692,848.92
	3.1.1	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian	1.	PDRB sektor pertanian (Rp Ribu)	29,683,059.75	31,485,017.58	33,286,975.41	35,088,933.25	36,890,891.08	38,692,848.92	38,692,848.92
	3.1.2	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan	1.	PDRB sektor pertanian (Rp Ribu)	29,683,059.75	31,485,017.58	33,286,975.41	35,088,933.25	36,890,891.08	38,692,848.92	38,692,848.92
	3.1.3	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	1.	PDRB sektor pariwisata (Rp Ribu)	286,136.55	303,677.09	321,217.64	338,758.18	356,298.73	373,839.28	373,839.28
3.2	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)		53,04	53,04	53.92	54.79	55.66	56.54	56.54
	3.2.1	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	1.	Indeks tutupan lahan (indeks)	24,69	24,69	24.7	24.71	24.71	24.72	24.72

	3.2.2	Meningkatnya Kualitas Udara	1.	Indeks kualitas udara (indeks)	91,67	91,67	91.88	92.09	92.29	92.50	92.50
	3.2.3	Meningkatnya Kualitas Air	1.	Indeks kualitas air (indeks)	52,22	52,22	54.91	57.61	60.30	62.99	62.99
	3.2.4	Terwujudnya pengelolaan dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan	1.	Persentase pengelolaan dan penanganan sampah (%)	70.10	69.15	68.22	67.29	66.38	65.48	65.48
<b>Misi 4: Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan iman dan taqwa</b>											
4.1	Mewujudkan kualitas SDM berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks)		66,30	66.53	67.53	68.08	68.90	69.72	69.72
	4.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar pendidikan sesuai dengan standar	1.	Angka Melek Huruf (%)	99.60	99.61	99.72	99.78	99.80	99.85	99.85
			2.	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7.18	7.25	7.26	7.38	7.62	7.86	7.86
			3.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,88	12.05	12.76	12.96	13.26	13.56	13.56
	4.1.2	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	67,07	67,09	68,00	68,40	68,80	70,00	70,00
	4.1.3	Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat	1.	Pengeluaran per kapita (Ribuan rupiah)	11,003.59	11,223.66	11,448.14	11,677.10	11,910.64	12,148.86	12,148.86
4.2	Mewujudkan pembangunan SDM beriman dan bertaqwa		Rasio rumah ibadah per jumlah penduduk (Rasio)		1 : 422	1:415	1:408	1:402	1:396	1:390	1:390
	4.2.1	Meningkatnya sarana rumah ibadah	1.	Rasio rumah ibadah per jumlah penduduk (Rasio)	1 : 422	1:415	1:408	1:402	1:396	1:390	1:390
<b>Misi 5: Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.</b>											
5.1	Meningkatkan partisipasi sosial		Cakupan partisipasi sosial (%)		51.20	52.35	53.5	54.65	55.8	56.95	56.95
	5.1.1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	82.39	82.69	82.99	83.29	83.59	83.89	83.89
	5.1.2	Meningkatnya semangat kegotong royongan masyarakat	1.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (%)	20.00	22.00	24.00	26.00	28.00	30.00	30.00

5.2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Desa dengan peningkatan Status Desa dalam Indeks Desa membangun ( Desa )		2	2	48	48	48	49	195
5.2.1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59.00	63.10	63.9	64.8	65.78	66.78	66.78
5.2.2	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat	1.	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi (%)	85.00	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00	90.00
5.2.3	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat	1.	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Sosial (%)	60.00	61.00	62.00	63.00	64.00	65.00	65.00
<b>Misi 6: Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial</b>										
6.1	Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman sosial	Indeks keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial (indeks)		60.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
6.1.1	Menurunnya angka kriminalitas	1.	Angka kriminalitas yang tertangani (angka)	4500	4450	4400	4350	4300	4250	4250
6.1.2	Tegaknya prinsip-prinsip demokrasi	1.	Indeks demokrasi Indonesia (indeks)	60.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
6.1.3	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	1.	Jumlah Penyelesaian Kasus Perempuan dan Anak (Kasus)	41	35	40	46	51	57	57
6.1.4	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	1.	Jumlah PMKS yang tertangani (jiwa)	60132	21000	36617	2247	750	500	500
6.1.5	Menurunnya resiko bencana	1.	Luas wilayah terdampak bencana (Km2)	1.76	1.40	1.22	1.04	0.86	0.68	0.68



Misi 7: Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran											
7.1	Menurunkan tingkat pengangguran		Tingkat pengangguran terbuka (%)		3.74	3.43	3.14	2.86	2.61	2.38	2.38
	7.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja	1.	Tingkat kesempatan kerja (%)	96.26	96.57	96.86	97.14	97.39	97.62	97.62
	7.1.2	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	1.	Tenaga Kerja Terlatih (%)	26.56	28.27	29.97	31.68	33.38	35.09	35.09
7.2	Menurunkan tingkat kemiskinan		Persentase penduduk miskin (%)		7,70	7,50	7,40	7,30	7,20	7,10	7,10
	7.2.1	Meningkatnya cakupan bantuan kepada masyarakat miskin	1.	Cakupan bantuan kepada masyarakat miskin (%)	35.07	18.67	19.50	20.00	20.50	21.25	21.25
	7.2.2	Meningkatkan daya beli penduduk miskin	1.	Pengeluaran per kapita penduduk miskin (Rp per kapita per hari)	11,003.59	11,223.66	11,448.14	11,677.10	11,910.64	12,148.86	12,148.86
Misi 8: Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.											
8.1	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah		Laju pertumbuhan ekonomi (%)		4.84	4.98	5.12	5.26	5.4	5.54	5.54
	8.1.1	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan terkendalinya kesenjangan pendapatan	1.	Indeks gini (indeks)	0.33*	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31
			2.	Laju inflasi (%)	4.02	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.4
	8.1.2	Terwujudnya percepatan transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan	1.	Kontribusi sektor pertanian/Perkebunan terhadap PDRB (%)	45.63	45.53	45.08	44.63	44.18	43.72	43.72
			2.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	6.84	28.41	28.48	28.56	28.63	28.71	5.1
	8.1.3	Meningkatnya investasi daerah	1.	Nilai investasi PMDN (Milyar Rupiah)	5,116	5,628	6,191	6,810	7,491	8,240	8,240
			2.	Nilai investasi PMA (Juta US\$)	315	436	381	419	461	507	507

	8.1.4	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (%)	85.90	87.90	88.90	89.90	90.90	91.90	91.90
			2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	83.20	84.20	85.20	86.20	87.20	88.20	88.20

**BAB****6****STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 dirumuskan secara komprehensif. Selain untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat agar dapat diselenggarakan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

**6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR**

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk

mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Pada Tabel 6.1 disajikan keterkaitan antara strategi dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 6.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>VISI: UNTUK KEJAYAAN INDRAGIRI HILIR YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT</b>			
<b>Misi 1: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketaatan hukum</b>			
1.1	Memantapkan kinerja pelayanan publik	1 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	1 Penegakan disiplin ASN
			2 Pencegahan KKN
			3 Perumusan dan Penyerbarluasan informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
			4 Pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah secara berkala
		2 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1 Peningkatan kualitas pelayanan publik
			2 Peningkatan pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi						
<b>Misi 2: Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah</b>									
2.1	Memantapkan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat	1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	1	Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan				
				2	Peningkatan upaya peningkatan jalan				
				3	Peningkatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan				
				2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak	1	Peningkatan jaringan perpipaan air minum		
						2	Peningkatan pembangunan sumur bor di lingkungan permukiman		
				3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak	1	Peningkatan pembangunan drainase di lingkungan permukiman		
						2	Peningkatan rehabilitasi/pemeliharaan drainase di lingkungan permukiman		
						3	Peningkatan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di lingkungan permukiman		
						4	Peningkatan upaya penataan dan pengelolaan lingkungan permukiman dan pemakaman		
				2.2	Memantapkan pembangunan infrastruktur perhubungan	1	Meningkatnya layanan angkutan darat	1	Peningkatan kualitas pelayanan angkutan darat

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi	
				2	Peningkatan pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan publik angkutan darat
		2	Meningkatnya layanan angkutan Perairan, sungai dan penyeberangan	1	Peningkatan kualitas pelayanan angkutan Perairan, sungai dan penyeberangan
				2	Peningkatan pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan publik angkutan Perairan, sungai dan penyeberangan
<b>Misi 3:</b>					
<b>Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat</b>					
3.1	Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang lebih produktif	1	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian	1	Peningkatan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian
				2	Penguatan daya saing produk pertanian
		2	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan	1	Peningkatan kapasitas produksi melalui peningkatan penangkapan ikan dan budidaya
				2	Penguatan daya saing produk perikanan
		3	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	1	Pengembangan pemasaran pariwisata
				2	Pengembangan destinasi wisata

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi	
				3	Pegembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata
3.2	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	1	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	1	Peningkatan tutupan dan performance hutan
				2	Peningkatan kondisi tutupan tanah
				3	Peningkatan konservasi badan air
				4	Peningkatan kondisi habitat
		2	Meningkatnya Kualitas Udara	1	Peningkatan pengawasan terhadap aktivitas pencemaran udara
				2	Peningkatan pengendalian pencemaran udara
		3	Meningkatnya Kualitas Air	1	Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada sumber air
				2	Peningkatan ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global
				3	Pengendalian penggunaan air
				4	Pengendalian tingkat erosi dan sedimentasi
		4	Terwujudnya pengelolaan dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan	1	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan.

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi			
				2	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang arti penting pengelolaan persampahan		
<b>Misi 4: Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan iman dan taqwa</b>							
4.1	Mewujudkan kualitas SDM berdaya saing	1	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar pendidikan sesuai dengan standar	1	Peningkatan pelayanan pendidikan anak usia dini bermutu, merata, dan terjangkau.		
				2	Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bermutu, merata, dan terjangkau.		
				3	Peningkatan pelayanan pendidikan dasar anak berkebutuhan khusus bermutu, merata, dan terjangkau.		
				1	Penguatan upaya promotif dan preventif		
				2	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan		
				3	Percepatan perbaikan gizi masyarakat dan mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat		
		2	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	2	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	4	Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
						3	Meningkatnya
						1	Peningkatan
						3	Meningkatnya



No.	Tujuan	Sasaran		Strategi	
			kemampuan daya beli masyarakat		pengeluaran per kapita masyarakat
4.2	Mewujudkan pembangunan SDM beriman dan bertaqwa	1	Meningkatnya sarana rumah ibadah	1	Peningkatan kuantitas sarana rumah ibadah
				2	Peningkatan kualitas sarana rumah ibadah
				3	Peningkatan upaya rehabilitasi/ pemeliharaan sarana rumah ibadah
		2	Meningkatnya aktivitas keagamaan	1	Peningkatan upaya meningkatkan aktivitas keagamaan
				2	Peningkatan aktivitas kerjasama keagamaan
<b>Misi 5: Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan</b>					
5.1	Meningkatkan partisipasi sosial	1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	1	Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan perempuan
				2	Peningkatan kuantitas dan kualitas kesehatan perempuan
		2	Meningkatnya semangat kegotong royongan masyarakat	1	Peningkatan kepedulian sosial
				2	Peningkatan jumlah kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat
5.2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	1	Peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan, partai politik dan lembaga swasta

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi	
				2	Peningkatan partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi
		2	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat	1	Peningkatan kualitas kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat
				2	Peningkatan peran kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat
		3	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat	1	Peningkatan kualitas kelembagaan sosial
				2	Peningkatan peran kelembagaan sosial
<b>Misi 6: Memantapkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman kehidupan sosial</b>					
6.1	Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman sosial	1	Menurunnya angka kriminalitas	1	Peningkatan upaya pencegahan tindak kriminalitas
				2	Peningkatan upaya penindakan tindak kriminalitas
		2	Tegaknya prinsip-prinsip demokrasi	1	Peningkatan kebebasan sipil (civil liberty)
				2	Peningkatan hak-hak politik (political liberty)
				3	Penguatan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy)
		3	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	1	Peningkatan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
			2 Peningkatan penanganan dan penegakan hukum bagi perlindungan terhadap perempuan dan anak
		4 Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	1 Peningkatan upaya memberikan bantuan sosial kepada PMKS, korban bencana dan komunitas adat terpencil (KAT)
			2 Peningkatan upaya penertiban PMKS
		5 Menurunnya resiko bencana	1 Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana.
			2 Peningkatan kemitraan multipihak dalam penanggulangan bencana.
			3 Pemenuhan tata kelola yang baik bidang penanggulangan bencana.
			4 Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
			5 Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
			6 Peningkatan kapasitas pemulihan bencana.

No.	Tujuan		Sasaran		Strategi
<b>Misi 7: Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran</b>					
7.1	Menurunkan tingkat pengangguran	1	Meningkatnya kesempatan kerja	1	Peningkatan upaya penyusunan dan penyebarluasan data dan informasi ketenagakerjaan
				2	Peningkatan upaya meningkatkan investasi yang bersifat padat karya
		2	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	1	Peningkatan kualifikasi tenaga kerja
				2	Peningkatan kompetensi tenaga kerja
7.2.	Menurunkan tingkat kemiskinan	1	Meningkatnya cakupan bantuan kepada masyarakat miskin	1	Peningkatan perlindungan sosial berbasis masyarakat miskin
				2	Peningkatan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin
		2	Meningkatkan daya beli penduduk miskin	1	Peningkatan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
				2	Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat miskin
<b>Misi 8: Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah</b>					
8.1	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	1	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan terkendalinya kesenjangan pendapatan	1	Peningkatan kemandirian ekonomi
				2	Penurunan kesenjangan pendapatan

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi	
		2	Terwujudnya percepatan transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan	1	Pengembangan kluster industri daerah
				2	Percepatan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah
		3	Meningkatnya investasi daerah	1	Peningkatan promosi investasi
				2	Pemberian kemudahan dan insentif investasi
		4	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1	Peningkatan ketersediaan pangan
				2	Peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan
				3	Peningkatan upaya perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat
				4	Penguatan kelembagaan ketahanan pangan

## 6.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang

komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Arah Kebijakan pembangunan memberikan pedoman bagaimana strategi terhubung ke sasaran dan kapan sasaran tersebut harus dicapai. Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus sasaran dari waktu ke waktu Tahun 2019–2023. Arah kebijakan selama 5 tahun tersebut kemudian dijabarkan kepada prioritas dan sasaran pembangunan. Prioritas dan sasaran pembangunan menjadi tahapan pembangunan selama lima tahun yang nantinya akan menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada saat penyusunan RKPD.

Tahapan dalam pencapaian Indragiri Hilir Gemilang pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 6.1 dan Tabel 6.2.



**Gambar 6.1**  
**Tahapan Pencapaian Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2019-2023**

**Tabel 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023**

Arah Kebijakan				
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
<b>Tema:</b> Meningkatkan Kemajuan, Martabat dan Marwah Indragiri Hilir	<b>Tema:</b> Memperkuat Kemajuan, Martabat dan Marwah Indragiri Hilir	<b>Tema:</b> Memantapkan Kemajuan, Martabat dan Marwah Indragiri Hilir	<b>Tema:</b> Lebih Memantapkan Kemajuan, Martabat dan Marwah Indragiri Hilir	<b>Tema:</b> Menjaga Kemajuan, Martabat dan Marwah Indragiri Hilir
<b>Fokus:</b> Meningkatkan DMIJ Plus terintegrasi pada seluruh wilayah desa dan kelurahan, dan rehabilitasi industri kelapa untuk kesejahteraan rakyat	<b>Fokus:</b> Memperkuat DMIJ Plus terintegrasi melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dan pengembangan industri kelapa untuk kesejahteraan masyarakat	<b>Fokus:</b> Memantapkan DMIJ Plus terintegrasi melalui pemantapan infrastruktur dan penguatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dan peningkatan industri kelapa untuk kesejahteraan masyarakat	<b>Fokus:</b> Lebih memantapkan DMIJ Plus terintegrasi melalui pemeliharaan infrastruktur, pemantapan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dan pemantapan industri kelapa untuk kesejahteraan masyarakat	<b>Fokus:</b> Menjaga DMIJ Plus terintegrasi melalui pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dan industri kelapa untuk kesejahteraan masyarakat

Mengacu pada Tabel 6.2 dapat dinyatakan bahwa fokus arah kebijakan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir 5 (lima) tahun kedepan adalah meningkatkan, memperkuat, memantapkan dan menjada priotas pembangan daerah pada Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus (DMIJ-Pus). Hal ini didasarkan pada diterbitkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin memperkuat peran Desa dalam pembangunan, Desa bukan hanya menjadi objek pembangunan tetapi sekarang menjadi subjek pembangunan. Semangat ini diterima di seluruh daerah di Indonesia pada umumnya, Kabupaten Indragiri Hilir khususnya telah menyambut semangat pembangunan Desa ini dengan meluncurkan Program yang bernama Desa Maju Indragiri Hilir Jaya. Program ini bermula dari tahun 2014 di era kepemimpinan pertama H. Muhammad Wardan, karena pada saat itu Bupati melihat bahwa pembangunan di Desa masih sangat kekurangan, pada saat itu program ini bernama Desa Maju Indragiri Hilir Jaya yang merupakan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Program ini bertujuan sebagai penggerak agar

pembangunan/kegiatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir bercirikan daerah, artinya mengikuti khasanah Indragiri Hilir.

Pada perkembangannya, dengan melihat progres positif yang telah dicapai oleh Desa terutama pada program pembangunan fisik dan kegiatan sosial dan keagamaan lainnya, maka dinilai perlu untuk menambah serta mengevaluasi apa saja yang bisa menjadi nilai tambah dari program ini selanjutnya. pada masa kepemimpinan H. Muhammad Wardan dan H. Syamsuddin Uti di rancanglah sebuah program yang melanjutkan program yang telah dibuat sebelumnya. Bupati sebagai inisiator menempatkan Program ini sebagai wadah bagi seluruh Stakeholder untuk memberikan perhatiannya ke Desa dan Kelurahan, kemudian juga dengan melihat perkembangan pembangunan infrastruktur yang ada maka dinilai perlu untuk memberikan perhatian pada tercapainya porsi besar pada Pendapatan Asli Desa yang berasal dari sumber-sumber ekonomi Desa yang potensial dan belum teroptimalkan.

Konsep pemberdayaan masyarakat Desa yang diusung pemerintah menjadikan ruh dari Program ini. Hal yang paling utama dari program ini adalah efektifitas penggunaan Alokasi Dana Desa, DBH pajak dan retribusi serta bantuan keuangan yang menyentuh kebutuhan dasar Desa. Tujuan akhir dari Program ini adalah mendorong kemandirian Desa sehingga pada akhirnya Desa dapat mengelola potensi yang ada di Desa yang kemudian dijadikan PADes untuk membiayai kebutuhan Desa mereka sendiri. Hal inilah yang dirancang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui beberapa langkah, pada periode yang lalu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir fokus pada pembangunan infrastruktur dan mendukung jalannya Pemerintahan Desa. Pada Periode ini Bupati Indragiri Hilir H. Muhammad Wardan yang kembali dipercaya oleh masyarakat



memimpin Indragiri Hilir merancang untuk kembali dan bekonsentrasi pada pembangunan Desa melalui Program Lanjutan yaitu DMIJ Plus Terintegrasi. Sehingga apa yang telah direncanakan pada periode sebelumnya dapat terkoneksi. Pada periode ini Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat Desa yang menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai porosnya. Setelah rampung pada pembangunan infrastruktur, membuka akses Desa untuk jalannya perekonomian Desa maka Desa diminta untuk mampu mengelola serta mengontrol potensi local Desa sehingga memiliki nilai ekonomis yang nantinya berdampak pada terciptanya Desa maju dan mandiri.

Untuk menjamin berjalannya dengan sukses Program ini maka diperlukan Pendampingan Program. Pendampingan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Fasilitator juga mempunyai peran dalam menjembatani seluruh kebijakan Pemerintah yang ditujukan ke Desa termasuk menjelaskan terkait regulasi yang berhubungan dengan Program DMIJ Plus Terintegrasi. Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi Desa yang tujuan utama nya adalah memunculkan serta memotivasi Desa untuk mendapatkan APBDDesa. Untuk itu diperlukan persiapan yang matang serta Fasilitator harus dibekali Pengetahuan tentang tata cara pendampingan dan teknis menggiring Pemerintah Desa agar menggunakan dana Program sesuai dengan kebutuhannya.

Dasar Hukum dari DMIJ Plus Terintegrasi adalah: (1) Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (2) Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa; (3) Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang

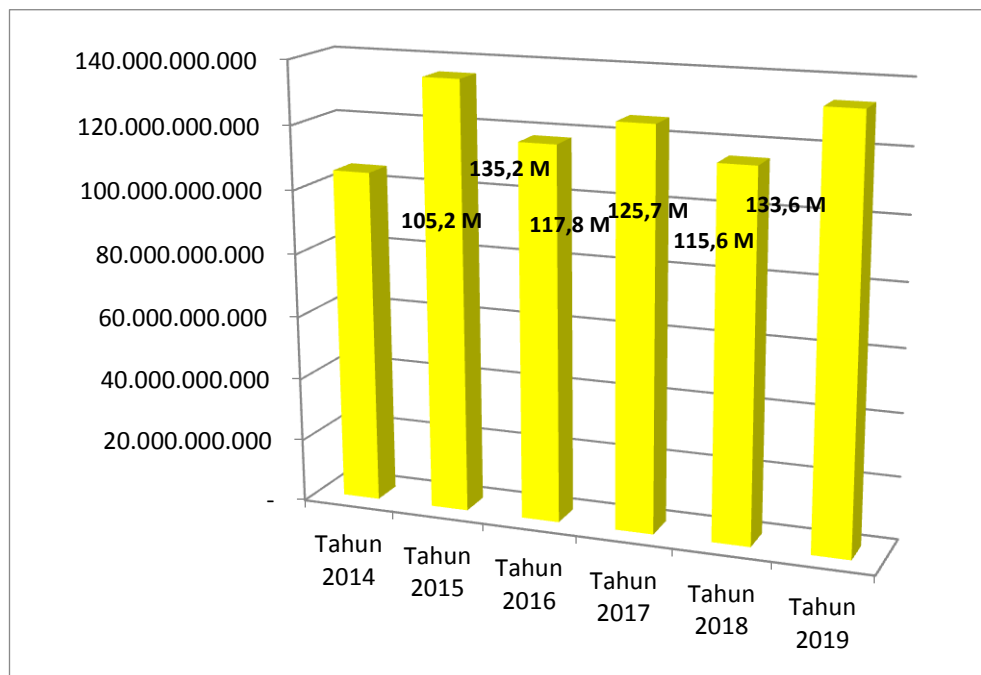
No. 6 tahun 2014 tentang Desa; (4) Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2018 tentang Kecamatan; (5) Permendes No. 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib mekanisme Musyawarah Desa; (6) Permendes No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; (7) Permendagri No. 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; (8) Permendagri No. 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; (9) Permendagri No. 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; (10) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 05 Tahun 2015 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya; (11) Peraturan Daerah No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; (12) Permendagri No. 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; (13) Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; (14) Peraturan Bupati No. 32 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; (15) Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa; (16) Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang PTO Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi; (17) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (18) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa Tahun 2019; dan (19) Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa, Penetapan Alokasi Dana Bantuan Kepada Desa dan Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Melalui Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi.

Secara umum DMIJ Plus Terintegrasi bertujuan untuk meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat desa dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan. Secara khusus bertujuan untuk: (1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan; (2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal dengan mempertimbangkan kelestariannya; (3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan; (4) Menyediakan prasarana sarana sosial dasar yang diprioritaskan oleh masyarakat; (5) Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar Desa melalui BKD dan BKAD; (6) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan (OPD) dan lembaga/koorporasi lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pembangunan dan perbaikan lingkungan hidup di Desa dan Kelurahan; dan (7) Peningkatan PADesa melalui optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Prinsip Dasar DMIJ Plus Terintegrasi adalah: (1) Desentralisasi; (2) Keterpaduan; (3) Efektif dan Efisien; (4) Partisipasi; (5) Transparansi dan Akuntabel; (6) Kesetaraan dan Keadilan Gender; (7) Prioritas; dan (8) Keberlanjutan. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan DIMI Plus Terintegrasi, maka kerangka kerja yang diterapkan adalah: (1) Otonomi merupakan Hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) Pemberdayaan Masyarakat merupakan Pelaksanaan

kegiatan menjadi sarana bagi proses/upaya secara sadar dan terencana untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi secara partisipatif dan demokratis, musyawarah dan mufakat; dan (3) Swakelola merupakan Prinsip Pengelolaan kegiatan pada DMIJ dilaksanakan secara swakelola. Proses dan mekanisme dilakukan sesuai dengan PTO dan peraturan perundangan yang berlaku.

DMIJ Plus Terintegrasi merupakan akan dilaksanakan dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Serta Bantuan Keuangan Kepada Desa. Pendanaan yang diberikan ke desa dalam Program DMIJ secara umum dibagi menjadi 5 kelompok kegiatan, yaitu: (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa; (3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa; (4) Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan (5) Belanja Tak terduga/Penanggulangan bencana. Gambaran tentang pendanaan DMIJ dan DMIJ Plus Terintegrasi tahun 2014-2019 disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 6.2.  
Alokasi Anggaran DMIJ (2014-2018) dan DMIJ Plus  
Terintegrasi (2019) Kabupaten Indragiri Hilir

Selain Program Infrastruktur dan BUM Desa, ada beberapa kegiatan keagamaan, sosial dan penunjang lainnya yang menjadi titik fokus dan merupakan khasanah lokal Indragiri Hilir, diantaranya: (1) Program Magrib Mengaji; (2) Ma'had Kampung Qur'an dengan satu Rumah Tahfizh Qur'an di Desa dan Kelurahan yang berpusat pada Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir; (3) Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A); (4) Kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI); (5) Bantuan Operasional PAUD; (6) Kegiatan 10 Program Pokok PKK; (7) Pembuatan sertifikat tanah kantor Desa maupun tanah hak milik Pemerintah Desa; (8) Kegiatan pendukung Desa Layak Anak; (9) Jambore PKK Desa; (10) Pelaksanaan MTQ ditingkat Desa dan Kecamatan; (11) Pendidikan dan pelatihan Produk Hukum Desa; (12) Desa layak Anak; dan (13) Karang Taruna.

Konsep pemberdayaan yang dianut oleh Program ini bertujuan memberikan kemandirian bagi Warga Desa sehingga apabila semua telah terpenuhi Desa mampu mengelola keuangan dan kewenangan Desa lainnya secara mandiri. Desa diharapkan menjadi pilar kuat Daerah dimana Desa memiliki sumber PADes sendiri dan pengelolannya secara efektif dan efisien dengan SDM yang berkualitas. Pada prinsipnya semua bantuan hanyalah bersifat pemicu dan selanjutnya Desa lah yang mengembangkannya guna mewujudkan kejayaan Indragiri Hilir yang semakin maju, barmarwah dan bermartabat.

Mengacu pada konsep DMIJ Plus Terintegrasi sebagaimana telah dijelaskan di atas, diiringi dengan implementasi program dan kegiatan yang konsisten dan sungguh-sungguh maka Kabupaten Indragiri Hilir akan mampu meningkatkan Indeks Desa Membangun menjadi kondisi

yang jauh lebih baik. Kondisi awal dan target Indeks Desa Membangun (ID) Tahun 2018-2023 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.3. Kondisi Awal dan Target Indeks Desa Membangun Tahun 2018-2019

No	Status IDM	Kondisi Awal (2018)	Target IDM				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Mandiri	0	0	0	1	3	10
2	Desa Maju	2	12	20	30	41	50
3	Desa Berkembang	49	59	70	79	153	137
4	Desa Tertinggal	129	115	103	87	0	0
5	Desa Sangat Tertinggal	17	11	4	0	0	0
	<b>Jumlah Desa</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>

Dari Tabel 6.3. dapat dilihat bahwa dari 197 desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, masih terdapat 17 desa dengan status sangat tertinggal dan 129 desa tertinggl. Sementara itu desa dengan status berkembang dan maju, masing-masing 49 desa dan 2 desa, belum ada desa dengan status mandiri.

Melalui Program/Kegiatan DMIJ Plus Terintegrasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menargetkan tidak terdapat lagi desa sangat tertinggal pada tahun 2021 dan tidak terdapat lagi desa tertinggal pada tahun 2022. Seiring dengan itu, jumlah desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri terus ditingkatkan, sehingga pada akhir RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, yakni pada tahun 2023, jumlah desa berkembang sebanyak 137 desa, jumlah desa maju sebanyak 50 desa, dan jumlah desa mandiri sebanyak 10 desa.

### 6.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2019)

Pembangunan Indragiri Hilir di Tahun 2019 diarahkan kepada **Meningkatkan Kemajuan, Martabat dan Marwah Indragiri Hilir**

sebagai lanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan tahun pertama (2019) disajikan pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>VISI:</b>				
<b>UNTUK KEJAYAAN INDRAGIRI HILIR YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT</b>				
<b>Misi 1:</b>				
<b>Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum</b>				
1.1	Memantapkan kinerja pelayanan publik	1 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	1 Penegakan disiplin ASN	1 Mensosialisasikan peraturan tentang disiplin ASN secara kontinu
				2 Melakukan pembinaan kepada ASN yang indisipliner dan reward kepada ASN berprestasi
			2 Pencegahan KKN	1 Mensosialisasikan peraturan anti KKN
				2 Menjalin kerjasama pengawasan penyelenggaraan pembangunan daerah dengan lembaga penegak hukum
				3 Melakukan pembinaan dan pengawasan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP)
			3 Perumusan dan Penyerbarluasan informasi perencanaan dan	1 Memperkuat perumusan rencana pembangunan
				2 Menerapkan sistem dan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
				pelaksanaan pembangunan daerah		penyerbarluasan informasi perencanaan berbasis <i>information technolgy</i> (IT)	
					3	Menyebarkan informasi tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah berbasis <i>information technolgy</i> (IT)	
			4	Pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah secara berkala	1	Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan internal Perangkat Daerah	
					2	Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah	
		2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1	Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi ASN
					2	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik	
				2	Peningkatan pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan	1	Menyederhanakan prosedur pelayanan publik
						2	Memperjelas dan menyederhanakan persyaratan pengurusan
<b>Misi 2:</b>							
<b>Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah</b>							
2.1	Memantapkan	1	Meningkatnya kualitas jalan	1	Peningkatan pembangunan	1	Meningkatkan kualitas



No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan	
	pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat	dan jembatan		n jalan dan jembatan	perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja pembangunan jalan dan jembatan kabupaten	
					2 Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja pembangunan jalan lingkungan	
				2 Peningkatan upaya peningkatan jalan	1 Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja peningkatan jalan kabupaten	
					2 Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja peningkatan jalan lingkungan	
				3 Peningkatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	1 Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten	
					2 Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja rehabilitasi/pemeliharaan jalan lingkungan	
				2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap air	1 Peningkatan jaringan perpipaan air minum	1 Memberikan bantuan sarana dan prasarana serta pendanaan peningkatan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
		minum layak			1 jaringan perpipaan air minum
					2 Melakukan penyertaan modal pada PDAM Tirta Indragiri
			2	Peningkatan pembangunan sumur bor di lingkungan permukiman	1 Meningkatkan pembangunan sumur bor di lingkungan permukiman
					2 Membangun instalasi pengolahan air minum (IPA) yang bersumber dari sumur bor
		3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak	1	Peningkatan pembangunan drainase di lingkungan permukiman	1 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengukuran pembangunan drainase
					2 Meningkatkan capaian kinerja pembangunan drainase
			2	Peningkatan rehabilitasi/pemeliharaan drainase di lingkungan permukiman	1 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengukuran rehabilitasi/pemeliharaan drainase
					2 Meningkatkan capaian kinerja rehabilitasi/pemeliharaan drainase
			3	Peningkatan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di lingkungan permukiman	1 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengukuran pembangunan IPAL
					2 Meningkatkan capaian kinerja pembangunan IPAL

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
				4	<p>Peningkatan upaya penataan dan pengelolaan lingkungan pemukiman dan pemakaman</p> <p>1 Meningkatkan upaya penataan bangunan</p> <p>2 Meningkatkan tata kelola lingkungan pemakaman</p> <p>3 Meningkatkan upaya pemberdayaan komunitas perumahan</p>
2.2	Memantapkan pembangunan infrastruktur perhubungan	1	Meningkatnya layanan angkutan darat	1	<p>Peningkatan kualitas pelayanan angkutan darat</p> <p>1 Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi ASN perhubungan angkutan darat</p> <p>2 Meningkatkan sarana dan prasarana angkutan darat</p> <p>3 Meningkatkan pengawasan kelayakan sarana angkutan darat</p>
				2	<p>Peningkatan pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan publik angkutan darat</p> <p>1 Menyederhanakan prosedur pelayanan publik angkutan darat</p> <p>2 Memperjelas dan menyederhanakan persyaratan pengurusan uji kelayakan angkutan darat</p> <p>3 Menertibkan pengelolaan Tepi jalan umum</p>
		2	Meningkatnya layanan angkutan Perairan, sungai dan penyeberangan	1	<p>Peningkatan kualitas pelayanan angkutan Perairan, sungai dan penyeberangan</p> <p>1 Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi ASN perhubungan angkutan Perairan, sungai dan penyeberangan</p> <p>2 Meningkatkan sarana dan</p>

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					<p>prasarana angkutan Perairan,sungai dan penyeberangan</p> <p>3 Meningkatkan pengawasan kelayakan sarana angkutan Perairan,sungai dan penyeberangan</p>
				2 Peningkatan pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan publik angkutan Perairan,sungai dan penyeberangan	<p>1 Menyederhanakan prosedur pelayanan publik angkutan Perairan,sungai dan penyeberangan</p> <p>2 Memperjelas dan menyederhanakan persyaratan pengurusan kelengkapan angkutan Perairan,sungai dan penyeberangan</p>
<b>Misi 3:</b>					
<b>Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat</b>					
3.1	Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang lebih produktif	1	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian	1	<p>Peningkatan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian</p> <p>1 Meningkatkan infrastruktur pertanian</p> <p>2 Mengembangkan SDM pertanian</p> <p>3 Memperkuat kelembagaan pertanian</p> <p>4 Mengembangkan alat dan mesin pertanian</p> <p>5 Meningkatkan pembiayaan usaha pertanian</p> <p>6 Memperkuat penguasaan teknologi dalam</p>

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					merespon dinamika dan perubahan iklim
					7 Memastikan kecukupan dan kontinuitas ketersediaan sarana produksi
					8 Meningkatkan koordinasi lintas sektor
			2	Penguatan daya saing produk pertanian	1 Mewujudkan efisiensi produksi pertanian
					2 Mewujudkan harga produk pertanian yang bersaing
					3 Meningkatkan pemasaran produk pertanian
		2 Meningkatnya kontribusi sektor perikanan	1	Peningkatan kapasitas produksi melalui peningkatan penangkapan ikan dan budidaya	1 Memantapkan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap
					2 Memantapkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya
					3 Mengembangkan SDM perikanan
					4 Memperkuat kelembagaan perikanan
					5 Meningkatkan infrastruktur perikanan
					6 Meningkatkan pembiayaan usaha perikanan
					7 Memperkuat penguasaan teknologi dalam merespon dinamika dan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					perubahan iklim
					8 Meningkatkan koordinasi lintas sektor
			2	Penguatan daya saing produk perikanan	1 Mewujudkan efisiensi produksi perikanan
					2 Mewujudkan harga produk perikanan yang bersaing
					3 Meningkatkan pemasaran produk perikanan
		3	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	1	Pengembangan pemasaran pariwisata
					1 Meningkatkan promosi objek-objek dan daya tarik wisata
					2 Meningkatkan penyelenggaraan even-even pariwisata
			2	Pengembangan destinasi wisata	1 Meningkatkan infrastruktur pariwisata
					2 Mengembangkan wisata alam
					3 Mengembangkan wisata budaya dan religi
					4 Mengembangkan wisata agro
			3	Pegembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata	1 Mewujudkan kelembagaan pariwisata yang kuat
					2 Mengembangkan SDM Pariwisata
					3 Meningkatkan koordinasi lintas sektor
3.2	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang	1	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	1	Peningkatan tutupan dan performance hutan
					1 Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas produksi, perubahan, ataupun

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan				
	berwawasan lingkungan				perawatan yang berdampak terhadap tutupan lahan				
					2	Meningkatkan ruang terbuka hijau			
				2	Peningkatan kondisi tutupan tanah			1	Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas produksi dan perubahan yang menyebabkan erosi tanah dan air limpasan
								2	Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi tanah dan air
				3	Peningkatan konservasi badan air			1	Meningkatkan upaya menjaga proporsi hutan di sepadan sungai/danau
								2	Meningkatkan upaya konservasi badan air
				4	Peningkatan kondisi habitat			1	Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas produksi dan perubahan yang menyebabkan perubahan keanekaragaman hayati
								2	Meningkatkan upaya mempertahankan keanekaragaman hayati
				2	Meningkatnya Kualitas Udara	1	Peningkatan pengawasan terhadap aktivitas pencemaran udara	1	Meningkatkan pengawasan terhadap emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan	
					bensin	
					2 Meningkatkan pengawasan terhadap emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya	
			2	Peningkatan pengendalian pencemaran udara	1 Memberlakukan kebijakan pemberian insentif dan disinsentif	
					2 Membangun komitmen antara para pemangku kepentingan	
		3	Meningkatnya Kualitas Air	1	Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada sumber air	1 Meningkatkan pengawasan terhadap pencemaran air
					2 Meningkatkan upaya pemulihan (restorasi) pencemaran pada sumber air	
				2	Peningkatan ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global	1 Meningkatkan upaya mempertahankan ketersediaan air yang cukup bagi aktivitas makhluk hidup
					2 Meningkatkan upaya pemulihan (restorasi) pada sumber air	
				3	Pengendalian penggunaan air	1 Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan air



No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					2 Mengintensifkan kampanye efisiensi penggunaan air
			4	Pengendalian tingkat erosi dan sedimentasi	1 Meningkatkan pengawasan terhadap tingkat erosi dan sedimentasi
					2 Meningkatkan upaya pemulihan (restorasi) erosi dan sedimentasi
		4	1	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan.	1 Memaksimalkan sarana dan prasarana persampahan
					2 Megedepankan peran dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan sampah.
					3 Megembangkan pola kemitraan strategis dengan pihak swasta melalui penyederhanaan jalur birokrasi bagi pihak swasta yang berminat untuk berinvestasi dalam pengelolaan sampah.
			2	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang arti penting pengelolaan persampahan	1 Meningkatkan pembinaan dan pemahaman masyarakat secara intensif dan berkelanjutan (sustainable) akan upaya 5R

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					(reduce, reuse, recycle, recovery, replace) terkait dengan pengelolaan persampahan
					2 Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 5R
<b>Misi 4:</b>					
<b>Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan iman dan taqwa</b>					
4.1	Mewujudkan kualitas SDM berdaya saing	1	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar pendidikan sesuai dengan standar	1	Peningkatan pelayanan pendidikan anak usia dini bermutu, merata, dan terjangkau.
					1 Meningkatkan ketersediaan fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD) secara merata, dan terjangkau di setiap desa.
					2 Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD).
					3 Memantapkan kualifikasi dan kompetensi aparatur, pendidik, dan tenaga kependidikan PAUD
					4 Mendorong penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) PAUD.
					5 Meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan

No.	Tujuan	Sasaram	Strategi	Arah Kebijakan
				Tenaga Kependidikan PAUD.
			2 Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bermutu, merata, dan terjangkau.	1 Meningkatkan ketersediaan fasilitas pendidikan dasar secara merata, dan terjangkau.
				2 Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.
				3 Memantapkan kualifikasi dan kompetensi aparatur, pendidik, dan tenaga kependidikan pendidikan dasar
				4 Mendorong penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) pendidikan dasar.
				5 Meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pendidikan dasar.
		2 Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	1 Penguatan upaya promotif dan preventif	1 Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
				2 Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					masyarakat
					3 Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat
			2	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1 Meningkatkan upaya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
					2 Memperkuat pengawasan obat dan makanan
					3 Mengembangkan obat asli Indonesia
					4 Meningkatkan upaya pengadaan, peningkatan dan perbaikan infrastruktur pelayanan kesehatan
					5 Mempercepat standarisasi pelayanan kesehatan
					6 Meningkatkan kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
					7 Meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita
					8 Meningkatkan mutu pelayanan BLUD
					9 Meningkatkan sumberdaya kesehatan
					10 Memperkuat manajemen dan informasi kesehatan
			3	Percepatan perbaikan gizi	1 Mempercepat upaya perbaikan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
				masyarakat dan mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat	gizi masyarakat
					2 Meningkatkan upaya pengembangan lingkungan hidup sehat
			4	Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	1 Memperkuat pelayanan keluarga berencana
					2 Meningkatkan upaya keselamatan ibu dan anak
		3	Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat	1 Peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat	1 Meningkatkan pendapatan masyarakat
					2 Mengendalikan inflasi
4.2	Mewujudkan pembangunan SDM beriman dan bertaqwa	1	Meningkatnya sarana rumah ibadah	1 Peningkatan kuantitas sarana rumah ibadah	1 Menyusun perencanaan pembangunan sarana rumah ibadah sesuai dengan kebutuhan
					2 Membangun sarana rumah ibadah sesuai kebutuhan
				2 Peningkatan kualitas sarana rumah ibadah	1 Menyusun perencanaan peningkatan pembangunan sarana rumah ibadah
					2 Meningkatkan sarana rumah ibadah
				3 Peningkatan upaya rehabilitasi/pemeliharaan sarana rumah ibadah	1 Menyusun perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan sarana rumah ibadah
					2 Meningkatkan upaya rehabilitasi sarana rumah ibadah

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
		2 Meningkatkan aktivitas keagamaan	1	Peningkatan upaya meningkatkan aktivitas keagamaan	1 Memfasilitasi kegiatan keagamaan sesuai kebutuhan umat beragama 2 Melaksanakan kegiatan pendataan terhadap aktivitas keagamaan
			2	Peningkatan aktivitas kerjasama keagamaan	1 Meningkatkan forum kerjasama antara umat beragama 2 Meningkatkan kegiatan kerjasama antara umat beragama
<b>Misi 5: Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan</b>					
5.1	Meningkatkan partisipasi sosial	1 Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan	1	Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan perempuan	1 Meningkatkan angka melek huruf perempuan 2 Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah perempuan 3 Meningkatkan angka harapan lama sekolah perempuan
			2	Peningkatan kuantitas dan kualitas kesehatan perempuan	1 Meningkatkan usia harapan hidup perempuan 2 Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi perempuan
		2 Meningkatkan semangat kegotong royongan masyarakat	1	Peningkatan kepedulian sosial	1 Meningkatkan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 2 Meningkatkan kepedulian sosial kepada korban bencana 3 Meningkatkan penerimaan zakat 4 Meningkatkan jumlah hewan kurban
			2	Peningkatan jumlah kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat	1 Meningkatkan jumlah kelompok tani 2 Meningkatkan jumlah koperasi 3 Meningkatkan jumlah lembaga keuangan berbasis masyarakat 4 Meningkatkan jumlah LSM
5.2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	1 Peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan, partai politik dan lembaga swasta 2 Peningkatan partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi	1 Meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan 2 Meningkatkan partisipasi perempuan dalam partai politik 3 Meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga swasta 1 Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan 2 Meningkatkan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					nonpertanian
		2 Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat	1	Peningkatan kualitas kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat	1 Meningkatkan kelas kelompok tani 2 Meningkatkan koperasi berkualitas 3 Mempercepat transformasi UED-SP menjadi BUMDes
			2	Peningkatan peran kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat	1 Meningkatkan cakupan pelayanan kelompok tani 2 Meningkatkan cakupan pelayanan koperasi 3 Meningkatkan cakupan pelayanan BUMDes
		3 Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat	1	Peningkatan kualitas kelembagaan sosial	1 Meningkatkan kualitas panti sosial 2 Meningkatkan kualitas LSM 3 Meningkatkan kualitas lembaga PKK 4 Meningkatkan kualitas Posyandu 5 Meningkatkan kualitas organisasi kepemudaan dan olahraga
			2	Peningkatan peran kelembagaan sosial	1 Meningkatkan cakupan pelayanan panti sosial 2 Meningkatkan cakupan pelayanan LSM 3 Meningkatkan



No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan	
					cakupan pelayanan lembaga PKK	
					4 Meningkatkan cakupan pelayanan Posyandu	
					5 Meningkatkan cakupan pelayanan organisasi kepemudaan dan olah raga	
<b>Misi 6:</b>						
<b>Memantapkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman kehidupan sosial</b>						
6.1	Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman sosial	1	Menurunnya angka kriminalitas	1	Peningkatan upaya pencegahan tindak kriminalitas	
					1	Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait hukum pidana dan perdata
					2	Meningkatkan wawasan kebangsaan
				2	3	Meningkatkan kerjasama antara penegak hukum dengan lembaga pemerintahan dan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kriminalitas
					1	Meningkatkan penegakan hukum dengan memegang teguh prinsip-prinsip transparansi, kesetaraan dan akuntabel
2	Meningkatkan kerjasama antara penegak hukum dengan lembaga pemerintahan dan masyarakat					

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan	
					dalam upaya penindakan tindak kriminalitas	
		2	Tegaknya prinsip-prinsip demokrasi	1	Peningkatan kebebasan sipil (civil liberty)	<p>1 Memantapkan upaya mewujudkan kebebasan berkumpul &amp; berserikat</p> <p>2 Memantapkan upaya mewujudkan kebebasan berpendapat</p> <p>3 Memantapkan upaya mewujudkan kebebasan berkeyakinan</p> <p>4 Memantapkan upaya mewujudkan kebebasan dari diskriminasi</p>
				2	Peningkatan hak-hak politik (political liberty)	<p>1 Meningkatkan upaya mewujudkan penggunaan hak memilih dan dipilih</p> <p>2 Meningkatkan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan</p>
				3	Penguatan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy)	<p>1 Memperkuat upaya mewujudkan pemilu yang bebas adil</p> <p>2 Memperkuat peran DPRD</p> <p>3 Memperkuat peran Partai Politik</p> <p>4 Memperkuat</p>

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan	
					peran birokrasi Pemda	
		3	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	1	Peningkatan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak	<p>1 Meningkatkan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit</p> <p>2 Meningkatkan cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.</p> <p>3 Meningkatkan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum</p> <p>4 Meningkatkan cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan</p> <p>5 Meningkatkan cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban</p>

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan	
					kekerasan	
			2	Peningkatan penanganan dan penegakan hukum bagi perlindungan terhadap perempuan dan anak	<p>1 Meningkatkan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu</p> <p>2 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>	
		4	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	1	Peningkatan upaya memberikan bantuan sosial kepada PMKS, korban bencana dan komunitas adat terpencil (KAT)	<p>1 Meningkatkan upaya memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar kepada PMKS, korban bencana dan komunitas adat terpencil (KAT)</p> <p>2 Meningkatkan upaya memberikan bantuan sosial kepada korban bencana selama masa tanggap darurat</p> <p>3 Mengoptimalkan sarana dan prasarana tanggap darurat</p>

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					kepada korban bencana yang dievakuasi
					4 Meningkatkan upaya memberikan jaminan sosial kepada penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial
			2	Peningkatan upaya penertiban PMKS	1 Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PMKS
					2 Melakukan pengamanan dan pembinaan terhadap PMKS
		5 Menurunnya resiko bencana	1	Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana.	1 Meningkatkan alokasi anggaran penanggulangan bencana daerah
					2 Meningkatkan efektivitas sistem kesiapsiagaan dan kedaruratan daerah
					3 Meningkatkan dan memperkuat kemitraan dalam penanggulangan bencana daerah
					4 Mewujudkan penetapan status bencana disertai dengan mekanisme pemantauan terpadu lintas sektor dan lintas kelembagaan pemerintah daerah.
			2	Peningkatan kemitraan	1 Meningkatkan partisipasi

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
				multi pihak dalam penanggulangan bencana.	<p>masyarakat dalam penanggulangan bencana daerah</p> <p>2 Menggalang kemitraan dengan lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan Forum Penanggulangan Resiko Bencana (PRB)</p>
			3	Pemenuhan tata kelola yang baik bidang penanggulangan bencana.	<p>1 Menjamin transparansi dan akuntabilitas bidang penanggulangan bencana</p> <p>2 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam mencapai efektivitas penanggulangan bencana daerah</p>
			4	Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	<p>1 Mengoptimalkan strategi penyadaran publik untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan mitigasi bencana</p> <p>2 Mengembangkan riset-riset terapan dengan kerangka kerja terstruktur dan mengarah kepada peningkatan rasio biaya-manfaat dan selalu mempertimbangan proses</p>

No.	Tujuan	Sasaram	Strategi	Arah Kebijakan
				<p>adaptasi pengetahuan asli lokal di tatanan masyarakat pengguna hasil riset,</p> <p>3 Menyusun penataan ruang dan lahan pada sebagian besar daerah prioritas kabupaten berdasarkan rencana pengelolaan sumberdaya air, tanah dan hutan sesuai dengan hasil Kajian Risiko Bencana serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah.</p>
			<p>5 Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.</p>	<p>1 Membangun sistem peringatan dini bencana multi ancaman nasional yang terkoordinasi dengan prosedur standar yang disepakati antar dinas/instansi terkait secara sistematis dan terukur dan selalu dilatih secara berkala</p> <p>2 Memperkuat tingkat paparan pelayanan sistem peringatan dini bencana kepada masyarakat pengguna dengan mengembangkan alternatif moda penyebaran,</p>

No.	Tujuan	Sasaram	Strategi	Arah Kebijakan
				strategi advokasi dan informasi publik, serta mekanisme latihan bersama antara pemerintah dan masyarakat
				2 Meningkatkan kapasitas evakuasi, penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan serta kemandirian mobilisasi sumberdaya masyarakat berdasarkan pedoman dan mekanisme standar yang disepakati.
			6 Peningkatan kapasitas pemulihan bencana.	1 Menyusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan karakter masyarakat yang mandiri
				2 Mengimplemantasikan kegiatan pemulihan bencana berdasarkan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan karakter masyarakat yang mandiri
<b>Misi 7:</b>				
<b>Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran</b>				



No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan				
7.1	Menurunka n tingkat penganggur an	1	Meningkatnya kesempatan kerja	1	Peningkatan upaya penyusunan dan penyebarluas an data dan informasi ketenagakerja an	1	Menyusun data dan informasi ketenagakerjaan berbasis teknologi informasi secara transparan dan akuntabel		
					2	Mengintensifkan even-even bursa tenaga kerja			
				2	Peningkatan upaya meningkatka n investasi yang bersifat padat karya	1	Memberikan kemudahan kepada investor- investor yang mengembangkan usaha padat karya, terutama yang memprioritaskan menyerap tenaga kerja lokal		
						2	Memberikan prioritas kepada investor-investor yang akan mengembangkan usaha berbasis pada sumberdaya lokal		
		2	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	1	Peningkatan kualifikasi tenaga kerja	1	Meningkatkan lulusan S1/S2/S3		
						2	Menyelenggaraka n pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja		
						3	Mengembangkan sekolah menengah kejuruan berbasis sumberdaya lokal  Mengembangkan perguruan tinggi berbasis sumberdaya lokal		
						2	Peningkatan kompetensi	1	Meningkatkan jumlah tenaga

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
				tenaga kerja	<p>1 kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</p> <p>2 Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat</p> <p>3 Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan</p>
7.2.	Menurunkan tingkat kemiskinan	1 Meningkatkan cakupan bantuan kepada masyarakat miskin	1	Peningkatan perlindungan sosial berbasis masyarakat miskin	<p>1 Menyusun data dan informasi kemiskinan berbasis teknologi informasi secara transparan dan akuntabel secara berkala</p> <p>2 Memberikan bantuan penanganan kesehatan kepada masyarakat miskin</p> <p>3 Memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat miskin</p> <p>4 Memantapkan sistem jaminan kesejahteraan sosial daerah</p>
			2	Peningkatan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	1 Memantapkan bantuan raskin dan/atau biaya langsung tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
				miskin	miskin
					2 Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan
		2 Meningkatkan daya beli penduduk miskin	1	Peningkatan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	1 Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan
					2 Mengupayakan harga produk pertanian dan perikanan yang bersaing
					3 Mengurangi beban biaya usahatani dan usaha perikanan dengan memberikan bantuan/subsidi
					4 Meningkatkan pembangunan rumah bagi fakir miskin
			2	Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat miskin	1 Meningkatkan kegiatan pemberdayaan petani dan nelayan
					2 Meningkatkan kegiatan pemberdayaan pelaku usaha mikro
<b>Misi 8:</b>					
<b>Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah</b>					
8.1	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	1 Meningkatnya kemandirian ekonomi dan terkendalinya kesenjangan pendapatan	1	Peningkatan kemandirian ekonomi	1 Menumbuhkembangkan komoditi, produk, dan jenis usaha unggulan daerah
					2 Meningkatkan daya saing sektoral
					3 Mengembangkan potensi pariwisata dan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					kebudayaan
					4 Mengembangkan ekonomi kreatif
					5 Mewujudkan efisiensi ekonomi melalui penerapan inovasi teknologi
					6 Mengembangkan infrastruktur ekonomi
					7 Meningkatkan perlindungan konsumen
			2	Penurunan kesenjangan pendapatan	1 Meningkatkan nilai tukar petani
					2 Mengendalikan inflasi
					3 Memberikan bantuan pengembangan usaha produktif
		2	Terwujudnya percepatan transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan	1 Pengembangan kluster industri daerah	1 Mempercepat penyusunan rencana induk pengembangan industri kabupaten (RIPIK)
					2 Menetapkan komitmen pemerintah daerah untuk mengimplementasikan RIPIK yang tertuang dalam bentuk Perda
					3 Mempercepat terbentuknya klaster industri produk unggulan daerah
			2	Percepatan penetapan kompetensi inti industri daerah yang	1 Mempercepat penetapan kompetensi inti industri daerah dalam bentuk

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
				merupakan keunggulan daerah	perda
					2 Menetapkan dan mengimplementasikan langkah-langkah pengembangan kompetensi inti industri
					3 Menjalin kemitraan dalam pengembangan kompetensi inti industri dengan perusahaan-perusahaan menengah dan besar
		3	Meningkatnya investasi daerah	1 Peningkatan promosi investasi	1 Menyusun dokumen masterplan dan bisnis plan pengembangan komoditi, produk dan jenis usaha unggulan daerah
					2 Meningkatkan penyelenggaraan even-even promosi investasi
					3 Mengintensifkan diseminasi dokumen promosi investasi (ringkasan masterplan/bisnis plan) melalui media massa dan elektronik
				2 Pemberian kemudahan dan insentif investasi	1 Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan persyaratan dan prosedur, memperjelas waktu dan biaya pengurusan
					2 Memberikan tax allowance kepada

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan	
					investor yang berinvestasi pada komoditi, produk dan jenis usaha unggulan daerah, melakukan pendidikan vokasi, dan bermitra dengan usaha mikro	
					3 Memberikan tax holiday kepada usaha mikro	
					4 Membebaskan perusahaan modal ventura sebagai objek PPh.	
		4	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1	Peningkatan ketersediaan pangan	1 Meningkatkan produksi pangan daerah, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah.
					2 Mengendalikan impor pangan pokok	
					3 Meningkatkan upaya pengembangan pemanfaatan lahan pekarangan	
					4 Meningkatkan cadangan pangan	
				2	Peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan	1 Melakukan pendataan dan pengawasan terhadap distribusi pangan secara berkala
					2 Melakukan operasi pasar terhadap pangan pokok sesuai kebutuhan	

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					3 Mengembangkan toko tani kabupaten
			3	Peningkatan upaya perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	1 Mengintensifkan pemantauan terhadap produk pangan 2 Mengintensifkan upaya pengalakan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)
			4	Penguatan kelembagaan ketahan pangan	1 Memperkuat dan menintensifkan peranan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten 2 Mempercepat penyusunan Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Pangan

### 6.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2020)

Pembangunan Indragiri Hilir di Tahun 2020 diarahkan kepada **Memperkuat Kemajuan, Martabat dan Marwah Indragiri Hilir** sebagai lanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan tahun kedua (2020) disajikan pada Tabel 6.5.

Tabel 6.5. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
<b>VISI:</b>					
<b>UNTUK KEJAYAAN INDRAGIRI HILIR YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT</b>					
<b>Misi 1:</b>					
<b>Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif,</b>					

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
<b>inovatif, efektif dan berketataan hukum</b>							
1.1	Memantapkan kinerja pelayanan publik	1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	1	Penegakan disiplin ASN	1	Memperkuat sosialisasi peraturan tentang disiplin ASN secara kontinu
					2	Memperkuat pembinaan kepada ASN yang indisipliner dan reward kepada ASN berprestasi	
				2	Pencegahan KKN	1	Memperkuat sosialisasi peraturan anti KKN
						2	Memperkuat kerjasama pengawasan penyelenggaraan pembangunan daerah dengan lembaga penegak hukum
						3	Memperkuat pembinaan dan pengawasan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP)
				3	Perumusan dan Penyerbarluasan informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	1	Memperkuat perumusan rencana pembangunan
						2	Memperkuat sistem dan penyerbarluasan informasi perencanaan berbasis <i>information technology</i> (IT)
						3	Memperkuat penyebarluasan informasi tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah berbasis



No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					information technology (IT)
			4	Pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah secara berkala	1 Memperkuat monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan internal Perangkat Daerah 2 Memperkuat tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah
		2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1 Peningkatan kualitas pelayanan publik 2 Peningkatan pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan	1 Memperkuat kualifikasi dan kompetensi ASN 2 Memperkuat sarana dan prasarana pelayanan publik 1 Menyederhanakan prosedur pelayanan publik 2 Memperjelas dan menyederhanakan persyaratan pengurusan
<b>Misi 2:</b>					
<b>Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah</b>					
2.1	Memantapkan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat	1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	1 Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan	1 Memperkuat kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja pembangunan jalan dan jembatan kabupaten

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
					2	Memperkuat kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja pembangunan jalan lingkungan	
				2	Peningkatan upaya peningkatan jalan	1	Memperkuat kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja peningkatan jalan kabupaten
					2	Memperkuat kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja peningkatan jalan lingkungan	
				3	Peningkatan rehabilitasi/p emeliharaan jalan dan jembatan	1	Memperkuat kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten
					2	Memperkuat kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja rehabilitasi/pemeliharaan jalan lingkungan	
		2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak	1	Peningkatan jaringan perpipaan air minum	1	Memberikan bantuan sarana dan prasarana serta pendanaan peningkatan jaringan perpipaan air minum
						2	Memperkuat penyertaan modal pada PDAM Tirta Indragiri

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
			2	Peningkatan pembangunan sumur bor di lingkungan permukiman	1	Memperkuat pembangunan sumur bor di lingkungan permukiman	
					2	Membangun instalasi pengolahan air minum (IPA) yang bersumber dari sumur bor	
		3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak	1	Peningkatan pembangunan drainase di lingkungan permukiman	1	Memperkuat kualitas perencanaan dan pengukuran pembangunan drainase
					2	Memperkuat capaian kinerja pembangunan drainase	
			2	Peningkatan rehabilitasi/pemeliharaan drainase di lingkungan permukiman	1	Memperkuat kualitas perencanaan dan pengukuran rehabilitasi/pemeliharaan drainase	
					2	Memperkuat capaian kinerja rehabilitasi/pemeliharaan drainase	
			3	Peningkatan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di lingkungan permukiman	1	Memperkuat kualitas perencanaan dan pengukuran pembangunan IPAL	
					2	Memperkuat capaian kinerja pembangunan IPAL	
			4	Peningkatan upaya penataan dan pengelolaan lingkungan permukiman dan pemukiman	1	Memperkuat upaya penataan bangunan	
					2	Memperkuat tata kelola lingkungan pemukiman	
					3	Memperkuat	

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
					upaya pemberdayaan komunitas perumahan		
2.2	Memantapkan pembangunan infrastruktur perhubungan	1	Meningkatnya layanan angkutan darat	1	Peningkatan kualitas pelayanan angkutan darat	1	Memperkuat kualifikasi dan kompetensi ASN perhubungan angkutan darat
					2	Memperkuat sarana dan prasarana angkutan darat	
					3	Memperkuat pengawasan kelayakan sarana angkutan darat	
				2	Peningkatan pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan publik angkutan darat	1	Menyederhanakan prosedur pelayanan publik angkutan darat
						2	Memperjelas dan menyederhanakan persyaratan pengurusan uji kelayakan angkutan darat
						3	Menertibkan pengelolaan Tepi jalan umum
		2	Meningkatnya layanan angkutan Perairan, sungai dan penyeberangan	1	Peningkatan kualitas pelayanan angkutan Perairan, sungai dan Penyeberangan	1	Memperkuat kualifikasi dan kompetensi ASN perhubungan angkutan Perairan, sungai dan Penyeberangan
						2	Memperkuat sarana dan prasarana angkutan Perairan, sungai dan Penyeberangan
						3	Memperkuat pengawasan kelayakan sarana angkutan Perairan, sungai dan Penyeberangan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
			2	Peningkatan pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan publik angkutan air	1	Menyederhanakan prosedur pelayanan publik angkutan Perairan, sungan dan Penyeberangan	
					2	Memperjelas dan menyederhanakan persyaratan pengurusan kelengkapan angkutan air	
<b>Misi 3:</b> <b>Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat</b>							
3.1	Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang lebih produktif	1	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian	1	Peningkatan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian	1	Memperkuat infrastruktur pertanian
					2	Memperkuat SDM pertanian	
					3	Memperkuat kelembagaan pertanian	
					4	Memperkuat alat dan mesin pertanian	
					5	Memperkuat pembiayaan usaha pertanian	
					6	Memperkuat penguasaan teknologi dalam merespon dinamika dan perubahan iklim	
					7	Memastikan kecukupan dan kontinuitas ketersediaan sarana produksi	
					8	Memperkuat koordinasi lintas sektor	
			2	Penguatan daya saing produk	1	Mewujudkan efisiensi produksi pertanian	

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
				pertanian	2	Mewujudkan harga produk pertanian yang bersaing	
					3	Memperkuat pemasaran produk pertanian	
		2	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan	1	Peningkatan kapasitas produksi melalui peningkatan penangkapan ikan dan budidaya	1	Memantapkan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap
					2	Memantapkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya	
					3	Memperkuat SDM perikanan	
					4	Memperkuat kelembagaan perikanan	
					5	Memperkuat infrastruktur perikanan	
					6	Memperkuat pembiayaan usaha perikanan	
					7	Memperkuat penguasaan teknologi dalam merespon dinamika dan perubahan iklim	
					8	Memperkuat koordinasi lintas sektor	
				2	Penguatan daya saing produk perikanan	1	Mewujudkan efisiensi produksi perikanan
						2	Mewujudkan harga produk perikanan yang bersaing
						3	Memperkuat pemasaran produk perikanan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
		3	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	1	Pengembangan pemasaran pariwisata	1	Memperkuat promosi objek-objek dan daya tarik wisata
						2	Memperkuat penyelenggaraan even-even pariwisata
				2	Pengembangan destinasi wisata	1	Memperkuat infrastruktur pariwisata
						2	Memperkuat wisata alam
						3	Memperkuat wisata budaya dan religi
						4	Memperkuat wisata agro
				3	Pegembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata	1	Mewujudkan kelembagaan pariwisata yang kuat
						2	Memperkuat SDM Pariwisata
						3	Memperkuat koordinasi lintas sektor
				3.2	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	1	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan
2	Memperkuat ruang terbuka hijau						
				2	Peningkatan kondisi tutupan tanah	1	Memperkuat pengawasan terhadap aktivitas produksi dan perubahan yang menyebabkan erosi tanah dan air limpasan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					2 Memperkuat upaya perlindungan dan konservasi tanah dan air
			3	Peningkatan konservasi badan air	1 Memperkuat upaya menjaga proporsi hutan di sepadan sungai/danau
					2 Memperkuat upaya konservasi badan air
			4	Peningkatan kondisi habitat	1 Memperkuat pengawasan terhadap aktivitas produksi dan perubahan yang menyebabkan perubahan keanekaragaman hayati
					2 Memperkuat upaya mempertahankan keanekaragaman hayati
		2	Meningkatnya Kualitas Udara	1	Peningkatan pengawasan terhadap aktivitas pencemaran udara
					1 Memperkuat pengawasan terhadap emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin
					2 Memperkuat pengawasan terhadap emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya
				2	Peningkatan pengendalian pencemaran
					1 Memberlakukan kebijakan pemberian insentif



No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
				udara	dan disinsentif
					2 Membangun komitmen antara para pemangku kepentingan
		3 Meningkatkan Kualitas Air	1	Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada sumber air	1 Memperkuat pengawasan terhadap pencemaran air
					2 Memperkuat upaya pemulihan (restorasi) pencemaran pada sumber air
			2	Peningkatan ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global	1 Memperkuat upaya mempertahankan ketersediaan air yang cukup bagi aktivitas makhluk hidup
					2 Memperkuat upaya pemulihan (restorasi) pada sumber air
			3	Pengendalian penggunaan air	1 Memperkuat pengawasan terhadap penggunaan air
					2 Mengintensifkan kampanye efisiensi penggunaan air
			4	Pengendalian tingkat erosi dan sedimentasi	1 Memperkuat pengawasan terhadap tingkat erosi dan sedimentasi
					2 Memperkuat upaya pemulihan (restorasi) erosi dan sedimentasi
		4 Terwujudnya pengelolaan dan penanganan	1	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas	1 Memaksimalkan sarana dan prasarana persampahan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
		sampah yang berwawasan lingkungan		sistem pengelolaan persampahan.	2	Megedepankan peran dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan sampah.	
					3	Megembangkan pola kemitraan strategis dengan pihak swasta melalui penyederhanaan jalur birokrasi bagi pihak swasta yang berminat untuk berinvestasi dalam pengelolaan sampah.	
				2	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang arti penting pengelolaan persampahan	1	Memperkuat pembinaan dan pemahaman masyarakat secara intensif dan berkelanjutan (sustainable) akan upaya 5R (reduce, reuse, recycle, recovery, replace) terkait dengan pengelolaan persampahan
						2	Memperkuat dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 5R
<b>Misi 4:</b>							
<b>Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan iman dan taqwa</b>							
4.1	Mewujudkan kualitas SDM berdaya saing	1	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar pendidikan sesuai dengan standar	1	Peningkatan pelayanan pendidikan anak usia dini bermutu, merata, dan terjangkau.	1	Memperkuat ketersediaan fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD) secara merata, dan terjangkau di setiap desa.

No.	Tujuan	Sasaram	Strategi	Arah Kebijakan
				2 Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD).
				3 Memantapkan kualifikasi dan kompetensi aparatur, pendidik, dan tenaga kependidikan PAUD
				4 Mendorong penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) PAUD.
				5 Memperkuat kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD.
			2 Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bermutu, merata, dan terjangkau.	1 Memperkuat ketersediaan fasilitas pendidikan dasar secara merata, dan terjangkau.
				2 Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.
				3 Memantapkan kualifikasi dan kompetensi aparatur, pendidik, dan tenaga kependidikan pendidikan dasar
				4 Mendorong penyelenggaraan pendidikan yang

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan	
					memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) pendidikan dasar.	
					5 Memperkuat kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pendidikan dasar.	
		2	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	1	Penguatan upaya promotif dan preventif	1 Memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
					2 Memperkuat upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	
					3 Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat	
				2	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1 Memperkuat upaya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
					2 Memperkuat pengawasan obat dan makanan	
					3 Memperkuat obat asli Indonesia	
					4 Memperkuat upaya pengadaan, peningkatan dan perbaikan infrastruktur pelayanan kesehatan	
					5 Mempercepat standarisasi pelayanan kesehatan	
					6 Memperkuat kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan			
					7	Memperkuat pelayanan kesehatan anak balita		
					8	Memperkuat mutu pelayanan BLUD		
					9	Memperkuat sumberdaya kesehatan		
					10	Memperkuat manajemen dan informasi kesehatan		
				3	Percepatan perbaikan gizi masyarakat dan mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat	1	Mempercepat upaya perbaikan gizi masyarakat	
						2	Memperkuat upaya pengembangan lingkungan hidup sehat	
				4	Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	1	Memperkuat pelayanan keluarga berencana	
						2	Memperkuat upaya keselamatan ibu dan anak	
				3	Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat	1	1	Memperkuat pendapatan masyarakat
							2	Mengendalikan inflasi
4.2	Mewujudkan pembangunan SDM beriman dan bertaqwa	1	Meningkatnya sarana rumah ibadah	1	1	Menyusun perencanaan pembangunan sarana rumah ibadah sesuai dengan kebutuhan		
					2	Membangun sarana rumah ibadah sesuai kebutuhan		
			2	Peningkatan kualitas sarana rumah ibadah	1	Menyusun perencanaan peningkatan pembangunan sarana rumah ibadah		

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
					2	Memperkuat sarana rumah ibadah	
				3	Peningkatan upaya rehabilitasi/ pemeliharaan sarana rumah ibadah	1	Menyusun perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan sarana rumah ibadah
						2	Memperkuat upaya rehabilitasi sarana rumah ibadah
		2	Meningkatnya aktivitas keagamaan	1	Peningkatan upaya meningkatkan aktivitas keagamaan	1	Memfasilitasi kegiatan keagamaan sesuai kebutuhan umat beragama
						2	Melaksanakan kegiatan pendataan terhadap aktivitas keagamaan
				2	Peningkatan aktivitas kerjasama keagamaan	1	Memperkuat forum kerjasama antara umat beragama
						2	Memperkuat kegiatan kerjasama antara umat beragama
<b>Misi 5:</b>							
<b>Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan</b>							
5.1	Meningkatkan partisipasi sosial	1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	1	Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan perempuan	1	Memperkuat angka melek huruf perempuan
						2	Memperkuat angka rata-rata lama sekolah perempuan
						3	Memperkuat angka harapan lama sekolah perempuan
				2	Peningkatan kuantitas dan kualitas	1	Memperkuat usia harapan hidup perempuan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
				kesehatan perempuan	2 Memperkuat cakupan pelayanan kesehatan bagi perempuan
		2 Meningkatkan semangat kegotong royongan masyarakat	1	Peningkatan kepedulian sosial	1 Memperkuat wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 2 Memperkuat kepedulian sosial kepada korban bencana 3 Memperkuat penerimaan zakat 4 Memperkuat jumlah hewan kurban
			2	Peningkatan jumlah kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat	1 Memperkuat jumlah kelompok tani 2 Memperkuat jumlah koperasi 3 Memperkuat jumlah lembaga keuangan berbasis masyarakat 4 Memperkuat jumlah LSM
5.2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	1 Meningkatkan pemberdayaan perempuan	1	Peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan, partai politik dan lembaga swasta	1 Memperkuat partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan 2 Memperkuat partisipasi perempuan dalam partai politik 3 Memperkuat partisipasi perempuan dalam

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					lembaga swasta
			2	Peningkatan partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi	1 Memperkuat partisipasi angkatan kerja perempuan 2 Memperkuat kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian
		2 Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat	1	Peningkatan kualitas kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat	1 Memperkuat kelas kelompok tani 2 Memperkuat koperasi berkualitas 3 Mempercepat transformasi UED-SP menjadi BUMDes
			2	Peningkatan peran kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat	1 Memperkuat cakupan pelayanan kelompok tani 2 Memperkuat cakupan pelayanan koperasi 3 Memperkuat cakupan pelayanan BUMDes
		3 Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat	1	Peningkatan kualitas kelembagaan sosial	1 Memperkuat kualitas panti sosial 2 Memperkuat kualitas LSM 3 Memperkuat kualitas lembaga PKK 4 Memperkuat kualitas Posyandu 5 Memperkuat kualitas organisasi kepemudaan dan olahraga



No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
			2	Peningkatan peran kelembagaan sosial	1	Memperkuat cakupan pelayanan panti sosial	
					2	Memperkuat cakupan pelayanan LSM	
					3	Memperkuat cakupan pelayanan lembaga PKK	
					4	Memperkuat cakupan pelayanan Posyandu	
					5	Memperkuat cakupan pelayanan organisasi kepemudaan dan olah raga	
<b>Misi 6:</b>							
<b>Memantapkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman kehidupan sosial</b>							
6.1	Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman sosial	1	Menurunnya angka kriminalitas	1	Peningkatan upaya pencegahan tindak kriminalitas	1	Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait hukum pidana dan perdata
						2	Memperkuat wawasan kebangsaan
						3	Memperkuat kerjasama antara penegak hukum dengan lembaga pemerintahan dan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kriminalitas
				2	Peningkatan upaya penindakan tindak kriminalitas	1	Memperkuat penegakan hukum dengan memegang teguh prinsip-prinsip transparansi,

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					kesetaraan dan akuntabel
					2 Memperkuat kerjasama antara penegak hukum dengan lembaga pemerintahan dan masyarakat dalam upaya penindakan tindak kriminalitas
		2 Tegaknya prinsip-prinsip demokrasi	1	Peningkatan kebebasan sipil (civil liberty)	1 Memantapkan upaya mewujudkan kebebasan berkumpul & berserikat
					2 Memantapkan upaya mewujudkan kebebasan berpendapat
					3 Memantapkan upaya mewujudkan kebebasan berkeyakinan
					4 Memantapkan upaya mewujudkan kebebasan dari diskriminasi
			2	Peningkatan hak-hak politik (political liberty)	1 Memperkuat upaya mewujudkan penggunaan hak memilih dan dipilih
					2 Memperkuat partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan
			3	Penguatan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy)	1 Memperkuat upaya mewujudkan pemilu yang bebas adil

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					2 Memperkuat peran DPRD
					3 Memperkuat peran Partai Politik
					4 Memperkuat peran birokrasi Pemda
		3 Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	1	Peningkatan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak	1 Memperkuat cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
					2 Memperkuat cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
					3 Memperkuat cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
					4 Memperkuat cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
					5 Memperkuat cakupan layanan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
			2	Peningkatan penanganan dan penegakan hukum bagi perlindungan terhadap perempuan dan anak	1 Memperkuat cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
					2 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
		4	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	1 Peningkatan upaya memberikan bantuan sosial kepada PMKS, korban bencana dan komunitas adat terpencil (KAT)	1 Meningkatkan upaya memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar kepada PMKS, korban bencana dan komunitas adat terpencil (KAT)
					2 Memperkuat upaya memberikan bantuan sosial kepada korban bencana selama masa tanggap darurat
					3 Mengoptimalkan sarana dan prasarana tanggap darurat kepada korban bencana

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					yang dievakuasi
					4 Memperkuat upaya memberikan jaminan sosial kepada penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial
			2	Peningkatan upaya penertiban PMKS	1 Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PMKS
					2 Melakukan pengamanan dan pembinaan terhadap PMKS
		5	Menurunnya resiko bencana	1	Penguatan kerangka hukum penanggulangan an bencana.
					1 Memperkuat alokasi anggaran penanggulangan bencana daerah
					2 Memperkuat efektivitas sistem kesiapsiagaan dan kedaruratan daerah
					3 Memperkuat dan memperkuat kemitraan dalam penanggulangan bencana daerah
					4 Mewujudkan penetapan status bencana disertai dengan mekanisme pemantauan terpadu lintas sektor dan lintas kelembagaan pemerintah daerah.
			2	Peningkatan kemitraan multipihak dalam	1 Memperkuat partisipasi masyarakat dalam penanggulangan

No.	Tujuan	Sasaram	Strategi	Arah Kebijakan
			penanggulang an bencana.	<p>bencana daerah</p> <p>2 Menggalang kemitraan dengan lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan Forum Penanggulangan Resiko Bencana (PRB)</p>
			3 Pemenuhan tata kelola yang baik bidang penanggulang an bencana.	<p>1 Menjamin transparansi dan akuntabilitas bidang penanggulangan bencana</p>
				<p>2 Memperkuat ketersediaan sarana dan prasarana dalam mencapai efektivitas penanggulangan bencana daerah</p>
			4 Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	<p>1 Mengoptimalkan strategi penyadaran publik untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan mitigasi bencana</p>
				<p>2 Memperkuat riset-riset terapan dengan kerangka kerja terstruktur dan mengarah kepada peningkatan rasio biaya-manfaat dan selalu mempertimbangkan proses adaptasi pengetahuan asli lokal di tatanan masyarakat pengguna hasil</p>

No.	Tujuan	Sasaram	Strategi	Arah Kebijakan
				riset,
				3 Menyusun penataan ruang dan lahan pada sebagian besar daerah prioritas kabupaten berdasarkan rencana pengelolaan sumberdaya air, tanah dan hutan sesuai dengan hasil Kajian Risiko Bencana serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah.
			5 Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.	1 Membangun sistem peringatan dini bencana multi ancaman nasional yang terkoordinasi dengan prosedur standar yang disepakati antar dinas/instansi terkait secara sistematis dan terukur dan selalu dilatih secara berkala
				2 Memperkuat tingkat paparan pelayanan sistem peringatan dini bencana kepada masyarakat pengguna dengan memperkuat alternatif moda penyebaran, strategi advokasi dan informasi

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					publik, serta mekanisme latihan bersama antara pemerintah dan masyarakat
					2 Memperkuat kapasitas evakuasi, penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan serta kemandirian mobilisasi sumberdaya masyarakat berdasarkan pedoman dan mekanisme standar yang disepakati.
			6	Peningkatan kapasitas pemulihan bencana.	1 Menyusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan karakter masyarakat yang mandiri
					2 Mengimplemantasikan kegiatan pemulihan bencana berdasarkan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan karakter masyarakat yang mandiri
<b>Misi 7:</b>					
<b>Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran</b>					
7.1	Menurunkan tingkat penganggur	1	Meningkatnya kesempatan	1	Peningkatan upaya penyusunan dan
					1 Menyusun data dan informasi ketenagakerjaan berbasis teknologi



No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
	an	kerja		penyebarluasan data dan informasi ketenagakerjaan	1 informasi secara transparan dan akuntabel 2 Mengintensifkan even-even bursa tenaga kerja
			2	Peningkatan upaya meningkatkan investasi yang bersifat padat karya	1 Memberikan kemudahan kepada investor-investor yang memperkuat usaha padat karya, terutama yang memprioritaskan menyerap tenaga kerja lokal 2 Memberikan prioritas kepada investor-investor yang akan memperkuat usaha berbasis pada sumberdaya lokal
		2 Meningkatkan kualitas tenaga kerja	1	Peningkatan kualifikasi tenaga kerja	1 Memperkuat lulusan S1/S2/S3 2 Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 3 Memperkuat sekolah menengah kejuruan berbasis sumberdaya lokal Memperkuat perguruan tinggi berbasis sumberdaya lokal
			2	Peningkatan kompetensi tenaga kerja	1 Memperkuat jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 2 Memperkuat jumlah tenaga

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					<p>kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat</p> <p>3 Memperkuat jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan</p>
7.2.	Menurunkan tingkat kemiskinan	1 Meningkatkan cakupan bantuan kepada masyarakat miskin	1	Peningkatan perlindungan sosial berbasis masyarakat miskin	<p>1 Menyusun data dan informasi kemiskinan berbasis teknologi informasi secara transparan dan akuntabel secara berkala</p> <p>2 Memberikan bantuan penanganan kesehatan kepada masyarakat miskin</p> <p>3 Memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat miskin</p> <p>4 Memantapkan sistem jaminan kesejahteraan sosial daerah</p>
			2	Peningkatan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin	<p>1 Memantapkan bantuan raskin dan/atau biaya langsung tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin</p> <p>2 Memperkuat penanganan daerah rawan pangan</p>
		2 Meningkatkan daya beli penduduk miskin	1	Peningkatan upaya meningkatkan pendapatan	1 Memperkuat produktivitas pertanian dan perikanan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
				masyarakat miskin	2	Mengupayakan harga produk pertanian dan perikanan yang bersaing	
					3	Mengurangi beban biaya usahatani dan usaha perikanan dengan memberikan bantuan/subsidi	
					4	Memperkuat pembangunan rumah bagi fakir miskin	
			2	Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat miskin	1	Memperkuat kegiatan pemberdayaan petani dan nelayan	
					2	Memperkuat kegiatan pemberdayaan pelaku usaha mikro	
<b>Misi 8:</b>							
<b>Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah</b>							
8.1	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	1	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan terkendalinya kesenjangan pendapatan	1	Peningkatan kemandirian ekonomi	1	Menumbuhkembangkan komoditi, produk, dan jenis usaha unggulan daerah
						2	Memperkuat daya saing sektoral
						3	Memperkuat potensi pariwisata dan kebudayaan
						4	Memperkuat ekonomi kreatif
						5	Mewujudkan efisiensi ekonomi melalui penerapan inovasi teknologi
						6	Memperkuat infrastruktur ekonomi
						7	Memperkuat

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					perlindungan konsumen
			2	Penurunan kesenjangan pendapatan	1 Memperkuat nilai tukar petani
					2 Mengendalikan inflasi
					3 Memberikan bantuan pengembangan usaha produktif
		2	1	Pengembangan kluster industri daerah	1 Mempercepat penyusunan rencana induk pengembangan industri kabupaten (RIPIK)
					2 Menetapkan komitmen pemerintah daerah untuk mengimplementasikan RIPIK yang tertuang dalam bentuk Perda
					3 Mempercepat terbentuknya klaster industri produk unggulan daerah
			2	Percepatan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah	1 Mempercepat penetapan kompetensi inti industri daerah dalam bentuk perda
					2 Menetapkan dan mengimplementasikan langkah-langkah pengembangan kompetensi inti industri
					3 Menjalin kemitraan dalam pengembangan kompetensi inti industri dengan perusahaan-perusahaan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan	
					menengah dan besar	
		3	Meningkatnya investasi daerah	1	Peningkatan promosi investasi	<p>1 Menyusun dokumen masterplan dan bisnis plan pengembangan komoditi, produk dan jenis usaha unggulan daerah</p> <p>2 Memperkuat penyelenggaraan even-even promosi investasi</p> <p>3 Mengintensifkan diseminasi dokumen promosi investasi (ringkasan masterplan/bisnis plan) melalui media massa dan elektronik</p>
				2	Pemberian kemudahan dan insentif investasi	<p>1 Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan persyaratan dan prosedur, memperjelas waktu dan biaya pengurusan</p> <p>2 Memberikan tax allowance kepada investor yang berinvestasi pada komoditi, produk dan jenis usaha unggulan daerah, melakukan pendidikan vokasi, dan bermitra dengan usaha mikro</p> <p>3 Memberikan tax holiday kepada usaha mikro</p>

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					4 Membebaskan perusahaan modal ventura sebagai objek PPh.
		4 Meningkatkan ketahanan pangan daerah	1	Peningkatan ketersediaan pangan	1 Memperkuat produksi pangan daerah, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah. 2 Mengendalikan impor pangan pokok 3 Memperkuat upaya pengembangan pemanfaatan lahan pekarangan 4 Memperkuat cadangan pangan
			2	Peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan	1 Melakukan pendataan dan pengawasan terhadap distribusi pangan secara berkala 2 Melakukan operasi pasar terhadap pangan pokok sesuai kebutuhan 3 Memperkuat toko tani kabupaten
			3	Peningkatan upaya perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	1 Mengintensifkan pemantauan terhadap produk pangan 2 Mengintensifkan upaya pengalakan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)
			4	Penguatan kelembagaan ketahan	1 Memperkuat dan menintensifkan peranan Dewan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
				pangan	Ketahanan Pangan Kabupaten
					2 Mempercepat penyusunan Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Pangan

### 6.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2021)

Pembangunan Indragiri Hilir di Tahun 2021 diarahkan kepada **Memantapkan Kemajuan, Martabat dan Marwah Indragiri Hilir** sebagai lanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga (2021) disajikan pada Tabel 6.6.

Tabel 6.6. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
<b>VISI:</b>					
<b>UNTUK KEJAYAAN INDRAGIRI HILIR YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT</b>					
<b>Misi 1:</b>					
<b>Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum</b>					
1.1	Memantapkan kinerja pelayanan publik	1 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Penegakan disiplin ASN	1 Memantapkan sosialisasi peraturan tentang disiplin ASN secara kontinu
					2 Memantapkan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
		yang bersih, transparan, dan akuntabel			pembinaan kepada ASN yang indisipliner dan reward kepada ASN berprestasi
			2	Pencegahan KKN	1 Memantapkan sialisasi peraturan anti KKN
					2 Memantapkan kerjasama pengawasan penyelenggaraan pembangunan daerah dengan lembaga penegak hukum
					3 Memantapkan pembinaan dan pengawasan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP)
			3	Perumusan dan Penyerbarluasan informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	1 Memantapkan perumusan rencana pembangunan
					2 Memantapkan sistem dan penyerbarluasan informasi perencanaan berbasis <i>information technology</i> (IT)
					3 Memantapkan penyebarluasan informasi tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah berbasis <i>information technology</i> (IT)
			4	Pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah	1 Memantapkan monitorng, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan



No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
				secara berkala	kegiatan pembangunan internal Perangkat Daerah
					2 Memantapkan tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah
		2 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1 Memantapkan kualifikasi dan kompetensi ASN
					2 Memantapkan sarana dan prasarana pelayanan publik
			2	Peningkatan pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan	1 Menyederhanakan prosedur pelayanan publik
					2 Memperjelas dan menyederhanakan persyaratan pengurusan
<b>Misi 2:</b>					
<b>Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah</b>					
2.1	Memantapkan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat	1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	1	Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan
					1 Memantapkan kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja pembangunan jalan dan jembatan kabupaten
					2 Memantapkan kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja pembangunan jalan lingkungan
				2	Peningkatan upaya peningkatan
					1 Memantapkan kualitas perencanaan, pengukuran dan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
				jalan	capaian kinerja peningkatan jalan kabupaten
					2 Memantapkan kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja peningkatan jalan lingkungan
			3	Peningkatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	1 Memantapkan kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten
					2 Memantapkan kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja rehabilitasi/pemeliharaan jalan lingkungan
		2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak	1 Peningkatan jaringan perpipaan air minum	1 Memberikan bantuan sarana dan prasarana serta pendanaan peningkatan jaringan perpipaan air minum
					2 Memantapkan penyertaan modal pada PDAM Tirta Indragiri
				2 Peningkatan pembangunan sumur bor di lingkungan permukiman	1 Memantapkan pembangunan sumur bor di lingkungan permukiman
					2 Membangun instalasi pengolahan air minum (IPA) yang bersumber dari sumur bor

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan						
		3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak	1	Peningkatan pembangunan drainase di lingkungan pemukiman	1	Memantapkan kualitas perencanaan dan pengukuran pembangunan drainase				
						2	Memantapkan capaian kinerja pembangunan drainase				
				2	Peningkatan rehabilitasi/pemeliharaan drainase di lingkungan pemukiman	1	Memantapkan kualitas perencanaan dan pengukuran rehabilitasi/pemeliharaan drainase				
						2	Memantapkan capaian kinerja rehabilitasi/pemeliharaan drainase				
				3	Peningkatan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di lingkungan permukiman	1	Memantapkan kualitas perencanaan dan pengukuran pembangunan IPAL				
						2	Memantapkan capaian kinerja pembangunan IPAL				
				4	Peningkatan upaya penataan dan pengelolaan lingkungan pemukiman dan pemukiman	1	Memantapkan upaya penataan bangunan				
						2	Memantapkan tata kelola lingkungan pemukiman				
						3	Memantapkan upaya pemberdayaan komunitas perumahan				
				2.2	Memantapkan pembangunan infrastruktur perhubungan	1	Meningkatnya layanan angkutan darat	1	Peningkatan kualitas pelayanan angkutan darat	1	Memantapkan kualifikasi dan kompetensi ASN perhubungan angkutan darat
										2	Memantapkan sarana dan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					<p>prasarana angkutan darat</p> <p>3 Memantapkan pengawasan kelayakan sarana angkutan darat</p>
			2	Peningkatan pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan publik angkutan darat	<p>1 Menyederhanakan prosedur pelayanan publik angkutan darat</p> <p>2 Memperjelas dan menyederhanakan persyaratan pengurusan uji kelayakan angkutan darat</p> <p>3 Menertibkan pengelolaan Tepi jalan umum</p>
		2 Meningkatkan layanan angkutan Perairan, sungai dan penyeberangan	1	Peningkatan kualitas pelayanan angkutan Perairan, Sungai dan Penyeberangan	<p>1 Memantapkan kualifikasi dan kompetensi ASN perhubungan angkutan Perairan, Sungai dan Penyeberangan</p> <p>2 Memantapkan sarana dan prasarana angkutan Perairan, Sungai dan Penyeberangan</p> <p>3 Memantapkan pengawasan kelayakan sarana angkutan Perairan, Sungai dan Penyeberangan</p>
			2	Peningkatan pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan publik angkutan Perairan, Sungai dan Penyeberangan	<p>1 Menyederhanakan prosedur pelayanan publik angkutan Perairan, Sungai dan Penyeberangan</p> <p>2 Memperjelas dan menyederhanakan persyaratan pengurusan kelengkapan</p>

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
					angkutan air		
<b>Misi 3:</b>							
<b>Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat</b>							
3.1	Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang lebih produktif	1	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian	1	Peningkatan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian	1	Memantapkan infrastruktur pertanian
					2	Memantapkan SDM pertanian	
					3	Memantapkan kelembagaan pertanian	
					4	Memantapkan alat dan mesin pertanian	
					5	Memantapkan pembiayaan usaha pertanian	
					6	Memantapkan penguasaan teknologi dalam merespon dinamika dan perubahan iklim	
					7	Memastikan kecukupan dan kontinuitas ketersediaan sarana produksi	
		2	Penguatan daya saing produk pertanian	2	1	Mewujudkan efisiensi produksi pertanian	
					2	Mewujudkan harga produk pertanian yang bersaing	
					3	Memantapkan pemasaran produk pertanian	
2	Meningkatnya kontribusi sektor	1	Peningkatan kapasitas produksi	1	Memantapkan pengelolaan sumberdaya		

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan				
		perikanan		melalui peningkatan penangkapan ikan dan budidaya	perikanan tangkap				
			2		Memantapkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya				
			3		Memantapkan SDM perikanan				
			4		Memantapkan kelembagaan perikanan				
			5		Memantapkan infrastruktur perikanan				
			6		Memantapkan pembiayaan usaha perikanan				
			7		Memantapkan penguasaan teknologi dalam merespon dinamika dan perubahan iklim				
			8		Memantapkan koordinasi lintas sektor				
			3		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	1	Pengembangan pemasaran pariwisata	1	Memantapkan promosi objek-objek dan daya tarik wisata
								2	Memantapkan penyelenggaraan even-even pariwisata
		2		Pengembangan destinasi wisata				1	Memantapkan infrastruktur pariwisata

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan	
					2 Memantapkan wisata alam	
					3 Memantapkan wisata budaya dan religi	
					4 Memantapkan wisata agro	
			3	Pegembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata	1 Mewujudkan kelembagaan pariwisata yang kuat	
					2 Memantapkan SDM Pariwisata	
					3 Memantapkan koordinasi lintas sektor	
3.2	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	1	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	1	Peningkatan tutupan dan performance hutan	1 Memantapkan pengawasan terhadap aktivitas produksi, perubahan, ataupun perawatan yang berdampak terhadap tutupan lahan
					2 Memantapkan ruang terbuka hijau	
				2	Peningkatan kondisi tutupan tanah	1 Memantapkan pengawasan terhadap aktivitas produksi dan perubahan yang menyebabkan erosi tanah dan air limpasan
					2 Memantapkan upaya perlindungan dan konservasi tanah dan air	
				3	Peningkatan konservasi badan air	1 Memantapkan upaya menjaga proporsi hutan di sepadan sungai/danau
					2 Memantapkan	

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					upaya konservasi badan air
			4	Peningkatan kondisi habitat	1 Memantapkan pengawasan terhadap aktivitas produksi dan perubahan yang menyebabkan perubahan keanekaragaman hayati
					2 Memantapkan upaya mempertahankan keanekaragaman hayati
		2	Meningkatnya Kualitas Udara	1 Peningkatan pengawasan terhadap aktivitas pencemaran udara	1 Memantapkan pengawasan terhadap emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin
					2 Memantapkan pengawasan terhadap emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya
				2 Peningkatan pengendalian pencemaran udara	1 Memberlakukan kebijakan pemberian insentif dan disinsentif
					2 Membangun komitmen antara para pemangku kepentingan
		3	Meningkatnya Kualitas Air	1 Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi)	1 Memantapkan pengawasan terhadap pencemaran air
					2 Memantapkan upaya pemulihan



No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
				pada sumber air	(restorasi) pencemaran pada sumber air
			2	Peningkatan ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global	1 Memantapkan upaya mempertahankan ketersediaan air yang cukup bagi aktivitas makhluk hidup 2 Memantapkan upaya pemulihan (restorasi) pada sumber air
			3	Pengendalian penggunaan air	1 Memantapkan pengawasan terhadap penggunaan air 2 Mengintensifkan kampanye efisiensi penggunaan air
			4	Pengendalian tingkat erosi dan sedimentasi	1 Memantapkan pengawasan terhadap tingkat erosi dan sedimentasi 2 Memantapkan upaya pemulihan (restorasi) erosi dan sedimentasi
		4	Terwujudnya pengelolaan dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan	1 Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan.	1 Memaksimalkan sarana dan prasarana persampahan 2 Mege depankan peran dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan sampah. 3 Megembangkan pola kemitraan strategis dengan pihak swasta melalui

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					penyederhanaan jalur birokrasi bagi pihak swasta yang berminat untuk berinvestasi dalam pengelolaan sampah.
			2	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang arti penting pengelolaan persampahan	1 Memantapkan pembinaan dan pemahaman masyarakat secara intensif dan berkelanjutan (sustainable) akan upaya 5R (reduce, reuse, recycle, recovery, replace) terkait dengan pengelolaan persampahan
					2 Memantapkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 5R
<b>Misi 4:</b>					
<b>Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan iman dan taqwa</b>					
4.1	Mewujudkan kualitas SDM berdaya saing	1	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar pendidikan sesuai dengan standar	1	Peningkatan pelayanan pendidikan anak usia dini bermutu, merata, dan terjangkau.
					1 Memantapkan ketersediaan fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD) secara merata, dan terjangkau di setiap desa.
					2 Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD).
					3 Memantapkan kualifikasi dan kompetensi aparatur, pendidik, dan tenaga kependidikan PAUD

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan				
					4	Mendorong penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) PAUD.			
					5	Memantapkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD.			
				2	Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bermutu, merata, dan terjangkau.	1	Memantapkan ketersediaan fasilitas pendidikan dasar secara merata, dan terjangkau.		
				2	Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.				
				3	Memantapkan kualifikasi dan kompetensi aparatur, pendidik, dan tenaga kependidikan pendidikan dasar				
				4	Mendorong penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) pendidikan dasar.				
				5	Memantapkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pendidikan dasar.				
				2	Meningkatnya pelayanan kesehatan	1	Penguatan upaya promotif dan preventif	1	Memantapkan upaya pencegahan dan

No.	Tujuan	Sasaram	Strategi	Arah Kebijakan
		masyarakat		penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular 2 Memantapkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 3 Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat
			2 Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1 Memantapkan upaya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 2 Memantapkan pengawasan obat dan makanan 3 Memantapkan obat asli Indonesia 4 Memantapkan upaya pengadaan, peningkatan dan perbaikan infrastruktur pelayanan kesehatan 5 Mempercepat standarisasi pelayanan kesehatan 6 Memantapkan kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 7 Memantapkan pelayanan kesehatan anak balita 8 Memantapkan mutu pelayanan BLUD 9 Memantapkan sumberdaya kesehatan 10 Memantapkan manajemen dan informasi kesehatan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan			
				3	Percepatan perbaikan gizi masyarakat dan mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat	1	Mempercepat upaya perbaikan gizi masyarakat	
					2	Memantapkan upaya pengembangan lingkungan hidup sehat		
				4	Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	1	Memantapkan pelayanan keluarga berencana	
					2	Memantapkan upaya keselamatan ibu dan anak		
			3	Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat	1	Peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat	1	Memantapkan pendapatan masyarakat
							2	Mengendalikan inflasi
4.2	Mewujudkan pembangunan SDM beriman dan bertaqwa	1	Meningkatnya sarana rumah ibadah	1	Peningkatan kuantitas sarana rumah ibadah	1	Menyusun perencanaan pembangunan sarana rumah ibadah sesuai dengan kebutuhan	
						2	Membangun sarana rumah ibadah sesuai kebutuhan	
					2	Peningkatan kualitas sarana rumah ibadah	1	Menyusun perencanaan peningkatan pembangunan sarana rumah ibadah
							2	Memantapkan sarana rumah ibadah
				3	Peningkatan upaya rehabilitasi/pemeliharaan sarana rumah ibadah	1	Menyusun perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan sarana rumah ibadah	
						2	Memantapkan upaya rehabilitasi sarana rumah	

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
					ibadah		
		2	Meningkatnya aktivitas keagamaan	1	Peningkatan upaya meningkatkan aktivitas keagamaan	1	Memfasilitasi kegiatan keagamaan sesuai kebutuhan umat beragama
						2	Melaksanakan kegiatan pendataan terhadap aktivitas keagamaan
				2	Peningkatan aktivitas kerjasama keagamaan	1	Memantapkan forum kerjasama antara umat beragama
						2	Memantapkan kegiatan kerjasama antara umat beragama
<b>Misi 5:</b>							
<b>Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan</b>							
5.1	Meningkatkan partisipasi sosial	1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	1	Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan perempuan	1	Memantapkan angka melek huruf perempuan
						2	Memantapkan angka rata-rata lama sekolah perempuan
						3	Memantapkan angka harapan lama sekolah perempuan
				2	Peningkatan kuantitas dan kualitas kesehatan perempuan	1	Memantapkan usia harapan hidup perempuan
						2	Memantapkan cakupan pelayanan kesehatan bagi perempuan
		2	Meningkatnya semangat kegotong royongan masyarakat	1	Peningkatan kepedulian sosial	1	Memantapkan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					<p>sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial</p> <p>2 Memantapkan kepedulian sosial kepada korban bencana</p> <p>3 Memantapkan penerimaan zakat</p> <p>4 Memantapkan jumlah hewan kurban</p>
			2	Peningkatan jumlah kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat	<p>1 Memantapkan jumlah kelompok tani</p> <p>2 Memantapkan jumlah koperasi</p> <p>3 Memantapkan jumlah lembaga keuangan berbasis masyarakat</p> <p>4 Memantapkan jumlah LSM</p>
5.2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	1 Meningkatkan pemberdayaan perempuan	1	Peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan, partai politik dan lembaga swasta	<p>1 Memantapkan partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan</p> <p>2 Memantapkan partisipasi perempuan dalam partai politik</p> <p>3 Memantapkan partisipasi perempuan dalam lembaga swasta</p>
			2	Peningkatan partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi	<p>1 Memantapkan partisipasi angkatan kerja perempuan</p> <p>2 Memantapkan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian</p>

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan	
		2 Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat	1	Peningkatan kualitas kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat	1	Memantapkan kelas kelompok tani
					2	Memantapkan koperasi berkualitas
					3	Mempercepat transformasi UED-SP menjadi BUMDes
			2	Peningkatan peran kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat	1	Memantapkan cakupan pelayanan kelompok tani
					2	Memantapkan cakupan pelayanan koperasi
					3	Memantapkan cakupan pelayanan BUMDes
		3 Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat	1	Peningkatan kualitas kelembagaan sosial	1	Memantapkan kualitas panti sosial
					2	Memantapkan kualitas LSM
					3	Memantapkan kualitas lembaga PKK
					4	Memantapkan kualitas Posyandu
					5	Memantapkan kualitas organisasi kepemudaan dan olahraga
			2	Peningkatan peran kelembagaan sosial	1	Memantapkan cakupan pelayanan panti sosial
2	Memantapkan cakupan pelayanan LSM					
3	Memantapkan cakupan pelayanan lembaga PKK					



No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					4 Memantapkan cakupan pelayanan Posyandu
					5 Memantapkan cakupan pelayanan organisasi kepemudaan dan olah raga
<b>Misi 6:</b>					
<b>Memantapkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman kehidupan sosial</b>					
6.1	Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman sosial	1	Menurunnya angka kriminalitas	1	Peningkatan upaya pencegahan tindak kriminalitas
				1	Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait hukum pidana dan perdata
				2	Memantapkan wawasan kebangsaan
				3	Memantapkan kerjasama antara penegak hukum dengan lembaga pemerintahan dan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kriminalitas
				2	Peningkatan upaya penindakan tindak kriminalitas
1	Memantapkan penegakan hukum dengan memegang teguh prinsip-prinsip transparansi, kesetaraan dan akuntabel				
2	Memantapkan kerjasama antara penegak hukum dengan lembaga pemerintahan dan masyarakat dalam upaya penindakan tindak kriminalitas				

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan									
		2	Tegaknya prinsip-prinsip demokrasi	1	Peningkatan kebebasan sipil (civil liberty)	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Memantapkan upaya mewujudkan kebebasan berkumpul &amp; berserikat</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Memantapkan upaya mewujudkan kebebasan berpendapat</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Memantapkan upaya mewujudkan kebebasan berkeyakinan</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Memantapkan upaya mewujudkan kebebasan dari diskriminasi</td> </tr> </table>	1	Memantapkan upaya mewujudkan kebebasan berkumpul & berserikat	2	Memantapkan upaya mewujudkan kebebasan berpendapat	3	Memantapkan upaya mewujudkan kebebasan berkeyakinan	4	Memantapkan upaya mewujudkan kebebasan dari diskriminasi
1	Memantapkan upaya mewujudkan kebebasan berkumpul & berserikat													
2	Memantapkan upaya mewujudkan kebebasan berpendapat													
3	Memantapkan upaya mewujudkan kebebasan berkeyakinan													
4	Memantapkan upaya mewujudkan kebebasan dari diskriminasi													
				2	Peningkatan hak-hak politik (political liberty)	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Memantapkan upaya mewujudkan penggunaan hak memilih dan dipilih</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Memantapkan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan</td> </tr> </table>	1	Memantapkan upaya mewujudkan penggunaan hak memilih dan dipilih	2	Memantapkan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan				
1	Memantapkan upaya mewujudkan penggunaan hak memilih dan dipilih													
2	Memantapkan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan													
				3	Penguatan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy)	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Memantapkan upaya mewujudkan pemilu yang bebas adil</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Memantapkan peran DPRD</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Memantapkan peran Partai Politik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Memantapkan peran birokrasi Pemda</td> </tr> </table>	1	Memantapkan upaya mewujudkan pemilu yang bebas adil	2	Memantapkan peran DPRD	3	Memantapkan peran Partai Politik	4	Memantapkan peran birokrasi Pemda
1	Memantapkan upaya mewujudkan pemilu yang bebas adil													
2	Memantapkan peran DPRD													
3	Memantapkan peran Partai Politik													
4	Memantapkan peran birokrasi Pemda													

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan	
		3	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	1	Peningkatan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak	<p>1 Memantapkan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit</p> <p>2 Memantapkan cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.</p>
					<p>3 Memantapkan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum</p> <p>4 Memantapkan cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan</p> <p>5 Memantapkan cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan</p>	
				2	Peningkatan penanganan dan	1 Memantapkan cakupan perempuan dan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
				penegakan hukum bagi perlindungan terhadap perempuan dan anak	anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
					2 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
		4 Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	1	Peningkatan upaya memberikan bantuan sosial kepada PMKS, korban bencana dan komunitas adat terpencil (KAT)	1 Meningkatkan upaya memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar kepada PMKS, korban bencana dan komunitas adat terpencil (KAT)
					2 Memantapkan upaya memberikan bantuan sosial kepada korban bencana selama masa tanggap darurat
					3 Mengoptimalkan sarana dan prasarana tanggap darurat kepada korban bencana yang dievakuasi
					4 Memantapkan upaya memberikan jaminan sosial kepada penyandang cacat

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial
			2	Peningkatan upaya penertiban PMKS	1 Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PMKS 2 Melakukan pengamanan dan pembinaan terhadap PMKS
		5	Menurunnya resiko bencana	1 Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana.	1 Memantapkan alokasi anggaran penanggulangan bencana daerah 2 Memantapkan efektivitas sistem kesiapsiagaan dan kedaruratan daerah
					3 Memantapkan dan memantapkan kemitraan dalam penanggulangan bencana daerah 4 Mewujudkan penetapan status bencana disertai dengan mekanisme pemantauan terpadu lintas sektor dan lintas kelembagaan pemerintah daerah.
			2	Peningkatan kemitraan multipihak dalam penanggulangan bencana.	1 Memantapkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana daerah 2 Menggalang kemitraan dengan lembaga non pemerintah,

No.	Tujuan	Sasaram	Strategi	Arah Kebijakan
				lembaga pendidikan dan Forum Penanggulangan Resiko Bencana (PRB)
			3 Pemenuhan tata kelola yang baik bidang penanggulangan bencana.	1 Menjamin transparansi dan akuntabilitas bidang penanggulangan bencana
				2 Memantapkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam mencapai efektivitas penanggulangan bencana daerah
			4 Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	1 Mengoptimalkan strategi penyadaran publik untuk memantapkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan mitigasi bencana
				2 Memantapkan riset-riset terapan dengan kerangka kerja terstruktur dan mengarah kepada peningkatan rasio biaya-manfaat dan selalu mempertimbangkan proses adaptasi pengetahuan asli lokal di tatanan masyarakat pengguna hasil riset,

No.	Tujuan	Sasaram	Strategi	Arah Kebijakan
				<p>3 Menyusun penataan ruang dan lahan pada sebagian besar daerah prioritas kabupaten berdasarkan rencana pengelolaan sumberdaya air, tanah dan hutan sesuai dengan hasil Kajian Risiko Bencana serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah.</p>
			<p>5 Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.</p>	<p>1 Membangun sistem peringatan dini bencana multi ancaman nasional yang terkoordinasi dengan prosedur standar yang disepakati antar dinas/instansi terkaik secara sistematis dan terukur dan selalu dilatih secara berkala</p> <p>2 Memantapkan tingkat paparan pelayanan sistem peringatan dini bencana kepada masyarakat pengguna dengan memantapkan alternatif moda penyebaran, strategi advokasi dan informasi publik, serta mekanisme latihan bersama antara pemerintah dan masyarakat</p> <p>2 Memantapkan kapasitas evakuasi,</p>

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan serta kemandirian mobilisasi sumberdaya masyarakat berdasarkan pedoman dan mekanisme standar yang disepakati.
			6	Peningkatan kapasitas pemulihan bencana.	<p>1 Menyusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan karakter masyarakat yang mandiri</p> <p>2 Mengimplemantasi kan kegiatan pemulihan bencana berdasarkan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan karakter masyarakat yang mandiri</p>
<b>Misi 7:</b>					
<b>Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran</b>					
7.1	Menurunkan tingkat pengangguran	1	Meningkatnya kesempatan kerja	<p>1 Peningkatan upaya penyusunan dan penyebarluasan data dan informasi ketenagakerjaan</p> <p>2 Peningkatan upaya meningkatkan investasi yang bersifat</p>	<p>1 Menyusun data dan informasi ketenagakerjaan berbasis teknologi informasi secara transparan dan akuntabel</p> <p>2 Mengintensifkan even-even bursa tenaga kerja</p> <p>1 Memberikan kemudahan kepada investor-investor yang memantapkan usaha padat</p>



No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
				padat karya	<p>karya, terutama yang memprioritaskan menyerap tenaga kerja lokal</p> <p>2 Memberikan prioritas kepada investor-investor yang akan memantapkan usaha berbasis pada sumberdaya lokal</p>
		2 Meningkatkan kualitas tenaga kerja	1	Peningkatan kualifikasi tenaga kerja	<p>1 Memantapkan lulusan S1/S2/S3</p> <p>2 Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja</p> <p>3 Memantapkan sekolah menengah kejuruan berbasis sumberdaya lokal</p> <p>Memantapkan perguruan tinggi berbasis sumberdaya lokal</p>
			2	Peningkatan kompetensi tenaga kerja	<p>1 Memantapkan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</p> <p>2 Memantapkan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat</p> <p>3 Memantapkan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan</p>
7.2.	Menurunkan tingkat	1 Meningkatkan cakupan bantuan	1	Peningkatan perlindungan sosial	1 Menyusun data dan informasi kemiskinan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
	kemiskinan	kepada masyarakat miskin		berbasis masyarakat miskin	berbasis teknologi informasi secara transparan dan akuntabel secara berkala		
					2	Memberikan bantuan penanganan kesehatan kepada masyarakat miskin	
					3	Memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat miskin	
					4	Memantapkan sistem jaminan kesejahteraan sosial daerah	
					2	Peningkatan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin	
		2	Meningkatkan daya beli penduduk miskin	1	Peningkatan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	1	Memantapkan bantuan raskin dan/atau biaya langsung tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin
						2	Memantapkan penanganan daerah rawan pangan
						1	Memantapkan produktivitas pertanian dan perikanan
						2	Mengupayakan harga produk pertanian dan perikanan yang bersaing
						3	Mengurangi beban biaya usahatani dan usaha perikanan dengan memberikan bantuan/subsidi

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan						
					4	Memantapkan pembangunan rumah bagi fakir miskin					
				2 Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat miskin	1	Memantapkan kegiatan pemberdayaan petani dan nelayan					
					2	Memantapkan kegiatan pemberdayaan pelaku usaha mikro					
<b>Misi 8:</b>											
<b>Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah</b>											
8.1	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	1	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan terkendalinya kesenjangan pendapatan	1	Peningkatan kemandirian ekonomi	1	Menumbuhkembangkan komoditi, produk, dan jenis usaha unggulan daerah				
						2	Memantapkan daya saing sektoral				
						3	Memantapkan potensi pariwisata dan kebudayaan				
						4	Memantapkan ekonomi kreatif				
						5	Mewujudkan efisiensi ekonomi melalui penerapan inovasi teknologi				
								6	Memantapkan infrastruktur ekonomi		
								7	Memantapkan perlindungan konsumen		
								2	Penurunan kesenjangan pendapatan	1	Memantapkan nilai tukar petani
										2	Mengendalikan inflasi
										3	Memberikan bantuan pengembangan usaha produktif

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
		2	Terwujudnya percepatan transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan	1	Pengembangan kluster industri daerah	1	Mempercepat penyusunan rencana induk pengembangan industri kabupaten (RIPIK)
						2	Menetapkan komitmen pemerintah daerah untuk mengimplementasikan RIPIK yang tertuang dalam bentuk Perda
						3	Mempercepat terbentuknya kluster industri produk unggulan daerah
				2	Percepatan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah	1	Mempercepat penetapan kompetensi inti industri daerah dalam bentuk perda
						2	Menetapkan dan mengimplementasikan langkah-langkah pengembangan kompetensi inti industri
						3	Menjalin kemitraan dalam pengembangan kompetensi inti industri dengan perusahaan-perusahaan menengah dan besar
3	Meningkatnya investasi daerah	1	Peningkatan promosi investasi	1	Menyusun dokumen masterplan dan bisnis plan pengembangan komoditi, produk dan jenis usaha unggulan daerah		

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					2 Memantapkan penyelenggaraan even-even promosi investasi
					3 Mengintensifkan diseminasi dokumen promosi investasi (ringkasan masterplan/bisnis plan) melalui media massa dan elektronik
			2	Pemberian kemudahan dan insentif investasi	1 Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan persyaratan dan prosedur, memperjelas waktu dan biaya pengurusan
					2 Memberikan tax allowance kepada investor yang berinvestasi pada komoditi, produk dan jenis usaha unggulan daerah, melakukan pendidikan vokasi, dan bermitra dengan usaha mikro
					3 Memberikan tax holiday kepada usaha mikro
					4 Membebaskan perusahaan modal ventura sebagai objek PPh.
		4 Meningkatkan ketahanan pangan daerah	1	Peningkatan ketersediaan pangan	1 Memantapkan produksi pangan daerah, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					merah.
					2 Mengendalikan impor pangan pokok
					3 Memantapkan upaya pengembangan pemanfaatan lahan pekarangan
					4 Memantapkan cadangan pangan
			2	Peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan	1 Melakukan pendataan dan pengawasan terhadap distribusi pangan secara berkala
					2 Melakukan operasi pasar terhadap pangan pokok sesuai kebutuhan
					3 Memantapkan toko tani kabupaten
			3	Peningkatan upaya perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	1 Mengintensifkan pemantauan terhadap produk pangan
					2 Mengintensifkan upaya pengalakan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)
			4	Penguatan kelembagaan ketahan pangan	1 Memantapkan dan menintensifkan peranan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten
					2 Mempercepat penyusunan Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Pangan



**6.2.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2022)**

Pembangunan Indragiri Hilir di Tahun 2022 diarahkan kepada **Lebih Memantapkan Kemajuan, Martabat dan Marwah Indragiri Hilir** sebagai lanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan tahun pertama (2022) disajikan pada Tabel 6.7.

Tabel 6.7. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>VISI:</b>				
<b>UNTUK KEJAYAAN INDRAGIRI HILIR YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT</b>				
<b>Misi 1:</b>				
<b>Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum</b>				
1.1	Memantapkan kinerja pelayanan publik	1 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	1 Penegakan disiplin ASN	1 Lebih memantapkan sosialisasi peraturan tentang disiplin ASN secara kontinu
				2 Lebih memantapkan pembinaan kepada ASN yang indisipliner dan reward kepada ASN berprestasi
			2 Pencegahan KKN	1 Lebih memantapkan sosialisasi peraturan anti KKN
				2 Lebih memantapkan kerjasama pengawasan penyelenggaraan pembangunan daerah dengan lembaga penegak hukum
				3 Lebih memantapkan pembinaan dan pengawasan oleh Aparatur



No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan	
					Pengawas Internal Pemerintahan (APIP)	
			3	Perumusan dan Penyerbarluasan informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	1 Lebih memantapkan perumusan rencana pembangunan	
					2 Lebih memantapkan sistem dan penyerbarluasan informasi perencanaan berbasis <i>information technolgy</i> (IT)	
					3 Lebih memantapkan penyebarluasan informasi tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah berbasis <i>information technolgy</i> (IT)	
			4	Pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah secara berkala	1 Lebih memantapkan monitorng, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan internal Perangkat Daerah	
					2 Lebih memantapkan tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah	
		2	Meningkatnya kepuasan masyarakat	1	Peningkatan kualitas pelayanan	1 Lebih memantapkan kualifikasi dan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
		terhadap pelayanan publik		publik	kompetensi ASN
					2 Lebih memantapkan sarana dan prasarana pelayanan publik
			2	Peningkatan pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan	1 Menyederhanakan prosedur pelayanan publik
					2 Memperjelas dan menyederhanakan persyaratan pengurusan
<b>Misi 2:</b>					
<b>Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah</b>					
2.1	Memantapkan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat	1 Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	1	Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan	1 Lebih memantapkan kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja pembangunan jalan dan jembatan kabupaten
					2 Lebih memantapkan kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja pembangunan jalan lingkungan
			2	Peningkatan upaya peningkatan jalan	1 Lebih memantapkan kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja peningkatan jalan kabupaten
					2 Lebih memantapkan kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja peningkatan jalan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					lingkungan
			3	Peningkatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	1 Lebih memantapkan kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten
					2 Lebih memantapkan kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja rehabilitasi/pemeliharaan jalan lingkungan
		2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak	1 Peningkatan jaringan perpipaan air minum	1 Memberikan bantuan sarana dan prasarana serta pendanaan peningkatan jaringan perpipaan air minum
					2 Lebih memantapkan penyertaan modal pada PDAM Tirta Indragiri
				2 Peningkatan pembangunan sumur bor di lingkungan permukiman	1 Lebih memantapkan pembangunan sumur bor di lingkungan permukiman
					2 Membangun instalasi pengolahan air minum (IPA) yang bersumber dari sumur bor
		3	Meningkatnya akses masyarakat	1 Peningkatan pembangunan drainase di	1 Lebih memantapkan kualitas

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan			
		terhadap sanitasi layak		lingkungan pemukiman	perencanaan dan pengukuran pembangunan drainase			
			2		Lebih memantapkan capaian kinerja pembangunan drainase			
			2	Peningkatan rehabilitasi/pemeliharaan drainase di lingkungan pemukiman	1	Lebih memantapkan kualitas perencanaan dan pengukuran rehabilitasi/pemeliharaan drainase		
			2		Lebih memantapkan capaian kinerja rehabilitasi/pemeliharaan drainase			
			3	Peningkatan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di lingkungan permukiman	1	Lebih memantapkan kualitas perencanaan dan pengukuran pembangunan IPAL		
			2		Lebih memantapkan capaian kinerja pembangunan IPAL			
			4	Peningkatan upaya penataan dan pengelolaan lingkungan pemukiman dan pemakaman	1	Lebih memantapkan upaya penataan bangunan		
			2		Lebih memantapkan tata kelola lingkungan pemukiman			
			3		Lebih memantapkan upaya pemberdayaan komunitas perumahan			
2.2	Memantapkan		1	Meningkatnya layanan	1	Peningkatan kualitas	1	Lebih memantapkan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
	pembangunan infrastruktur perhubungan	angkutan darat		pelayanan angkutan darat	1	kualifikasi dan kompetensi ASN perhubungan angkutan darat	
					2	Lebih memantapkan sarana dan prasarana angkutan darat	
					3	Lebih memantapkan pengawasan kelayakan sarana angkutan darat	
				2	Peningkatan pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan publik angkutan darat	1	Menyederhanakan prosedur pelayanan publik angkutan darat
						2	Memperjelas dan menyederhanakan persyaratan pengurusan uji kelayakan angkutan darat
						3	Menertibkan pengelolaan Tepi jalan umum
		2	Meningkatnya layanan angkutan Perairan, sungai dan penyeberangan	1	Peningkatan kualitas pelayanan angkutan Perairan, Sungai dan Penyeberangan	1	Lebih memantapkan kualifikasi dan kompetensi ASN perhubungan angkutan Perairan, Sungai dan Penyeberangan
						2	Lebih memantapkan sarana dan prasarana angkutan Perairan, Sungai dan Penyeberangan
						3	Lebih memantapkan pengawasan kelayakan sarana angkutan Perairan, Sungai dan Penyeberangan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
			2	Peningkatan pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan publik angkutan Perairan, Sungai dan Penyeberangan	1	Menyederhanakan prosedur pelayanan publik angkutan Perairan, Sungai dan Penyeberangan	
					2	Memperjelas dan menyederhanakan persyaratan pengurusan kelengkapan angkutan Perairan, Sungai dan Penyeberangan	
<b>Misi 3:</b>							
<b>Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat</b>							
3.1	Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang lebih produktif	1	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian	1	Peningkatan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian	1	Lebih memantapkan infrastruktur pertanian
						2	Lebih memantapkan SDM pertanian
						3	Lebih memantapkan kelembagaan pertanian
						4	Lebih memantapkan alat dan mesin pertanian
						5	Lebih memantapkan pembiayaan usaha pertanian
						6	Lebih memantapkan penguasaan teknologi dalam merespon dinamika dan perubahan iklim
						7	Memastikan kecukupan dan kontinuitas ketersediaan sarana produksi

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					8 Lebih memantapkan koordinasi lintas sektor
			2	Penguatan daya saing produk pertanian	1 Mewujudkan efisiensi produksi pertanian
					2 Mewujudkan harga produk pertanian yang bersaing
					3 Lebih memantapkan pemasaran produk pertanian
		2 Meningkatkan kontribusi sektor perikanan	1	Peningkatan kapasitas produksi melalui peningkatan penangkapan ikan dan budidaya	1 Lebih memantapkan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap
					2 Lebih memantapkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya
					3 Lebih memantapkan SDM perikanan
					4 Lebih memantapkan kelembagaan perikanan
					5 Lebih memantapkan infrastruktur perikanan
					6 Lebih memantapkan pembiayaan usaha perikanan
					7 Lebih memantapkan penguasaan teknologi dalam merespon dinamika dan perubahan iklim

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
					8	Lebih memantapkan koordinasi lintas sektor	
			2	Penguatan daya saing produk perikanan	1	Mewujudkan efisiensi produksi perikanan	
					2	Mewujudkan harga produk perikanan yang bersaing	
					3	Lebih memantapkan pemasaran produk perikanan	
		3	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	1	Pengembangan pemasaran pariwisata	1	Lebih memantapkan promosi objek-objek dan daya tarik wisata
					2	Lebih memantapkan penyelenggaraan even-even pariwisata	
			2	Pengembangan destinasi wisata	1	Lebih memantapkan infrastruktur pariwisata	
					2	Lebih memantapkan wisata alam	
					3	Lebih memantapkan wisata budaya dan religi	
					4	Lebih memantapkan wisata agro	
			3	Pegembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata	1	Mewujudkan kelembagaan pariwisata yang kuat	
					2	Lebih memantapkan SDM Pariwisata	
					3	Lebih	



No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
					memantapkan koordinasi lintas sektor		
3.2	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	1	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	1	Peningkatan tutupan dan performance hutan	1	Lebih memantapkan pengawasan terhadap aktivitas produksi, perubahan, ataupun perawatan yang berdampak terhadap tutupan lahan
					2	Lebih memantapkan ruang terbuka hijau	
				2	Peningkatan kondisi tutupan tanah	1	Lebih memantapkan pengawasan terhadap aktivitas produksi dan perubahan yang menyebabkan erosi tanah dan air limpasan
						2	Lebih memantapkan upaya perlindungan dan konservasi tanah dan air
				3	Peningkatan konservasi badan air	1	Lebih memantapkan upaya menjaga proporsi hutan di sepadan sungai/danau
						2	Lebih memantapkan upaya konservasi badan air
				4	Peningkatan kondisi habitat	1	Lebih memantapkan pengawasan terhadap aktivitas produksi dan perubahan yang

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					menyebabkan perubahan keanekaragaman hayati
					2 Lebih memantapkan upaya mempertahankan keanekaragaman hayati
		2 Meningkatkan Kualitas Udara	1	Peningkatan pengawasan terhadap aktivitas pencemaran udara	1 Lebih memantapkan pengawasan terhadap emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin
					2 Lebih memantapkan pengawasan terhadap emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya
			2	Peningkatan pengendalian pencemaran udara	1 Memberlakukan kebijakan pemberian insentif dan disinsentif
					2 Membangun komitmen antara para pemangku kepentingan
		3 Meningkatkan Kualitas Air	1	Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada sumber air	1 Lebih memantapkan pengawasan terhadap pencemaran air
					2 Lebih memantapkan upaya pemulihan (restorasi) pencemaran pada

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					sumber air
			2	Peningkatan ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global	1 Lebih memantapkan upaya mempertahankan ketersediaan air yang cukup bagi aktivitas makhluk hidup
					2 Lebih memantapkan upaya pemulihan (restorasi) pada sumber air
			3	Pengendalian penggunaan air	1 Lebih memantapkan pengawasan terhadap penggunaan air
					2 Mengintensifkan kampanye efisiensi penggunaan air
			4	Pengendalian tingkat erosi dan sedimentasi	1 Lebih memantapkan pengawasan terhadap tingkat erosi dan sedimentasi
					2 Lebih memantapkan upaya pemulihan (restorasi) erosi dan sedimentasi
		4	Terwujudnya pengelolaan dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan	1 Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan.	1 Memaksimalkan sarana dan prasarana persampahan
					2 Megedepankan peran dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan sampah.

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					3 Megembangkan pola kemitraan strategis dengan pihak swasta melalui penyederhanaan jalur birokrasi bagi pihak swasta yang berminat untuk berinvestasi dalam pengelolaan sampah.
				2 Peningkatan kesadaran masyarakat tentang arti penting pengelolaan persampahan	1 Lebih memantapkan pembinaan dan pemahaman masyarakat secara intensif dan berkelanjutan (sustainable) akan upaya 5R (reduce, reuse, recycle, recovery, replace) terkait dengan pengelolaan persampahan
					2 Lebih memantapkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 5R
<b>Misi 4:</b>					
<b>Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan iman dan taqwa</b>					
4.1	Mewujudkan kualitas SDM berdaya saing	1	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar pendidikan sesuai dengan standar	1	Peningkatan pelayanan pendidikan anak usia dini bermutu, merata, dan terjangkau.
					1 Lebih memantapkan ketersediaan fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD) secara merata, dan terjangkau di setiap desa.
					2 Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD).

No.	Tujuan	Sasaram	Strategi	Arah Kebijakan												
				<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1098 342 1161 555">3</td> <td data-bbox="1161 342 1441 555">Lebih memantapkan kualifikasi dan kompetensi aparatur, pendidik, dan tenaga kependidikan PAUD</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1098 555 1161 768">4</td> <td data-bbox="1161 555 1441 768">Mendorong penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) PAUD.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1098 768 1161 981">5</td> <td data-bbox="1161 768 1441 981">Lebih memantapkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD.</td> </tr> </table>	3	Lebih memantapkan kualifikasi dan kompetensi aparatur, pendidik, dan tenaga kependidikan PAUD	4	Mendorong penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) PAUD.	5	Lebih memantapkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD.						
3	Lebih memantapkan kualifikasi dan kompetensi aparatur, pendidik, dan tenaga kependidikan PAUD															
4	Mendorong penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) PAUD.															
5	Lebih memantapkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD.															
			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="831 981 1098 1955">2</td> <td data-bbox="1098 981 1441 1955">Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bermutu, merata, dan terjangkau.</td> </tr> </table>	2	Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bermutu, merata, dan terjangkau.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1098 981 1161 1149">1</td> <td data-bbox="1161 981 1441 1149">Lebih memantapkan ketersediaan fasilitas pendidikan dasar secara merata, dan terjangkau.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1098 1149 1161 1361">2</td> <td data-bbox="1161 1149 1441 1361">Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1098 1361 1161 1608">3</td> <td data-bbox="1161 1361 1441 1608">Lebih memantapkan kualifikasi dan kompetensi aparatur, pendidik, dan tenaga kependidikan pendidikan dasar</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1098 1608 1161 1843">4</td> <td data-bbox="1161 1608 1441 1843">Mendorong penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) pendidikan dasar.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1098 1843 1161 1955">5</td> <td data-bbox="1161 1843 1441 1955">Lebih memantapkan kesejahteraan Pendidik dan</td> </tr> </table>	1	Lebih memantapkan ketersediaan fasilitas pendidikan dasar secara merata, dan terjangkau.	2	Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.	3	Lebih memantapkan kualifikasi dan kompetensi aparatur, pendidik, dan tenaga kependidikan pendidikan dasar	4	Mendorong penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) pendidikan dasar.	5	Lebih memantapkan kesejahteraan Pendidik dan
2	Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bermutu, merata, dan terjangkau.															
1	Lebih memantapkan ketersediaan fasilitas pendidikan dasar secara merata, dan terjangkau.															
2	Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.															
3	Lebih memantapkan kualifikasi dan kompetensi aparatur, pendidik, dan tenaga kependidikan pendidikan dasar															
4	Mendorong penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) pendidikan dasar.															
5	Lebih memantapkan kesejahteraan Pendidik dan															

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan	
					Tenaga Kependidikan pendidikan dasar.	
		2	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	1	Penguatan upaya promotif dan preventif	<p>1 Lebih memantapkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular</p> <p>2 Lebih memantapkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat</p> <p>3 Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat</p>
				2	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	<p>1 Lebih memantapkan upaya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan</p> <p>2 Lebih memantapkan pengawasan obat dan makanan</p> <p>3 Lebih memantapkan obat asli Indonesia</p> <p>4 Lebih memantapkan upaya pengadaan, peningkatan dan perbaikan infrastruktur pelayanan kesehatan</p> <p>5 Mempercepat standarisasi pelayanan kesehatan</p> <p>6 Lebih memantapkan kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan</p> <p>7 Lebih memantapkan pelayanan kesehatan anak balita</p> <p>8 Lebih memantapkan mutu pelayanan</p>

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					BLUD
					9 Lebih memantapkan sumberdaya kesehatan
					10 Lebih memantapkan manajemen dan informasi kesehatan
			3	Percepatan perbaikan gizi masyarakat dan mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat	1 Mempercepat upaya perbaikan gizi masyarakat
					2 Lebih memantapkan upaya pengembangan lingkungan hidup sehat
			4	Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	1 Lebih memantapkan pelayanan keluarga berencana
					2 Lebih memantapkan upaya keselamatan ibu dan anak
		3	Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat	1 Peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat	1 Lebih memantapkan pendapatan masyarakat
					2 Mengendalikan inflasi
4.2	Mewujudkan pembangunan SDM beriman dan bertaqwa	1	Meningkatnya sarana rumah ibadah	1 Peningkatan kuantitas sarana rumah ibadah	1 Menyusun perencanaan pembangunan sarana rumah ibadah sesuai dengan kebutuhan
					2 Membangun sarana rumah ibadah sesuai kebutuhan
			2	Peningkatan kualitas sarana rumah ibadah	1 Menyusun perencanaan peningkatan pembangunan sarana rumah ibadah
					2 Lebih memantapkan sarana rumah ibadah

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
			3	Peningkatan upaya rehabilitasi/ pemeliharaan sarana rumah ibadah	1	Menyusun perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan sarana rumah ibadah	
					2	Lebih memantapkan upaya rehabilitasi sarana rumah ibadah	
				2	Meningkatnya aktivitas keagamaan	1	Peningkatan upaya meningkatkan aktivitas keagamaan
				2	Melaksanakan kegiatan pendataan terhadap aktivitas keagamaan		
				2	Peningkatan aktivitas kerjasama keagamaan	1	Lebih memantapkan forum kerjasama antara umat beragama
						2	Lebih memantapkan kegiatan kerjasama antara umat beragama
<b>Misi 5: Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan</b>							
5.1	Meningkatkan partisipasi sosial	1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	1	Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan perempuan	1	Lebih memantapkan angka melek huruf perempuan
						2	Lebih memantapkan angka rata-rata lama sekolah perempuan
						3	Lebih memantapkan angka harapan lama sekolah perempuan
				2	Peningkatan	1	Lebih



No.	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
				kuantitas dan kualitas kesehatan perempuan	<p>1 memantapkan usia harapan hidup perempuan</p> <p>2 Lebih memantapkan cakupan pelayanan kesehatan bagi perempuan</p>
		2 Meningkatkan semangat kegotong royongan masyarakat	1	Peningkatan kepedulian sosial	<p>1 Lebih memantapkan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial</p> <p>2 Lebih memantapkan kepedulian sosial kepada korban bencana</p> <p>3 Lebih memantapkan penerimaan zakat</p> <p>4 Lebih memantapkan jumlah hewan kurban</p>
			2	Peningkatan jumlah kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat	<p>1 Lebih memantapkan jumlah kelompok tani</p> <p>2 Lebih memantapkan jumlah koperasi</p> <p>3 Lebih memantapkan jumlah lembaga keuangan berbasis masyarakat</p> <p>4 Lebih memantapkan jumlah LSM</p>

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
5.2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	1	Peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan, partai politik dan lembaga swasta	1	Lebih memantapkan partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan
					2	Lebih memantapkan partisipasi perempuan dalam partai politik	
					3	Lebih memantapkan partisipasi perempuan dalam lembaga swasta	
				2	Peningkatan partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi	1	Lebih memantapkan partisipasi angkatan kerja perempuan
					2	Lebih memantapkan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	
		2	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat	1	Peningkatan kualitas kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat	1	Lebih memantapkan kelas kelompok tani
						2	Lebih memantapkan koperasi berkualitas
						3	Menpercepat transformasi UED-SP menjadi BUMDes
				2	Peningkatan peran kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat	1	Lebih memantapkan cakupan pelayanan kelompok tani
						2	Lebih memantapkan cakupan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					<p>pelayanan koperasi</p> <p>3 Lebih memantapkan cakupan pelayanan BUMDes</p>
		3 Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat	1	Peningkatan kualitas kelembagaan sosial	<p>1 Lebih memantapkan kualitas panti sosial</p> <p>2 Lebih memantapkan kualitas LSM</p> <p>3 Lebih memantapkan kualitas lembaga PKK</p> <p>4 Lebih memantapkan kualitas Posyandu</p> <p>5 Lebih memantapkan kualitas organisasi kepemudaan dan olahraga</p>
			2	Peningkatan peran kelembagaan sosial	<p>1 Lebih memantapkan cakupan pelayanan panti sosial</p> <p>2 Lebih memantapkan cakupan pelayanan LSM</p> <p>3 Lebih memantapkan cakupan pelayanan lembaga PKK</p> <p>4 Lebih memantapkan cakupan pelayanan Posyandu</p> <p>5 Lebih memantapkan cakupan</p>

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
					pelayanan organisasi kepemudaan dan olah raga		
<b>Misi 6:</b>							
<b>Memantapkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman kehidupan sosial</b>							
6.1	Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman sosial	1	Menurunnya angka kriminalitas	1	Peningkatan upaya pencegahan tindak kriminalitas	1	Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait hukum pidana dan perdata
						2	Lebih memantapkan wawasan kebangsaan
						3	Lebih memantapkan kerjasama antara penegak hukum dengan lembaga pemerintahan dan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kriminalitas
				2	Peningkatan upaya penindakan tindak kriminalitas	1	Lebih memantapkan penegakan hukum dengan memegang teguh prinsip-prinsip transparansi, kesetaraan dan akuntabel
						2	Lebih memantapkan kerjasama antara penegak hukum dengan lembaga pemerintahan dan masyarakat dalam upaya penindakan tindak kriminalitas
				2	Tegaknya prinsip-prinsip	1	Peningkatan kebebasan sipil (civil)

No.	Tujuan	Sasaram	Strategi	Arah Kebijakan
		demokrasi	liberty)	<p>mewujudkan kebebasan berkumpul &amp; berserikat</p> <p>2 Lebih memantapkan upaya mewujudkan kebebasan berpendapat</p> <p>3 Lebih memantapkan upaya mewujudkan kebebasan berkeyakinan</p> <p>4 Lebih memantapkan upaya mewujudkan kebebasan dari diskriminasi</p>
			2 Peningkatan hak-hak politik (political liberty)	<p>1 Lebih memantapkan upaya mewujudkan penggunaan hak memilih dan dipilih</p> <p>2 Lebih memantapkan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan</p>
			3 Penguatan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy)	<p>1 Lebih memantapkan upaya mewujudkan pemilu yang bebas adil</p> <p>2 Lebih memantapkan peran DPRD</p> <p>3 Lebih memantapkan peran Partai Politik</p>

No.	Tujuan	Sasaram	Strategi	Arah Kebijakan
				4 Lebih memantapkan peran birokrasi Pemda
		3 Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	1 Peningkatan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak	1 Lebih memantapkan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
				2 Lebih memantapkan cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
				3 Lebih memantapkan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
				4 Lebih memantapkan cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
				5 Lebih

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					memantapkan cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
			2	Peningkatan penanganan dan penegakan hukum bagi perlindungan terhadap perempuan dan anak	1 Lebih memantapkan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
					2 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
		4	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	1 Peningkatan upaya memberikan bantuan sosial kepada PMKS, korban bencana dan komunitas adat terpencil (KAT)	1 Meningkatkan upaya memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar kepada PMKS, korban bencana dan komunitas adat terpencil (KAT)
					2 Lebih memantapkan upaya memberikan bantuan sosial kepada korban bencana selama masa tanggap darurat
					3 Mengoptimalkan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					<p>sarana dan prasarana tanggap darurat kepada korban bencana yang dievakuasi</p> <p>4 Lebih memantapkan upaya memberikan jaminan sosial kepada penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial</p>
			2	Peningkatan upaya penertiban PMKS	<p>1 Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PMKS</p> <p>2 Melakukan pengamanan dan pembinaan terhadap PMKS</p>
		5	Menurunnya resiko bencana	1	<p>Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana.</p> <p>1 Lebih memantapkan alokasi anggaran penanggulangan bencana daerah</p> <p>2 Lebih memantapkan efektivitas sistem kesiapsiagaan dan kedaruratan daerah</p>
					<p>3 Lebih memantapkan dan lebih memantapkan kemitraan dalam penanggulangan bencana daerah</p> <p>4 Mewujudkan penetapan status bencana disertai dengan mekanisme pemantauan</p>



No.	Tujuan	Sasaram	Strategi	Arah Kebijakan
				terpadu lintas sektor dan lintas kelembagaan pemerintah daerah.
			2 Peningkatan kemitraan multipihak dalam penanggulangan bencana.	1 Lebih memantapkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana daerah
				2 Menggalang kemitraan dengan lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan Forum Penanggulangan Resiko Bencana (PRB)
			3 Pemenuhan tata kelola yang baik bidang penanggulangan bencana.	1 Menjamin transparansi dan akuntabilitas bidang penanggulangan bencana
				2 Lebih memantapkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam mencapai efektivitas penanggulangan bencana daerah
			4 Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	1 Mengoptimalkan strategi penyadaran publik untuk lebih memantapkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan mitigasi bencana

No.	Tujuan	Sasaram	Strategi	Arah Kebijakan
				<p>2 Lebih memantapkan riset-riset terapan dengan kerangka kerja terstruktur dan mengarah kepada peningkatan rasio biaya-manfaat dan selalu mempertimbangkan proses adaptasi pengetahuan asli lokal di tatanan masyarakat pengguna hasil riset,</p> <p>3 Menyusun penataan ruang dan lahan pada sebagian besar daerah prioritas kabupaten berdasarkan rencana pengelolaan sumberdaya air, tanah dan hutan sesuai dengan hasil Kajian Risiko Bencana serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah.</p>
			<p>5 Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.</p>	<p>1 Membangun sistem peringatan dini bencana multi ancaman nasional yang terkoordinasi dengan prosedur standar yang disepakati antar dinas/instansi terkait secara sistematis dan terukur dan selalu dilatih secara berkala</p>

No.	Tujuan	Sasaram	Strategi	Arah Kebijakan
				<p>2 Lebih memantapkan tingkat paparan pelayanan sistem peringatan dini bencana kepada masyarakat pengguna dengan lebih memantapkan alternatif moda penyebaran, strategi advokasi dan informasi publik, serta mekanisme latihan bersama antara pemerintah dan masyarakat</p>
				<p>2 Lebih memantapkan kapasitas evakuasi, penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan serta kemandirian mobilisasi sumberdaya masyarakat berdasarkan pedoman dan mekanisme standar yang disepakati.</p>
			<p>6 Peningkatan kapasitas pemulihan bencana.</p>	<p>1 Menyusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan karakter masyarakat yang mandiri</p>
				<p>2 Mengimplemantasi kegiatan pemulihan bencana berdasarkan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi</p>

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
					sesuai dengan karakter masyarakat yang mandiri		
<b>Misi 7: Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran</b>							
7.1	Menurunkan tingkat pengangguran	1	Meningkatnya kesempatan kerja	1	Peningkatan upaya penyusunan dan penyebarluasan data dan informasi ketenagakerjaan	1	Menyusun data dan informasi ketenagakerjaan berbasis teknologi informasi secara transparan dan akuntabel
						2	Mengintensifkan even-even bursa tenaga kerja
				2	Peningkatan upaya meningkatkan investasi yang bersifat padat karya	1	Memberikan kemudahan kepada investor-investor yang lebih memantapkan usaha padat karya, terutama yang memprioritaskan menyerap tenaga kerja lokal
				2	Memberikan prioritas kepada investor-investor yang akan lebih memantapkan usaha berbasis pada sumberdaya lokal		
		2	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	1	Peningkatan kualifikasi tenaga kerja	1	Lebih memantapkan lulusan S1/S2/S3
						2	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
3	Lebih memantapkan sekolah menengah kejuruan berbasis sumberdaya lokal						

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan	
					Lebih memantapkan perguruan tinggi berbasis sumberdaya lokal	
			2	Peningkatan kompetensi tenaga kerja	<p>1 Lebih memantapkan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</p> <p>2 Lebih memantapkan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat</p> <p>3 Lebih memantapkan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan</p>	
7.2.	Menurunkan tingkat kemiskinan	1	Meningkatnya cakupan bantuan kepada masyarakat miskin	1	Peningkatan perlindungan sosial berbasis masyarakat miskin	<p>1 Menyusun data dan informasi kemiskinan berbasis teknologi informasi secara transparan dan akuntabel secara berkala</p> <p>2 Memberikan bantuan penanganan kesehatan kepada masyarakat miskin</p> <p>3 Memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat miskin</p> <p>4 Lebih memantapkan sistem jaminan kesejahteraan</p>

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					sosial daerah
			2	Peningkatan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin	1 Lebih memantapkan bantuan raskin dan/atau biaya langsung tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin 2 Lebih memantapkan penanganan daerah rawan pangan
		2 Meningkatkan daya beli penduduk miskin	1	Peningkatan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	1 Lebih memantapkan produktivitas pertanian dan perikanan 2 Mengupayakan harga produk pertanian dan perikanan yang bersaing 3 Mengurangi beban biaya usahatani dan usaha perikanan dengan memberikan bantuan/subsidi 4 Lebih memantapkan pembangunan rumah bagi fakir miskin
			2	Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat miskin	1 Lebih memantapkan kegiatan pemberdayaan petani dan nelayan 2 Lebih memantapkan kegiatan pemberdayaan pelaku usaha mikro

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
<b>Misi 8: Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah</b>							
8.1	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	1	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan terkendalinya kesenjangan pendapatan	1	Peningkatan kemandirian ekonomi	1	Menumbuhkembangkan komoditi, produk, dan jenis usaha unggulan daerah
						2	Lebih memantapkan daya saing sektoral
						3	Lebih memantapkan potensi pariwisata dan kebudayaan
						4	Lebih memantapkan ekonomi kreatif
						5	Mewujudkan efisiensi ekonomi melalui penerapan inovasi teknologi
						6	Lebih memantapkan infrastruktur ekonomi
						7	Lebih memantapkan perlindungan konsumen
		2	Penurunan kesenjangan pendapatan	2	Penurunan kesenjangan pendapatan	1	Lebih memantapkan nilai tukar petani
						2	Mengendalikan inflasi
						3	Memberikan bantuan pengembangan usaha produktif
		2	Terwujudnya percepatan transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri	1	Pengembangan kluster industri daerah	1	Mempercepat penyusunan rencana induk pengembangan industri kabupaten (RIPIK)
2	Menetapkan komitmen						

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
		pengolahan			pemerintah daerah untuk mengimplementasikan RIPIK yang tertuang dalam bentuk Perda		
					3	Mempercepat terbentuknya klaster industri produk unggulan daerah	
				2	Percepatan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah	1	Mempercepat penetapan kompetensi inti industri daerah dalam bentuk perda
						2	Menetapkan dan mengimplementasikan langkah-langkah pengembangan kompetensi inti industri
						3	Menjalin kemitraan dalam pengembangan kompetensi inti industri dengan perusahaan-perusahaan menengah dan besar
			3	Meningkatnya investasi daerah	1	Peningkatan promosi investasi	1
							2



No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					3 Mengintensifkan diseminasi dokumen promosi investasi (ringkasan masterplan/bisnis plan) melalui media massa dan elektronik
				2 Pemberian kemudahan dan insentif investasi	1 Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan persyaratan dan prosedur, memperjelas waktu dan biaya pengurusan
					2 Memberikan tax allowance kepada investor yang berinvestasi pada komoditi, produk dan jenis usaha unggulan daerah, melakukan pendidikan vokasi, dan bermitra dengan usaha mikro
					3 Memberikan tax holiday kepada usaha mikro
					4 Membebaskan perusahaan modal ventura sebagai objek PPh.
		4 Meningkatkan ketahanan pangan daerah	1	Peningkatan ketersediaan pangan	1 Lebih memantapkan produksi pangan daerah, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah.
					2 Mengendalikan impor pangan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					pokok
					3 Lebih memantapkan upaya pengembangan pemanfaatan lahan pekarangan
					4 Lebih memantapkan cadangan pangan
			2	Peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan	1 Melakukan pendataan dan pengawasan terhadap distribusi pangan secara berkala
					2 Melakukan operasi pasar terhadap pangan pokok sesuai kebutuhan
					3 Lebih memantapkan toko tani kabupaten
			3	Peningkatan upaya perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	1 Mengintensifkan pemantauan terhadap produk pangan
					2 Mengintensifkan upaya pengalakan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)
			4	Penguatan kelembagaan ketahanan pangan	1 Lebih memantapkan dan menintensifkan peranan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten
					2 Mempercepat penyusunan Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Pangan

**6.2.5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2023)**

Pembangunan Indragiri Hilir di Tahun 2023 diarahkan kepada **Lebih Memantapkan Kemajuan, Martabat dan Marwah Indragiri Hilir** sebagai lanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan tahun pertama (2023) disajikan pada Tabel 6.8.

Tabel 6.8. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
<b>VISI:</b>					
<b>UNTUK KEJAYAAN INDRAGIRI HILIR YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT</b>					
<b>Misi 1:</b>					
<b>Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum</b>					
1.1	Memantapkan kinerja pelayanan publik	1 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	1	1 Penegakan disiplin ASN	1 Menjaga sosialisasi peraturan tentang disiplin ASN secara kontinu
					2 Menjaga pembinaan kepada ASN yang indisipliner dan reward kepada ASN berprestasi
				2 Pencegahan KKN	1 Menjaga sialisasi peraturan anti KKN
					2 Menjaga kerjasama pengawasan penyelenggaraan pembangunan daerah dengan lembaga penegak hukum
					3 Menjaga pembinaan dan pengawasan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP)

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
			3	Perumusan dan Penyerbarluasan informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	1	Menjaga perumusan rencana pembangunan	
					2	Menjaga sistem dan penyerbarluasan informasi perencanaan berbasis <i>information technolgy</i> (IT)	
					3	Menjaga penyebaran informasi tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah berbasis <i>information technolgy</i> (IT)	
			4	Pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah secara berkala	1	Menjaga monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan internal Perangkat Daerah	
					2	Menjaga tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah	
					2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1
2	Menjaga sarana dan prasarana pelayanan publik						
2	Peningkatan pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan	1					Menyederhanakan prosedur pelayanan publik
		2					Memperjelas dan menyederhanakan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
					n persyaratan pengurusan		
<b>Misi 2:</b>							
<b>Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah</b>							
2.1	Memantapkan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat	1 Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	1	1 Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan	1 Menjaga kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja pembangunan jalan dan jembatan kabupaten		
					2 Menjaga kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja pembangunan jalan lingkungan		
				2 Peningkatan upaya peningkatan jalan	1 Menjaga kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja peningkatan jalan kabupaten		
					2 Menjaga kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja peningkatan jalan lingkungan		
				3 Peningkatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	1 Menjaga kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten		
					2 Menjaga kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja rehabilitasi/pemeliharaan jalan lingkungan		
				2 Meningkatkan akses masyarakat terhadap air	1	1 Peningkatan jaringan perpipaan air	1 Memberikan bantuan sarana dan prasarana serta pendanaan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
		minum layak		minum	peningkatan jaringan perpipaan air minum		
					2	Menjaga penyertaan modal pada PDAM Tirta Indragiri	
				2	Peningkatan pembangunan sumur bor di lingkungan permukiman	1	Menjaga pembangunan sumur bor di lingkungan permukiman
						2	Membangun instalasi pengolahan air minum (IPA) yang bersumber dari sumur bor
		3 Meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi layak	1	Peningkatan pembangunan drainase di lingkungan permukiman	1	Menjaga kualitas perencanaan dan pengukuran pembangunan drainase	
					2	Menjaga capaian kinerja pembangunan drainase	
			2	Peningkatan rehabilitasi/pemeliharaan drainase di lingkungan permukiman	1	Menjaga kualitas perencanaan dan pengukuran rehabilitasi/pemeliharaan drainase	
					2	Menjaga capaian kinerja rehabilitasi/pemeliharaan drainase	
			3	Peningkatan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di lingkungan permukiman	1	Menjaga kualitas perencanaan dan pengukuran pembangunan IPAL	
					2	Menjaga capaian kinerja pembangunan IPAL	
				4	Peningkatan upaya	1	Menjaga upaya penataan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
				penataan dan pengelolaan lingkungan pemukiman dan pemakaman	bangunan 2 Menjaga tata kelola lingkungan pemakaman 3 Menjaga upaya pemberdayaan komunitas perumahan
2.2	Memantapkan pembangunan infrastruktur perhubungan	1 Meningkatnya layanan angkutan darat	1	Peningkatan kualitas pelayanan angkutan darat	1 Menjaga kualifikasi dan kompetensi ASN perhubungan angkutan darat 2 Menjaga sarana dan prasarana angkutan darat 3 Menjaga pengawasan kelayakan sarana angkutan darat
			2	Peningkatan pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan publik angkutan darat	1 Menyederhanakan prosedur pelayanan publik angkutan darat 2 Memperjelas dan menyederhanakan persyaratan pengurusan uji kelayakan angkutan darat 3 Menertibkan pengelolaan Tepi Jalan Umum
		2 Meningkatnya layanan angkutan Perairan, sungai dan penyeberangan	1	Peningkatan kualitas pelayanan angkutan Perairan, Sungai dan Penyeberangan	1 Menjaga kualifikasi dan kompetensi ASN perhubungan angkutan Perairan, Sungai dan Penyeberangan 2 Menjaga sarana dan prasarana angkutan Perairan, Sungai dan Penyeberangan 3 Menjaga pengawasan kelayakan sarana

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
						angkutan Perairan, Sungai dan Penyeberangan	
			2	Peningkatan pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan publik angkutan Perairan, Sungai dan Penyeberangan	1	Menyederhanakan prosedur pelayanan publik angkutan air	
					2	Memperjelas dan menyederhanakan persyaratan pengurusan kelengkapan angkutan Perairan, Sungai dan Penyeberangan	
<b>Misi 3:</b>							
<b>Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat</b>							
3.1	Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang lebih produktif	1	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian	1	Peningkatan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian	1	Menjaga infrastruktur pertanian
						2	Menjaga SDM pertanian
						3	Menjaga kelembagaan pertanian
						4	Menjaga alat dan mesin pertanian
						5	Menjaga pembiayaan usaha pertanian
						6	Menjaga penguasaan teknologi dalam merespon dinamika dan perubahan iklim
						7	Memastikan kecukupan dan kontinuitas ketersediaan sarana produksi
						8	Menjaga koordinasi lintas sektor
				2	Penguatan daya saing produk	1	Mewujudkan efisiensi produksi pertanian



No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
				pertanian	2 Mewujudkan harga produk pertanian yang bersaing
					3 Menjaga pemasaran produk pertanian
		2 Meningkatnya kontribusi sektor perikanan	1	Peningkatan kapasitas produksi melalui peningkatan penangkapan ikan dan budidaya	1 Menjaga pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap
					2 Menjaga pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya
					3 Menjaga SDM perikanan
					4 Menjaga kelembagaan perikanan
					5 Menjaga infrastruktur perikanan
					6 Menjaga pembiayaan usaha perikanan
					7 Menjaga penguasaan teknologi dalam merespon dinamika dan perubahan iklim
					8 Menjaga koordinasi lintas sektor
			2	Penguatan daya saing produk perikanan	1 Mewujudkan efisiensi produksi perikanan
					2 Mewujudkan harga produk perikanan yang bersaing
					3 Menjaga pemasaran produk perikanan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
		3 Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	1	Pengembangan pemasaran pariwisata	1 Menjaga promosi objek-objek dan daya tarik wisata 2 Menjaga penyelenggaraan even-even pariwisata
			2	Pengembangan destinasi wisata	1 Menjaga infrastruktur pariwisata 2 Menjaga wisata alam 3 Menjaga wisata budaya dan religi 4 Menjaga wisata agro
			3	Pegembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata	1 Mewujudkan kelembagaan pariwisata yang kuat 2 Menjaga SDM Pariwisata 3 Menjaga koordinasi lintas sektor
3.2	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan	1 Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan	1	Peningkatan tutupan dan performance hutan	1 Menjaga pengawasan terhadap aktivitas produksi, perubahan, ataupun perawatan yang berdampak terhadap tutupan lahan 2 Menjaga ruang terbuka hijau
			2	Peningkatan kondisi tutupan tanah	1 Menjaga pengawasan terhadap aktivitas produksi dan perubahan yang menyebabkan erosi tanah dan air limpasan 2 Menjaga upaya perlindungan dan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					konservasi tanah dan air
			3	Peningkatan konservasi badan air	1 Menjaga upaya menjaga proporsi hutan di sepadan sungai/danau
					2 Menjaga upaya konservasi badan air
			4	Peningkatan kondisi habitat	1 Menjaga pengawasan terhadap aktivitas produksi dan perubahan yang menyebabkan perubahan keanekaragaman hayati
					2 Menjaga upaya mempertahankan keanekaragaman hayati
		2 Meningkatkan Kualitas Udara	1	Peningkatan pengawasan terhadap aktivitas pencemaran udara	1 Menjaga pengawasan terhadap emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin
					2 Menjaga pengawasan terhadap emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya
			2	Peningkatan pengendalian pencemaran udara	1 Memberlakukan kebijakan pemberian insentif dan disinsentif
					2 Membangun komitmen antara

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan	
					para pemangku kepentingan	
		3	Meningkatnya Kualitas Air	1	Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada sumber air	1 Menjaga pengawasan terhadap pencemaran air 2 Menjaga upaya pemulihan (restorasi) pencemaran pada sumber air
				2	Peningkatan ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global	1 Menjaga upaya mempertahankan ketersediaan air yang cukup bagi aktivitas makhluk hidup 2 Menjaga upaya pemulihan (restorasi) pada sumber air
				3	Pengendalian penggunaan air	1 Menjaga pengawasan terhadap penggunaan air 2 Mengintensifkan kampanye efisiensi penggunaan air
				4	Pengendalian tingkat erosi dan sedimentasi	1 Menjaga pengawasan terhadap tingkat erosi dan sedimentasi 2 Menjaga upaya pemulihan (restorasi) erosi dan sedimentasi
		4	Terwujudnya pengelolaan dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan	1	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan.	1 Memaksimalkan sarana dan prasarana persampahan 2 Megepedankan peran dan partisipasi aktif dari seluruh

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					komponen masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan sampah.
					3 Megembangkan pola kemitraan strategis dengan pihak swasta melalui penyederhanaan jalur birokrasi bagi pihak swasta yang berminat untuk berinvestasi dalam pengelolaan sampah.
			2	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang arti penting pengelolaan persampahan	1 Menjaga pembinaan dan pemahaman masyarakat secara intensif dan berkelanjutan (sustainable) akan upaya 5R (reduce, reuse, recycle, recovery, replace) terkait dengan pengelolaan persampahan
					2 Menjaga dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 5R
<b>Misi 4:</b>					
<b>Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan iman dan taqwa</b>					
4.1	Mewujudkan kualitas SDM berdaya saing	1 Meningkatkan kualitas pelayanan dasar pendidikan sesuai dengan	1	Peningkatan pelayanan pendidikan anak usia dini bermutu, merata, dan	1 Menjaga ketersediaan fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD) secara merata, dan

No.	Tujuan	Sasaram	Strategi	Arah Kebijakan	
		standar	terjangkau.		terjangkau di setiap desa.
				2	Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD).
				3	Menjaga kualifikasi dan kompetensi aparatur, pendidik, dan tenaga kependidikan PAUD
				4	Mendorong penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) PAUD.
				5	Menjaga kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD.
			2 Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bermutu, merata, dan terjangkau.	1	Menjaga ketersediaan fasilitas pendidikan dasar secara merata, dan terjangkau.
				2	Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.
				3	Menjaga kualifikasi dan kompetensi aparatur, pendidik, dan tenaga kependidikan pendidikan dasar

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					4 Mendorong penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) pendidikan dasar.
					5 Menjaga kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pendidikan dasar.
		2 Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	1	Penguatan upaya promotif dan preventif	1 Menjaga upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
					2 Menjaga upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
					3 Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat
			2	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1 Menjaga upaya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
					2 Menjaga pengawasan obat dan makanan
					3 Menjaga obat asli Indonesia
					4 Menjaga upaya pengadaan, peningkatan dan perbaikan infrastruktur pelayanan kesehatan
					5 Mempercepat standarisasi pelayanan kesehatan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
					6	Menjaga kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	
					7	Menjaga pelayanan kesehatan anak balita	
					8	Menjaga mutu pelayanan BLUD	
					9	Menjaga sumberdaya kesehatan	
					10	Menjaga manajemen dan informasi kesehatan	
				3	Percepatan perbaikan gizi masyarakat dan mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat	1	Mempercepat upaya perbaikan gizi masyarakat
				2		Menjaga upaya pengembangan lingkungan hidup sehat	
				4	Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	1	Menjaga pelayanan keluarga berencana
						2	Menjaga upaya keselamatan ibu dan anak
				3	Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat	1	Peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat
2	Mengendalikan inflasi						
4.2	Mewujudkan pembangunan SDM beriman dan bertaqwa	1	Meningkatnya sarana rumah ibadah	1	Peningkatan kuantitas sarana rumah ibadah	1	Menyusun perencanaan pembangunan sarana rumah ibadah sesuai dengan kebutuhan
					2	Membangun sarana rumah ibadah sesuai	



No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					kebutuhan
			2	Peningkatan kualitas sarana rumah ibadah	1 Menyusun perencanaan peningkatan pembangunan sarana rumah ibadah 2 Menjaga sarana rumah ibadah
			3	Peningkatan upaya rehabilitasi/ pemeliharaan sarana rumah ibadah	1 Menyusun perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan sarana rumah ibadah 2 Menjaga upaya rehabilitasi sarana rumah ibadah
		2	Meningkatnya aktivitas keagamaan	1 Peningkatan upaya meningkatkan aktivitas keagamaan 2 Peningkatan aktivitas kerjasama keagamaan	1 Memfasilitasi kegiatan keagamaan sesuai kebutuhan umat beragama 2 Melaksanakan kegiatan pendataan terhadap aktivitas keagamaan 1 Menjaga forum kerjasama antara umat beragama 2 Menjaga kegiatan kerjasama antara umat beragama
<b>Misi 5: Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan</b>					
5.1	Meningkatkan partisipasi sosial	1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	1	Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan perempuan 1 Menjaga angka melek huruf perempuan 2 Menjaga angka rata-rata lama sekolah perempuan 3 Menjaga angka harapan lama

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					sekolah perempuan
			2	Peningkatan kuantitas dan kualitas kesehatan perempuan	1 Menjaga usia harapan hidup perempuan 2 Menjaga cakupan pelayanan kesehatan bagi perempuan
		2	Meningkatnya semangat kegotong royongan masyarakat	1 Peningkatan kepedulian sosial	1 Menjaga wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 2 Menjaga kepedulian sosial kepada korban bencana 3 Menjaga penerimaan zakat 4 Menjaga jumlah hewan kurban
			2	Peningkatan jumlah kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat	1 Menjaga jumlah kelompok tani 2 Menjaga jumlah koperasi 3 Menjaga jumlah lembaga keuangan berbasis masyarakat 4 Menjaga jumlah LSM
5.2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	1 Peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan, partai politik dan lembaga	1 Menjaga partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan 2 Menjaga partisipasi perempuan dalam

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
				swasta	partai politik
					3 Menjaga partisipasi perempuan dalam lembaga swasta
			2	Peningkatan partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi	1 Menjaga partisipasi angkatan kerja perempuan
					2 Menjaga kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian
		2	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat	1	Peningkatan kualitas kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat
					1 Menjaga kelas kelompok tani
					2 Menjaga koperasi berkualitas
					3 Menpercepat transformasi UED-SP menjadi BUMDes
			2	Peningkatan peran kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat	1 Menjaga cakupan pelayanan kelompok tani
					2 Menjaga cakupan pelayanan koperasi
					3 Menjaga cakupan pelayanan BUMDes
		3	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat	1	Peningkatan kualitas kelembagaan sosial
					1 Menjaga kualitas panti sosial
					2 Menjaga kualitas LSM
					3 Menjaga kualitas lembaga PKK
					4 Menjaga kualitas Posyandu
					5 Menjaga kualitas organisasi kepemudaan dan olahraga
			2	Peningkatan peran	1 Menjaga cakupan pelayanan panti

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan	
				kelembagaan sosial	sosial 2 Menjaga cakupan pelayanan LSM 3 Menjaga cakupan pelayanan lembaga PKK 4 Menjaga cakupan pelayanan Posyandu 5 Menjaga cakupan pelayanan organisasi kepemudaan dan olah raga	
<b>Misi 6:</b>						
<b>Memantapkan keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial</b>						
6.1	Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman sosial	1	Menurunnya angka kriminalitas	1	Peningkatan upaya pencegahan tindak kriminalitas	1 Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait hukum pidana dan perdata 2 Menjaga wawasan kebangsaan 3 Menjaga kerjasama antara penegak hukum dengan lembaga pemerintahan dan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kriminalitas
				2	Peningkatan upaya penindakan tindak kriminalitas	1 Menjaga penegakan hukum dengan memegang teguh prinsip-prinsip transparansi, kesetaraan dan akuntabel 2 Menjaga kerjasama antara penegak hukum dengan lembaga pemerintahan

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan	
					dan masyarakat dalam upaya penindakan tindak kriminalitas	
		2	Tegaknya prinsip-prinsip demokrasi	1	Peningkatan kebebasan sipil (civil liberty)	1 Menjaga upaya mewujudkan kebebasan berkumpul & berserikat
					2 Menjaga upaya mewujudkan kebebasan berpendapat	
					3 Menjaga upaya mewujudkan kebebasan berkeyakinan	
					4 Menjaga upaya mewujudkan kebebasan dari diskriminasi	
				2	Peningkatan hak-hak politik (political liberty)	1 Menjaga upaya mewujudkan penggunaan hak memilih dan dipilih
					2 Menjaga partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan	
				3	Penguatan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy)	1 Menjaga upaya mewujudkan pemilu yang bebas adil
					2 Menjaga peran DPRD	
					3 Menjaga peran Partai Politik	
					4 Menjaga peran birokrasi Pemda	

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
		3 Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	1	Peningkatan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak	1 Menjaga cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
					2 Menjaga cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
					3 Menjaga cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
					4 Menjaga cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
					5 Menjaga cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
			2	Peningkatan penanganan dan	1 Menjaga cakupan perempuan dan anak korban

No.	Tujuan	Sasaram	Strategi	Arah Kebijakan
			penegakan hukum bagi perlindungan terhadap perempuan dan anak	<p>kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu</p> <p>2 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>
		4 Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	1 Peningkatan upaya memberikan bantuan sosial kepada PMKS, korban bencana dan komunitas adat terpencil (KAT)	<p>1 Meningkatkan upaya memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar kepada PMKS, korban bencana dan komunitas adat terpencil (KAT)</p> <p>2 Menjaga upaya memberikan bantuan sosial kepada korban bencana selama masa tanggap darurat</p> <p>3 Mengoptimalkan sarana dan prasarana tanggap darurat kepada korban bencana yang dievakuasi</p>

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					4 Menjaga upaya memberikan jaminan sosial kepada penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial
				2 Peningkatan upaya penertiban PMKS	1 Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PMKS
					2 Melakukan pengamanan dan pembinaan terhadap PMKS
		5 Menurunnya resiko bencana	1	Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana.	1 Menjaga alokasi anggaran penanggulangan bencana daerah
					2 Menjaga efektivitas sistem kesiapsiagaan dan kedaruratan daerah
					3 Menjaga dan menjaga kemitraan dalam penanggulangan bencana daerah
					4 Mewujudkan penetapan status bencana disertai dengan mekanisme pemantauan terpadu lintas sektor dan lintas kelembagaan pemerintah daerah.
			2	Peningkatan kemitraan multipihak dalam penanggulangan bencana.	1 Menjaga partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana daerah



No.	Tujuan	Sasaram	Strategi	Arah Kebijakan
				2 Menggalang kemitraan dengan lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan Forum Penanggulangan Resiko Bencana (PRB)
			3 Pemenuhan tata kelola yang baik bidang penanggulangan bencana.	1 Menjamin transparansi dan akuntabilitas bidang penanggulangan bencana
				2 Menjaga ketersediaan sarana dan prasarana dalam mencapai efektivitas penanggulangan bencana daerah
			4 Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	1 Mengoptimalkan strategi penyadaran publik untuk menjaga partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan mitigasi bencana
				2 Menjaga riset-riset terapan dengan kerangka kerja terstruktur dan mengarah kepada peningkatan rasio biaya-manfaat dan selalu mempertimbangkan proses adaptasi pengetahuan asli lokal di tatanan masyarakat

No.	Tujuan	Sasaram	Strategi	Arah Kebijakan
				<p>pengguna hasil riset,</p> <p>3 Menyusun penataan ruang dan lahan pada sebagian besar daerah prioritas kabupaten berdasarkan rencana pengelolaan sumberdaya air, tanah dan hutan sesuai dengan hasil Kajian Risiko Bencana serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah.</p>
			<p>5 Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.</p>	<p>1 Membangun sistem peringatan dini bencana multi ancaman nasional yang terkoordinasi dengan prosedur standar yang disepakati antar dinas/instansi terkait secara sistematis dan terukur dan selalu dilatih secara berkala</p> <p>2 Menjaga tingkat paparan pelayanan sistem peringatan dini bencana kepada masyarakat pengguna dengan menjaga alternatif moda penyebaran,</p>

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					strategi advokasi dan informasi publik, serta mekanisme latihan bersama antara pemerintah dan masyarakat
					2 Menjaga kapasitas evakuasi, penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan serta kemandirian mobilisasi sumberdaya masyarakat berdasarkan pedoman dan mekanisme standar yang disepakati.
			6	Peningkatan kapasitas pemulihan bencana.	1 Menyusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan karakter masyarakat yang mandiri
					2 Mengimplemantasikan kegiatan pemulihan bencana berdasarkan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan karakter masyarakat yang mandiri
<b>Misi 7:</b>					
<b>Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran</b>					
7.1	Menurunkan tingkat pengangguran	1 Meningkatkan kesempatan kerja	1	Peningkatan upaya penyusunan dan	1 Menyusun data dan informasi ketenagakerjaan berbasis teknologi

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan	
				penyebarluasan data dan informasi ketenagakerjaan	informasi secara transparan dan akuntabel	
					2 Mengintensifkan even-even bursa tenaga kerja	
			2	Peningkatan upaya meningkatkan investasi yang bersifat padat karya	1 Memberikan kemudahan kepada investor-investor yang menjaga usaha padat karya, terutama yang memprioritaskan menyerap tenaga kerja lokal	
					2 Memberikan prioritas kepada investor-investor yang akan menjaga usaha berbasis pada sumberdaya lokal	
		2	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	1	Peningkatan kualifikasi tenaga kerja	1 Menjaga lulusan S1/S2/S3
					2 Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	
					3 Menjaga sekolah menengah kejuruan berbasis sumberdaya lokal	
					Menjaga perguruan tinggi berbasis sumberdaya lokal	
				2	Peningkatan kompetensi tenaga kerja	1 Menjaga jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
					2 Menjaga jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
					berbasis masyarakat		
					3 Menjaga jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		
7.2.	Menurunkan tingkat kemiskinan	1 Meningkatkan cakupan bantuan kepada masyarakat miskin	1	Peningkatan perlindungan sosial berbasis masyarakat miskin	1 Menyusun data dan informasi kemiskinan berbasis teknologi informasi secara transparan dan akuntabel secara berkala		
					2 Memberikan bantuan penanganan kesehatan kepada masyarakat miskin		
					3 Memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat miskin		
					4 Menjaga sistem jaminan kesejahteraan sosial daerah		
					2	Peningkatan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin	1 Menjaga bantuan raskin dan/atau biaya langsung tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin
							2 Menjaga penanganan daerah rawan pangan
			2 Meningkatkan daya beli penduduk miskin	1	Peningkatan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	1 Menjaga produktivitas pertanian dan perikanan	
							2 Mengupayakan harga produk

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
						pertanian dan perikanan yang bersaing	
					3	Mengurangi beban biaya usahatani dan usaha perikanan dengan memberikan bantuan/subsidi	
					4	Menjaga pembangunan rumah bagi fakir miskin	
			2	Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat miskin	1	Menjaga kegiatan pemberdayaan petani dan nelayan	
					2	Menjaga kegiatan pemberdayaan pelaku usaha mikro	
<b>Misi 8:</b>							
<b>Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah</b>							
8.1	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	1	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan terkendalinya kesenjangan pendapatan	1	Peningkatan kemandirian ekonomi	1	Menumbuhkembangkan komoditi, produk, dan jenis usaha unggulan daerah
						2	Menjaga daya saing sektoral
						3	Menjaga potensi pariwisata dan kebudayaan
						4	Menjaga ekonomi kreatif
						5	Mewujudkan efisiensi ekonomi melalui penerapan inovasi teknologi
						6	Menjaga infrastruktur ekonomi
						7	Menjaga perlindungan konsumen

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan		
			2	Penurunan kesenjangan pendapatan	1	Menjaga nilai tukar petani	
					2	Mengendalikan inflasi	
					3	Memberikan bantuan pengembangan usaha produktif	
		2	Terwujudnya percepatan transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan	1	Pengembangan kluster industri daerah	1	Mempercepat penyusunan rencana induk pengembangan industri kabupaten (RIPIK)
					2	Menetapkan komitmen pemerintah daerah untuk mengimplementasikan RIPIK yang tertuang dalam bentuk Perda	
					3	Mempercepat terbentuknya kluster industri produk unggulan daerah	
				2	Percepatan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah	1	Mempercepat penetapan kompetensi inti industri daerah dalam bentuk perda
					2	Menetapkan dan mengimplementasikan langkah-langkah pengembangan kompetensi inti industri	
					3	Menjalin kemitraan dalam pengembangan kompetensi inti industri dengan perusahaan-perusahaan menengah dan besar	

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan	
		3	Meningkatnya investasi daerah	1	Peningkatan promosi investasi	<p>1 Menyusun dokumen masterplan dan bisnis plan pengembangan komoditi, produk dan jenis usaha unggulan daerah</p> <p>2 Menjaga penyelenggaraan even-even promosi investasi</p> <p>3 Mengintensifkan diseminasi dokumen promosi investasi (ringkasan masterplan/bisnis plan) melalui media massa dan elektronik</p>
				2	Pemberian kemudahan dan insentif investasi	<p>1 Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan persyaratan dan prosedur, memperjelas waktu dan biaya pengurusan</p> <p>2 Memberikan tax allowance kepada investor yang berinvestasi pada komoditi, produk dan jenis usaha unggulan daerah, melakukan pendidikan vokasi, dan bermitra dengan usaha mikro</p> <p>3 Memberikan tax holiday kepada usaha mikro</p> <p>4 Membebaskan perusahaan modal ventura sebagai objek</p>



No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan	
					PPh.	
		4	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1	Peningkatan ketersediaan pangan	<p>1 Menjaga produksi pangan daerah, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah.</p> <p>2 Mengendalikan impor pangan pokok</p> <p>3 Menjaga upaya pengembangan pemanfaatan lahan pekarangan</p> <p>4 Menjaga cadangan pangan</p>
				2	Peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan	<p>1 Melakukan pendataan dan pengawasan terhadap distribusi pangan secara berkala</p> <p>2 Melakukan operasi pasar terhadap pangan pokok sesuai kebutuhan</p> <p>3 Menjaga toko tani kabupaten</p>
				3	Peningkatan upaya perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	<p>1 Mengintensifkan pemantauan terhadap produk pangan</p> <p>2 Mengintensifkan upaya pengalakan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)</p>
				4	Penguatan kelembagaan ketahanan pangan	<p>1 Menjaga dan menintensifkan peranan Dewan Ketahanan Pangan</p>

No.	Tujuan	Sasaram		Strategi	Arah Kebijakan
					Kabupaten
					2 Mempercepat penyusunan Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Pangan

### 6.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH

Untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maka kebijakan pengembangan kewilayahan perlu dilakukan. Wilayah strategis yang perlu dibangun dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir adalah: (1) Pembangunan Kotabaru sebagai pusat pelayanan publik; (2) Pengembangan Kawasan Wisata; dan (3) Pembangunan dan pengembangan Kawasan Kuala Enok-Pulau Burung, yang merupakan kawasan yang terletak di bagian hilir kabupaten ini.

Untuk membangun Kotabaru sebagai pusat pelayanan publik sejumlah program/aktivitas akan dilakukan. Aktivitas utama yang akan dilakukan adalah pembebasan lahan seluas 520 Ha, berturut-turut untuk tahun pertama (2019) seluas 120 Ha, tahun kedua (2020) seluas 100 Ha, tahun ketiga (2021) seluas 100 Ha, tahun keempat (2022) seluas 100 Ha, dan tahun kelima (2023). seluas 100 Ha. Untuk mewujudkan hal tersebut akan dilakukan melalui Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pengembangan Kawasan Pemukiman.

Pengembangan Kawasan Wisata ditujukan untuk menumbuhkembangkan berbagai potensi alam dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun pengembangan

Kawasan Wisata mencakup objek/kegiatan, daerah dan jenis wisata berikut ini:

Tabel 6.9. Objek/Kegiatan, Wilayah dan Jenis Wisata yang Akan Dikembangkan di Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Objek/Kegiatan Wisata	Wilayah	Jenis
1.	Ekowisata Solop	Desa Pulau Cawan Kec.Mandah	Wisata Alam
2.	Makam Tuan Guru	Desa Teluk Dalam Kec.Kuindra	Wisata Religi
3.	Danau Mambu	Pulau Basu Kec.Kuindra	Wisata Alam
4.	Festival Sampan Leper	Sungai Beringin Kec.Tembilahan	Wisata Bahari
5.	Festival Menongkah	Desa Tanjung Pasir Kec.Tanah Merah	Wisata Bahari
6.	Agrowisata Kelapa	Desa Tanjung Pidada Kec.Tempuling	Agro Wisata
7.	Air Terjun Tembulon Ruso	Desa Batu Ampar Kec.Kemuning	Wisata Alam
8.	Air Terjun 86	Dusun Simpang Pendowo, Desa Selensen Kec.Kemuning.	Wisata Alam
9.	Festival Bakaroh	Desa Sei. Intan Kec.Tembilahan Hulu	Wisata Bahari
10.	Festival Sampan Selodang	Kuala Lahang Kec.Gaung	Wisata Bahari
11.	Gua Batu Leman	Kota Selensen Kec.Kemuning	Wisata Alam
12.	Semah Kampung	Desa Pelanduk Kec.Mandah	Wisata Budaya
13.	Festival Jalur Mini	Kempas Jaya Kec.Kempas	Wisata Bahari

Pengembangan Kawasan Kuala Enok-Pulau Burung sangat penting sebagai outlet utama hasil bumi bagi daerah Riau bagian Selatan dan Jambi bagian utara. Daerah hinterland Kuala Enok merupakan daerah-daerah yang kaya akan hasil sumberdaya alam seperti perkebunan Kelapa Sawit, kopra, karet, hasil hutan, perikanan, minyak kelapa serta mulai dibukanya penambangan batu bara di daerah hinterland-nya. Keberadaan pintu keluar bagi daerah Riau bagian Selatan dan Jambi bagian utara sudah sangat mendesak karena akan memperpendek waktu dan efisiensi biaya dalam memasarkan hasil bumi di daerah tersebut. Kuala Enok akan didorong untuk menjadi outlet Riau bagian Selatan dan Jambi bagian utara.

Guna mempersiapkan Kuala Enok sebagai outlet Riau bagian Selatan dan Jambi bagian Utara, telah tersedia pelabuhan yang sarana dan prasarananya setara dengan pelabuhan internasional serta dukungannya terhadap pembangunan kemaritiman. Disamping itu, pembangunan ekonomi bidang kemaritiman pada sub sektor perikanan yang memiliki potensi pada wilayah pesisir dan laut, dengan sebagian besar produksi perikanan merupakan perikanan tangkap laut sebesar 93.279 ton yang terdapat salah satunya di Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk pengembangan kawasan Kuala Enok, Pemerintah Provinsi Riau juga telah mempersiapkan dan membangun infrastruktur pendukung lainnya. Secara bertahap Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, telah membangun jalan yang langsung menghubungkan Kuala Enok dengan Jalan Lintas Timur (Jalan Nasional) sebagai akses langsung bagi daerah - daerah sekitar untuk masuk ke Kuala Enok.

Sedangkan Pulau Burung merupakan pulau kembaran dari Kuala Enok yang dipersiapkan sebagai pusat industri untuk pengolahan berbagai hasil bumi daerah hinterland Kuala Enok. Sampai sekarang, industri yang paling menonjol di Pulau Burung adalah pengolahan hasil kelapa dan kelapa sawit. Industri daerah ini telah mampu menghasilkan turunan hasil kelapa dan kelapa sawit, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produknya. Pada masa yang akan datang diharapkan dengan dukungan kawasan industri yang baik akan memberi nilai tambah bagi sumber daya alam secara keseluruhan bagi hinterland Kuala Enok sehingga kesejahteraan masyarakat di sekitarnya dapat meningkat.

Perencanaan pengembangan kawasan industri Kuala Enok telah dimulai sejak tahun 2010. Milestone pengembangan kawasan industri Kuala Enok tahun 2010 - 2014 meliputi:

- (1) Feasibility studi kawasan klaster industri berbasis pertanian dan oleokimia di Kuala Enok 2010 oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau.
- (2) Penyusunan dokumen eksisting infrastruktur fisik dan non fisik serta rancangan umum pengembangan kawasan klaster Kuala Enok tahun 2011 oleh Dinas Perindustri dan Perdagangan Provinsi Riau.
- (3) Identifikasi dan inventarisasi kepemilikan lahan kawasan klaster Industri Hilir Kelapa Sawit (IHKS) Kuala Enok tahun 2011 oleh Bappeda Provinsi Riau.
- (4) Penyusunan Detail Engineering Design (DED) kawasan klaster IHKS Kuala Enok tahun 2012 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau. Penyusunan dokumen AMDAL kawasan klaster IHKS Kuala Enok tahun 2012 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir.
- (5) Penyusunan business plan kawasan klaster Kuala Enok tahun 2012 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.
- (6) Penyusunan Perda penetapan kawasan klaster IHKS Kuala Enok tahun 2012 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.
- (7) Penyusunan Perda badan pengelola kawasan klaster IHKS Kuala Enok tahun 2012 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.
- (8) Penyusunan blok plan dan animasi kawasan klaster IHKS Kuala Enok tahun 2012.
- (9) Rencana penyertaan modal pada badan pengelola klaster IHKS Kuala Enok tahun 2013 oleh Biro Ekonomi Setda Provinsi Riau.
- (10) Rencana penyusunan dokumen identifikasi dan inventarisasi eksisting teknologi IHKS pada perusahaan dan perguruan tinggi

serta lembaga terkait lainnya tahun 2013 oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

(11)Pembebasan lahan kawasan IHKS Kuala Enok tahun 2014 oleh Badan Pengelola.

(12)Master plan pengembangan IHKS Kuala Enok tahun 2014. (14) Pelaksanaan persiapan pembangunan infrastruktur dalam kawasan tahun 2014.

Pengembangan kawasan IHKS Kuala Enok memerlukan dana yang besar sehingga juga memerlukan dukungan yang besar dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau. Namun perlu disadari bahwa memasuki tahun 2014, peta kebijakan pembangunan di Provinsi Riau telah mengalami perubahan yang cukup drastis. Meski pengembangan kawasan IHKS Kuala Enok termasuk ke dalam isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Riau, namun komitmen pimpinan di Provinsi Riau sudah mulai teralihkan dengan isu-isu strategis lainnya. Disisi lain, semakin terbatasnya pendanaan Pemerintah Pusat menjadikan pembangunan kawasan industri yang sudah direncanakan “ditinjau kembali” berdasarkan skala prioritas. Hingga saat ini, keberadaan IHKS Kuala Enok prioritasnya berada di bawah kawasan IHKS Pelintung dan bahkan dengan kawasan industri Buton.

Peluang terbesar untuk melanjutkan pembangunan IHKS Kuala Enok selain mempunyai potensi sumber daya alam adalah dengan letak yang strategis, dimana pelabuhan Kuala Enok terhubung dengan alur pelayaran internasional (Selat Malaka) dan bisa menampung kapal yang berbobot 25.000 DWT serta adanya rencana pemerintah pembangunan Hight Way dan Rail Way Ke Pelabuhan Kuala Enok. Daya dukung lainnya adalah tersedianya areal pelabuhan seluas 105

Ha dan kawasan industri seluas 5.203,95 Ha yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati Indragiri Hilir.

Pengembangan IHKS Kuala Enok sejalan dengan program strategis nasional (Nawacita - 9) dengan agenda prioritas meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga berupaya untuk mendukung program-program nasional sebagaimana telah ditetapkan seperti:

#### 1. PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS)

Tujuan : Untuk mempercepat pencapaian Akses Air Minum dan Sanitasi Bagi Masyarakat, terutama bagi masyarakat Perdesaan, sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat. Program ini dimulai dari Tahun 2006, yang saat itu disebut PAMSIMAS I. Selanjutnya pada Tahun 2012 - 2016 disebut Program Pamsimas II dan untuk Tahun 2016 - 2019 disebut Program PAMSIMAS Tahap III.

Sumber Dana : Bantuan Bank Dunia (*WORD BANK*) melalui APBN, APBD Kabupaten dan Kontribusi Masyarakat.

Pola

Penganggaran

Program : 70 % APBN, Minimal 10 % APBD dan 20 % Kontribusi Masyarakat dalam bentuk *IN-KIND* 16 % dan *IN-CASH* 4 %.

Pola

Pelaksanaan : Pemberdayaan Masyarakat.

Target

Program

s/d. 2019 : Tercapainya secara nasional akses penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat 100 % di Tahun 2019 yang masuk dalam target nasional *UNIVERSAL ACCESS*.

Instansi/

lembaga

terkait : Ditingkat Nasional; Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Bank Dunia, Ditingkat Daerah; BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum yang membidangi/menangani air minum, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD/BPMADES/DPMD), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), dan Dinas Kehutanan.

Mengingat pentingnya Program Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (PAMSIMAS) sampai berakhirnya target nasional Tahun 2019, maka Kabupaten yang mendapat alokasi program diharuskan membuat/menyusun dokumen perencanaan yang diberi nama dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) yang sewaktu-waktu dalam perjalanannya akan ditinjau kembali atau direvisi oleh Kelompok Kerja (POKJA) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten. Dokumen RAD-AMPL ini akan disusun dalam bentuk Peraturan



Bupati (Perbup) sehingga penganggaran program dalam APBD dapat lebih terjamin setiap tahunnya.

## 2. PROGRAM PENANGANAN KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)

Tujuan : Untuk memperbaiki dan merubah lingkungan kawasan permukiman kumuh menjadi tidak kumuh, terutama dikawasan perkotaan.

Program ini dimulai dari Tahun 2006, yang saat itu disebut dengan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Program ini di Tahun 2012 berubah nama menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Selanjutnya, mulai Tahun 2016 hingga saat ini berubah lagi nama programnya menjadi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Program Kotaku diarahkan hanya pada Kawasan Perkotaan dan untuk Kabupaten Indragiri Hilir, program ini diarahkan pada Kawasan Perkotaan Dalam Ibukota Kabupaten yaitu 8 kelurahan di Kecamatan Tembilahan.

Arah kebijakan terhadap kegiatan pembangunan pada Program Kotaku ini adalah (1) perbaikan infrastruktur permukiman (jalan dan jembatan dalam lingkungan permukiman, drainase lingkungan, MCK, Pemb. Sumur Bor untuk Air Bersih), (2) perbaikan ekonomi masyarakat melalui kelompok usaha kecil dengan cara memberikan bantuan dana bergulir (*Revolving*), dan (3) perbaikan status sosial masyarakat dengan cara memberikan

pelatihan keterampilan usaha kecil, seperti menjahit, montir/perbengkelan, kerajinan dan lain-lain.

Sumber dana : APBN, APBD Kabupaten/Kota, dan Kontribusi Masyarakat.

Pola Pelaksanaan : Pemberdayaan Masyarakat

Target

Program

s/d. 2019 : Tercapainya secara nasional kawasan permukiman perkotaan yang tidak kumuh (0 % Kumuh) di Tahun 2019 yang masuk dalam target nasional *UNIVERSAL ACCESS*.

Target nasional

di tahun 2019 : Tercapainya target *UNIVERSAL ACCES*, yakni terciptanya akses air minum 100%, tidak adanya Kawasan Kumuh (0%) dan terbangunnya sanitasi yang layak (100%), yang dikenal dengan target *UNIVERSAL ACCESS 100%-0%-100% TAHUN 2019*.

### 3. PROGRAM PEGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PISEW).

Tujuan : Untuk meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman di Kecamatan, serta kualitas permukiman perdesaan.

Program ini dimulai dari Tahun 2006, yang saat itu disebut dengan Program *Rural Infrastructure Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (RIS-PNPM)*. Program ini lebih diarahkan pada wilayah-wilayah kecamatan/perdesaan yang merupakan

wilayah sentra produksi lokal, baik pertanian, perkebunan, perikanan, industri lokal yang selama ini kurang memadai infrastrukturnya.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah membangun jalan-jalan akses kecamatan/perdesaan yang non status guna untuk memudahkan akses produksi, agar perekonomian masyarakat setempat/desa tumbuh lebih baik.

Sumber dana : APBN untuk pelaksanaan pembangunan fisiknya, dan Kontribusi APBD Minimal 5 % dari total APBN untuk biaya penunjang program dalam bentuk kegiatan koordinasi dan pengendalian di lapangan.

Pola

Pelaksanaan : Kontraktual dengan Pihak Ketiga.

OPD Pelaksana

Fisik : Satker Pusat di Provinsi

#### 4. PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

SDGs sebagai pengganti Millenium Development Goals (MDGs) adalah sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia yang berisikan 17 tujuan (goal), 169 sasaran (target) dan 220 indikator pembangunan dan telah disepakati oleh lebih dari 190 negara. SDGs merupakan kesepakatan pembangunan baru dengan masa berlaku dari tahun 2015 hingga 2030, tujuan dan sasaran SDGs diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik di negara-negara maju (seperti penanganan masalah konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara-negara sedang berkembang (seperti

kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum).

SDGs berisi 4 pilar, 17 Tujuan, 169 target dan 241 indikator, sebagai berikut:

1. Pilar Sosial (5 tujuan, 47 target, 77 indikator):
  - a. Tujuan 1. Menghapus kemiskinan: 7 target, 12 indikator
  - b. Tujuan 2. Menghapus kelaparan dan mewujudkan pertanian yang berkelanjutan: 8 target, 14 indikator
  - c. Tujuan 3. Kesehatan untuk semua umur: 13 target, 27 indikator
  - d. Tujuan 4. Pendidikan yang berkualitas dan merata: 10 target, 10 indikator
  - e. Tujuan 5. Kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan dan remaja perempuan: 9 target, 14 indikator
2. Pilar Ekonomi (5 tujuan, 54 target, 72 indikator):
  - a. Tujuan 7. Energi untuk semua: 5 target, 6 indikator
  - b. Tujuan 8. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan kerja layak:  
12 target, 17 indikator
  - c. Tujuan 9. Infrastruktur yang kuat dan industrialisasi yang berkelanjutan: 8 target, 11 indikator
  - d. Tujuan 10. Menurunkan ketimpangan: 10 target, 12 indikator
  - e. Tujuan 17. Kerjasama internasional yang semakin kuat: 19 target, 25 indikator
3. Pilar Lingkungan (6 tujuan, 56 target dan 69 indikator):
  - a. Tujuan 11. Kota dan hunian yang inklusif, aman dan berkelanjutan:  
10 target, 15 indikator

- b. Tujuan 12. Pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan: 11 target, 13 indikator
  - c. Tujuan 13. Melawan perubahan iklim dan dampaknya: 5 target, 7 indikator
  - d. Tujuan 14. Konservasi pemanfaatan laut, pesisir dan laut dalam: 10 target, 10 indikator
  - e. Tujuan 15. Melindungi dan merestorasi ekosistem dan perlindungan hutan: 12 target, 14 indikator
4. Pilar Hukum dan Pemerintahan (1 tujuan, 12 target, 23 indikator):
- a. Tujuan 16. Masyarakat yang damai, tanpa kekerasan, pemerintahan yang akuntabel, antikorupsi dan non diskriminasi: 12 target, 23 indikator.

Disamping berbagai kebijakan kewilayahan yang telah dijelaskan sebelumnya, pada hari Senin tanggal empat bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan, telah diselenggarakan Rapat Pleno II pada Musrenbang RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023 yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan tanggapan dan saran dari seluruh peserta Rapat Pleno II Musrenbang RPJMD terhadap materi yang dipaparkan dan dirangkum menjadi hasil keputusan diskusi Rapat Pleno II musrenbang RPJMD, seluruh peserta Rapat Pleno II Musrenbang RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 menyepakati:

- (1) Mendorong percepatan penanganan dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terhadap infrastruktur jalan dan jembatan di masing-masing kabupaten dalam Provinsi Riau.

**Kabupaten Pelalawan :**

- Simpang Bunut -Teluk Meranti sepanjang 84,59 Km'.
- Teluk Meranti - Sebekek sepanjang 50,88 Km'.

**Kabupaten Indragiri Hulu :**

- Peningkatan Infrastruktur Pekan Heran - Pelor - Teluk Kiambang - Mumpa, panjang 72 Km' (sesuai SK Gubernur).
- Ruas Jalan Pekan Heran - Kampung Besar Seberang sepanjang 12 Km', sedangkan ruas jalan Kampung Besar Seberang sampai Pelor perlu ditingkatkan sepanjang 22 Km'.
- SPAM Regional telah dilakukan survey 2 tempat yaitu di Kuala Mulya 2 Ha, Pulau Jum'at 5 Ha.
- Pemeliharaan jalan dan abrasi Sungai mengancam jalan pada ruas Jalan Provinsi Rengat - Kuala Cenaku (batas Inhil) sepanjang 26,26 Km'.
- Pemeliharaan Jalan Kuala Cenaku (batas Inhil) - Rumbai Jaya sepanjang 36,25 Km'.
- Jalan alternatif Rengat-Kuala Cenaku telah disusun perencanaannya yang dimulai dari Simpang Sawmill - Bukit Meranti - Rawa Bangun - Rawa Asri - Rawa Sekip - Kuala Cenaku.

- (2) Mendorong percepatan penanganan Infrastruktur jalan dan jembatan serta melakukan koordinasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

**Kabupaten Tanjung Jabung Barat :**

- Pembangunan Jalan di wilayah Pasar Senen ke batas Indragiri Hilir, sepanjang 6 Km', tahun 2019 dikerjakan pengerasan melalui Karya Bhakti TNI.
- Pembangunan Jembatan Sungai Pengabuan dan Sungai Betara Parit Deli.

**Kabupaten Tanjung Jabung Timur :**

- Pengembangan Infrastruktur Jalan sebagai konektivitas sebagai jalur arus lalu lintas orang dan barang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
  - Peningkatan Ruas Jalan :
    1. Pangkal Duri - Mendahara Tengah.
    2. Sungai Tawar - Mendahara Hilir.
    3. Mendahara Hilir - Geragai - Muara Sabak Barat.
  - Pembangunan Jembatan :
    1. Sungai Mendahara.
    2. Parit 7, 8, 9 Pangkal Duri.
    3. Kanal WKS.
    4. Parit Jenggek, Parit 4 Bengkok, Parit Berkat dan Box Culvert di Desa Sungai Tawar.
  - Pengembangan Perkebunan kelapa masyarakat, khususnya kelapa dalam.
  - Pemanfaatan BUMDES secara bersama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Indragiri Hilir.
  - Menyusun dan melengkapi proposal bersama untuk percepatan pembangunan infrastruktur dalam pelaksanaan Musrenbangnas.
  - Forum CSR bersama untuk percepatan pembangunan infrastruktur, terutama perusahaan yang dilewati jalur jalan yang akan dibangun.
- (3) Mendorong percepatan penanganan ruas jalan dan jembatan yang ada di wilayah Provinsi Riau, khususnya antar Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Pelalawan :

**Kabupaten Indragiri Hilir :**

- Ruas Simpang Kuala Saka - Teluk Lanjut (Sei.Guntung).
  - Ruas Sungai Teritip (Sambu) - Pulau Burung.
- (4) Mendorong percepatan penanganan ruas jalan dan jembatan antar wilayah Provinsi dan kerjasama lainnya antara Pemda Provinsi Riau dan Provinsi Jambi.
- Ruas Enok - Batas Jambi.
  - Desa Sungai Asam merupakan Daerah Konservasi untuk usaha Budidaya species kepiting, siput dan kerang-kerangan.
- (5) Mendorong percepatan kerjasama antar wilayah di bidang Kesehatan, Ekonomi, Pariwisata, Pengelolaan Mangrove dan Perikanan untuk Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau untuk percepatan Pembangunan Daerah.

**6.4. KLHS dan RPJMD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Skenario pembangunan berkelanjutan berisi tentang perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tim Penyusun mendampingi tim penyusun RPJMD menyelaraskan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah berdasarkan konsultasi publik. Dalam tahap persiapan penyusunan rancangan RPJMD, tim penyusun RPJMD menjabarkan kebijakan umum dan program pembangunan daerah ke dalam rumusan indikasi program prioritas yang disertai dengan kebutuhan rencana pendanaan, sementara tim Tim Penyusun melaksanakan proses kajian khususnya



integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) kedalam Rencana awal RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir.

Setelah diperoleh hasil kajian Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir, yang berupa deskripsi pengaruh kaitan isi Rencana Teknokratik dan Visi Misi Program Bupati terpilih, Tim Penyusun merumuskan langkah-langkah atau skenario pembangunan berkelanjutan, dimana dengan pertimbangan isu strategis dan kondisi daya dukung lingkungan, dirumuskan program-program penting untuk mendukung implementasi TPB Kabupaten Indragiri Hilir. Secara umum skenario terjadi dalam dua keadaan yaitu berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berupa target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan.

Kemudian Tim Penyusun menyusun rekomendasi yang berisi rangkuman langkah- langkah, skenario atau alternatif program prioritas, serta program-program prioritas yang pengaruhnya perlu dikaji lebih dalam melalui proses. Hasil rekomendasi ini, oleh tim penyusun RPJMD digunakan sebagai salah satu dasar acuan dalam forum konsultasi publik.

Dari hasil konsultasi publik, Tim Penyusun mendampingi tim penyusun RPJMD menyelaraskan program prioritas. Hasil penyelarasan digunakan oleh tim penyusun RPJMD untuk merumuskan tahap penyusunan rancangan awal RPJMD. Sesuai dengan Permendagri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tata cara mengintegrasikan rekomendasi pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD sesuai dengan sistematika pada tabel berikut ini:

Tabel : 6.10. Integrasi Program Rencana Awal RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan	Target	Program
<b>PILAR SOSIAL</b>		
Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</li> </ul>
	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar (Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan)</li> <li>• Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan (Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat Pedesaan)</li> </ul>
	Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin</li> <li>• Penyediaan Sanitasi Lingkungan berbasis Masyarakat</li> </ul> <b>Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat</li> </ul>

Tujuan	Target	Program
		Pedesaan
	Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak pada tahun 2019 menjadi 18,6 juta untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan</li> <li>• Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan</li> </ul> <b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Perencanaan Prasarana Permukiman</li> </ul>
	Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (penerbitan akte kelahiran)</li> <li>• Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (penerbitan KTP)</li> <li>• Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (penerbitan Kartu Keluarga)</li> </ul>
Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (P2B)	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian Pengembangan Agribisnis Hortikultura</li> </ul>
	Terselenggaranya system pengembangan, pembinaan, pengawasan dan sertifikasi pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan efisien dilokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat	<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak</li> </ul> <b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembibitan dan Perawatan Ternak</li> <li>• Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat</li> </ul>
Tujuan 3. Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	<b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak</li> </ul>
	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan	<b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>

Tujuan	Target	Program
	kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak</li> </ul>
	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%).	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas</li> </ul>
Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	Angka Partisipasi Kasar (APK) pengguruan tinggi meningkat menjadi 36,73 %	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengembangan dan Pembinaan Perguruan Tinggi</li> <li>• Pembangunan Gedung</li> <li>• Pengadaan Perlengkapan Perguruan Tinggi</li> </ul>
<b>PILAR EKONOMI</b>		
Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata</li> <li>• Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri</li> </ul> <b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Daerah Tujuan Wisata</li> </ul>
Tujuan 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Prosentase panjang jalan kabupaten dalam keadaan baik dan sedang	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan Pembangunan Jalan</li> <li>• Pembangunan Jalan</li> <li>• Perencanaan Pembangunan Jembatan</li> <li>• Pembangunan Jembatan</li> </ul> <b>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan</li> <li>• Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan</li> </ul>
	Meningkatnya kontribusi industri manufaktur menjadi 21,6% terhadap PDB pada tahun 2019 (2015: 20,8%)	<b>Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri</li> <li>• Penguatan Kemampuan</li> </ul>

Tujuan	Target	Program
		<p>Industri Berbasis Teknologi</p> <p><b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya</li> <li>• Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri</li> <li>• Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah</li> <li>• Peningkatan dan Pengembangan Usaha Perbengkelan</li> <li>• Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri Sandang</li> <li>• Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri Kerajinan Umum</li> <li>• Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri Perabot</li> <li>• Penyediaan Sarana dan Prasarana Usaha Perbengkelan</li> </ul>
<p>Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan didalam Negara dan Antar Negara</p>	<p>Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).</p>	<p><b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah</li> </ul>
<b>PILAR LINGKUNGAN</b>		
<p>Tujuan 6 . Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan</p>	<p>Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).</p>	<p><b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan</li> </ul> <p><b>Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Sistem</li> </ul>

Tujuan	Target	Program
		Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat Pedesaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin</li> </ul>
	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m <sup>3</sup> /detik (2015: 51,44 m <sup>3</sup> /detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi Sumber Air Baku untuk air minum di kab. Inhil</li> <li>• pembangunan Unit Air Baku di Perkotaan dan IKK</li> <li>• Penyiapan SIPA Untuk Kebutuhan Air Baku Air Minum</li> </ul>
	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin</li> </ul>
Tujuan 11. Membangun Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</li> <li>• Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan</li> <li>• Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan</li> </ul>
	Meningkatnya ratio RTH per satuan wilayah be HPL / HGB	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan RTH</li> <li>• Pemeliharaan RTH</li> <li>• Penataan Lampu Taman dan Jalan</li> </ul>
Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan B3 dan Limbah B3</li> </ul>
Tujuan 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya		<b>Program Penanganan Kedaruratan dan Logistik Bencana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Logistik Bencana</li> </ul>

Tujuan	Target	Program
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Penanggulangan Bencana</li> </ul> <p><b>Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Operasional Posko Siaga dan Penanganan Darurat Bencana</li> </ul>
<b>PILAR KELEMBAGAAN</b>		
Tujuan 16 : Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</li> <li>Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak</li> </ul>
	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sebanyak 3.021 orang dan non litigasi sebanyak 3.645 orang pada tahun 2019.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program jaminan sosial</li> <li>Program kemitraan bina ideology Negara dan wawasan kebangsaan</li> </ul>
	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sebanyak 3.021 orang dan non litigasi sebanyak 3.645 orang pada tahun 2019.	

## 6.5. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, dapat dirumuskan program pembangunan daerah. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator

kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah.



**Tabel 6.11.**  
**Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif**  
**Kabupaten Indragiri Hilir**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
<b>Misi 1 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berkeadilan hukum</b>						107.298,64		89.615,79		90.361,62		94.014,56		90.356,85				
1.1.	Memantapkan kinerja pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		44,36	55,00	107.298,64	65,00	89.615,79	69,00	90.361,62	72,00	94.014,56	79,00	90.356,85	79,00	471.647,47		
1.1.1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Nilai AKIP (predikat)		CC	B	36.509,30	B	36.172,37	BB	35.796,67	BB	37.814,17	A	35.632,10	A	181.924,62		
		Nilai LPPD (Nilai)		Tinggi	Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi			
		Opini BPK atas LKPD (predikat)		WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			
		Keterbukaan informasi (%)		32,28	20,00		40,00		60,00		80,00		95,00		95,00			
1.01.03.34.	1.1.1.01	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Peningkatan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang yang tersedia	Persen	100	100	689,39	100	1800,00	55	1000,00	0	0,00	0	0,00	51	3489,39	PUPR
1.01.03.35.	1.1.1.02	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Penyusunan Norma Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang	Persen	100	100	228,79	100	208,20	100	212,36	92	193,25	84	175,86	95,2	1018,45	PUPR
1.01.03.36.	1.1.1.03	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Koordinasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota	Persen	100	100	23,24	100	21,15	100	21,57	92	19,63	84	17,86	95,2	103,45	PUPR
1.02.07.18.	1.1.1.04	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pelatihan	Orang	100	197	78,41	197	540,00	109	300,00	273	750,00	164	450,00	940	2118,41	DPMD
1.02.07.26.	1.1.1.05	Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berbasis Sistem Informasi	Orang	197	197	110,45	197	248,79	158	200,00	395	500,00	197	250,00	1144	1309,24	DPMD
1.02.07.28.	1.1.1.06	Program Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Penataan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa	197	36	91,14	45	280,00	32	200,00	128	800,00	64	400,00	197	1271,14	DPMD
3.00.01.20.	1.1.1.07	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah	Persen	100	100	75,13	100	230,00	78	180,00	100	300,00	86	200,00	92,8	985,13	BAPPEDA
3.00.01.21.	1.1.1.08	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Indikator Program Daerah yang terukur	Persen	100	100	4948,77	100	3502,53	100	4614,31	100	4174,59	100	4343,72	100	21583,92	BAPPEDA
			Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kategori)	(Tinggi)	Tinggi	100	100		100		100		100		500	0,00	SETDA	
3.00.02.15.	1.1.1.09	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan target dan realisasi pendapatan daerah (%)	Persen	100	100	6558,90	100	6963,81	94	6459,54	92	6489,92	88	6467,84	94,8	32940,01	BAPENDA

			Persentase tersusunya Rencana Kerja Badan/Dinas/Instansi/Bagian	Persen	100	100	100		91		93		95		95,8	0,00	BPKAD	
3.00.02.16.	1.1.1.10	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas pengelolaan keuangan	Persen	100	100	168,18	100	169,37	100	169,67	100	169,67	100	169,37	100	846,25	SETDA
3.00.02.21.	1.1.1.11	Program Pengelolaan Aset Daerah	Pemutakhiran administrasi pencatatan dan pelaporan aset daerah	Persen	100	100	1027,87	100	1150,00	100	1155,00	100	1215,00	100	1220,00	100	5767,87	BPKAD
3.00.03.15.	1.1.1.12	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indeks Kepuasan Pelayanan administrasi kepegawaian	Persen	73	74	3572,35	76	4596,78	76	4636,40	77	4675,94	79	4746,94	76,4	22228,40	BKPSDM
			Persentase ketersediaan data informasi Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100		80		80		83		73		83,2	0,00	SETDA
3.00.03.16.	1.1.1.13	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase pengiriman peserta sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Teknis Luar Daerah	Persen	100	100	121,77	80	168,62	97	205,12	100	235,00	97	205,12	94,8	935,63	SETDA
3.00.03.17.	1.1.1.14	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (teknis)	Persentase ASN mengikuti DIKLAT	Persen	50	50	4804,76	51	3151,84	51	3151,84	64	4005,00	55	3440,63	54,2	18554,06	BKPSDM
3.00.04.15.	1.1.1.15	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Realisasi pelaksanaan penelitian dan Pengembangan dalam mendukung Produk Unggulan Daerah	Persen	100	100	216,87	100	350,00	68	240,00	100	541,80	68	240,00	87,2	1588,67	BAPPEDA
3.00.05.15.	1.1.1.16	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDHI	Persentase temuan APIP yang ditindak lanjuti	Persen	100	75	5218,94	75	4702,49	73	4653,70	78	5055,48	73	4723,11	74,8	24353,72	INSPEKTORAT
			Cakupan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDHI	Kecamatan	0	10		10		10		13		12		20	20,00	KESBANGPOL
3.00.05.16.	1.1.1.17	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan kantor sendiri	Persen	0,35	100	64,38	100	64,38	100	98,84	100	108,72	100	98,84	100	435,16	INSPEKTORAT
3.00.05.20.	1.1.1.18	Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Nilai Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.	Nilai	90	92	717,16	94	1019,98	99	1077,67	99	1077,67	99	1077,67	483	4970,13	INSPEKTORAT
4.00.01.17.	1.1.1.19	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase keselarasan produk hukum daerah dengan produk hukum yang lebih tinggi	Persen	100	75	43,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	43,68	SETDA
4.00.01.18.	1.1.1.20	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Persen	68	70	2185,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	2185,15	SETDA
4.00.01.20.	1.1.1.21	Program Pembinaan dan Pengembangan Reformasi Birokrasi	Persentase implementasi agenda reformasi birokrasi sesuai road map reformasi birokrasi	Persen	70	100	100,08	100	140,00	57	80,00	57	80,00	57	80,00	74,2	480,08	SETDA
4.00.01.22.	1.1.1.22	Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum	Persentase keluaran Produk Hukum yang berkualitas	Persen	0	0	0,00	5	797,16	5	797,16	5	797,16	5	797,16	4	3188,63	SETDA
4.00.01.23.	1.1.1.23	Program Penataan Kualitas Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase Dokumen dan Informasi yang berkualitas	Persen	0	0	0,00	100	538,09	100	538,09	100	616,83	100	539,69	80	2232,70	SETDA

4.00.01.24.		1.1.1.24	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum	Persentase layanan bantuan hukum	Persen	0	0	0,00	4	666,76	4	738,44	4	738,44	4	738,44	3,2	2882,08	SETDA
4.00.01.33.		1.1.1.25	Program Pembinaan, Pelaksanaan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PBJ melalui ULP	Persen	100	100	3397,74	100	3051,96	100	3161,24	100	3281,27	100	3163,67	100	16035,88	SETDA
				Level Maturitas ULP	(Level)	3	3		4		0		0		0		7	0,00	SETDA
4.00.01.35.		1.1.1.26	Program Pembinaan, Koordinasi, Kebijakan Bidang Administrasi Pemerintahan	Persentase pelaksanaan koordinasi Bidang Administrasi pemerintahan	Persen	100	100	997,96	100	901,07	99	898,76	100	940,55	100	1078,39	99,8	4816,73	SETDA
4.00.01.36.		1.1.1.27	Program Pembinaan, Koordinasi, Kebijakan Bidang Organisasi	Cakupan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah	Persen	83	100	1068,22	85	909,40	94	1006,98	97	1048,25	94	1007,82	94	5040,67	SETDA
	<b>1.1.2.</b>	<b>Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)</b>		<b>75,22</b>	<b>78,47</b>	<b>70.789,34</b>	<b>80,08</b>	<b>53.443,41</b>	<b>83,12</b>	<b>54.564,95</b>	<b>87,65</b>	<b>56.200,40</b>	<b>89,22</b>	<b>54.724,75</b>	<b>89,22</b>	<b>289.722,85</b>	
1.02.06.15.		1.1.2.01	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	Persen	100	90	2579,30	90	1886,80	90	1887,48	90	1888,30	90	1887,48	90	10129,38	DISDUKCAPIL
1.02.06.16.		1.1.2.02	Program Penataan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persen	0	0	0,00	100	287,14	100	324,34	100	298,74	100	293,19	80	1203,41	DISDUKCAPIL
1.02.06.17.		1.1.2.03	Program Penataan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penataan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen	0	0	0,00	100	100,00	100	102,00	100	104,04	100	102,50	80	408,54	DISDUKCAPIL
1.02.06.18.		1.1.2.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	0	0	0,00	100	50,00	100	51,00	100	52,02	100	51,20	80	204,22	DISDUKCAPIL
1.02.06.19.		1.1.2.05	Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	persentase OPD/Lembaga Pengguna Daerah yang menggunakan Data Kependudukan	Persen	0	0	0,00	100	100,37	100	102,38	100	104,42	100	102,34	80	409,50	DISDUKCAPIL
1.02.10.15.		1.1.2.06	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Persen	0,2	100	726,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	726,94	DISKOMINFOSANTIK
1.02.10.18.		1.1.2.07	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase Terperuhnya kerjasama informasi dan media massa.	Persen	100	100	11788,79	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	11788,79	DISKOMINFOSANTIK
1.02.10.21.		1.1.2.08	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tersedianya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	100	0	0,00	25	4844,73	25	4844,73	25	4932,49	25	4844,73	20	19466,67	DISKOMINFOSANTIK
1.02.10.23.		1.1.2.09	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Terperuhnya Sistem Pelayanan Informasi berbasis IKT	Persen	0	0	0,00	100	2925,09	100	3075,29	100	3212,00	100	3052,43	80	12264,81	DISKOMINFOSANTIK
1.02.10.27.		1.1.2.10	Program Pengembangan E-Government	Persentase Ketersediaan Jaringan WAN dan Fiber Optik, Jumlah OPD yang Menyelenggarakan E-Government	Persen	20	20	818,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	818,98	DISKOMINFOSANTIK
1.02.14.15.		1.1.2.11	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase terperuhnya dokumen/buku informasi pembangunan daerah	Persen	100	100	283,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	283,75	DISKOMINFOSANTIK
1.02.14.16.		1.1.2.12	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terperuhnya Informasi / Data Daerah	Persen	100	0	0,00	25	200,00	25	200,00	25	200,00	25	200,00	20	800,00	DISKOMINFOSANTIK

1.02.15.15.		1.1.2.13	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan persandian	Persen	0,2	100	152,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	20	152,21	DISKOMINFOSANTIK	
1.02.15.16.		1.1.2.14	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase terciptanya pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Persen	100	0	0,00	25	200,00	25	200,00	25	200,00	20	800,00	DISKOMINFOSANTIK		
1.02.18.18.		1.1.2.15	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase pengelolaan Arsip secara baku	Persen	0	0	0,00	9,9	70,00	9	70,00	9	70,00	7,38	280,00	PERPUSIP		
3.00.01.16.		1.1.2.16	Program Kerjasama Pembangunan	Capaian kerjasama pembangunan daerah (%)	Persen	100	100	111,82	100	650,00	83	540,00	100	850,00	67	440,00	90	2591,82	BAPPEDA
4.00.01.15.		1.1.2.17	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan KDH dan Wakil KDH	Persen	100	100	10943,58	100	9040,79	100	9261,27	100	9561,47	100	9572,24	100	48379,34	SETDA
				Persentase Kunjungan Kerja yang difasilitasi	Persen	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	SETWAN
4.00.01.34.		1.1.2.18	Program Hubungan Masyarakat, Dokumentasi, Publikasi Protokol dan Acara	Indeks pelayanan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda	Persen	78	100	3022,80	80	2715,18	82	2812,40	86	2919,19	82	2814,56	86	14284,13	SETDA
4.00.02.15.		1.1.2.19	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Rancangan peraturan daerah yang difasilitasi	Persen	100	100	40361,16	100	30373,32	100	31094,08	100	31807,73	100	31094,08	100	164730,36	SETWAN
Misi 2 : Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah								175.400,18		152.300,56		152.751,77		160.602,64		158.471,94			
2.1. Memantapkan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat				Rata-rata persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar (%)		27,03	28,58	158.317,44	30,16	142.504,62	31,70	142.717,73	33,32	150.144,21	36,10	148.397,09	36,10	742.081,09	
2.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan				Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)		17,57	19,00	138.520,09	22,49	115.025,96	26,08	116.744,86	29,75	120.921,45	34,08	121.670,20	34,08	612.882,56	
				Persentase Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik (%)		18,80	22,46		24,17		25,66		27,25		30,75		30,75		
1.01.03.15.		2.1.1.01	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah panjang Jalan dalam kondisi baik	KM	22,73	227,08	87231,97	211,9	81405,52	210	80918,81	217	83535,32	218	83824,68	1083,98	416916,30	PUPR
				Jumlah jembatan yang terbangun	Unit	0	41		45		0		0		0		86	0,00	PUPR
1.01.03.18.		2.1.1.02	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	0,1757	17,57	10213,63	18,29	6073,88	21	7073,79	24	8301,28	23	7774,18	20,772	39436,76	PUPR
				Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	6,17	6,17		6,17		0		0				2,468	0,00	PUPR
1.01.03.23.		2.1.1.03	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinaamargaan	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi dan Alat-alat berat	Persen	0,1337	13,37	418,36	21,66	455,71	22	464,82	19	419,39	18	381,64	18,806	2139,92	PUPR
1.01.03.31.		2.1.1.04	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase Pengembangan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	Persen	100	100	164,24	100	149,46	100	152,45	92	138,73	84	126,25	95,2	731,13	PUPR
1.01.03.32.		2.1.1.05	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase Peningkatan kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan bersertifikat	Persen	100	100	304,16	100	276,78	100	282,32	92	256,91	84	233,79	95,2	1353,95	PUPR
1.01.03.33.		2.1.1.06	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Cakupan Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Persen	100	100	153,69	100	139,86	100	142,66	92	129,82	84	118,14	95,2	684,17	PUPR

1.01.04.15.		2.1.1.07	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Permukiman/ Rumah tidak sehat	Unit	5	5	40034,04	3	26524,75	3	27710,00	3	28140,00	3	29211,53	17	151620,32	DISPERAKIM
				Proporsi Panjang jalan lingkungan yang dibangun dengan kondisi baik	KM	50	50		35		0		0	0	0		85	0,00	DISPERAKIM
		<b>2.1.2.</b>	<b>Meningkatnya akses masyarakat terhadap air Bersih layak layak</b>	<b>Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air Bersih layak (%)</b>		<b>36,58</b>	<b>39,66</b>	<b>13.929,56</b>	<b>42,75</b>	<b>12.416,94</b>	<b>45,83</b>	<b>12.257,12</b>	<b>48,92</b>	<b>13.343,77</b>	<b>52,00</b>	<b>12.362,51</b>	<b>52,00</b>	<b>64.309,90</b>	
1.01.02.21.		2.1.2.01	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa Sehat	Persen	60	60	2021,03	70	150,00	70	150,00	100	450,00	70	150,00	74	2921,03	DINKES
1.01.03.24.		2.1.2.02	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rasio jaringan Irigasi dan luas irigasi kondisi baik	Persen	0,2	14,59	4017,32	15,69	3944,57	15	3959,29	15	4019,31	15	3946,38	15,056	19886,87	PUPR
1.01.03.25.		2.1.2.03	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Persentase Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persen	100	0	0,00	20	160,93	20	164,14	18	149,37	16	135,93	14,8	610,37	PUPR
1.01.03.30.		2.1.2.04	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jumlah Sambungan Rumah pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	SR	0	2000	6270,57	2130	6672,80	2056	6441,05	2241	7022,80	2095	6566,05	10522	32973,27	DISPERAKIM
3.00.01.19.		2.1.2.05	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Capaian Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persen	100	100	159,87	100	200,00	100	200,00	100	300,00	100	220,00	100	1079,87	BAPPEDA
4.00.01.32.		2.1.2.06	Program Pembinaan, Koordinasi, Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan pembinaan, koordinasi kebijakan bidang administrasi pembangunan	Persen	100	100	1460,77	100	1288,64	100	1342,64	100	1402,30	100	1344,15	100	6838,50	SETDA
		<b>2.1.3.</b>	<b>Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak</b>	<b>Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak (%)</b>		<b>60,54</b>	<b>61,38</b>	<b>5.867,78</b>	<b>62,43</b>	<b>15.061,72</b>	<b>63,47</b>	<b>13.715,76</b>	<b>64,52</b>	<b>15.878,99</b>	<b>65,56</b>	<b>14.364,38</b>	<b>65,56</b>	<b>64.888,63</b>	
1.01.03.16.		2.1.3.01	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terpenuhi	KM	6	3,8	3105,57	5,2	4000,00	5	4200,00	6	5050,13	4	3219,46	24	19575,16	DISPERAKIM
1.01.04.17.		2.1.3.02	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Hektar	24,75	5	1104,60	5	1125,00	5	1150,00	4	1082,65	4	1054,92	23	5517,17	DISPERAKIM
1.01.04.18.		2.1.3.03	Program pengelolaan areal pemukiman	Jumlah daya tampung TPU	Lokasi	0	0	0,00	1	2550,00	1	1300,00	1	1650,00	1	1400,00	4	6900,00	DISPERAKIM
1.01.04.19.		2.1.3.04	Program Penataan Bangunan	Persentase Bangunan/pemukiman yang telah ditata	Persen	0	50	205,92	70	4000,00	70	4030,00	70	4030,00	73	4180,00	66,6	16445,92	DISPERAKIM
1.02.05.24.		2.1.3.05	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTIH)	Jumlah RTIH Publik yang dibangun	Lokasi	4	5	1451,69	10	3386,72	8	3035,76	12	4066,22	13	4510,00	48	16450,39	DISPERAKIM
		<b>2.2.</b>	<b>Memantapkan pembangunan infrastruktur perhubungan</b>	<b>Konektivitas Wilayah (Desa yang terhubung) (%)</b>		<b>1,70</b>	<b>7,00</b>	<b>17.082,74</b>	<b>17,00</b>	<b>9.795,94</b>	<b>32,00</b>	<b>10.034,03</b>	<b>52,00</b>	<b>10.458,43</b>	<b>77,00</b>	<b>10.074,85</b>	<b>77,00</b>	<b>57.446,00</b>	
		<b>2.2.1.</b>	<b>Meningkatnya layanan angkutan darat</b>	<b>Konektivitas desa yang memiliki layanan angkutan darat (%)</b>		<b>9,43</b>	<b>14,00</b>	<b>3.838,54</b>	<b>24,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>39,43</b>	<b>1.200,00</b>	<b>59,00</b>	<b>1.508,43</b>	<b>84,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>84,00</b>	<b>9.546,98</b>	
1.02.09.15.		2.2.1.01	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan Dokumen Standar Perhubungan	Persen	50	60	181,93	70	250,00	0	0,00	0	0,00	98	350,00	45,6	781,93	DISHUB
1.02.09.16.		2.2.1.02	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Persen	0,4	50	1787,09	60	1200,00	60	1200,00	60	1200,00	60	1200,00	58	6587,09	DISHUB

1.02.09.20.		2.2.1.03	Program peningkatan kelainan pengoperasian kendaraan bermotor	Tingkat Kendaraan bermotor Laik Jalan	Persen	50	60	1869,52	0	0,00	0	0,00	70	308,43	0	0,00	26	2177,95	DISHUB
		2.2.2.	Meningkatnya layanan angkutan Perairan,sungai dan penyeberangan	konektivitas desa yang memiliki layanan angkutan perairan, sungai dan penyeberangan (%)		17,54	23,00	13.244,20	33,00	8.345,94	48,00	8.834,03	68,00	8.950,00	93,00	8.524,85	93,00	47.899,02	
1.02.09.17.		2.2.2.01	Program peningkatan pelayanan angkutan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan angkutan	Persen	50	60	3561,36	70	2800,00	79	3175,00	81	3250,00	81	3250,00	74,2	16036,36	DISHUB
1.02.09.18.		2.2.2.02	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persen	50	60	9682,84	70	5545,94	71	5699,03	71	5700,00	66	5274,85	67,6	31862,67	DISHUB
Misi 3 : Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat								46.423,08		73.254,52		75.120,29		75.700,67		72.452,53			
	3.1.	Mewujudkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang lebih produktif	PDRB Sektor Pertanian dan Pariwisata (Rp Juta)			29.683.059,75	31.485.017,58	26.908,16	33.286.975,41	51.826,41	35.088.933,25	53.797,41	36.890.891,08	54.894,81	38.692.848,92	53.165,12	38.692.848,92	240.591,91	
	3.1.1.	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian	PDRB sektor pertanian (Rp juta)			29.396.923,20	31.181.340,49	8.733,18	32.965.757,78	32.002,77	34.750.175,06	33.138,32	36.534.592,35	33.263,31	38.319.009,64	32.204,80	38.319.009,64	139.342,37	
2.00.03.15.		3.1.1.01	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan bina kelompok petani	Kelompok Tani	80	100	594,35	200	1620,00	183	1870,24	136	1472,74	156	1545,46	775	7102,79	DTPHP
				Peningkatan pendapatan Petani Perkebunan dan Pelaku Agribisnis dan Kemampuan Lembaga Petani	Kelompok Tani	0	0		5		9		8		7		29	0,00	DESBUN
2.00.03.16.		3.1.1.02	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	kali	1	3	147,37	3	680,00	3	832,00	3	860,40	3	860,40	15	3380,17	DTPHP
				Persentase Penyebaran Informasi Produk Perkebunan	Persen	0	0		100		100		100		100		80	0,00	DESBUN
2.00.03.17.		3.1.1.03	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Produksi sektor tanaman pangan	Ton	1	100,95	2822,18	600	13844,30	694	17871,43	663	17551,07	442	18080,46	2499,95	70169,44	DTPHP
				Persentase Terwujudnya Penerapan Teknologi tepat guna untuk peningkatan produksi dan penyelamatan kebun masyarakat	Persen	100	100		100		100		100		100		100	0,00	DESBUN
2.00.03.18.		3.1.1.04	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi sektor perkebunan (ton)	Persen	100	0	772,30	0	9978,17	80	5987,20	80	5638,48	0	4253,49	32	26629,64	DTPHP
				Persentase Prasarana dan Sarana Penyelamatan Kebun Masyarakat dan peningkatan Produksi perkebunan	Persen	100	100		100		58		53		42		70,6	0,00	DESBUN
2.00.03.19.		3.1.1.05	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah Pertemuan penyuluh pendamping petani	Kali	1	50	2843,85	50	3573,71	50	4110,85	62	4694,03	47	4218,40	259	19440,84	DTPHP
				Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan dalam menyusun program dan penyebarluasan informasi penyuluhan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	0,00	DESBUN
2.00.03.20.		3.1.1.06	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Kesehatan ternak	Persen	0	80	544,75	80	596,59	80	546,59	80	746,59	80	596,59	80	3031,11	DTPHP
2.00.03.21.		3.1.1.07	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persen	0	20	934,97	90	1560,00	100	1820,00	100	2150,00	100	2450,00	82	8914,97	DTPHP

2.00.03.22.		3.1.1.08	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Ketersediaan produk pangan asal hewan yang ASUH(Aman,sehat,tutuh dan Halal)	kali	0	6	73,41	8	150,00	5	100,00	8	150,00	10	200,00	37	673,41	DTPHP
	<b>3.1.2.</b>	<b>Meningkatnya kontribusi sektor perikanan</b>		<b>PDRB sektor pertanian (Rp Ribu)</b>		<b>29.396.923,20</b>	<b>31.181.340,49</b>	<b>8.736,26</b>	<b>32.965.757,78</b>	<b>10.158,03</b>	<b>34.750.175,06</b>	<b>10.301,57</b>	<b>36.534.592,35</b>	<b>10.805,90</b>	<b>38.319.009,64</b>	<b>10.474,72</b>	<b>38.319.009,64</b>	<b>50.476,48</b>	
2.00.01.20.		3.1.2.01	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4.548	4000	775,49	7400	1446,50	7788	1522,50	7955	1555,00	8159	1995,00	35302	6894,49	DESKAN
2.00.01.21.		3.1.2.02	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	ton	58.361	75000	7659,22	77000	7802,09	77172	7819,57	81335	8241,36	77400	7842,67	387907	39364,90	DESKAN
2.00.01.22.		3.1.2.03	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Jumlah Penyuluh yang kompeten	orang	29	29	62,85	200	487,85	220	537,85	240	587,85	251	612,85	940	2289,23	DESKAN
2.00.01.24.		3.1.2.04	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Persentase Penyerapan Teknologi Tepat Guna Yang Dapat Dikembangkan	Persen	100	100	54,63	100	65,00	100	65,00	100	65,00	100	65,00	100	314,63	DESKAN
2.00.01.29.		3.1.2.05	Program Optimalisasi Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Perikanan	Ketersediaan pangan dan Kosumsi Ikan Perkapita Tahunan	Kg/Kapita/Th	39,77	39,77	184,09	39,75	356,60	39	356,65	39	356,70	40	359,20	197,52	1613,24	DESKAN
	<b>3.1.3.</b>	<b>Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata</b>		<b>PDRB sektor pariwisata (Rp Ribu)</b>		<b>286.136,55</b>	<b>303.677,09</b>	<b>9.438,71</b>	<b>321.217,64</b>	<b>9.665,61</b>	<b>338.758,18</b>	<b>10.357,53</b>	<b>356.298,73</b>	<b>10.825,61</b>	<b>373.839,28</b>	<b>10.485,61</b>	<b>373.839,28</b>	<b>50.773,06</b>	
1.02.16.15.		3.1.3.01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Pengembangan Budaya Daerah	Tampilan Kesenian	6	11	944,82	11	1050,00	12	1150,00	12	1150,00	8	850,00	54	5144,82	DISPORABUDBAR
1.02.16.16.		3.1.3.02	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan	Kegiatan	0	7	183,95	7	700,00	10	1000,00	10	1000,00	10	1000,00	44	3883,95	DISPORABUDBAR
1.02.16.18.		3.1.3.03	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Keragaman Kebudayaan Daerah	Festival Budaya Daerah	2	1	591,51	1	200,00	3	650,00	3	650,00	3	650,00	11	2741,51	DISPORABUDBAR
1.02.16.21.		3.1.3.04	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Jumlah Bangunan Bernilai Sejarah	Unit	0	10	2676,53	5	1100,00	5	1291,92	5	1300,00	5	1300,00	30	7668,25	DISPORABUDBAR
2.00.02.12.		3.1.3.05	Program Pengembangan Kelembagaan Dan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM yang Dilatih	Orang	0	0	0,00	180	100,00	540	300,00	540	300,00	720	400,00	1980	1100,00	DISPORABUDBAR
2.00.02.15.		3.1.3.06	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Promosi Yang Dilaksanakan	Pameran	2	0	0,00	5	500,00	3	350,00	3	300,00	3	350,00	14	1500,00	DISPORABUDBAR
2.00.02.16.		3.1.3.07	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Sarana dan Pariwisata	daya tarik	2	0	0,00	2	300,00	2	350,00	2	410,00	1	260,00	7	1320,00	DISPORABUDBAR
2.00.02.17.		3.1.3.08	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Kemitraan Pariwisata	Kerjasama	0	0	0,00	20	100,00	20	100,00	20	100,00	0	0,00	60	300,00	DISPORABUDBAR
2.00.02.21.		3.1.3.09	Program Peningkatan Kebijakan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah	Dokumen	-	0	0,00	1	250,00	0	0,00	1	250,00	1	100,00	3	600,00	DISPORABUDBAR
2.00.02.22.		3.1.3.10	Program Pengembangan Industri Pariwisata	Persentase Pelaku Usaha Pariwisata Yang Memiliki TDUP	Persen	100	0	0,00	90	200,00	45	100,00	100	400,00	100	400,00	67	1100,00	DISPORABUDBAR
2.00.02.23.		3.1.3.11	Program Pengembangan dan Pelestarian Daya Tarik Wisata Unggulan	Jumlah Event Pariwisata	Event	8	5	1773,96	4	950,00	4	950,00	4	950,00	4	960,00	21	5583,96	DISPORABUDBAR

2.00.02.24.		3.1.3.12	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	Peserta	20	0	0,00	50	200,00	25	100,00	0	0,00	50	200,00	125	500,00	DISPORABUDBAR	
2.00.02.25.		3.1.3.13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah Prasarana Pariwisata Yang Dibangun	Unit	4	10	2609,57	10	3357,03	10	3357,03	10	3357,03	10	3357,03	50	16037,68	DISPORABUDBAR	
2.00.02.26.		3.1.3.14	Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataaan	Jumlah Peserta Yang Dilatih	Orang	120	50	658,58	50	658,58	50	658,58	50	658,58	50	658,58	250	3292,90	DISPORABUDBAR	
<b>3.2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan</b>						<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)</b>	<b>53,04</b>	<b>53,04</b>	<b>19.514,93</b>	<b>53,92</b>	<b>21.428,11</b>	<b>54,79</b>	<b>21.322,88</b>	<b>55,66</b>	<b>20.805,86</b>	<b>56,54</b>	<b>19.287,40</b>	<b>56,54</b>	<b>102.359,17</b>	
<b>3.2.1. Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan</b>						<b>Indeks tutupan lahan (indeks)</b>	<b>24,69</b>	<b>24,69</b>	<b>1.220,86</b>	<b>24,7</b>	<b>410,68</b>	<b>24,71</b>	<b>496,56</b>	<b>24,71</b>	<b>588,05</b>	<b>24,72</b>	<b>502,70</b>	<b>24,72</b>	<b>3.188,84</b>	
1.02.05.17.		3.2.1.01	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Tutupan Lahan Hijau	Pembinaan	0	2	139,30	2	282,68	2	362,56	2	406,05	2	346,70	10	1537,29	DLHK	
1.02.05.18.		3.2.1.02	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Persentase Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persen	0	80	973,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	973,71	DLHK	
1.02.05.19.		3.2.1.03	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun	Dokumen	0	2	107,84	2	128,00	2	134,00	2	152,00	2	156,00	10	677,84	DLHK	
<b>3.2.2. Meningkatnya Kualitas Udara</b>						<b>Indeks kualitas udara (indeks)</b>	<b>91,67</b>	<b>91,67</b>	<b>69,55</b>	<b>91,88</b>	<b>212,67</b>	<b>92,09</b>	<b>262,78</b>	<b>92,29</b>	<b>338,11</b>	<b>92,50</b>	<b>268,00</b>	<b>92,50</b>	<b>1.151,10</b>	
1.02.05.20.		3.2.2.01	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah Pengujian Emisi/Polusi Udara dan Penyuluban	Pengujian	0	7	69,55	20	212,67	24	262,78	31	338,11	25	268,00	107	1151,10	DLHK	
<b>3.2.3. Meningkatnya Kualitas Air</b>						<b>Indeks kualitas air (indeks)</b>	<b>52,22</b>	<b>52,22</b>	<b>11.269,35</b>	<b>54,91</b>	<b>12.062,17</b>	<b>57,61</b>	<b>11.717,94</b>	<b>60,3</b>	<b>10.813,10</b>	<b>62,99</b>	<b>9.760,92</b>	<b>62,99</b>	<b>55.623,47</b>	
1.01.04.16.		3.2.3.01	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Rumah tangga dengan sumber air minum dan sanitasi layak	Unit	100	105	10978,38	108	11640,83	103	11195,17	95	10277,04	85	9216,92	496	53308,32	DISPERAKIM	
1.02.05.16.		3.2.3.02	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Pemantauan, Pengawasan, Tindak Lanjut Pengaduan Dugaan Kasus Lingkungan dan Penghargaan Lingkungan Tingkat Nasional	Kegiatan usaha	0	23	290,97	23	421,34	28	522,78	29	536,07	29	544,00	132	2315,15	DLHK	
<b>3.2.4. Terwujudnya pengelolaan dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan</b>						<b>Persentase pengelolaan dan penanganan sampah (%)</b>	<b>70,00</b>	<b>69,00</b>	<b>6.955,17</b>	<b>68,00</b>	<b>8.742,60</b>	<b>67,00</b>	<b>8.845,60</b>	<b>66,00</b>	<b>9.096,60</b>	<b>65,00</b>	<b>8.755,79</b>	<b>65,00</b>	<b>42.395,76</b>	
1.02.05.15.		3.2.4.01	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pengurangan dan Penanganan Timbulan Sampah	Ton	0	18,25	6955,17	22	8742,60	22	8845,60	22	9096,60	22	8755,79	106,25	42395,76	DLHK	
<b>Misi 4 : Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan iman dan taqwa</b>								<b>454.996,09</b>	<b>437.411,50</b>	<b>449.614,67</b>	<b>463.986,46</b>	<b>467.878,54</b>								
<b>4.1. Mewujudkan kualitas SDM berdaya saing</b>						<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks)</b>	<b>66,30</b>	<b>66,53</b>	<b>400.171,81</b>	<b>67,53</b>	<b>388.166,46</b>	<b>68,08</b>	<b>398.606,48</b>	<b>68,90</b>	<b>411.041,39</b>	<b>69,72</b>	<b>416.831,03</b>	<b>69,72</b>	<b>2.014.817,17</b>	
<b>4.1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan dasar pendidikan sesuai dengan standar</b>						<b>Angka Melek Huruf (%)</b>	<b>99,60</b>	<b>99,61</b>	<b>139.264,79</b>	<b>99,72</b>	<b>136.112,66</b>	<b>99,78</b>	<b>137.250,17</b>	<b>99,80</b>	<b>139.917,19</b>	<b>99,85</b>	<b>138.139,00</b>	<b>99,85</b>	<b>690.683,81</b>	
						Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,18	7,25	7,26	7,38	7,62	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86		
						Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,88	12,05	12,76	12,96	13,26	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56	13,56		



1.01.01.15.		4.1.1.01	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	0,31	100	6086,03	100	6062,09	100	6263,54	100	6924,29	100	6406,39	100	31742,34	DISDIK
1.01.01.16.		4.1.1.02	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	75	100	120871,05	100	118016,38	100	118609,12	100	120511,45	100	119272,62	100	597280,62	DISDIK
1.01.01.18.		4.1.1.03	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	53	100	2569,26	100	680,00	100	705,00	100	705,00	100	705,00	100	5364,26	DISDIK
1.01.01.20.		4.1.1.04	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI- (Guru/10.000 Murid SD/MI)	Orang	768	700	620,91	2000	2268,06	2251	2553,01	2323	2634,96	2322	2633,91	9596	10710,83	DISDIK
				Rasio Guru Terhadap Murid SMP/MTs- (Guru/10.000 Murid SMP/MTs)	Orang	893	769	714		0		0		0			1483	0,00	DISDIK
1.01.01.21.		4.1.1.05	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan pelaksanaan manajemen pelayanan pendidikan	Persen	100	100	8301,63	100	8319,33	99	8312,71	100	8321,50	99	8314,28	99,6	41569,45	DISDIK
1.02.17.15.		4.1.1.06	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Persen	3,88	4,11	735,91	4,34	696,80	4	726,80	4	740,00	4	726,80	4,09	3626,30	PERPUSIP
1.02.18.16.		4.1.1.07	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Persentase arsip daerah yang disimpan dan dilestarikan pada LKD	Persen	0	5	80,00	5	70,00	5	80,00	5	80,00	5	80,00	5	390,00	PERPUSIP
		<b>4.1.2.</b>	<b>Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat</b>	<b>Angka Harapan Hidup (tahun)</b>		<b>67,07</b>	<b>67,09</b>	<b>258.079,75</b>	<b>68,00</b>	<b>247.525,85</b>	<b>68,40</b>	<b>256.784,27</b>	<b>68,80</b>	<b>266.460,78</b>	<b>70,00</b>	<b>274.099,74</b>	<b>70,00</b>	<b>1.302.950,38</b>	
1.01.02.15.		4.1.2.01	Program obat dan perbekalan kesehatan	Persentase kebutuhan obat, bahan medis habis pakai (BMHP) dan vaksin di Puskesmas	Persen	60	60	10501,68	65	9467,28	65	9467,28	65	9467,28	65	9467,28	64	48370,81	DINKES
1.01.02.16.		4.1.2.02	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kunjungan Sakit	Kunjungan	296.940	280000	55857,69	263060	52139,00	263565	52239,00	263565	52264,00	263565	52264,00	1333755	264763,69	DINKES
				Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	Persen	100	90		90		90		90		90		90	0,00	RSUD PURI HUSADA
1.01.02.17.		4.1.2.03	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pengawasan obat dan makanan	Persen	100	100	782,26	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	1182,26	DINKES
1.01.02.18.		4.1.2.04	Program Perbaikan Gizi masyarakat	Persentase Gizi Buruk	Persen	0,12	0	0,00	8	200,00	12	300,00	20	500,00	20	500,00	12	1500,00	DINKES
1.01.02.19.		4.1.2.05	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga PHBS	Persen	0,25	30	1798,63	40	247,00	40	245,00	40	249,00	40	245,00	38	2784,63	DINKES
				Cakupan Masyarakat yang peduli terhadap kesehatan (%)	Persen	100	3		3		3		3		3		3	0,00	RSUD PURI HUSADA
				Persentase penyampaian Informasi kesehatan	Persen	100	100		100		0		100		0		60	0,00	RSUD TENGGU SULUNG
1.01.02.20.		4.1.2.06	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Rasio ketersediaan tenaga kesehatan	Persen	60	0	0,00	70	306,85	100	859,97	100	1086,58	100	1037,91	74	3291,30	DINKES
1.01.02.22.		4.1.2.07	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Angka Kesakitan	Persen	80	70	3071,52	60	715,30	60	715,30	100	1265,30	60	715,30	70	6482,72	DINKES
				Cakupan Peserta Sosialisasi HIV AIDS, dll (%)	Persen	100	20		20		20		20		20		20	0,00	RSUD PURI HUSADA

			Cakupan Peserta Sosialisasi penanggulangan penyakit menular	Persen	0	0		100		100		100		100		80	0,00	RSUD TENGGU SULUNG
1.01.02.23.	4.1.2.08	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	Persen	100	100	10447,61	100	2285,00	100	2180,00	100	2198,00	100	2200,00	100	19310,61	DINKES
			Cakupan Tingkat Akreditasi (%)	Persen	0	85		90		90		90		90		89	0,00	RSUD PURI HUSADA
1.01.02.25.	4.1.2.09	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Fasyankes sesuai standar	Puskesmas	27	28	32375,90	30	36817,56	30	36987,56	30	37037,56	30	36987,56	30	180206,15	DINKES
			Cakupan Pengadaan,Peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit (%)	Persen	0	0		90		90		90		90		72	0,00	RSUD RAJA MUSA
1.01.02.26.	4.1.2.10	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (%)	Persen	100	18	34068,59	18	28453,05	18	28698,51	18	28934,73	18	28668,51	18	148823,38	RSUD PURI HUSADA
			Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persen	100	100		100		100		100		100		100	0,00	RSUD TENGGU SULUNG
			Cakupan Pengadaan,Peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit (%)	Persen	0	100		100		100		100		100		100	0,00	RSUD RAJA MUSA
1.01.02.27.	4.1.2.11	Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (%)	Persen	100	20	140,00	20	454,00	24	552,21	26	553,60	26	569,00	23,2	2268,81	RSUD PURI HUSADA
			Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Persen	100			85		85		85		85		68	0,00	RSUD TENGGU SULUNG
1.01.02.28.	4.1.2.12	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Kemitraan Organisasi Profesi dan LSM Kesehatan	Persen	80	80	259,96	90	150,00	90	150,00	90	150,00	90	150,00	88	859,96	DINKES
1.01.02.30.	4.1.2.13	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase kepuasan Masyarakat	Persen	60	60	44,81	70	50,00	70	50,00	70	50,00	70	50,00	68	244,81	DINKES
1.01.02.32.	4.1.2.14	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase AKI dan AKB	Persen	0,2	18	337,27	15	50,00	100	400,00	100	450,00	15	50,00	49,6	1287,27	DINKES
1.01.02.33.	4.1.2.15	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas BLUD	Persen	0	80	100115,84	80	105970,36	80	113578,98	80	121893,57	80	130984,72	80	572543,47	DINKES
			Cakupan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (%)	Persen	100	100		100		100		100		100		100	0,00	RSUD PURI HUSADA
			Cakupan peningkatan pelayanan dengan cepat dan berkualitas (%)	Persen	100	100		100		100		100		100		100	0,00	RSUD TENGGU SULUNG
1.01.02.46.	4.1.2.16	Program Manajemen dan Informasi Kesehatan	Jumlah Fasyankes Pelaksana Manajeme n Sistem Informasi Kesehatan berbasis IT	PKM	25	25	766,42	27	2650,00	27	2650,00	27	2650,00	27	2650,00	27	11366,42	DINKES
			Persentase Kualitas Data Terintegrasi	Persen	60	100		70		0		0		0		34	0,00	DINKES

				Persentase Peningkatan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kesehatan	Persen	60	100	70		0		0		0		34	0,00	DINKES		
1.02.08.15.		4.1.2.17	Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Persen	0,1861	18	1771,89	17,5	1565,80	17	1580,80	17	1580,80	17	1565,80	17,3	8065,07	DP2KBP3A	
1.02.08.16.		4.1.2.18	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Remaja yang mengikuti Materi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Persen	100	100	71,23	100	145,00	100	180,00	100	180,69	100	145,00	100	721,92	DP2KBP3A	
1.02.08.17.		4.1.2.19	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase Pengguna Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	0,1722	18,49	73,26	19,76	173,26	19	173,26	19	173,26	19	173,26	19,05	766,30	DP2KBP3A	
1.02.08.18.		4.1.2.20	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	Jumlah Kampung KB yang dibina	Kecamatan	14	20	5337,86	20	5296,40	20	5316,40	20	5316,40	20	5296,40	20	26563,46	DP2KBP3A	
1.02.08.20.		4.1.2.21	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa.	Persen	0,35	45	188,48	55	170,00	64	200,00	64	200,00	51	160,00	55,8	918,48	DP2KBP3A	
1.02.08.21.		4.1.2.22	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Cakupan Advokasi tentang Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Persen	100	0	0,00	100	60,00	100	100,00	100	100,00	100	60,00	80	320,00	DP2KBP3A	
1.02.08.23.		4.1.2.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase Cakupan Anggota Poktan Ber-KB	Persen	82	84,08	68,85	85,68	60,00	85	60,00	85	60,00	85	60,00	84,952	308,85	DP2KBP3A	
		<b>4.1.3.</b>	<b>Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat</b>	<b>Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)</b>		<b>11.003,59</b>	<b>11.223,66</b>	<b>2.827,27</b>	<b>11.448,14</b>	<b>4.527,95</b>	<b>11.677,10</b>	<b>4.572,05</b>	<b>11.910,64</b>	<b>4.663,42</b>	<b>12.148,86</b>	<b>4.592,30</b>	<b>12.148,86</b>	<b>21.182,98</b>		
1.02.11.15.		4.1.3.01	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah Koperasi Usaha Mikro dan Kecil yang dibangun dan difasilitasi	Kelompok UM	87	32	1444,89	37	1673,50	37	1686,25	37	1694,85	36	1662,45	179	8161,94	DESKOP	
1.02.11.16.		4.1.3.02	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dan Koperasi yang dilatih	Kelompok	53	220	212,40	730	705,00	737	712,00	742	716,75	738	712,75	3167	3058,90	DESKOP	
1.02.11.17.		4.1.3.03	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pameran dan promosi produk yg diikuti	Kali	10	2	667,33	2	1634,45	1	1612,63	2	1640,85	1	1606,13	8	7161,39	DESKOP	
				Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan	Kelompok	0	23		25		0		0		0		48	0,00	DESKOP	
2.00.06.19.		4.1.3.04	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan bina kelompok pedagang/kaki lima dan asongan	Persen	100	100	502,65	100	515,00	100	561,17	100	610,97	100	610,97	100	2800,76	DISDAGTRI	
		<b>4.2.</b>	<b>Mewujudkan pembangunan SDM beriman dan bertaqwa</b>	<b>Rasio rumah ibadah per jumlah penduduk (Rasio)</b>		<b>1 : 422</b>	<b>1:415</b>	<b>54.824,28</b>	<b>1:408</b>	<b>49.245,04</b>	<b>1:402</b>	<b>51.008,18</b>	<b>1:396</b>	<b>52.945,08</b>	<b>1:390</b>	<b>51.047,51</b>	<b>1:390</b>	<b>259.070,09</b>		
		<b>4.2.1.</b>	<b>Meningkatnya sarana rumah ibadah</b>	<b>Rasio rumah ibadah per jumlah penduduk (Rasio)</b>		<b>1 : 422</b>	<b>1:415</b>	<b>54.824,28</b>	<b>1:408</b>	<b>49.245,04</b>	<b>1:402</b>	<b>51.008,18</b>	<b>1:396</b>	<b>52.945,08</b>	<b>1:390</b>	<b>51.047,51</b>	<b>1:390</b>	<b>259.070,09</b>		
4.00.01.31.		4.2.1.01	Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan.	Persentase Peningkatan kualitas kehidupan Sosial keagamaan dan kemasyarakatan	Persen	100	100	54824,28	100	49245,04	100	51008,18	100	52945,08	100	51047,51	100	259070,09	SETDA	
		<b>Misi 5 : Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.</b>						<b>81.939,69</b>		<b>77.307,54</b>		<b>84.942,53</b>		<b>78.647,25</b>		<b>84.108,91</b>				
		<b>5.1.</b>	<b>Meningkatkan partisipasi sosial</b>	<b>Cakupan partisipasi sosial (%)</b>			<b>51,20</b>	<b>52,35</b>	<b>49.953,23</b>	<b>53,50</b>	<b>54.988,29</b>	<b>54,65</b>	<b>63.434,39</b>	<b>55,80</b>	<b>55.587,20</b>	<b>56,95</b>	<b>63.070,73</b>	<b>56,95</b>	<b>287.033,85</b>	
		<b>5.1.1.</b>	<b>Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan</b>	<b>Indeks Pembangunan Gender IPG (Indeks)</b>			<b>82,39</b>	<b>82,69</b>	<b>945,77</b>	<b>82,99</b>	<b>1.000,00</b>	<b>83,29</b>	<b>1.000,00</b>	<b>83,59</b>	<b>1.000,00</b>	<b>83,89</b>	<b>1.000,00</b>	<b>83,89</b>	<b>4.945,77</b>	

1.02.07.19.		5.1.1.01	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Jumlah Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) PKK di Desa/ Kelurahan	Desa/Kel	236	236	945,77	236	1000,00	236	1000,00	236	1000,00	236	1000,00	236	4945,77	DPMD
		5.1.2.	Meningkatnya semangat kegotong royongan masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (%)		20,00	22,00	49.007,46	24,00	53.988,29	26,00	62.434,39	28,00	54.587,20	30,00	62.070,73	30,00	282.088,07	
1.02.07.29.		5.1.2.01	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Pelaksanaan Pemilahan Kepala Desa	Desa	96	43	1670,66	50	200,00	888	3553,33	75	300,00	836	3347,30	197	9071,28	DPMD
				Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	KEC. BATANG TUAKA
4.00.03.15.		5.1.2.02	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	90	95	47336,80	95	53788,29	95	58881,07	95	54287,20	95	58723,43	95	273016,79	KEC. TEMBLAHAN
		5.2.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Desa dengan peningkatan Status Desa dalam Indeks Desa membangun ( Desa )		2	2	31.986,46	48	22.319,24	48	21.508,14	48	23.060,05	49	21.038,19	195	119.912,07	
		5.2.1.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		59,00	63,10	1.191,57	63,90	1.080,50	64,80	1.068,95	65,78	1.170,87	66,78	1.030,00	66,78	5.541,88	
1.02.02.15.		5.2.1.01	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan OPD yang menggunakan Data gender dan anak dalam pembangunan Daerah	Persen	0	0	0,00	7,463	50,00	7	50,00	7	50,00	7	50,00	5,6926	200,00	DP2KBP3A
1.02.02.16.		5.2.1.02	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Bahan Informasi terkait Gender dan Anak serta Perlindungan dan Pemenuhan Anak	Persen	100	100	354,31	100	290,00	86	250,00	100	320,00	82	240,00	93,6	1454,31	DP2KBP3A
1.02.02.17.		5.2.1.03	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan Advokasi Perlindungan Perempuan terhadap tindak Kekerasan	Persen	100	100	91,86	100	80,00	100	80,00	100	80,00	100	80,00	100	411,86	DP2KBP3A
1.02.02.18.		5.2.1.04	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Jumlah Kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Kebijakan	0	2	745,39	2	660,50	2	688,95	2	720,87	1	660,00	9	3475,71	DP2KBP3A
		5.2.2.	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi (%)		85,00	86,00	783,97	87,00	1.594,11	88,00	1.200,00	89,00	1.550,00	90,00	1.050,00	90,00	6.178,07	
1.02.07.16.		5.2.2.01	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Lembaga Lembaga Ekonomi yang Aktif Membangun Desa	BUM Desa	102	20	720,54	25	1444,11	19	1100,00	21	1250,00	15	900,00	100	5414,65	DPMD
1.02.07.27.		5.2.2.02	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah Pemetaan Kawasan Perdesaan	Desa	10	19	63,43	44	150,00	29	100,00	88	300,00	44	150,00	197	763,43	DPMD
		5.2.3.	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Sosial (%)		60,00	61,00	30.010,93	62,00	19.644,64	63,00	19.239,19	64,00	20.339,19	65,00	18.958,19	65,00	108.192,12	
1.02.07.17.		5.2.3.01	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persen	100	100	12117,61	90	12344,19	90	12349,19	91	12549,19	89	12299,19	92	61659,35	DPMD
1.02.07.25.		5.2.3.02	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	18	15	1777,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	1777,50	DPMD

1.02.13.15.		5.2.3.03	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase wirausaha muda	Persen	0,2	0	0,00	90	200,00	90	200,00	90	200,00	45	100,00	63	700,00	DISPORABUDBAR
1.02.13.16.		5.2.3.04	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	0,2	90	1387,10	90	1230,00	93	1280,00	79	1080,00	79	1080,00	86,2	6057,10	DISPORABUDBAR
1.02.13.17.		5.2.3.05	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapanhidup pemuda	Cakupan pembinaan wirausaha muda	Persen	0,2	0	0,00	90	100,00	90	100,00	90	100,00	90	100,00	72	400,00	DISPORABUDBAR
1.02.13.19.		5.2.3.06	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah Cabang olahraga yang dibina	Cabor	7	0	0,00	0	0,00	7	150,00	7	100,00	9	150,00	23	400,00	DISPORABUDBAR
1.02.13.20.		5.2.3.07	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	0,2	90	1462,26	90	1210,00	60	820,00	85	1150,00	55	750,00	76	5392,26	DISPORABUDBAR
1.02.13.23.		5.2.3.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Yang Disediakan	Unit	0	200	11956,05	55	3250,00	55	3250,00	55	3250,00	55	3250,00	420	24956,05	DISPORABUDBAR
3.00.01.23.		5.2.3.09	Program perencanaan sosial budaya	Persentase Realisasi pelaksanaan pencapaian pembangunan bidang Sosial Budaya	Persen	100	100	1310,40	100	1310,45	83	1090,00	100	1910,00	93	1229,00	95,2	6849,85	BAPPEDA
Misi 6 : Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial								26.140,37	23.589,10	24.042,95	22.779,21	21.880,41							
6.1. Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman sosial				Indeks keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial (indeks)				26.140,37	23.589,10	24.042,95	22.779,21	21.880,41	118.432,03						
6.1.1. Menurunnya angka kriminalitas				Angka kriminalitas yang tertangani (angka)		4500	4450	4.629,92	4400	3.292,10	4350	3.411,23	4300	3.715,00	4250	3.220,80	4250	18.269,04	
1.01.05.15.		6.1.1.01	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Patroli Siaga Operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	kali	0	96	2847,01	96	1595,01	95	1800,00	93	1790,00	54	1204,80	434	9236,82	SATPOL PP
				Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,00	KESBANGPOL	
1.01.05.16.		6.1.1.02	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan penegakan PERDA dan PERKADA / Kebijakan KDHI	kali	0	18	1440,29	20	1362,97	20	1221,23	26	1625,00	26	1666,00	110	7315,49	SATPOL PP
				Jumlah Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persen	100	100	100	100	74	100	100	100	100	94,8	0,00	KESBANGPOL		
1.01.05.17.		6.1.1.03	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan pemberdayaan petugas linmas	Persen	0	80	196,29	85	196,29	82	190,00	86	200,00	86	200,00	83,8	982,58	SATPOL PP
3.00.06.17.		6.1.1.04	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Jumlah warga negara yang mengikuti Pembinaan dan Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Orang	2	200	146,33	230	137,83	333	200,00	166	100,00	250	150,00	1179	734,16	KESBANGPOL
6.1.2. Tegaknya prinsip-prinsip demokrasi				Indeks demokrasi Indonesia (indeks)		60	65	2.673,27	0	2.552,63	0	2.900,00	70	2.362,65	0	3.049,49	70	13.538,04	
3.00.06.15.		6.1.2.01	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah warga negara yang mendapat pelatihan wawasan kebangsaan	Orang	2	300	705,02	363	853,26	404	950,00	417	982,00	352	829,49	1836	4319,77	KESBANGPOL

3.00.06.16.		6.1.2.02	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase kemitraan wawasan kebangsaan yang dikembangkan	Persen	100	80	36,97	80	224,05	100	430,00	100	450,00	100	480,00	92	1621,02	KESBANGPOL
3.00.06.18.		6.1.2.03	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Pemahaman Politik Masyarakat dan Jumlah Forum-forum Diskusi Politik	Persen	100	90	386,44	90	972,54	71	770,00	53	580,65	43	470,00	69,4	3179,63	KESBANGPOL
3.00.06.19.		6.1.2.04	Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Jumlah Pengamanan Tahapan Pemilu / Pilkada dan Pilkadaes	kali	20	21	1544,84	0	0,00	21	250,00	0	0,00	21	900,00	63	2694,84	SATPOL PP
				Persentase Partisipasi Pemilih pada Pilkada dan Pemilu	Persen	100	100	0	0	0	0	0	0	100	40	0,00			KESBANGPOL
3.00.06.20.		6.1.2.05	Program Pengembangan dan Kemitraan Ormas	Persentase cakupan Ormas yang dibina	Persen	0	0	0,00	80	502,78	79	500,00	55	350,00	58	370,00	54,4	1722,78	KESBANGPOL
		<b>6.1.3.</b>	<b>Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak</b>	<b>Jumlah Penyelesaian Kasus Perempuan dan Anak (Kasus)</b>		<b>41</b>	<b>35</b>	<b>184,54</b>	<b>40</b>	<b>180,00</b>	<b>46</b>	<b>180,00</b>	<b>51</b>	<b>180,00</b>	<b>57</b>	<b>180,00</b>	<b>57</b>	<b>904,54</b>	
1.02.02.20.		6.1.3.01	Program Pengembangan Kota Layak Anak	Angka Implementasi Pencapaian Kab layak Anak (KLA)	Poin	500	600	184,54	600	180,00	600	180,00	600	180,00	600	180,00	3000	904,54	DP2KBP3A
		<b>6.1.4.</b>	<b>Menurunnya penyanggah masalah kesejahteraan sosial</b>	<b>Jumlah PMKS yang tertangani (jiwa)</b>		<b>60132</b>	<b>21000</b>	<b>667,23</b>	<b>36617</b>	<b>599,33</b>	<b>2247</b>	<b>620,78</b>	<b>750</b>	<b>644,36</b>	<b>500</b>	<b>621,26</b>	<b>500</b>	<b>3.152,96</b>	
4.00.01.37.		6.1.4.01	Program Pembinaan, Koordinasi, Kebijakan Bidang Administrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas	Cakupan Fasilitas, Pembinaan, Koordinasi, Asistensi dan Evaluasi Kebijakan Bidang Administrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas	Persen	100	100	667,23	100	599,33	100	620,78	100	644,36	100	621,26	100	3152,96	SETDA
		<b>6.1.5.</b>	<b>Menurunnya resiko bencana</b>	<b>Luas wilayah terdampak bencana (Km2)</b>		<b>1,76</b>	<b>1,40</b>	<b>17.985,42</b>	<b>1,22</b>	<b>16.965,04</b>	<b>1,04</b>	<b>16.930,93</b>	<b>0,86</b>	<b>15.877,20</b>	<b>0,68</b>	<b>14.808,86</b>	<b>0,68</b>	<b>82.567,45</b>	
1.01.03.17.		6.1.5.01	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Panjang turap di wilayah aliran sungai rawan longsor dalam kondisi baik	Meter	250	165	716,09	115	501,26	117	511,28	126	552,19	115	502,49	638	2783,31	PUPR
1.01.03.19.		6.1.5.02	Program rehabilitasi/pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	Proporsi Turap/Talud/Bronjong yang di rehabilitasi/Peliharaan	Persen	0,1757	0	0,00	20	164,57	20	167,87	22	181,30	20	164,98	16,4	678,71	PUPR
1.01.03.28.		6.1.5.03	Program pengendalian banjir	Panjang parit (anak sungai) dalam kondisi baik	KM	70	50	12403,94	50	12371,34	51	12721,99	46	11577,01	42	10535,08	239	59609,35	PUPR
1.01.05.25.		6.1.5.04	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Warga Negara yang Memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	899,21	100	1082,44	100	1159,45	100	1170,92	100	1181,85	100	5493,88	DPKP
1.01.05.42.		6.1.5.05	Program Penanggulangan bahaya Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	100	100	1719,86	100	840,00	39	331,94	39	335,79	46	389,46	64,8	3617,05	DPKP
3.00.07.15.		6.1.5.06	Program pencegahan dini dari penanggulangan korban bencana alam	Persentase Cakupan Pencegahan dan Penanganan Daerah Rawan Bencana	Persen	95	96	97,22	96	150,00	96	150,00	96	150,00	92	145,00	95,2	692,22	BPBD
3.00.07.16.		6.1.5.07	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penanganan Daerah Rawan Bencana	Persen	98	98	1498,64	98	1508,40	98	1508,40	98	1510,00	98	1510,00	98	7535,44	BPBD
3.00.07.17.		6.1.5.08	Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sementara daerah pasca bencana	Persen	94	95	50,98	95	100,00	95	100,00	100	120,00	95	100,00	96	470,98	BPBD
3.00.07.18.		6.1.5.09	Program Penanganan Kedaruratan Dan Logistik Bencana	Persentase Jumlah penanggulangan kedaruratan, peralatan dan logistik korban bencana	Persen	98	98	599,49	98	247,03	100	280,00	100	280,00	100	280,00	99,2	1686,52	BPBD

Misi 7 : Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran				5,968,10		4,685,06		4,846,21		5,013,70		4,918,50						
7.1.	Menurunkan tingkat pengangguran			Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,74	3,43	566,48	3,14	780,00	2,86	830,00	2,61	883,00	2,38	830,00	2,38	3.889,48	
7.1.1.	Meningkatnya kesempatan kerja			Tingkat kesempatan kerja (%)			111,60		345,00		370,00		410,00		375,00		1.611,60	
1.02.01.16.	7.1.1.01	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persen	0,0343	55	111,60	55	345,00	58	370,00	65	410,00	59	375,00	58,4	1611,60	DISNAKERTRANS
7.1.2.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja			Tenaga Kerja Terlatih (%)	26,56	28,27	454,88	29,97	435,00	31,68	460,00	33,38	473,00	35,09	455,00	35,09	2.277,88	
1.02.01.15.	7.1.2.01	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja/tenaga kerja yang di latih	Orang	5	5	19,50	20	80,00	21	85,00	21	85,00	20	80,00	87	349,50	DISNAKERTRANS
1.02.01.17.	7.1.2.02	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kasus yang diselesaikan melalui PB	Persen	0,3333	70	316,69	50	145,00	53	155,00	55	161,00	53	155,00	56,2	932,69	DISNAKERTRANS
2.00.08.15.	7.1.2.03	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Cakupan bina transmigrasi dan penempatan transmigrasi lokal	KK	225	225	98,03	550	180,00	574	188,00	592	194,00	574	188,00	2515	848,03	DISNAKERTRANS
2.00.08.16.	7.1.2.04	Program Transmigrasi Lokal	Cakupan bina transmigrasi	KK	225	225	20,66	325	30,00	346	32,00	357	33,00	346	32,00	1599	147,66	DISNAKERTRANS
7.2.	Menurunkan tingkat kemiskinan			Persentase penduduk miskin (%)	7,70	7,50	5.401,63	7,40	3.905,06	7,30	4.016,21	7,20	4.130,70	7,10	4.088,50	7,10	21.542,10	
7.2.1.	Meningkatnya cakupan bantuan kepada masyarakat miskin			Cakupan bantuan kepada masyarakat miskin (%)	35,07%	18,67%	2.473,74	19,50%	2.363,93	20,00%	2.428,85	20,50%	2.495,72	21,25%	2.404,47	21,25%	12.166,70	
1.01.06.16.	7.2.1.01	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	Persen	100	100	1163,53	100	1274,63	100	1312,87	100	1352,25	100	1392,82	100	6496,11	DINSOS
1.01.06.18.	7.2.1.02	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah cacat fisik dan mental yang mendapat bantuan	Persen	100	100	84,12	100	79,77	100	82,17	100	84,63	100	87,17	100	417,86	DINSOS
1.01.06.20.	7.2.1.03	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah eks Penyandang Penyakit Sosial yang diberikan Pelatihan SDM dan Bantuan	Persen	100	100	182,74	100	188,48	100	194,14	100	199,96	56	105,96	91,2	871,29	DINSOS
1.01.06.30.	7.2.1.04	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Jumlah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Persen	100	100	405,89	100	200,00	100	200,00	100	200,00	100	200,00	100	1205,89	DINSOS
1.01.06.32.	7.2.1.05	Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah Perjuang Kemerdekaan, Veteran yang dilangani	Persen	100	100	287,73	100	302,12	100	311,18	100	320,52	100	330,14	100	1551,70	DINSOS
1.01.06.33.	7.2.1.06	Program Penanganan Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Terehabilitasi dan terbantunya Pengemis, Gelandangan serta terkirimnya Orang Terlantar	Persen	100	100	349,72	100	318,92	100	328,49	100	338,35	90	288,38	98	1623,86	DINSOS
7.2.2.	Meningkatkan daya beli penduduk miskin			Pengeluaran per kapita penduduk miskin (Rp per kapita per hari)	11.003,59	11.223,66	2.927,89	11.448,14	1.541,13	11.677,10	1.587,36	11.910,64	1.634,98	12.148,86	1.684,03	12.148,86	9.375,40	
1.01.06.15.	7.2.2.01	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase masyarakat yang menerima bantuan	Persen	100	100	1786,74	100	696,01	100	716,89	100	738,40	100	760,55	100	4698,59	DINSOS
1.01.06.21.	7.2.2.02	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penerima Bantuan dan Pelatihan Peningkatan SDM	Persen	100	100	703,61	100	385,70	100	397,27	100	409,19	100	421,46	100	2317,24	DINSOS

1.01.06.25.		7.2.2.03	Program Keluarga Harapan	Jumlah Rumah Tangga Program Keluarga Harapan yang dibina	Persen	100	100	437,54	100	459,42	100	473,20	100	487,40	100	502,02	100	2359,57	DINSOS
Misi 8 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.								24.017,91	28.031,98	29.493,60	30.281,47	29.349,36							
8.1. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah				Laju pertumbuhan ekonomi (%)		4,84	4,98	24.017,91	5,12	28.031,98	5,26	29.493,60	5,40	30.281,47	5,54	29.349,36	5,54	141.174,32	
8.1.1. Meningkatkan kemandirian ekonomi dan terkendalinya kesenjangan pendapatan				Indeks gini (indeks)		0,33	0,32	7.548,95	0,32	9.867,87	0,32	10.330,07	0,31	10.480,61	0,31	9.592,08	0,31	47.819,57	
				Laju inflasi (%)		4,02	3,80	3,70		3,60		3,50		3,40		3,40			
1.02.11.18.		8.1.1.01	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang dibina	Koperasi	249	261	17,12	300	583,75	344	669,60	385	749,55	355	691,15	1645	2711,17	DISKOP
2.00.06.21.		8.1.1.02	Program Pengembangan dan Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Cakupan dan Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Persen	100	100	1949,90	100	4800,00	100	5659,38	100	5811,00	100	5895,31	100	24115,59	DISDAGTRI
2.00.07.15.		8.1.1.03	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana peralatan mesin pengolahan kelapa	Persen	100	100	3590,10	100	2500,00	84	2124,40	60	1500,00	44	1100,00	77,6	10814,50	DISDAGTRI
3.00.01.22.		8.1.1.04	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase Realisasi pelaksanaan pencapaian pembangunan bidang ekonomi	Persen	100	100	707,76	100	830,72	82	682,00	100	1180,00	85	710,00	93,4	4110,48	BAPPEDA
4.00.01.21.		8.1.1.05	Program Fasilitas, Pembinaan, Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi Pembangunan	Persentase pelaksanaan koordinasi Bidang Ekonomi Pembangunan	Persen	100	100	1284,07	100	1153,40	100	1194,69	100	1240,06	100	1195,62	100	6067,84	SETDA
8.1.2. Terwujudnya percepatan transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan				Kontribusi sektor pertanian/Perkebunan terhadap PDRB (%)		45,63	45,53	11.153,47	45,08	9.763,19	44,63	9.755,85	44,18	10.575,85	43,72	10.235,40	43,72	51.483,76	
				Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)		6,84	28,41	28,48		28,56		28,63		28,71		5,10			
2.00.06.15.		8.1.2.01	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan penyelesaian masalah pengaduan konsumen cakupan perlindungan konsumen dan bina kelompok pedagang/ usaha sesuai peruntukannya	Persen	100	100	1191,24	100	1775,00	100	2219,80	100	2358,12	100	2316,14	100	9860,31	DISDAGTRI
2.00.06.17.		8.1.2.02	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Cakupan Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persen	100	100	966,57	100	1030,00	100	1131,50	100	1364,20	100	1365,73	100	5888,00	DISDAGTRI
2.00.06.18.		8.1.2.03	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan pendataan dan informasi harga	Persen	100	100	7207,82	100	3889,82	100	3919,82	100	4219,82	100	3919,82	100	23157,11	DISDAGTRI
2.00.07.16.		8.1.2.04	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persen	100	100	1787,83	100	2368,37	100	2484,73	100	2633,71	100	2633,71	100	11908,34	DISDAGTRI
2.00.07.18.		8.1.2.05	Program Penataan Struktur Industri	Cakupan pertumbuhan Struktur Industri	Persen	100	0	0,00	100	700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	700,00	DISDAGTRI
8.1.3. Meningkatkan investasi daerah				Nilai investasi PMDN (Milyar Rupiah)		5.116,00	5.628,00	1.265,87	6.191,00	779,93	6.810,00	979,73	7.491,00	843,13	8.240,00	863,54	8.240,00	4.732,19	
				Nilai investasi PMA (Juta US\$)		315,00	436,00	381,00		419,00		461,00		507,00		507,00			



1.02.12.15.		8.1.3.01	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	Kali	1	2	572,02	2	352,88	2	354,93	2	370,73	2	401,64	10	2052,20	DPMPPTSP
1.02.12.16.		8.1.3.02	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha	Persen	75	20	458,21	20	110,03	56	311,73	26	143,24	21	116,10	28,6	1139,32	DPMPPTSP
1.02.12.17.		8.1.3.03	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Jumlah Potensi Daerah	Potensi	0	0	0,00	1	25,00	1	20,50	1	21,00	1	20,30	4	86,80	DPMPPTSP
1.02.12.24.		8.1.3.04	Program Pengendalian dan Penataan Perizinan	Jumlah Perizinan Usaha dan Non Perizinan yang diterbitkan	Izin	957	0	0,00	500	161,37	493	159,19	534	172,45	565	182,51	2092	675,51	DPMPPTSP
1.02.12.25.		8.1.3.05	Program Penataan Perizinan Tertentu	Jumlah Perizinan Pelaksanaan Daerah yang diterbitkan	Izin	48	100	235,63	105	130,66	107	133,37	109	135,71	114	143,00	535	778,37	DPMPPTSP
	<b>8.1.4. Meningkatnya ketahanan pangan daerah</b>			<b>Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (%)</b>		<b>85,90</b>	<b>87,90</b>	<b>4.049,63</b>	<b>88,90</b>	<b>7.620,99</b>	<b>89,90</b>	<b>8.427,95</b>	<b>90,90</b>	<b>8.381,88</b>	<b>91,90</b>	<b>8.658,34</b>	<b>91,90</b>	<b>37.138,80</b>	
				<b>Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)</b>		<b>85,20</b>	<b>84,20</b>		<b>85,20</b>		<b>86,20</b>		<b>87,20</b>		<b>88,20</b>		<b>88,20</b>		
1.02.03.15.		8.1.4.01	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Persen	85,90	87,9	4049,63	89,9	7620,99	91	8427,95	92	8381,88	91	8658,34	90,56	37138,80	DKP
				Persentase peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Persen	87,9	87,9		89,9		0		0		0		35,56	0,00	DKP
				Persentase Produktifitas tanaman pangan dan hortikultura (%)	Persen	40,09	40,09		41		40		36		38		39,018	0,00	DTPHP
				Persentase Meningkatnya Ketahanan Pangan, Luasan Lahan Peremajaan, Produksi dan Mutu Produk perkebunan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	0,00	DISBUN

**BAB****7****KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN  
DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH****7.1. Kerangka Pendanaan**

Kerangka pendanaan pembangunan penting untuk dirumuskan dalam rangka memperoleh gambaran tentang alokasi penerimaan daerah terkait dengan kapasitas riil kemampuan daerah, belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung), dan pembiayaan pengeluaran. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 3 bahwa hal ini perlu dilakukan dalam rangka pencapaian efektifitas program dan keterbatasan anggaran serta pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow of priority program*). Oleh karenanya maka diperlukan kebijakan Alokasi Anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan ditentukannya prioritas alokasi anggaran.

Berdasarkan ketersediaan anggaran yang ada akan dialokasikan anggaran berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir. Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1.  
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
<b>A</b>	<b>PENERIMAAN</b>	2.273.167.918.992,17	2.262.472.472.283,64	2.321.086.428.372,68	2.380.409.474.494,76	2.451.985.635.933,50
<b>B</b>	<b>KAPASITAS RIIL KEUANGAN</b>	1.099.964.741.014,37	1.038.040.564.941,17	1.066.314.836.152,00	1.091.488.515.310,00	1.085.110.212.920,00
<b>C</b>	<b>BELANJA</b>					
<b>C.1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	1.163.378.177.977,80	1.205.756.907.342,46	1.241.271.592.220,68	1.276.920.959.184,76	1.354.875.423.013,50
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	518.112.325.148,00	523.565.403.795,57	531.783.608.122,84	539.989.104.360,81	548.318.143.008,68
2	Tambahan Penghasilan PNS	286.777.790.755,00	289.680.108.444,82	294.046.300.309,06	298.477.985.051,27	302.976.145.064,61
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	12.990.600.000,00	12.990.600.000,00	12.990.600.000,00	12.990.600.000,00	12.990.600.000,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.865.482.097,00	1.806.278.729,62	1.702.518.402,65	1.733.182.824,99	1.763.847.247,33
5	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
6	Belanja Hibah	25.828.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	60.000.000.000,00
7	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00
8	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.432.027.684,30	5.119.195.718,01	5.222.986.523,13	5.280.271.685,29	5.463.961.611,15
9	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota	297.709.846.853,50	343.595.320.654,46	366.525.578.863,00	389.449.815.262,40	413.362.726.081,73
10	Belanja Tidak Terduga	10.662.105.440,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
<b>C.2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	1.088.562.677.766,14	1.038.040.564.941,17	1.066.314.836.152,00	1.091.488.515.310,00	1.085.110.212.920,00
<b>D</b>	<b>Pembiayaan Pengeluaran</b>	9.825.000.000,00	18.675.000.000,00	13.500.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
2	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-
3	Penyertaan Modal	9.825.000.000,00	18.675.000.000,00	13.500.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00

## **7.2. Program Perangkat Daerah**

Program prioritas dirumuskan dalam rangka pencapaian visi Pembangunan Daerah “Untuk Kejayaan Inhil Yang Semakin Maju, Bermarwah Dan Bermartabat. Program sebagaimana dimaksud harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.

Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Program prioritas ini meliputi program kegiatan pada urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang.

Untuk program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah berdasarkan bidang urusan seperti Tabel 7.2.

Tabel 7.2.  
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Indragiri Hilir

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)
<b>1.01.01.01.</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>				<b>145.540,60</b>	<b>140.660,58</b>	<b>142.092,72</b>	<b>143.665,99</b>	<b>142.124,66</b>							
<b>0.00.00.1.01.01.01.</b>	<b>NON URUSAN</b>				<b>7.091,72</b>	<b>5.314,72</b>	<b>5.649,35</b>	<b>4.568,80</b>	<b>4.792,46</b>							
0.00.00.1.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100	100	6.630,55	100	1.800,34	100	1.820,74	100	1.824,36	100	1.836,27	100	DINAS PENDIDIKAN
0.00.00.1.01.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan	Persen	100	100	71,17	100	2.787,65	100	3.097,65	71	2.007,00	79	2.214,72	90	DINAS PENDIDIKAN
0.00.00.1.01.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	Persen	100	100	117,25	100	120,50	100	121,50	100	121,50	100	123,50	100	DINAS PENDIDIKAN
0.00.00.1.01.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyediaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100	100	272,75	100	275,75	100	275,75	100	275,75	99	274,85	99,8	DINAS PENDIDIKAN
0.00.00.1.01.01.01.07.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	Persen	100	0	-	100	330,48	100	333,72	100	340,20	100	343,12	80	DINAS PENDIDIKAN
<b>1.01.01.1.01.01.01.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>				<b>138.448,88</b>	<b>135.345,87</b>	<b>136.443,37</b>	<b>139.097,19</b>	<b>137.332,20</b>							
1.01.01.1.01.01.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	31	100	6.086,03	100	6.062,09	100	6.263,54	100	6.924,29	100	6.406,39	100	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.1.01.01.01.16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	75,27	100	120.871,05	100	118.016,38	100	118.609,12	100	120.511,45	100	119.272,62	100	DINAS PENDIDIKAN

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

1.01.01.1.01.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	53	100	2.569,26	100	680,00	100	705,00	100	705,00	100	705,00	100	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.1.01.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI- (Guru/10.000 Murid SD/MI)	Orang	768	700	620,91	2000	2.268,06	2251	2.553,01	2323	2.634,96	2322	2.633,91	9596	DINAS PENDIDIKAN
		Rasio Guru Terhadap Murid SMP/MTs- (Guru/10.000 Murid SMP/MTs)	Orang	893	769	-	714	-	0	-	0	-	0	-	1483	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.1.01.01.01.21.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan pelaksanaan manajemen pelayanan pendidikan	Persen	100	100	8.301,63	100	8.319,33	99	8.312,71	100	8.321,50	99	8.314,28	99,6	DINAS KESEHATAN
<b>1.01.02.01.</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>					<b>161.161,38</b>		<b>138.320,81</b>		<b>139.573,93</b>		<b>140.950,54</b>		<b>139.601,88</b>		
<b>0.00.00.1.01.02.01.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>16.315,90</b>		<b>6.145,00</b>		<b>6.145,00</b>		<b>6.145,00</b>		<b>6.145,00</b>		
0.00.00.1.01.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	10.237,12	100	4.310,00	100	4.310,00	100	4.310,00	100	4.310,00	100	DINAS KESEHATAN
0.00.00.1.01.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor dan Pemeliharaan Peralatan Kerja	Persen	100	100	3.664,14	100	1.410,00	100	1.410,00	100	1.410,00	100	1.410,00	100	DINAS KESEHATAN
0.00.00.1.01.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki kemampuan dan Keterampilan Khusus	Persen	70	71	2.228,78	72	200,00	72	200,00	72	200,00	72	200,00	71,8	DINAS KESEHATAN
0.00.00.1.01.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tercapainya penyusunan dokumen capaian kinerja dan keuangan	Persen	100	100	185,86	100	175,00	100	175,00	100	175,00	100	175,00	100	DINAS KESEHATAN
0.00.00.1.01.02.01.07.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Jumlah dokumen penunjang program kerja	Dokumen	9	0	-	9	50,00	9	50,00	9	50,00	9	50,00	36	DINAS KESEHATAN
<b>1.01.02.1.01.02.01.</b>	<b>KESEHATAN</b>					<b>144.845,47</b>		<b>132.175,81</b>		<b>133.428,93</b>		<b>134.805,54</b>		<b>133.456,88</b>		
1.01.02.1.01.02.01.15.	Program obat dan perbekalan kesehatan	Persentase kebutuhan obat, bahan medis habis pakai (BMHP) dan vaksin di Puskesmas	Persen	50	60	10.501,68	65	9.467,28	65	9.467,28	65	9.467,28	65	9.467,28	64	DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.01.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kunjungan Sakit	Kunjungan	296940	280000	55.857,69	263060	52.079,00	263565	52.179,00	263565	52.179,00	263565	52.179,00	1333755	DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.01.17.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pengawasan obat dan makanan	Persen	100	100	782,26	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.01.18.	Program Perbaikan Gizi masyarakat	Persentase Gizi Buruk	Persen	12	0	-	8	200,00	12	300,00	20	500,00	20	500,00	12	DINAS KESEHATAN

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

1.01.02.1.01.02.01.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga PHBS	Persen	25	30	1.441,19	40	200,00	40	200,00	40	200,00	40	200,00	38	DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.01.20.	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Rasio ketersediaan tenaga kesehatan	Persen	60	0	-	70	306,85	100	859,97	100	1.086,58	100	1.037,91	74	DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.01.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa Sehat	Persen	60	60	2.021,03	70	150,00	70	150,00	100	450,00	70	150,00	74	DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.01.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Angka Kesakitan	Persen	80	70	3.059,53	60	700,00	60	700,00	100	1.250,00	60	700,00	70	DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.01.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	Persen	100	100	10.072,61	100	1.950,00	100	1.950,00	100	1.950,00	100	1.950,00	100	DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.01.25.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Fasyankes sesuai standar	Puskesmas	27	28	32.375,90	30	36.797,56	30	36.947,56	30	36.997,56	30	36.947,56	148	DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.01.28.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Kemitraan Organisasi Profesi dan LSM Kesehatan	Persen	80	80	259,96	90	150,00	90	150,00	90	150,00	90	150,00	88	DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.01.30.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase kepuasan Masyarakat	Persen	60	60	44,81	70	50,00	70	50,00	70	50,00	70	50,00	68	DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.01.32.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase AKI dan AKB	Persen	20	18	337,27	15	50,00	100	400,00	100	450,00	15	50,00	49,6	DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.01.33.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas BLUD	Persen	0	80	27.325,12	80	27.325,12	80	27.325,12	80	27.325,12	80	27.325,12	80	DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.01.46.	Program Manajemen dan Informasi Kesehatan	Jumlah Fasyankes Pelaksana Manajeme n Sistem Informasi Kesehatan berbasis IT	PKM	25	25	766,42	27	2.650,00	27	2.650,00	27	2.650,00	27	2.650,00	133	DINAS KESEHATAN
		Persentase Kualitas Data Terintegrasi	Persen	60	100	-	70	-	0	-	0	-	0	-	34	DINAS KESEHATAN
		Persentase Peningkatan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kesehatan	Persen	60	100	-	70	-	0	-	0	-	0	-	34	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
<b>1.01.02.02.</b>	<b>RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN</b>					<b>84.913,01</b>		<b>83.572,09</b>		<b>90.936,04</b>		<b>99.035,94</b>		<b>107.250,56</b>		
<b>0.00.00.1.01.02.02.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>9.708,35</b>		<b>6.061,10</b>		<b>6.240,43</b>		<b>6.319,55</b>		<b>6.181,62</b>		

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

0.00.00.1.01.02.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	19	9.450,43	19	5.640,50	19	5.789,83	19	5.768,95	19	5.718,55	19	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
0.00.00.1.01.02.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	0	-	20	260,00	25	335,00	25	335,00	25	335,00	19	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
0.00.00.1.01.02.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	Persen	100	0	-	38	45,00	0	-	84	100,00	0	-	24,4	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
0.00.00.1.01.02.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	17	257,92	17	100,00	17	100,00	17	100,00	19	112,47	17,4	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
0.00.00.1.01.02.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	0	0	-	100	7,20	100	7,20	100	7,20	100	7,20	80	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
0.00.00.1.01.02.02.07.	Program Peningkatan Pengembangan Rencana Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (%)	Persen	0	0	-	100	8,40	100	8,40	100	8,40	100	8,40	80	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
<b>1.01.02.1.01.02.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>					<b>75.204,65</b>		<b>77.510,99</b>		<b>84.695,61</b>		<b>92.716,40</b>		<b>101.068,94</b>		
1.01.02.1.01.02.02.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	Persen	100	0	-	21	50,00	21	50,00	31	75,00	31	75,00	20,8	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1.01.02.1.01.02.02.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Masyarakat yang peduli terhadap kesehatan (%)	Persen	100	3	335,44	3	45,00	3	45,00	3	45,00	3	45,00	3	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1.01.02.1.01.02.02.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Peserta Sosialisasi HIV AIDS, dll (%)	Persen	100	20	11,99	20	14,50	20	14,50	20	14,50	20	14,50	20	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1.01.02.1.01.02.02.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Tingkat Akreditasi (%)	Persen	0	0	-	100	280,00	64	180,00	71	200,00	71	200,00	61,2	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN



RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

1.01.02.1.01.02.02.26.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (%)	Persen	100	18	10.426,50	18	6.155,25	18	6.305,25	18	6.470,85	18	6.275,85	18	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1.01.02.1.01.02.02.27.	Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (%)	Persen	100	20	140,00	20	370,00	24	445,00	26	489,60	26	495,00	23,2	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
1.01.02.1.01.02.02.33.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (%)	Persen	100	100	64.290,72	100	70.596,24	100	77.655,86	100	85.421,45	100	93.963,60	100	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
<b>1.01.02.03.</b>	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG</b>					<b>12.333,58</b>		<b>10.679,56</b>		<b>10.871,78</b>		<b>11.078,10</b>		<b>10.972,97</b>		
<b>0.00.00.1.01.02.03.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>3.114,55</b>		<b>3.750,37</b>		<b>3.890,13</b>		<b>4.010,67</b>		<b>3.843,63</b>		
0.00.00.1.01.02.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	85,5	90	2.930,66	95	3.692,55	96	3.752,03	97	3.801,97	97	3.777,93	95	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
0.00.00.1.01.02.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	91,23	95	62,89	95	31,90	100	138,10	100	83,70	91	30,70	96,2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
0.00.00.1.01.02.03.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	100	100	64,00	0	-	0	-	100	75,00	0	-	40	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
0.00.00.1.01.02.03.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	57,00	72	25,92	0	-	100	50,00	97	35,00	73,8	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
<b>1.01.02.1.01.02.03.</b>	<b>KESEHATAN</b>					<b>9.219,03</b>		<b>6.929,19</b>		<b>6.981,65</b>		<b>7.067,44</b>		<b>7.129,35</b>		
1.01.02.1.01.02.03.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase penyampaian Informasi kesehatan	Persen	100	100	22,00	100	2,00	0	-	100	4,00	0	-	60	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
1.01.02.1.01.02.03.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Peserta Sosialisasi penanggulangan penyakit menular	Persen	0	0	-	100	0,80	100	0,80	100	0,80	100	0,80	80	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
1.01.02.1.01.02.03.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Tingkat Akreditasi (%)	Persen	0	100	375,00	0	-	0	-	0	-	0	-	20	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

1.01.02.1.01.02.03.26.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persen	100	100	6.322,03	100	4.873,39	100	4.878,85	100	4.911,64	100	4.928,55	100	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
1.01.02.1.01.02.03.27.	Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Persen	0	0	-	100	4,00	100	4,00	100	4,00	100	4,00	80	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU SULUNG
1.01.02.1.01.02.03.33.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan peningkatan pelayanan dengan cepat dan berkualitas (%)	Persen	100	100	2.500,00	100	2.049,00	100	2.098,00	100	2.147,00	100	2.196,00	100	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
<b>1.01.02.04.</b>	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA</b>					<b>27.632,87</b>		<b>27.107,61</b>		<b>27.750,82</b>		<b>28.408,15</b>		<b>28.754,02</b>		
<b>0.00.00.1.01.02.04.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>4.312,81</b>		<b>3.518,20</b>		<b>3.533,20</b>		<b>3.697,90</b>		<b>3.619,90</b>		
0.00.00.1.01.02.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	3.714,37	100	3.192,30	100	3.197,30	100	3.272,00	100	3.278,00	100	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
0.00.00.1.01.02.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	347,98	100	165,90	100	175,90	100	245,90	100	181,90	100	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
0.00.00.1.01.02.04.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	Persen	100	0	-	100	80,00	100	80,00	100	80,00	100	80,00	80	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
0.00.00.1.01.02.04.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Presentase peningkatan kualitas SDM Aparatur Perangkat Daerah	Persen	100	100	250,46	100	80,00	100	80,00	100	100,00	100	80,00	100	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
<b>1.01.02.1.01.02.04.</b>	<b>KESEHATAN</b>					<b>23.320,06</b>		<b>23.589,41</b>		<b>24.217,62</b>		<b>24.710,25</b>		<b>25.134,12</b>		
1.01.02.1.01.02.04.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	Persen	100	0	-	100	10,00	100	10,00	100	10,00	100	10,00	80	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
1.01.02.1.01.02.04.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Tingkat Akreditasi (%)	Persen	0	0	-	100	55,00	90	50,00	87	48,00	90	50,00	73,4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
1.01.02.1.01.02.04.25.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Cakupan Pengadaan,Peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit (%)	Persen	0	0	-	90	20,00	90	40,00	90	40,00	90	40,00	72	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
1.01.02.1.01.02.04.26.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan Pengadaan,Peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit (%)	Persen	100	100	17.320,06	100	17.424,41	100	17.514,41	100	17.552,25	100	17.464,12	100	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

1.01.02.1.01.02.04.27.	Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Persen	100	0	-	90	80,00	90	103,21	90	60,00	90	70,00	72	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
1.01.02.1.01.02.04.33.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan peningkatan pelayanan dengan cepat dan berkualitas (%)	Persen	100	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.500,00	100	7.000,00	100	7.500,00	100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
<b>1.01.03.01.</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>					<b>127.761,81</b>		<b>118.421,46</b>		<b>118.748,69</b>		<b>121.305,25</b>		<b>118.800,59</b>		
<b>0.00.00.1.01.03.01.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>11.196,99</b>		<b>10.748,23</b>		<b>10.955,33</b>		<b>11.831,76</b>		<b>10.863,34</b>		
0.00.00.1.01.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	9.850,24	100	9.805,51	100	9.993,75	100	10.793,25	100	9.918,27	100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
0.00.00.1.01.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	798,15	100	558,71	100	569,88	100	615,47	100	560,08	100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
0.00.00.1.01.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan pegawai	Persen	100	100	37,50	100	26,25	100	26,78	100	28,92	100	26,34	100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
0.00.00.1.01.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	280,00	100	196,00	100	199,92	100	215,91	100	196,48	100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
0.00.00.1.01.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100	100	231,10	100	161,77	100	165,01	100	178,21	100	162,17	100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
<b>1.01.03.1.01.03.01.</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>					<b>116.564,81</b>		<b>107.673,23</b>		<b>107.793,36</b>		<b>109.473,49</b>		<b>107.937,24</b>		
1.01.03.1.01.03.01.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah panjang Jalan dalam kondisi baik	KM	22,73	227	87.231,97	211,9	81.405,52	210	80.918,81	217	83.535,32	218	83.824,68	1083,98	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Jumlah Jembatan yang terbangun	Unit	75	41	-	45	-	0	-	0	-	0	-	86	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.01.17.	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Panjang turap di wilayah aliran sungai rawan longsor dalam kondisi baik	Meter	250	165	716,09	115	501,26	117	511,28	126	552,19	115	502,49	638	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.01.18.	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	17,57	18	10.213,63	18,29	6.073,88	21	7.073,79	24	8.301,28	23	7.774,18	20,772	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	1,23	6,17	-	6,17	-	0	-	0	-	0	-	2,468	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

1.01.03.1.01.03.01.19.	Program rehabilitasi/pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	Proporsi Turap/Talud/Bronjong yang di rehabilitasi/Peliharaha	Persen	100	0	-	20	164,57	20	167,87	22	181,30	20	164,98	16,4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.01.23.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah Laboratorium Bahan Konstruksi dan Alat-alat berat	Persen	13,37	13	418,36	21,66	455,71	22	464,82	19	419,39	18	381,64	18,806	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.01.24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rasio jaringan Irigasi dan luas irigasi kondisi baik	Persen	20	15	4.017,32	15,69	3.944,57	15	3.959,29	15	4.019,31	15	3.946,38	15,056	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.01.25.	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Persentase Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persen	100	0	-	20	160,93	20	164,14	18	149,37	16	135,93	14,8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.01.28.	Program pengendalian banjir	Panjang parit (anak sungai) dalam kondisi baik	KM	70	50	12.403,94	50	12.371,34	51	12.721,99	46	11.577,01	42	10.535,08	239	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.01.31.	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase Pengembangan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	Persen	100	100	164,24	100	149,46	100	152,45	92	138,73	84	126,25	95,2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.01.32.	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase Peningkatan kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan bersertifikat	Persen	100	100	304,16	100	276,78	100	282,32	92	256,91	84	233,79	95,2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.01.33.	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Cakupan Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Persen	100	100	153,69	100	139,86	100	142,66	92	129,82	84	118,14	95,2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.01.34.	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Peningkatan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang yang tersedia	Persen	100	100	689,39	100	1.800,00	55	1.000,00	0	-	0	-	51	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.01.35.	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Penyusunan Norma Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang	Persen	100	100	228,79	100	208,20	100	212,36	92	193,25	84	175,86	95,2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.01.36.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Koordinasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota	Persen	100	100	23,24	100	21,15	100	21,57	92	19,63	84	17,86	95,2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
<b>1.01.04.01.</b>	<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>					<b>66.024,64</b>		<b>63.198,71</b>		<b>63.060,49</b>		<b>65.105,74</b>		<b>63.102,01</b>		
<b>0.00.00.1.01.04.01.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>2.873,87</b>		<b>3.298,61</b>		<b>3.998,52</b>		<b>3.786,92</b>		<b>3.743,14</b>		
0.00.00.1.01.04.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	2.474,39	100	2.598,11	100	2.728,02	100	2.864,42	100	3.007,64	100	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

0.00.00.1.01.04.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	131,70	100	425,50	100	945,50	100	615,50	92	395,50	98,4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
0.00.00.1.01.04.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	100	100	50,00	100	50,00	100	100,00	100	67,00	100	100,00	100	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
0.00.00.1.01.04.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	217,78	100	225,00	100	225,00	100	240,00	100	240,00	100	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
<b>1.01.03.1.01.04.01.</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>					<b>9.376,14</b>		<b>10.672,80</b>		<b>10.641,05</b>		<b>12.072,93</b>		<b>9.785,50</b>		
1.01.03.1.01.04.01.16.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terpenuhi	KM	6	4	3.105,57	5,2	4.000,00	5	4.200,00	6	5.050,13	4	3.219,46	24	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.01.03.1.01.04.01.30.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jumlah Sambungan Rumah pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	SR	2900	2000	6.270,57	2130	6.672,80	2056	6.441,05	2241	7.022,80	2095	6.566,05	10522	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
<b>1.01.04.1.01.04.01.</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>					<b>52.322,93</b>		<b>45.840,58</b>		<b>45.385,17</b>		<b>45.179,68</b>		<b>45.063,37</b>		
1.01.04.1.01.04.01.15.	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Permukiman/ Rumah tidak sehat	Unit	5	5	40.034,04	3	26.524,75	3	27.710,00	3	28.140,00	3	29.211,53	17	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
		Proporsi Panjang jalan lingkungan yang dibangun dengan kondisi baik	KM	50	50	-	35	-	0	-	0	-	0	-	85	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.01.04.1.01.04.01.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Rumah tangga dengan sumber air minum dan sanitasi layak	Unit	100	105	10.978,38	108	11.640,83	103	11.195,17	95	10.277,04	85	9.216,92	496	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.01.04.1.01.04.01.17.	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Hektar	2475	5	1.104,60	5	1.125,00	5	1.150,00	4	1.082,65	4	1.054,92	23	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.01.04.1.01.04.01.18.	Program pengelolaan areal pemakaman	Jumlah daya tampung TPU	Lokasi	0	0	-	1	2.550,00	1	1.300,00	1	1.650,00	1	1.400,00	4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

1.01.04.1.01.04.01.19.	Program Penataan Bangunan	Persentase Bangunan/pemukiman yang telah ditata	Persen	18	50	205,92	70	4.000,00	70	4.030,00	70	4.030,00	73	4.180,00	66,6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.02.05.1.01.04.01.	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>					<b>1.451,69</b>		<b>3.386,72</b>		<b>3.035,76</b>		<b>4.066,22</b>		<b>4.510,00</b>		
1.02.05.1.01.04.01.24.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH Publik yang dibangun	Lokasi	4	5	1.451,69	10	3.386,72	8	3.035,76	12	4.066,22	13	4.510,00	48	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
<b>1.01.05.01.</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>					<b>6.688,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.214,82</b>		<b>6.450,81</b>		<b>6.219,61</b>		
<b>0.00.00.1.01.05.01.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>1.888,16</b>		<b>3.594,39</b>		<b>3.569,82</b>		<b>3.815,81</b>		<b>3.578,81</b>		
0.00.00.1.01.05.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi	Persen	0	90	1.062,59	95	2.672,67	99	2.790,82	100	2.886,81	100	2.868,81	96,8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
0.00.00.1.01.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhi Sarana Prasarana	Persen	0	0	-	0	-	95	65,00	90	225,00	95	50,00	56	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
0.00.00.1.01.05.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Terciptanya Keseragaman Pakaian Dinaas Dan Peningkatan Disiplin ASN	Persen	0	90	201,81	95	214,92	0	-	0	-	0	-	37	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
0.00.00.1.01.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kemampuan dan Keterampilan Khusus	Persen	0	75	493,17	80	576,81	80	582,00	79	570,00	73	530,00	77,4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
0.00.00.1.01.05.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Tercapainya Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persen	0	90	130,60	95	130,00	96	132,00	97	134,00	95	130,00	94,6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
<b>1.01.05.1.01.05.01.</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					<b>3.604,05</b>		<b>2.405,61</b>		<b>2.395,00</b>		<b>2.635,00</b>		<b>2.040,80</b>		
1.01.05.1.01.05.01.15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Patroli Siaga Operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	kali	0	96	2.738,43	96	1.443,32	95	1.430,00	93	1.410,00	54	824,80	434	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.01.05.1.01.05.01.16.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan penegakan PERDA dan PERKADA / Kebijakan KDH	kali	0	18	669,33	20	766,00	20	775,00	26	1.025,00	26	1.016,00	110	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.01.05.1.01.05.01.17.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan pemberdayaan petugas linmas	Persen	0	80	196,29	85	196,29	82	190,00	86	200,00	86	200,00	83,8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
<b>3.00.06.1.01.05.01.</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>					<b>1.195,79</b>		<b>-</b>		<b>250,00</b>		<b>-</b>		<b>600,00</b>		

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

3.00.06.1.01.05.01.19.	Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Jumlah Pengamanan Tahapan Pemilu / Pilkada dan Pilkadaes	kali	0	21	1.195,79	0	-	21	250,00	0	-	21	600,00	63	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
<b>1.01.05.02.</b>	<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN</b>					<b>3.679,91</b>		<b>3.500,00</b>		<b>3.625,31</b>		<b>3.762,97</b>		<b>3.628,11</b>		
<b>0.00.00.1.01.05.02.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>1.060,84</b>		<b>1.577,56</b>		<b>2.133,92</b>		<b>2.256,26</b>		<b>2.056,80</b>		
0.00.00.1.01.05.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	777,08	100	985,23	87	866,17	100	1.098,69	100	1.221,90	97,4	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
0.00.00.1.01.05.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Meningkatnya sarana Prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persen	100	100	169,40	100	251,00	100	947,75	100	821,57	100	455,90	100	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
0.00.00.1.01.05.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100	100	38,10	100	264,00	60	160,00	63	168,00	70	185,00	78,6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
0.00.00.1.01.05.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persen	100	0	-	100	15,00	100	43,00	100	45,15	100	65,00	80	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
0.00.00.1.01.05.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase terwujudnya penata usahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persen	100	100	76,26	100	62,33	100	117,00	100	122,85	100	128,99	100	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
0.00.00.1.01.05.02.07.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
<b>1.01.05.1.01.05.02.</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					<b>2.619,07</b>		<b>1.922,44</b>		<b>1.491,39</b>		<b>1.506,71</b>		<b>1.571,31</b>		
1.01.05.1.01.05.02.25.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Warga Negara yang Memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	899,21	100	1.082,44	100	1.159,45	100	1.170,92	100	1.181,85	100	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

1.01.05.1.01.05.02.42.	Program Penanggulangan bahaya Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	100	100	1.719,86	100	840,00	39	331,94	39	335,79	46	389,46	64,8	DINAS SOSIAL
<b>1.01.06.01.</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>					<b>6.893,39</b>		<b>6.500,00</b>		<b>6.732,72</b>		<b>6.988,38</b>		<b>6.737,91</b>		
<b>0.00.00.1.01.06.01.01.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>1.491,76</b>		<b>2.594,94</b>		<b>2.716,51</b>		<b>2.857,68</b>		<b>2.649,41</b>		
0.00.00.1.01.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	1.160,90	100	1.714,62	100	1.772,06	100	1.831,22	100	1.792,16	100	DINAS SOSIAL
0.00.00.1.01.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	179,93	100	688,09	100	746,45	100	822,52	94	647,20	98,8	DINAS SOSIAL
0.00.00.1.01.06.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kemampuan dan Keterampilan Khusus (%)	Persen	100	100	122,13	100	128,24	100	132,08	100	136,05	100	140,13	100	DINAS SOSIAL
0.00.00.1.01.06.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100	100	28,80	100	36,00	100	37,08	100	38,19	100	39,34	100	DINAS SOSIAL
0.00.00.1.01.06.01.07.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (%)	Persen	100	0	-	100	27,99	100	28,83	100	29,69	100	30,59	80	DINAS SOSIAL
<b>1.01.06.1.01.06.01.</b>	<b>SOSIAL</b>					<b>5.401,63</b>		<b>3.905,06</b>		<b>4.016,21</b>		<b>4.130,70</b>		<b>4.088,50</b>		
1.01.06.1.01.06.01.15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase masyarakat yang menerima bantuan	Persen	100	100	1.786,74	100	696,01	100	716,89	100	738,40	100	760,55	100	DINAS SOSIAL
1.01.06.1.01.06.01.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	Persen	100	100	1.163,53	100	1.274,63	100	1.312,87	100	1.352,25	100	1.392,82	100	DINAS SOSIAL
1.01.06.1.01.06.01.18.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah cacat fisik dan mental yang mendapat bantuan	Persen	100	100	84,12	100	79,77	100	82,17	100	84,63	100	87,17	100	DINAS SOSIAL
1.01.06.1.01.06.01.20.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah eks Penyandang Penyakit Sosial yang diberikan Pelatihan SDM dan Bantuan	Persen	100	100	182,74	100	188,48	100	194,14	100	199,96	56	105,96	91,2	DINAS SOSIAL
1.01.06.1.01.06.01.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penerima Bantuan dan Pelatihan Peningkatan SDM	Persen	100	100	703,61	100	385,70	100	397,27	100	409,19	100	421,46	100	DINAS SOSIAL
1.01.06.1.01.06.01.25.	Program Keluarga Harapan	Jumlah Rumah Tangga Program Keluarga Harapan yang dibina	Persen	100	100	437,54	100	459,42	100	473,20	100	487,40	100	502,02	100	DINAS SOSIAL



RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

1.01.06.1.01.06.01.30.	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Jumlah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Persen	100	100	405,89	100	200,00	100	200,00	100	200,00	100	200,00	100	DINAS SOSIAL
1.01.06.1.01.06.01.32.	Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah Perjuang Kemerdekaan, Veteran yang ditangani	Persen	100	100	287,73	100	302,12	100	311,18	100	320,52	100	330,14	100	DINAS SOSIAL
1.01.06.1.01.06.01.33.	Program Penanganan Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Terehabilitasi dan terbantunya Pengemis, Gelandangan serta terkirimnya Orang Terlantar	Persen	100	100	349,72	100	318,92	100	328,49	100	338,35	90	288,38	98	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
<b>1.02.01.01.</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>					<b>1.255,90</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.553,71</b>		<b>1.612,70</b>		<b>1.554,90</b>		
<b>0.00.00.1.02.01.01.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>689,43</b>		<b>720,00</b>		<b>723,71</b>		<b>729,70</b>		<b>724,90</b>		
0.00.00.1.02.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	588,46	100	547,40	100	551,11	100	552,10	99	547,30	99,8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
0.00.00.1.02.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	28,80	100	88,80	100	88,80	100	88,80	100	88,80	100	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
0.00.00.1.02.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	56,68	100	63,80	100	63,80	100	63,80	100	63,80	100	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
0.00.00.1.02.01.01.07.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	15,49	100	20,00	100	20,00	100	25,00	100	25,00	100	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
<b>1.02.01.1.02.01.01.</b>	<b>KETENAGAKERJAAN</b>					<b>447,79</b>		<b>570,00</b>		<b>610,00</b>		<b>656,00</b>		<b>610,00</b>		
1.02.01.1.02.01.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja/tenaga kerja yang di latih	Orang	0	5	19,50	20	80,00	21	85,00	21	85,00	20	80,00	87	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.02.01.1.02.01.01.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persen	3,43	55	111,60	55	345,00	58	370,00	65	410,00	59	375,00	58,4	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.02.01.1.02.01.01.17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kasus yang diselesaikan melalui PB	Persen	33,33	70	316,69	50	145,00	53	155,00	55	161,00	53	155,00	56,2	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
<b>2.00.08.1.02.01.01.</b>	<b>TRANSMIGRASI</b>					<b>118,69</b>		<b>210,00</b>		<b>220,00</b>		<b>227,00</b>		<b>220,00</b>		
2.00.08.1.02.01.01.15.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Cakupan bina transmigrasi dan penempatan transmigrasi lokal	KK	225	225	98,03	550	180,00	574	188,00	592	194,00	574	188,00	2515	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

2.00.08.1.02.01.01.16.	Program Transmigrasi Lokal	Cakupan bina transmigrasi	KK	225	225	20,66	325	30,00	346	32,00	357	33,00	346	32,00	1599	DINAS KETAHANAN PANGAN
<b>1.02.03.01.</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>					<b>1.493,68</b>		<b>3.500,00</b>		<b>3.553,71</b>		<b>3.612,70</b>		<b>3.554,90</b>		
<b>0.00.00.1.02.03.01.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>625,60</b>		<b>792,20</b>		<b>796,71</b>		<b>811,71</b>		<b>797,90</b>		
0.00.00.1.02.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	538,09	100	582,20	100	582,40	100	582,40	100	582,40	100	DINAS KETAHANAN PANGAN
0.00.00.1.02.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	32,50	100	65,00	100	69,31	100	79,31	100	70,50	100	DINAS KETAHANAN PANGAN
0.00.00.1.02.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Terwujudnya Penata Usahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	55,01	100	80,00	100	80,00	100	80,00	100	80,00	100	DINAS KETAHANAN PANGAN
0.00.00.1.02.03.01.07.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	Persen	100	0	-	100	65,00	100	65,00	100	70,00	100	65,00	80	DINAS KETAHANAN PANGAN
<b>1.02.03.1.02.03.01.</b>	<b>PANGAN</b>					<b>868,08</b>		<b>2.707,80</b>		<b>2.757,00</b>		<b>2.801,00</b>		<b>2.757,00</b>		
1.02.03.1.02.03.01.15.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Persen	85,9	88	868,08	89,9	2.707,80	91	2.757,00	92	2.801,00	91	2.757,00	90,36	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Persentase peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Persen	85,9	88	-	89,9	-	0	-	0	-	0	-	35,56	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
<b>1.02.05.01.</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN</b>					<b>10.445,05</b>		<b>12.000,00</b>		<b>12.358,03</b>		<b>12.751,35</b>		<b>12.366,02</b>		
<b>0.00.00.1.02.05.01.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>1.908,50</b>		<b>2.212,72</b>		<b>2.230,32</b>		<b>2.222,53</b>		<b>2.295,53</b>		
0.00.00.1.02.05.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	1.651,84	100	1.986,66	100	2.018,76	100	2.069,39	100	2.083,74	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
0.00.00.1.02.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	19,00	100	146,00	95	140,00	54	80,00	86	127,00	87	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
0.00.00.1.02.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan ASN yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus	Persen	100	100	23,00	100	50,00	80	40,00	80	40,00	100	50,00	92	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

0.00.00.1.02.05.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tercapainya penyusunan dokumen capaian kinerja dan keuangan	Persen	100	100	118,00	100	30,06	100	31,56	100	33,14	100	34,80	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
0.00.00.1.02.05.01.07.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya rencana kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persen	100	100	96,66	0	-	0	-	0	-	0	-	20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
<b>1.02.05.1.02.05.01.</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>					<b>8.536,55</b>		<b>9.787,28</b>		<b>10.127,71</b>		<b>10.528,82</b>		<b>10.070,49</b>		
1.02.05.1.02.05.01.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pengurangan dan Penanganan Timbulan Sampah	Ton	0	18	6.955,17	22	8.742,60	22	8.845,60	22	9.096,60	22	8.755,79	106,25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
1.02.05.1.02.05.01.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Pemantauan, Pengawasan, Tindak Lanjut Pengaduan Dugaan Kasus Lingkungan dan Penghargaan Lingkungan Tingkat Nasional	Kegiatan usaha	0	23	290,97	23	421,34	28	522,78	29	536,07	29	544,00	132	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
1.02.05.1.02.05.01.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Tutupan Lahan Hijau	Pembinaan	0	2	139,30	2	282,68	2	362,56	2	406,05	2	346,70	10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
1.02.05.1.02.05.01.18.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Persentase Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persen	0	80	973,71	0	-	0	-	0	-	0	-	16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
1.02.05.1.02.05.01.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun	Dokumen	0	2	107,84	2	128,00	2	134,00	2	152,00	2	156,00	10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
1.02.05.1.02.05.01.20.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah Pengujian Emisi/Polusi Udara dan Penyuluhan	Pengujian	0	7	69,55	20	212,67	24	262,78	31	338,11	25	268,00	107	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
<b>1.02.06.01.</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					<b>4.626,62</b>		<b>4.367,30</b>		<b>4.456,81</b>		<b>4.555,14</b>		<b>4.458,81</b>		
<b>0.00.00.1.02.06.01.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>2.047,32</b>		<b>1.942,99</b>		<b>1.989,61</b>		<b>2.107,62</b>		<b>2.022,09</b>		
0.00.00.1.02.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	1.307,82	100	1.292,37	100	1.318,97	100	1.351,35	100	1.320,22	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
0.00.00.1.02.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	675,15	100	583,05	100	600,64	100	683,81	100	631,88	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

0.00.00.1.02.06.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	64,35	100	67,57	100	70,00	100	72,45	100	70,00	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
<b>1.02.06.1.02.06.01.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					<b>2.579,30</b>		<b>2.424,31</b>		<b>2.467,20</b>		<b>2.447,52</b>		<b>2.436,71</b>		
1.02.06.1.02.06.01.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	Persen	100	90	2.579,30	90	1.886,80	90	1.887,48	90	1.888,30	90	1.887,48	90	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.02.06.1.02.06.01.16.	Program Penataan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persen	0	0	-	100	287,14	100	324,34	100	298,74	100	293,19	80	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.02.06.1.02.06.01.17.	Program Penataan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penataan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen	0	0	-	100	100,00	100	102,00	100	104,04	100	102,50	80	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.02.06.1.02.06.01.18.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	0	0	-	100	50,00	100	51,00	100	52,02	100	51,20	80	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.02.06.1.02.06.01.19.	Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	persentase OPD/Lembaga Pengguna Daerah yang menggunakan Data Kependudukan	Persen	0	0	-	100	100,37	100	102,38	100	104,42	100	102,34	80	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
<b>1.02.07.01.</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>					<b>18.153,11</b>		<b>17.500,00</b>		<b>20.126,56</b>		<b>18.814,87</b>		<b>20.320,53</b>		
<b>0.00.00.1.02.07.01.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>1.067,40</b>		<b>1.292,92</b>		<b>1.324,05</b>		<b>1.365,68</b>		<b>1.524,05</b>		
0.00.00.1.02.07.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	945,23	90	1.035,67	91	1.049,05	91	1.055,68	91	1.049,05	92,6	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
0.00.00.1.02.07.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	73,73	90	210,85	96	225,00	100	260,00	100	425,00	97,2	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
0.00.00.1.02.07.01.07.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	48,43	90	46,40	96	50,00	96	50,00	96	50,00	95,6	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
<b>1.02.07.1.02.07.01.</b>	<b>PEMBERDAYAAN</b>					<b>17.085,72</b>		<b>16.207,08</b>		<b>18.802,51</b>		<b>17.449,19</b>		<b>18.796,48</b>		

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

MASYARAKAT DAN DESA																
1.02.07.1.02.07.01.16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Lembaga Lembaga Ekonomi yang Aktif Membangun Desa	BUM Desa	102	20	720,54	25	1.444,11	19	1.100,00	21	1.250,00	15	900,00	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.02.07.1.02.07.01.17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persen	100	100	12.117,61	90	12.344,19	90	12.349,19	91	12.549,19	89	12.299,19	92	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.02.07.1.02.07.01.18.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pelatihan	Orang	100	197	78,41	197	540,00	109	300,00	273	750,00	164	450,00	940	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.02.07.1.02.07.01.19.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Jumlah Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) PKK di Desa/Kelurahan	Desa/Kel	236	236	945,77	236	1.000,00	236	1.000,00	236	1.000,00	236	1.000,00	236	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.02.07.1.02.07.01.25.	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	18	15	1.777,50	0	-	0	-	0	-	0	-	15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.02.07.1.02.07.01.26.	Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berbasis Sistem Informasi	Orang	197	197	110,45	197	248,79	158	200,00	395	500,00	197	250,00	1144	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.02.07.1.02.07.01.27.	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Kawasan Pedesaan	Jumlah Pemetaan Kawasan Pedesaan	Desa	10	19	63,43	44	150,00	29	100,00	88	300,00	44	150,00	224	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.02.07.1.02.07.01.28.	Program Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Penataan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa	197	36	91,14	45	280,00	32	200,00	128	800,00	64	400,00	197	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.02.07.1.02.07.01.29.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa	96	43	1.180,87	50	200,00	197	3.553,33	75	300,00	197	3.347,30	197	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.02.08.01.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					9.861,61		9.750,46		9.857,87		9.975,86		9.860,26		

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

<b>0.00.00.1.02.08.01.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>973,94</b>		<b>1.019,50</b>		<b>998,46</b>		<b>1.013,84</b>		<b>1.189,81</b>		
0.00.00.1.02.08.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	778,44	100	745,44	100	775,46	100	788,84	99	744,81	99,8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
0.00.00.1.02.08.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	145,50	100	224,06	60	135,00	60	135,00	100	365,00	84	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
0.00.00.1.02.08.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	100	0	-	0	-	100	33,00	100	35,00	100	30,00	60	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
0.00.00.1.02.08.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	0	-	0	-	100	5,00	100	5,00	100	5,00	60	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
0.00.00.1.02.08.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	50,00	100	50,00	100	50,00	100	50,00	90	45,00	98	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
<b>1.02.02.1.02.08.01.</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					<b>1.376,11</b>		<b>1.260,50</b>		<b>1.248,95</b>		<b>1.350,87</b>		<b>1.210,00</b>		

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

1.02.02.1.02.08.01.15.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan OPD yang menggunakan Data gender dan anak dalam pembangunan Daerah	Persen	0	0	-	7,463	50,00	7	50,00	7	50,00	7	50,00	5,6926	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.02.02.1.02.08.01.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Bahan Informasi terkait Gender dan Anak serta Perlindungan dan Pemenuhan Anak	Persen	100	100	354,31	100	290,00	86	250,00	100	320,00	82	240,00	93,6	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.02.02.1.02.08.01.17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan Advokasi Perlindungan Perempuan terhadap tindak Kekerasan	Persen	100	100	91,86	100	80,00	100	80,00	100	80,00	100	80,00	100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.02.02.1.02.08.01.18.	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Jumlah Kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Kebijakan	0	2	745,39	2	660,50	2	688,95	2	720,87	1	660,00	9	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.02.02.1.02.08.01.20.	Program Pengembangan Kota Layak Anak	Angka Implementasi Pencapaian Kab layak Anak (KLA)	Poin	500	600	184,54	600	180,00	600	180,00	600	180,00	600	180,00	3000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.02.08.1.02.08.01.	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>					<b>7.511,57</b>		<b>7.470,46</b>		<b>7.610,46</b>		<b>7.611,15</b>		<b>7.460,46</b>		

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

1.02.08.1.02.08.01.15.	Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Persen	18,61	18	1.771,89	17,5	1.565,80	17	1.580,80	17	1.580,80	17	1.565,80	17,3	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.02.08.1.02.08.01.16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Remaja yang mengikuti Materi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Persen	100	100	71,23	100	145,00	100	180,00	100	180,69	100	145,00	100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.02.08.1.02.08.01.17.	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase Pengguna Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	17,22	18	73,26	19,76	173,26	19	173,26	19	173,26	19	173,26	19,05	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.02.08.1.02.08.01.18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	Jumlah Kampung KB yang dibina	Kecamatan	14	20	5.337,86	20	5.296,40	20	5.316,40	20	5.316,40	20	5.296,40	100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.02.08.1.02.08.01.20.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa.	Persen	35	45	188,48	55	170,00	64	200,00	64	200,00	51	160,00	55,8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

1.02.08.1.02.08.01.21.	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Cakupan Advokasi tentang Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Persen	100	0	-	100	60,00	100	100,00	100	100,00	100	60,00	80	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.02.08.1.02.08.01.23.	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase Cakupan Anggota Poktan Ber-KB	Persen	82,48	84	68,85	85,68	60,00	85	60,00	85	60,00	85	60,00	84,952	DINAS PERHUBUNGAN
<b>1.02.09.01.</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>					<b>18.402,91</b>		<b>13.800,00</b>		<b>14.158,03</b>		<b>14.551,35</b>		<b>14.166,02</b>		
<b>0.00.00.1.02.09.01.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>1.320,17</b>		<b>4.004,06</b>		<b>4.124,00</b>		<b>4.092,92</b>		<b>4.091,17</b>		
0.00.00.1.02.09.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	7	75	1.172,46	80	2.571,63	84	2.731,23	86	2.770,15	86	2.793,40	82,2	DINAS PERHUBUNGAN
0.00.00.1.02.09.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	200	75	124,95	80	330,62	41	170,00	84	350,00	42	175,00	64,4	DINAS PERHUBUNGAN
0.00.00.1.02.09.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	50	0	-	70	131,30	0	-	0	-	79	150,00	29,8	DINAS PERHUBUNGAN
0.00.00.1.02.09.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	0	60	22,77	70	520,52	100	822,77	77	572,77	77	572,77	76,8	DINAS PERHUBUNGAN
0.00.00.1.02.09.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	0	-	100	450,00	88	400,00	88	400,00	88	400,00	72,8	DINAS PERHUBUNGAN
<b>1.02.09.1.02.09.01.</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>					<b>17.082,74</b>		<b>9.795,94</b>		<b>10.034,03</b>		<b>10.458,43</b>		<b>10.074,85</b>		
1.02.09.1.02.09.01.15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan Dokumen Standar Perhubungan	Persen	50	60	181,93	70	250,00	0	-	0	-	98	350,00	45,6	DINAS PERHUBUNGAN
1.02.09.1.02.09.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Persen	40	50	1.787,09	60	1.200,00	60	1.200,00	60	1.200,00	60	1.200,00	58	DINAS PERHUBUNGAN

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

1.02.09.1.02.09.01.17.	Program peningkatan pelayanan angkutan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan angkutan	Persen	50	60	3.561,36	70	2.800,00	79	3.175,00	81	3.250,00	81	3.250,00	74,2	DINAS PERHUBUNGAN
1.02.09.1.02.09.01.18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persen	50	60	9.682,84	70	5.545,94	71	5.659,03	71	5.700,00	66	5.274,85	67,6	DINAS PERHUBUNGAN
1.02.09.1.02.09.01.20.	Program peningkatan kelaitan pengoperasian kendaraan bermotor	Tingkat Kendaraan bermotor Laik Jalan	Persen	50	60	1.869,52	0	-	0	-	70	308,43	0	-	26	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
<b>1.02.10.01.</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK</b>					<b>14.789,76</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.358,03</b>		<b>10.751,35</b>		<b>10.366,02</b>		
<b>0.00.00.1.02.10.01.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>1.019,08</b>		<b>1.830,19</b>		<b>2.038,02</b>		<b>2.206,86</b>		<b>2.068,86</b>		
0.00.00.1.02.10.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	761,43	100	1.653,91	100	1.705,84	100	1.843,83	100	1.805,83	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
0.00.00.1.02.10.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	130,20	100	127,00	100	220,50	100	250,00	100	150,00	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
0.00.00.1.02.10.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	100	0	-	100	10,00	100	62,40	100	62,40	100	62,40	80	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
0.00.00.1.02.10.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Presentase peningkatan kualitas SDM Aparatur Perangkat Daerah	Persen	100	100	23,20	100	20,00	100	30,00	100	30,00	100	30,00	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
0.00.00.1.02.10.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	104,25	100	19,28	100	19,28	100	20,63	100	20,63	100	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
<b>1.02.10.1.02.10.01.</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					<b>13.334,71</b>		<b>7.769,81</b>		<b>7.920,01</b>		<b>8.144,49</b>		<b>7.897,16</b>		
1.02.10.1.02.10.01.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peersentase Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Persen	20	100	726,94	0	-	0	-	0	-	0	-	20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

1.02.10.1.02.10.01.18.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase Terpenuhinya kerjasama informasi dan media massa.	Persen	100	100	11.788,79	0	-	0	-	0	-	0	-	20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
1.02.10.1.02.10.01.21.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tersedianya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	100	0	-	25	4.844,73	25	4.844,73	25	4.932,49	25	4.844,73	20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
1.02.10.1.02.10.01.23.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK	Persen	0	0	-	100	2.925,09	100	3.075,29	100	3.212,00	100	3.052,43	80	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
1.02.10.1.02.10.01.27.	Program Pengembangan E-Government	Persentase Ketersediaan Jaringan WAN dan Fiber Optik, Jumlah OPD yang Menyelenggarakan E-Government	Persen	20	20	818,98	0	-	0	-	0	-	0	-	4	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
<b>1.02.14.1.02.10.01.</b>	<b>STATISTIK</b>					<b>283,75</b>		<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		
1.02.14.1.02.10.01.15.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase terpenuhinya dokumen/buku informasi pembangunan daerah	Persen	100	100	283,75	0	-	0	-	0	-	0	-	20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
1.02.14.1.02.10.01.16.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya Informasi / Data Daerah	Persen	100	0	-	25	200,00	25	200,00	25	200,00	25	200,00	20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
<b>1.02.15.1.02.10.01.</b>	<b>PERSANDIAN</b>					<b>152,21</b>		<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		
1.02.15.1.02.10.01.15.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan persandian	Persen	20	100	152,21	0	-	0	-	0	-	0	-	20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
1.02.15.1.02.10.01.16.	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase terciptanya pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Persen	100	0	-	25	200,00	25	200,00	25	200,00	25	200,00	20	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
<b>1.02.11.01.</b>	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>					<b>3.267,42</b>		<b>5.500,00</b>		<b>5.625,31</b>		<b>5.762,97</b>		<b>5.628,11</b>		
<b>0.00.00.1.02.11.01.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>925,68</b>		<b>903,30</b>		<b>944,83</b>		<b>960,97</b>		<b>955,63</b>		
0.00.00.1.02.11.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	Persen	100	100	869,93	100	737,95	100	784,63	100	784,73	100	788,94	100	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
0.00.00.1.02.11.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor Dan Pemeliharaan Peralatan Kerja (%)	Persen	100	100	26,00	100	81,76	88	72,20	95	78,25	96	78,69	95,8	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
0.00.00.1.02.11.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Terciptanya Keseragaman Dan Peningkatan Disiplin ASN (%)	Persen	100	100	22,50	100	57,25	100	60,00	100	60,00	100	60,00	100	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

0.00.00.1.02.11.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kemampuan dan Keterampilan Khusus (%)	Persen	100	100	7,25	100	26,35	100	28,00	100	38,00	100	28,00	100	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
<b>1.02.11.1.02.11.01.</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>					<b>2.341,74</b>		<b>4.596,70</b>		<b>4.680,48</b>		<b>4.802,00</b>		<b>4.672,48</b>		
1.02.11.1.02.11.01.15.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah Koperasi Usaha Mikro dan Kecil yang dibina dan difasilitasi	Kelompok UM	87	32	1.444,89	37	1.673,50	37	1.686,25	37	1.694,85	36	1.662,45	179	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.02.11.1.02.11.01.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dan Koperasi yang dilatih	Kelompok	53	220	212,40	730	705,00	737	712,00	742	716,75	738	712,75	3167	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.02.11.1.02.11.01.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pameran dan promosi produk yg diikuti	Kali	10	2	667,33	2	1.634,45	1	1.612,63	2	1.640,85	1	1.606,13	8	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan	Kelompok	47	23	-	25	-	0	-	0	-	0	-	48	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.02.11.1.02.11.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang dibina	Koperasi	249	261	17,12	300	583,75	344	669,60	385	749,55	355	691,15	1645	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>1.02.12.01.</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>					<b>2.235,86</b>		<b>2.200,00</b>		<b>2.278,77</b>		<b>2.365,30</b>		<b>2.280,52</b>		
<b>0.00.00.1.02.12.01.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>970,00</b>		<b>1.420,07</b>		<b>1.299,04</b>		<b>1.522,17</b>		<b>1.416,98</b>		
0.00.00.1.02.12.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	891,06	100	1.132,57	88	1.006,19	100	1.190,95	96	1.090,22	96,8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
0.00.00.1.02.12.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	54,50	100	177,50	100	180,65	100	214,94	100	211,65	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
0.00.00.1.02.12.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	100	0	-	100	40,00	102	40,80	105	42,02	106	42,46	82,6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
0.00.00.1.02.12.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	0	-	100	20,00	102	20,40	105	21,01	102	20,40	81,8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

0.00.00.1.02.12.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	24,44	100	35,00	100	35,70	100	37,49	100	35,70	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
0.00.00.1.02.12.01.07.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	Persen	0	0	-	90	15,00	90	15,30	90	15,76	90	16,55	72	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>1.02.12.1.02.12.01.</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>					<b>1.265,87</b>		<b>779,93</b>		<b>979,73</b>		<b>843,13</b>		<b>863,54</b>		
1.02.12.1.02.12.01.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	Kali	1	2	572,02	2	352,88	2	354,93	2	370,73	2	401,64	10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.12.1.02.12.01.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha	Persen	75	20	458,21	20	110,03	56	311,73	26	143,24	21	116,10	28,6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.12.1.02.12.01.17.	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Jumlah Potensi Daerah	Potensi	0	0	-	1	25,00	1	20,50	1	21,00	1	20,30	4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.12.1.02.12.01.24.	Program Pengendalian dan Penataan Perizinan	Jumlah Perizinan Usaha dan Non Perizinan yang diterbitkan	Izin	957	0	-	500	161,37	493	159,19	534	172,45	565	182,51	2092	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.12.1.02.12.01.25.	Program Penataan Perizinan Tertentu	Jumlah Perizinan Pelaksanaan Daerah yang diterbitkan	Izin	48	100	235,63	105	130,66	107	133,37	109	135,71	114	143,00	535	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
<b>1.02.17.01.</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>					<b>1.557,33</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.553,71</b>		<b>1.612,70</b>		<b>1.554,90</b>		
<b>0.00.00.1.02.17.01.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>741,42</b>		<b>663,20</b>		<b>676,91</b>		<b>722,70</b>		<b>678,11</b>		
0.00.00.1.02.17.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	444,10	100	478,54	100	478,54	100	524,14	100	479,74	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
0.00.00.1.02.17.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	0	90	200,01	90	79,70	100	93,41	100	93,61	100	93,41	96	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

0.00.00.1.02.17.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparaturnya Perangkat Daerah	Persen	100	100	19,96	100	19,96	100	19,96	100	19,96	100	19,96	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
0.00.00.1.02.17.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	0	0	-	20	10,00	20	10,00	20	10,00	20	10,00	16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
0.00.00.1.02.17.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Laporan	0	0	-	2	75,00	2	75,00	2	75,00	2	75,00	8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
0.00.00.1.02.17.01.07.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	Persen	0	100	77,36	0	-	0	-	0	-	0	-	20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
<b>1.02.17.1.02.17.01.</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>					<b>735,91</b>		<b>696,80</b>		<b>726,80</b>		<b>740,00</b>		<b>726,80</b>		
1.02.17.1.02.17.01.15.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Persen	3,88	4	735,91	4,34	696,80	4	726,80	4	740,00	4	726,80	4,09	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
<b>1.02.18.1.02.17.01.</b>	<b>KEARSIPAN</b>					<b>80,00</b>		<b>140,00</b>		<b>150,00</b>		<b>150,00</b>		<b>150,00</b>		
1.02.18.1.02.17.01.16.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase arsip daerah yang disimpan dan dilestarikan pada LKD	Persen	0	5	80,00	5	70,00	5	80,00	5	80,00	5	80,00	5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.02.18.1.02.17.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase pengelolaan Arsip secara baku	Persen	0	0	-	9,9	70,00	9	70,00	9	70,00	9	70,00	7,38	DINAS PERIKANAN
<b>2.00.01.01.</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>					<b>9.856,81</b>		<b>12.304,83</b>		<b>12.627,07</b>		<b>12.981,05</b>		<b>12.634,25</b>		
<b>0.00.00.2.00.01.01.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>1.120,55</b>		<b>2.146,80</b>		<b>2.325,50</b>		<b>2.175,15</b>		<b>2.159,54</b>		
0.00.00.2.00.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	748,63	100	1.419,48	100	1.425,00	100	1.431,15	100	1.436,04	100	DINAS PERIKANAN
0.00.00.2.00.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Kantor Dan Pemeliharaan Peralatan Kerja	Persen	100	100	280,33	100	580,33	100	752,50	100	595,00	97	566,00	99,4	DINAS PERIKANAN
0.00.00.2.00.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin ASN Dinas Perikanan	Persen	100	0	-	90	30,00	90	30,00	90	30,00	90	30,00	72	DINAS PERIKANAN
0.00.00.2.00.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumberdaya Aparatur Dinas Perikanan	Persen	100	0	-	90	15,00	90	15,00	90	15,00	90	22,50	72	DINAS PERIKANAN

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

0.00.00.2.00.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persen	100	0	-	90	10,00	90	10,00	90	10,00	90	10,00	72	DINAS PERIKANAN
0.00.00.2.00.01.01.07.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase Tersusunya Rencana Kerja Dinas Perikanan	Persen	100	100	91,59	100	92,00	100	93,00	100	94,00	100	95,00	100	DINAS PERIKANAN
<b>2.00.01.2.00.01.01.</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					<b>8.736,26</b>		<b>10.158,03</b>		<b>10.301,57</b>		<b>10.805,90</b>		<b>10.474,72</b>		
2.00.01.2.00.01.01.20.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4548	4000	775,49	7400	1.446,50	7788	1.522,50	7955	1.555,00	8159	1.595,00	35302	DINAS PERIKANAN
2.00.01.2.00.01.01.21.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	ton	58361	75000	7.659,22	77000	7.802,09	77172	7.819,57	81335	8.241,36	77400	7.842,67	387907	DINAS PERIKANAN
2.00.01.2.00.01.01.22.	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Jumlah Penyuluh yang kompeten	orang	29	29	62,85	200	487,85	220	537,85	240	587,85	251	612,85	940	DINAS PERIKANAN
2.00.01.2.00.01.01.24.	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Persentase Penyerapan Teknologi Tepat Guna Yang Dapat Dikembangkan	Persen	100	100	54,63	100	65,00	100	65,00	100	65,00	100	65,00	100	DINAS PERIKANAN
2.00.01.2.00.01.01.29.	Program Optimalisasi Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Perikanan	Ketersediaan pangan dan Konsumsi Ikan Perkapita Tahun	Kg/Kapita/Th	39,77	40	184,09	39,75	356,60	39	356,65	39	356,70	40	359,20	197,52	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
<b>2.00.02.01.</b>	<b>DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN</b>					<b>26.806,12</b>		<b>19.665,61</b>		<b>20.263,53</b>		<b>20.920,37</b>		<b>20.276,86</b>		
<b>0.00.00.2.00.02.01.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>2.561,99</b>		<b>4.010,00</b>		<b>4.106,00</b>		<b>4.214,76</b>		<b>4.361,25</b>		
0.00.00.2.00.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	1.865,15	100	2.018,95	100	2.079,00	100	2.117,76	100	2.153,25	100	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
0.00.00.2.00.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Yang Sesuai dengan Syandar Kerja	Persen	100	100	264,32	100	878,09	98	862,00	100	977,00	100	1.050,00	99,6	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
0.00.00.2.00.02.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Meningkatnya Kualitas Sumberdaya ASN	Persen	100	0	-	100	34,40	100	35,00	100	35,00	100	35,00	80	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
0.00.00.2.00.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Meningkatnya Kualitas Sumberdaya ASN	Persen	100	100	6,00	100	10,00	100	10,00	100	10,00	100	13,00	100	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

0.00.00.2.00.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketepatan Penyampaian laporan	Persen	100	100	231,28	100	438,56	100	440,00	100	440,00	100	460,00	100	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
0.00.00.2.00.02.01.07.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase Ketepatan Penyampaian laporan	Persen	100	100	195,24	100	630,00	100	680,00	100	635,00	100	650,00	100	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
<b>1.02.13.2.00.02.01.</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>					<b>14.805,41</b>		<b>5.990,00</b>		<b>5.800,00</b>		<b>5.880,00</b>		<b>5.430,00</b>		
1.02.13.2.00.02.01.15.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase wirasaha muda	Persen	20	0	-	90	200,00	90	200,00	90	200,00	45	100,00	63	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
1.02.13.2.00.02.01.16.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	20	90	1.387,10	90	1.230,00	93	1.280,00	79	1.080,00	79	1.080,00	86,2	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
1.02.13.2.00.02.01.17.	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Cakupan pembinaan wirasaha muda	Persen	20	0	-	90	100,00	90	100,00	90	100,00	90	100,00	72	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
1.02.13.2.00.02.01.19.	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah Cabang olahraga yang dibina	Cabor	7	0	-	0	-	7	150,00	7	100,00	9	150,00	23	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
1.02.13.2.00.02.01.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	20	90	1.462,26	90	1.210,00	60	820,00	85	1.150,00	55	750,00	76	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
1.02.13.2.00.02.01.23.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Yang Disediakan	Unit	0	200	11.956,05	55	3.250,00	55	3.250,00	55	3.250,00	55	3.250,00	420	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
<b>1.02.16.2.00.02.01.</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>					<b>4.396,61</b>		<b>3.050,00</b>		<b>4.091,92</b>		<b>4.100,00</b>		<b>3.800,00</b>		
1.02.16.2.00.02.01.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Pengembangan Budaya Daerah	Tampilan Kesenian	6	11	944,82	11	1.050,00	12	1.150,00	12	1.150,00	8	850,00	54	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
1.02.16.2.00.02.01.16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan	Kegiatan	0	7	183,95	7	700,00	10	1.000,00	10	1.000,00	10	1.000,00	44	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
1.02.16.2.00.02.01.18.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Keragaman Kebudayaan Daerah	Festival Budaya Daerah	2	1	591,51	1	200,00	3	650,00	3	650,00	3	650,00	11	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN



RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

1.02.16.2.00.02.01.21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Jumlah Bangunan Bernilai Sejarah	Unit	0	10	2.676,33	5	1.100,00	5	1.291,92	5	1.300,00	5	1.300,00	30	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
<b>2.00.02.2.00.02.01.</b>	<b>PARIWISATA</b>					<b>5.042,11</b>		<b>6.615,61</b>		<b>6.265,61</b>		<b>6.725,61</b>		<b>6.685,61</b>		
2.00.02.2.00.02.01.12.	Program Pengembangan Kelembagaan Dan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM yang Dilatih	Orang	0	0	-	180	100,00	540	300,00	540	300,00	720	400,00	1980	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
2.00.02.2.00.02.01.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Promosi Yang Dilaksanakan	Pameran	2	0	-	5	500,00	3	350,00	3	300,00	3	350,00	14	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
2.00.02.2.00.02.01.16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Sarana dan Pariwisata	daya tarik	2	0	-	2	300,00	2	350,00	2	410,00	1	260,00	7	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
2.00.02.2.00.02.01.17.	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Kemitraan Pariwisata	Kerjasama	0	0	-	20	100,00	20	100,00	20	100,00	0	-	60	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
2.00.02.2.00.02.01.21.	Program Peningkatan Kebijakan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah	Dokumen	0	0	-	1	250,00	0	-	1	250,00	1	100,00	3	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
2.00.02.2.00.02.01.22.	Program Pengembangan Industri Pariwisata	Persentase Pelaku Usaha Pariwisata Yang Memiliki TDUP	Persen	100	0	-	90	200,00	45	100,00	100	400,00	100	400,00	67	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
2.00.02.2.00.02.01.23.	Program Pengembangan dan Pelestarian Daya Tarik Wisata Unggulan	Jumlah Event Pariwisata	Event	0	5	1.773,96	4	950,00	4	950,00	4	950,00	4	960,00	21	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
2.00.02.2.00.02.01.24.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	Peserta	20	0	-	50	200,00	25	100,00	0	-	50	200,00	125	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
2.00.02.2.00.02.01.25.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah Prasarana Pariwisata Yang Dibangun	Unit	4	10	2.609,57	10	3.357,03	10	3.357,03	10	3.357,03	10	3.357,03	50	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
2.00.02.2.00.02.01.26.	Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisata	Jumlah Peserta Yang Dilatih	Orang	120	50	658,58	50	658,58	50	658,58	50	658,58	50	658,58	250	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

2.00.03.01.		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN					7.213,29	11.600,00	11.850,62	12.125,95	11.856,21					
0.00.00.2.00.03.01.	NON URUSAN					1.069,29	1.740,00	1.614,01	1.419,00	1.880,75						
0.00.00.2.00.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	761,43	100	796,00	93	748,01	94	749,00	100	811,00	97,4	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
0.00.00.2.00.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	98,32	100	525,50	69	366,00	19	105,00	87	459,75	75	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
0.00.00.2.00.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	100	100	52,00	100	73,50	100	125,00	100	150,00	100	175,00	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
0.00.00.2.00.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	9,73	100	20,00	100	25,00	100	35,00	100	40,00	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
0.00.00.2.00.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	74,63	100	175,00	100	180,00	100	200,00	100	220,00	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
0.00.00.2.00.03.01.07.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	73,18	100	150,00	100	170,00	100	180,00	100	175,00	100	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
1.02.03.2.00.03.01.	PANGAN					1.886,83	3.300,00	3.271,35	2.956,95	3.100,00						
1.02.03.2.00.03.01.15.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Produktifitas tanaman pangan dan hortikultura (%)	Persen	0	40	1.886,83	41	3.300,00	40	3.271,35	36	2.956,95	38	3.100,00	39,018	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
2.00.03.2.00.03.01.	PERTANIAN					4.257,17	6.560,00	6.965,27	7.750,00	6.875,46						
2.00.03.2.00.03.01.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan bina kelompok petani	Kelompok Tani	80	100	594,35	200	1.250,00	183	1.147,50	136	850,00	156	975,46	775	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
2.00.03.2.00.03.01.16.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	kali	3	3	147,37	3	200,00	3	200,00	3	200,00	3	200,00	15	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

2.00.03.2.00.03.01.17.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Produksi sektor tanaman pangan	Ton	87,32	101	143,47	600	950,00	694	1.100,00	663	1.050,00	442	700,00	2499,95	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
2.00.03.2.00.03.01.18.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi sektor perkebunan	Persen	0	0	-	0	-	80	197,77	80	300,00	0	-	32	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
2.00.03.2.00.03.01.19.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah Pertemuan penyuluh pendamping petani	Kali	0	50	1.818,85	50	1.853,41	50	1.853,41	62	2.303,41	47	1.753,41	259	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
2.00.03.2.00.03.01.20.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Kesehatan ternak	Persen	0	80	544,75	80	596,59	80	546,59	80	746,59	80	596,59	80	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
2.00.03.2.00.03.01.21.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persen	0	20	934,97	90	1.560,00	100	1.820,00	100	2.150,00	100	2.450,00	82	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
2.00.03.2.00.03.01.22.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Ketersediaan produk pangan asal hewan yang ASUH(Aman,sehat,utuh dan Halal)	kali	0	6	73,41	8	150,00	5	100,00	8	150,00	10	200,00	37	DINAS PERKEBUNAN
<b>2.00.03.02.</b>	<b>DINAS PERKEBUNAN</b>					<b>8.566,65</b>		<b>30.978,84</b>		<b>31.241,56</b>		<b>31.530,15</b>		<b>31.247,42</b>		
<b>0.00.00.2.00.03.02.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>2.795,92</b>		<b>3.922,88</b>		<b>2.668,90</b>		<b>3.392,91</b>		<b>3.116,75</b>		
0.00.00.2.00.03.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	1.295,35	100	1.557,36	100	1.730,52	100	1.892,32	100	1.952,79	100	DINAS PERKEBUNAN
0.00.00.2.00.03.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor dan Pemeliharaan Peralatan Kerja	Persen	100	100	764,61	100	1.763,85	14	254,54	42	750,54	25	451,45	56,2	DINAS PERKEBUNAN
0.00.00.2.00.03.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Terciptanya Keseragaman dan Peningkatan Disiplin ASN	Persen	100	100	145,75	100	92,75	100	127,50	100	174,90	100	120,58	100	DINAS PERKEBUNAN
0.00.00.2.00.03.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	Persen	100	100	52,80	100	33,84	100	35,53	100	46,98	100	53,43	100	DINAS PERKEBUNAN
0.00.00.2.00.03.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Tercapainya Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persen	100	100	305,77	100	273,43	100	305,01	100	306,59	100	316,92	100	DINAS PERKEBUNAN
0.00.00.2.00.03.02.07.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya rencana kerja Badan / Dinas / Instansi / Bagian	Persen	100	100	231,65	100	201,65	100	215,81	100	221,58	100	221,58	100	DINAS PERKEBUNAN

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

<b>1.02.03.2.00.03.02.</b>	<b>PANGAN</b>					<b>1.294,72</b>		<b>1.613,19</b>		<b>2.399,60</b>		<b>2.623,94</b>		<b>2.801,34</b>		
1.02.03.2.00.03.02.15.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Meningkatnya Ketahanan Pangan, Luasan Lahan Peremajaan, Produksi dan Mutu Produk perkebunan	Persen	100	100	1.294,72	100	1.613,19	100	2.399,60	100	2.623,94	100	2.801,34	100	DINAS PERKEBUNAN
<b>2.00.03.2.00.03.02.</b>	<b>PERTANIAN</b>					<b>4.476,01</b>		<b>25.442,77</b>		<b>26.173,05</b>		<b>25.513,31</b>		<b>25.329,34</b>		
2.00.03.2.00.03.02.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan pendapatan Petani Perkebunan dan Pelaku Agribisnis dan Kemampuan Lembaga Petani	Kelompok Tani	3	0	-	5	370,00	9	722,74	8	622,74	7	570,00	29	DINAS PERKEBUNAN
2.00.03.2.00.03.02.16.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Penyebaran Informasi Produk Perkebunan	Persen	100	0	-	100	480,00	100	632,00	100	660,40	100	660,40	80	DINAS PERKEBUNAN
2.00.03.2.00.03.02.17.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase Terwujudnya Penerapan Teknologi tepat guna untuk peningkatan produksi dan penyelamatan kebun masyarakat	Persen	100	100	2.678,71	100	12.894,30	100	16.771,43	100	16.501,07	100	17.380,46	100	DINAS PERKEBUNAN
2.00.03.2.00.03.02.18.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Prasarana dan Sarana Penyelamatan Kebun Masyarakat dan peningkatan Produksi perkebunan	Persen	100	100	772,30	100	9.978,17	58	5.789,44	53	5.338,48	42	4.253,49	70,6	DINAS PERKEBUNAN
2.00.03.2.00.03.02.19.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan dalam menyusun program dan penyebarluasan informasi penyuluhan	Persen	100	100	1.025,00	100	1.720,30	100	2.257,44	100	2.390,62	100	2.464,99	100	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
<b>2.00.06.01.</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>					<b>18.788,51</b>		<b>19.319,82</b>		<b>19.803,17</b>		<b>20.334,15</b>		<b>19.813,95</b>		
<b>0.00.00.2.00.06.01.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>1.592,39</b>		<b>1.741,63</b>		<b>1.702,37</b>		<b>1.836,33</b>		<b>1.972,26</b>		
0.00.00.2.00.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	1.136,21	100	884,07	100	906,92	100	983,95	100	999,88	100	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
0.00.00.2.00.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	60,85	100	153,89	100	159,59	100	171,84	100	171,84	100	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
0.00.00.2.00.06.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	100	0	-	100	120,00	0	-	0	-	100	120,00	40	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

0.00.00.2.00.06.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	0	-	100	100,00	100	150,00	100	150,00	100	150,00	80	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
0.00.00.2.00.06.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	79,64	100	135,62	100	137,80	100	146,80	100	146,80	100	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
0.00.00.2.00.06.01.07.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	315,70	100	348,06	100	348,06	100	383,73	100	383,73	100	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
<b>2.00.06.2.00.06.01.</b>	<b>PERDAGANGAN</b>					<b>11.818,18</b>		<b>12.009,82</b>		<b>13.491,67</b>		<b>14.364,11</b>		<b>14.107,98</b>		
2.00.06.2.00.06.01.15.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan penyelesaian masalah pengaduan konsumen cakupan perlindungan konsumen dan bina kelompok pedagang/usaha sesuai peruntukannya	Persen	100	100	1.191,24	100	1.775,00	100	2.219,80	100	2.358,12	100	2.316,14	100	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.00.06.2.00.06.01.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Cakupan Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persen	100	100	966,57	100	1.030,00	100	1.131,50	100	1.364,20	100	1.365,73	100	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.00.06.2.00.06.01.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan pendataan dan informasi harga	Persen	100	100	7.207,82	100	3.889,82	100	3.919,82	100	4.219,82	100	3.919,82	100	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.00.06.2.00.06.01.19.	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha sesuai peruntukannya	Persen	100	100	502,65	100	515,00	100	561,17	100	610,97	100	610,97	100	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.00.06.2.00.06.01.21.	Program Pengembangan dan Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Cakupan dan Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Persen	100	100	1.949,90	100	4.800,00	100	5.659,38	100	5.811,00	100	5.895,31	100	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
<b>2.00.07.2.00.06.01.</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>					<b>5.377,93</b>		<b>5.568,37</b>		<b>4.609,13</b>		<b>4.133,71</b>		<b>3.733,71</b>		
2.00.07.2.00.06.01.15.	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana peralatan mesin pengolahan kelapa	Persen	100	100	3.590,10	100	2.500,00	84	2.124,40	60	1.500,00	44	1.100,00	77,6	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.00.07.2.00.06.01.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persen	100	100	1.787,83	100	2.368,37	100	2.484,73	100	2.633,71	100	2.633,71	100	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

2.00.07.2.00.06.01.18.	Program Penataan Struktur Industri	Cakupan pertumbuhan Industri	Persen	100	0	-	100	700,00	0	-	0	-	0	-	20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>3.00.01.01.</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>					<b>10.494,01</b>		<b>10.230,18</b>		<b>10.555,99</b>		<b>12.913,91</b>		<b>10.563,26</b>		
<b>0.00.00.3.00.01.01.01.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>3.023,00</b>		<b>3.215,20</b>		<b>3.068,40</b>		<b>3.716,24</b>		<b>3.239,26</b>		
0.00.00.3.00.01.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	1.891,92	100	1.747,60	95	1.677,40	100	1.963,74	100	1.826,26	99	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
0.00.00.3.00.01.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	629,00	100	915,00	94	863,00	100	1.118,00	90	824,00	96,8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
0.00.00.3.00.01.01.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase terciptanya keseragaman pakaian dinas dan peningkatan disiplin Aparatur	Persen	100	0	-	100	47,60	100	48,00	100	49,60	100	49,00	80	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
0.00.00.3.00.01.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Presentase peningkatan kualitas SDM Aparatur Perangkat Daerah (%)	persen	100	100	158,54	100	170,00	88	150,00	100	176,40	100	170,00	97,6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
0.00.00.3.00.01.01.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	238,73	100	235,00	97	230,00	100	282,50	100	250,00	99,4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
0.00.00.3.00.01.01.01.07.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Badan/Dinas/Instansi/Bagian	Persen	100	100	104,81	100	100,00	100	100,00	100	126,00	100	120,00	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>3.00.01.3.00.01.01.01.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>					<b>7.254,15</b>		<b>6.664,98</b>		<b>7.247,59</b>		<b>8.655,87</b>		<b>7.084,00</b>		
3.00.01.3.00.01.01.01.16.	Program Kerjasama Pembangunan	Capaian kerjasama pembangunan daerah (%)	Persen	100	100	111,82	100	650,00	83	540,00	100	850,00	67	440,00	90	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.00.01.3.00.01.01.01.19.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Capaian Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persen	100	100	159,87	100	200,00	100	200,00	100	300,00	100	220,00	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.00.01.3.00.01.01.01.20.	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah	Persen	100	100	75,13	100	230,00	78	180,00	100	300,00	86	200,00	92,8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

3.00.01.3.00.01.01.21.	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Indikator Program Daerah yang terukur	Persen	100	100	4.889,16	100	3.443,81	100	4.555,59	100	4.115,87	100	4.285,00	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.00.01.3.00.01.01.22.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase Realisasi pelaksanaan pencapaian pembangunan bidang ekonomi	Persen	100	100	707,76	100	830,72	82	682,00	100	1.180,00	85	710,00	93,4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.00.01.3.00.01.01.23.	Program perencanaan sosial budaya	Persentase Realisasi pelaksanaan pencapaian pembangunan bidang Sosial Budaya	Persen	100	100	1.310,40	100	1.310,45	83	1.090,00	100	1.910,00	93	1.229,00	95,2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>3.00.04.3.00.01.01.</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>					<b>216,87</b>		<b>350,00</b>		<b>240,00</b>		<b>541,80</b>		<b>240,00</b>		
3.00.04.3.00.01.01.15.	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Realisasi pelaksanaan penelitian dan Pengembangan dalam mendukung Produk Unggulan Daerah	Persen	100	100	216,87	100	350,00	68	240,00	100	541,80	68	240,00	87,2	BADAN PENDAPATAN DAERAH
<b>3.00.02.01.</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>					<b>5.771,52</b>		<b>5.500,00</b>		<b>5.696,92</b>		<b>5.913,24</b>		<b>5.701,31</b>		
<b>0.00.00.3.00.02.01.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>3.274,43</b>		<b>3.216,19</b>		<b>3.532,38</b>		<b>3.808,32</b>		<b>3.688,47</b>		
0.00.00.3.00.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100	100	2.212,89	100	2.663,43	100	2.732,74	100	2.803,50	100	2.879,47	100	BADAN PENDAPATAN DAERAH
0.00.00.3.00.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD (%)	Persen	100	100	693,82	100	329,76	100	484,14	100	744,82	100	541,50	100	BADAN PENDAPATAN DAERAH
0.00.00.3.00.02.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase terciptanya keseragaman pakaian dinas dan peningkatan disiplin Aparatur (%)	Persen	100	100	9,61	100	61,11	100	128,00	100	65,00	100	66,00	100	BADAN PENDAPATAN DAERAH
0.00.00.3.00.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	Persen	100	100	240,59	100	30,70	100	49,12	100	49,12	100	49,12	100	BADAN PENDAPATAN DAERAH
0.00.00.3.00.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD (%)	Persen	100	100	117,52	100	131,19	100	138,38	100	145,88	100	152,38	100	BADAN PENDAPATAN DAERAH

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

3.00.02.3.00.02.01.	KEUANGAN					2.497,09		2.283,81		2.164,54		2.104,92		2.012,84		
3.00.02.3.00.02.01.15.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan target dan realisasi pendapatan daerah (%)	Persen	100	100	2.497,09	100	2.283,81	94	2.164,54	92	2.104,92	88	2.012,84	94,8	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
<b>3.00.02.02.</b>	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>					<b>21.233,71</b>		<b>17.687,50</b>		<b>16.393,00</b>		<b>16.689,00</b>		<b>17.352,00</b>		
0.00.00.3.00.02.02.	NON URUSAN					16.144,04		11.857,50		10.943,00		11.089,00		11.677,00		
0.00.00.3.00.02.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	4.009,86	100	3.717,50	100	3.818,00	100	3.894,00	100	4.017,00	100	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
0.00.00.3.00.02.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	10.746,49	100	6.710,00	84	5.665,00	85	5.715,00	91	6.130,00	92	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
0.00.00.3.00.02.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Presentase peningkatan kualitas SDM Aparatur Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	480,07	100	500,00	100	505,00	100	510,00	100	515,00	100	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
0.00.00.3.00.02.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	907,63	100	930,00	100	955,00	100	970,00	100	1.015,00	100	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.00.02.3.00.02.02.	KEUANGAN					5.089,67		5.830,00		5.450,00		5.600,00		5.675,00		
3.00.02.3.00.02.02.15.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Badan/Dinas/Instansi/Bagian Daerah	Persen	100	100	4.061,80	100	4.680,00	91	4.295,00	93	4.385,00	95	4.455,00	95,8	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.00.02.3.00.02.02.21.	Program Pengelolaan Aset Daerah	Pemutakhiran administrasi pencatatan dan pelaporan aset daerah	Persen	100	100	1.027,87	100	1.150,00	100	1.155,00	100	1.215,00	100	1.220,00	100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
<b>3.00.03.01.</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA</b>					<b>9.941,33</b>		<b>9.500,00</b>		<b>9.840,13</b>		<b>10.213,78</b>		<b>9.847,72</b>		
0.00.00.3.00.03.01.	NON URUSAN					2.008,73		2.134,85		2.435,36		1.932,85		2.010,15		



RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

0.00.00.3.00.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian (%)	Persen	100	100	1.079,93	100	1.097,27	100	1.111,85	100	1.111,85	100	1.111,85	100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
0.00.00.3.00.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana prasarana kantor dan pemeliharaan peralatan kerja	Persen	100	100	320,55	100	871,58	100	1.195,21	79	690,00	88	770,00	93,4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
0.00.00.3.00.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase terciptanya keseragaman dan Peningkatan Disiplin ASN	Persen	100	100	21,20	100	20,00	100	27,30	100	30,00	100	27,30	100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
0.00.00.3.00.03.01.04.	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Persen	100	100	487,42	0	-	0	-	0	-	0	-	20	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
0.00.00.3.00.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus	Persen	100	100	63,63	100	110,00	59	65,00	59	65,00	59	65,00	75,4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
0.00.00.3.00.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tercapainya Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100	100	18,00	100	18,00	100	18,00	100	18,00	100	18,00	100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
0.00.00.3.00.03.01.07.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Badan/Dinas/Instansi/Bagian	Persen	100	100	18,00	100	18,00	100	18,00	100	18,00	100	18,00	100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
<b>3.00.03.3.00.03.01.</b>	<b>KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>					<b>7.932,60</b>		<b>7.365,15</b>		<b>7.404,77</b>		<b>8.280,93</b>		<b>7.837,57</b>		
3.00.03.3.00.03.01.15.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indeks Kepuasan Pelayanan administrasi kepegawaian	Persen	73,06	74	3.127,85	76	4.213,31	76	4.252,94	77	4.275,94	79	4.396,94	76,4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
3.00.03.3.00.03.01.17.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (teknis)	Persentase ASN mengikuti DIKLAT	Persen	50	50	4.804,76	51	3.151,84	51	3.151,84	64	4.005,00	55	3.440,63	54,2	INSPEKTORAT DAERAH
<b>3.00.05.01.</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>					<b>8.889,74</b>		<b>8.500,00</b>		<b>8.804,33</b>		<b>9.138,65</b>		<b>8.811,12</b>		
<b>0.00.00.3.00.05.01.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>3.087,82</b>		<b>3.171,82</b>		<b>3.474,13</b>		<b>3.496,78</b>		<b>3.474,13</b>		

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

0.00.00.3.00.05.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	1.806,10	100	1.890,10	100	2.025,89	100	2.025,89	100	2.025,89	100	INSPEKTORAT DAERAH
0.00.00.3.00.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	608,60	100	608,60	100	674,62	100	674,62	100	674,62	100	INSPEKTORAT DAERAH
0.00.00.3.00.05.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	100	100	37,00	100	37,00	100	42,00	100	42,00	100	42,00	100	INSPEKTORAT DAERAH
0.00.00.3.00.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kemampuan dan Keterampilan Khusus	Persen	100	100	478,78	100	478,78	100	574,27	100	574,27	100	574,27	100	INSPEKTORAT DAERAH
0.00.00.3.00.05.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Tercapainya Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja Dan Keuangan (%)	Persen	100	100	157,35	100	157,35	100	157,35	100	180,00	100	157,35	100	INSPEKTORAT DAERAH
<b>3.00.05.3.00.05.01.</b>	<b>PENGAWASAN</b>					<b>5.801,92</b>		<b>5.328,19</b>		<b>5.330,20</b>		<b>5.641,87</b>		<b>5.336,99</b>		
3.00.05.3.00.05.01.15.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase temuan APIP yang ditindak lanjuti	Persen	100	75	5.020,38	75	4.243,83	73	4.153,70	78	4.455,48	73	4.160,48	74,8	INSPEKTORAT DAERAH
3.00.05.3.00.05.01.16.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan kantor sendiri	Persen	35	100	64,38	100	64,38	100	98,84	100	108,72	100	98,84	100	INSPEKTORAT DAERAH
3.00.05.3.00.05.01.20.	Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Nilai Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.	Nilai	90	92	717,16	94	1.019,98	99	1.077,67	99	1.077,67	99	1.077,67	483	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>3.00.06.01.</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>					<b>8.937,38</b>		<b>8.500,00</b>		<b>8.804,33</b>		<b>9.138,65</b>		<b>8.811,12</b>		
<b>0.00.00.3.00.06.01.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>6.235,48</b>		<b>4.602,22</b>		<b>4.638,10</b>		<b>5.096,00</b>		<b>4.619,00</b>		
0.00.00.3.00.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik	Persen	100	95	1.359,12	95	833,18	100	1.027,10	100	1.083,00	100	1.132,00	98	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0.00.00.3.00.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kecukupan Sarana Kerja Aparatur yang sesuai dengan Standar Kerja	Persen	100	90	3.591,08	90	2.794,60	82	2.566,00	86	2.693,00	69	2.157,00	83,4	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0.00.00.3.00.06.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Terciptanya Keseragaman dan Peningkatan Disiplin ASN	Persen	100	95	35,10	95	64,55	100	75,00	100	80,00	100	80,00	98	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

0.00.00.3.00.06.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan ASN yang memiliki Kemampuan, Keterampilan Khusus dan Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Persen	100	95	1.064,10	95	723,80	100	770,00	100	950,00	100	950,00	98	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
0.00.00.3.00.06.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persen	100	90	186,08	90	186,08	96	200,00	100	290,00	100	300,00	95,2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>1.01.05.3.00.06.01.</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					<b>879,54</b>		<b>748,66</b>		<b>816,23</b>		<b>980,00</b>		<b>1.030,00</b>		
1.01.05.3.00.06.01.15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persen	100	100	108,58	100	151,69	100	370,00	100	380,00	100	380,00	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.01.05.3.00.06.01.16.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persen	100	100	770,96	100	596,97	74	446,23	100	600,00	100	650,00	94,8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>3.00.05.3.00.06.01.</b>	<b>PENGAWASAN</b>					<b>198,55</b>		<b>458,67</b>		<b>500,00</b>		<b>600,00</b>		<b>562,63</b>		
3.00.05.3.00.06.01.15.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kecamatan	0	10	198,55	10	458,67	10	500,00	13	600,00	12	562,63	55	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>3.00.06.3.00.06.01.</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>					<b>1.623,81</b>		<b>2.690,46</b>		<b>2.850,00</b>		<b>2.462,65</b>		<b>2.599,49</b>		
3.00.06.3.00.06.01.15.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah warga negara yang mendapat pelatihan wawasan kebangsaan	Orang	2	300	705,02	363	853,26	404	950,00	417	982,00	352	829,49	1836	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.00.06.3.00.06.01.16.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase kemitraan wawasan kebangsaan yang dikembangkan	Persen	1	80	36,97	80	224,05	100	430,00	100	450,00	100	480,00	92	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.00.06.3.00.06.01.17.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Jumlah warga negara yang mengikuti Pembinaan dan Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Orang	2	200	146,33	230	137,83	333	200,00	166	100,00	250	150,00	1179	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.00.06.3.00.06.01.18.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Pemahaman Politik Masyarakat dan Jumlah Forum-forum Diskusi Politik	Persen	100	90	386,44	90	972,54	71	770,00	53	580,65	43	470,00	69,4	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.00.06.3.00.06.01.19.	Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pilkada dan Pemilu	Persen	0	100	349,05	0	-	0	-	0	-	100	300,00	40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

3.00.06.3.00.06.01.20.	Program Pengembangan dan Kemitraan Ormas	Persentase cakupan Ormas yang dibina	Persen	0	0	-	80	502,78	79	500,00	55	350,00	58	370,00	54,4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
<b>3.00.07.01.</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>					<b>3.196,73</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.107,41</b>		<b>3.225,41</b>		<b>3.109,81</b>		
<b>0.00.00.3.00.07.01.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>950,41</b>		<b>994,57</b>		<b>1.069,01</b>		<b>1.165,41</b>		<b>1.074,81</b>		
0.00.00.3.00.07.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	94	97	653,74	97	581,90	100	629,71	100	684,35	100	655,85	98,8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
0.00.00.3.00.07.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	95	97	143,60	98	174,30	98	174,30	100	214,30	100	204,30	98,6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
0.00.00.3.00.07.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	0	0	-	100	79,20	100	95,00	100	95,00	69	55,00	73,8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
0.00.00.3.00.07.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	95	98	4,88	98	5,00	98	5,00	98	5,00	98	5,00	98	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
0.00.00.3.00.07.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	95	95	50,85	97	55,00	100	60,00	100	61,76	97	55,00	97,8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
0.00.00.3.00.07.01.07.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah	Persen	100	98	97,35	98	99,18	100	105,00	100	105,00	98	99,66	98,8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
<b>3.00.07.3.00.07.01.</b>	<b>PENANGGULANGAN BENCANA</b>					<b>2.246,33</b>		<b>2.005,43</b>		<b>2.038,40</b>		<b>2.060,00</b>		<b>2.035,00</b>		
3.00.07.3.00.07.01.15.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Cakupan Pencegahan dan Penanganan Daerah Rawan Bencana	Persen	95	96	97,22	96	150,00	96	150,00	96	150,00	92	145,00	95,2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.00.07.3.00.07.01.16.	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penanganan Daerah Rawan Bencana	Persen	98	98	1.498,64	98	1.508,40	98	1.508,40	98	1.510,00	98	1.510,00	98	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.00.07.3.00.07.01.17.	Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sementara daerah pasca bencana	Persen	94	95	50,98	95	100,00	95	100,00	100	120,00	95	100,00	96	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

3.00.07.3.00.07.01.18.	Program Penanganan Kedaruratan Dan Logistik Bencana	Persentase Jumlah penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik korban bencana	Persen	98	98	599,49	98	247,03	100	280,00	100	280,00	100	280,00	99,2	SEKRETARIAT DAERAH
<b>4.00.01.02.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>					<b>106.876,36</b>		<b>96.000,00</b>		<b>99.437,13</b>		<b>103.212,98</b>		<b>99.513,79</b>		
<b>0.00.00.4.00.01.02.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>29.267,62</b>		<b>26.128,73</b>		<b>27.230,15</b>		<b>28.205,25</b>		<b>26.800,70</b>		
0.00.00.4.00.01.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persen	100	100	17.217,72	100	16.684,82	100	16.850,46	100	16.990,12	100	17.123,44	100	SEKRETARIAT DAERAH
0.00.00.4.00.01.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	9.523,37	100	6.962,24	100	7.790,75	100	8.538,47	100	7.367,16	100	SEKRETARIAT DAERAH
0.00.00.4.00.01.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	50	100	157,40	100	166,43	100	168,93	100	168,93	100	174,10	100	SEKRETARIAT DAERAH
0.00.00.4.00.01.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	1.544,78	100	1.600,33	100	1.672,35	100	1.706,20	84	1.349,39	96,8	SEKRETARIAT DAERAH
0.00.00.4.00.01.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	824,35	100	714,91	100	747,66	100	801,54	100	786,62	100	SEKRETARIAT DAERAH
<b>3.00.01.4.00.01.02.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>					<b>59,61</b>		<b>58,72</b>		<b>58,72</b>		<b>58,72</b>		<b>58,72</b>		
3.00.01.4.00.01.02.21.	Program perencanaan pembangunan daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kategori)	(Tinggi)	4	100	59,61	100	58,72	100	58,72	100	58,72	100	58,72	100	SEKRETARIAT DAERAH
<b>3.00.02.4.00.01.02.</b>	<b>KEUANGAN</b>					<b>168,18</b>		<b>169,37</b>		<b>169,67</b>		<b>169,67</b>		<b>169,37</b>		
3.00.02.4.00.01.02.16.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas pengelolaan keuangan	Persen	100	100	168,18	100	169,37	100	169,67	100	169,67	100	169,37	100	SEKRETARIAT DAERAH
<b>3.00.03.4.00.01.02.</b>	<b>KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>					<b>566,27</b>		<b>552,09</b>		<b>588,59</b>		<b>635,00</b>		<b>555,12</b>		
3.00.03.4.00.01.02.15.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ketersediaan data informasi Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	70	100	444,50	80	383,47	80	383,47	83	400,00	73	350,00	83,2	SEKRETARIAT DAERAH

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

3.00.03.4.00.01.02.16.	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase pengiriman peserta sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Teknis Luar Daerah	Persen	70	100	121,77	80	168,62	97	205,12	100	235,00	97	205,12	94,8	SEKRETARIAT DAERAH
<b>4.00.01.4.00.01.02.02.</b>	<b>KEPALA DAERAH</b>					<b>76.814,68</b>		<b>69.091,10</b>		<b>71.390,01</b>		<b>74.144,34</b>		<b>71.929,89</b>		
4.00.01.4.00.01.02.15.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan KDH dan Wakil KDH	Persen	100	100	7.762,70	100	7.085,06	100	7.190,65	100	7.490,85	100	7.501,62	100	SEKRETARIAT DAERAH
4.00.01.4.00.01.02.17.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase keselarasan produk hukum daerah dengan produk hukum yang lebih tinggi	Persen	100	75	43,68	0	-	0	-	0	-	0	-	15	SEKRETARIAT DAERAH
4.00.01.4.00.01.02.18.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Persen	68	70	2.185,15	0	-	0	-	0	-	0	-	14	SEKRETARIAT DAERAH
4.00.01.4.00.01.02.20.	Program Pembinaan dan Pengembangan Reformasi Birokrasi	Persentase implementasi agenda reformasi birokrasi sesuai road map reformasi birokrasi	Persen	70	100	100,08	100	140,00	57	80,00	57	80,00	57	80,00	74,2	SEKRETARIAT DAERAH
4.00.01.4.00.01.02.21.	Program Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi Pembangunan	Persentase pelaksanaan koordinasi Bidang Ekonomi Pembangunan	Persen	100	100	1.284,07	100	1.153,40	100	1.194,69	100	1.240,06	100	1.195,62	100	SEKRETARIAT DAERAH
4.00.01.4.00.01.02.22.	Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum	Persentase keluaran Produk Hukum yang berkualitas	Persen	0	0	-	5	797,16	5	797,16	5	797,16	5	797,16	4	SEKRETARIAT DAERAH
4.00.01.4.00.01.02.23.	Program Penataan Kualitas Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase Dokumen dan Informasi yang berkualitas	Persen	0	0	-	100	538,09	100	538,09	100	616,83	100	539,69	80	SEKRETARIAT DAERAH
4.00.01.4.00.01.02.24.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum	Persentase layanan bantuan hukum	Persen	0	0	-	4	666,76	4	738,44	4	738,44	4	738,44	3,2	SEKRETARIAT DAERAH
4.00.01.4.00.01.02.31.	Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan.	Persentase Peningkatan kualitas kehidupan Sosial keagamaan dan kemasyarakatan	Persen	100	100	54.824,28	100	49.245,04	100	51.008,18	100	52.945,08	100	51.047,51	100	SEKRETARIAT DAERAH
4.00.01.4.00.01.02.32.	Program Pembinaan, Koordinasi, Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan pembinaan, koordinasi kebijakan bidang administrasi pembangunan	Persen	100	100	1.460,77	100	1.288,64	100	1.342,64	100	1.402,30	100	1.344,15	100	SEKRETARIAT DAERAH
4.00.01.4.00.01.02.33.	Program Pembinaan, Pelaksanaan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PBJ melalui ULP	Persen	100	100	3.397,74	100	3.051,96	100	3.161,24	100	3.281,27	100	3.163,67	100	SEKRETARIAT DAERAH
		Level Maturitas ULP	(Level)	3	3	-	4	-	0	-	0	-	0	-	4	SEKRETARIAT DAERAH

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

4.00.01.4.00.01.02.34.	Program Hubungan Masyarakat, Dokumentasi, Publikasi Protokol dan Acara	Indeks pelayanan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda	Persen	78	100	3.022,80	80	2.715,18	82	2.812,40	86	2.919,19	82	2.814,56	86	SEKRETARIAT DAERAH
4.00.01.4.00.01.02.35.	Program Pembinaan, Koordinasi, Kebijakan Bidang Administrasi Pemerintahan	Persentase pelaksanaan koordinasi Bidang Administrasi pemerintahan	Persen	100	100	997,96	100	901,07	99	898,76	100	940,55	100	1.078,39	99,8	SEKRETARIAT DAERAH
4.00.01.4.00.01.02.36.	Program Pembinaan, Koordinasi, Kebijakan Bidang Organisasi	Cakupan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah	Persen	83	100	1.068,22	85	909,40	94	1.006,98	97	1.048,25	94	1.007,82	94	SEKRETARIAT DAERAH
4.00.01.4.00.01.02.37.	Program Pembinaan, Koordinasi, Kebijakan Bidang Administrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas	Cakupan Fasilitas, Pembinaan, Koordinasi, Asistensi dan Evaluasi Kebijakan Bidang Administrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas	Persen	100	100	667,23	100	599,33	100	620,78	100	644,36	100	621,26	100	SEKRETARIAT DPRD
<b>4.00.02.02.</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>					<b>59.907,33</b>		<b>46.000,00</b>		<b>47.646,96</b>		<b>49.456,22</b>		<b>47.683,69</b>		
<b>0.00.00.4.00.02.02.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>16.365,30</b>		<b>13.670,95</b>		<b>14.482,27</b>		<b>15.577,88</b>		<b>14.519,00</b>		
0.00.00.4.00.02.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	9.924,05	100	9.943,77	100	10.227,42	100	10.856,03	100	10.264,15	100	SEKRETARIAT DPRD
0.00.00.4.00.02.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	5.124,17	100	2.674,29	100	3.201,96	100	3.668,96	100	3.201,96	100	SEKRETARIAT DPRD
0.00.00.4.00.02.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	882,18	100	690,93	100	690,93	100	690,93	100	690,93	100	SEKRETARIAT DPRD
0.00.00.4.00.02.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	254,83	100	178,85	100	178,85	100	178,85	100	178,85	100	SEKRETARIAT DPRD
0.00.00.4.00.02.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	140,88	100	145,09	100	145,09	100	145,09	100	145,09	100	SEKRETARIAT DPRD
0.00.00.4.00.02.02.07.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase penigkatan Rencana Kerja Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	39,18	100	38,03	100	38,03	100	38,03	100	38,03	100	SEKRETARIAT DPRD

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

4.00.01.4.00.02.02.	KEPALA DAERAH					3.180,87		1.955,73		2.070,61		2.070,61		2.070,61		
4.00.01.4.00.02.02.15.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Kunjungan Kerja yang difasilitasi	Persen	100	100	3.180,87	100	1.955,73	100	2.070,61	100	2.070,61	100	2.070,61	100	SEKRETARIAT DPRD
4.00.02.4.00.02.02.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					40.361,16		30.373,32		31.094,08		31.807,73		31.094,08		
4.00.02.4.00.02.02.15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Rancangan peraturan daerah yang difasilitasi	Persen	100	100	40.361,16	100	30.373,32	100	31.094,08	100	31.807,73	100	31.094,08	100	KECAMATAN TEMBILAHAN
4.00.03.01.	KECAMATAN TEMBILAHAN					6.254,80		10.522,13		10.543,61		10.567,21		10.544,09		
0.00.00.4.00.03.01.	NON URUSAN					405,92		364,97		366,40		393,56		366,07		
0.00.00.4.00.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	275,91	100	259,36	100	263,99	100	271,01	100	284,16	100	KECAMATAN TEMBILAHAN
0.00.00.4.00.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	99,50	100	70,05	100	80,85	100	85,00	78	55,05	95,6	KECAMATAN TEMBILAHAN
0.00.00.4.00.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah ( %)	Persen	100	100	8,95	100	14,00	0	-	100	14,00	0	-	60	KECAMATAN TEMBILAHAN
0.00.00.4.00.03.01.07.	Program Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja Badan/Kantor/Instansi Bagian	Persentase tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	21,56	100	21,56	100	21,56	100	23,55	100	26,86	100	KECAMATAN TEMBILAHAN
4.00.03.4.00.03.01.	KECAMATAN					5.848,88		10.157,16		10.177,21		10.173,65		10.178,03		
4.00.03.4.00.03.01.15.	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	100	100	5.848,88	100	10.157,16	100	10.177,21	100	10.173,65	100	10.178,03	100	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
4.00.03.02.	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU					2.603,81		3.093,96		3.275,44		3.139,04		3.275,92		
0.00.00.4.00.03.02.	NON URUSAN					343,51		374,82		363,05		391,90		363,78		
0.00.00.4.00.03.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	284,57	100	267,97	85	228,45	94	252,80	91	245,93	94	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU



RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

0.00.00.4.00.03.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	29,44	100	88,60	100	124,60	100	124,60	100	109,60	100	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
0.00.00.4.00.03.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah ( %)	Persen	100	100	29,50	100	18,25	54	10,00	79	14,50	45	8,25	75,6	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
<b>4.00.03.4.00.03.02.</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>2.260,30</b>		<b>2.719,14</b>		<b>2.912,39</b>		<b>2.747,14</b>		<b>2.912,14</b>		
4.00.03.4.00.03.02.15.	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	100	100	2.260,30	100	2.719,14	100	2.912,39	100	2.747,14	100	2.912,14	100	KECAMATAN TEMPULING
<b>4.00.03.03.</b>	<b>KECAMATAN TEMPULING</b>					<b>3.606,25</b>		<b>5.540,46</b>		<b>5.761,94</b>		<b>5.585,54</b>		<b>5.562,42</b>		
<b>0.00.00.4.00.03.03.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>223,80</b>		<b>255,34</b>		<b>276,82</b>		<b>300,42</b>		<b>277,30</b>		
0.00.00.4.00.03.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	200,64	100	134,90	100	141,08	100	153,08	100	142,36	100	KECAMATAN TEMPULING
0.00.00.4.00.03.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	17,52	100	89,48	100	98,80	100	110,40	100	98,00	100	KECAMATAN TEMPULING
0.00.00.4.00.03.03.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	100	100	5,64	100	11,96	100	17,94	100	17,94	100	17,94	100	KECAMATAN TEMPULING
0.00.00.4.00.03.03.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	0	0	-	100	10,00	100	10,00	100	10,00	100	10,00	80	KECAMATAN TEMPULING
0.00.00.4.00.03.03.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	0	0	-	100	9,00	100	9,00	100	9,00	100	9,00	80	KECAMATAN TEMPULING
<b>4.00.03.4.00.03.03.</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>3.382,45</b>		<b>5.285,13</b>		<b>5.485,13</b>		<b>5.285,13</b>		<b>5.285,13</b>		
4.00.03.4.00.03.03.15.	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	100	100	3.382,45	100	5.285,13	100	5.485,13	100	5.285,13	100	5.285,13	100	KECAMATAN BATANG TUAKA
<b>4.00.03.04.</b>	<b>KECAMATAN BATANG TUAKA</b>					<b>2.630,46</b>		<b>1.835,96</b>		<b>2.067,44</b>		<b>1.881,04</b>		<b>2.157,92</b>		

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

<b>0.00.00.4.00.03.04.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>516,62</b>		<b>381,60</b>		<b>371,10</b>		<b>426,68</b>		<b>403,56</b>		
0.00.00.4.00.03.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	238,64	100	194,88	100	194,88	100	239,96	100	216,84	100	KECAMATAN BATANG TUAKA
0.00.00.4.00.03.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	277,98	100	176,22	100	176,22	100	176,22	100	176,22	100	KECAMATAN BATANG TUAKA
0.00.00.4.00.03.04.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	100	0	-	100	10,50	0	-	100	10,50	100	10,50	60	KECAMATAN BATANG TUAKA
<b>1.02.07.4.00.03.04.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>					<b>489,79</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		
1.02.07.4.00.03.04.29.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	100	100	489,79	0	-	0	-	0	-	0	-	20	KECAMATAN BATANG TUAKA
<b>4.00.03.4.00.03.04.</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>1.624,06</b>		<b>1.454,36</b>		<b>1.696,34</b>		<b>1.454,36</b>		<b>1.754,36</b>		
4.00.03.4.00.03.04.15.	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	100	100	1.624,06	100	1.454,36	100	1.696,34	100	1.454,36	100	1.754,36	100	KECAMATAN CONCONG
<b>4.00.03.05.</b>	<b>KECAMATAN CONCONG</b>					<b>2.118,03</b>		<b>1.759,84</b>		<b>1.991,32</b>		<b>1.804,92</b>		<b>2.021,80</b>		
<b>0.00.00.4.00.03.05.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>333,22</b>		<b>275,18</b>		<b>294,82</b>		<b>292,18</b>		<b>287,18</b>		
0.00.00.4.00.03.05.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	309,22	100	242,08	100	243,22	100	242,08	100	242,08	100	KECAMATAN CONCONG
0.00.00.4.00.03.05.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	9,00	100	18,10	100	23,60	100	28,60	100	23,60	100	KECAMATAN CONCONG
0.00.00.4.00.03.05.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah ( % )	Persen	100	100	15,00	100	15,00	100	28,00	100	21,50	100	21,50	100	KECAMATAN CONCONG
<b>4.00.03.4.00.03.05.</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>1.784,81</b>		<b>1.484,66</b>		<b>1.696,50</b>		<b>1.512,74</b>		<b>1.734,62</b>		
4.00.03.4.00.03.05.15.	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	5	100	1.784,81	100	1.484,66	100	1.696,50	100	1.512,74	100	1.734,62	100	KECAMATAN ENOK
<b>4.00.03.06.</b>	<b>KECAMATAN ENOK</b>					<b>4.000,14</b>		<b>5.644,17</b>		<b>5.945,65</b>		<b>5.689,25</b>		<b>5.826,13</b>		

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

0.00.00.4.00.03.06.	NON URUSAN					242,98		243,93		267,49		287,33		262,33		
0.00.00.4.00.03.06.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	235,98	100	189,93	95	181,49	100	199,33	100	199,33	99	KECAMATAN ENOK
0.00.00.4.00.03.06.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	7,00	100	50,00	100	82,00	100	84,00	100	59,00	100	KECAMATAN ENOK
0.00.00.4.00.03.06.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah ( % )	Persen	100	0	-	100	4,00	100	4,00	100	4,00	100	4,00	80	KECAMATAN ENOK
4.00.03.4.00.03.06.	KECAMATAN					3.757,16		5.400,25		5.678,17		5.401,93		5.563,81		
4.00.03.4.00.03.06.15.	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	100	100	3.757,16	100	5.400,25	100	5.678,17	100	5.401,93	100	5.563,81	100	KECAMATAN GAUNG
4.00.03.07.	KECAMATAN GAUNG					2.253,61		1.857,70		2.119,18		1.902,78		2.169,66		
0.00.00.4.00.03.07.	NON URUSAN					161,22		350,54		300,51		392,01		315,89		
0.00.00.4.00.03.07.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	90	143,72	100	154,54	100	196,11	100	187,56	100	204,27	98	KECAMATAN GAUNG
0.00.00.4.00.03.07.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat (%)	Persen	100	92	17,50	95	196,00	50	104,40	99	204,45	54	111,62	78	KECAMATAN GAUNG
4.00.03.4.00.03.07.	KECAMATAN					2.092,39		1.507,16		1.818,67		1.510,77		1.853,77		
4.00.03.4.00.03.07.15.	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	100	80	2.092,39	80	1.507,16	96	1.818,67	80	1.510,77	98	1.853,77	86,8	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
4.00.03.08.	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA					3.392,75		4.264,12		4.485,61		4.309,21		4.566,09		
0.00.00.4.00.03.08.	NON URUSAN					311,90		292,31		275,61		309,30		271,11		
0.00.00.4.00.03.08.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	219,86	100	219,71	100	225,51	100	237,50	100	227,51	100	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

0.00.00.4.00.03.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	75,24	100	59,00	60	35,50	86	51,00	50	30,00	79,2	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
0.00.00.4.00.03.08.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah ( % )	Persen	100	100	16,80	100	9,60	100	9,60	100	16,80	100	9,60	100	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
0.00.00.4.00.03.08.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	Persen	100	0	-	100	4,00	100	5,00	100	4,00	100	4,00	80	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
<b>4.00.03.4.00.03.08.</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>3.080,86</b>		<b>3.971,81</b>		<b>4.210,00</b>		<b>3.999,91</b>		<b>4.294,98</b>		
4.00.03.4.00.03.08.15.	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	100	100	3.080,86	100	3.971,81	100	4.210,00	100	3.999,91	100	4.294,98	100	KECAMATAN KATEMAN
<b>4.00.03.09.</b>	<b>KECAMATAN KATEMAN</b>					<b>3.338,94</b>		<b>4.206,10</b>		<b>4.437,58</b>		<b>4.251,18</b>		<b>4.518,06</b>		
<b>0.00.00.4.00.03.09.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>206,49</b>		<b>216,07</b>		<b>216,05</b>		<b>217,05</b>		<b>216,53</b>		
0.00.00.4.00.03.09.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persen	100	100	206,49	100	211,07	99	211,05	100	212,05	100	211,53	99,8	KECAMATAN KATEMAN
0.00.00.4.00.03.09.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kelengkapan Sarana dan Prasarana Apartur	Persen	0	0	-	100	5,00	100	5,00	100	5,00	100	5,00	80	KECAMATAN KATEMAN
<b>4.00.03.4.00.03.09.</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>3.132,45</b>		<b>3.990,03</b>		<b>4.221,53</b>		<b>4.034,13</b>		<b>4.301,53</b>		
4.00.03.4.00.03.09.15.	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	100	100	3.132,45	100	3.990,03	100	4.221,53	100	4.034,13	100	4.301,53	100	KECAMATAN KEMPAS
<b>4.00.03.10.</b>	<b>KECAMATAN KEMPAS</b>					<b>2.507,79</b>		<b>2.971,67</b>		<b>3.193,15</b>		<b>3.016,75</b>		<b>3.193,63</b>		
<b>0.00.00.4.00.03.10.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>222,84</b>		<b>295,08</b>		<b>292,96</b>		<b>307,54</b>		<b>300,08</b>		
0.00.00.4.00.03.10.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	92,31	100	212,94	100	241,98	100	247,36	100	255,74	100	246,88	100	KECAMATAN KEMPAS
0.00.00.4.00.03.10.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	5,70	100	48,20	82	40,00	93	45,00	95	46,00	94	KECAMATAN KEMPAS

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

0.00.00.4.00.03.10.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparaturnya Perangkat Daerah	Persen	100	100	4,20	100	4,90	100	5,60	100	6,80	100	7,20	100	KECAMATAN KEMPAS
<b>4.00.03.4.00.03.10.</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>2.284,95</b>		<b>2.676,59</b>		<b>2.900,19</b>		<b>2.709,21</b>		<b>2.893,55</b>		
4.00.03.4.00.03.10.15.	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	92,31	20	2.284,95	37	2.676,59	40	2.900,19	37	2.709,21	39	2.893,55	34,6	KECAMATAN KEMUNING
<b>4.00.03.11.</b>	<b>KECAMATAN KEMUNING</b>					<b>1.381,34</b>		<b>1.836,19</b>		<b>2.127,67</b>		<b>1.881,27</b>		<b>2.168,15</b>		
<b>0.00.00.4.00.03.11.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>205,85</b>		<b>277,15</b>		<b>217,81</b>		<b>231,36</b>		<b>206,35</b>		
0.00.00.4.00.03.11.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	195,65	100	179,78	80	145,32	100	193,29	96	173,47	95,2	KECAMATAN KEMUNING
0.00.00.4.00.03.11.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparaturnya yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	10,20	100	97,37	74	72,49	39	38,08	33	32,87	69,2	KECAMATAN KEMUNING
<b>4.00.03.4.00.03.11.</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>1.175,49</b>		<b>1.559,04</b>		<b>1.909,86</b>		<b>1.649,90</b>		<b>1.961,80</b>		
4.00.03.4.00.03.11.15.	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	100	100	1.175,49	100	1.559,04	100	1.909,86	100	1.649,90	100	1.961,80	100	KECAMATAN KERITANG
<b>4.00.03.12.</b>	<b>KECAMATAN KERITANG</b>					<b>2.892,02</b>		<b>1.748,74</b>		<b>2.020,22</b>		<b>1.793,82</b>		<b>2.160,70</b>		
<b>0.00.00.4.00.03.12.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>334,03</b>		<b>280,50</b>		<b>292,98</b>		<b>290,08</b>		<b>275,96</b>		
0.00.00.4.00.03.12.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	312,23	100	150,00	100	158,48	100	168,98	100	176,86	100	KECAMATAN KERITANG
0.00.00.4.00.03.12.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparaturnya yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	100	100	21,80	100	123,00	100	127,00	91	113,00	73	91,00	92,8	KECAMATAN KERITANG
0.00.00.4.00.03.12.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	Persen	100	0	-	100	7,50	100	7,50	100	8,10	100	8,10	80	KECAMATAN KERITANG
<b>4.00.03.4.00.03.12.</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>2.557,98</b>		<b>1.468,24</b>		<b>1.727,24</b>		<b>1.503,74</b>		<b>1.884,74</b>		

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

4.00.03.4.00.03.12.15.	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	100	100	2.557,98	100	1.468,24	100	1.727,24	100	1.503,74	100	1.884,74	100	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
<b>4.00.03.13.</b>	<b>KECAMATAN KUALA INDRAGIRI</b>					<b>2.203,48</b>		<b>1.783,55</b>		<b>2.055,03</b>		<b>1.828,63</b>		<b>2.015,51</b>		
<b>0.00.00.4.00.03.13.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>197,16</b>		<b>270,28</b>		<b>230,22</b>		<b>265,82</b>		<b>263,62</b>		
0.00.00.4.00.03.13.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persen	100	100	150,53	100	162,03	100	169,68	100	201,32	100	210,12	100	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
0.00.00.4.00.03.13.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	46,63	100	100,25	44	45,00	64	64,50	45	45,50	70,6	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
0.00.00.4.00.03.13.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	100	0	-	100	8,00	10	0,80	0	-	100	8,00	42	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
0.00.00.4.00.03.13.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	0	-	0	-	100	14,74	100	-	100	-	60	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
<b>4.00.03.4.00.03.13.</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>2.006,32</b>		<b>1.513,27</b>		<b>1.824,81</b>		<b>1.562,81</b>		<b>1.751,89</b>		
4.00.03.4.00.03.13.15.	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	100	100	2.006,32	100	1.513,27	100	1.824,81	100	1.562,81	100	1.751,89	100	KECAMATAN MANDAH
<b>4.00.03.14.</b>	<b>KECAMATAN MANDAH</b>					<b>2.328,66</b>		<b>1.763,08</b>		<b>2.084,56</b>		<b>1.808,16</b>		<b>2.065,04</b>		
<b>0.00.00.4.00.03.14.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>235,34</b>		<b>273,00</b>		<b>262,48</b>		<b>302,08</b>		<b>253,96</b>		
0.00.00.4.00.03.14.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	95	100	235,34	100	197,00	100	201,48	100	207,08	100	199,96	100	KECAMATAN MANDAH
0.00.00.4.00.03.14.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	0	0	-	100	44,00	100	61,00	100	80,00	100	52,00	80	KECAMATAN MANDAH
0.00.00.4.00.03.14.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	Persen	0	0	-	100	30,00	0	-	50	15,00	0	-	30	KECAMATAN MANDAH

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

0.00.00.4.00.03.14.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	0	-	100	2,00	0	-	0	-	100	2,00	40	KECAMATAN MANDAH
<b>4.00.03.4.00.03.14.</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>2.093,32</b>		<b>1.490,08</b>		<b>1.822,08</b>		<b>1.506,08</b>		<b>1.811,08</b>		
4.00.03.4.00.03.14.15.	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	100	100	2.093,32	100	1.490,08	100	1.822,08	100	1.506,08	100	1.811,08	100	KECAMATAN PELANGIRAN
<b>4.00.03.15.</b>	<b>KECAMATAN PELANGIRAN</b>					<b>2.453,70</b>		<b>1.783,65</b>		<b>2.105,13</b>		<b>1.828,73</b>		<b>2.055,61</b>		
<b>0.00.00.4.00.03.15.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>417,76</b>		<b>233,69</b>		<b>255,17</b>		<b>264,91</b>		<b>255,88</b>		
0.00.00.4.00.03.15.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	222,30	100	217,44	100	219,44	100	225,56	100	219,43	100	KECAMATAN PELANGIRAN
0.00.00.4.00.03.15.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	195,46	100	16,25	100	20,25	100	23,15	100	20,25	100	KECAMATAN PELANGIRAN
0.00.00.4.00.03.15.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	100	0	-	0	-	100	15,48	100	16,20	100	16,20	60	KECAMATAN PELANGIRAN
<b>4.00.03.4.00.03.15.</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>2.035,94</b>		<b>1.549,96</b>		<b>1.849,96</b>		<b>1.563,82</b>		<b>1.799,73</b>		
4.00.03.4.00.03.15.15.	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	50	100	2.035,94	90	1.549,96	100	1.849,96	90	1.563,82	100	1.799,73	96	KECAMATAN PULAU BURUNG
<b>4.00.03.16.</b>	<b>KECAMATAN PULAU BURUNG</b>					<b>1.012,87</b>		<b>600,00</b>		<b>921,48</b>		<b>645,08</b>		<b>971,96</b>		
<b>0.00.00.4.00.03.16.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>227,65</b>		<b>356,67</b>		<b>345,75</b>		<b>404,08</b>		<b>383,90</b>		
0.00.00.4.00.03.16.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	199,10	100	254,17	99	251,90	100	279,08	99	251,90	99,6	KECAMATAN PULAU BURUNG
0.00.00.4.00.03.16.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	28,55	100	95,00	98	93,85	100	110,00	100	120,00	99,6	KECAMATAN PULAU BURUNG

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

0.00.00.4.00.03.16.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparaturnya Perangkat Daerah (%)	Persen	0	0	-	100	7,50	0	-	100	15,00	100	12,00	60	KECAMATAN PULAU BURUNG
<b>4.00.03.4.00.03.16.</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>785,22</b>		<b>243,33</b>		<b>575,73</b>		<b>241,00</b>		<b>588,06</b>		
4.00.03.4.00.03.16.15.	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	100	90	785,22	90	243,33	100	575,73	89	241,00	100	588,06	93,8	KECAMATAN RETEH
<b>4.00.03.17.</b>	<b>KECAMATAN RETEH</b>					<b>3.664,51</b>		<b>4.220,52</b>		<b>4.522,00</b>		<b>4.265,60</b>		<b>4.242,48</b>		
<b>0.00.00.4.00.03.17.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>253,45</b>		<b>275,05</b>		<b>296,53</b>		<b>275,05</b>		<b>275,05</b>		
0.00.00.4.00.03.17.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	229,08	100	243,88	86	211,36	78	190,88	78	190,88	88,4	KECAMATAN RETEH
0.00.00.4.00.03.17.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparaturnya yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	18,08	100	12,58	100	66,58	100	65,58	100	65,58	100	KECAMATAN RETEH
0.00.00.4.00.03.17.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparaturnya Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	6,30	100	12,60	100	12,60	100	12,60	100	12,60	100	KECAMATAN RETEH
0.00.00.4.00.03.17.05.	Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	0	0	-	90	6,00	90	6,00	90	6,00	90	6,00	72	KECAMATAN RETEH
<b>4.00.03.4.00.03.17.</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>3.411,06</b>		<b>3.945,47</b>		<b>4.225,47</b>		<b>3.990,55</b>		<b>3.967,43</b>		
4.00.03.4.00.03.17.15.	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	100	100	3.411,06	100	3.945,47	100	4.225,47	100	3.990,55	100	3.967,43	100	KECAMATAN SUNGAI BATANG
<b>4.00.03.18.</b>	<b>KECAMATAN SUNGAI BATANG</b>					<b>1.689,43</b>		<b>1.827,29</b>		<b>2.058,77</b>		<b>1.872,37</b>		<b>2.089,25</b>		
<b>0.00.00.4.00.03.18.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>265,79</b>		<b>336,11</b>		<b>370,85</b>		<b>333,11</b>		<b>309,99</b>		
0.00.00.4.00.03.18.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	228,00	100	236,16	99	234,25	100	237,86	100	237,76	99,8	KECAMATAN SUNGAI BATANG
0.00.00.4.00.03.18.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparaturnya yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	37,80	100	87,95	100	114,60	94	83,25	68	60,23	92,4	KECAMATAN SUNGAI BATANG



RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

0.00.00.4.00.03.18.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	Persen	100	0	-	0	-	100	10,00	100	12,00	100	-	60	KECAMATAN SUNGAI BATANG
0.00.00.4.00.03.18.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	Persen	100	0	-	100	12,00	100	12,00	100	-	100	12,00	80	KECAMATAN SUNGAI BATANG
<b>4.00.03.4.00.03.18.</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>1.423,63</b>		<b>1.491,18</b>		<b>1.687,92</b>		<b>1.539,26</b>		<b>1.779,26</b>		
4.00.03.4.00.03.18.15.	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	100	100	1.423,63	100	1.491,18	100	1.687,92	100	1.539,26	100	1.779,26	100	KECAMATAN TANAH MERAH
<b>4.00.03.19.</b>	<b>KECAMATAN TANAH MERAH</b>					<b>1.900,95</b>		<b>1.816,09</b>		<b>2.117,57</b>		<b>1.861,17</b>		<b>2.178,05</b>		
<b>0.00.00.4.00.03.19.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>227,61</b>		<b>234,86</b>		<b>256,35</b>		<b>264,24</b>		<b>256,36</b>		
0.00.00.4.00.03.19.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	214,91	100	212,56	100	234,05	100	241,94	100	234,06	100	KECAMATAN TANAH MERAH
0.00.00.4.00.03.19.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	5,10	90	15,10	90	15,10	90	15,10	90	15,10	92	KECAMATAN TANAH MERAH
0.00.00.4.00.03.19.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	7,60	90	7,20	90	7,20	90	7,20	90	7,20	92	KECAMATAN TANAH MERAH
<b>4.00.03.4.00.03.19.</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>1.673,34</b>		<b>1.581,23</b>		<b>1.861,23</b>		<b>1.596,93</b>		<b>1.921,69</b>		
4.00.03.4.00.03.19.15.	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	100	100	1.673,34	90	1.581,23	100	1.861,23	90	1.596,93	100	1.921,69	96	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
<b>4.00.03.20.</b>	<b>KECAMATAN TELUK BELENGKONG</b>					<b>1.131,23</b>		<b>600,00</b>		<b>921,48</b>		<b>645,08</b>		<b>801,96</b>		
<b>0.00.00.4.00.03.20.</b>	<b>NON URUSAN</b>					<b>205,04</b>		<b>299,77</b>		<b>320,84</b>		<b>340,94</b>		<b>316,12</b>		
0.00.00.4.00.03.20.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	96,46	100	192,24	100	214,25	100	255,84	100	292,94	100	273,78	100	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
0.00.00.4.00.03.20.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	0	100	12,80	100	85,53	71	61,50	49	42,00	45	39,34	73	KECAMATAN TELUK BELENGKONG

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

0.00.00.4.00.03.20.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah	Persen	0	0	-	0	-	100	3,50	100	6,00	100	3,00	60	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
<b>4.00.03.4.00.03.20.</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>926,19</b>		<b>300,23</b>		<b>600,64</b>		<b>304,14</b>		<b>485,84</b>		
4.00.03.4.00.03.20.15.	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan	Persen	73,48	100	926,19	100	300,23	100	600,64	100	304,14	100	485,84	100	

## BAB

## 8

## KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) daerah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1.  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Indragiri Hilir 2019 – 2023

No	Indikator	Target Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.98	5.12	5.26	5.4	5.54
2	Laju Inflasi (%)	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4
3	Indeks Gini (Indeks)	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,50	7,40	7,30	7,20	7,10
5	Indeks Pembangunan Manusia - IPM (%)	66.53	67.53	68.08	68.9	69.72
6	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7.25	7.26	7.38	7.62	7.86
7	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.05	12.76	12.96	13.26	13.56
8	Angka Harapan Hidup (Tahun)	67,09	68,00	68,40	68,80	70,00
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.43	3.14	2.86	2.61	2.38
10	Tingkat kesempatan kerja (%)	96.57	96.86	97.14	97.39	97.62
11	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km)	19.00	22.49	26.08	29.75	34.08
12	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air bersih layak (%)	39.66	42.75	45.83	48.92	52

13	Opini BPK atas LKPD (Prediket)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Nilai AKIP (Prediket)	B	B	BB	BB	A
15	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	55.00	65.00	69.00	72.00	79.00
16	Nilai LPPD (Prediket)	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
17	Keterbukaan Informasi (%)	20.00	40.00	60.00	80.00	95.00
18	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	78,47	80,08	83,12	87,65	89,22
19	Indeks Demokrasi Indonesia (Indeks)	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
20	Jumlah Penyelesaian Kasus Perempuan dan Anak (Kasus)	35	40	46	51	57
21	Jumlah PMKS yang Tertangani (Jiwa)	21,000.00	36,617.00	2,247.00	750.00	500.00
22	Indeks Pembangunan Gender (%)	82.69	82.99	83.29	83.59	83.89
23	Indeks Pemberdayaan Gender (%)	63.10	63.90	64.80	65.78	66.78
24	Jumlah Desa dengan peningkatan Status Desa dalam Indeks Desa membangun ( Desa )		48	48	48	49
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	53,04	53.92	54.79	55.66	56.54
26	Nilai investasi PMDN (Milyar Rupiah)	5.628	6.191	6.81	7.491	8.24
27	Nilai investasi PMA (Juta US\$)	436	381	419	461	507
28	Kontribusi sektor pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB (%)	45.53	45.08	44.63	44.18	43.72
29	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	28.41	28.48	28.56	28.63	28.71
30	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	11223.66	11448.14	11677.1	11910.64	12148.86
31	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (%)	87.9	88.9	89.9	90.9	91.9
32	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	84.2	85.2	86.2	87.2	88.2
33	Angka kriminalitas yang tertangani (angka)	4450	4400	4350	4300	4250
34	Rata-rata persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar	28.58	30.16	31.70	33.32	36.10
35	Persentase Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	22.46	24.17	25.66	27.25	30.75

36	Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak (%)	61.38	62.43	63.47	64.52	65.56
37	Konektivitas Wilayah (Desa yang terhubung) (%)	7	17	32	52	77
38	Konektivitas desa yang memiliki layanan angkutan darat (%)	14	24	39.43	59	84
39	konektivitas desa yang memiliki layanan angkutan perairan, sungai dan penyeberangan (%)	23	33	48	68	93
40	PDRB Sektor Pertanian dan Pariwisata (Rp Ribu)	31,485,017.58	33,286,975.41	35,088,933.25	36,890,891.08	38,692,848.92
41	PDRB sektor pertanian (Rp Ribu)	31,485,017.58	33,286,975.41	35,088,933.25	36,890,891.08	38,692,848.92
42	PDRB sektor pariwisata (Rp Ribu)	303,677.09	321,217.64	338,758.18	356,298.73	373,839.28
43	Indeks tutupan lahan (indeks)	24,69	24.7	24.71	24.71	24.72
44	Indeks kualitas udara (indeks)	91,67	91.88	92.09	92.29	92.5
45	Indeks kualitas air (indeks)	52,22	54.91	57.61	60.3	62.99
46	Persentase pengelolaan dan penanganan sampah (%)	69.15	68.22	67.29	66.38	65.48
47	Angka Melek Huruf (%)	99.61	99.72	99.78	99.8	99.85
48	Rasio rumah ibadah per jumlah penduduk (Rasio)	1:415	1:408	1:402	1:396	1:390
49	Rasio rumah ibadah per jumlah penduduk (Rasio)	1:415	1:408	1:402	1:396	1:390
50	Cakupan partisipasi sosial (%)	52.35	53.5	54.65	55.8	56.95
51	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (%)	22.00	24.00	26.00	28.00	30.00
52	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi (%)	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00
53	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Sosial (%)	61.00	62.00	63.00	64.00	65.00
54	Indeks keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial (indeks)	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
55	Luas wilayah terdampak bencana (Km2)	1.40	1.22	1.04	0.86	0.68
56	Tenaga Kerja Terlatih (%)	28.27	29.97	31.68	33.38	35.09
57	Cakupan bantuan kepada masyarakat miskin (%)	18.67	19.5	20	20.5	21.25
58	Pengeluaran per kapita penduduk miskin (Rp per kapita per hari)	11,223.66	11,448.14	11,677.10	11,910.64	12,148.86

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8.2 digunakan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir periode 2019 - 2023.

Tabel 8.2.  
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan  
Urusan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 - 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
<b>I</b>	<b>KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>							
<b>1.1.</b>	<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>							
1.1.1.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp Milyar)	43.501,00	45.676,05	48.188,23	51.079,53	54.399,70	58.207,67	58.207,67
1.1.2.	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (%)	4,84	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,00
1.1.3.	Inflasi (%)	5,00	3,80	3,70	3,60	3,50	3,40	3,40
1.1.4.	PDRB Per Kapita (Rp Juta/Kap/Tahun)	59,46	60,73	62,02	63,34	64,69	66,07	66,07
1.1.5.	Indeks Gini (Indeks)	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31
1.1.6.	Indeks Williamson (Indeks)	0,29	0,27	0,26	0,24	0,22	0,21	0,21
1.1.7.	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	54,02	53,69	53,36	53,03	52,71	52,39	52,39
1.1.8.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,60	7,50	7,40	7,30	7,20	7,10	7,10
<b>1.2.</b>	<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>							
1.2.1.	Indeks Pembangunan Manusia (%)	66,30	66,53	67,53	68,08	68,90	69,72	69,72
1.2.2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,88	12,05	12,76	12,96	13,26	13,56	13,56
1.2.3.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,18	7,25	7,26	7,38	7,62	7,86	7,86
1.2.3.	APK SD/MI (%)	99,47	100,97	102,47	103,97	105,47	106,97	106,97
1.2.4.	APK SMP/MTs (%)	100,78	101,03	101,28	101,53	101,78	102,03	102,03
1.2.5.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	67,07	67,09	68,00	68,40	68,80	70,00	70,00
1.2.6.	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	1,10	1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,60
1.2.7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,74	3,43	3,14	2,86	2,61	2,38	2,38
1.2.8.	Nilai AKIP (Prediket)	CC	B	B	BB	BB	A	A
1.2.9.	Nilai LPPD (Prediket)	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.2.10.	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	44,36	55,00	65,00	69,00	72,00	79,00	79,00
1.2.11.	Keterbukaan Informasi (%)	32,28	20,00	40,00	60,00	80,00	95,00	95,00
1.2.12.	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	75,22	78,47	80,08	83,12	87,65	89,22	89,22
1.2.13.	Indeks Demokrasi Indonesia (Indeks)	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
1.2.14.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (%)	68,00	70,00	72,00	75,00	76,00	78,00	78,00
<b>1.3.</b>	<b>Fokus Seni Budaya dan Olahraga</b>							
1.3.1.	Cakupan Fasilitasi Seni (%)	50,75	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	60,00
1.3.2.	Jumlah Lapangan Olahraga (Lapangan)	979,00	985,00	990,00	995,00	997,00	1.000,00	1.000,00
<b>II</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>							
<b>2.1.</b>	<b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b>							
<b>2.1.1.</b>	<b>Pendidikan</b>							
2.1.1.1.	APMSD/MI (%)	85,38	87,0000	90,0000	93,0000	97,0000	100,0000	100,00
2.1.1.2.	APMSMP/MTs (%)	75,72	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	80,00
2.1.1.3.	APS 7 - 12 Tahun (%)	97,66	98,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100
2.1.1.4.	APS 13 - 15 tahun (%)	90,77	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	96
2.1.1.5.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01
2.1.1.6.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02
2.1.1.7.	Rasio Ketersediaan Sekolah Thd Penduduk Usia 7 - 12 Tahun (%)	72,32	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00	82,00
2.1.1.8.	Rasio Ketersediaan Sekolah Thd Penduduk Usia 13 - 15 Tahun (%)	64,05	67,00	70,00	73,00	76,00	79,00	79,00
2.1.1.9.	Rasio ketersediaan Guru Thd Murid SD/MI (Guru Per 10.000 Murid)	697,61	710,00	730,00	760,00	790,00	810,00	810,00
2.1.1.10.	Rasio ketersediaan Guru Thd Murid SMP/MTs (Guru Per 10.000 Murid)	1.005,19	1.007,00	1.008,00	1.009,00	1.010,00	1.011,00	1.011,00
2.1.1.11.	Guru Yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV (%)	84,61	88,00	92,00	96,00	98,00	100,00	100,00
<b>2.1.2.</b>	<b>Kesehatan</b>							
2.1.2.1.	Rasio Rumah Sakit (Per 1.000 Penduduk)	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042
2.1.2.2.	Rasio Puskesmas (Per 1.000 Penduduk)	0,0370	0,0380	0,0390	0,0400	0,0410	0,0420	0,0420
2.1.2.3.	Rasio Dokter Spesialis (Per 1.000 Penduduk)	0,0370	0,0400	0,0420	0,0440	0,0460	0,0480	0,0480
2.1.2.4.	Rasio Dokter Umum (Per 1.000 Penduduk)	0,1080	0,1100	0,2000	0,3000	0,4000	0,5000	0,5000
2.1.2.5.	Rasio Dokter Gigi (Per 1.000 Penduduk)	0,0039	0,0060	0,0100	0,0150	0,0200	0,0250	0,0250

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
2.1.2.6.	Rasio Perawat (Per 1.000 Penduduk)	0,7890	0,8000	0,0820	0,0840	0,0860	0,0860	0,0860
2.1.2.7.	Rasio Bidan (Per 1.000 Penduduk)	0,5950	0,6100	0,0620	0,6300	0,6400	0,6500	0,6500
<b>2.1.3.</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
2.1.3.1.	Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Baik (%)	14,22	17,00	20,00	23,00	26,00	30,00	30,00
2.1.3.2.	Proporsi Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Mantap (%)	59,23	66,23	69,73	73,23	76,73	80,23	80,23
2.1.3.3.	Proporsi Jembatan Dengan Kondisi Baik (%)	35,96	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00
2.1.3.5.	Proporsi Irigasi Dalam kondisi Baik (%)	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	38,00
2.1.3.6.	Ratio RTH Per Satuan Wilayah Ber HPL/HGB (%)	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00
<b>2.1.4.</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Pemukiman</b>							
2.1.4.1.	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	18,77	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	28,00
2.1.4.2.	Rumah Tidak Layak Huni (%)	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,25
2.1.4.3.	Persentase luasan pemukiman kumuh diperkotaan (%)	25,00	20,00	18,00	15,00	13,00	10,00	10,00
<b>2.1.5.</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>							
2.1.5.1.	Rasio Rumah Ber IMB (%)	2,14	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	7,00
2.1.5.2.	Rasio Personil Satpol PP (Per 10.000 Penduduk)	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07
2.1.5.3.	Cakupan Penegakan Peraturan (%)	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00
2.1.5.4.	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (%)	10,00	30,00	50,00	70,00	90,00	100,00	100,00
<b>2.1.6.</b>	<b>Sosial</b>							
2.1.6.1.	Penyandang Cacat Baik Fisik Maupun Mental Serta Lanjut Usia Yang Tidak Potensial Yang telah Menerima Jaminan Sosial (%)	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00	100,00
2.1.6.2.	PMKS penerima bantuan sosial (%)	80,00	85,00	90,00	93,00	96,00	100,00	100,00
<b>2.2.</b>	<b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>							
<b>2.2.1.</b>	<b>Tenaga Kerja</b>							
2.2.1.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	62,27	63,00	64,00	65,00	66,00	67,00	67,00



RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	96,26	96,57	96,86	97,14	97,39	97,62	97,62
2.2.1.2.	Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%)	82,74	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	87,00
2.2.1.3.	Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan (%)	75,00	78,00	81,00	84,00	87,00	90,00	90,00
<b>2.2.2.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
2.2.2.1.	Indeks Pembangunan Gender (%)	82,39	82,69	82,99	83,29	83,59	83,89	83,89
2.2.2.2.	Indeks Pemberdayaan Gender (%)	62,30	63,10	63,90	64,80	65,78	66,78	66,78
2.2.2.3.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	90,98	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	96,00
<b>2.2.3.</b>	<b>Pangan</b>							
2.2.3.1.	Ketersediaan Pangan Utama (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.3.2.	Skor Pola Pangan Harapan (%)	88,00	88,60	95,50	96,50	96,50	100,00	100,00
<b>2.2.4.</b>	<b>Pertanahan</b>							
2.2.4.1.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	41,39	43,00	44,00	45,00	46,00	47,00	47,00
<b>2.2.5.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>							
2.2.5.1.	Penegakan Hukum Lingkungan (%)	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00
2.2.5.2.	Persentase Penanganan Sampah (%)	81,50	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	86,00
2.2.5.3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	53,05	53,30	53,55	53,88	54,05	54,30	54,30
<b>2.2.6.</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>							
2.2.6.1.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (%)	84,23	86,00	88,00	90,00	95,00	100,00	100,00
2.2.6.2.	Kepemilikan KTP (%)	57,00	65,00	80,00	85,00	90,00	100,00	100,00
2.2.6.3.	Kepemilikan Akta Kelahiran (Per 1.000 Penduduk)	671,28	700,00	750,00	850,00	950,00	1.000,00	1.000,00
<b>2.2.7.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>							
2.2.7.1.	Cakupan Program Desa Maju Inhil Jaya (Desa)	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00
2.2.7.2.	Pertambahan Jumlah Desa Maju (Desa)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	12,00
2.2.7.3.	PKK Aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.7.4.	Posyandu Aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2.2.8.</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>							
2.2.8.1.	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	70,76	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
2.2.8.2.	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	73,92	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	83,00

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
2.2.8.3.	Ratio PPKBD Satu Setiap Desa/Kelurahan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2.2.9.</b>	<b>Perhubungan</b>							
2.2.9.1.	Tersedianya Angkutan Umum Yang melayani Trayek Yang Telah Tersedia Jaringan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten (%)	73,00	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	83,00
2.2.9.2.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan penerangan jalan pada jalan kabupaten/kota (%)	75,00	80,00	85,00	90,00	92,00	95,00	95,00
2.2.9.3.	Tersedianya angkutan perairan yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan (%)	85,00	87,00	90,00	93,00	95,00	97,00	97,00
<b>2.2.10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>							
2.2.10.1	Pelaksanaan diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui website (media online)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.10.2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2.2.11.</b>	<b>Koperasi, Usaha kecil dan Menengah</b>							
2.2.11.1.	Koperasi Aktif (%)	66,05	67,00	68,00	69,00	70,00	71,00	71,00
2.2.11.2.	Usaha Mikro dan Kecil (%)	67,00	68,00	69,00	70,00	71,00	72,00	72,00
<b>2.2.12.</b>	<b>Penanaman Modal</b>							
2.2.11.1.	Realisasi PMDN (Rp Milyar)	8.730,00	9.921,00	11.112,00	12.445,00	13.938,00	15.611,00	15.611,00
2.2.11.2.	Realisasi PMA (USD Juta)	84,00	96,00	108,00	121,00	136,00	152,00	152,00
<b>2.2.13.</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>							
2.2.13.1.	Jumlah Prestasi olahraga (Kejuaraan)	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	9,00
<b>2.2.14</b>	<b>Statistik</b>							
2.2.14.1.	Buku "Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka" (Judul)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.2.14.1.	Kecamatan Dalam Angka (Judul)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
<b>2.2.15</b>	<b>Persandian</b>							
<b>2.2.16</b>	<b>Kebudayaan</b>							
2.2.16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Event)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2.2.16.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (Unit)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>2.2.17.</b>	<b>Perpustakaan</b>							
2.2.17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	4.972,00	5.672,00	6.372,00	7.072,00	7.772,00	8.472,00	8.472,00
2.2.17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan.	22.862,00	23.012,00	23.162,00	23.312,00	23.462,00	23.612,00	23.612,00
<b>2.2.18.</b>	<b>Kearsipan</b>							
2.2.18.1	Pengelolaan arsip secara baku (5)	30,36	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00
2.2.18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (Orang)	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	8,00
<b>2.3.</b>	<b>Layanan Pilihan</b>							
<b>2.3.1.</b>	<b>Pariwisata</b>							
2.3.1.	Kunjungan Wisatawan (Orang)	3.115,00	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	5.500
<b>2.3.2.</b>	<b>Pertanian</b>							
2.3.2.1.	Produktivitas Padi (Ton GKG/Hektar)	4,02	4,10	4,15	4,20	4,25	4,30	4,30
2.3.2.2.	Produksi beras (Ton)	56.415,42	59.115,42	61.815,42	64.515,42	67.215,42	69.915,42	69.915,42
2.3.2.3.	Produktivitas Kelapa (Ton Koppa/Hektar)	1,19	1,21	1,23	1,25	1,27	1,30	1,30
2.3.2.4.	Produktivitas kelapa sawit (Ton CPO/Hektar)	2,53	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,00
2.3.2.5.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	45,63	45,53	45,08	44,63	44,18	43,72	43,72
<b>2.3.3.</b>	<b>Perdagangan</b>							
2.3.3.1.	Nilai Ekspor bersih Perdagangan (USD Juta)	184,88	210,00	240,00	270,00	300,00	330,00	330,00
2.3.3.2.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	14,02	14,10	14,20	14,40	14,50	14,60	14,60
<b>2.3.4.</b>	<b>Perindustrian</b>							
2.3.4.1.	Nilai produksi usaha menengah kecil (Rp Juta)	58.710,22	59.335,22	59.960,22	60.585,22	61.210,22	61.835,22	61.835,22
2.3.4.2.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.	28,32	28,41	28,48	28,56	28,63	28,71	28,71
<b>2.3.5.</b>	<b>Transmigrasi</b>							
<b>2.3.6.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>							
2.3.6.1.	Produksi Perikanan (Ton)	57.080,60	58.080,60	59.080,60	60.080,60	61.080,60	62.080,60	62.080,60
2.3.6.2.	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	38,67	40,27	41,87	43,47	45,07	46,67	46,67

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
2.4.	<b>Urusan Penunjang</b>							
2.4.1.	<b>Perencanaan Pembangunan</b>							
2.4.1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2.4.1.2.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.1.3.	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.2.	<b>Keuangan</b>							
2.4.1.	Opini BPK (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.4.3.	<b>Kepegawaian Serta Pendidikan dan Latihan</b>							
2.4.3.1.	Pembinaan PNS melalui Pemberian Hukuman Disiplin (SK)	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,00	2,00
2.4.4.	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>							
2.4.4.1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	65,00	75,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
2.4.5.	<b>Pengawasan</b>							
2.4.5.1.	Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti (%)	47,21	55,00	70,00	85,00	90,00	100,00	100,00
2.4.6.	<b>Sekretariat Dewan</b>							
2.4.6.1.	Rasio Pembahasan Prolegda	85,48	87,00	90,00	93,00	97,00	100,00	100,00
III.	<b>Aspek Daya Saing</b>							
3.1.	<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>							
3.1.1.	Pengeluaran Per Kapita (Rp Ribu)	10.171,00	11.223,66	11.448,14	11.677,10	11.910,64	12.148,86	12.148,86
3.1.2.	Nilai Tukar Petani	101,53	105,00	110,00	112,00	112,00	115,00	115,00
3.2.	<b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>							
3.2.1.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	51,07	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
3.3.	<b>Fokus Iklim Investasi</b>							
3.3.1.	Angka Kriminalitas (Kasus Tertangani Per 10.000 Penduduk)	0,97	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	3,50
3.4.	<b>Fokus Sumberdaya Manusia</b>							
3.4.1.	Rasio Ketergantungan (%)	47,92	47,52	47,12	46,72	46,32	45,92	45,92

Indikator kinerja pencapaian SPM bidang pendidikan dasar, kesehatan, PU-PR, perumahan rakyat, pemerintahan dalam negeri dan sosial ditunjukkan pada Tabel 8.3 digunakan sebagai Indikator Kinerja yang wajib dicapai pada akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir periode 2019 - 2023.

Tabel 8.3.

Indikator Kinerja SPM Bidang Pendidikan , Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, TRANTIBUMLINMAS dan Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 - 2023

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
I.	<b>PENDIDIKAN</b>							
	<b>A. Pendidikan Dasar</b>							
	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	90.51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>B. Pendidikan Kesetaraan</b>							
	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	18.85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>C. Pendidikan Anak Usia Dini</b>							
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	92.02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
II.	<b>KESEHATAN</b>							
	<b>A. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>							
	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>B. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>							
	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>C. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>							
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>D. Pelayanan kesehatan balita</b>							
	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>E. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</b>							
	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>F. Pelayanan kesehatan pada usia produktif,</b>							
	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	<b>G. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;</b>							
	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>H. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi</b>							
	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	6	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>I. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus</b>							
	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>J. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat</b>							
	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>K. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis</b>							
	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>L. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b>							
	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>III.</b>	<b>PEKERJAAN UMUM</b>							
	<b>A. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari</b>							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	36.58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>B. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik</b>							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	59.95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>IV.</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT</b>							
	<b>A. Penyediaan &amp; rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota</b>							
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>B. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota</b>							
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Bidang/Pelayanan/Indikator SPM	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
V.	<b>TRANTIBUMLINMAS</b>							
	<b>A. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum</b>							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>B. Pelayanan informasi rawan bencana</b>							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	97,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>C. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	97,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>D. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>E. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
VI.	<b>SOSIAL</b>							
	<b>A. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti</b>							
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	0.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>B. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti</b>							
	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	28.30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>C. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti</b>							
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	0.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>D. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti</b>							
	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	0.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>E. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap &amp; paska bencana bagi korban bencana kab/kota</b>							
	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**BAB**

**9**

**PENUTUP**

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025.

**9.1 PROGRAM TRANSISI**

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dijabarkan kedalam kegiatan tahunan yang menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan tahun 2023. Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024, maka penyusunan RKPD Tahun 2020 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD 2005 - 2025 Kabupaten Indragiri Hilir, arah kebijakan dan isu strategis Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir dengan pembangunan nasional.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 (Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019) yang diperlukan sebagai pedoman bagi



penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019 serta dengan mengingat waktu yang sangat sempit bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada langsung Tahun 2018, maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sesuai dengan jadwal dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam Tahun 2019. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 yang sudah disusun untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya RKPD Tahun 2019 menjadi bagian dari RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023.

Tahun 2023 merupakan tahun transisi pemerintahan Bupati H.Muhammad Wardan dan Wakil Bupati H. Syamsudin Uti. Untuk itu diperlukan pedoman transisi guna menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada Tahun 2023, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 yang harus disusun pada Tahun 2022.

Program-program pembangunan pada masa transisi diarahkan untuk menjaga kesinambungan aktifitas dan capaian program pembangunan daerah. Program pembangunan pada Tahun 2023 melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu setiap perangkat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan pada Tahun 2023 tetap mengacu kepada program-program Kabupaten yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

## **9.2 KAIDAH PELAKSANAAN**

Dalam pelaksanaan pembangunan, diterapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023. Pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan yang melekat pada masing-masing unit kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 merupakan pedoman atau acuan bagi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir maupun masyarakat termasuk dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan sehingga tercapai sinergi antar pelaku pembangunan dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut :

- a. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program pembangunan sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023 dengan sebaik-baiknya;
- b. Bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tiap program maka dalam kerangka koordinasi perencanaan masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, wajib menyesuaikan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) dengan Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023. Selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sebagai dasar dalam penyusunan APBD Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperanserta dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk Peraturan Daerah. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperanserta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan

rencana peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.

- d. Pada akhir tahun perencanaan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur APBD dan peraturan lainnya.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasilnya kepada Bupati Indragiri Hilir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.